



PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023





WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SURABAYA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
37. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
42. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4. Walikota adalah Walikota Surabaya.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
7. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kota Surabaya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Desease* 2019 di Daerah.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
 - a. acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan PD dan/atau lintas PD;

- b. bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun 2023 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 2023 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

- (1) PD melaksanakan evaluasi serta membuat laporan evaluasi setiap triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan evaluasi menjadi masukan dan bahan pertimbangan terhadap usulan kegiatan dan anggaran yang diajukan oleh PD untuk tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan evaluasi serta membuat laporan evaluasi setiap triwulan dan tahunan terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan menggunakan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

- (3) Laporan evaluasi menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program, kegiatan dan subkegiatan apabila belum tertampung dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas dan sasaran pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juli 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004



DAFTAR ISI



Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	xiii
Bab I Pendahuluan	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-10
1.4 Maksud Dan Tujuan.....	I-12
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-13
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-177
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-353
Bab III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah.....	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-22
Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-5
Bab V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah	V-1
5.1 Rencana Program	V-1
5.2 Kerangka Pendanaan.....	V-449



Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama	VI-1
6.2 Indikator Kinerja Kunci.....	VI-5
Bab VII Penutup.....	VII-1



DAFTAR TABEL



Tabel II.1 Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan	II-6
Tabel II.2 Luasan Kawasan RTH	II-7
Tabel II.3 Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-13
Tabel II.4 Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-13
Tabel II.5 Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan	II-14
Tabel II.6 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2021	II-15
Tabel II.7 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama	II-17
Tabel II.8 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2021	II-17
Tabel II.9 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021	II-19
Tabel II.10 Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-20
Tabel II.11 Pengeluaran per Kapita disesuaikan di kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-20
Tabel II.12 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017 – 2021 (dalam Juta Rp)	II-22
Tabel II.13 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017 – 2021 (dalam Juta Rp)	II-23
Tabel II.14 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	II-24
Tabel II.15 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017 – 2021	II-26
Tabel II.16 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (dalam persen)	II-27
Tabel II.17 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-29
Tabel II.18 Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-30
Tabel II.19 Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-31
Tabel II.20 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-32
Tabel II.21 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-33



Tabel II.22 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki Kota Surabaya Tahun 2017– 2021	II–34
Tabel II.23 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–35
Tabel II.24 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–35
Tabel II.25 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–36
Tabel II.26 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–36
Tabel II.27 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–37
Tabel II.28 Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–37
Tabel II.29 Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2017– 2021	II–38
Tabel II.30 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–40
Tabel II.31 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–40
Tabel II.32 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–42
Tabel II.33 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–43
Tabel II.34 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–43
Tabel II.35 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Surabaya Tahun 2021	II–45
Tabel II.36 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2021	II–51
Tabel II.37 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2021	II–53
Tabel II.38 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–54
Tabel II.39 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–55
Tabel II.40 Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–56
Tabel II.41 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–57



Tabel II.42 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2021	II-57
Tabel II.43 Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-60
Tabel II.44 Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021	II-60
Tabel II.45 Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021	II-61
Tabel II.46 Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2021	II-61
Tabel II.47 Jumlah Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2017- 2021	II-62
Tabel II.48 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani Kurang Dari 24 Jam Tahun 2017 – 2021	II-62
Tabel II.49 Daftar Kampung Tangguh Covid-19 Kota Surabaya 2021	II-63
Tabel II.50 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2017 – 2021	II-65
Tabel II.51 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2017 – 2021	II-65
Tabel II.52 Cakupan kunjungan bayi Tahun 2017 – 2021	II-66
Tabel II.53 Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2017 – 2021	II-66
Tabel II.54 Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-67
Tabel II.55 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-68
Tabel II.56 Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-68
Tabel II.57 Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-69
Tabel II.58 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Capaian Pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-69
Tabel II.59 Masyarakat Berpenghasilan Rendah Mendapatkan Jaminan Kesehatan Tahun 2017 – 2021	II-71
Tabel II.60 Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi Tahun 2017 – 2021	II-72
Tabel II.61 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-73
Tabel II.62 Penyusunan Rencana Induk Kota Surabaya Tahun 2015 – 2021	II-73
Tabel II.63 IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-75
Tabel II.64 Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB Tahun 2017 – 2021	II-75
Tabel II.65 Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya	II-76



Tabel II.66 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dan Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-77
Tabel II.67 Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-79
Tabel II.68 Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa	II-79
Tabel II.69 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-82
Tabel II.70 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-83
Tabel II.71 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-84
Tabel II.72 Rasio Kejadian Unjuk Rasa Yang Mengarah Tindakan Anarkis Tahun 2017 - 2021	II-84
Tabel II.73 Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2017 – 2021	II-85
Tabel II.74 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-85
Tabel II.75 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-86
Tabel II.76 Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-88
Tabel II.77 PMKS Penduduk non Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-88
Tabel II.78 PSKS Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-89
Tabel II.79 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-89
Tabel II.80 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-90
Tabel II.81 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir	II-90
Tabel II.82 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-91
Tabel II.83 Penempatan Kerja Peserta Pelatihan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-92
Tabel II.84 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-92
Tabel II.85 Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-93
Tabel II.86 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-94
Tabel II.87 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-95
Tabel II.88 KDRT Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-95
Tabel II.89 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-96



Tabel II.90 Jejaring Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak	
Tahun 2017 – 2021.....	II–97
Tabel II.91 Perempuan Mengikuti Pemberdayaan Ekonomi Kota Surabaya	
Tahun 2017 – 2021.....	II–97
Tabel II.92 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–98
Tabel II.93 Pola Pangan Harapan Tahun 2017 – 2021	II–98
Tabel II.94 Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–99
Tabel II.95 Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat	
Tahun 2017 – 2021.....	II–100
Tabel II.96 Luas Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Bersertifikat	
Tahun 2017 – 2021.....	II–101
Tabel II.97 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–101
Tabel II.98 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–102
Tabel II.99 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2017 – 2021	II–103
Tabel II.100 Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–103
Tabel II.101 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2017 – 2021	II–104
Tabel II.102 Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–105
Tabel II.103 Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan Tahun 2017 – 2021.....	II–106
Tabel II.104 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2017 – 2021.....	II–107
Tabel II.105 Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–107
Tabel II.106 Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2017 – 2021.....	II–109
Tabel II.107 Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2017 – 2021.....	II–111
Tabel II.108 Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya	
Tahun 2017 – 2021.....	II–111
Tabel II.109 Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–112
Tabel II.110 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–113
Tabel II.111 Partisipasi KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Surabaya Tahun 2017 - 2021	II–114
Tabel II.112 Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–115
Tabel II.113 Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–116



Tabel II.114 Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya	
Tahun 2017 – 2021.....	II–117
Tabel II.115 Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–117
Tabel II.116 Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum (Angkutan Kota dan Bus) Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–118
Tabel II.117 Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Kota Surabaya	
Tahun 2017 – 2021.....	II–119
Tabel II.118 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–120
Tabel II.119 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–120
Tabel II.120 Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–121
Tabel II.121 Website Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–121
Tabel II.122 Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Daring Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–122
Tabel II.123 Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2017 – 2021.....	II–123
Tabel II.124 Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–123
Tabel II.125 Koperasi per Jenis Usaha di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–123
Tabel II.126 Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–125
Tabel II.127 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–125
Tabel II.128 UMKM Kota Surabaya Berdasarkan Intervensi Tahun 2017 - 2021.....	II–125
Tabel II.129 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–126
Tabel II.130 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–127
Tabel II.131 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II–127
Tabel II.132 Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya	
Tahun 2017 – 2021.....	II–128
Tabel II.133 Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya	
Tahun 2017 – 2021.....	II–130
Tabel II.134 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya	
Tahun 2017 – 2021.....	II–131
Tabel II.135 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya	
Tahun 2017 – 2021.....	II–132
Tabel II.136 Kelompok Seni Terdaftar Yang Belum Layak Tampil Tahun 2017 – 2021.....	II–133
Tabel II.137 Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–134
Tabel II.138 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II–135
Tabel II.139 Kepuasan Pelayanan Perpustakaan Tahun 2020.....	II–135



Tabel II.140 Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2017 – 2021.....	II-137
Tabel II.141 Perkembangan Nilai Tambah Sektor Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 – 2021.....	II-138
Tabel II.142 Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-138
Tabel II.143 Pembudidaya Perikanan dan Kelautan Binaan Yang Memanfaatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Serta Teknologi Tepat Guna (TTG) Tahun 2017-2021	II-139
Tabel II.144 Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-140
Tabel II.145 Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-141
Tabel II.146 Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-142
Tabel II.147 Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Tahun 2017 – 2021	II-144
Tabel II.148 Jumlah Kesepakatan Dengan Stakeholder Bidang Pariwisata Tahun 2017 – 2021.....	II-145
Tabel II.149 Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-145
Tabel II.150 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-146
Tabel II.151 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-146
Tabel II.152 Pembudidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Memanfaatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi Tahun 2017 – 2021	II-147
Tabel II.153 Pembudidaya Pertanian yang Mengaplikasikan TTG Tahun 2017 – 2021.....	II-147
Tabel II.154 Pembudidaya Peternakan yang Mengaplikasikan TTG Tahun 2017 – 2021.....	II-148
Tabel II.155 Intervensi Hewan Ternak Kota Surabaya 2017 – 2021.....	II-148
Tabel II.156 Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-148
Tabel II.157 Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-149
Tabel II.158 Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2017 – 2021	II-150
Tabel II.159 Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-150
Tabel II.160 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-150
Tabel II.161 Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-151



Tabel II.162 Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2017 – 2021.....	II-152
Tabel II.163 SOP Dievaluasi Tahun 2017 – 2021	II-152
Tabel II.164 Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2017 – 2021	II-153
Tabel II.165 Rekap Hasil Audit Kinerja BUMD Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-153
Tabel II.166 Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-154
Tabel II.167 MoU Kerjasama (Non Perdagangan) Antar Daerah dan Pihak Ketiga Tahun 2021	II-155
Tabel II.168 MoU Kerjasama (non perdagangan) Luar Negeri Tahun 2021	II-155
Tabel II.169 MoU Kerjasama Kota Surabaya yang Dievaluasi Tahun 2017 – 2021.....	II-155
Tabel II.170 Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-156
Tabel II.171 Penjabaran Program RPJMD Dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-157
Tabel II.172 Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Tahun 2017 – 2021.....	II-158
Tabel II.173 Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-158
Tabel II.174 Pelaksanaan Kegiatan Kota Surabaya Tahun 2017– 2021	II-159
Tabel II.175 Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-160
Tabel II.176 Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2017 – 2021.....	II-160
Tabel II.177 Penegasan Wilayah Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2017 - 2021	II-161
Tabel II.178 Pelanggaran Tata Kelola Administrasi Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-161
Tabel II.179 Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-162
Tabel II.180 Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-163
Tabel II.181 Jumlah Potensi Konflik Kota Surabaya Tahun 2017– 2021	II-163
Tabel II.182 Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-164
Tabel II.183 Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-164
Tabel II.184 Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan Tahun 2017 – 2021.....	II-165
Tabel II.185 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-166
Tabel II.186 Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-167
Tabel II.187 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-167



Tabel II.188 Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-168
Tabel II.189 Derajat Kejenuhan Lalu Lintas (V/C Rasio) Kota Surabaya	
Tahun 2018 – 2021.....	II-168
Tabel II.190 Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya	
Tahun 2017 – 2021.....	II-171
Tabel II.191 Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya	
Tahun 2017 – 2021.....	II-171
Tabel II.192 Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-172
Tabel II.193 Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-172
Tabel II.194 Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tahun 2017– 2021	II-173
Tabel II.195 Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-175
Tabel II.196 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya	
Tahun 2017 – 2021.....	II-175
Tabel II.197 Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	II-176
Tabel II.198 Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	II-176
Tabel II.199 Rekapitulasi Evaluasi Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan dan Kinerja Hasil	
Program Tahun 2021.....	II-178
Tabel II.200 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Akhir Tahun 2021 Kota Surabaya.....	II-179
Tabel III.1 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2020 dan Tahun	
2021 (dalam juta).....	III-8
Tabel III.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Tahun 2020 dan Tahun	
2021 (dalam juta).....	III-9
Tabel III.3 Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar	
Harga Konstan Tahun 2020 dan 2021 (dalam persen)	III-11
Tabel III.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2020 dan 2021 (dalam persen)	III-14
Tabel III.5 Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021.....	III-16
Tabel III.6 Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2018 – 2021	III-17
Tabel III.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya Tahun 2020 - 2021.....	III-18
Tabel III.8 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2020 s.d.	
Tahun 2024	III-26
Tabel III.9 Realisasi dan Target Kota Surabaya Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-28
Tabel III.10 Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2022 s.d Tahun	
2024	III-29
Tabel III.11 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Surabaya Tahun 2020 s.d. Tahun	
2024	III-32



Tabel III.12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 s.d Tahun 2024.....	III-34
Tabel IV.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	IV-3
Tabel IV.2 Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kota Surabaya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur	IV-19
Tabel IV.3 Keselarasan Kebijakan RPJMD Kota Surabaya dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023	IV-20
Tabel IV.4 Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Surabaya, Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-21
Tabel IV.5 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023 yang Mendukung Prioritas Pembangunan	IV-23
Tabel IV.6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023	IV-90
Tabel IV.7 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen RKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023	IV-94
Tabel V.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023	V-2
Tabel V.2 Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2023.....	V-449
Tabel VI.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026.....	VI-3
Tabel VI.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022-2026	VI-6



DAFTAR GAMBAR



Gambar I.1 Alur Penyusunan RKPDP	I-11
Gambar II.1 Grafik Curah Hujan Kota Surabaya	II-1
Gambar II.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya	II-3
Gambar II.3 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya.....	II-4
Gambar II.4 Kondisi Intrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya.....	II-8
Gambar II.5 Peta Sesar Kendeng	II-10
Gambar II.6 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara	II-11
Gambar II.7 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya	II-11
Gambar II.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya	II-12
Gambar II.9 Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia.....	II-15
Gambar II.10 Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2017 – 2021.....	II-28
Gambar II.11 Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian Terbanyak Tahun 2021	II-40
Gambar II.12 Prevalensi Balita Stunting Tahun 2017 – 2021.....	II-41
Gambar II.13 Perkembangan Indeks Budaya Lokal Tahun 2017–2021	II-44
Gambar II.14 Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Tahun 2021	II-65
Gambar II.15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi per Kecamatan Tahun 2021.....	II-66
Gambar II.16 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2021	II-70
Gambar II.17 Perkembangan Luas Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas dan Permukiman Kota Surabaya Tahun 2017 - 2021	II-77
Gambar II.18 Persentase Atlet Berprestasi	II-129
Gambar II.19 Nilai Terhadap Pelayanan dan Kemampuan Petugas TBM/Perpusatakaan dalam Membimbing Bibit Penulis dan Pendongeng	II-136
Gambar II.20 Perangkat <i>Smart Water Level</i>	II-173
Gambar III.1 Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 – Tahun 2021 (persen)	III-15
Gambar IV.1 Visi, Misi, Arah dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024	IV-11
Gambar IV.2 Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur.....	IV-18



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 54

TANGGAL : 5 Juli 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah, juga berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, RPJPD, Perubahan RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024, program prioritas nasional dalam RKP 2023 hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2021, hasil evaluasi Renja



Perangkat Daerah Tahun 2021, visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 serta hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dokumen Rancangan Akhir RKPD 2023 untuk dijadikan masukan dalam penyusunan dokumen RKPD 2023.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Penyusunan RKPD adalah proses penyempurnaan berdasarkan hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dokumen Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan Surat Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Nomor 050/12802/201.2/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal Rekomendasi Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, hasil penelaahan terhadap RKPD Provinsi Jawa Timur dan program strategis nasional.

Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 telah mempengaruhi berbagai aspek, baik kesehatan, ekonomi maupun sosial. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami kontraksi sampai dengan -4,85%. Seiring dengan perbaikan dalam penanganan pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya menunjukkan hasil yang positif sehingga tahun 2021 ekonomi tumbuh pada angka 4,29%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 belum diiringi oleh perbaikan signifikan pada Tingkat Pengangguran Terbuka yang berada pada angka 9,68% dan persentase penduduk miskin yang meningkat menjadi 5,23%. Kondisi ini disebabkan karena sektor yang tumbuh cepat pada tahun 2021 berada pada sektor padat modal serta kondisi perekonomian utamanya sektor perdagangan dan jasa yang belum sepenuhnya pulih, oleh sebab itu pada tahun 2022 fokus pembangunan pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang ditekankan pada perbaikan dalam bidang Kesehatan, Pendidikan dan Sosial. Seiring dengan percepatan vaksinasi booster



ke-3 serta berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali, yang menempatkan Kota Surabaya berada pada level 1, maka dalam penyusunan RKPD 2023 diarahkan untuk pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran terbuka serta peningkatan aspek pembangunan manusia yang disinergikan dengan arah kebijakan tahun 2023 yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 ***“Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar berkelanjutan”***.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo -



- Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana



- Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
38. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
43. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
45. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025



(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);

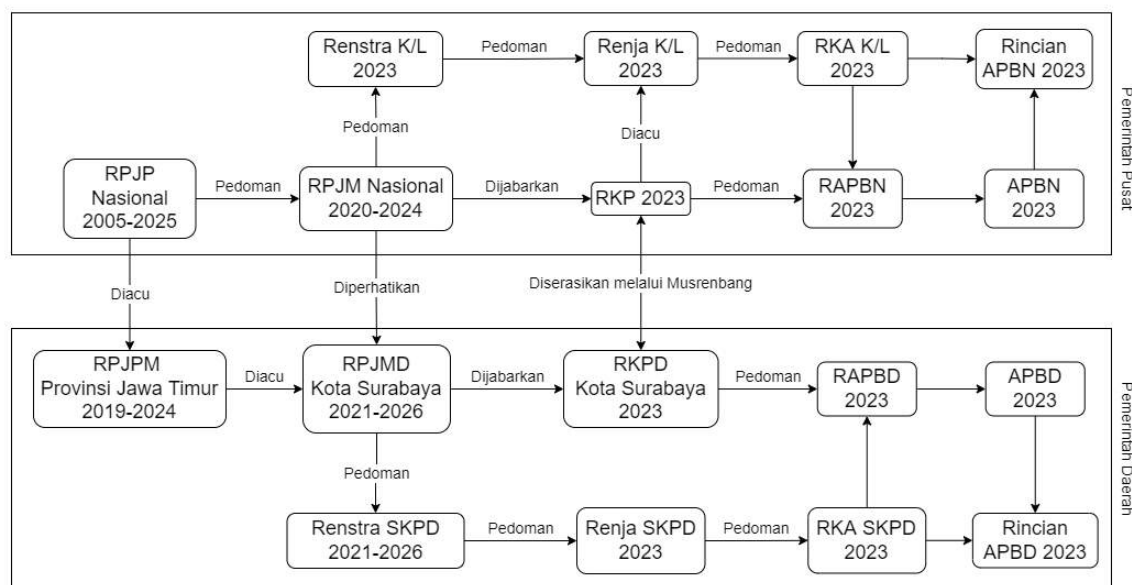
46. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
47. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
49. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Penetapan dokumen RKPD 2023 merupakan proses akhir dalam tahapan penyusunan RKPD berdasarkan telaahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD).

Secara substansial, Penetapan RKPD tahun 2023 memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah pada tahun 2023.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.



Gambar I.1
Alur Penyusunan RKPD

Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara

Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, RPJPD, Perubahan RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024, program prioritas nasional dalam RKP 2023, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2021, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih



sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 serta hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dokumen Rancangan Akhir RKPD 2023 menuju Penetapan RKPD Kota Surabaya Tahun 2023.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Penyusunan RKPD adalah proses penyempurnaan berdasarkan hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dokumen Rancangan Akhir RKPD dan hasil penelaahan terhadap RKPD Provinsi Jawa Timur dan program strategis nasional.

Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2023 adalah untuk:

1. Menjaga konsistensi antara substansi rencana jangka panjang, substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
3. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional;



4. Memberikan arah bagi seluruh *stakeholder* pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2023.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Penetapan RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD serta latar belakang penyusunan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, provinsi maupun kota.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/Kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan secara ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yaitu menguraikan hasil evaluasi RKPD tahun 2021, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan dokumen RKPD tahun 2022 sebagai bahan acuan.



2.1 Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan mengenai kondisi geografi daerah, kondisi demografi, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.



Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan Nasional/Provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah



Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi permasalahan ditingkat Daerah dan Nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kota Surabaya pada tahun 2023, dengan memperhatikan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dan RPJMN 2020-2024, mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil.

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

VII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

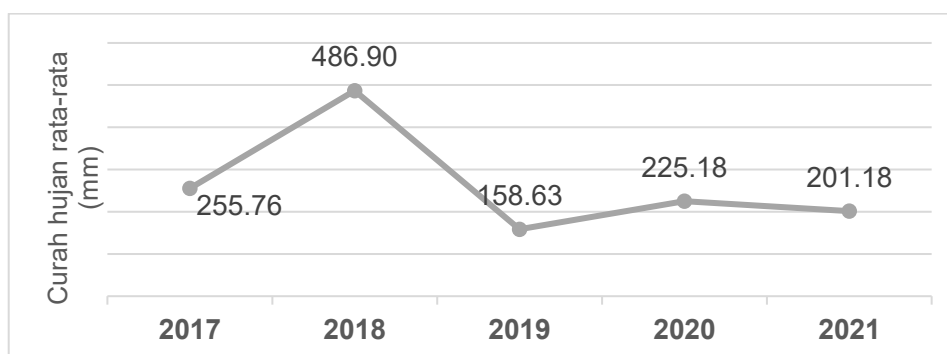
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km² yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Di Tahun 2021, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, yakni sebesar 551,8 mm, dengan temperatur berkisar antara 20°C hingga 36°C. Gambar II.1 menunjukkan grafik curah hujan Kota Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.



Gambar II.1 Grafik Curah Hujan Kota Surabaya

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022



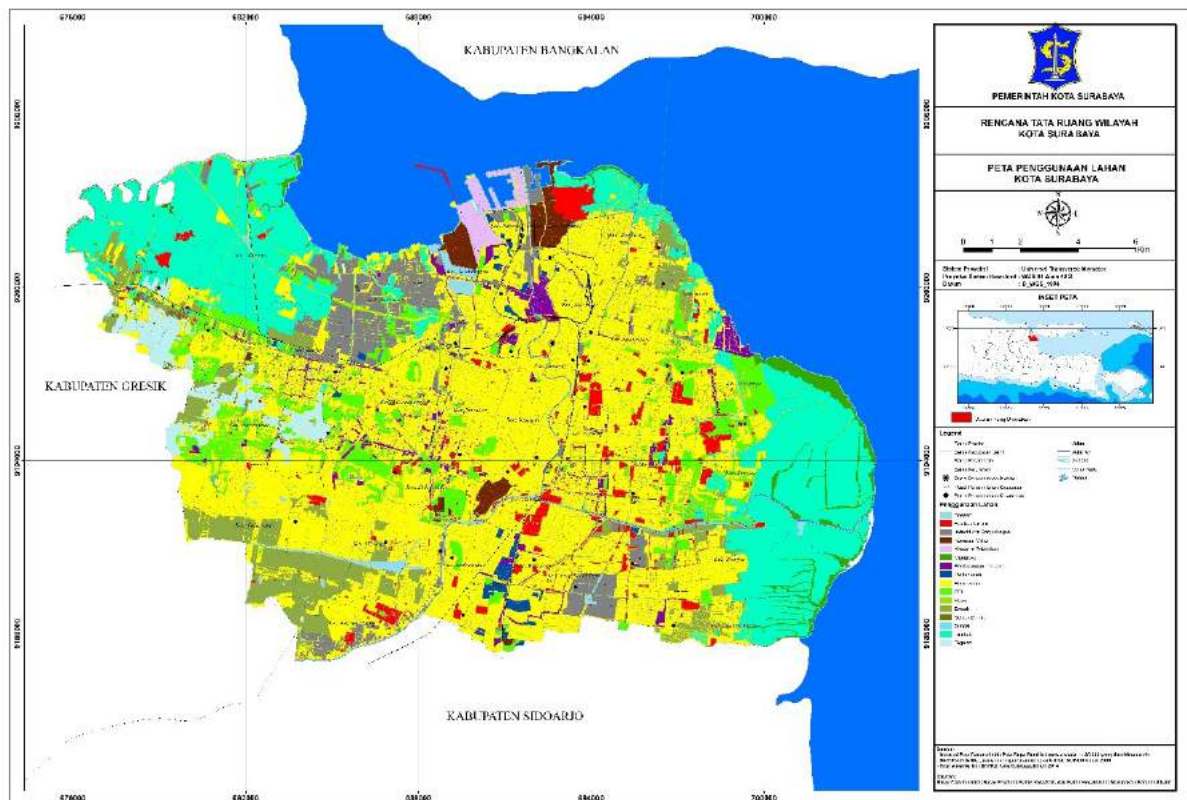
Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan.

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1.361 Rukun Warga (RW) dan 9.130 Rukun Tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

1. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
3. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;
4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
5. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

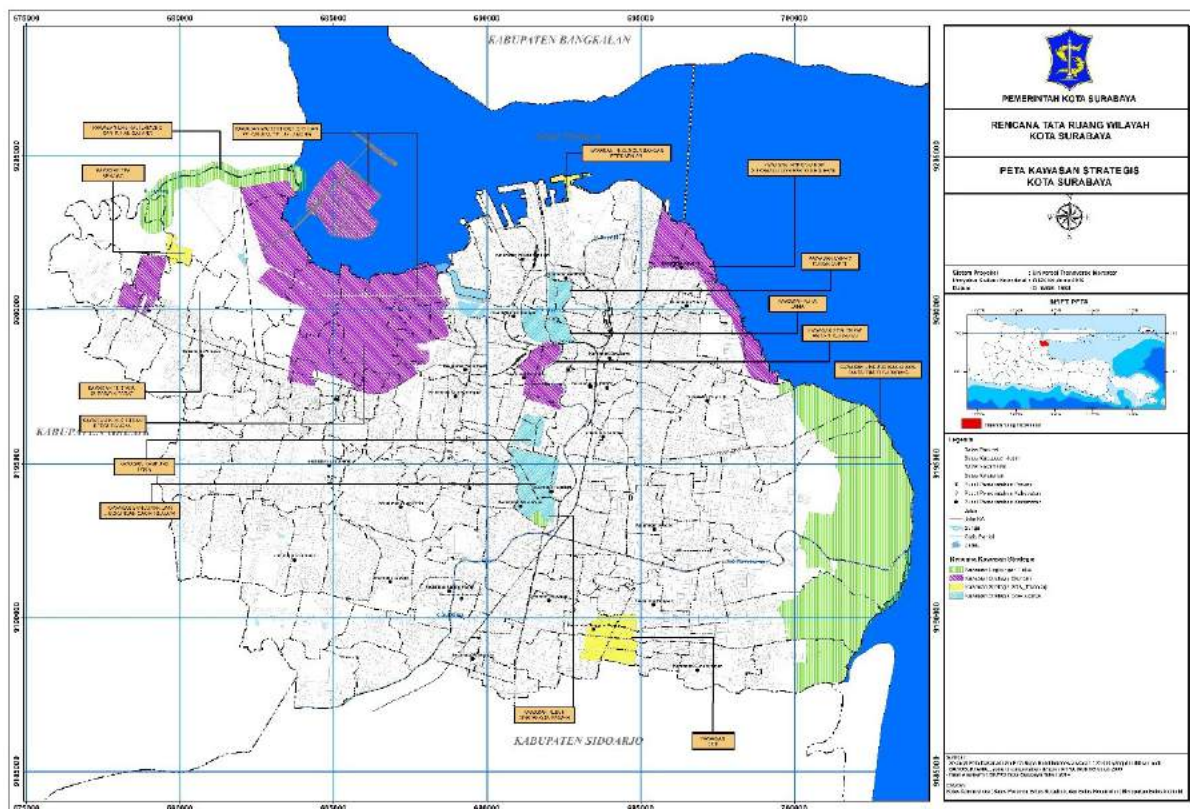
2.1.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya yaitu kota/kabupaten yang ada dalam Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.



Gambar II.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya

Berdasarkan peta penggunaan lahan di atas, Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang. Gambar II.2 menunjukkan Peta kawasan strategis kota Surabaya.



Gambar II.3 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, diantaranya adalah :

a) Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah :

- Kawasan Pergudangan dan Industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangan Ditinjau dari aksesibilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Sidoarjo–Surabaya–Gresik, Kawasan Industri dan Pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada *industry smart and clean* dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.
- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan.

Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Tunjungan merupakan salah satu pusat kota yang sangat potensial untuk terus dikembangkan karena memiliki sejarah dan mengalami masa keemasan pada



dekade 1940 hingga akhir 1970an dengan karakteristik *shopping-street* dan *shopping arcade*, sehingga dikenal dan menjadi salah satu *icon* kota Surabaya dengan Jargon “Rek Ayo Rek Mlaku – Mlaku nang Tunjungan”. Kawasan ini memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

- Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan Kawasan Kota Tepi Pantai (*Waterfront City*) di Kecamatan Bulak berada di Unit Pengembangan III Tambak Wedi, merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan pesisir Pantai Bulak - Kenjeran yang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai wisata pesisir dan laut. Keberadaan Jembatan Suramadu dan Pantai Kenjeran diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi dan peran Kota Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional. Dengan adanya Sentra Ikan Bulak, kawasan ini, khususnya Kecamatan Bulak pada kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menyumbang sebesar 33,36% dari total PDRB Kecamatan Bulak, diikuti kategori Perdagangan Besar&Eceran; Reparasi Mobil & Motor sebesar 26,53% dari total PDRB Kecamatan Bulak.
- Kawasan Kota Tepi Pantai (*Waterfront City*) di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan lahan *mixed-use* pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan penunjalang Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala nasional dan akan terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya.

b) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah :



- Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar budaya dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah di Indonesia yang berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya yang khas dengan beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur religi yang kuat.
- Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI Tunjungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.
- Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan dan lingkungan cagar budaya.

Tabel II.1**Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya
1	Genteng	70
2	Krembangan	58
3	Pabean Cantian	37
4	Tegalsari	30
5	Bubutan	23
6	Wonokromo	23
7	Gubeng	11
8	Sawahan	9
9	Semampir	8
10	Simokerto	7
11	Tambaksari	6
12	Dukuh Pakis	2
13	Lakarsantri	2
14	Bulak	1
15	Gayungan	1
16	Wonocolo	1
Jumlah		289

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2022

c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah:

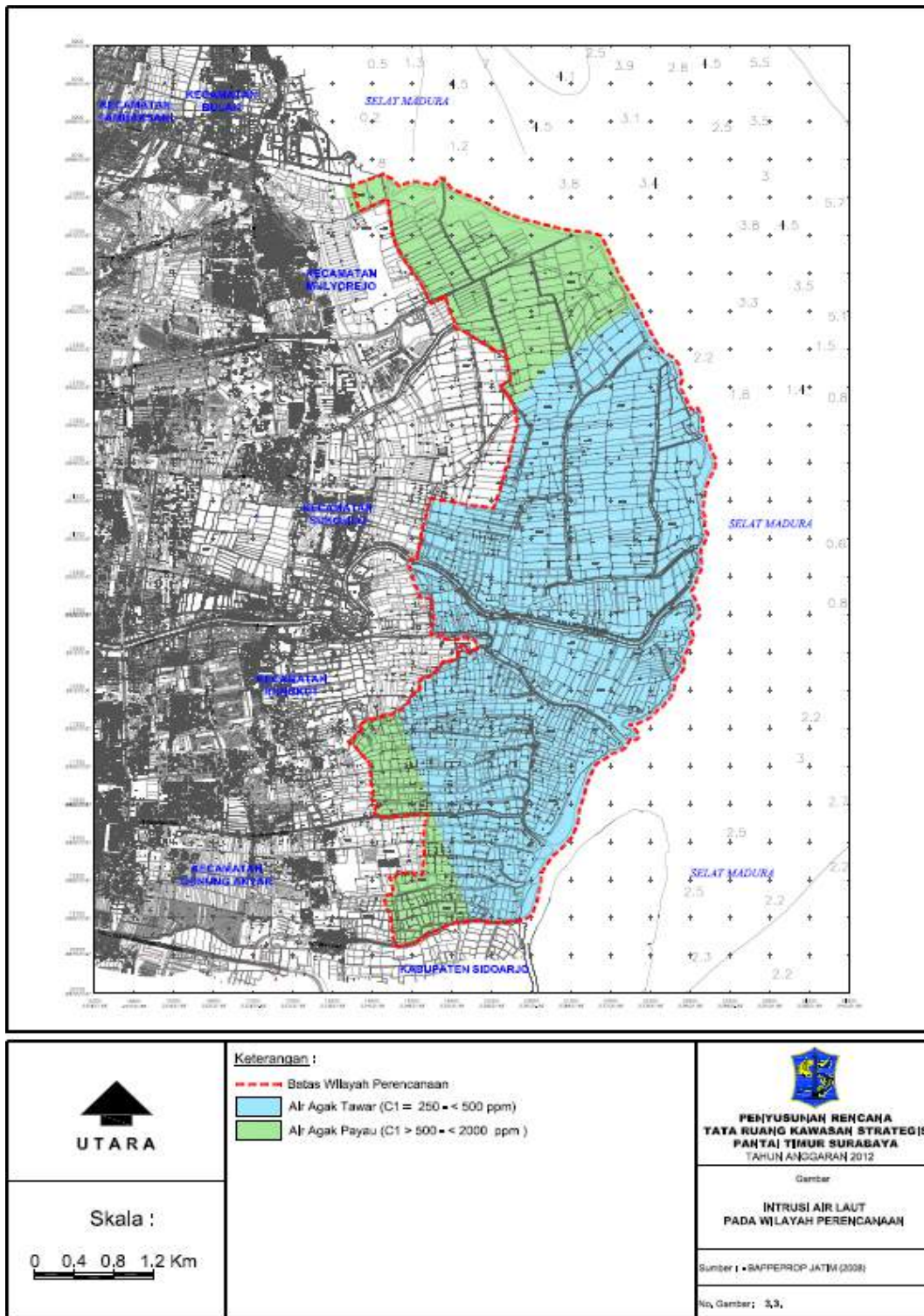


- Kawasan Kebun Binatang Surabaya di Kecamatan Wonokromo berada di Unit Pengembangan VII Wonokromo, merupakan hutan kota di kawasan Wonokromo dengan luas lahan 15,3 Ha yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, hutan kota dan rekreasi alam, juga berperan dalam mengatur iklim mikro di Kota Surabaya. Melihat nilai strategis sebagai kawasan wisata dalam kota, maka keberadaan KBS harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya.
- Kawasan Pantai Timur Surabaya di Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Mulyorejo, yang berada di Unit Pengembangan I Rungkut dan Unit Pengembangan II Kertajaya merupakan kawasan lindung alam berupa vegetasi mangrove yang berada di pesisir timur Kota Surabaya. Kawasan Mangrove Pamurbaya sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan sebagai *barrier* alami dari proses abrasi dan intrusi air laut. Luasan kawasan tersebut ditampilkan pada Tabel II.2. Kondisi instrusi air laut di kawasan mangrove Pamurbaya dapat dilihat pada peta berikut ini.

Tabel II.2
Luasan Kawasan RTH

No	Jenis RTH	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kawasan lindung dan pesisir timur	4.548,59	4.548,59	4.570,33	4.570,33	4.570,33
2	Taman hutan raya	55,81	55,81	57,55	66,03	66,03
Total (Ha)		4.601,47	4.604,40	4.624,95	4.636,36	4.636,36

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022



Gambar II.4 Kondisi Intrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya

- Kawasan sekitar Kali Lamong di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal yang berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun dan Unit Pengembangan Sambikerep XII, merupakan kawasan perlindungan setempat/ sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan vegetasi, dan pendukung utilitas kota. Luasan kawasan tersebut ditampilkan pada Tabel II.2.



d) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan teknologi tinggi adalah penghasil SDA yang sangat potensial untuk kepentingan masyarakat beserta perangkat atau instalasi pengolahannya atau kawasan khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan strategis negara dan kepentingan umum. Kawasan strategis SDA dan Teknologi Tinggi di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Industri Pengembangan Perkapalan di Kecamatan Pabean Cantian berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, merupakan salah satu kawasan yang digunakan dalam pengembangan teknologi perkapalan tingkat nasional. Sebagai industri perkapalan nasional, kawasan industri ini memiliki nilai strategis dan diperlukan upaya dalam menjaga dan meningkatkan nilai atau potensi kawasan tersebut.
- Kawasan industri/*industrial estate* di Kecamatan Rungkut berada di Unit Pengembangan I Rungkut, merupakan kawasan industri dan pergudangan yang telah lama berdiri di Kota Surabaya dan diarahkan menjadi kawasan industri dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
- Kawasan Depo dan Pengolahan BBM, berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak dan pengelolaan BBM, sehingga kawasan ini memiliki nilai strategis dalam kaitannya dengan sistem energi di Kota Surabaya dan sekitarnya.
- Kawasan pengelolaan sampah teknologi tepat guna penghasil energi pada TPA Benowo di Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan yang digunakan untuk pemrosesan akhir sampah di Kota Surabaya dengan konsep: “*Waste to Energy*”.

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:

1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/Reklamasi di Teluk Lamong.
2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.



3. Pengembangan jalur komuter/kereta api *double track* serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera sehingga “relatif aman” dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan potensi sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagaimana pada Gambar II.5.



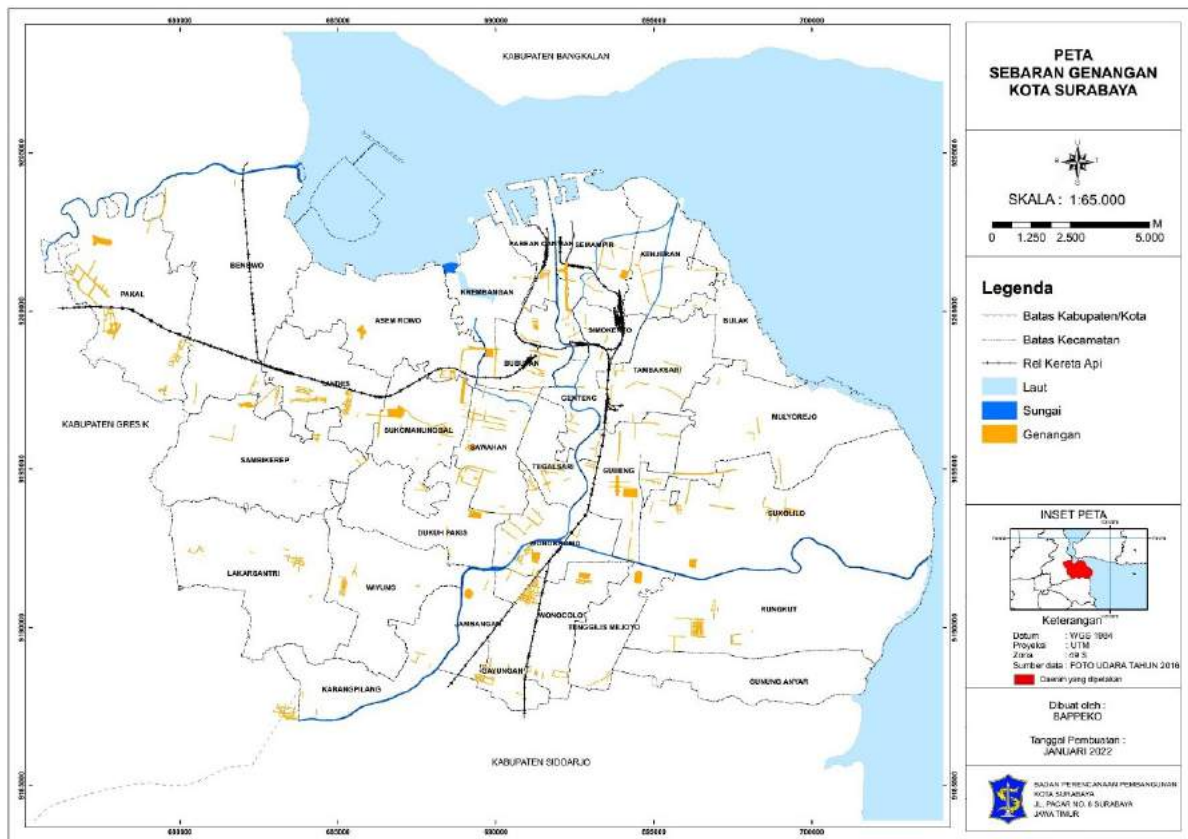
Gambar II.5
Peta Sesar Kendeng

Sumber: (http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270)

Di samping itu Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya utara. Kawasan rawan genangan dan banjir rob di Kota Surabaya seperti dalam gambar peta sebagai berikut.



Gambar II.6 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara



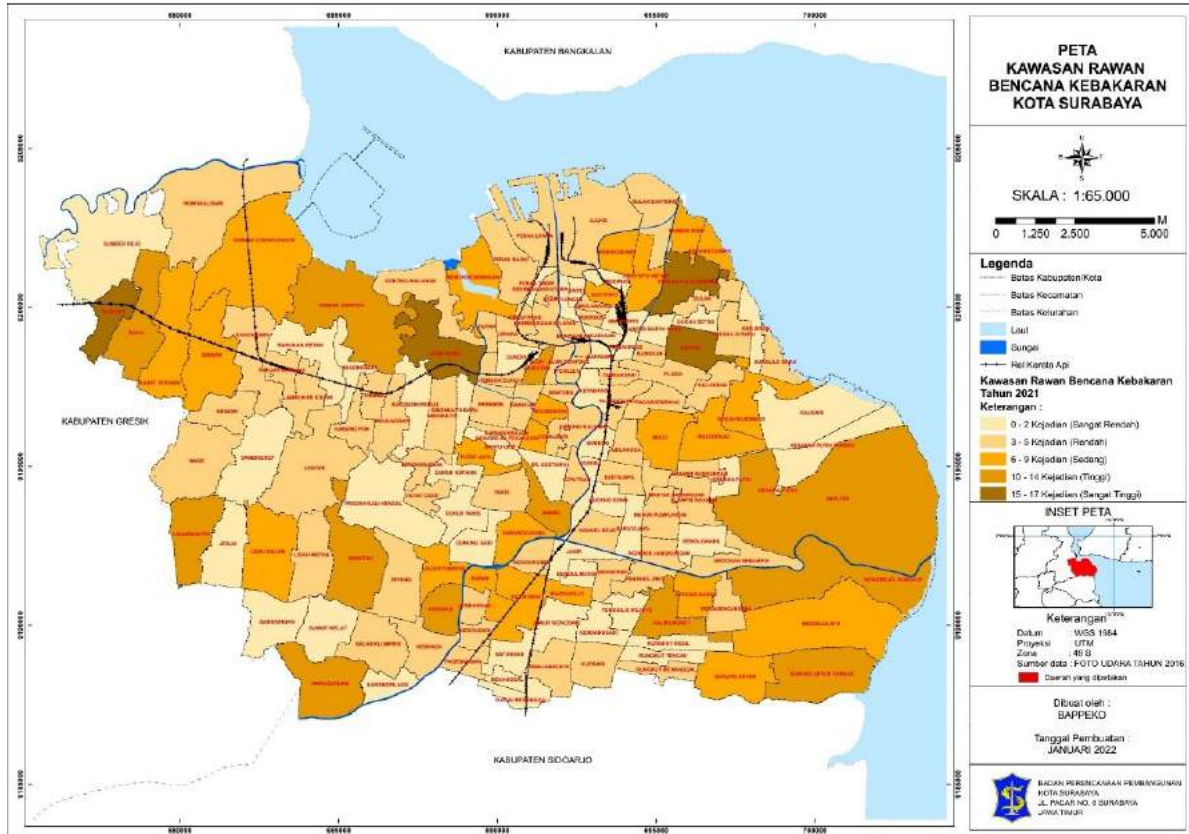
Gambar II.7 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya

Sumber: BAPPEDALITBANG Surabaya, 2022

Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan



terbangun dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka kriteria yang dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar II.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya

Sumber: BAPPEDALITBANG Surabaya, 2022

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan beberapa strategi dalam pengendalian, pengurangan, serta penanggulangan bencana kebakaran. Salah satu strategi efektif yang dilakukan dalam pengendalian dan pencegahan risiko bencana kebakaran adalah dengan memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Selain itu, dalam rangka mengurangi kejadian bencana kebakaran pada bangunan gedung, perlu dilakukan proteksi terhadap bangunan gedung terutama pada wilayah dengan intensitas pemanfaatan bangunan yang cukup tinggi. Untuk itu, upaya aktif yang



dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah dengan melakukan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung, baik milik swasta maupun milik Pemerintah Kota Surabaya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kejadian bencana di Kota Surabaya.

Tabel II.3
Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Banjir/ Pasang Air Laut	1	0	0	0	0
2	Angin Puting Beliung/ Angin Kencang	3	3	7	2	4
3	Kebakaran	589	496	515	608	705

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2022

Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2019 telah membentuk 154 Kelurahan Tangguh bencana. Kelurahan tangguh bencana ini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam di Kota Surabaya, upaya mengantisipasi terjadinya bencana dan mengurangi dampak bencana. Data kelurahan Tangguh bencana Tahun 2017 – 2021 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.4
Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	33	47	154	154	154

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022

2.1.1.3 Kondisi Demografis

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK per 31 Desember Tahun 2021 sebesar 2.970.952 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada Tabel II.5. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km² yaitu Kecamatan Bubutan, Sawahan, Semampir, Simokerto, Tambaksari, dan Tegalsari. Oleh karenanya, program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang



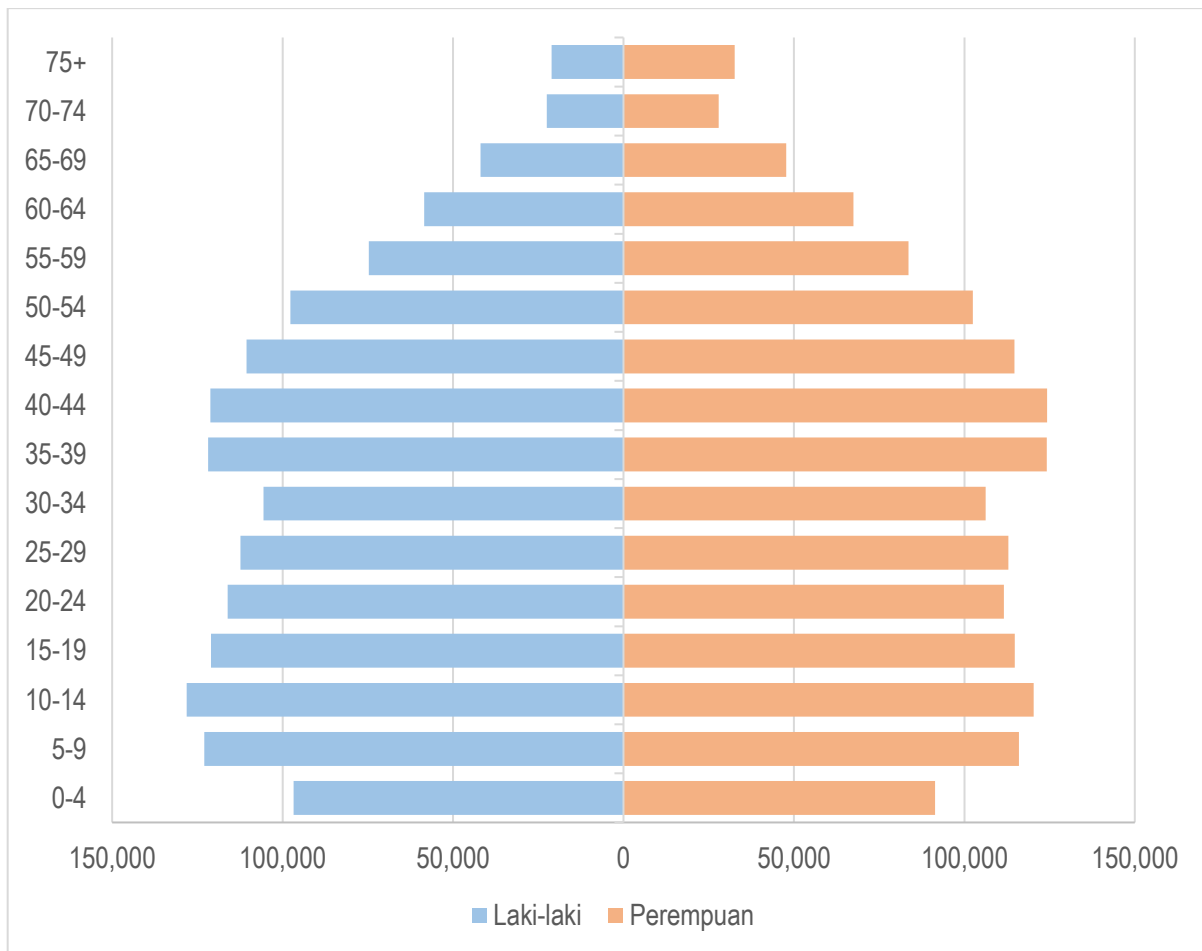
padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel II.5
Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Asemrowo	15,32	47.036	3.069	17	Pakal	19,07	58.865	3.086
2	Benowo	25,11	68.643	2.734	18	Rungkut	22,74	117.983	5.189
3	Bubutan	3,95	97.573	24.721	19	Sambikerep	16,72	65.638	3.926
4	Bulak	5,66	45.420	8.020	20	Sawahan	7,07	200.341	28.350
5	Dukuh Pakis	10,95	59.564	5.438	21	Semampir	8,70	183.344	21.068
6	Gayungan	5,51	43.336	7.859	22	Simokerto	2,77	93.793	33.832
7	Genteng	14,12	58.114	4.115	23	Sukolilo	28,72	111.762	3.891
8	Gubeng	7,80	134.467	17.237	24	Sukomanunggal	9,29	103.831	11.172
9	Gunung Anyar	9,77	59.673	6.109	25	Tambaksari	9,30	225.180	24.207
10	Jambangan	4,54	52.851	11.645	26	Tandes	9,76	91.462	9.375
11	Karang Pilang	9,98	74.341	7.452	27	Tegalsari	4,29	98.288	22.908
12	Kenjeran	8,73	174.180	19.949	28	Tenggiling Mejoyo	5,85	58.329	9.975
13	Krembangan	8,73	114.618	13.136	29	Wiyung	11,39	73.223	6.429
14	Lakarsantri	19,27	61.422	3.187	30	Wonocolo	6,54	79.260	12.128
15	Mulyorejo	12,77	86.469	6.769	31	Wonokromo	8,32	157.126	18.891
16	Pabean Cantian	5,58	74.820	13.418					

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022, diolah

Jumlah penduduk Kota Surabaya Tahun 2021 berdasarkan jenis kelamin, meliputi 1.498.135 jiwa atau 50,43% penduduk perempuan dan 1.472.817 jiwa atau 49,57% penduduk laki-laki. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, atau lebih dikenal sebagai piramida penduduk, dapat dilihat pada Gambar II.9.



Gambar II.9 Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022, diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada tahun 2021 yaitu usia 3-6 tahun sebanyak 177.135 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 297.369 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 148.573 jiwa dan usia 16-18 tahun sebanyak 138.779 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.6
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2021

No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	Asemrowo	4.300	7.171	3.613	3.375
2	Benowo	4.744	7.789	3.920	3.580
3	Bubutan	7.117	11.761	5.597	5.128
4	Bulak	8.470	14.799	7.739	7.724
5	Dukuh Pakis	5.507	9.619	4.755	4.452



No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
6	Gayungan	11.063	19.961	9.978	9.408
7	Genteng	3.151	5.375	2.847	2.634
8	Gubeng	7.092	12.412	6.369	6.030
9	Gunung Anyar	6.856	11.069	5.311	5.062
10	Jambangan	13.019	22.120	10.914	10.318
11	Karang Pilang	5.508	9.384	4.527	4.425
12	Kenjeran	4.507	7.440	3.788	3.613
13	Krembangan	5.658	9.627	4.963	4.624
14	Lakar Santri	5.528	9.435	4.755	4.288
15	Mulyorejo	6.933	11.590	5.794	5.465
16	Pabean Cantian	12.250	20.275	9.945	9.079
17	Pakal	11.932	19.014	9.326	8.517
18	Rungkut	3.769	6.220	3.211	2.908
19	Sambikerep	4.301	7.276	3.705	3.273
20	Sawahan	4.225	7.096	3.505	3.356
21	Semampir	3.455	5.802	2.893	2.613
22	Simokerto	2.507	4.145	2.167	2.033
23	Sukolilo	3.231	5.427	2.688	2.489
24	Sukomanunggal	3.538	5.610	2.821	2.560
25	Tambak Sari	3.772	6.015	2.870	2.664
26	Tandes	4.884	8.187	4.101	3.920
27	Tegalsari	6.139	10.378	5.019	4.698
28	Tenggilis Mejoyo	3.184	5.028	2.635	2.304
29	Wiyung	2.887	4.698	2.396	2.330
30	Wonocolo	3.690	6.026	3.129	2.849
31	Wonokromo	3.918	6.620	3.292	3.060
Jumlah		177.135	297.369	148.573	138.779

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022



Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada tabel di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.7
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama

Agama	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Islam	85,04%	85,11%	85,35%	85,51%	85,70%	85,83%
2. Kristen	9,14%	9,12%	8,98%	8,89%	8,75%	8,68%
3. Katholik	4,00%	3,96%	3,94%	3,91%	3,90%	3,87%
4. Budha	1,51%	1,50%	1,45%	1,42%	1,40%	1,37%
5. Hindu	0,28%	0,28%	0,25%	0,24%	0,22%	0,22%
6. Konghuchu	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
7. Lainnya	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Tabel di atas menunjukkan, bahwa pada tahun 2021, Kota Surabaya didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 85,83% sedangkan sebesar 14,17% adalah penduduk beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kota Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik dimasyarakat. Salah satu prasyarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari 83 jenis pekerjaan, yang paling banyak adalah penduduk dengan status Belum/tidak bekerja, sebesar 29,09 persen. Posisi kedua ditempati oleh Karyawan swasta yakni sebesar 27,04 persen, dan di posisi ketiga adalah Mengurus rumah tangga sebesar 17,83 persen. Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.8
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2021

No.	Pekerjaan	Jumlah	%	No.	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Belum / Tidak Bekerja	864.333	29,09280	2	Karyawan Swasta	803.328	27,03941



No.	Pekerjaan	Jumlah	%	No.	Pekerjaan	Jumlah	%
3	Mengurus Rumah Tangga	529.790	17,83233	37	Wartawan	224	0,00754
4	Pelajar Mahasiswa	440.088	14,81303	38	Pengacara	221	0,00744
5	Wiraswasta	155.692	5,24048	39	Notaris	189	0,00636
6	Pegawai Negeri Sipil	37.967	1,27794	40	Konsultan	177	0,00596
7	Lainnya	29.885	1,00591	41	Biarawati	154	0,00518
8	Guru	23.029	0,77514	42	Tukang Las Pandai Besi	152	0,00512
9	Pensiunan	17.109	0,57588	43	Seniman	147	0,00495
10	Tentara Nasional Indonesia	10.827	0,36443	44	Arsitek	125	0,00421
11	Pedagang	7.268	0,24464	45	Tukang Listrik	117	0,00394
12	Dosen	6.222	0,20943	46	Buruh Nelayan Perikanan	88	0,00296
13	Dokter	6.188	0,20828	47	Juru Masak	82	0,00276
14	Karyawan BUMN	6.113	0,20576	48	Akuntan	73	0,00246
15	Buruh Harian Lepas	5.134	0,17281	49	Ustadz Mubaligh	72	0,00242
16	Kepolisian RI	4.432	0,14918	50	Penata Rias	71	0,00239
17	Petani Pekebun	3.059	0,10296	51	Penata Rambut	67	0,00226
18	Perawat	2.836	0,09546	52	Tukang Sol Sepatu	57	0,00192
19	Perdagangan	2.781	0,09361	53	Psikiater Psikolog	54	0,00182
20	Karyawan Honorer	2.258	0,07600	54	Tukang Cukur	44	0,00148
21	Sopir	1.915	0,06446	55	Peneliti	44	0,00148
22	Tukang Batu	1.417	0,04770	56	Peternak	30	0,00101
23	Nelayan Perikanan	1.081	0,03639	57	Pastor	26	0,00088
24	Bidan	889	0,02992	58	Pilot	20	0,00067
25	Karyawan BUMD	645	0,02171	59	Penata Busana	18	0,00061
26	Pembantu Rumah Tangga	536	0,01804	60	Penterjemah	18	0,00061
27	Industri	505	0,01700	61	Anggota DPRD Kabupaten Kota	18	0,00061
28	Tukang Jahit	493	0,01659	62	Buruh Peternakan	16	0,00054
29	Pendeta	490	0,01649	63	Penyiar Radio	16	0,00054
30	Mekanik	391	0,01316	64	Perancang Busana	15	0,00050
31	Apoteker	387	0,01303	65	Imam Masjid	14	0,00047
32	Pelaut	323	0,01087	66	Tabib	10	0,00034
33	Buruh Tani Perkebunan	308	0,01037	67	Anggota DPRD Provinsi	10	0,00034
34	Transportasi	276	0,00929	68	Pialang	9	0,00030
35	Konstruksi	266	0,00895	69	Penyiar Televisi	8	0,00027
36	Tukang Kayu	264	0,00889	70	Tukang Gigi	7	0,00024



No.	Pekerjaan	Jumlah	%	No.	Pekerjaan	Jumlah	%
71	Anggota DPR RI	7	0,00024	77	Gubernur	2	0,00007
72	Paraji	4	0,00013	78	Walikota	2	0,00007
73	Perangkat Desa	4	0,00013	79	Wakil Walikota	2	0,00007
74	Anggota Kabinet Kementerian	3	0,00010	80	Kepala Desa	2	0,00007
75	Paranormal	3	0,00010	81	Anggota BPK	1	0,00003
76	Promotor Acara	2	0,00007	82	Bupati	1	0,00003
				83	Wakil Bupati	1	0,00003

Sumber : Data Penduduk WNI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Berdasarkan pendidikan, komposisi penduduk Kota Surabaya ditampilkan pada tabel di bawah ini. Penduduk Kota Surabaya paling banyak (27,55 persen), merupakan lulusan SMA-sederajat. Posisi kedua adalah penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 26,50 persen dan posisi selanjutnya adalah lulusan SD-sederajat sebanyak 14,07 persen.

Tabel II.9
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
Tidak/Belum Sekolah	787.338	26,50
Belum Tamat SD/setara	223.414	7,52
Tamat SD/setara	417.981	14,07
SMP/setara	357.518	12,04
SMA/setara	818.549	27,55
D1/D2	17.361	0,58
D3/Sarjana Muda	39.887	1,34
D4/S1	287.516	9,68
S2	19.976	0,67
S3	1.412	0,05
Total	2.970.952	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022



2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya terus mengalami peningkatan selama periode 2017 hingga 2021. IPM Kota Surabaya meningkat dari 81,07 pada tahun 2017 menjadi 82,31 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Kota Surabaya rata-rata tumbuh sebesar 0,55 % per tahun. Keberhasilan dalam meningkatkan IPM secara berkelanjutan tersebut telah mampu meningkatkan standar kualitas pembangunan manusia Kota Surabaya menjadi kategori sangat tinggi, dan merupakan angka tertinggi level Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Tren IPM Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.10
Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
IPM Kota Surabaya	81,07	81,74	82,22	82,23	82,31
IPM Provinsi Jawa Timur	70,27	70,77	71,5	71,71	72,14
IPM Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2021

Standar hidup layak dapat melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita masyarakat di kota Surabaya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.11
Pengeluaran per Kapita disesuaikan di kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran per Kapita (Rp 000)	16.726	17.157	17.854	17.755	17.826

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2021

Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Surabaya mencapai 17,826 juta rupiah per tahun.



2.1.2.1.2 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010, seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tabels* (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Nilai PDRB Kota Surabaya atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2021, sebesar Rp590.249.836,50 juta, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2020, sebesar Rp554.509.457,38 juta. Kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB tersebut, pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang bervariasi namun masih lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya tahun 2021 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp163.509.913,20 juta atau sebesar 27,70%. Selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai kontribusi sebesar Rp113.544.581,10 juta atau sebesar 19,24% sebagai sektor yang berkontribusi paling tinggi kedua dalam pembentuk PDRB ADHB Kota Surabaya, seperti yang dapat dilihat pada Tabel II.12.

Sama halnya dengan PDRB ADHB Kota Surabaya, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp390.936.424,98 juta meningkat menjadi sebesar Rp407.726.799,20 juta pada tahun 2021. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2021 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp114.183.332,30 juta diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp79.366.597,60 juta serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp57.221.633,10 juta seperti dapat dilihat pada Tabel II.13 berikut.



Tabel II.12
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017 – 2021 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	883.177,33	0,18	913.363,56	0,17	928.398,16	0,16	889.331,91	0,16	917.595,42	0,16
B	Pertambangan dan Penggalian	30.638,64	0,01	32.568,38	0,01	33.531,33	0,01	31.943,8	0,01	32.761,34	0,01
C	Industri Pengolahan	92.745.070,08	18,81	101.196.564,52	18,78	109.245.937,20	18,81	107.416.294,34	19,37	113.544.581,14	19,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.263.680,02	0,46	2.311.134,20	0,43	2.362.300,29	0,41	2.237.615,57	0,40	2.417.167,25	0,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	740.173,38	0,15	771.856,00	0,14	791.147,83	0,14	824.951,94	0,15	872.320,90	0,15
F	Konstruksi	49.603.609,37	10,06	52.920.129,31	9,82	54.649.310,30	9,41	51.969.408,77	9,37	55.273.538,87	9,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	135.322.725,10	27,45	149.167.327,31	27,68	161.141.233,33	27,75	149.246.755,05	26,92	163.509.913,19	27,70
H	Transportasi dan Pergudangan	26.215.295,76	5,32	28.811.194,17	5,35	31.240.415,60	5,38	29.794.090,41	5,37	30.520.260,56	5,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	78.971.933,92	16,02	87.056.324,46	16,15	95.537.038,24	16,45	85.618.582,64	15,44	91.418.079,71	15,49
J	Informasi dan Komunikasi	26.571.784,77	5,39	28.390.748,22	5,27	30.770.585,80	5,30	33.247.669,54	6,00	35.273.340,84	5,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	25.631.465,09	5,20	28.140.646,05	5,22	29.413.339,89	5,06	29.183.377,44	5,26	30.560.741,63	5,18
L	Real Estate	12.495.064,18	2,53	13.775.255,11	2,56	14.947.568,30	2,57	15.354.350,85	2,77	15.790.323,11	2,68
M,N	Jasa Perusahaan	12.098.851,21	2,45	13.571.273,11	2,52	14.930.184,77	2,57	14.116.912,06	2,55	14.543.157,97	2,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.768.287,70	1,37	7.345.115,74	1,36	8.154.990,77	1,40	8.238.304,23	1,49	8.310.975,30	1,41
P	Jasa Pendidikan	11.958.097,23	2,43	12.897.475,91	2,39	14.007.607,77	2,41	14.540.365,94	2,62	14.682.371,72	2,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.730.513,94	0,76	4.053.612,67	0,75	4.443.228,45	0,77	4.880.587,79	0,88	5.220.638,17	0,88
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.995.936,81	1,42	7.599.869,06	1,41	8.159.192,66	1,40	6.918.915,11	1,25	7.340.199,70	1,24
Produk Domestik Regional Bruto		493.026.304,54	100,00	538.954.457,78	100,00	580.756.010,69	100,00	554.509.457,38	100,00	590.227.966,81	100,00

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2022



Tabel II.13

**Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017 – 2021 (dalam Juta Rp)**

Kategori	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	589.909,43	0,16	581.426,57	0,15	576.221,53	0,14	547.994,9	0,14	554.054,70	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian	20.544,80	0,01	20.762,58	0,01	20.782,09	0,01	19.464,04	0,00	19.479,80	0,00
C	Industri Pengolahan	69.881.287,92	19,16	73.328.747,38	18,93	77.312.368,81	18,81	76.384.521,77	19,54	79.366.597,60	19,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.541.129,01	0,42	1.540.006,38	0,40	1.546.272,08	0,38	1.449.668,99	0,37	1.538.145,90	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	564.406,83	0,15	583.121,24	0,15	605.979,60	0,15	630.336,37	0,16	665.833,70	0,16
F	Konstruksi	36.208.179,04	9,93	38.480.421,60	9,93	40.576.452,62	9,87	38.387.739,29	9,82	40.070.071,60	9,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	103.301.112,79	28,32	109.870.324,37	28,37	116.343.590,22	28,31	106.340.867,71	27,20	114.183.332,30	28,00
H	Transportasi dan Pergudangan	17.707.950,22	4,86	19.046.861,58	4,92	20.497.977,43	4,99	19.477.422,82	4,98	19.875.912,40	4,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.192.882,21	14,86	58.419.739,39	15,08	62.898.688,76	15,30	56.053.239,21	14,34	57.221.633,10	14,03
J	Informasi dan Komunikasi	23.974.911,33	6,57	25.613.455,86	6,61	27.531.903,71	6,70	29.511.280,46	7,55	31.281.790,20	7,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	17.685.808,04	4,85	18.541.116,14	4,79	19.187.832,54	4,67	19.231.210,98	4,92	19.324.709,70	4,74
L	Real Estate	9.610.228,83	2,63	10.165.858,67	2,62	10.784.959,46	2,62	11.000.304,15	2,81	11.179.684,10	2,74
M,N	Jasa Perusahaan	8.278.199,91	2,27	8.867.969,79	2,29	9.474.538,92	2,31	8.801.216,28	2,25	8.974.255,50	2,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.597.265,29	1,26	4.697.025,94	1,21	4.867.861,44	1,18	4.754.525,35	1,22	4.748.920,20	1,16
P	Jasa Pendidikan	8.531.781,66	2,34	9.064.164,83	2,34	9.668.100,19	2,35	9.934.443,75	2,54	9.993.043,00	2,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.804.625,21	0,77	3.023.591,50	0,78	3.254.593,89	0,79	3.539.299,11	0,91	3.722.145,30	0,91
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.224.596,95	1,43	5.495.449,09	1,42	5.821.770,58	1,42	4.872.889,81	1,25	5.007.190,10	1,23
Produk Domestik Regional Bruto		364.714.819,48	100,00	387.340.042,93	100,00	410.969.893,87	100,00	390.936.424,98	100,00	407.726.799,20	100,00

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2022



Tabel II.14

**Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**

Kategori	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,18	0,16	0,17	0,15	0,16	0,14	0,16	0,14	0,16	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
C	Industri Pengolahan	18,81	19,16	18,78	18,93	18,81	18,81	19,37	19,54	19,24	19,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,46	0,42	0,43	0,40	0,41	0,38	0,40	0,37	0,41	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,14	0,15	0,14	0,15	0,15	0,16	0,15	0,16
F	Konstruksi	10,06	9,93	9,82	9,93	9,41	9,87	9,37	9,82	9,36	9,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,45	28,32	27,68	28,37	27,75	28,31	26,92	27,20	27,70	28,00
H	Transportasi dan Pergudangan	5,32	4,86	5,35	4,92	5,38	4,99	5,37	4,98	5,17	4,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,02	14,86	16,15	15,08	16,45	15,30	15,44	14,34	15,49	14,03
J	Informasi dan Komunikasi	5,39	6,57	5,27	6,61	5,30	6,70	6,00	7,55	5,98	7,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,20	4,85	5,22	4,79	5,06	4,67	5,26	4,92	5,18	4,74
L	Real Estate	2,53	2,63	2,56	2,62	2,57	2,62	2,77	2,81	2,68	2,74
M,N	Jasa Perusahaan	2,45	2,27	2,52	2,29	2,57	2,31	2,55	2,25	2,46	2,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,37	1,26	1,36	1,21	1,40	1,18	1,49	1,22	1,41	1,16
P	Jasa Pendidikan	2,43	2,34	2,39	2,34	2,41	2,35	2,62	2,54	2,49	2,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,77	0,75	0,78	0,77	0,79	0,88	0,91	0,88	0,91
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,42	1,43	1,41	1,42	1,40	1,42	1,25	1,25	1,24	1,23
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2022

Struktur ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kategori yang mendominasi dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya yaitu kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi



mobil, dan sepeda motor, industri pengolahan serta akomodasi, serta makanan minuman. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan maraknya aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terus tumbuh pesat di Kota Surabaya. Di samping itu, daya dukung seperti padatnya jumlah penduduk Kota Surabaya disertai tingginya tingkat konsumsi membuat Kota Surabaya memiliki nilai tambah lebih besar bagi pelaku pasar.

Selama tahun 2017-2021 kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 26-27 persen setiap tahunnya. Sebagai penggerak utama perekonomian Kota Surabaya, pesatnya aktivitas perdagangan tersebut tentunya menjadi pengungkit (*multiplier effect*) bagi aktivitas lapangan usaha lainnya seperti aktivitas industri, penyediaan akomodasi dan makanan minuman serta aktivitas jasa lainnya. Hal itu terjadi karena semakin meningkatnya aktivitas perdagangan maka semakin meningkat pula permintaan barang dan jasa pada aktivitas industri. Berdasarkan keterkaitan tersebut menjadikan kategori industri pengolahan sebagai kategori lapangan usaha paling dominan kedua dengan nilai kontribusi 18-19 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya setiap tahunnya.

Kategori tertinggi selanjutnya yaitu akomodasi dan makanan minuman dengan kontribusi rata-rata sebesar 15-16 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya. Potensi aktivitas akomodasi dan makanan minuman di Kota Surabaya sangatlah besar. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh pembangunan hotel, wisma/penginapan, serta tempat makan mulai dari warung kecil hingga restoran yang terus bermunculan mengikuti pesatnya perkembangan ekonomi Kota Surabaya. Ditambah lagi, semakin modernnya perilaku hidup masyarakat Kota Surabaya turut mendukung tumbuhnya aktivitas kategori akomodasi dan makanan minuman dari tahun ke tahun.

2.1.2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 11.5. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2021, terjadi pada hampir seluruh



lapangan usaha, kecuali pada kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Jika dirinci, kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tinggi pada masa pandemi ini adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; kategori pengadaan listrik dan gas; kategori informasi dan komunikasi; kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Adapun kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kategori pertambangan dan penggalian; kategori jasa keuangan dan asuransi; kategori jasa pendidikan; serta kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Kategori tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif di tahun ini dikarenakan masih rendahnya pendapatan asli daerah yang disebabkan belum pulihnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk membayarkan kewajiban berupa pajak dan retribusi lainnya.

Tabel II.15
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017 – 2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,35	-1,44	-0,90	-4,90	1,11
B	Pertambangan dan Penggalian	2,58	1,06	0,09	-6,34	0,08
C	Industri Pengolahan	4,95	4,93	5,43	-1,15	3,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,75	-0,07	0,41	-6,25	6,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,83	3,32	3,92	4,02	5,63
F	Konstruksi	6,92	6,28	5,45	-5,39	4,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,01	6,36	5,89	-8,57	7,37
H	Transportasi dan Pergudangan	6,87	7,56	7,62	-4,98	2,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,64	7,80	7,67	-10,87	2,08
J	Informasi dan Komunikasi	6,93	6,83	7,49	7,19	6,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,92	4,84	3,49	0,23	0,49



Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
L	Real Estate	5,08	5,78	6,09	2,00	1,63
M,N	Jasa Perusahaan	6,66	7,12	6,84	-7,11	1,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,85	2,17	3,64	-2,33	-0,12
P	Jasa Pendidikan	5,95	6,24	6,66	2,75	0,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,87	7,81	7,64	8,75	5,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,89	5,18	5,94	-16,30	2,76
PDRB		6,13	6,20	6,10	-4,85	4,29
PDRB TANPA MIGAS		6,13	6,20	6,10	-4,85	4,29

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2022

Kondisi pandemi *Covid-19* yang terjadi di awal tahun 2020, memaksa perlambatan ekonomi yang sangat signifikan di angka -4,85 persen. Namun seiring dengan melandainya jumlah kasus penularan yang terjadi di Surabaya Raya, dan didukung oleh kerjasama antar pemangku kepentingan untuk mengakselerasi kembalinya perekonomian masyarakat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, hal tersebut dapat membantu menghidupkan kembali aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat di normal yang baru dengan inovasi berupa pemanfaatan teknologi informasi, di antaranya *online marketplace* seperti ePeken.

Berdasarkan data rilis BPS, perekonomian nasional dan provinsi pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan dan terlepas dari kontraksi sebagaimana terjadi di tahun 2020 yang lalu. Data selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.16
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2017 – 2021 (dalam persen)

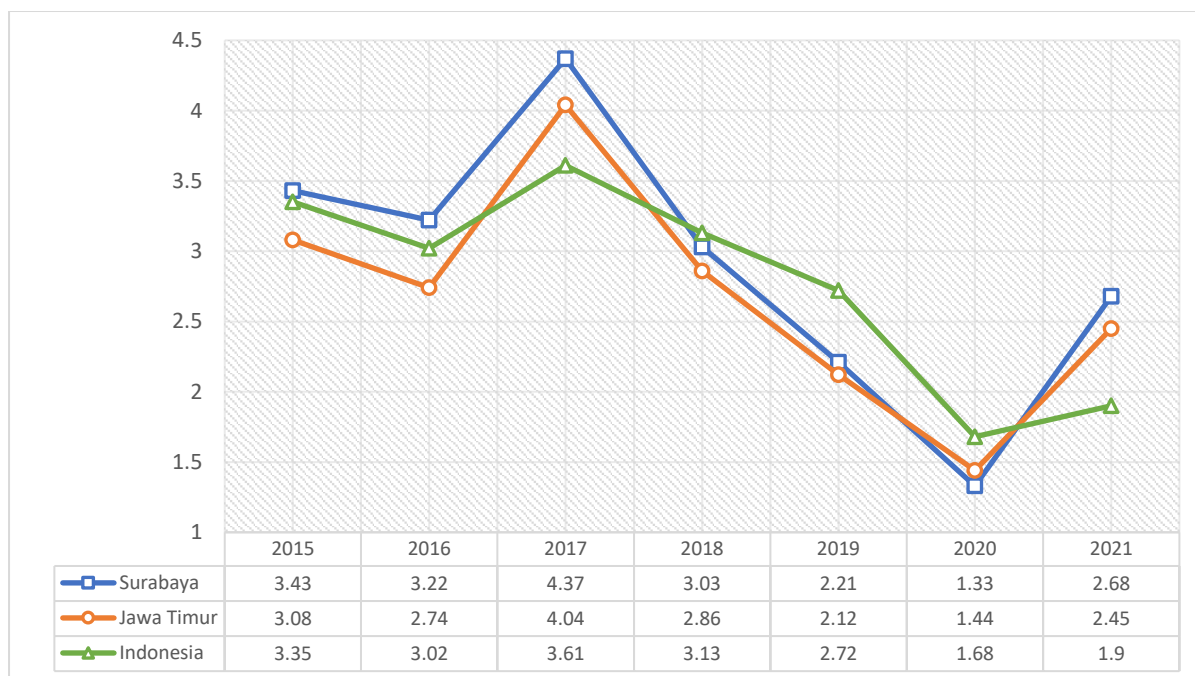
Pertumbuhan Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021
Surabaya	6,13	6,19	6,10	-4,85	4,29
Jawa Timur	5,46	5,47	5,53	-2,33	3,57
Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,7

Sumber data: BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya, 2022



2.1.2.1.4 Tingkat Inflasi

Pada tahun 2021 tingkat inflasi Kota Surabaya sebesar 2,68 persen. Angka tersebut meningkat bila dibandingkan dengan inflasi di tahun 2020 sebesar 1,33 persen, sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar II.10
Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2017 – 2021

Sumber: BPS Kota Surabaya, diolah, 2022

Berdasarkan data rilis BPS Kota Surabaya, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar 2,68 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Surabaya pada tahun 2020 sebesar 1,33 persen. Bila dibandingkan dengan kondisi di Jawa Timur dan Nasional, Pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana terangkum dalam grafik di atas. Meski rata-rata inflasi Kota Surabaya cenderung lebih rendah dibandingkan angka inflasi nasional, namun pada periode tertentu nilai inflasi tersebut bisa tinggi melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga tetap perlu dilakukan kontrol berkala terhadap komoditas-komoditas penyumbang inflasi di Kota Surabaya.

2.1.2.1.5 PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan



gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari *output* yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Surabaya tahun 2017-2021.

Tabel II.17
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
PDRB (Milyar Rp)	493.026,30	538.845,46	580.488,53	554.509,46	590.227,97
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	171,51	186,74	200,43	193,01	204,92
ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
PDRB (Milyar Rp)	364.714,82	387.303,94	410.879,31	390.936,42	407.726,80
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	126,87	134,22	141,87	136,07	141,56
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (ribu orang)	2.875	2.886	2.897	2.873	2.880

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2022

Pada tabel di atas, PDRB per kapita Kota Surabaya, dapat dilihat bahwa ADHB dan ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya, meski mengalami penurunan pada tahun 2020, hal ini karena dampak adanya pandemi Covid-19. Peningkatan PDRB perkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

2.1.2.1.6 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata.



Berdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Nilai Indeks Gini Kota Surabaya selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,3 – 0,4 yang tergolong dalam kategori sedang. Jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional, versi Bulan September yang dirilis BPS, indeks gini Kota Surabaya memiliki angka yang sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan keduanya. Meski demikian, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik, karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat. Saat ini, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk menurunkan angka rasio gini, dengan strategi yang berfokus pada upaya untuk menuntaskan masalah kemiskinan melalui fasilitasi kesempatan berusaha, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran.

Tabel II.18
Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Indeks Gini	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Surabaya	0,390	0,358	0,406	0,344	0,351
Jawa Timur	0,415	0,379	0,369	0,366	0,364
Nasional	0,391	0,384	0,380	0,385	0,381

Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022

2.1.2.1.7 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2017 sebesar Rp474.365 dan meningkat menjadi Rp530.178 pada tahun 2018. Jumlah penduduk miskin menurun dari tahun 2017 sebanyak 154.710 jiwa menjadi 140.810 jiwa pada tahun 2018, sehingga persentase penduduk miskin menurun menjadi 4,54%. Garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2019 meningkat menjadi Rp567.474, tetapi jumlah penduduk miskin menurun dari tahun 2018 sebanyak 140.810 menjadi 130.550 sehingga angka



kemiskinan Kota Surabaya pada tahun 2019 turun menjadi 4,51 persen. Sedangkan pada tahun 2020, garis kemiskinan meningkat menjadi Rp592.197 dan angka kemiskinan juga meningkat menjadi 5,02 persen. Demikian juga yang terjadi di tahun 2021, garis kemiskinan meningkat menjadi Rp592.197 dan angka kemiskinan ikut meningkat menjadi 5,23 persen. Kondisi tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 dan 2021 masih berlangsung pandemi covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi dan daya serap tenaga kerja. Angka Kemiskinan Kota Surabaya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.19
Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin
Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	Lingkup	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kemiskinan (persen)	Surabaya	5,39	4,88	4,51	5,02	5,23
	Jawa Timur	11,77	10,98	10,37	11,09	11,4
	Nasional	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan)	Surabaya	474.365	530.178	567.474	592.137	611.466
	Jawa Timur	342.092	373.574	397.687	416.001	429.133
	Nasional	370.910	392.154	418.515	450.185	464.474
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Surabaya	154,71	140,81	130,55	145,67	152,489
	Jawa Timur	4.617,01	4.332,59	4.112,25	4.419,10	4.572,73
	Nasional	26.582,99	25.674,58	24.785,87	27.549,69	26.503,65

Sumber: BPS, 2021

Program dan kegiatan berbagai sektor yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun program dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan skill melalui pelatihan, pemberdayaan UKM serta inkubasi dan klinik usaha mandiri. Intervensi tersebut diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, bahwa pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat 0% (nol persen) pada 2024. Kemiskinan ekstrem yang dimaksud mengacu pada definisi yang digunakan



oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu rumah tangga yang mendapatkan penghasilan sebesar 1,9 USD PPP (*Purchasing Power Parity*) per hari. Menggunakan definisi tersebut, kondisi kemiskinan ekstrem di Kota Surabaya pada Tahun 2020 yaitu sebesar 69.330 jiwa atau 2,39% (data Susenas 2020).

Pada tahun 2021 jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi sebesar 152.490 jiwa atau 5,23% (data Susenas 2021). Kota Surabaya sedang berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem antara lain dengan cara mendorong pelaksanaan padat karya untuk peningkatan kemandirian ekonomi.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah.

Angka melek huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kota Surabaya sebesar 100 persen pada tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15 tahun ke atas tercatat sebanyak 2.408.552 jiwa, pada tahun 2018 sebanyak 2.157.098 jiwa, pada tahun 2019 sebanyak 2.458.655, pada tahun 2020 sebanyak 2.460.443 jiwa, pada tahun 2021 sebanyak 2.295.394 dan seluruhnya dapat membaca dan menulis. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kota Surabaya mulai tahun 2017 hingga tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.20
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bisa Membaca dan Menulis	2.408.552	2.157.098	2.458.655	2.460.443	2.295.394



No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	2.408.552	2.157.098	2.458.655	2.460.443	2.295.394
3	Angka Melek Huruf (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Dari data pada tabel di atas, penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

APM jenjang SD/MI pada tahun 2017 sebesar 95,02 persen dan jenjang SMP/MTS sebesar 85,06 persen. APM jenjang SD/MI pada tahun 2018 sebesar 97,24 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 87,17 persen. APM jenjang SD/MI pada tahun 2019 sebesar 98,88 persen dan jenjang SMP/MTS sebesar 84,58 persen. Sedangkan pada tahun 2020, APM jenjang SD/MI sebesar 98,46 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 87,58 persen. Kemudian pada tahun 2021 APM jenjang SD/MI sebesar 100,82 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 87,34 persen. Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK, terhitung mulai 1 Januari 2017 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rekap data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.21
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	APM SD/MI (persen)	95,02	97,24	98,88	98,46	100,82
1.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	282.604	274.104	291.907	295.357	299.814



No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	281.089	286.373	303.021	299.966	297.369
2	APM SMP/MTs (persen)	85,06	87,17	84,58	87,58	87,34
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	108.231	118.636	123.398	126.874	129.763
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	144.127	141.554	146.952	144.872	148.573

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Adapun rasio perempuan terhadap laki-laki untuk APM Kota Surabaya pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.22
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki
Kota Surabaya Tahun 2017– 2021

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI (persen)	99,76	101,73	94,34	92,73	99,80
2.	Rasio APM perempuan/laki-laki SMP/MTs (persen)	94,52	105,49	100,04	90,59	103,13

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Rekap data perkembangan APK Kota Surabaya tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut.



Tabel II.23
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	APK PAUD (persen)	67,65	66,36	68,07	69,36	69,59
1.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan PAUD	119.747	119.047	125.941	124.883	123.269
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 3-6 Tahun	177.009	179.389	185.012	180.053	177.135
2.	APK SD/MI (persen)	104,46	103,79	105,86	104,30	106,90
2.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	287.406	287.830	310.982	312.873	317.885
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	281.089	286.373	303.021	299.966	297.369
3.	APK SMP/MTs (persen)	101,38	94,39	86,49	98,93	110,64
3.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	143.426	129.136	135.629	143.329	164.376
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	144.127	141.554	146.952	144.872	148.573

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 21 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.24
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-Rata Lama Sekolah	10,45	10,46	10,47	10,49	10,5

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa



mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.25
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Lama Sekolah	14,41	14,78	14,79	14,8	14,81

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Surabaya di tahun 2021 berharap mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA, yakni melebihi tingkat Diploma-3 (D3) namun masih belum mencapai Diploma-4 (D4) atau Strata-1 (S1).

Meski mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata lama sekolah masih belum dapat memenuhi harapan lama sekolah. Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong pelaksanaan pemberian beasiswa bagi pelajar SMA/SMK, bahkan hingga Perguruan Tinggi, sehingga diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan indeks pendidikan bagi masyarakat/warga Kota Surabaya.

2.1.2.2.2 Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.26
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup	73,88	73,98	74,13	74,18	74,18

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

AHH penduduk Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 73,88 tahun, pada tahun 2018 menjadi 73,98 tahun dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 74,13 tahun, serta meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 74,18 tahun. Sedangkan di tahun 2021, meski kondisi pandemi, AHH penduduk Kota Surabaya dapat dipertahankan di 74,18 tahun.

Status gizi masyarakat pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2017



sebesar 0,15 persen dan pada tahun 2018 menurun menjadi 0,14 persen, pada tahun 2019 menurun menjadi 0,12 dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 0,11 persen, serta pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 0,10 persen. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk tahun 2017 hingga 2021.

Tabel II.27
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk	278	254	224	196	148
2	Jumlah balita yang ditimbang	179.662	181.842	183.286	178.043	148.720
3	Persentase (persen)	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022

Tabel II.28
Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk dan kurang	16.627	15.274	15.060	14.813	6.348
2	Jumlah balita yang ditimbang	179.662	181.842	180.328	178.043	148.720
3	Persentase (persen)	9,25	8,39	8,35	8,32	4,27

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022



Tabel II.29
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2017– 2021

No	Kecamatan	2017			2018			2019			2020			2021		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
1	Kec. Asemrowo	0	3.633	0,00%	4	3.369	0,12%	3	3.228	0,09%	3	2.875	0,10%	12	3.257	0,37%
2	Kec. Benowo	4	4.506	0,09%	4	4.559	0,09%	4	4.392	0,09%	1	4.577	0,02%	1	3.475	0,03%
3	Kec. Bubutan	4	6.361	0,06%	3	5.989	0,05%	1	5.793	0,02%	3	5.567	0,05%	4	5.008	0,08%
4	Kec. Bulak	3	2.770	0,11%	4	2.839	0,14%	5	2.802	0,18%	2	2.774	0,07%	6	2.645	0,23%
5	Kec. Dukuh Pakis	5	3.436	0,15%	4	3.293	0,12%	3	3.148	0,10%	1	3.084	0,03%	6	2.167	0,28%
6	Kec. Gayungan	3	2.449	0,12%	2	2.338	0,09%	4	2.249	0,18%	1	2.210	0,05%	1	1.828	0,05%
7	Kec. Genteng	8	3.203	0,25%	11	3.257	0,34%	11	3.265	0,34%	7	3.211	0,22%	5	3.181	0,16%
8	Kec. Gubeng	2	7.164	0,03%	0	7.268	0,00%	0	7.592	0,00%	2	6.878	0,03%	1	6.056	0,02%
9	Kec. Gunung Anyar	2	3.321	0,06%	2	3.483	0,06%	0	4.087	0,00%	2	3.895	0,05%	0	3.383	0,00%
10	Kec. Jambangan	6	3.586	0,17%	3	3.587	0,08%	0	3.529	0,00%	2	3.479	0,06%	0	3.280	0,00%
11	Kec. Karang Pilang	2	4.155	0,05%	2	4.347	0,05%	5	4.372	0,11%	5	4.390	0,11%	0	4.552	0,00%
12	Kec. Kenjeran	18	11.251	0,16%	15	11.822	0,13%	15	14.034	0,11%	12	13.647	0,09%	8	10.635	0,08%
13	Kec. Krembangan	6	7.597	0,08%	2	7.987	0,03%	2	7.832	0,03%	4	7.480	0,05%	3	6.197	0,05%
14	Kec. Lakarsantri	2	5.148	0,04%	9	3.670	0,25%	4	4.158	0,10%	4	4.209	0,10%	5	2.857	0,18%
15	Kec. Mulyorejo	2	5.373	0,04%	4	5.589	0,07%	0	5.616	0,00%	4	5.513	0,07%	3	2.368	0,13%
16	Kec. Pabean Cantian	3	4.425	0,07%	5	4.357	0,11%	2	4.249	0,05%	1	4.195	0,02%	1	3.478	0,03%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



No	Kecamatan	2017			2018			2019			2020			2021		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
17	Kec. Pakal	44	4.576	0,96%	16	4.394	0,36%	36	4.093	0,88%	20	3.895	0,51%	8	3.841	0,21%
18	Kec. Rungkut	11	6.803	0,16%	8	7.304	0,11%	8	7.163	0,11%	5	7.154	0,07%	2	5.186	0,04%
19	Kec. Sambikerep	2	2.864	0,07%	5	4.229	0,12%	5	3.400	0,15%	2	4.350	0,05%	4	3.317	0,12%
20	Kec. Sawahan	16	12.390	0,13%	14	12.380	0,11%	15	12.064	0,12%	21	11.869	0,18%	10	10.349	0,10%
21	Kec. Semampir	22	11.651	0,19%	24	11.740	0,20%	21	11.680	0,18%	10	11.719	0,09%	11	9.578	0,11%
22	Kec. Simokerto	5	5.807	0,09%	9	5.694	0,16%	8	3.626	0,22%	3	3.754	0,08%	7	4.887	0,14%
23	Kec. Sukolilo	7	6.246	0,11%	2	6.540	0,03%	3	6.845	0,04%	7	6.760	0,10%	1	4.759	0,02%
24	Kec. Sukomanunggal	63	6.775	0,93%	60	6.657	0,90%	59	6.405	0,92%	43	6.387	0,67%	22	5.558	0,40%
25	Kec. Tambaksari	12	11.482	0,10%	18	12.229	0,15%	6	11.963	0,05%	9	12.227	0,07%	6	10.767	0,06%
26	Kec. Tandes	4	5.989	0,07%	4	6.108	0,07%	4	6.263	0,06%	5	6.125	0,08%	2	5.864	0,03%
27	Kec. Tegalsari	9	5.911	0,15%	7	5.884	0,12%	7	5.646	0,12%	7	5.594	0,13%	12	3.960	0,30%
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	0	2.820	0,00%	0	3.022	0,00%	0	3.058	0,00%	1	2.947	0,03%	0	2.714	0,00%
29	Kec. Wiyung	1	4.364	0,02%	3	4.318	0,07%	3	4.316	0,07%	1	4.324	0,02%	3	2.395	0,13%
30	Kec. Wonocolo	5	5.037	0,10%	5	4.859	0,10%	4	4.925	0,08%	3	4.959	0,06%	2	4.261	0,05%
31	Kec. Wonokromo	7	8.569	0,08%	5	8.730	0,06%	4	8.535	0,05%	5	7.995	0,06%	2	6.917	0,03%
Total		278	179.662	0,15%	254	181.842	0,14%	242	180.328	0,13%	196	178.043	0,11%	148	148.720	0,10%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2022



Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel II.30
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	34	31	25	24	17
2	Kelahiran Hidup	42.822	42.474	42.145	41.814	40.158
3	AKI per 100.000 KH	79,40	72,99	59,32	57,40	42,33

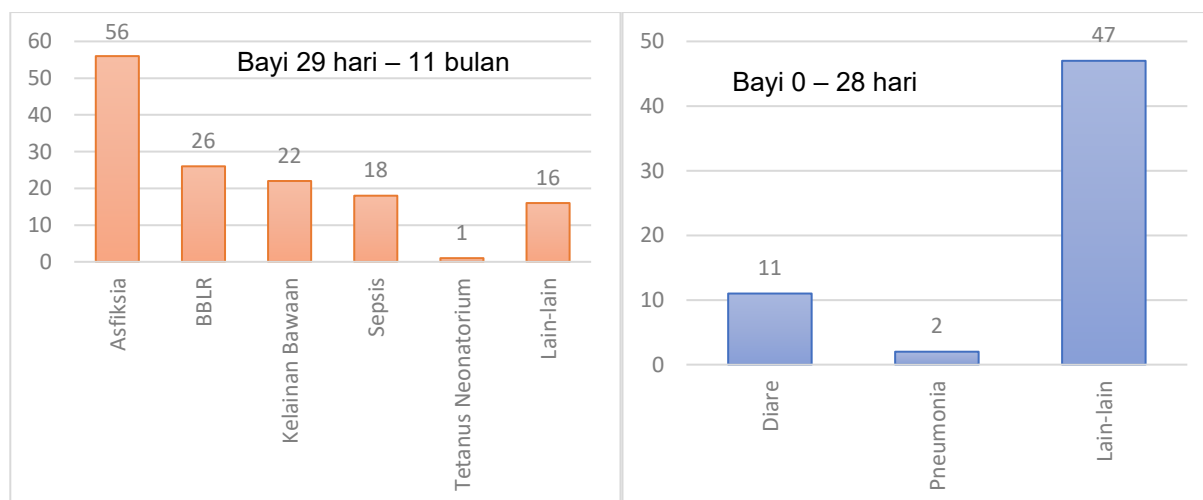
Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup terus berkurang dari tahun 2017 sebesar 79,40 menjadi 42,33 pada tahun 2021. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 sebesar 5,11 terus berkurang menjadi 4,96 pada tahun 2021. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan bawaan, ketiganya menyumbang 58,65 persen dari 208 bayi yang meninggal di tahun 2020.

Tabel II.31
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah bayi lahir meninggal	219	214	211	208	199
2	Kelahiran Hidup	42.822	42.474	42.145	41.814	40.158
3	AKB per 1.000 KH	5,11	5,04	5,01	4,97	4,96

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022



Gambar II.11

Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian Terbanyak Tahun 2021

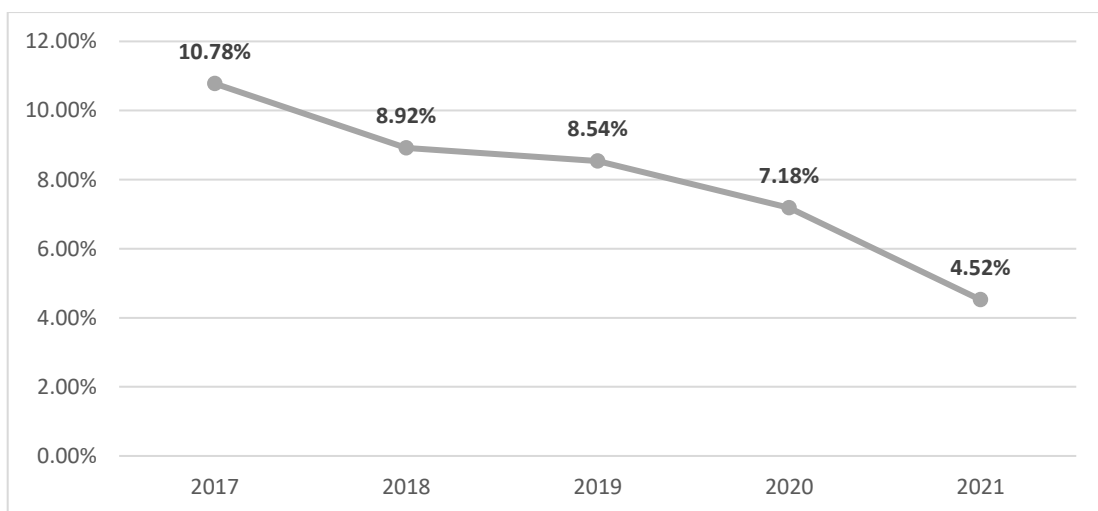
Sumber: Dinas Kesehatan, 2022 diolah



Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita gizi Buruk di Kota Surabaya telah mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan prevalensi balita kurang gizi di bawah target bahkan capaiannya telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun capaiannya telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun dari jumlah kasus kejadian masih cukup besar dan diupayakan menurun setiap tahunnya.

Selain permasalahan di atas, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah *stunting* (kerdil) di mana kondisi balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita *stunting* termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.

Prevalensi Balita *Stunting* menunjukkan perkembangan yang makin baik dari tahun 2017 sebesar 10,78% menjadi hanya 4,52% pada tahun 2021. Hal ini tidak terlepas dari upaya pencegahan dan penurunan *stunting* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Namun demikian, Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan guna mewujudkan *zero stunting* di Kota Surabaya, seperti dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.12 Prevalensi Balita *Stunting* Tahun 2017 – 2021

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022

2.1.2.2.3 Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga



menimbulkan pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2021 mempunyai tren meningkat dengan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 yaitu sebesar 9,68 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*), dan faktor pemutusan hubungan kerja yang utamanya banyak terjadi ketika pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021. Berikut adalah rekapitulasi data tentang tingkat pengangguran terbuka tahun 2017-2021.

Tabel II.32
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	89.479	93.096	130.459	154.933	152.273
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.468.094	1.520.041	2.222.469	1.582.564	1.572.888
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,98	6,12	5,87	9,79	9,68

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2021

Jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2017 jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya sebesar 1.468.094 menjadi 2.222.469 di tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 berdampak pada naiknya TPT Kota Surabaya sampai dengan 9,79 persen. Rendahnya penyerapan tenaga kerja dan banyaknya karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja merupakan akibat dari terdampaknya perekonomian Kota Surabaya, Indonesia dan global secara umum karena pembatasan sosial dalam skala besar. Meski kondisi pandemi masih berlanjut di tahun 2021, namun TPT Kota Surabaya dapat diturunkan menjadi 9,68 persen.



Tabel II.33
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

TPT	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Surabaya	5,98	6,12	5,87	9,79	9,68
Jawa Timur	4,00	3,91	3,82	5,84	5,74
Nasional	5,50	5,30	5,23	7,07	6,50

Sumber data: BPS, 2022

Dalam kurun 5 tahun terakhir angka TPT kota Surabaya cukup fluktuatif. Namun pada tahun 2020 angka TPT sangat tinggi. Angka TPT di Provinsi Jawa Timur dan Nasional juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Hal ini merupakan dampak adanya pandemi Covid-19.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.34
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No.	Capaian Pembangunan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Grup Kesenian	591	611	731	771	743
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
3	Jumlah Klub Olahraga	42	42	42	42	42
4	Jumlah Gedung Olahraga	4	4	4	4	5

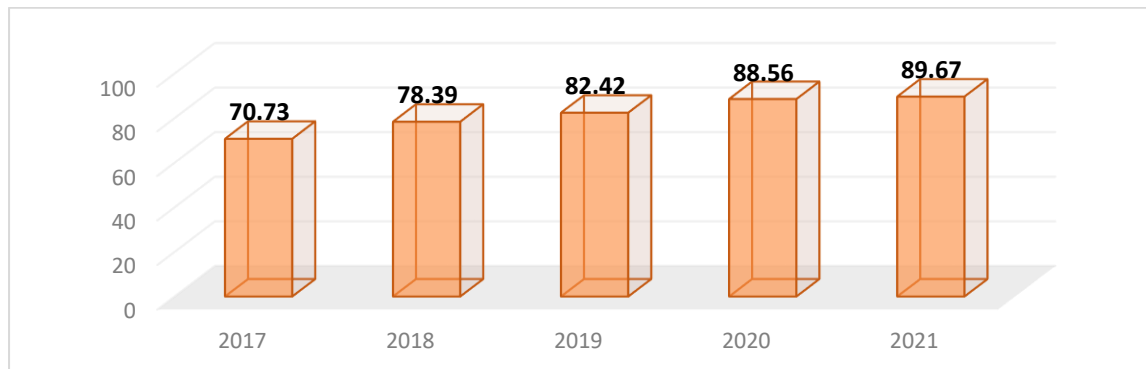
Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2022

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat kota Surabaya terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Salah satu wadah untuk menyalurkan minat terhadap budaya lokal adalah melalui kelompok/grup kesenian. Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tahun 2017 sebanyak 591 grup kesenian, tahun 2018 meningkat menjadi 611 grup kesenian



dan sampai dengan tahun 2021 meningkat menjadi 743 grup kesenian. Pembinaan seni dan budaya juga dilakukan dengan kegiatan pelatihan dan pelaksanaan penampilan/pertunjukan seni di ruang publik. Adapun even pertunjukan seni dan budaya yang diadakan di antaranya Surabaya Vaganza, Mlaku-mlaku Nang Tunjungan, Festival Rujak Uleg, Festival Cipta Karya Tari serta Festival *Cross Culture*.

Selain itu, dalam melestarikan budaya lokal, dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan menciptakan rasa memiliki disertai kepedulian terhadap nilai-nilai kebangsaan. Hal ini diukur dalam indeks budaya lokal yang dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari hasil survei tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal, serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan bernilai kebangsaan. Adapun pencapaian indeks budaya lokal pada tahun 2017 hingga 2021, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.13 Perkembangan Indeks Budaya Lokal Tahun 2017–2021

(sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2022)

Pencapaian Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya tahun 2021 realisasinya 89,67%. Angka realisasi tersebut terus meningkat dari realisasi tahun 2017 sebesar 70,73%. Peningkatan Indeks Budaya Lokal tersebut menunjukkan penguatan nilai-nilai budaya lokal yang semakin membaik.

Jumlah cabang olahraga yang dibina sampai dengan tahun 2021 sebanyak 42 cabang olahraga. Pada tahun 2021 sejumlah 416 orang atlet dari 31 cabang olahraga meraih prestasi di kejuaraan skala provinsi, nasional dan internasional. Dengan keterbatasan even kejuaraan pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19, capaian tersebut cukup memuaskan. Untuk memberikan fasilitasi pembinaan cabang olahraga tersebut, diperlukan gedung olahraga yang baik dan memadai. Sampai dengan tahun 2021, gedung olahraga yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 5 unit antara lain Gelanggang Remaja, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo, dan gedung indoor *Surabaya Sport Center* (SSC), serta Gelora Pancasila.



Selain itu, lapangan olahraga juga tersebar di permukiman penduduk maupun sekolah-sekolah, baik itu lapangan olahraga yang dibangun pemerintah kota maupun milik swasta. Sampai dengan tahun 2021 lapangan olahraga yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya berjumlah 586 lapangan terdiri dari lapangan berbagai macam cabang olahraga termasuk olahraga renang dan menembak. Pembinaan atlet juga dilakukan melalui kegiatan pendampingan, pemusatan latihan dan pelaksanaan even kejuaraan tingkat kota seperti Piala Walikota.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk Tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel II.35
Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Surabaya Tahun 2021

No.	Bidang Urusan	Indikator Capaian	Rumus	Elemen Data	Capaian
1	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini; Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah total yang terlayani	97.142 orang	106,81%
			Jumlah total yang harus dilayani	90.951 orang	
		Pendidikan Dasar; Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Jumlah total yang terlayani	450.043 orang	100,85%
			Jumlah total yang harus dilayani	446.251 orang	
		Pendidikan Kesetaraan; Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah total yang terlayani	2.142 orang	100,00%
			Jumlah total yang harus dilayani	2.142 orang	
2	Kesehatan	Kesehatan Ibu Hamil; Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar	Jumlah total yang terlayani	43.901 orang	99,38%
			Jumlah total yang harus dilayani	44.174 orang	



No.	Bidang Urusan	Indikator Capaian	Rumus	Elemen Data	Capaian
		Kesehatan Ibu Bersalin; Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah total yang terlayani	42.008 orang	99,63%
			Jumlah total yang harus dilayani	42.164 orang	
		Kesehatan Bayi Baru Lahir; Persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah total yang terlayani	41.967 bayi	104,50%
			Jumlah total yang harus dilayani	40.158 bayi	
		Kesehatan Balita; Cakupan balita usia 0- 59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar	Jumlah total yang terlayani	151.550 orang	91,59%
			Jumlah total yang harus dilayani	165.467 orang	
		Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar; Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah total yang terlayani	358.605 orang	107,68%
			Jumlah total yang harus dilayani	333.018 orang	
		Kesehatan pada Usia Produktif; Persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah total yang terlayani	1.804.530 orang	88,33%
			Jumlah total yang harus dilayani	2.042.911 orang	
		Kesehatan pada Usia Lanjut; Persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah total yang terlayani	316.075 orang	108,23%
			Jumlah total yang harus dilayani	292.030 orang	
		Kesehatan Penderita Hipertensi; Persentase jumlah	Jumlah total yang terlayani	625.943 orang	84,90%



No.	Bidang Urusan	Indikator Capaian	Rumus	Elemen Data	Capaian
		penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah total yang harus dilayani	737.254 orang	107,83%
		Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah total yang terlayani	103.819 orang	
		Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat; Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah total yang harus dilayani	96.280 orang	83,05%
			Jumlah total yang terlayani	4.605 orang	
		Kesehatan Orang dengan TB; Persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah total yang terlayani	5.545 orang	126,09%
			Jumlah total yang harus dilayani	68.623 orang	
		Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV; Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah total yang terlayani	54.422 orang	107,16%
			Jumlah total yang harus dilayani	52.598 orang	
3	Pekerjaan Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah total yang terlayani	2.822.902 orang	98,21%
			Jumlah total yang harus dilayani	2.874.314 orang	



No.	Bidang Urusan	Indikator Capaian	Rumus	Elemen Data	Capaian
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestic	Jumlah total yang terlayani	400 rumah	100,00%
			Jumlah total yang harus dilayani	400 rumah	
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah total yang terlayani	26 orang	100,00%
			Jumlah total yang harus dilayani	26 orang	
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah total yang terlayani	-	Pada tahun 2021 tidak ada Program Pemerintah Kota Surabaya yang memindah rumah tinggal masyarakat
			Jumlah total yang harus dilayani	-	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah total yang terlayani	-	Tidak ada penegakan perda yang membutuhkan ganti rugi kerugian materil dan kerugian pengobatan
			Jumlah total yang harus dilayani	-	
		Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah total yang terlayani	14.818 orang	100,00%
			Jumlah total yang harus dilayani	14.818 orang	
		Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah total yang terlayani	57.148 orang	98, 57 %
			Jumlah total yang harus dilayani	57.978 orang	
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah total yang terlayani	-	Indikator pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dilakukan kepada seluruh kelurahan tangguh bencana dengan melibatkan seluruh warga
			Jumlah total yang harus dilayani	-	



No.	Bidang Urusan	Indikator Capaian	Rumus	Elemen Data	Capaian
6	Sosial	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah total yang terlayani	324 orang	100,00%
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah total yang terlayani	669 orang	100,00%
			Jumlah total yang harus dilayani	669 orang	
		Pelayanan sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Jumlah total yang terlayani	480 orang	72,73%
			Jumlah total yang harus dilayani	660 orang	
		Pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Jumlah total yang terlayani	225 orang	55,55%
			Jumlah total yang harus dilayani	405 orang	
		Pelayanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah total yang terlayani	960 orang	100,00%
			Jumlah total yang harus dilayani	960 orang	
		Pelayanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah total yang terlayani	5.233 orang	76,50%
			Jumlah total yang harus dilayani	6.840 orang	
		Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah total yang terlayani	266 orang	100,00%
			Jumlah total yang harus dilayani	266 orang	

Sumber: Sekretariat Daerah, 2022



2.1.3.1.1 Pendidikan

Untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS).

2.1.3.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data APK per kecamatan disajikan pada tabel berikut.



Tabel II.36
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	Penduduk usia 3-6 tahun	Siswa di jenjang PAUD	APK	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa di jenjang SD/MI	APK	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Asemrowo	3.184	1.543	43,56%	5.028	4.465	88,80%	2.635	2.269	86,11%
Benowo	4.301	2.675	57,27%	7.276	7.778	106,90%	3.705	4.090	110,39%
Bubutan	5.658	4.136	70,66%	9.627	9.929	103,14%	4.963	2.554	51,46%
Bulak	2.887	1.526	51,51%	4.698	6.866	146,15%	2.396	3.277	136,77%
Dukuh Pakis	3.455	2.032	51,98%	5.802	6.973	120,18%	2.893	4.445	153,65%
Gayungan	2.507	1.330	50,02%	4.145	6.375	153,80%	2.167	2.772	127,92%
Genteng	3.151	3.138	92,19%	5.375	6.909	128,54%	2.847	7.000	245,87%
Gubeng	7.092	5.922	76,20%	12.412	14.953	120,47%	6.369	5.216	81,90%
Gunung Anyar	3.772	3.607	86,37%	6.015	5.288	87,91%	2.870	2.291	79,83%
Jambangan	3.231	1.383	40,61%	5.427	5.610	103,37%	2.688	5.008	186,31%
Karangpilang	4.300	2.790	55,35%	7.171	7.125	99,36%	3.613	4.045	111,96%
Kenjeran	11.932	8.187	65,80%	19.014	19.634	103,26%	9.326	11.507	123,39%
Krembangan	6.933	5.327	72,13%	11.590	14.361	123,91%	5.794	9.632	166,24%
Lakarsantri	3.769	2.239	50,46%	6.220	9.564	153,76%	3.211	5.758	179,32%
Mulyorejo	4.884	5.591	61,02%	8.187	11.540	140,96%	4.101	6.854	167,13%
Pabean Cantian	4.507	2.556	52,36%	7.440	4.764	64,03%	3.788	2.013	53,14%
Pakal	3.690	2.539	62,11%	6.026	8.170	135,58%	3.129	3.931	125,63%
Rungkut	7.117	6.448	82,07%	11.761	12.229	103,98%	5.597	6.292	112,42%
Sambikerep	3.918	1.948	45,64%	6.620	6.908	104,35%	3.292	5.217	158,48%
Sawahan	11.063	4.519	39,09%	19.961	17.178	86,06%	9.978	4.943	49,54%
Semampir	12.250	7.685	61,22%	20.275	21.797	107,51%	9.945	6.941	69,79%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2023



Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	Penduduk usia 3-6 tahun	Siswa di jenjang PAUD	APK	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa di jenjang SD/MI	APK	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Simokerto	5.508	5.323	92,32%	9.384	7.689	81,94%	4.527	4.143	91,52%
Sukolilo	6.856	5.474	60,49%	11.069	13.577	122,66%	5.311	8.497	159,97%
Sukomanunggal	6.139	3.298	50,46%	10.378	11.049	106,47%	5.019	7.428	148,00%
Tambaksari	13.019	9.654	65,58%	22.120	19.196	86,78%	10.914	7.345	67,30%
Tandes	5.528	4.096	67,85%	9.435	12.562	133,14%	4.755	4.183	87,97%
Tegalsari	5.507	4.013	64,95%	9.619	10.937	113,70%	4.755	3.712	78,07%
Tenggilis Mejoyo	3.538	3.188	80,75%	5.610	5.887	104,94%	2.821	3.573	126,66%
Wiyung	4.225	2.462	53,40%	7.096	7.598	107,07%	3.505	3.670	104,71%
Wonocolo	4.744	2.253	44,94%	7.789	8.507	109,22%	3.920	6.144	156,73%
Wonokromo	8.470	6.387	45,30%	14.799	12.467	84,24%	7.739	9.626	124,38%
Total	177.135	123.269	61,40%	297.369	317.885	106,90%	148.573	164.376	110,64%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022 diolah



2.1.3.1.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data APM per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.37
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan
Tahun 2021

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa berusia 7-12 tahun yang berada di jenjang SD/MI	APM	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa berusia 13-15 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs	APM
Asemrowo	5.028	4.450	88,50%	2.635	1.574	59,73%
Benowo	7.276	7.105	97,65%	3.705	2.984	80,54%
Bubutan	9.627	9.401	97,65%	4.963	1.888	38,04%
Bulak	4.698	6.672	142,02%	2.396	2.527	105,47%
Dukuh Pakis	5.802	6.895	118,84%	2.893	3.759	129,93%
Gayungan	4.145	6.088	146,88%	2.167	2.451	113,11%
Genteng	5.375	6.379	118,68%	2.847	5.576	195,86%
Gubeng	12.412	14.350	115,61%	6.369	4.458	70,00%
Gunung Anyar	6.015	5.094	84,69%	2.870	1.708	59,51%
Jambangan	5.427	5.313	97,90%	2.688	3.638	135,34%
Karangpilang	7.171	6.605	92,11%	3.613	3.705	102,55%
Kenjeran	19.014	18.465	97,11%	9.326	8.177	87,68%
Krembangan	11.590	13.662	117,88%	5.794	7.213	124,49%
Lakarsantri	6.220	8.964	144,12%	3.211	4.631	144,22%
Mulyorejo	8.187	11.089	135,45%	4.101	5.704	139,09%
Pabean Cantian	7.440	4.471	60,09%	3.788	1.467	38,73%
Pakal	6.026	7.944	131,83%	3.129	3.214	102,72%
Rungkut	11.761	11.318	96,23%	5.597	5.087	90,89%
Sambikerep	6.620	6.619	99,98%	3.292	4.220	128,19%
Sawahan	19.961	16.201	81,16%	9.978	3.871	38,80%
Semampir	20.275	20.374	100,49%	9.945	5.549	55,80%
Simokerto	9.384	7.101	75,67%	4.527	3.036	67,06%
Sukolilo	11.069	12.647	114,26%	5.311	6.722	126,57%
Sukomanunggal	10.378	10.260	98,86%	5.019	5.920	117,95%
Tambaksari	22.120	18.075	81,71%	10.914	5.454	49,97%
Tandes	9.435	11.800	125,07%	4.755	3.590	75,50%
Tegalsari	9.619	10.295	107,03%	4.755	3.196	67,21%
Tenggilis Mejoyo	5.610	5.480	97,68%	2.821	2.705	95,89%
Wiyung	7.096	7.284	102,65%	3.505	2.765	78,89%
Wonocolo	7.789	7.822	100,42%	3.920	4.955	126,40%
Wonokromo	14.799	11.591	78,32%	7.739	8.018	103,61%
Total	297.369	299.814	100,82%	148.573	129.762	87,34%

Sumber: Dinas Pendidikan, diolah, 2022



Tabel di atas menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pendidikan sudah baik namun perlu dilakukan upaya pemerataan fasilitas layanan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Dari data di atas terdapat beberapa kecamatan yang memiliki APK lebih dari 100%, kondisi ini menunjukkan bahwa di wilayah tersebut jumlah sekolah lebih banyak dari wilayah lain dan sekolah-sekolahnya memiliki kualitas lebih baik, sehingga menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lainnya untuk bersekolah di wilayah tersebut. Sebaliknya kecamatan yang memiliki APK 100% menunjukkan kondisi bahwa di wilayah kecamatan tersebut ketersediaan atau jumlah sekolah sedikit dan kualitas sekolah masih kurang sehingga menyebabkan penduduk usia sekolah cenderung memilih bersekolah di luar wilayah kecamatan. Aspek yang mendorong tingginya nilai APK dan APM adalah sarana prasarana, fasilitas, kualitas tenaga pendidik dan penerapan kurikulum.

2.1.3.1.1.3 Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan (AL) dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir. AL untuk jenjang SD/MI tahun 2017 mencapai angka 100 persen dan konsisten sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2021. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2017 sebesar 100 persen, dan konsisten sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2021. Perkembangan Angka Kelulusan jenjang pendidikan dasar Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.38
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	AL SD/MI (persen)	100	100	100	100	100
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang Lulus	42.621	44.223	46.127	41.677	41.182
1.2	Jumlah Siswa SD/MI Kelas 6	42.621	44.223	46.127	41.677	41.182
2.	AL SMP/MTs (persen)	100	100	100	100	100
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Lulus	41.834	42.282	40.965	38.403	37.413
2.2	Jumlah Siswa SMP/MTs Kelas 9	41.834	42.282	40.965	38.403	37.413

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021



Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah dijenjang masing-masing.

2.1.3.1.1.1 Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Jadi semakin rendah APS, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini, penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung untuk menempuh pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.

Pada tahun 2017 APS di jenjang SD/MI sebesar 0,00% dan konsisten sebesar 0,00% sampai dengan tahun 2020. Begitu pula dengan APS SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 0,00% dan konsisten sebesar 0,00% sampai dengan tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Surabaya. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.39
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	APS SD/MI (persen)	0	0	0	0	0
1.1	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SD/MI	0	0	0	0	0
1.2	Jumlah Siswa SD/MI	282.408	287.830	309.427	312.873	317.885
2.	APS SMP/MTs (persen)	0	0	0	0	0
2.1	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs	0	0	0	0	0



No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
2.2	Jumlah Siswa SMP/MTs	130.505	129.136	134.215	143.329	156.083

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

2.1.3.1.1.2 Angka Melanjutkan (AM)

AM diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian. Angka Melanjutkan SMP/MTs diukur dari perbandingan jumlah siswa baru kelas 7 SMP/MTs/setara di Kota Surabaya terhadap siswa yang lulus ujian kelas 6 SD/MI/setara di Kota Surabaya.

Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 95,03% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 105,51%. Pada tahun 2018, Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs sebesar 92,35% persen dan Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK sebesar 100%. Pada tahun 2019, Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs sebesar 112,30%. Selanjutnya pada tahun 2020, Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs sebesar 88,97%. Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.40
Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Siswa yang melanjutkan ke Jenjang SMP/MTs	40.503	40.841	51.803	37.070	N/A
Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI Tahun Sebelumnya	42.621	44.223	46.127	41.667	41.182
Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs (persen)	95,03	92,35	112,30	88,97	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

Seperti halnya angka kelulusan dan angka putus sekolah, dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa adanya siswa yang melanjutkan pendidikan di luar Kota Surabaya, salah satunya dikarenakan mengikuti orang tua yang pindah tugas dan bekerja.



2.1.3.1.1.3 Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.41
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio Ketersediaan SD/MI	1:312	1:339	1:356	1:325	1:358
1.1.	Jumlah gedung sekolah	900	846	851	857	831
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	281.089	286.373	303.021	278.601	297.369
2.	Rasio Ketersediaan SMP/MTs	1:367	1:350	1:357	1:357	1:372
2.1.	Jumlah gedung sekolah	393	404	412	413	399
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	144.127	141.554	146.952	147.458	148.573

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

Tabel II.42
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya
Menurut Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Asemrowo	7	10	17	5.028	1:306	3	4	7	2.635	1:376
Benowo	14	5	19	7.276	1:383	4	2	6	3.705	1:617
Bubutan	29	2	31	9.627	1:310	8	0	8	4.963	1:620
Bulak	12	6	18	4.698	1:261	4	2	6	2.396	1:399
Dukuh Pakis	22	1	23	5.802	1:252	12	1	13	2.893	1:222
Gayungan	14	1	15	4.145	1:276	5	1	6	2.167	1:361
Genteng	20	1	21	5.375	1:256	12	0	12	2.847	1:237
Gubeng	24	5	29	12.412	1:428	13	0	13	6.369	1:490



Kecamatan	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Gununganyar	14	1	15	6.015	1:401	8	1	9	2.870	1:319
Jambangan	7	5	12	5.427	1:452	6	1	7	2.688	1:384
Karangpilang	12	3	15	7.171	1:478	8	0	8	3.613	1:452
Kenjeran	18	20	38	19.014	1:500	13	9	22	9.326	1:424
Krembangan	31	7	38	11.590	1:305	17	2	19	5.794	1:305
Lakarsantri	22	5	27	6.220	1:230	10	2	12	3.211	1:268
Mulyorejo	24	0	24	8.187	1:341	15	0	15	4.101	1:273
Pabean Cantian	14	4	18	7.440	1:413	5	1	6	3.788	1:631
Pakal	15	6	21	6.026	1:287	7	3	10	3.129	1:312
Rungkut	24	5	29	11.761	1:405	10	2	12	5.597	1:466
Sambikerep	15	6	21	6.620	1:315	16	3	19	3.292	1:173
Sawahan	42	0	42	19.961	1:475	13	1	14	9.978	1:713
Semampir	34	34	68	20.275	1:298	15	16	31	9.945	1:321
Simokerto	18	6	24	9.384	1:391	9	3	12	4.527	1:377
Sukolilo	32	1	33	11.069	1:335	16	2	18	5.311	1:295
Sukomanunggal	27	1	28	10.378	1:371	16	2	18	5.019	1:279
Tambaksari	36	10	46	22.120	1:481	18	4	22	10.914	1:496
Tandes	20	10	30	9.435	1:314	12	2	14	4.755	1:340
Tegalsari	30	2	32	9.619	1:301	10	0	10	4.755	1:475
Tenggilis Mejoyo	17	1	18	5.610	1:312	7	0	7	2.821	1:403
Wiyung	16	1	17	7.096	1:417	11	0	11	3.505	1:319
Wonocolo	18	2	20	7.789	1:389	9	1	10	3.920	1:392
Wonokromo	33	8	41	14.799	1:361	19	2	21	7.739	1:368

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebutuhan akan ketersediaan sekolah baik di jenjang SD dan di jenjang SMP semakin meningkat di setiap tahunnya. Namun jika dilihat rasio ketersediaan sekolah, ada beberapa wilayah kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tinggi dan ada beberapa wilayah kecamatan dengan rasio ketersediaan sekolah rendah. Kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI tertinggi adalah Kecamatan Kenjeran dengan nilai rasio sebesar 1:500, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio terkecil adalah Kecamatan Lakarsantri dengan nilai rasio sebesar 1:230. Pada tingkat



SMP/MTs Kecamatan Sawahan memiliki rasio tertinggi yaitu 1:713 dan Kecamatan Sambikerep merupakan Kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:173.

Rasio kecamatan yang ketersediaan sekolahnya rendah justru menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya tinggi perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari data Dinas Pendidikan tahun 2020 terdapat 371 sekolah SMP/ sederajat yang telah terakreditasi, terdiri dari 232 sekolah yang terakreditasi A, 124 sekolah terakreditasi B dan terdapat 15 sekolah yang terakreditasi C. Sedangkan untuk sekolah SD/ sederajat terdapat 806 sekolah yang terakreditasi, terdiri dari 516 sekolah yang terakreditasi A, 252 sekolah terakreditasi B dan 38 sekolah SD/MI yang terakreditasi C. Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tahun 2020, terdapat 204 lembaga kursus/pelatihan, yang telah terakreditasi 67 lembaga, dan sebanyak 137 lembaga sisanya belum terakreditasi. Fakta bahwa masih adanya sekolah di jenjang SD maupun SMP yang terakreditasi C, kemudian masih adanya lembaga kursus/pelatihan yang belum terakreditasi ini penting untuk diperbaiki kembali guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan untuk menjawab tantangan global seperti saat ini.

Di samping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2020 dari PKBM yang tersebar di kecamatan terdapat peserta pendidikan kesetaraan Paket A sebanyak 938 peserta, sebanyak 304 peserta mengikuti ujian dengan tingkat kelulusan 91,78%. Sedangkan peserta pendidikan kesetaraan Paket B sebanyak 1.697 peserta, sebanyak 726 peserta mengikuti ujian dengan tingkat kelulusan



89,67%. Dan untuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C terdapat 3.644 peserta, sebanyak 1.638 peserta mengikuti ujian dan seluruhnya lulus. Rendahnya tingkat kelulusan peserta ujian Paket A dan B banyak disebabkan karena kurangnya motivasi peserta didik dalam menuntaskan pendidikan kesetaraannya. Hal ini seharusnya dapat menjadi masukan bagi tenaga pendidik di PKBM untuk lebih meningkatkan motivasi peserta didiknya.

2.1.3.1.1.4 Rasio Guru dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula, dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Tabel II.43
Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio Guru SD/MI	1:22	1:21	1:19	1:24	1:23
1.1.	Guru	12.797	14.132	13.798	12.806	13.725
1.2.	Murid	282.408	287.830	310.283	312.873	317.885
2.	Rasio Guru SMP/MTs	1:18	1:18	1:19	1:23	1:23
2.1.	Guru	7.231	7524	6.887	6.250	6.862
2.2.	Murid	128.471	129.136	134.215	143.329	156.083

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.44
Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	40	0	9	0	0	127	10	0	186
SD	56	2	65	12	1	3.323	570	2	4.031
SMP	3	6	4	11	1	1.412	442	3	1.882
Total	99	8	78	23	2	4.862	1.022	5	6.099

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021



Tabel II.45
Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2021

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	4561	104	184	181	4	5.049	109	3	10.195
SD	372	14	69	48	7	8.777	406	1	9.694
SMP	56	3	5	31	5	4.467	412	1	4.980
Total	4.989	121	258	260	16	18.293	927	5	24.869

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

Pada tabel jumlah guru di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat sejumlah pengajar yang belum memenuhi kesesuaian akademik, sehingga masih sangat penting bagi Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas para pengajar baik PNS maupun Non PNS di jenjang pendidikan TK, SD, maupun SMP.

Tabel II.46
Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2021

No	Jenjang	Guru Bersertifikat Pendidik			Jumlah Total Guru			Guru Yang Belum Sertifikasi		
		PNS	Non PNS	Jumlah	PNS	Non PNS	Jumlah	PNS	Non PNS	Jumlah
1	SD	3.665	3.077	6.742	4.031	9.694	13.725	366	6.616	6.982
2	SMP	1.800	1.930	3.730	1.882	4.980	6.862	82	3.050	3.132
Jumlah		5.465	5.007	10.472	5.913	14.674	20.587	448	9.666	10.114

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa masih ada 6.982 guru SD/MI/setara dan 3.132 guru SMP/MTs/setara yang belum sertifikasi. Hal ini disebabkan banyaknya guru non PNS yang tidak dapat didaftarkan sertifikasi mengingat terbatasnya kuota sertifikasi guru dari Pemerintah Pusat dan syarat guru yang diajukan untuk sertifikasi adalah guru PNS.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.



Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan AHH, salah satunya melalui penanganan terhadap penderita penyakit menular dan tidak menular yang dapat dilihat pada tabel berikut. Meski semua penderita telah ditangani, namun tingginya jumlah penderita dari tahun ke tahun, utamanya penyakit hipertensi dan diabetes melitus, serta penyakit menular covid-19, menunjukkan masih diperlukannya perbaikan di bidang pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Data penderita penyakit menular dan tidak menular selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.47**Jumlah Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2017- 2021**

No	Penyakit	Jumlah Kasus				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	TBC	6.488	3.003	7.950	4.151	4.628
2.	COVID-19	0	0	N/A	18.164	67.073*
3.	HIV/AIDS	934	1.096	1.343	786	749
4.	Kusta	124	97	97	47	45
5.	DBD	325	321	277	73	111
6.	Hipertensi	102.599	399.435	720.378*	724.582*	737.258
7.	Diabetes Melitus	N/A	N/A	94.076	94.624	96.279

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Keterangan: *) dihitung berdasarkan estimasi

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan AHH, melakukan berbagai upaya, yang salah satunya melalui layanan cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.48**Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani Kurang Dari 24 Jam Tahun 2017 – 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	30	49	4	154	154
2	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB	30	49	4	154	154



No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Kejadian Luar Biasa tahun 2020 dan 2021 adalah pandemi COVID-19 yang terjadi di 154 kelurahan. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sesuai RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, target penanganan KLB telah ditingkatkan menjadi kurang dari 20 jam.

Untuk kasus Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan 2021, 31 Kecamatan di kota Surabaya telah membentuk Kampung Tangguh Wani Covid-19 di tiap RW nya sebagai upaya untuk mendukung program Pemerintah dalam pencegahan persebaran Covid-19. Data Kampung Tangguh Covid-19 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.49

Daftar Kampung Tangguh Covid-19 Kota Surabaya 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kampung Tangguh
1	Asemrowo	17
2	Benowo	26
3	Bubutan	44
4	Bulak	21
5	Dukuh Pakis	31
6	Gayungan	28
7	Genteng	51
8	Gubeng	51
9	Gunung Anyar	29
10	Jambangan	26
11	Karangpilang	29
12	Kenjeran	37
13	Krembangan	43
14	Lakarsantri	29
15	Mulyorejo	52
16	Pakal	26
17	Pabean Cantian	52
18	Rungkut	74

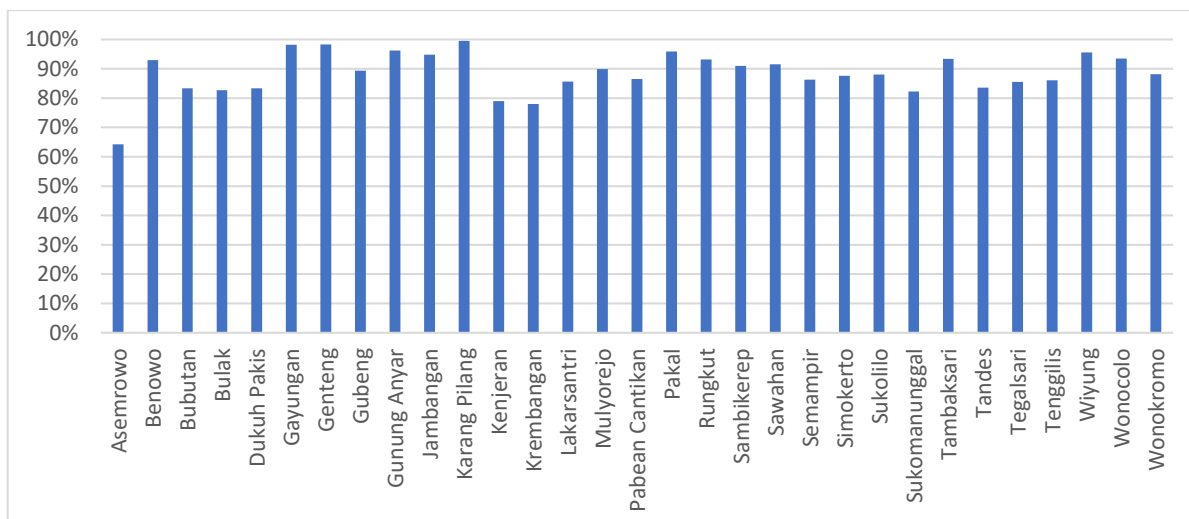


No	Kecamatan	Jumlah Kampung Tangguh
19	Sambikerep	31
20	Sawahan	68
21	Simokerto	48
22	Semampir	49
23	Sukolilo	67
24	Sukomanunggal	36
25	Tambaksari	73
26	Tandes	51
27	Tegalsari	48
29	Tenggilis Mejoyo	25
29	Wiyung	34
30	Wonocolo	44
31	Wonokromo	58

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya, 2022

Kesehatan masyarakat juga diupayakan melalui terwujudnya rumah sehat. Kriteria rumah sehat yang digunakan meliputi tujuh kriteria, yaitu atap berplafon, dinding permanen (tembok/papan), jenis lantai bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi cukup, pencahayaan alami cukup, dan tidak padat huni (lebih besar atau sama dengan 8 m²/orang). Selain itu, sarana sanitasi seperti sarana air bersih, jamban, sarana pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah serta perilaku hidup sehat penghuni rumah menjadi pertimbangan dalam penilaian rumah sehat.

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Persentase rumah sehat dapat dilihat pada gambar di bawah dan diharapkan setiap tahun jumlah rumah sehat meningkat dan derajat kesehatan masyarakat semakin baik.

**Gambar II.14****Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Tahun 2021**

Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2022

Pembentukan kelurahan siaga aktif dan pengembangan Pembinaan Terpadu (Bindu) juga menjadi upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan, secara mandiri. Pada tahun 2021 seluruh kelurahan memiliki Bindu. Persentase kelurahan siaga aktif kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.50**Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelurahan siaga aktif	154	154	154	154	154
2	Jumlah kelurahan siaga	154	154	154	154	154
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Tabel II.51**Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2017 – 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan	42.502	42.791	42.783	35.657	42.100
2	Jumlah ibu nifas	44.963	44.598	44.252	43.904	42.164
3	Persentase (persen)	94,65%	95,95%	96,68%	81,22%	99,85%

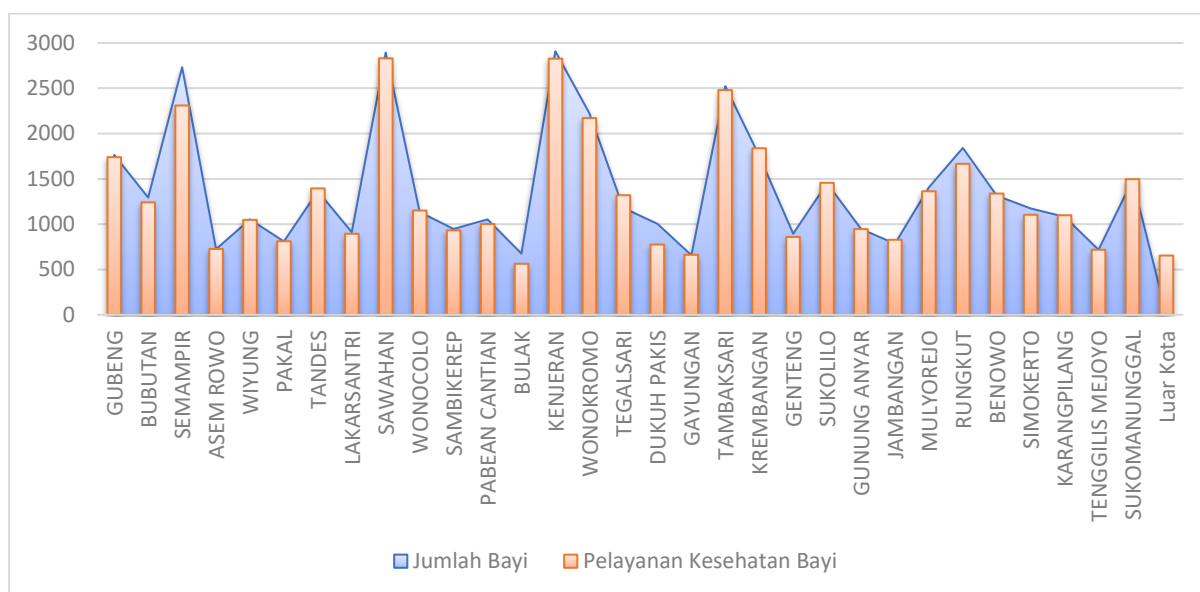
Sumber : Dinas Kesehatan, 2022



Tabel II.52
Cakupan kunjungan bayi Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai standar	40.668	41.070	40.813	40.448	42.248
2	Jumlah bayi	42.377	42.003	41.646	42.034	42.708
3	Persentase (persen)	95,97%	97,78%	98,00%	96,23%	98,92%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022



Gambar II.15

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi per Kecamatan Tahun 2021

Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2022

Pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling banyak sesuai gambar di atas adalah di Kecamatan Kenjeran. Sedangkan pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling sedikit ada di Kecamatan Gayungan.

Tabel II.53
Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	278	254	242	196	148
2	Jumlah balita gizi buruk	278	254	242	196	148
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022



Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu. Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah posyandu balita mengalami penurunan karena terdapat penggabungan beberapa posyandu yang menyesuaikan jumlah balita diwilayahnya masing-masing, dan di tahun 2019 dan 2020 jumlah posyandu balita sebanyak 2.776 dan 2.764. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah posyandu balita sebanyak 2.764 posyandu. Perkembangan dan cakupan posyandu dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.54
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah posyandu	2.797	2.797	2.776	2.764	2.734
2	Jumlah balita	219.367	211.564	209.706	207.881	208.175
3	Rasio posyandu per 1.000 balita	12,75	13,25	13,37	13,30	13,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2022

Dari data tabel di atas, menunjukkan bahwa rasio posyandu per 1.000 penduduk berkisar angka 12-13. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap. Pada tahun 2017, dari 63 Puskesmas induk, sebanyak 21 Puskesmas merupakan puskesmas rawat inap, dan terdapat puskesmas pembantu sebanyak 60 puskesmas. Jika ditinjau dari skala wilayah Kota Surabaya dengan data jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan tahun 2021 sejumlah 2.970.952 jiwa, maka 1 Puskesmas kurang lebih melayani 47.158 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Puskesmas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kota Surabaya belum mencukupi.

Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II.55
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah puskesmas	63	63	63	63	63
2	Jumlah klinik	241	352	286	348	358
3	Jumlah pustu	59	59	59	59	60

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.56
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952
2.	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi)	4	3	4	5	5
3.	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah/ Provinsi	4	4	4	4	3
4.	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	7	7	7	7	7
5.	Rumah Sakit Daerah	2	2	2	2	2
6.	Rumah Sakit Swasta	42	43	43	42	43
Jumlah Rumah Sakit		59	59	59	60	60
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk		0,0179	0,0191	0,0187	0,0209	0,0209

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2017, jumlah dokter sebanyak 5.195 orang, dengan rasio 1,55 per 1000 penduduk. Pada tahun 2018, jumlah dokter sebanyak 4.295 orang, dengan rasio 1,38 per 1000 penduduk. Pada tahun 2019, jumlah dokter sebanyak 2.093 orang, dengan rasio 0,66 per 1000 penduduk. Pada tahun 2020, jumlah dokter sebanyak 2.066 orang, dengan rasio 1,44 per 1000 penduduk. Pada Tahun 2021, jumlah dokter sebanyak 7.484, dengan rasio 2,52 per 1000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2021, Apabila dibandingkan dengan rasio jumlah dokter di Indonesia berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2012 sebesar 19 dokter per 100.000



penduduk, maka pada saat ini jumlah dokter di Kota Surabaya masih belum mencukupi. Selain kecukupan kuantitas SDM Kesehatan, kualitas SDM Kesehatan juga mutlak diperlukan dalam menunjang percepatan pembangunan kesehatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.57
Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952
2	Jumlah dokter	5.195	4.295	2.093	1.561	7.484
3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	1,55	1,38	0,66	0,53	2,52

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2022

Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah berupaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Pencapaian SPM di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.58
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Capaian Pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Instansi	2017	2018	2019	2020	2021
IKM RSUD Bhakti Dharma Husada	78,73	86,41	86,43	88,76	79,89
IKM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	81,12	87,72	88,80	83,48	88,85
SPM RSUD Bhakti Dharma Husada	79,79	86,73	77,98	81,55	86,39
SPM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	85,11	82,65	83,67	82,83	84,85

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

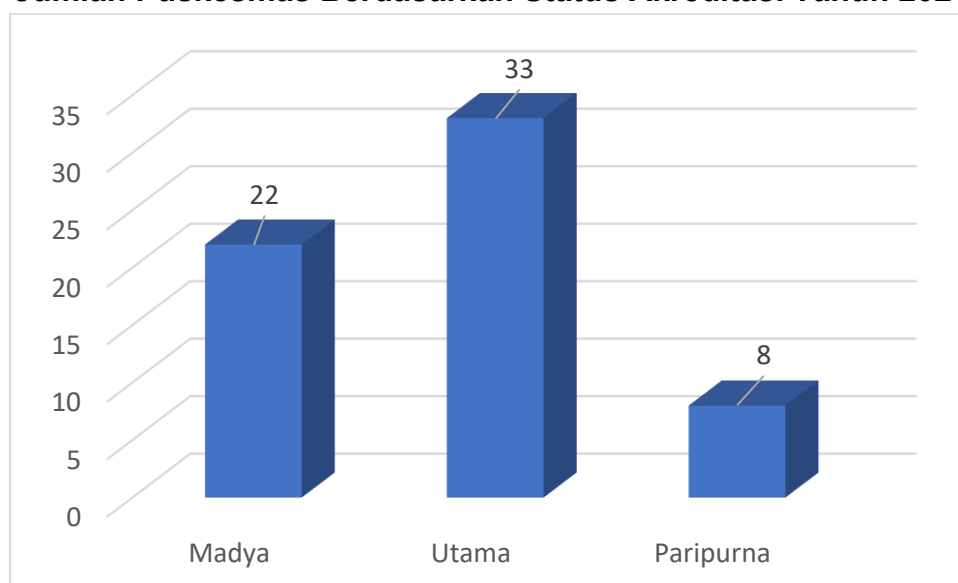
Dari tabel pencapaian nilai IKM dan SPM di RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD dr. Mohamad Soewandhie di atas, dapat dinilai masih tergolong baik, namun cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya proses renovasi gedung yang menghambat pelayanan kesehatan. Meski begitu, tentu hal ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Selain itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga diupayakan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengamanatkan bahwa



puskesmas wajib terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 terdapat 16 puskesmas telah dilakukan akreditasi diantaranya yaitu Puskesmas Pucang Sewu, Puskesmas Dupak, Puskesmas Jagir, Puskesmas Simomulyo, Puskesmas Sawahan, Puskesmas Tanah Kali Kedinding, Puskesmas Balongsari, Puskesmas Medokan Ayu, Puskesmas Gunung Anyar, Puskesmas Keputih, Puskesmas Pegirian, Puskesmas Jeruk, Puskesmas Tenggilis, Puskesmas Putat Jaya, Puskesmas Wonokromo dan Puskesmas Dukuh Kupang. Pada tahun 2017, terdapat 44 puskesmas yang dilaksanakan akreditasi, dan sisanya di tahun 2018. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2021 telah dilaksanakan penilaian akreditasi di semua puskesmas. Untuk rumah sakit umum daerah, pada tahun 2017 RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada telah diakreditasi dengan hasil akreditasi paripurna. Hasil akreditasi puskesmas Kota Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.16
Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan, 2022 diolah

Selain peningkatan mutu, aksesibilitas pelayanan kesehatan, juga diupayakan melalui pemberian jaminan kesehatan, terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehubungan dengan hal tersebut, sejak tahun 2017 telah ditetapkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan survei yang dilakukan secara berkala untuk memperbarui data tersebut. Pada tahun 2017 dan 2018, terdapat sebanyak 291.686 orang MBR dan lebih dari 99 persennya telah mendapatkan jaminan kesehatan. Kemudian di tahun 2019, jumlah MBR diperbarui menjadi 799.540 orang, sehingga pada tahun tersebut cakupan jaminan kesehatan MBR turun menjadi



84,17 persen, meski jumlah MBR yang mendapatkan jaminan bertambah menjadi 672 ribu orang. Lalu di tahun 2020, cakupan jaminan kesehatan untuk MBR kembali ditingkatkan menjadi 92,55 persen, meski jumlah data MBR juga kembali dilakukan pembaruan menjadi 822.105 orang. Kemudian di tahun 2021 jumlah MBR diperbarui menjadi 1.566.307 orang, sehingga pada tahun tersebut cakupan jaminan kesehatan MBR turun menjadi 69,80 persen, meski jumlah MBR yang mendapatkan jaminan bertambah menjadi 1.093.374 orang. Ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota untuk menjamin akses hidup sehat bagi penduduknya. Selengkapnya tentang data perkembangan cakupan jaminan kesehatan bagi MBR dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.59
Masyarakat Berpenghasilan Rendah Mendapatkan Jaminan Kesehatan
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah MBR	291.686	291.686	799.540	822.105	1.566.307
2	Jumlah MBR yang mendapatkan jaminan kesehatan	289.003	290.153	672.998	760.882	1.093.374
3	Persentase (%)	99,08	99,47	84,17	92,55	69,80

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2021

Dalam rangka mencapai Bebas BABS (Buang Air Besar Sembarangan), Pemerintah Kota Surabaya terus berusaha meningkatkan capaian kelurahan yang bebas BABS. Peningkatan yang terjadi, dari tahun 2017 sebanyak 35 persen atau sejumlah 54 kelurahan hingga tahun 2021 sebanyak 48,7 persen atau sejumlah 75 kelurahan. Permasalahan yang paling sering ditemui dalam penanganan BABS menuju kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) adalah banyaknya rumah yang berada pada tanah ilegal dan tidak adanya lahan yang tersedia untuk dilakukan pembangunan jamban sehat sehingga sulit untuk dilakukan intervensi dalam memperoleh bantuan baik dari pemerintah dan/atau swasta.

Pelayanan kesehatan juga dilakukan untuk menjamin makanan olahan yang dijual di masyarakat memenuhi syarat kebersihan (higienis sanitasi). Hasil pengawasan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Masih adanya 10 persen lebih TPM yang belum memenuhi syarat higienis sanitasi merupakan masalah yang cukup penting untuk segera diperbaiki.



Tabel II.60
Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah TPM	N/A	1.700	1.834	1.846	1.797
2	Jumlah TPM yang memenuhi syarat higienis sanitasi	N/A	1.114	1.380	1.408	1.532
3	Persentase (%)	N/A	65,53	75,25	76,27	85,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2022

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1 Pekerjaan Umum

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kota Surabaya berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Pada tahun 2021, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 0,54; di mana jalan Kota Surabaya sepanjang 1.697.394 meter melayani jumlah penduduk sebesar 2.970.952 orang.

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottleneck* di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Pada tahun 2017, panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 1.667,78 km dari panjang jalan 1.689,29 km, dengan persentase 98,73%. Pada tahun 2018, panjang jalan kondisi baik meningkat menjadi 1.678,86 km dari panjang jalan 1.692,53 km, dengan persentase 99,19%. Pada tahun 2019, panjang jalan kondisi baik meningkat menjadi 1.683,11 km dari panjang jalan 1.694,38 km, dengan persentase 99,33%. Sedangkan pada tahun 2020, panjang jalan kondisi baik juga meningkat menjadi 1.686,88 km dari panjang jalan 1.697,39 km, dengan persentase 99,38%. Pada Tahun 2021, panjang jalan kondisi baik menjadi 1.686,88 km dari panjang jalan 1.697,39 km, dengan persentase 99,38%. Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.61****Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	1.667,78	1.678,86	1.683,11	1.686,88	1.686,88
Panjang Jalan (Km)	1.689,29	1.692,53	1.694,38	1.697,39	1.697,39
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	98,73%	99,19%	99,33%	99,38%	99,38%

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2022

2.1.3.1.3.2 Penataan Ruang

Kota Surabaya merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. Kota Surabaya telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 12 tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan melalui integrasi RTRW dengan rencana induk dan rencana-rencana sektoral lainnya.

Rencana induk sektoral mutlak dibutuhkan untuk menjawab perkembangan kota yang pesat dan dinamis. Sepanjang periode 2016-2020, rencana induk yang telah disusun, beserta kebutuhan rencana induk yang masih diperlukan untuk disusun ke depannya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.62**Penyusunan Rencana Induk Kota Surabaya Tahun 2015 – 2021**

Uraian	Tahun Penyusunan
1. Rencana Induk Air Minum	2015
2. Rencana Induk Kereta Api	2015
3. Rencana Induk Pelabuhan	2015
4. Rencana induk Bandara	2015
5. Masterplan Permakaman	2016
6. Masterplan RTH	2016
7. Masterplan Permukiman (RP3KP)	2016
8. Masterplan Sarpras Kebakaran	2016
9. Masterplan Drainase	2017



Uraian	Tahun Penyusunan
10. Masterplan Air Limbah	2018
11. Masterplan Transportasi	2019
12. Masterplan RPPLH	2020
13. Masterplan Energi	2021
14. Masterplan Persampahan	(belum disusun)
15. Masterplan Industri	(belum disusun)
16. Strategi Sanitasi Kota	2019
17. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan	(belum disusun)
18. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	2015
19. Rencana Induk Sistem Drainase Lingkungan di Perkotaan	(belum disusun)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Surabaya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS dan dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam aplikasi perizinan Surabaya Single Window (SSW).

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II.63****IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rumah Tinggal	7.638	4.923	5.723	5.783	6.615
2	Non Rumah Tinggal	1.717	1.773	1.944	1.807	1.572
3	Reklame	1.576	1.148	454	436	101
Total		10.931	7.844	8.121	8.026	8.288

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2022

Tabel II.64**Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB Tahun 2017 – 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah bangunan yang dikenakan sanksi administratif	22 persil	29 persil	9 persil	401 persil	412 persil

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2021

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota dapat diindikasikan dengan jumlah ijin mendirikan bangunan yang diterbitkan. Penerbitan ijin tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kota.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarannya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya ditetapkan 26 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha sebagai kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung salah satu pencapaian target RPJMN III 2015-2019, yang



dikenal dengan “Gerakan 100-0-100”, yakni pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat. Daftar kawasan prioritas penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.65

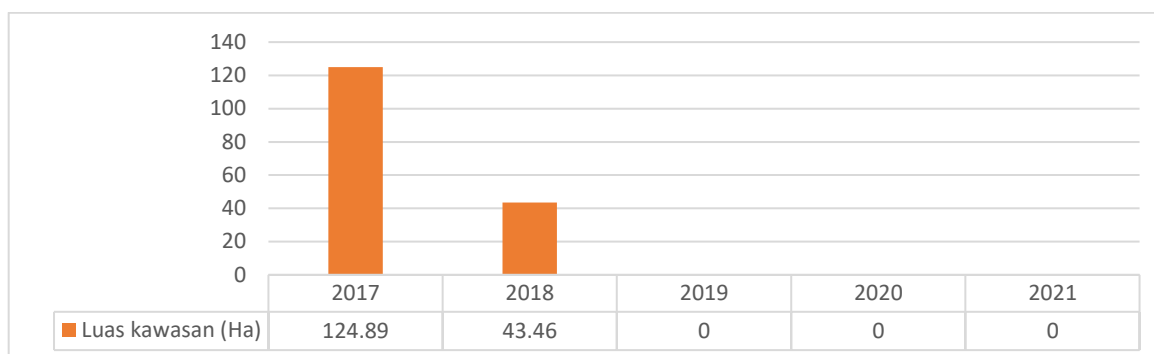
Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
1	Wonokromo	Sawunggaling	PRIORITAS I
2	Bulak	Kenjeran	
3	Bulak	Kedung Cowek	
4	Bulak	Sukolilo Baru	
5	Kenjeran	Bulak Banteng	
6	Rungkut	Rungkut Kidul	
7	Rungkut	Kalirungkut	
8	Semampir	Wonokusumo	
9	Semampir	Sidotopo	
10	Gubeng	Airlangga	PRIORITAS II
11	Mulyorejo	Kalisari	
12	Pakal	Benowo	
13	Simokerto	Tambakrejo	
14	Sukomanunggal	Putat Gede	
15	Tenggilis Mejoyo	Kutisari	
16	Krembangan	Morokrembangan	
17	Asemrowo	Asemrowo	PRIORITAS III
18	Bubutan	Bubutan	
19	Bubutan	Gundih	
20	Bulak	Kenjeran	
21	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	
22	Semampir	Sidotopo	
23	Tandes	Tandes	
24	Wonokromo	Darmo	
25	Krembangan	Dupak	
26	Tandes	Karangpoh	

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2017



Sedangkan perkembangan luas kawasan prioritas, yang ditetapkan melalui SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015, dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar II.17

Perkembangan Luas Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas dan Permukiman Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2022

Dari grafik di atas, luas kawasan prioritas berhasil ditingkatkan kualitasnya hingga semua kawasan tersebut memiliki kualitas permukiman yang sesuai standar. Meski demikian, pengembangan dan pemeliharaan lingkungan permukiman tetap harus dilakukan guna meningkatkan derajat hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Salah satu faktor penilaian kawasan kumuh adalah cakupan layanan sanitasi di kawasan tersebut. Untuk itu dalam menurunkan luasan permukiman kumuh di Kota Surabaya dapat dilakukan dengan upaya pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi. Meski demikian, usaha tersebut seringkali terhambat dengan kepemilikan hak atas tanah.

Terkait dengan upaya perbaikan kualitas kawasan permukiman salah satunya dilakukan melalui perbaikan rumah tinggal tidak layak huni yang diutamakan pada kawasan prioritas. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.66

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dan Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	749	1.629	1.648	1.090	461	623



Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak	97,57%	97,85%	97,97%	98,10%	98,27%	98,27%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak	99,56%	99,6%	99,54%	99,48%	99,12%	99,12%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Bersih	95,51%	96,38%	98,97%	99,90%	99,46%	99,46%

Sumber: Dinas Sosial dan PDAM Surya Sembada, 2022

Pemerintah Surabaya terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh.

Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015, kegiatan RSDK kota Surabaya ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
- Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
- Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;
- Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Dengan sasaran menanggulangi masyarakat miskin di Surabaya.

RSDK Kota Surabaya merupakan kegiatan pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (*community based development*). Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat



meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni secara bertahap, penanganan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya juga dilaksanakan melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.67
Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pemohon Rusun	1.360	1.633	2.105	1.141	1.234

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2022

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 85 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi. Pada tahun 2018, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 93 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi dan pada tahun 2019, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 96 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 19 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.68
Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m ²)	Keterangan
1	Dupak Bangunrejo	Kel. Dupak Kec. Krembangan	18	6	± 3.000	Dibangun th. 1989/1990 (APBN)
2	Sombo	Kel. Simolawang Kec. Simokerto	18	10	± 41.044	Dibangun th. 1993/1994 (APBN)
3	Urip Sumoharjo	Kel. Embongkaliasin Kec. Genteng	21	3	± 3.500	Dibangun th. 1975 direhab th. 2004/2005 (APBD I)
4	Penjaringan Sari	Kel Penjaringan Sari Kec. Rungkut	18	3	± 32.350	Dibangun th. 1995 (APBN)
			21	6		Dibangun th. 2004 (APBN)
			24	2		Dibangun th. 2009 (APBN)
			24	2		Dibangun 2018 (APBD)



No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m ²)	Keterangan
5	Wonorejo	Kel. Wonorejo Kec. Rungkut	21	2	± 5.466	Dibangun th. 2004 (APBN)
			21	4		Dibangun th. 2005/2006 (APBN)
6	Waru Gunung	Kel. Warugunung Kec. Karangpilang	21	10	± 29,845	Dibangun th. 1996 kerjasama dg PERUMNAS
7	Randu	Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran	21	6	± 44.290	Dibangun t. 2008 (APBN)
8	Tanah Merah	Kel. Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran	21	4	± 28.810	Dibangun th. 2008 (APBN)
			24	4		
9	Grudo	Kel dr Soetomo Kec Tegalsari	24	2	± 5.000	Dibangun 2011 (APBN)
10	Pesapen	Kel. Krembangan Selatan Kec. Krembangan	24	1	± 2.500	Dibangun 2011-2012 (APBN)
11	Jambangan	Kel. Jambangan Kec. Jambangan	24	2	± 2.977,3	Dibangun 2011-2012 (APBN)
12.	TPI/PPI Romokalisari (1-3)	Kel. Romokalisari Kec. Benowo	24	10	± 25.000	Dibangun 2013-2015 (APBN)
13.	Siwalankerto	Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo	24	2	± 8.000	Dibangun 2012 (APBN)
			24	2		Dibangun 2018 (APBD)
14.	Jl. Bandarejo	Kel. Sememi Kec. Benowo	24	2	± 4.320	Dibangun 2012 (APBN)
15.	Gununganyar	Kelurahan Gununganyar Tambak Kecamatan Gununganyar	36	1	± 9.438	Dibangun 2014 (APBN)
			24	1	± 4.282	Dibangun 2019 (APBN)
16.	Dukuh Menanggal	Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan	24	2	± 14.388	Dibangun 2017 (APBN)
17	Keputih	Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo	36	4	± 258.140	Dibangun 2016 (APBN)
			36	2		Dibangun 2017 (APBN)
			36	2		Dibangun 2018 (APBN)
18	Pondok Benowo	Babat Jerawat, Kecamatan Pakal	24	2	± 4.129	Dibangun 2019 (APBN)
19	Indrapura 135	Pabean Cantian	24	2	± 5.466	Dibangun 2019 (APBN)
Total			99			

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2022



2.1.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum pada Tabel II.35 di atas, upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja SPM, antara lain:

- 1) Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani sebanyak 14.818 orang melalui aktivitas penegakan perda sesuai SOP menggunakan sarana prasarana serta SDM Satpol PP sesuai standar.
- 2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan cara melakukan identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana kepada sejumlah 56.328 orang dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kepada 820 orang.
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kepada sebanyak 324 orang. Aktivitas yang mendukung pelayanan tersebut antara lain, pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana, melakukan respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, respon cepat penyakit KLB dan/atau wabah zoonosis, serta pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana.



- 4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan cara Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak sebanyak 38 orang. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan sebanyak 8 orang.

2.1.3.1.5.1 Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.69
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	663	677	781	781	783
2	Jumlah penduduk	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,15	2,18	2,47	2,62	2,63

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2022

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3).

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan



demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2017, sebanyak 41.111 pelanggaran K3 telah diselesaikan atau sebesar 100 persen, dan pada tahun 2018, jumlah pelanggaran menurun menjadi 24.095 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah pelanggaran menurun menjadi 16.382 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Pada tahun 2020, jumlah pelanggaran sebanyak 5.274 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah pelanggaran sebanyak 4.124 dan pelanggaran telah diselesaikan. Data penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada tabel berikut. Khusus di tahun 2020, jumlah pelanggaran terbesar adalah pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan virus covid-19, yakni sebanyak 829 pelanggaran.

Tabel II.70
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	41.111	24.095	16.382	5.274	4.124
2	Jumlah pelanggaran K3	41.111	24.095	16.382	5.274	4.124
3	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2022

Selain anggota Satpol PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kota Surabaya pada tahun 2017 setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 63 personil Linmas, dan pada tahun 2018, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 64-65 personil Linmas. Pada tahun 2019, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 65 personil Linmas. Sedangkan pada tahun 2020, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 66 personil Linmas. Pada tahun 2021, setiap 10.000 penduduk juga dilayani oleh 66 personil Linmas. Data rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II.71
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Linmas	19.372	20.033	20.641	19.584	19.592
2	Jumlah penduduk	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952
3	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	63,00	64,73	65,33	65,92	65,94

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya, 2022

Terdapat penurunan jumlah personil Linmas yang disebabkan oleh adanya petugas Linmas yang pindah ke luar kota, menikah, memiliki pekerjaan, serta meneruskan pendidikannya. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pemasangan CCTV di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Tabel II.72
Rasio Kejadian Unjuk Rasa Yang Mengarah Tindakan Anarkis
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa	226	236	227	215	297
2	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa yang Mengarah Kejadian Anarkis	10	11	13	10	8

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022

Masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis. Pada tahun 2017 terdapat 10 kejadian anarkis dari 226 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, sedangkan di tahun 2018, hanya ada 11 kejadian anarkis dari 236 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk tahun 2019, hanya ada 13 kejadian anarkis dari 227 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2020, ada 10 kejadian anarkis dari 215 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, sedangkan di tahun 2021 ada 8 kejadian anarkis dari 297 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Guna mencegah dan meminimalisasi kondisi tersebut, diperlukan kesiagaan petugas Linmas dan Satpol PP di Kota Surabaya.



2.1.3.1.5.2 Penanganan Bencana Kebakaran

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah satu penyebab bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

Tabel II.73
Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2017 – 2021

No	Penyebab	2017	2018	2019	2020	2021
1	Hubungan Listrik	114	107	75	157	200
2	Api Terbuka	239	301	186	220	246
3	Api Mekanis	0	4	0	0	0
4	Dalam Penyelidikan	234	70	254	241	257
5	Tidak Ada Keterangan	2	14	0	0	2
Total		589	496	515	617	705

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2022

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.74
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap maksimal 15 menit	589	496	515	617	705
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	589	496	515	617	705

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, 2022

Sepanjang tahun 2017, jumlah kejadian kebakaran yaitu 589 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 589



kejadian. Pada tahun 2018, jumlah kejadian kebakaran yaitu 496 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 496 kejadian. Pada tahun 2019, jumlah kejadian kebakaran yaitu 515 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 515 kejadian, sebagaimana tampak pada tabel di atas. Sedangkan, pada tahun 2020, jumlah kejadian kebakaran yaitu 617 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 617 kejadian. Untuk tahun 2021, jumlah kejadian kebakaran yaitu 705 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 705 kejadian, sebagaimana tampak pada tabel di atas.

Sedangkan untuk penyebab kebakaran di tahun 2021, dari total 705 kejadian, terdapat 446 kejadian yang sudah diketahui penyebabnya, yakni sebagian besarnya karena kelalaian manusia. Dari sumber api terbuka, sebanyak 246 kejadian, sebagian besar disebabkan karena kelalaian dalam meninggalkan sisa pembakaran sampah atau terdapat puntung rokok yang di buang sembarangan. Sedangkan dari sumber listrik, sebanyak 200 kejadian, sebagian besarnya karena hubungan arus pendek

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit, jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit direncanakan dapat mencakup jumlah penduduk Kota Surabaya sesuai dengan waktu respon yang telah ditentukan.

Tabel II.75
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	64	74	86	86	86
2	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	20	21	21	21	21
3	Jumlah Penduduk	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952
4	Cakupan Pelayanan WMK	93%	93%	94%	95,6%	95,6%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2022

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:



- a. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
- b. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
- c. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
- d. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

2.1.3.1.6 Sosial

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar.

2.1.3.1.6.1 PMKS yang Ditangani

Bentuk penanganan yang diterima PMKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanan, pembinaan mental, pemberian beasiswa, dan pelayanan di 5 (lima) UPTD Dinas Sosial, yaitu UPTD Griya Werdha melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, UPTD Kampung Anak negeri yang melayani dan menangani anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar, UPTD Babat Jerawat melayani dan menangani eks penderita kusta, UPTD Ponsos Kalijudan melayani dan menangani anak berkebutuhan khusus dan pengasramaan mahasiswa miskin berprestasi serta UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan, penderita psikotik dan PMKS hasil penertiban.



Tabel II.76
Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PMKS yang ada	47.633	58.129	77.808	73.176	62.243
2	Jumlah PMKS yang ditangani	28.643	36.098	46.765	44.435	31.516
3	Persentase PMKS yang ditangani (persen)	60,13	62,09	60,10	60,72	50,63

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2022

Secara umum, jumlah PMKS menurun dari tahun 2019 sebanyak 77.808 orang menjadi 73.176 orang pada tahun 2020 dan menjadi 62.243 orang di Tahun 2021. Prosentase PMKS yang ditangani sepanjang tahun 2019-2020 semakin meningkat yaitu dari 60,10 persen menjadi 60,72 persen dan pada tahun 2021 sebesar 50,63 persen. Hal tersebut tidak lepas dari upaya pengentasan PMKS dilakukan melalui pemulangan ke daerah asal dan pelatihan PMKS usia produktif. Namun demikian, adanya jenis PMKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanaan, pembinaan maupun pelayanan mental di UPTD terkait.

Selain PMKS dari penduduk Kota Surabaya sebagaimana tabel di atas, di Kota Surabaya juga terdapat PMKS dari penduduk non Surabaya. Mayoritas PMKS ini merupakan pendatang dari luar Kota Surabaya. Banyaknya pendatang ini rentan menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Jumlah PMKS dari penduduk non Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.77
PMKS Penduduk non Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah PMKS non Surabaya	1.609	650	669	1.137	1.252

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PMKS oleh Pemerintah Kota Surabaya perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PMKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS. PSKS merupakan komponen masyarakat yang dapat diandalkan sebagai mitra kerja Pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Peran aktif PSKS dapat dilihat dari berkurangnya PMKS. Jumlah PSKS aktif bisa dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel II.78
PSKS Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Total PSKS	1.462	3.312	1.551	1.090	1.159
PSKS Aktif	N/A	N/A	1.016	645	996

Sumber: Dinas Sosial, 2022

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar.

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya cenderung meningkat hingga tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, yaitu sebesar 1.520.041 pada tahun 2018 menjadi 1.566.846 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 1.582.564. Pada tahun 2021 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami penurunan menjadi 1.572.888 hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Adapun data tahun 2016 belum dapat disediakan dikarenakan anggaran untuk Sakernas besar (bulan agustus) pada tahun 2016 digeser oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan yang lain. Secara rinci, rasio angkatan kerja 15 tahun keatas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.79
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas	1.495.837	1.520.041	1.566.846	1.582.564	1.572.888
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	2.254.188	2.269.293	2.283.861	2.325.749	2.337.229
3	Rasio angkatan kerja	0,66	0,67	0,69	0,68	0,67

Sumber : BPS Kota Surabaya, Januari 2022



2.1.3.2.1.1 Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.80

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha	280	226	235	347	283
2	Jumlah Sengketa Selesai	N/A	120	112	125	117
3	Jumlah Perusahaan	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782
4	Rasio sengketa	2,19	1,77	1,84	2,72	2,42

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2021

Pada tahun 2017 terdapat 280 sengketa. Sengketa pada tahun 2017 tersebut dipicu oleh kenaikan UMK yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan adanya hak-hak pekerja yang belum terpenuhi. Jumlah sengketa mengalami penurunan sebesar 226 pada tahun 2018 sebagai dampak dari upaya pemeliharaan hubungan industrial yang baik. Tahun 2019 kembali naik menjadi 235 sengketa dengan kasus yang sama dengan tahun 2017 yaitu terjadinya PHK. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kasus meningkat tajam menjadi 347 kasus, hal ini dipicu oleh gelombang PHK yang cukup besar dikarenakan banyak perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 dan pada tahun 2021 jumlah sengketa mengalami penurunan menjadi sebesar 283 sengketa.

2.1.3.2.1.2 Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi

Dalam data pengangguran terbuka, kontribusi terbesar adalah penduduk yang mempunyai pendidikan terakhir SMA maupun SMK, sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai. Data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.81

Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun 2019
1	Tidak/belum pernah sekolah	8.738
2	Tidak/belum tamat SD	



No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun 2019
3	Sekolah Dasar	
4	SMP	9.803
5	SMA	56.371
6	SMK	
7	Diploma I/II/III/Akademi	17.000
8	Universitas	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2020

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, sertifikasi, pemagangan, bimbingan keterampilan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.

Jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 8.035 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 4.305 orang. Pada tahun 2018, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 8.288 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 5.805 orang. Pada tahun 2019, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 9.235 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 6.065 orang. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 4.507 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 2.570 orang. Pada tahun 2021, pencari kerja yang difasilitasi sebesar 5.132 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 2.815 orang. Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.82
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan	4.305	5.805	6.065	2.570	2.815
2	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	8.035	8.288	9.235	4.507	5.132

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2022

Penurunan jumlah pencari kerja yang difasilitasi maupun ditempatkan disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi hampir sepanjang tahun 2020 dan juga di tahun 2021 yang berdampak pada turunnya permintaan tenaga kerja dari



perusahaan. Diharapkan kegiatan fasilitasi yang terus dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bisa efektif mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Diharapkan dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya pencari kerja juga mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal agar mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

Salah satu hal yang masih menjadi fokus Pemerintah Kota Surabaya adalah penempatan peserta pelatihan pada pasar kerja. Penyerapan tenaga kerja hasil pelatihan Pemerintah Kota Surabaya masih tergolong rendah. Data peserta pelatihan yang ditempatkan pada pasar kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.83
Penempatan Kerja Peserta Pelatihan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah peserta pelatihan	920	2872	1085	126	441
Peserta pelatihan ditempatkan	77	560	14	3	0
Persentase (%)	8,37	19,50	1,29	2,38	0

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2022

2.1.3.2.1.3 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3), dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja. Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021. Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.84
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	5.215	6.689	7.801	9.335	12.746
2	Jumlah Perusahaan	12.782	12.782	12.782	12.782	12.780
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 (persen)	40,80	52,33	61,03	73,03	99,73

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2022



Pada tahun 2017 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 5.215 perusahaan atau 40,80% dari total perusahaan yang terdaftar. Pada tahun 2018, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 6.689 perusahaan atau 52,33% dari total perusahaan yang terdaftar. Pada tahun 2019, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 7.801 perusahaan atau 61,03% dari total perusahaan yang terdaftar. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 9.335 perusahaan atau 73,03% dari total perusahaan yang terdaftar. Untuk tahun 2021 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 12.780 perusahaan atau 99,73% dari total perusahaan yang terdaftar.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pengarusutamaan gender sejatinya dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Sejak tahun 2017 hingga 2021, nilai IPG cenderung meningkat dikarenakan keterkaitannya dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surabaya yang semakin meningkat. Sedangkan nilai IDG dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena IDG menitikberatkan pada partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Sejauh ini, di Kota Surabaya, pembentukan nilai IDG lebih banyak dipengaruhi faktor alami dari kemampuan individu. Karenanya masih diperlukan strategi-strategi khusus dalam percepatan partisipasi perempuan di sektor ekonomi dan politik.

Tabel II.85

Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,66	93,57	93,68	93,70*	93,90*
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	82,89	83,29	83,88	82,86	82,82

Sumber : BPS Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur, 2022

*) angka sementara



2.1.3.2.2.1 Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya

Pada tahun 2017 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 12.125 orang dan di tahun 2018, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 24.476 orang. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 23.903 orang. Dan untuk tahun 2021 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 12.167 orang. Data partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.86
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pekerja Perempuan	583.772	587.684	617.965	600.845	312.338
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya	12.125	21.365	24.476	29.380	12.167
3	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota (%)	2,07	3,63	3,96	4,89	3,89

Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia & Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bekerja di luar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

2.1.3.2.2.2 Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya pada tahun 2019, sebesar 617.965 orang atau 94,05% dari jumlah angkatan kerja perempuan dan menurun di tahun 2020 menjadi sebesar 600.845 orang. Kemudian di tahun 2021 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 312.338 orang atau 53,43%. Salah satu penyebabnya adalah dampak pandemi Covid-19 yang memaksa banyak perusahaan untuk melakukan PHK atau merumahkan pekerjanya. Data partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II.87
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah angkatan kerja perempuan	612.988	617.096	657.039	655.746	584.465
2.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	583.772	587.684	617.965	600.845	312.338
3.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	95,23	95,23	94,05	91,63	53,43

Sumber : BPS dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2022

2.1.3.2.3 Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.88
KDRT Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga	935.089	953.888	974.740	957.188	974.298
2	Jumlah KDRT	26	37	10	13	34
3	Rasio KDRT	1:35.965	1:25.781	1:97.474	1:73.630	1:28.656

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, 2022

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Data pada tabel di atas jumlah KDRT pada tahun 2017 sebanyak 27 kejadian dan mengalami fluktuasi di tahun 2018-2021. Salah satu upaya yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan tetap waspada terhadap semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagian korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat di antaranya adalah PPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), Pos Curhat dan Halo Anak Surabaya serta Satgas perlindungan perempuan dan Anak. Meski



demikian, kualitas pelayanan pengaduan tersebut masih perlu ditingkatkan karena nilai kepuasan terhadap pelayanan PPTP2A di tahun 2020 masih sebesar 84 persen. Meski sudah baik, namun pada tahun 2018 hingga 2019 kualitas pelayanan masih sebesar 72,7 persen dan 75,43 persen berturut-turut.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *Trafficking* (perdagangan orang), untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.89

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	138	123	342	235	138
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan	138	123	342	235	138
3	Persen penyelesaian pengaduan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, 2022

Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan di *shelter* (rumah aman). Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan penguatan terhadap peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak sebagai salah satu upaya untuk menekan angka permasalahan perempuan dan anak. Jumlah jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak pada tahun 2017- 2021 bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.90****Jejaring Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak Tahun 2017 – 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak (lembaga)	56	56	62	63	70

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota berupaya untuk mewujudkan Kecamatan yang Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Anak. Pada tahun 2017, terdapat 15 kecamatan yang responsif gender dan 50 kelurahan ramah anak, dan sampai dengan tahun 2018, terdapat 19 kecamatan yang responsif gender dan 81 kelurahan ramah anak. Pada tahun 2020 terdapat 31 kecamatan sudah responsif gender dan 119 kelurahan ramah anak. Sampai dengan tahun 2021, seluruh 31 kecamatan sudah responsif gender dan 153 kelurahan ramah anak. Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung pengarusutamaan gender adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan usia produktif. Jumlah perempuan usia produktif yang mengikuti pemberdayaan ekonomi tahun 2017 – 2021 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.91

**Perempuan Mengikuti Pemberdayaan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah perempuan mengikuti pemberdayaan ekonomi	218	177	197	0	50

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

2.1.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya meningkat sejak tahun 2017 yaitu pada tahun 2017 sebesar 167,946 kg/kapita/th dan pada tahun 2018 sebesar 521,49 kg/kapita/th. selanjutnya pada tahun 2019 menjadi 310,95 kg/kapita/th. Selanjutnya pada tahun 2020 menjadi 216,55 kg/kapita/th dan pada tahun 2021 sebesar 248,28 kg/kapita/th. Hal tersebut dikarenakan produksi beras dari daerah penghasil pangan menurun.



Tabel II.92
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	561.380.280	1.613.871.200	982.443.190	643.307.412	737.617.453
Jumlah Penduduk (jiwa)	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952
Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	167,946	521,49	310,95	216,55	248,28

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat disampaikan bahwa Pola Pangan Harapan masyarakat kota Surabaya pada tahun 2018 mencapai 96,76. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 95,5 maka capaian kinerjanya mencapai 101,32%. Namun, pada tahun 2019 PPH masyarakat kota Surabaya menurun menjadi 96,1. Hal ini dikarenakan ada pergeseran pola konsumsi pangan kota Surabaya dari yang semula mengutamakan sumber energi karbohidrat (padi-padian dan umbi-umbian) menjadi sumber protein. Pada tahun 2020 PPH masyarakat Kota Surabaya meningkat lagi menjadi 96,25 dan pada tahun 2021 PPH masyarakat Kota Surabaya menurun menjadi 94,48.

Tabel II.93
Pola Pangan Harapan Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pola Pangan Harapan	95,62	96,76	96,1	96,25	94,48

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022



Selain permasalahan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan perhatian terhadap keamanan pangan segar yang dikonsumsi oleh masyarakat Surabaya. Setiap tahun dilakukan survei dan pengambilan sampel pangan segar untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi aman. Hasil pengambilan sampel pangan segar Kota Surabaya pada tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.94
Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah sampel pangan segar	1.900	1.920	2.003	2.060	2.061
Jumlah sampel tidak memenuhi syarat keamanan	248	210	210	44	149

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

2.1.3.2.4 Pertanahan

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan Rencana Rincinya. Pada tahun 2016, sebanyak 744 aset tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat dan pada tahun 2017 sebesar 16,56 persen dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat. Pada tahun 2018, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 20,27 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Sedangkan pada tahun 2019, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 20,36 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Pada tahun 2019, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 20,36 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Selanjutnya pada tahun 2020,



tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 44,20 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Sedangkan untuk tahun 2021 tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 50,04 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Pengamanan administrasi berupa pencatatan/inventarisasi aset, sertifikasi dan pengamanan fisik berupa pemasangan pagar, papan, patok merupakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam meningkatkan pengelolaan tanah aset bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun masih terdapat aset tanah maupun bangunan yang belum diamankan secara administrasi dan fisik.

Luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dibagi menjadi dua, yaitu Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur dan Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur. Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur diantaranya pemanfaatan tanah untuk jalan, jembatan, dan saluran. Selanjutnya, Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur diantaranya pemanfaatan tanah untuk makam, lapangan olahraga, taman, dan lain-lain.

Tabel II.95
Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat
Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Aset Pemerintah yang telah bersertifikat	1.076	1.317	1.323	1.505	199
Total aset pemerintah	6.497	6.497	6.497	3.405	3.405
Persentase Aset Pemerintah yang telah bersertifikat (%)	16,56	20,27	20,36	44,20	50,04

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Surabaya, 2021

Total aset 2017-2018 adalah aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya

Total aset 2020 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh DPBT

Sementara itu, luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang bersertifikat sampai dengan tahun 2017 mencapai 395.939 m² dan sampai dengan tahun 2018 luas lahan aset yang bersertifikat menjadi 726.071 m². Sedangkan sampai dengan tahun 2019, luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang bersertifikat mencapai 2.429.216,11 m² dan sampai dengan tahun 2020 luas lahan aset yang bersertifikat meningkat menjadi 2.889.606,11 m². Kemudian pada tahun 2021, luas lahan aset yang bersertifikat kembali bertambah menjadi 3.854.505,11 m². Data luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II.96
Luas Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Bersertifikat
Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Akumulasi Luas Lahan Aset Bersertifikat (m ²)	395.939	726.072	2.429.216	2.889.606	3.854.505
Jumlah Luas Wilayah Aset (m ²)	61.834.608	63.173.396	64.552.306	64.688.802	65.653.701
Presentase Luas Lahan Aset Bersertifikat (%)	0,64	1,15	3,76	4,47	5,87

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

Sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat ke depannya, terdapat peningkatan aktivitas pergerakan orang atau barang di Kota Surabaya. Aktivitas pergerakan tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Untuk mendorong pengembangan perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kota Surabaya, diperlukan pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur bagi kepentingan umum seperti pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat, Jalan Lingkar Luar Timur, Kebun Raya Mangrove di Wonorejo dan Gunung Anyar, TPA Benowo, serta Makam Waru Gunung.

Untuk mewujudkan pembangunan sarana prasarana bagi kepentingan umum tersebut, perlu dilakukan pengadaan tanah. Hingga akhir tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya telah membebaskan lahan seluas 12,3 Ha untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan lahan seluas 11,8 Ha untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur. Untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan Jalan Lingkar Luar Timur tidak terlepas dari kontribusi pengembang yang terkena rencana pembangunan tersebut. Adapun untuk RTH Kebun Raya Mangrove Wonorejo luas yang telah dibebaskan sebesar 2,08 Ha dan untuk Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar sebesar 2,24 Ha. Lahan yang telah dibebaskan hingga akhir tahun 2020 untuk sarana kebersihan TPA Benowo seluas 22,6 Ha. Adapun lahan yang telah dibebaskan untuk lokasi makam Waru Gunung seluas 3,31 Ha.

Tabel II.97
Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	24	30	30	33	44



No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
2.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	2	2	6	2	28
3.	Persen Kasus yang Diselesaikan	8,33%	6,67%	20%	6,06%	63,64%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

Kasus tanah di atas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar di Pengadilan. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya).

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya pada tahun 2017 sebanyak 3.234,41 ton/hari, pada tahun 2018 sebanyak 2.164,43 ton/hari, pada tahun 2019 sebanyak 2.224,27 ton/hari, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 2.222,62 ton/hari, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 1.752,50 ton/hari sebagaimana rekap data pada tabel berikut.

Tabel II.98
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA
Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Volume Produksi Sampah (ton/hari)	3.234,41	2.164,43	2.224,27	2.222,62	1.752,50
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (ton/hari)	1.678,36	1.666,83	1.969,87	1.958,41	1.585,26

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang



akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Data terkait jumlah TPS tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.99
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk	3.342.627	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952
2	Jumlah TPS (unit)	185	185	187	187	190
3	Jumlah TPS 3R	3	3	4	9	9

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Perlunya pengetahuan tentang peduli lingkungan oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan pada peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan. Kondisi lingkungan yang kurang baik akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan jika dilihat pada tabel di bawah naik setiap tahunnya. Namun tetap diperlukan adanya peningkatan Kerjasama dalam pengembangan pemasaran daur ulang maupun peningkatan gerakan terhadap pengelolaan sampah plastik.

Tabel II.100
Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan kebersihan	858	922	1.028	1.082	909

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Di samping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) perlu diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota.

Luasan RTH publik Kota Surabaya sampai dengan tahun 2016 mencapai 21,73 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 6.853,46 Ha yang meliputi RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan fasum dan fasos, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, RTH taman dan jalur hijau. Pada tahun



2017 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,75 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.275,27 Ha. Pada tahun 2018 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,88 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.321,93 Ha. Pada tahun 2019 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,91 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.329,82 Ha. Sedangkan pada tahun 2020 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,99 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.356,96 Ha. Untuk tahun 2021 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 22,00 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.356,96 Ha. Secara rinci luasan RTH publik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.101
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2017 – 2021

No.	Jenis RTH Publik	2017	2018	2019	2020	2021
1	RTH makam	283,53	283,53	283,53	283,53	284,95
2	RTH lapangan dan stadion	355,35	355,86	359,86	360,58	361,08
3	RTH telaga/ waduk/ boezem	191,86	192,08	196,29	198,23	198,23
4	RTH dari fasum dan fasos permukiman	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50
5	RTH kawasan lindung dan pesisir timur	4.548,59	4.548,59	4.570,33	4.570,33	4.570,33
6	RTH hutan	55,81	55,81	57,55	66,03	66,03
7	RTH taman dan jalur hijau (JH)	1.646,10	1.646,10	1.672,75	1.672,75	1.672,75
Jumlah Luasan RTH Publik total (Ha)		7.286,74	7.287,48	7.345,82	7.356,96	7.358,87
Luas Kota Surabaya		33.451	33.451	33.451	33.451	33.451
Persentase luas RTH terhadap luas kota (persen)		21,78	21,79	21,96	21,99	22,00

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2022

Secara kuantitas, proporsi dan jumlah RTH publik di Kota Surabaya telah memenuhi standar minimum kebutuhan RTH publik suatu kota, namun sebagian besar dari RTH publik tersebut masih perlu untuk dimanfaatkan atau difungsikan secara optimal sebagai paru-paru kota. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan, pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum diarahkan optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh Kota Surabaya serta melibatkan partisipasi/peran serta masyarakat dan pihak swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai *stakeholder*.



Keberadaan industri dan tempat usaha yang semakin pesat di kota Surabaya berkaitan dengan adanya pencemaran lingkungan berupa pencemaran air, saluran drainase, polusi udara, dan kebisingan. Di kota Surabaya kasus dugaan pencemaran lingkungan masih terjadi. Jumlah kasus dugaan pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan masyarakat pada tahun 2017 jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 54 kasus yang secara keseluruhan juga dapat ditangani. Pada tahun 2018, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 66 kasus, dan sebanyak 66 kasus dapat ditangani. Pada tahun 2019, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 59 kasus, dan sebanyak 59 kasus dapat ditangani. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 43 kasus, dan sebanyak 43 kasus dapat ditangani. Dan pada tahun 2021, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 51 kasus, dan sebanyak 51 kasus dapat ditangani.

Berikut rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.102
Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah permasalahan lingkungan	54	66	59	43	51
2	Jumlah permasalahan lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Kota	54	66	59	43	51
3	Persentase permasalahan lingkungan yang ditangani (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Dampak dari tercemarnya lingkungan hidup adalah rusaknya ekosistem alami, lingkungan tersebut tercemar akibat kegiatan manusia, baik melalui kegiatan industri ataupun kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah dan sampah. Berikut merupakan ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan di kota Surabaya. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa dengan terus meningkatnya ketaatan/kepatuhan para pengusaha terhadap aspek lingkungan serta meningkatnya kualitas sistem pengawasan dampak lingkungan oleh pemerintah Kota Surabaya.



Tabel II.103
Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan
Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kegiatan usaha yang diawasi	200	200	200	200	200
Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi aspek administrasi dan teknis	100	200	200	180	190

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disebabkan oleh berbagai jenis kegiatan usaha yang berbeda-beda baik dalam bentuk industri, rumah sakit, hotel, *mall*, apartemen, maupun kantor. Dari jenis kegiatan usaha tersebut bisa ditentukan limbah apa yang dihasilkan baik padat, cair, dan udara. Limbah padat yaitu berupa sampah domestik maupun sampah B3. Limbah cair dihasilkan dari kegiatan usaha yang menggunakan air, baik itu domestik maupun air proses. Sedangkan pencemaran udara antara lain berupa gas buang hasil dari pembakaran seperti adanya *boiler*, *genset*, *furnace*, *dryer*, serta suara kebisingan dari kegiatan usaha. Dengan adanya beragam aktivitas dari kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, maka perlu adanya tolak ukur kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Di antara pelaku usaha ada yang sudah melakukan seluruh pengelolaan lingkungan dengan baik, dan juga ada yang belum melakukan seluruhnya. Oleh karena itu untuk menginventarisir penataan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan suatu upaya pengawasan dan pemantauan yang diwujudkan dalam bentuk penilaian ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan antara lain aspek administrasi (aspek ini meliputi perizinan dan rekomendasi dokumen lingkungan) dan aspek teknis (aspek ini meliputi pengendalian pencemaran air bagi yang berpotensi menghasilkan limbah cair, pengendalian pencemaran udara bagi yang menggunakan alat penghasil emisi, pengelolaan TPS Limbah B3). Nilai inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai target pencapaian dan sistem kontrol bersama.

Pembuangan limbah domestik dan industri di sepanjang Kali Surabaya mengakibatkan kondisi fisik sungai mengalami pencemaran yang akan semakin berat. Keberadaan Kali Surabaya penting bagi keberlangsungan perekonomian dan kelangsungan hidup bagi masyarakat, industri, dan niaga di sekitar bantaran kali. Selain itu Kali Surabaya menjadi sumber air baku PDAM Surabaya dan konsumen PDAM Surabaya bergantung pada kondisi kualitas air Kali Surabaya. Menurunnya



kualitas air baku Kali Surabaya menyebabkan menurunnya kualitas air bersih dan menurunnya kualitas jaringan pipa distribusi air bersih yang mengakibatkan rawan kebocoran air, panjang pipa PDAM di Kota Surabaya adalah 5.812,62 km².

Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH dapat digunakan sebagai bahan evaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang difokuskan pada media lingkungan air, udara, dan tutupan lahan. Perhitungan IKLH terdiri atas tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Namun pada tahun 2018 terdapat surat edaran Menteri LHK Nomor 5.318/PPKL/SFT/REN.0/12/2020 perihal metode perhitungan IKLH 2020-2024 dimana komponen IKTL digantikan dengan komponen IKL (Indeks Kualitas Lahan).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang telah dicapai kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar 67,78. Sedangkan nilai IKLH Nasional sebesar 71,43. Berikut capaian nilai IKLH kota Surabaya, provinsi Jawa Timur dan Nasional dalam 5 tahun terakhir.

Tabel II.104
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
IKLH Kota Surabaya	61,30	61,34	61,43	60,96	67,78
IKLH Provinsi Jawa Timur	66,29	66,36	67,10	67,04	N/A
IKLH Nasional	66,19	71,67	66,55	70,27	71,43

Sumber data: DLH Surabaya, 2022

Kota Surabaya menambahkan indikator persampahan dalam perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup sehingga indeks menjadi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS). Berikut merupakan pencapaian IKLHS Kota Surabaya pada tahun 2017-2021.

Tabel II.105
Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Indeks	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Air (IKA)	54,9	57,5	57,62	57,68	56,05	58,18
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,57	90,26	90,26	90,30	90,35	90,28
Indeks Tutupan Hutan (ITH)	42,38	42,38	42,44	42,45	42,63	42,63
Indeks Persampahan	69,27	74,96	74,98	75,09	75,84	76,62



Indeks	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	62,09	64,88	64,91	64,97	65,08	65,71

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah, 2022

Pengukuran indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya

Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan maka untuk menghitung indeks tutupan lahan digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Oleh karena itu indikator di bidang persampahan mencakup:

1. Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan
2. Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
3. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Kondisi lingkungan hidup Kota Surabaya semakin membaik dari tahun 2017 sampai 2021, dimana pada tahun 2017 IKLHS sebesar 64,88, dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2021 IKLHS telah mencapai 65,71. Hal ini



menunjukkan bahwa Kota Surabaya telah cukup berhasil dalam meningkatkan kualitas lingkungannya, baik melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang bagus serta manajemen pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau dan pengawasan serta pengendalian dampak lingkungan yang sangat baik. Pada tahun 2021, IKLHS mengalami kenaikan yang signifikan karena salah satu unsur pembentuk nilai KLHS yaitu kualitas udara mengalami kenaikan. Hal ini terjadi disebabkan berkurangnya pemakaian kendaraan di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21 bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik.

Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Pemerintah Kota Surabaya memulai upaya konversi dan konservasi energi dengan cara penerapan solar cell, pemasangan PJU dengan LED, mengkonversi gas metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah kompos/TPS dan TPA Benowo dan penggunaan BBG untuk kendaraan roda empat yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 257 mobil. Selain itu, dibangun juga kincir angin di beberapa titik lokasi. Namun, upaya memulai konversi dan konservasi energi ini belum diterapkan oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

Tabel II.106

Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2017 – 2021

Penerapan Konservasi Energi	Satuan	Jumlah (titik) s.d. Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah PJU LED	Unit	8.127	13.499	19.589	20.598	20.598
<i>Solar cell</i> di Sekolah Adiwiyata	Unit	22	28	29	29	29
<i>Solar cell</i> di gedung pemerintah	Lokasi	12	19	28	35	40
Kincir Angin	Unit	8	8	8	8	8



Penerapan Konservasi Energi	Satuan	Jumlah (titik) s.d. Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Warning Light (APIL) Solar Cell	Unit	21	18	18	4	8
Traffic Light (APIL) Solar Cell	Unit	9	24	59	71	77

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2022

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk melanjutkan upaya konversi dan konservasi energi dengan mendorong pihak swasta atau masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi. Untuk pengusahaan konservasi energi oleh kegiatan/usaha swasta sudah mulai didorong mulai tahun 2017, dengan 11 kegiatan/usaha yang diaudit di tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga 2021, setiap tahunnya menambahkan 11 kegiatan/usaha yang telah diaudit penerapan konservasi energinya. Tentunya hal ini masih jauh dari pengawasan yang menyeluruh dikarenakan jumlah kegiatan/usaha yang masih sedikit. Sehingga diharapkan ke depannya dapat meningkat.

Namun, dalam hal pemanfaatan energi terbarukan bagi sektor swasta masih belum mempunyai payung hukum. Karena itu, perlu diciptakan instrumen pendukung di antaranya berupa peraturan daerah dalam rangka mendorong percepatan dimulainya upaya pemanfaatan energi terbarukan ini oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II.107
Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2017	2.313.440	2.040.526
2018	2.348.598	2.020.291
2019	2.355.489	2.108.476
2020	2.188.680	2.147.337
2021	2.217.423	2.181.345

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2022

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

Tabel II.108
Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelahiran (berdasarkan data SIAK)	30.814	70.502	45.248	51.368	75.253
2	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	30.297	91.006	45.248	51.368	75.253
3	Jumlah kematian (berdasarkan data SIAK)	21.762	20.504	45.248	23.212	42.717
4	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	20.445	20.504	45.248	23.212	42.717

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Berdasarkan tabel penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) di atas, menunjukkan bahwa seluruh penduduk lahir berdasarkan data SIAK memperoleh akta kelahiran, dimana anak yang dilahirkan di seluruh rumah sakit, puskesmas, dan beberapa bidan di Kota Surabaya (yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) akan otomatis mendapatkan akta kelahiran. Untuk anak yang dilahirkan di luar kota Surabaya dan selain rumah sakit, puskesmas,



dan bidan di kota Surabaya, maka akta kelahiran anak tersebut diurus secara pribadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah Kota Surabaya memberikan kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran yaitu dengan menyediakan fasilitas pelayanan publik di Siola dan mobil pelayanan keliling oleh dispendukcapil yang beroperasi di beberapa titik lokasi, antara lain: di RT, RW, kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan taman kota (tempat publik). Hal yang sama juga berlaku pada penduduk yang meninggal, di mana penduduk meninggal dapat diurus di kantor kelurahan/kecamatan.

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2019 adalah 8.483 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun yaitu 829.725 jiwa. Selanjutnya kepemilikan KIA sampai tahun 2020 yaitu 197.486 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun yaitu 752.020 jiwa. Kemudian pada tahun 2021 kepemilikan KIA bertambah menjadi 368.802 jiwa, dari 768.210 jiwa (jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun).

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran.

2.1.3.2.7.1 Jumlah Akseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Jumlah akseptor KB pada tahun 2017 sebesar 66.425 atau sebesar 12,97 persen dari jumlah PUS 512.066. Di tahun 2018, jumlah akseptor KB sebesar 67.972 atau sebesar 13,23 persen dari jumlah PUS sebesar 513.412. Pada tahun 2019, jumlah akseptor KB meningkat sebesar 426.024 atau 80,94 persen. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah akseptor KB juga meningkat sebesar 434.983 atau 82,37 persen. Pada tahun 2021, jumlah akseptor KB sebesar 429.350 atau 81,33 persen. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.109
Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	512.066	513.412	526.329	528.086	527.912
2	Jumlah Akseptor KB	66.425	67.972	426.024	434.983	429.350



No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
3	Rasio Akseptor KB (persen)	12,97	13,23	80,94	82,37	81,33

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

Adapun angka *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebanyak 415.241 pasangan, Tahun 2017 sebanyak 416.634 pasangan, Tahun 2018 sebanyak 412.170 pasangan, Tahun 2019 sebanyak 416.205 pasangan, dan Tahun 2020 sebanyak 434.983 pasangan. Meski fluktuatif namun terjadi peningkatan yang cukup besar dari tahun 2019 ke tahun 2020. Data mCPR tahun 2021 belum disajikan pada *web* resmi BPS Kota Surabaya.

Sedangkan angka *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2019. Tahun 2017 mencapai 13,62; Tahun 2018 mencapai 21,98; dan Tahun 2019 mencapai 19,88. Sedangkan data ASFR untuk tahun 2020 dan 2021 juga belum dapat disajikan pada *web* resmi BPS Kota Surabaya.

2.1.3.2.7.2 Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka *drop out* peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.110
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	512.066	513.412	526.329	528.086	527.912
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	414.571	412.170	426.024	434.983	429.350
3	Cakupan Peserta KB Aktif	80,96	80,28	80,94	82,37	81,33

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, 2022

Sehubungan dengan upaya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB, maka salah satu targetnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu wanita usia 15-



49 tahun yang telah menikah. Pada tahun 2017 terdapat 512.066 PUS, tahun 2018 terdapat 513.412 PUS, tahun 2019 terdapat 526.329 PUS, dan tahun 2020 terdapat 528.086 dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 434.983. Sedangkan pada tahun 2021, terdapat 527.912 PUS dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 429.350.

Program KB bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan terciptanya keluarga sejahtera. Keberhasilan implementasi program dapat dilihat dari tingkat kepesertaan masyarakat pada program KB. Jika dilihat pada tabel di bawah ini. Jumlah peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi, Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB (*unmet need*), dan Jumlah pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun semakin menurun dari tahun ke tahun, namun mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 dikarenakan dampak pandemi Covid-19 dimana banyak fasilitas kesehatan yang membatasi layanannya sekaligus banyak peserta KB yang membatasi interaksi dengan orang lain.

Tabel II.111
Partisipasi KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Surabaya
Tahun 2017 - 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	9.822	13.180	1.271	712	937
2	Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB	93.425	101.555	100.576	93.103	98.562
3	Jumlah pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun	241	334	15	12	14

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, 2022

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator *Total Fertility Rate* (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah nak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II.112

Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Total Fertility Rate (TFR)	1,779	1,731	1,729	1,705**	N/A

Sumber : Bappeko, 2021 diolah

**angka sangat sementara

Catatan : Tahun 2019 merupakan data olahan Susenas

2.1.3.2.7.3 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I). Selain itu secara mikro kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas keluarga dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga diharapkan dapat meningkatkan gizi, tingkat kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Pada tahun 2014, jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 193.550 atau 27,18% dari jumlah keluarga sebesar 712.172. Dalam hal mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, utamanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2017, sebanyak 724 BKB, 209 BKR, dan 42 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Pada tahun 2018, terdapat 1000 BKB, 232 BKR, dan 97 BKL yang aktif melakukan kegiatan, tahun 2019 terdapat 1000 BKB, 233 BKR dan 100 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Sedangkan sampai dengan tahun 2020 terdapat 1000 BKB yang aktif melakukan kegiatan. Untuk tahun 2021 terdapat 675 BKB, 50 BKR, dan 150 BKL yang aktif melakukan kegiatan.

2.1.3.2.7.4 Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) Lembaga Kemasyarakatan lainnya.



Jumlah lembaga LKMK di Kota Surabaya sebanyak 154 lembaga. Selain itu, kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Pada tahun 2017, dari 1.017 PMKS yang dilatih, 695 orang atau sebesar 68,34% di antaranya berproduksi. Sedangkan dari 695 orang yang telah berproduksi sebanyak 508 orang atau sebesar 73,09 % yang telah menghasilkan omzet diatas 1 juta. Sedangkan di tahun 2018, dari 464 orang yang dibina, 335 orang diantaranya telah berproduksi dan sebanyak 277 orang telah menghasilkan omzet di atas 1 juta atau sebesar 82,68%. Tahun 2019 terdapat 190 PMKS yang dilatih dan dalam masa belajar untuk melakukan produksi, dan pada tahun 2020 terdapat 23 yang didampingi. Pada tahun 2021, akan dilaksanakan pendampingan pada 50 orang. Data keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.113
Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif
di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Keluarga Miskin yang telah Melakukan Usaha Ekonomi Produktif	695	464	190	23	50

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS terutama keluarga miskin usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Data PMKS terutama keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada tabel di atas. Kelompok keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif akan tetap diupayakan diberikan pendampingan agar memenuhi kriteria bagi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan kearah peningkatan usaha dan omzet bagi kelompok usaha keluarga miskin yang telah berjalan.

2.1.3.2.8 Perhubungan

Kota Surabaya sampai dengan saat ini memiliki total 14 terminal angkutan darat yang melayani angkutan umum dengan jenis bus dan/atau angkutan kota (angkot). Jumlah angkutan darat di Kota Surabaya sendiri terus menurun sejak tahun 2017 menjadi 8.444 kendaraan, berlanjut ke tahun 2018, menjadi 8.001 kendaraan, lalu tahun 2019 menjadi 7.349 kendaraan, kemudian tahun 2020 ini menjadi 1.999



kendaraan, dan di tahun 2021 menjadi 1.870 kendaraan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan restrukturisasi angkutan kota (mikrolet dan bus kota) agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang transportasi. Detil jumlah terminal dan angkutan darat di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.114**Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Terminal Tipe A (Bus)	2	2	2	2	2	2
2	Jumlah Terminal Tipe B	2	2	1	1	1	1
3	Jumlah Terminal Tipe C	10	10	11	11	11	11
4	Jumlah Angkutan Darat	10.202	8.444	8.001	7.349	1.999	1.870

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2022

Dalam merealisasikan restrukturisasi angkutan kota tersebut, Pemerintah Kota Surabaya masih menjamin pelayanan transportasi (angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek) eksisting. Salah satu contohnya adalah pemberian izin trayek yang dikeluarkan kepada pemilik angkutan umum. Dalam pemberian izin trayek tersebut, angkutan umum harus memenuhi syarat laik jalan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II.115**Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk	3.342.627	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952
2	Jumlah Izin Trayek yang Dikeluarkan	3.699	3.341	2435	3.257	2.869
3	Rasio Izin Trayek	0,0011	0,0011	0,00077	0,00109	0,00096

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2022

Pada tahun 2017, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.699 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.342.627 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar 0,0011. Untuk tahun 2018, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.341 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.094.732 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar 0,0011. Pada tahun 2019, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 2.435 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.159.481 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar 0,00077. Sedangkan pada tahun 2020, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.257 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 2.970.730 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar 0,00109.



Pada tahun 2021, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 2.869 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 2.970.952

Tren penurunan jumlah izin trayek yang dikeluarkan ini disebabkan oleh banyaknya kendaraan angkutan umum yang sudah berakhir masa berlaku pajaknya tidak bisa balik nama kendaraan, dikarenakan persyaratan wajib berbadan usaha. Penyebab berikutnya adalah menurunnya jumlah penumpang angkutan umum setiap tahun diakibatkan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi serta persaingan dengan kendaraan berbasis aplikasi sehingga membuat pendapatan pemilik dan pengemudi angkutan hanya mencukupi untuk pemenuhan bahan bakar, sehingga pemilik tidak mampu melakukan perawatan kendaraan yang berakibat pada angkutan umum yang tidak laik jalan. Penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengurusan izin trayek disebabkan juga oleh banyaknya kendaraan taksi dan angkot yang berubah menjadi plat hitam, yakni sebanyak 16 dan 23 kendaraan angkutan umum pada tahun 2018 dan 2019 secara berurutan.

Meskipun terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengurusan izin trayek, Pemerintah Kota Surabaya selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan angkutan umum dari tahun ke tahun. Salah satunya dengan memperpendek waktu tunggu kendaraan umum di terminal atau halte. Rata-rata waktu tunggu angkutan umum di Kota Surabaya dari tahun ke tahun semakin singkat. Pada tahun 2018, rata-rata waktu tunggu untuk Angkutan Kota (angkot) adalah 15,24 menit, pada tahun 2019 rata-rata waktu tunggu menjadi 14,14 menit, pada tahun 2020 turun lagi menjadi 12,61 menit, dan begitu juga pada tahun 2021 menjadi 12,61 menit. Sedangkan rata-rata waktu tunggu untuk bus pada tahun 2018 adalah 21 menit, kemudian turun menjadi 19,82 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menjadi 13 menit, dan begitu juga pada tahun 2021 menjadi 13 menit. Rata-rata waktu tunggu kendaraan umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.116
Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum (Angkutan Kota dan Bus)
Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata waktu tunggu angkutan kota (menit)	26,50	28,11	15,24	14,14	12,61	12,61
Rata-rata waktu tunggu bus (menit)	44,67	46,73	21,00	19,82	13,00	13

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2022



Selain itu, untuk memberikan kenyamanan pada pengguna angkutan umum, Pemerintah Kota Surabaya juga memperhatikan *load factor* angkutan umum. *Load factor* adalah rasio jumlah penumpang dengan kapasitas tempat duduk per satuan waktu tertentu. *Load factor* menggambarkan kebutuhan/*demand* dibandingkan kapasitas yang tersedia. Semakin tinggi angka *load factor* kendaraan umum maka semakin efisien pula biaya operasionalnya. Pada tahun 2018, rata-rata *load factor* angkutan kota (angkot) di Kota Surabaya adalah sebesar 29,60, kemudian naik menjadi 34,37 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 nilai *load factor* angkutan kota mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat menurunnya jumlah penumpang/pengguna angkutan umum karena penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Namun pada tahun 2021 nilai *load factor* angkutan kota mengalami kenaikan menjadi 33,02.

Begitupun dengan nilai *load factor* bus, yang menunjukkan tren serupa. *Load factor* bus pada tahun 2018 berada pada angka 36,14, kemudian naik menjadi 42,06 pada tahun 2019, turun menjadi 40,58 pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 44,65. Jika dibandingkan dengan penurunan *load factor* angkutan kota, penurunan *load factor* bus di tahun 2020 relatif lebih kecil. Data terkait *load factor* kendaraan umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.117

Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Load factor</i> angkutan kota (persen)	30,00	29,6	34,37	29,69	33,02
<i>Load factor</i> bus (persen)	35,6	36,1	42,06	40,58	44,65

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2022

Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum (baik penumpang dan barang) di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya melalui pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR yang berada di UPTD PKB Tandes dan Wiyung. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala selama tiap hari kerja. Jumlah kendaraan yang lulus uji pada tahun 2017 sebanyak 131.256 kendaraan, sementara sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 150.494 kendaraan. Pada tahun 2019, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 149.446 kendaraan. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 141.663 kendaraan. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 135.905 kendaraan. Rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel II.118****Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	39.610	46.989	47.605	45.582	43.135
2	Jumlah kendaraan wajib uji KIR	99.983	155.450	157.768	159.116	151.064
3	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	148.528	158.619	158.249	147.708	142.532
4	Jumlah kendaraan lulus uji KIR	131.256	150.494	149.446	141.663	135.905

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2022

Selain itu, untuk memberikan kenyamanan demi menjaga kondisi lalu lintas di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Surabaya selalu meningkat dari tahun ke tahun, di mana sampai dengan tahun 2017 berjumlah 13.974 unit. Sedangkan sampai dengan tahun 2018, pemasangan rambu meningkat menjadi 16.337 unit. Sampai dengan tahun 2019, pemasangan rambu meningkat menjadi 16.915 unit, sedangkan sampai dengan tahun 2020 pemasangan rambu mencapai 17.439 unit. Samapai dengan tahun 2021, pemasangan rambu meningkat menjadi 18.140 unit. Dengan adanya penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan serta menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.

Tabel II.119**Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	13.974	16.337	16.915	17.439	18.140

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2022

2.1.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah tower yang tersebar di berbagai lokasi dan alat komunikasi (HT) pada tiap SKPD. Pada tahun 2017 tower yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 88 unit dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 997 unit. Pada tahun 2018 tower yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 29 unit dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh



Pemerintah Kota Surabaya adalah 1.542 unit. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki tower dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 2.653 unit. Demikian juga pada tahun 2020 Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki tower, dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 2.753 unit. Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki tower, dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 2.788 unit. Selain menggunakan alat komunikasi (HT), untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

Tabel II.120
Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Menara (Tower) (unit)	88	29	0	0	0
Alat Komunikasi (HT)	997	1.542	2.653	2.753	2788

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Pemerintah Kota Surabaya memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat <http://www.surabaya.go.id>. Selain halaman utama, juga terdapat beberapa sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Tabel II.121
Website Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Website Milik Pemerintah Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain menggunakan website resmi milik Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan menggunakan aplikasi/sistem pelayanan perijinan sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota



telah membangun 30 sistem informasi pelayanan perijinan dan 10 sistem informasi pelayanan non perijinan. Sedangkan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 terdapat 10 sistem informasi pelayanan perijinan dan 5 sistem informasi pelayanan non perijinan yang terbangun dan pada tahun 2020 terdapat 63 sistem informasi pelayanan perijinan dan 18 sistem informasi pelayanan non perijinan yang terbangun. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 10 sistem informasi pelayanan perijinan dan 5 sistem pelayanan non perijinan yang terbangun. Karena masih banyak terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK maka Pemerintah Kota terus mengupayakan untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis TIK seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.122

**Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Daring Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan	10	10	10	10	10
2	Sistem Informasi Pelayanan Non Perijinan	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melalui peningkatan produktivitas usaha.

2.1.3.2.10.1 Koperasi

Peningkatan jumlah koperasi di Kota Surabaya disertai dengan peningkatan pertumbuhan jumlah anggota koperasi, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 2017 jumlah anggota koperasi di Kota Surabaya sebanyak 262.153 orang, serta ditahun 2018 jumlah anggota koperasi mencapai 266.396 Orang. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah anggota koperasi meningkat menjadi 271.267 orang, sedangkan pada tahun



2020 jumlah anggota koperasi turun menjadi 221.968 orang. Namun pada tahun 2021 jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan menjadi 256.946 orang. Secara rinci pertumbuhan anggota koperasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.123
Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah anggota koperasi	262.153	266.396	271.267	221.968	256.946

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2022

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup berhasil, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2017 jumlah koperasi di Kota Surabaya adalah sebanyak 1.747 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.484 koperasi, sedangkan pada tahun 2018 jumlah koperasi meningkat menjadi 1.750 koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1.487 koperasi. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah koperasi kembali meningkat sebanyak 1.784 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.521 koperasi, sedangkan pada tahun 2020, jumlah koperasi kembali mengalami peningkatan menjadi 1.817 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.554 koperasi. Untuk tahun 2021 jumlah koperasi meningkat sebanyak 1.834 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.571 koperasi. Secara rinci presentase koperasi aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.124
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah koperasi	1.747	1.750	1.784	1.817	1.834
2	Jumlah koperasi aktif	1.484	1.487	1.521	1.554	1.571
3	Persen koperasi aktif	84,95	84,97	85,26	85,52	85,66

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2022

Sedangkan jumlah koperasi per jenis usaha di Kota Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.125
Koperasi per Jenis Usaha di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jasa Angkutan Darat	-	13	13	13	13
Jasa Angkutan Laut	-	1	1	1	1
Jasa Lain-Lain	-	87	90	91	105
KJKS	-	23	23	23	23



Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Kopinkra	-	7	7	7	7
Kopkar	-	325	326	327	328
Kopma	-	21	21	21	21
Koppas	-	14	21	24	24
Koppontren	-	22	22	22	22
Kopwan	-	171	171	171	171
KPRI	-	185	185	185	186
KSP	-	106	107	108	110
KSU	-	617	639	666	665
KUD	-	5	5	5	5
Pemuda	-	4	4	4	4
Perikanan	-	4	4	4	4
Pertanian	-	4	4	4	4
PK 5	-	33	33	33	33
Primkopabri	-	12	12	12	12
Primkopad	-	18	18	18	18
Primkopal	-	17	17	17	17
Primkopau	-	1	1	1	1
Primkoppol	-	11	11	11	11
Primkoptama	-	30	30	30	30
Profesi	-	18	18	18	18
Sekunder	-	1	1	1	1
Kelompok Koperasi	-	1	-	-	-
TOTAL	-	1751	1784	1817	1834

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, 2022

Rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 volume usaha koperasi adalah sebesar 1.797 milyar dari 1.484 koperasi, di tahun 2018 volume usaha koperasi meningkat mencapai 2.092 milyar dari 1.487 koperasi, dan pada tahun 2019 volume usaha koperasi meningkat mencapai 2.128 milyar dari 1.521 koperasi. Sedangkan pada tahun 2020 volume usaha koperasi turun menjadi 1.864 milyar dari 1.554 koperasi dan pada tahun 2021 volume usaha koperasi



meningkat menjadi 2.147 milyar dari 1.571 koperasi. Secara rinci rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.126
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif
di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Koperasi Aktif	1.484	1.487	1.521	1.554	1.571
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar)	1.797	2.092	2.128	1.864	2.147
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif	1,21	1,41	1,40	1,20	1,37

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2022

2.1.3.2.10.2 Usaha Mikro dan Kecil

Dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM. Sampai dengan tahun 2021 jumlah UMKM tercatat sebanyak 26.854 di mana sebanyak 22.924 merupakan Usaha Mikro dan Kecil. Jumlah usaha kecil dan menengah yang tercatat merupakan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki ijin dan untuk usaha mikro yang tercatat merupakan jumlah usaha mikro baik yang memiliki ijin maupun yang masih belum memiliki ijin. Secara rinci rekap data presentase usaha mikro dan kecil Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.127
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah seluruh UMKM	26.854	26.854	26.854	26.854	26.854
2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	22.924	22.924	22.924	22.924	22.924
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	85,37	85,37	85,37	85,37	85,37

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2022

Jumlah UMKM binaan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan intervensi yang dilakukan bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.128
UMKM Kota Surabaya Berdasarkan Intervensi Tahun 2017 - 2021

Intervensi	2017	2018	2019	2020	2021
Merek	150	118	250	140	200
Halal	60	105	200	70	165



Intervensi	2017	2018	2019	2020	2021
Pelatihan UMKM	280	448	769	88	505
Fasilitas Kemitraan/Kerjasama	11	156	45	187	260
Pameran/Bazar/Gelar Produk	962	897	893	9	346
Total	1.493	1.781	2.237	534	1.476

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2022

2.1.3.2.11 Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

2.1.3.2.11.1 PMA dan PMDN

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya.

Tabel II.129
Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Proyek PMDN	76	251	119	541	1.764
Jumlah Proyek PMA	10	42	3	124	233
Total	86	293	122	655	1.997

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Penanaman Modal di Kota Surabaya menunjukkan bahwa investasi di Kota Surabaya pada tahun 2017 tercatat sejumlah 86 proyek. Tahun 2018 tercatat meningkat menjadi 293 proyek, sedangkan tahun 2019 turun menjadi 122 proyek, dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 655 proyek. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah proyek PMA/PMDN sebanyak 1.997 proyek.

Sedangkan untuk nilai investasi PMA dan PMDN, pada tahun 2017 sebesar Rp3.972,13 Miliar. Selanjutnya, pada tahun 2018 sebesar Rp4.740,23 Miliar, kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp19.219,90 Miliar. Sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp22.152,03 Miliar, dan pada tahun 2021 sebesar Rp29.037,08 Miliar.

Menurut jenisnya, realisasi investasi lebih banyak berasal dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibanding dengan Penanaman Modal Asing



(PMA). Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif.

Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perizinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.130
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persetujuan (USD Juta)	-	774,57	379,90	-	-
1.1	Jumlah Proyek	86	293	122	665	1.997
1.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	4.964,37	10.379,22	5.689,61	384,95	-
2	Realisasi (USD Juta)	166,45	53,28	1.281,32	-	-
2.1	Jumlah Proyek	47	122	379	588	1.844
2.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	5.065,56	5.690,23	19.219,90	22.152,03	29.037,08

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, di mana rekap tabel dapat dilihat di bawah ini.

Tabel II.131
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PMA/PMDN	47	122	379	588	1.844
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	10.767	10.607	37.040	8.500	19.523
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	229,09	86,94	97,73	14,46	10,59

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, realisasi investasi baik dari penanaman PMA dan PMDN pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.627 orang dari 44 proyek maka nilai



rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 241,52. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.607 orang dari 122 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 86,94. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 123.705 orang dari 6081 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 20,34. Untuk tahun 2021 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 19.523 orang dari 1.844 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 10,59.

2.1.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya bersifat terbuka (*outdoor*) maupun tertutup (*indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya diantaranya adalah Lapangan Atletik THOR, Lapangan Softball dan Hockey Dharmawangsa, Gelora 10 Nopember, dan Gelora Bung Tomo. Sampai dengan tahun 2017, total lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya adalah sejumlah 393 lapangan yang berada di atas lahan fasilitas umum perumahan dan permukiman maupun di tanah aset BTKD di wilayah kota Surabaya. Pada tahun 2018, jumlah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota mengalami peningkatan menjadi 479 lapangan olahraga. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 630 lapangan olahraga. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 665 lapangan olahraga. Untuk tahun 2021, jumlah lapangan olahraga tersebut masih sejumlah 665 lapangan olahraga. Rincian jumlah lapangan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.132

Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah lapangan olahraga	393	479	630	665	665
2	Jumlah penduduk	3.342.627	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952
3	Rasio lapangan olahraga	1 : 8.505	1 : 6.461	1 : 5.015	1:4.467	1:4.467

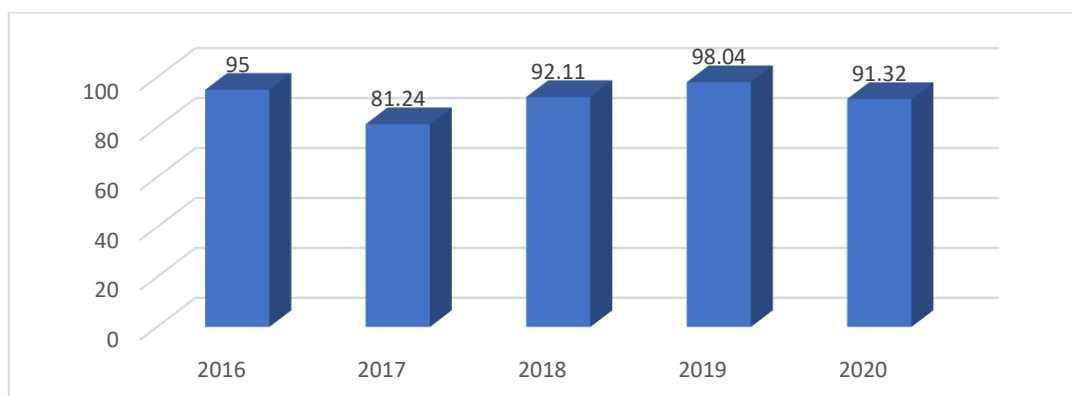
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2022



Namun sebaran prasarana olahraga di Kota Surabaya memang belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya lahan kosong di beberapa wilayah kota. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surabaya tetap berupaya untuk mewujudkan pemerataan sebaran prasarana olahraga di seluruh kelurahan di wilayah Kota Surabaya dengan berbagai cara diantaranya yaitu dengan pengadaan lahan.

Dengan penyediaan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat Kota Surabaya khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan waktu luang untuk diarahkan untuk kegiatan yang positif. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Kota Surabaya secara umum dan menumbuhkan bibit-bibit atlet olahraga secara khusus.

Pada tahun 2016, nilai persentasi atlet yang berprestasi sangat memuaskan yaitu mencapai 95%, dari 847 orang atlet olahraga yang dibina sejumlah 805 orang diantaranya meraih prestasi olahraga ditingkat regional, nasional maupun internasional. Sementara pada tahun 2017, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 81,24% terdapat 581 orang atlet yang dibina dan sejumlah 472 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Sampai dengan tahun 2018, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 92,11% terdapat 2307 orang atlet yang dibina dan sejumlah 2125 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Sedangkan sampai dengan tahun 2019, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 98,04% terdapat 2,852 orang atlet yang dibina dan sejumlah 2,796 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Selanjutnya pada tahun 2020, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 91,32%.



Gambar II.18 Persentase Atlet Berprestasi

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2021



Kepemudaan dan Olahraga juga erat kaitannya dengan pemuda-pemuda yang dapat menjadi kader. Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengadakan pembinaan untuk kader anti kenakalan remaja.

Dalam bidang kepemudaan, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program dan kegiatan khusus terkait pembinaan kepemudaan diantaranya adalah pembentukan pemuda kader anti kenakalan remaja (anti narkoba dan peduli HIV AIDS). Pada tahun 2017 terdapat sejumlah 787 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sementara sampai dengan tahun 2018 terdapat sejumlah 1.244 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan sampai dengan tahun 2019 terdapat sejumlah 1.732 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya, sampai dengan tahun 2020 terdapat sejumlah 799 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Untuk tahun 2021 terdapat sejumlah 1.000 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya.

2.1.3.2.13 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik sebelumnya dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan melaksanakan kegiatan penyusunan dan analisa data dan informasi perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun buku PDRB Kota Surabaya dan Statistik Sektorial Kota Surabaya sebagai bagian penyelenggaraan statistik, serta disusunnya buku Surabaya Dalam Angka.

Tabel II.133

**Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021**

No.	Dokumen	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PDRB Kota Surabaya	-	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	PDRB Kecamatan	-	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Statistik Sektorial Kota Surabaya	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Surabaya Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappedalitbang Surabaya, 2022

Selain itu pelaksanaan sektoral juga telah diselenggarakan di Perangkat Daerah masing-masing, dalam rangka mendukung dan untuk memenuhi kebutuhan



perencanaan sektoral di masing-masing Perangkat Daerah, seperti Dinas Sosial terkait pengumpulan dan pengolahan data kemiskinan, Sekretariat Daerah melalui PD Pasar Surya terkait harga pasar, dan sebagainya.

Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti yang tertuang pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

2.1.3.2.14 Kebudayaan

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta.

2.1.3.2.14.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman-seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya. Disisi lain, banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni di Surabaya, Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.134

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	445	984	805	520	4

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2022

Tahun 2017, festival seni dan budaya yang dilaksanakan di kota Surabaya sebanyak 445 festival, dan pada tahun 2018, jumlah festival seni dan budaya meningkat menjadi sebanyak 984 kali. Sedangkan di tahun 2019 menurun menjadi 805 festival karena beberapa festival melakukan kolaborasi menjadi satu festival yang lebih besar. Namun pada tahun 2020 penyelenggaraan festival seni dan budaya berkurang drastis menjadi hanya 502 kali dan di tahun 2021 juga mengalami



penurunan menjadi hanya 4 festival seni dan budaya yang diselenggarakan, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

2.1.3.2.14.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung perkembangan kesenian menyediakan sarana berupa gedung/tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian/berekspresi di UPTD Tugu Pahlawan, THR dan Balai Pemuda serta UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel.

2.1.3.2.14.3 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2015 terdapat 273 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2018 tidak ada penambahan cagar budaya yang ditetapkan karena masih dalam proses evaluasi terhadap bangunan/benda yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah cagar budaya tersebut masih memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Sedangkan pada tahun 2019, ada penambahan Bangunan Cagar Budaya sebanyak 4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya, sehingga jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya pada tahun 2019 menjadi 277 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Selanjutnya pada tahun 2020, Situs dan Kawasan Cagar Budaya menjadi 288 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Pada tahun 2021, terdapat penambahan 1 Bangunan Cagar Budaya, sehingga jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 289 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya.

Rekapitulasi data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel II.135

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	273	273	277	288	289



No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	273	273	277	288	289
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2022

Karya seni tidak sebatas fenomena keindahan saja, tetapi juga adalah sebuah ekspresi, tepatnya objektifikasi manusia pada ruang dan waktu dimana ia berada. Segala bentuk hasil cipta manusia adalah fakta budaya yang seharusnya dapat dipahami oleh masyarakat luas melalui suatu pagelaran budaya. Kelompok seni yang terdaftar sebanyak 498 pada tahun 2016, yang selanjutnya dilatih dan dibimbing hingga kelompok seni tersebut layak tampil di depan publik. Kelompok seni layak tampil dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami kenaikan, yang menunjukkan adanya perkembangan di bidang seni dan minat seni masyarakat di Kota Surabaya. Adapun kelompok seni yang layak tampil pada tabel di bawah ini.

Tabel II.136

Kelompok Seni Terdaftar Yang Belum Layak Tampil Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Kelompok Seni Layak Tampil	192	287	399	406	415
Kelompok Seni Belum Layak Tampil	306	211	99	92	92

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2022

2.1.3.2.15 Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan layanan perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Puskesmas, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal yang tersebar secara merata; menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan dan TBM; menyediakan



sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM; menyelenggarakan perpustakaan keliling yang menggunakan sarana angkutan yang melayani di sekolah dan taman kota; melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi melalui brosur/leaflet, spanduk, *banner*, *billboard*, media cetak dan elektronik; melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan; melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan serta melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Perpustakaan di Kota Surabaya milik Pemerintah Kota dari tahun 2017 sampai dengan 2021 berjumlah sama yaitu 2 perpustakaan. Selain itu terdapat 61 Perpustakaan milik non Pemda yang diselenggarakan masyarakat dan Perguruan Tinggi. Data yang tercatat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.137
Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perpustakaan Milik Pemda	2	2	2	2	2
2	Perpustakaan Milik Non Pemda	61	61	61	61	61

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2022

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Perpustakaan berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah persentase pengunjung layanan baca yang meminjam buku. Keberhasilan pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dilakukan pada periode sebelumnya ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan. Pada tahun 2017 jumlah pengunjung layanan baca sebanyak 729.877 orang. Pada tahun 2018, jumlah ini meningkat menjadi 1.762.516 pengunjung dan seluruhnya meminjam buku. Jumlah pengunjung terus meningkat hingga tahun 2020. Sedangkan pada triwulan II 2021, pengunjung perpustakaan turun menjadi 141.563. Pengunjung perpustakaan ini antara lain merupakan pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, maupun perpustakaan keliling. Jumlah kunjungan perpustakaan milik Pemerintah Kota Surabaya ditampilkan pada tabel berikut ini.



Tabel II.138

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Kunjungan layanan baca per bulan (kali)	5.496.517	6.061.413	6.715.104	7.718.590	162.050

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2022

Mengacu kepada sasaran pembangunan pada Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, meningkatkan kualitas pembangunan manusia dilakukan salah satunya dengan meningkatkan minat baca masyarakat. Dan pada tahun 2019, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan minat dan budaya baca melalui program 15 menit membaca di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, kegiatan Tantangan Membaca Surabaya, kegiatan bedah buku, festival budaya pustaka dan pameran buku.

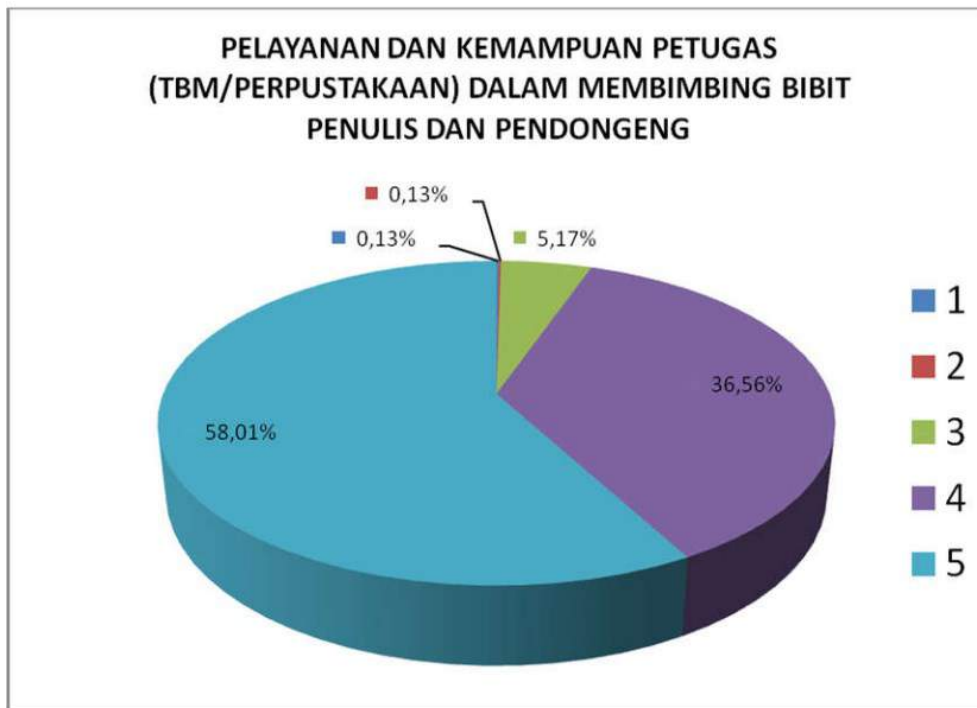
Barometer keberhasilan perpustakaan adalah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat guna, hal ini sangat dipengaruhi oleh prosedur prosedur didalam perpustakaan tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik.

Tabel II.139

Kepuasan Pelayanan Perpustakaan Tahun 2020

Aspek	Nilai					Total
	1	2	3	4	5	
Fasilitas Pembimbingan Bibit Penulis dan Pendongeng (<i>Platform</i> TAMAN KALIMAS)	2	1	52	314	405	774
Pelayanan dan Kemampuan Petugas (TBM/Perpustakaan) dalam Membimbing Bibit Penulis dan Pendongeng	1	1	40	283	449	774

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020



Gambar II.19

Nilai Terhadap Pelayanan dan Kemampuan Petugas TBM/Perpusatakaan dalam Membimbing Bibit Penulis dan Pendongeng

2.1.3.2.16 Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT.

Kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Kearsipan salah satunya diukur dari ketertiban Perangkat Daerah terhadap sistem tata kearsipan. Perangkat Daerah diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2) Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana kearsipan Arsip Aktif (*Filing Cabinet*, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan Arsip Inaktif (Rak Arsip/Mobil File, Box Arsip, Folder Besar) serta 5) Adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

Data Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II.140
Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib
Sistem Tata Kearsipan Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri	684	899	641	580	583
2.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	154	284	432	531	583
3.	Persentase Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan (%)	22,51	43,89	67,39	91,55	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2022

Pada tahun 2017 sebanyak 154 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan, dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 284 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan. Pada tahun 2019, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan terus meningkat menjadi 432 lembaga. Sedangkan, pada tahun 2020, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan menjadi 531 lembaga dan persentasenya meningkat menjadi 91,08 persen. Untuk tahun 2021, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan menjadi 583 lembaga dan persentasenya meningkat menjadi 100 persen.

Peningkatan yang signifikan didukung oleh adanya pendampingan dan pembinaan kearsipan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selain itu juga didukung dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompeten pada kearsipan. Pada tahun 2020, dilakukan pembinaan sistem kearsipan kepada 84 SDN di Kota Surabaya.

Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah, maka dilaksanakan juga akuisisi arsip, yaitu proses penambahan khasanah arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari Perangkat Daerah pencipta arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada tahun 2017, jumlah arsip diakuisisi



sebanyak 473 arsip. Dan di tahun 2018, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 876 arsip. Pada tahun 2019, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 352 arsip. Selanjutnya, pada tahun 2020, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 537 arsip dan pada tahun 2021, jumlah arsip yang diakuisisi sebanyak 175 arsip. Dengan demikian, persentase arsip diakuisi sebesar 139,88% terhadap target 1.725 arsip diakuisi.

2.1.3.3 Urusan Pilihan Pemerintahan

Analisis gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Perkembangan kelautan dan perikanan di Surabaya dapat dilihat pada kedua tabel di bawah ini.

Tabel II.141
Perkembangan Nilai Tambah Sektor Usaha Kelautan dan Perikanan
Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Total Nilai Tambah PDRB (miliar rupiah)	493.026,30	538.845,46	580.488,53	554.509,46	590.227,97
Total Nilai Tambah Sub Kategori Perikanan (miliar rupiah)	883,18	913,36	928,40	889,33	917,60
Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB (persen)	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sepanjang tahun 2017 hingga 2021 relatif stabil pada kisaran 0,16-0,18 persen, meski cenderung menurun kontribusinya. Menurunnya kontribusi sub kategori perikanan tersebut dikarenakan peningkatan nilai tambah PDRB lebih besar daripada peningkatan nilai tambah sub kategori perikanan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.142
Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Perikanan Laut	8.416,60	8.151,50	7.165,30	8.057,63	7.805,50



No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)				
		2017	2018	2019	2020	2021
2.	Perikanan Tambak	6.798,68	6.956,58	7.249,88	7.305,01	7.943.564
3.	Perairan umum	94	91,80	114,90	-	100,20
4.	Kolam	1.133,33	1.104,94	1.014,17	1.021,57	990.547
5.	Jaring Apung	134,22	138	125,97	115,89	120.060
Jumlah		18.849,44	16.576,83	15.670,22	16.500,11	9.062.076,7

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2022

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah produksi pada jenis usaha perikanan laut, dan kolam mengalami penurunan di tahun 2021. Menurunnya produksi perikanan laut karena sumber daya ikan semakin berkurang serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penangkapan ikan sehingga hasil tangkapan nelayan berkurang. Sedangkan kenaikan terjadi pada jumlah produksi perikanan tambak dan perairan umum, hal ini dikarenakan adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam budidaya perikanan melalui pelatihan teknologi tepat guna dan fasilitasi penyediaan sarana produksi dalam budidaya perikanan.

Tabel II.143

Pembudidaya Perikanan dan Kelautan Binaan Yang Memanfaatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Serta Teknologi Tepat Guna (TTG) Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pembudidaya perikanan dan kelautan binaan	1.330	1.428	1.932	1.932	1.932
Pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	189	191	276	275	314
Pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang mengaplikasikan TTG dalam proses budidaya	440	506	966	965	1.644

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2022

Untuk tingkat konsumsi ikan kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar 47,35 kg/kapita/th atau tercapai sebesar 87,69% dari yang ditargetkan nasional yaitu 54 kg/kapita/th. Adapun upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan di Surabaya melalui memasyarakatkan gemar makan ikan, sosialisasi/penyuluhan, dan pelatihan diversifikasi pangan berbahan baku dari ikan. Perkembangan tingkat konsumsi ikan Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.



Tabel II.144
Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	43,23	45,85	47,35	N/A	N/A
2	Target Nasional (Kg/kap/thn)	47,12	50,65	54,00	N/A	N/A
3	Persentase Konsumsi Ikan (persen)	91,74	90,52	87,69	N/A	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2020

2.1.3.3.2 Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat pada pada tahun 2017 kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 24.283.022 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.569.130 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 22.713.892 wisatawan. Pada tahun 2018, kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 29.283.022 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.728.194 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 27.575.125 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2019, kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 28.827.160 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.901.671 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 26.925.489 wisatawan. Kemudian pada tahun 2020, adanya pandemi virus Covid-19, membuat kunjungan wisatawan ke kota Surabaya menurun drastis menjadi sebanyak 10.681.318 kunjungan saja, dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 319.082 dan wisatawan nusantara sebanyak 10.362.236 kunjungan. Sedangkan sampai tahun 2021, kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 20.016.799 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 10.681.318 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 9.335.841 wisatawan. Berikut tabel mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya.



Tabel II.145
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	1.569.130	1.728.194	1.901.671	319.082	10.681.318
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	22.713.892	27.575.125	26.925.489	10.362.236	9.335.841
Jumlah		24.283.022	29.283.022	28.827.160	10.681.318	20.016.799

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, 2022

Dengan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian kota Surabaya dan *multiplier effect* bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan objek wisata jika dibandingkan dengan total kunjungan wisata ke Surabaya masih relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa daya tarik objek wisata di Surabaya belum optimal sehingga masih diperlukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang efektif.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan dan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini hanya memperhitungkan jumlah wisatawan yang berkunjung pada 20 obyek wisata yang ada di kota Surabaya, belum memperhitungkan wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata kuliner, lapangan golf, *mall*, maupun obyek wisata lainnya seperti hutan mangrove, museum Bank Indonesia, rumah pahlawan, dsb. Dari data tabel di atas tersebut dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata pada tahun 2017 sebanyak 5.811.227 kunjungan. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebanyak 7.215.914 kunjungan dan pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebanyak 6.524.456 kunjungan. Di tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata hanya sebanyak 3.517.009 kunjungan, jumlah ini mengalami penurunan sebagai dampak adanya pandemi Covid-19.



Tabel II.146
Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
	Jumlah Kunjungan	%	Jumlah Kunjungan	%	Jumlah Kunjungan	%	Jumlah Kunjungan	%	Jumlah Kunjungan	%
THP Kenjeran	511.227	10,47	408.976	8,26	460.552	7,11	102.162	5,87	87.687	8,63
Kenjeran Park	950.195	19,46	583.275	11,79	722.336	11,16	404.600	23,26	49.576	4,88
Taman Prestasi	55.156	1,13	78.135	1,58	103.998	1,61	22.182	1,28	11.932	1,17
Taman Hiburan Rakyat	11.115	0,23	8.122	0,16	872	0,01	0	0,00	0	0
Taman Remaja Surabaya	71.043	1,46	132.185	2,67	0	0,00	0	0,00	0	0
Monumen Tugu Pahlawan	264.501	5,42	245.208	4,96	328.588	5,08	71.521	4,11	28.981	2,85
Kawasan Wisata Religi Ampel	917.071	18,78	1.164.745	23,54	1.439.185	22,23	348.168	20,02	112.299	11,05
Masjid Al-Akbar	89.299	1,83	24.204	0,49	62.253	0,96	30.761	1,77	413	0,04
Masjid Cheng Ho	17.200	0,35	14.620	0,30	18.507	0,29	3.861	0,22	2.480	0,24
Kebun Binatang	1.220.669	25,00	1.590.761	32,15	2.412.604	37,26	570.855	32,82	619.861	61,00
Monumen Kapal Selam	219.654	4,50	220.409	4,45	310.111	4,79	79.320	4,56	72.643	7,15
Monumen Jalesveva Jayamahe	35.222	0,72	28.939	0,58	25.132	0,39	0	0,00	0	0
Loka Jala Srana	1.244	0,03	4.789	0,10	12.900	0,20	2.138	0,12	0	0
Rumah wafat WR. Soepratman	18.775	0,38	5.786	0,12	12.695	0,20	2.811	0,16	435	0,04

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2023



Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
	Jumlah Kunjungan	%	Jumlah Kunjungan	%	Jumlah Kunjungan	%	Jumlah Kunjungan	%	Jumlah Kunjungan	%
Makam DR. Soetomo	1.170	0,02	1.111	0,02	970	0,01	582	0,03	1.085	0,11
Patung Djoko Dolog	176.792	3,62	177.999	3,60	313.616	4,84	64.602	3,71	586	0,06
Balai Pemuda	165.200	3,38	156.300	3,16	171.600	2,65	35.800	2,06	28.130	2,77
House Of Sampoerna	147.457	3,02	95.844	1,94	69.826	1,08	0	0,00	0	0
Ciputra Water Park	9.395	0,19	6.912	0,14	8.711	0,13	0	0,00	0	0
Museum Kesehatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata	4.882.385	100	4.948.320	100	6.474.456	100	1.739.363	100	1.016.108	100

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, 2022



Pariwisata merupakan integral pembangunan yang semakin dipertimbangkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Pengaruh pembangunan pariwisata terhadap perkembangan regional, terutama peningkatan percepatan pembangunan dan perekonomian wilayah cukup besar. Hal ini menyebabkan pembangunan pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas, khususnya di kota-kota besar seperti Surabaya. Terjadi penurunan jumlah kunjungan di obyek wisata di tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19 seperti yang dipaparkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.147
Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kunjungan di objek wisata	7.294.219	7.558.967	10.161.859	3.517.009	2.967.996
Jumlah ODTW yang berhasil dikembangkan	4	6	10	11	13
Jumlah ODTW yang dikelola	11	13	14	14	15

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata, 2022

Untuk menggenjot perekonomian Kota Surabaya, pemerintah terus menerus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu fokus pembangunan di Kota Surabaya yang memberikan kontribusi yang besar adalah sektor pariwisata. Pariwisata memiliki perananan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan serta mengentaskan kemiskinan.

Pembangunan sektor pariwisata di Kota Surabaya saat ini menggunakan pendekatan kepariwisataan inklusif. Hal itu dituangkan dalam sasaran pembangunan pariwisata tahun 2019 oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Tujuan dari sasaran pembangunan pariwisata inklusif yakni meningkatkan usaha lokal dalam perindustrian pariwisata dan meningkatkan jumlah tenaga kerja lokal.

Sinergitas dalam kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* di Surabaya tentu memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan dan pengembangan objek wisata. Kolaborasi antar *stakeholder* tersebut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Hingga tahun 2021 terjadi peningkatan kesepakatan *stakeholder* di bidang pariwisata Surabaya yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.



Tabel II.148
Jumlah Kesepakatan Dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Akumulasi jumlah kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan	1	3	7	7	9

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata, 2022

2.1.3.3.3 Pertanian

Perkembangan pertanian di Surabaya dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian surabaya dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Surabaya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.149
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Total Nilai Tambah PDRB (miliar rupiah)	493.026,30	538.845,46	580.488,53	554.509,46	590.227,97
Total Nilai Tambah Sub Kategori Pertanian (miliar rupiah)	883,18	913,36	928,40	889,33	917,60
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB (persen)	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Kontribusi Sub Kategori pertanian di Surabaya terhadap PDRB kota Surabaya dari tahun ke tahun relatif kecil yaitu 0,16%, hal ini disebabkan karena semakin terbatasnya lahan pertanian di kawasan kota Surabaya serta mulai beralihnya mata pencaharian petani ke sektor yang lain yang lebih menjanjikan dari segi ekonomi. Hal ini perlu dilakukan upaya yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan mengaplikasikan teknologi tepat guna, pemilihan jenis komoditi serta penyuluhan dan pendampingan yang intensif.



Tabel II.150
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	10.568,57	10.130,64	9.685,21	12.042,85	8.082,50
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	2.017	1.844	1.750	1.854,90	1.242,8
3.	Produktivitas (ton/ha)	5,24	5,44	5,53	6,49	6,51

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2022

Pada tabel di bawah ini disajikan data bahwa jumlah produksi padi/bahan pangan utama lainnya di kota Surabaya dari tahun 2017 – 2021.

Tabel II.151
Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	10.568,57	10.130,64	9.685,21	12.042,85	8.076,12
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	503,05	400,49	109,54	323,86	162,219
3.	Jumlah Produksi Lombok (ton)	174,11	471	528,10	307,33	N/A
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	773,60	352,24	718,40	855,91	202,8
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	26,80	3.182,5	2.083,50	3.781,61	6763,71

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2022

Produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi (padi, jagung, lombok, sayur dan buah) dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk tahun 2021 komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu padi dan buah, sedangkan produksi sayur dan jagung mengalami penurunan. Data perkembangan produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi disajikan sebagaimana tabel di atas. Sedangkan untuk pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II.152
Pembudidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Memanfaatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pembudidaya	1164	1848	1077	1494	1494
Pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	140	283	213	451	451
Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	12,03%	15,31%	19,78%	30,19%	30,19%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura binaan masih belum optimal karena masih banyak pembudidaya yang belum memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi.

Selain pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan agar pembudidaya pertanian dan peternakan juga menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) agar hasil yang dicapai lebih maksimal. Namun sampai dengan tahun 2021, belum semua pembudidaya pertanian dan peternakan telah mengaplikasikan TTG. Data pembudidaya pertanian dan peternakan yang telah mengaplikasikan TTG bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.153
Pembudidaya Pertanian yang Mengaplikasikan TTG Tahun 2017 – 2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pembudidaya pertanian	N/A	1.164	1.848	1.077	1.494	1.494
Pembudidaya pertanian yang mengaplikasikan TTG	N/A	300	671	562	992	1.248
Persentase pembudidaya yang mengaplikasikan TTG	N/A	25,77%	36,31%	52,18%	66,40%	83,53%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022



Tabel II.154
Pembudidaya Peternakan yang Mengaplikasikan TTG
Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pembudidaya peternakan	320	320	312	116	99
Jumlah Pembudidaya peternakan yang mengaplikasikan TTG	80	121	162	78	85
Persentase Pembudidaya peternakan yang mengaplikasikan TTG	25,00%	37,81%	51,92%	67,24%	85,85%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

Untuk menjamin kualitas dan kesehatan hewan ternak, Pemerintah Kota Surabaya membuka pelayanan untuk pengobatan hewan ternak di Kota Surabaya. Data intervensi pengobatan dan vaksin hewan ternak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.155
Intervensi Hewan Ternak Kota Surabaya 2017 – 2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Ternak	41.587	15.663	27.390	47.516	91.609	23.870
Jumlah ternak diintervensi	34.575	13.445	25.039	43.332	81.398	21.128
Persentase ternak yang diintervensi (%)	83,14%	85,84%	91,42%	91,19%	88,85%	88,51%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

2.1.3.3.4 Perdagangan

Perdagangan di Surabaya merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kota Surabaya yaitu lebih dari 26 persen, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar modern, pasar tradisional yang dikelola PD Pasar dan pembangunan pasar oleh pemerintah kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.156
Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Jenis Pasar Modern	2017	2018	2019	2020	2021
1	Supermarket	61	67	63	83	83
2	Minimarket	566	593	601	709	709
3	Departement Store	9	12	12	13	13



No	Jenis Pasar Modern	2017	2018	2019	2020	2021
4	Mall/Plaza	33	34	34	34	34
Total		669	669	728	839	839

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, 2022

Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil. Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing UMK (Usaha Mikro Kecil). Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta berupaya meningkatkan peran PD. Pasar Surya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dikelola.

Tabel II.157

Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pasar Sememi/ Bandarejo (Lanjutan)			-	-
2	Pasar Gunung Anyar (Lanjutan)				
3	Pasar Nambangan/ Kenjeran (Lanjutan)	Pasar Nambangan/ Kenjeran (Lanjutan)			
4	Pasar Penjaringansari		Pasar Penjaringansari (lanjutan)		
5	Pasar Keputih				
6	Pasar Dukuh Menanggal				
7	Pasar Jambangan				
8		Pasar Kapasari			
9		Pasar Kutisari	Pasar Kutisari (lanjutan)		
10			Pasar Burung Dolly		
11			Pasar Loak Gembong (rehab)		

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2022



Tabel II.158
Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2017 – 2021

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Selatan	17	17	17	17	17
Timur	22	22	22	22	22
Utara	28	28	28	28	28
Total	67	67	67	67	67

Sumber : Sekretariat Daerah, 2022

Perkembangan sektor perdagangan selain ditunjukkan dengan perkembangan pasar modern, juga dapat dilihat dari pertumbuhan ijin usaha perdagangan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel II.159
Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Jenis Perusahaan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perdagangan	12.791	13.887	9.336	13.562	13.562
2	Industri	330	185	139	253	253
Total		13.121	14.072	9.475	13.815	13.815

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Dalam upaya mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/*city logistic*.

Aktivitas perdagangan di kota surabaya dapat dilihat dari aktivitas ekspor impor yang tercermin dari tabel berikut.

Tabel II.160
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Ekspor (juta USD)	18.268,87	18.120,06	17.278,97	17.278,97	22.780,68
Nilai Impor (juta USD)	16.956,90	17.368,05	15.382,23	15.382,23	19.568,40
Nilai Ekspor Bersih (juta USD)	1.311,97	752,02	1.896,74	1.896,74	3.212,27

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Timur dan Bappeko Surabaya, 2022

Berdasarkan perkembangannya, neraca perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2021 tercatat surplus sebesar US\$ 3.212.272.002. Hal tersebut didorong oleh



permintaan eksternal, yaitu sebesar US\$ 22.780.677.395 dan impor sebesar US\$ 19.568 405.393. Adanya peningkatan nilai realisasi ekspor dan impor Kota Surabaya tahun 2021 dapat merefleksikan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Surabaya sudah lebih produktif yang ditunjukkan dari permintaan akan input produksi yang meningkat seiring pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat di Kota Surabaya. Permintaan eksternal turut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya seperti Tiongkok, Amerika Serikat dan Jepang. Dengan demikian, terjaganya kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya mempengaruhi terhadap net ekspor Kota Surabaya selama tahun 2021.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah

2.1.3.4.1.1 Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.161
Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	BB	BB
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	68,86	70,03	73,47	75,13	75,34

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2022

Pada tahun 2017, telah dilaksanakan penilaian evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) untuk Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai 68,86 atau tingkat akuntabilitas kinerjanya B. Pada tahun 2018, penilaian evaluasi SAKIP untuk Kota Surabaya mengalami peningkatan menjadi 70,03 dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, Pemerintah Kota Surabaya selalu mendapatkan predikat kinerja tingkat BB. Meski demikian, nilai evaluasi SAKIP terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini diupayakan melalui perbaikan indikator kinerja utama Walikota dan Kepala Perangkat Daerah, dan akan terus ditingkatkan melalui proses penyusunan rencana kerja, pelaksanaan serta evaluasi hasil rencana yang lebih baik dan terintegrasi.



Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada *standard operational procedure* (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala SKPD.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Surabaya menjalankan ketatalaksanaan pelaksanaan pemerintahan dengan berpedoman pada adanya *standard operational procedure* (SOP) pada setiap jenis pelayanan. Pada 361 jenis pelayanan, sebanyak 215 jenis pelayanan atau 59,56 persen telah memiliki *standard operational procedure* (SOP).

Tabel II.162

Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah jenis pelayanan	329	329	329	329	361
2.	Jumlah jenis pelayanan yang memiliki SOP	48	124	172	182	215
3.	Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP (persen)	14,59	37,69	52,28	55,32	59,56

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Sedangkan untuk SOP yang dievaluasi tiap tahun bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.163

SOP Dievaluasi Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah SOP	868	868	868	868	906
SOP dievaluasi	40	76	561	10	68

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Dari keseluruhan 906 SOP yang ada, 40 di antaranya telah dilakukan evaluasi pada tahun 2017. Pada tahun 2018, terdapat 76 SOP lagi yang dievaluasi, sedangkan di tahun 2019 ada 561 SOP dievaluasi. Selanjutnya di tahun 2020 ada 10 SOP dievaluasi dan di tahun 2021 ada 68 SOP yang dievaluasi.

Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen untuk terus melakukan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penyelesaian rancangan produk hukum dan evaluasi terhadap produk hukum yang sudah ada. Sejak tahun 2017 hingga 2021, setiap



tahunnya terdapat 12 produk hukum yang dievaluasi. Sementara itu, produk hukum baru yang diselesaikan tiap tahunnya mencapai 100% terhadap rancangan produk hukum di tahun tersebut. Jumlah keseluruhan produk hukum baru yang bisa diselesaikan pada tahun 2017 hingga akhir tahun 2021 sebanyak 464 produk hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.164
Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rancangan produk hukum	79	89	75	72	149
2.	Jumlah rancangan produk hukum yang diselesaikan	79	89	75	72	149
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Selain itu, pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi hal yang penting dalam rangka mendukung pelayanan pada masyarakat sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Rekap kinerja BUMD Kota Surabaya sejak tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.165
Rekap Hasil Audit Kinerja BUMD Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Nama BUMD	2017	2018	2019	2020	2021
PDAM Surya Sembada	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
PD Pasar Surya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
PD Rumah Potong Hewan	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP
PT BPR Surya Artha Utama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
PT Surya Karsa Utama	WTP	WTP	WDP	WDP	TMP

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa BUMD milik Pemerintah Kota Surabaya yang kinerjanya belum maksimal. Beberapa BUMD yang telah memiliki kinerja baik yang ditunjukkan dengan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 antara lain PDAM Surya Sembada, PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, dan PT. BPR Surya Artha Utama.



2.1.3.4.1.2 Pelayanan Publik

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.166
Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata nilai SKM Pelayanan	76,30	83,74	82,43	86,05	88,37

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Pelaksanaan *survey* kepuasan masyarakat telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTSA Surabaya Pusat, UPTSA Surabaya Timur, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. M. Soewandhie, Laboratorium Kesehatan Daerah, 63 puskesmas, 31 kecamatan, dan 154 kelurahan di Kota Surabaya. Rata-rata nilai SKM sepanjang tahun 2017 hingga 2021, mayoritas berada di atas nilai 80, yakni “Baik”. Meski demikian, nilai tersebut selalu naik dan turun setiap tahunnya. Artinya, masih dibutuhkan usaha yang lebih inovatif lagi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya dapat mencapai kategori “Sangat Baik”.

2.1.3.4.1.3 Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan



kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

Pada tahun 2021 terdapat 115 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut sebanyak 115 MoU atau 100% terealisasi dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Untuk kerjasama luar negeri, terdapat 10 MoU dan keseluruhan 10 MoU memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya.

Tabel II.167
MoU Kerjasama (Non Perdagangan) Antar Daerah dan Pihak Ketiga
Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti tahun 2021	115
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga keseluruhan tahun 2021	115
3.	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti tahun 2021	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Tabel II.168
MoU Kerjasama (non perdagangan) Luar Negeri Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti tahun 2021	10
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri keseluruhan tahun 2021	10
3.	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti tahun 2021	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Dari beberapa Kerjasama tersebut, setiap tahunnya dilakukan evaluasi. Data jumlah Kerjasama yg dievaluasi bisa dilihat di tabel berikut.

Tabel II.169
MoU Kerjasama Kota Surabaya yang Dievaluasi Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kerjasama	139	215	262	161	125
Jumlah kerjasama dievaluasi	16	21	27	29	21

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022



2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.5.1 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012. Sedangkan di tahun 2016, disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016, sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.170
Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Jenis Dokumen	2017	2018	2019	2020	2021
1	RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada tahun 2015 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 60 program, tahun 2016 sebanyak 79 program dan pada tahun 2017 sampai dengan 2019 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 102 program. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan program-program pembangunan telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2020, telah dilakukan *review* terhadap RPJMD 2016-2021 untuk dilaksanakan di tahun 2020 dan 2021, namun dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka khusus untuk tahun 2021 dilaksanakan pemetaan program sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga terdapat perubahan jumlah program dalam RPJMD Tahun 2021. Akan tetapi, meski jumlah program berkurang, namun esensi program, berupa indikator-indikator versi *Review* RPJMD 2016-2021, seluruhnya tetap dimasukkan ke 121 program hasil konversi.

Tabel II.171
Penjabaran Program RPJMD Dalam RKPD Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	102	102	102	177	177
2	Jumlah Program RKPD	102	102	102	177	121
3	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100*

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022

Keterangan: *) Jumlah program RKPD 2021 menyesuaikan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020



Sementara itu, tingkat capaian keberhasilan program pada tahun 2017 mencapai 91,18%, dan pada tahun 2018 tingkat capaian keberhasilan program mencapai 98,04%. Sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020, tingkat capaian keberhasilan program meningkat menjadi 99,02%, dan di tahun 2021 tingkat capaian keberhasilan program mencapai 98,13%. Data tingkat capaian keberhasilan program pembangunan tahun 2017-2021 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.172**Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Tahun 2017 – 2021**

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	91,18%	98,04%	99,02%	99,02%	98,13

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Rata-rata penyerapan anggaran di tahun 2020 mencapai 90,18%. Sedangkan pada tahun 2021, rata-rata penyerapan anggaran mencapai 80,17%.

Tabel II.173**Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata penyerapan anggaran kegiatan	87,29	90,19	95,95	90,18	80,17

Sumber: Sekretariat Daerah, diolah, 2022

Dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan kinerja dan perbaikan pada pelayanan publik perlu adanya monitoring, evaluasi dan pengendalian. Dari tahun 2018 hingga 2020 masih terdapat pelaksanaan kegiatan yang belum tepat waktu. Pada tahun 2018, terdapat 93 kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat waktu atau 7,70% dari keseluruhan 1.207 kegiatan. Pada tahun 2019, terdapat 166 kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat waktu atau 13,52% dari keseluruhan 1.227 kegiatan. Sedangkan pada tahun 2020, terdapat 153 kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat waktu atau 15,43% dari keseluruhan 838 kegiatan. Jumlah kegiatan yang belum tepat waktu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel II.174
Pelaksanaan Kegiatan Kota Surabaya Tahun 2017– 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pelaksanaan kegiatan tepat waktu	N/A	1.114	1.061	838	N/A
Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	N/A	93	166	153	N/A
Jumlah kegiatan	N/A	1.207	1.227	991	1.206
Persentase kegiatan tidak tepat waktu	N/A	7,70%	13,52%	15,43%	N/A

Sumber: Sekretariat Daerah, 2022

Persentase pelaksanaan kegiatan dan pembangunan yang belum tepat waktu dari tahun 2018 hingga 2020 terus mengalami peningkatan. Untuk itu perlu adanya penekanan dan evaluasi agar tahun kedepannya dapat memperkecil persentase kegiatan yang tidak tepat waktu.

2.1.3.5.2 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistim. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyusunan pola karier PNS yang berhasil diidentifikasi meliputi pendidikan formal, diklat, usia, masa kerja, golongan ruang, pangkat dan tingkat jabatan serta kompetensi. Pemerintah Kota Surabaya juga telah merumuskan sistem pengembangan pola karier pegawai dan saat ini dalam proses pengesahan menjadi peraturan Kepala Daerah.

Selain itu, pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tak kalah pentingnya dalam memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyarkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat melalui *off the job* dan *on the job training*. Pada tahun 2017, jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 4.508 pegawai, kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 4.834 pegawai. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 5.803 pegawai, pada tahun 2020 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 4.503 pegawai dan di tahun 2021 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 4.725 pegawai. Di bawah ini terdapat jumlah data pegawai yang kompeten.

**Tabel II.175****Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pegawai kompeten	4.508	4.834	5.803	4.503	4.725
2	Jumlah pegawai belum kompeten	3.060	3.341	2.734	2.033	1.636

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

Dari data di atas, sejak tahun 2018-2021, jumlah pegawai belum kompeten menurun setiap tahunnya. Namun pegawai yang belum kompeten masih relatif tinggi. Mengingat kompetensi aparatur sipil negara (ASN) berperan penuh dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman yang dinamis, diupayakan untuk memperkecil jumlah pegawai yang belum kompeten.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pejabat struktural, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

Tabel II.176**Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2017 – 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pejabat struktural	1.577	1.577	1.580	1.461	1.414
2.	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	1.134	1.255	1.174	1.048	944
3.	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	71,91%	78,24%	74,30%	71,73%	66,76%

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

2.1.3.5.3 Pengelolaan Perbatasan

Tahapan pelaksanaan pekerjaan penegasan batas wilayah pada tahun 2016 – 2019 meliputi sosialisasi pelaksanaan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan lalu dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, pembuatan garis batas di atas peta serta penetapan ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Agar batas daerah tersebut dapat diterima oleh semua pihak maka harus didukung oleh dokumen otentik berupa peta batas daerah dan tanda fisik



di lapangan berupa pilar tanda batas. Sedangkan pada tahun 2020, penegasan batas wilayah dilakukan dengan mengukur dan menetapkan batas wilayah melalui Perwali. Data penegasan wilayah Tahun 2017- 2021 sebagai berikut.

Tabel II.177
Penegasan Wilayah Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kecamatan	31	31	31	31	31
Sudah dilakukan penegasan wilayah	0	0	0	10	12

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

2.1.3.6 Unsur Pengawasan

Dalam melaksanakan setiap kegiatan di instansi pemerintahan memerlukan data serta informasi. Salah satu informasi yang diperlukan melalui kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi sebagai aspek penunjang dalam hal pelayanan, baik buruknya kinerja pelayanan dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan administrasi yang berjalan. Dalam menjalankan setiap kegiatan tata kelola administrasi seringkali adanya pelanggaran yang terjadi di Perangkat Daerah. Karena itu, diperlukannya pengawasan untuk mengurangi pelanggaran di setiap tahunnya. Sebagaimana bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.178
Pelanggaran Tata Kelola Administrasi Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pelanggaran tata kelola administrasi	-	73	38	24	19

Sumber: Inspektorat Daerah, 2022

Dapat dilihat pada tabel di atas tahun 2018 sampai tahun 2020 pelanggaran tata kelola administrasi mengalami penurunan, dari 73 Dinas Daerah yang melakukan pelanggaran administrasi menurun pada tahun 2019 hanya terjadi 38 pelanggaran, begitu pula pada tahun 2020 terjadi penurunan pelanggaran tata kelola administrasi hanya 24 pelanggaran yang dilakukan oleh Dinas Daerah kota Surabaya. Dan pada tahun 2021, pelanggaran tata kelola administrasi berkurang menjadi 19 pelanggaran.

Selain itu, unsur pengawasan internal juga diperlukan untuk mendisiplinkan aparatur. Banyaknya pelanggaran disiplin aparatur, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut, mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal agar mengurangi jumlah pelanggaran.



Tabel II.179

**Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur di Lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021**

Jenis Hukuman Disiplin	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Hukuman Disiplin Ringan	14	5	2	8	13
Jumlah Hukuman Disiplin Sedang	4	3	2	7	0
Jumlah Hukuman Disiplin Berat	19	10	23	15	24
Total Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan	37	18	27	30	37

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

2.1.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

2.1.3.7.1 Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Masyarakat lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan



partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah Ormas Tahun 2017 –2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.180
Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Ormas Aktif	32	25	21	15	38
2	Jumlah Ormas Terdaftar	167	167	167	167	167

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan terhadap Ormas dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan Ormas melalui antara lain fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sampai dengan akhir tahun 2020, kegiatan pembinaan terhadap ormas terhadap 24 lembaga.

2.1.3.7.2 Penanganan Potensi Konflik

Lingkungan yang damai dan tertib merupakan keinginan setiap masyarakat karena hal ini termasuk salah satu faktor yang sangat signifikan pengaruhnya pada kehidupan manusia.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintah kota Surabaya melakukan upaya pengawasan terhadap potensi konflik yang bisa terjadi dimasyarakat. Data potensi konflik selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.181
Jumlah Potensi Konflik Kota Surabaya Tahun 2017– 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah potensi konflik	226	236	227	215	297
2	Jumlah konflik	10	11	13	10	8

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021

Guna mengurangi risiko potensi konflik ini, partisipasi masyarakat sangat signifikan dalam mewujudkan kerukunan antar elemen di masyarakat.



2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat produktivitas per kategori lapangan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

Tabel II.182
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga perkapita				Total	
	Makanan	%	Non Makanan	%		
2017	758.750	39,88	1.143.770	60,12	1.902.520	100%
2018	776.985	40,94	1.120.876	59,06	1.897.861	100%
2019	742.013	36,60	1.285.586	63,40	2.027.599	100%
2020	777.725	41,39	1.101.421	58,61	1.879.146	100%
2021	810.743	41.52	1.141.846	54.48	1.952.589	100%

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun pandemi 2020 dan 2021. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat. Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana berikut.

Tabel II.183
Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja (orang)	1.495.837	1.520.041	1.566.846	1.582.564	1.572.888
PDRB (Juta Rp)	493.026.305	538.845.465	580.488.529	554.509.457	590.227.967



Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Produktivitas (Juta Rp per orang)	329,60	354,49	370,48	350,39	375,25

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kota Surabaya maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub kategori PDRB yang menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu kategori transportasi dan pergudangan.

Tabel II.184
Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan
Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB ADHK (miliar rupiah)	17.707,95	19.046,86	20.497,98	19.477,42	19.875,91
Laju Pertumbuhan (persen)	6,87	7,56	7,62	-4,98	2,05

Sumber : BPS Kota Surabaya diolah, 2022

2.1.4.2 Fokus Infrastruktur Kewilayahan

2.1.4.2.1 Indeks Infrastruktur Kota

Indeks infrastruktur kota merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan infrastruktur kota. Indeks ini juga digunakan untuk menunjang pemantapan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan. Komponen penyusun Indeks Infrastruktur Kota terdiri dari tiga komponen, yaitu Tingkat Mobilitas, Tingkat Konektivitas dan Tingkat Aksesibilitas. Indeks ini merupakan indikator yang baru mulai dihitung data dasarnya pada tahun 2020, yakni sebesar 0,95. Sedangkan pada tahun 2021, sebesar 0,995.

Tingkat Mobilitas didapatkan dari Layanan Kinerja Ruas Jalan di Kota Surabaya dengan melakukan survey lapangan pada ruas jalan protokol yang ada di Kota Surabaya. Layanan Kinerja Ruas Jalan tersebut berupa Derajat Kejenuhan (V/C Ratio), Level of Service (LOS) dan Lama Jam Sibuk. Kota Surabaya telah berhasil mengurai kepadatan lalu lintas dengan melakukan pengembangan infrastruktur kota, di antaranya menyediakan alternatif rute perjalanan karena memiliki kehandalan jaringan jalan, dan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.



Tingkat Konektivitas didapatkan dari Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah dan Penurunan Luas Kawasan Tergenang. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, serta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan telah melakukan berbagai upaya, di antaranya mempercepat waktu tanggap penanggulangan kejadian bencana alam kurang dari 24 jam dan waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit serta pencegahan kejadian kebakaran bangunan/lahan. Pembangunan, peningkatan, serta operasional sarana dan prasarana pematusan dalam rangka penanganan genangan juga berperan penting dalam capaian tingkat konektivitas.

Tingkat Aksesibilitas didapatkan dari Persentase Cakupan Penyebaran dan Layanan Jaringan Utilitas Kota dan Persentase Sinkronisasi Sistem Penataan Ruang dalam Kebijakan Satu Peta Tata Ruang Kota. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, di antaranya:

- a. Meningkatkan dan mengelola sistem jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) hemat energi melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau;
- b. Menyediakan layanan air bersih melalui Badan Usaha Milik Daerah PDAM Surya Sembada;
- c. Menyediakan layanan rekomendasi utilitas yang mencakup rekomendasi penempatan jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan gas, jaringan listrik maupun utilitas lainnya melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

2.1.4.2.2 Penataan Ruang

Pada tahun 2017, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Tabel II.185

Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40



Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Wilayah Produktif (ha)	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80
Persentase luas wilayah produktif (persen)	93,27	93,27	93,27	93,27	93,27

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2021

Tabel II.186

Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Industri (ha)	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40
Rasio luas wilayah industri (persen)	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2021

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri pada tahun 2017 adalah sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya.

Tabel II.187

Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Perkotaan (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Rasio luas wilayah perkotaan (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2021

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,



pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya.

2.1.4.2.3 Perhubungan

Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk terus menyediakan fasilitas jalan yang memadai dengan memperhatikan perkembangan volume lalu lintas harian pada ruas jalan utama di Kota Surabaya. Hal ini diukur melalui V/C ratio yaitu perhitungan volume per jam tertinggi untuk memperkirakan volume per jam desain (yaitu volume per jam tertinggi ke-n) untuk keperluan desain yang ideal. Pada tahun 2021, terdapat 49 jalan kewenangan kota dan nasional yang memiliki V/C Ratio $\leq 0,95$ dari total 51 ruas jalan yang disampling. Semakin kecil nilai V/C ratio pada suatu ruas jalan maka semakin baik pula fungsi jalan tersebut. Rata-rata V/C ratio di beberapa ruas jalan di Kota Surabaya terbukti semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 rata-rata V/C ratio di Kota Surabaya adalah 0,56. Kemudian turun menjadi 0,54 pada tahun 2019, dan turun lagi di tahun 2020 menjadi 0,47 dan di tahun 2021 menjadi 0,42. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas dengan melakukan pengembangan infrastruktur kota antara lain dengan menyediakan alternatif rute perjalanan serta melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Rata-rata V/C ratio jalan di Kota Surabaya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel II.188
Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata V/C Ratio	-	0,56	0,54	0,47	0,42

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2021

Tabel II.189
Derajat Kejenuhan Lalu Lintas (V/C Rasio) Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2021

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	2018	2019	2020	2021
1	Jl. Adityawarman	kota	0,28	0,30	0,28	0,295
2	Jl. Bengawan	kota	0,15	0,16	0,13	0,155
3	Jl. Blauran	kota	1,03	0,95	0,72	0,57



No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	2018	2019	2020	2021
4	Jl. Bubutan	kota	0,54	0,67	0,40	0,82
5	Jl. Citra Raya Unesa	kota	0,55	0,51	0,40	0,27
6	Jl. Darmo	kota	0,55	0,47	0,50	0,545
7	Jl. Dharmahusada Utara VIII	kota	0,17	0,14	0,12	0,065
8	Jl. Dharmawangsa	kota	0,32	0,38	0,34	0,27
9	Jl. Dinoyo	kota	0,25	0,13	0,28	0,195
10	Jl. Diponegoro	nasional	0,51	0,44	0,42	0,45
11	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno	kota	0,43	0,43	0,42	0,49
12	Jl. Dr. Soetomo	kota	0,37	3,19	0,42	0,3
13	Jl. Embong Malang	nasional	0,52	0,37	0,44	0,55
14	Jl. Gemblongan	kota	0,58	0,61	0,48	0,53
16	Jl. Gubeng pojok	nasional	0,73	0,34	0,47	0,28
17	Jl. Gubernur Suryo	kota	1,59	0,91	0,67	0,32
18	Jl. Hayam Wuruk	kota	0,26	0,26	0,17	0,14
19	Jl. Indragiri	kota	0,27	0,20	0,18	0,375
20	Jl. Indrapura	kota	0,94	0,55	0,83	0,8
21	Jl. Jagir Wonokromo	nasional	0,32	0,29	0,18	0,315
22	Jl. Jakarta	kota	0,54	0,66	0,60	0,385
23	Jl. Joyoboyo	kota	0,46	0,64	0,22	0,545
24	Jl. Kapuas	kota	0,05	0,01	0,01	0,035
25	Jl. Kayun	kota	0,43	0,23	0,23	0,25
26	Jl. Kedung Doro	kota	0,29	0,23	0,27	0,41
27	Jl. Kejawan Putih Tambak	kota	0,31	0,13	0,27	0,2
28	Jl. Kembang Jepun	kota	0,75	0,36	0,57	0,55
29	Jl. Kertajaya Indah	kota	0,36	0,58	0,45	0,53
30	Jl. Kusuma Bangsa	kota	0,69	0,63	0,49	0,47
31	Jl. Laguna Kejawan Putih Tambak	kota	0,31	0,23	0,22	0,25
32	Jl. Mayjend HR Muhammad	kota	0,63	0,34	0,26	0,565
34	Jl. Mayjend Sungkono	kota	0,52	0,43	0,44	0,475



No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	2018	2019	2020	2021
35	Jl. Ngagel	kota	0,44	0,46	0,50	0,27
36	Jl. Pahlawan	kota	1,09	0,74	1,11	0,53
37	Jl. Pemuda	kota	0,78	0,51	0,79	0,83
38	Jl. Perak Barat	nasional	0,68	0,85	0,63	0,71
39	Jl. Perak Timur	nasional	0,88	0,87	0,54	0,41
40	Jl. Polisi Istimewa	kota	0,19	0,19	0,16	0,22
41	Jl. Prof. Dr. Mustopo	kota	0,75	0,66	0,72	0,565
42	Jl. Rajawali	kota	0,96	0,85	0,83	0,51
43	Jl. Raya ITS	kota	0,34	0,58	0,19	0,23
44	Jl. Stasiun Wonokromo	nasional	0,51	0,29	0,50	0,42
45	Jl. Sumatera	nasional	0,55	0,52	0,37	0,02
46	Jl. Tunjungan	kota	0,85	0,82	1,03	0,58
47	Jl. Urip Sumoharjo	kota	0,66	0,89	0,55	0,475
48	Jl. Jendral Basuki Rahmat	kota	1,34	1,18	1,38	1,2
49	Jl. Jembatan Merah/ Jl.Veteran	kota	0,95	0,86	1,01	1,05
50	Jl. Panglima Sudirman	kota	0,74	0,22	0,96	0,27
51	Jl. Keputran	kota	0,12	0,12	0,05	0,035
Rata-rata di jalan kewenangan kota			0,56	0,55	0,48	0,43
Rata-rata total			0,56	0,54	0,47	0,42

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Pada tabel di atas, meskipun rata-rata derajat kejenuhan menunjukkan tren yang semakin menurun, namun masih adanya beberapa ruas jalan yang derajat kejenuhannya lebih dari 0,95 menunjukkan masih diperlukannya upaya untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui *Traffic Demand Management* yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan.

Meningkatnya volume kendaraan di Kota Surabaya menyebabkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas semakin besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka kecelakaan dengan melakukan sosialisasi



agar masyarakat tetap tertib saat berkendara, pemasangan rambu dan lain-lain. Angka kejadian kecelakaan lalu lintas di Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.190

Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	1.349	1.191	1.345	874	932

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2022

Mengingat Kota Surabaya adalah kota besar dan merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, seringkali Kota Surabaya menjadi tempat jujukan bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut dapat terlihat pada jumlah kepadatan masyarakat di Kota Surabaya antara siang hari dan malam hari. Pada malam hari, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk kurang lebih 2.970.932 jiwa, sementara pada siang hari bisa menjadi 2 kali lipat karena masyarakat dari Kabupaten/Kota sekitar yang memiliki pekerjaan di Kota Surabaya. Hal ini membuat akses keluar masuk Kota Surabaya sering mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah sekitar Surabaya agar dapat memberikan alternatif moda transportasi bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih moda transportasi.

2.1.4.2.4 Drainase

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut.

Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya secara umum mengalami penurunan. Pada 2017 rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 25,03 menit, hingga Tahun 2021 ini rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 22,04 menit sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.191

Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan (menit)	25,03	22,43	22,01	22,22	22,04

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2022



Rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya secara umum juga mengalami penurunan. Pada tahun 2017, rata-rata tinggi genangan sebesar 13,37 cm. Hingga pada Tahun 2021 ini, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 10,92 cm sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.192
Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata Tinggi Genangan (cm)	13,37	12,49	9,20	10,92	10,92

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2022

Luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 765,12 ha. Hingga pada Tahun 2021, luas wilayah genangan Kota Surabaya terus menurun menjadi sebesar 452,57 hektar, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.193
Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Wilayah Genangan (ha)	765,12	697,79	688,96	462,64	452,57

Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2022

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan banjir dan genangan telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematuan di Kota Surabaya antara lain membangun boezem-boezem kurang lebih seluas 124,78 hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 56 rumah pompa, serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada muara-muara saluran yang menuju ke laut (*smart water level*) sehingga pada ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya genangan di wilayah tersebut. Hingga sekarang, *smart water level* telah terpasang pada 7 (tujuh) rumah pompa, yaitu pada Pompa Boezem Kalidami, Pompa Boezem Morokrembangan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi. Namun masih terjadi genangan di beberapa wilayah di Kota Surabaya. Dalam upaya menurunkan luas wilayah genangan ini, Pemerintah Kota Surabaya telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematuan antara lain melalui pembangunan dan normalisasi saluran, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah pompa baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan *smart water level* di rumah pompa lainnya.



Perangkat



Sensor dan Tiang Penyangga



Display Matrix

Gambar II.20
Perangkat Smart Water Level

2.1.4.2.5 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota di antaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU) secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Sampai dengan tahun 2021, jumlah PJU yang terpasang sebanyak 100.257 titik dan seluruhnya dalam kondisi baik.

Tabel II.194
Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tahun 2017– 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah PJU terpasang (titik per tahun)	5.380	5.372	6.090	6.400	1.324

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemasangan PJU di seluruh Kota Surabaya secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi



sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan/ konservasi energi kota.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang terdiri dari:

1. Komponen Pengungkit (*Enablers*), yaitu penilaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya antara lain dengan melakukan penataan unsur dan fungsi manajemen pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Komponen Hasil (*Results*), merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan penilaian BB (78,13). Sedangkan pada tahun 2021, hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali memberikan nilai BB (78,38). Meski mengalami peningkatan, nilai BB dapat dikatakan masih jauh harapan. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya peran ASN (Aparatur Sipil Negara) baik dalam pemahaman dan penerapan maupun pengawasan internal yang dilaksanakan. Di sisi lain, pentingnya peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi menjadi syarat mutlak bagi kepuasan masyarakat sekaligus semakin meningkatkan potensi masuknya investasi di Kota Surabaya.

2.1.4.3.2 Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II.195
Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bidang Politik	35	67	78	64	67
2	Bidang Ekonomi	84	64	68	81	142
3	Bidang Sosial Budaya	107	105	81	70	87
Jumlah unjuk rasa		226	236	227	215	296

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

Jumlah unjuk rasa di kota Surabaya dari tahun 2017 ke 2018 mengalami sedikit kenaikan dan pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2021, terjadi kenaikan kejadian unjuk rasa sebanyak 296 kejadian dan didominasi oleh unjuk rasa di bidang ekonomi. Tetapi meskipun angka unjuk rasa di 2021 meningkat, keseluruhan unjuk rasa bisa tertangani dengan baik dan tidak menimbulkan korban jiwa. Hal ini menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif dan bisa dikendalikan, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya.

Seperti disajikan pada tabel di berikut ini, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2018, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.

Tabel II.196
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Perda Terkait Perijinan	0	0	1	0	0
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa	0	1	0	0	0
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022



2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.197
Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah lulusan D4/S1	328.211	303.549	305.315	303.41	287.516
2	Jumlah lulusan S2	22.091	21.010	21.363	21.179	19.976
3	Jumlah lulusan S3	1.315	1.353	1.376	1.405	1.412
4	Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3	351.617	325.912	328.054	325.994	308.904
5	Jumlah penduduk	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952
6	Rasio lulusan D4/S1/S2/S3	0,114	0,105	0,104	0,109	0,104

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

2.1.4.4.2 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel II.198
Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	713.916	672.334	700.826	688.478	675.558
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	232.830	216.158	229.491	186.272	193.749



No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	946.746	888.492	930.317	874.750	869.307
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	2.395.881	2.206.240	2,229,164	2.095.980	2.101.645
6	Rasio ketergantungan	0,395	0,402	0,417	0,417	0,414

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk Surabaya pada Tahun 2021 antara lain kelompok usia non produktif, yakni penduduk dengan usia kurang dari 15 tahun dan usia lebih dari 64 tahun. Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar 70,71%. Sehingga rasio ketergantungan sebesar 0,414 yaitu setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 41 hingga 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan rekapitulasi hasil monitoring pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2021 dan realisasi tahun kelima RPJMD 2016-2021 yang bersumber dari hasil monitoring pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah serta dari laporan pertanggungjawaban APBD Akhir Tahun Anggaran 2021, maka rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2021, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun 2021, secara umum disajikan pada tabel berikut.



Tabel II.199
Rekapitulasi Evaluasi Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
dan Kinerja Hasil Program Tahun 2021

No.	Jenis Pencapaian Indikator Kinerja	Program (indikator kinerja hasil)		Kegiatan (indikator kinerja keluaran)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Realisasi indikator kinerja yang tidak memenuhi target yang direncanakan (capaian kurang dari 100%)	30	11,24%	159	12,37%
2	Realisasi indikator kinerja yang telah memenuhi target yang direncanakan (capaian 100% - 300%)	234	87,64%	1122	87,32%
3	Realisasi indikator kinerja yang melebihi target yang direncanakan (capaian lebih dari 300%)	3	1,12%	4	0,31%
Total		267	100%	1285	100%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022

Adapun capaian kinerja pembangunan Kota Surabaya berdasarkan urusan pemerintahan daerah, program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2021, dijelaskan pada tabel berikut ini tentang Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2021.



Tabel II.200
Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Akhir Tahun 2021
Kota Surabaya

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																								
	1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																								
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%		100%		100%		0%		100%		93,18 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%		100%		100%		0%		100%		90,28 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
	1.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					12 Dokumen	67.000	2 Dokumen	33.400	2 Dokumen	13.800	9 Dokumen	8.400	12 Dokumen	5.600	12 Dokumen	5.600	100,00 %	8,36%	100,00%	8,36%			Dinas Pendidikan
	1.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	1.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	853.500.343	100%	101.693.844	100%	475.043.181	100%	126.015.278	100%	312.427.735	100%	312.427.735	100,00 %	36,61%	100,00%	36,61%			Dinas Pendidikan
	1.01.01.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																								
	1.01.01.03.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1.079.557	2%	149.287	2%	222.677	88,89%	263.724	100%	240.277	100%	240.277	100,00 %	22,26%	100,00%	22,26%			Dinas Pendidikan
Meningkatkan kualitas pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			131.644.632		123.063.246		936.756.134		53.428.963		110.145.402		144.248.140		187.701.549		307.822.505		32,86%		430.885.750		40,33%	
			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket A	87,1 %		106,41 %		87,1 %		0%		100%		100%		100%		100%		114,81 %		100%		114,81 %		-
			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B	89,66 %		100,45 %		89,66 %		0%		100%		100%		100%		100%		111,53 %		100%		111,53 %		-
			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket C	91,37 %		109,6 %		91,37 %		0%		100%		100%		100%		100%		109,45 %		100%		109,45 %		-
			Persentase ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan pelatihan	74,5 %		100,5 %		74,5 %		0%		83,48 %		436,92 %		88,57%		88,57%		118,88 %		88,57%		118,88 %		-
			Persentase ketuntasan pendidikan PAUD	79,75 %		127,39 %		79,75 %		0%		100%		11,71 %		87,18%		87,18%		109,31 %		87,18%		109,31 %		-



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Persentase prestasi non akademik peserta didik PAUD pada lomba tingkat kecamatan/kota/provinsi/nasional/int ernalional	0,2 %		120,11 %		0,2 %		0%		0,01 %		0%		0,46%		0,22%		109,61 %		0,22%		109,61 %		-
			Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100%		101,46 %		100%		0%		91,72 %		111,75 %		109,94%		110,29%		110,29 %		110,29%		110,29 %		-
			Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarannya sesuai standar	93,19 %		108,68 %		93,19 %		0%		93,68 %		93,68 %		97,28%		97,28%		104,39 %		97,28%		104,39 %		-
			Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	0,15 %		115,86 %		0,15 %		0%		0,19 %		0,1 %		0,05%		0,18%		117,44 %		0,18%		117,44 %		-
			Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS	100%		102,31 %		100%		0%		84,33 %		91,61 %		110,92%		110,44%		110,44 %		110,44%		110,44 %		-
			Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarannya sesuai standar	96,04 %		100,26 %		96,04 %		0%		88,83 %		0%		95,06%		95,06%		98,98 %		95,06%		98,98 %		-
			Persentase prestasi akademik SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	0,3 %		111,76 %		0,3 %		0%		0,16 %		0,09 %		0,3%		0,44%		147,57 %		0,44%		147,57 %		-
			Persentase prasarana pendidikan dalam kondisi baik	100%		112,44 %		100%		0%		18,1 %		18,1 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi	83,18 %		122,16 %		83,18 %		0%		99,28 %		98,7 %		100%		100%		120,22 %		100%		120,22 %		-
			Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib administrasi	88,88 %		114,44 %		88,88 %		0%		100%		0%		100%		100%		112,51 %		100%		112,51 %		-
			Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan atau AKTA 4	100%		95,72 %		100%		0%		96,73 %		96,75 %		95,52%		95,52%		95,52 %		95,52%		95,52 %		-
			Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100%		98,19 %		100%		0%		98,84 %		97,91 %		98,84%		98,84%		98,84 %		98,84%		98,84 %		-
			Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SD yang berkualitas	85%		107,35 %		85%		0%		88,58 %		89,94 %		99,54%		99,54%		117,11 %		99,54%		117,11 %		-
			Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SMP yang berkualitas	90%		97,24 %		90%		0%		63,98 %		64,14 %		99,24%		99,24%		110,26 %		99,24%		110,26 %		-
	1.01.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																								
	1.01.02.01.01	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar					232 lembaga	67.000	32 lembaga	8.000	32 lembaga	12.300	64 lembaga	17.500	232 lembaga	17.500	232 lembaga	17.500	100,00 %	26,12%	100,00%	26,12%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.01.02	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar					1 kali	231.000	1 kali	92.400	1 kali	42.200	1 kali	31.100	1 kali	36.800	1 kali	36.800	100,00 %	15,93%	100,00%	15,93%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.01.03	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah lembaga penerima sarana pendidikan sekolah dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan					19 Lembaga	2.387.244	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.01.04	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah SD yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah dasar					1 lembaga	686.789	0 lembaga	6.700	0 lembaga	26.600	0 lembaga	16.200	1 lembaga	11.000	1 lembaga	11.000	100,00 %	1,60%	100,00%	1,60%			Dinas Pendidikan



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.01.02.01.05	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah lembaga sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan					285 lembaga	134.266.500	0 lembaga	5.400	0 lembaga	8.400	0 lembaga	8.400	285 lembaga	44.617.242	285 lembaga	44.617.242	100,00 %	33,23%	100,00%	33,23%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.01.06	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan					1 Kali	451.335	0 Kali	30.600	0 Kali	80.200	0 Kali	78.600	1 Kali	55.100	1 Kali	55.100	100,00 %	12,21%	100,00%	12,21%			Dinas Pendidikan
			Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan					1390 orang	451.335	1655 orang	30.600	1655 orang	80.200	1655 orang	78.600	1655 orang	55.100	1655 orang	55.100	119,06 %	12,21%	119,06%	12,21%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.01.08	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan					667 lembaga	226.747.058	284 lembaga	23.711.101	284 lembaga	34.826.416	633 lembaga	45.205.294	670 lembaga	31.797.431	670 lembaga	31.797.431	100,45 %	14,02%	100,45%	14,02%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.01.09	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan					298 Lembaga	68.143.489	285 Lembaga	11.170.242	285 Lembaga	16.583.125	285 Lembaga	16.266.675	285 Lembaga	10.843.255	285 Lembaga	10.843.255	95,64%	15,91%	95,64%	15,91%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.01.10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar dan Calistung SD					40153 orang	157.100	40153 orang	14.700	40153 orang	43.700	40153 orang	26.200	40153 orang	58.900	40153 orang	58.900	100,00 %	37,49%	100,00%	37,49%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																								
	1.01.02.02.01	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Fasilitas/Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhabilitasi					64 bangunan	29.460.214	10 bangunan	471.275	10 bangunan	3.439.219	43 bangunan	12.824.417	80 bangunan	4.730.181	80 bangunan	4.730.181	125,00 %	16,06%	125,00%	16,06%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.01.02.02.02	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan yang dipelihara					160 bangunan	41.561.373	141 bangunan	4.502.911	141 bangunan	9.138.869	191 bangunan	14.179.747	240 bangunan	8.936.108	240 bangunan	8.936.108	150,00 %	21,50%	150,00%	21,50%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.01.02.03	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																								
	1.01.02.03.01	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah menengah					294 Lembaga	165.700	177 Lembaga	32.000	177 Lembaga	41.700	290 Lembaga	38.600	433 Lembaga	30.600	433 Lembaga	30.600	147,28 %	18,47%	147,28%	18,47%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.03.02	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah					1 Kali	352.606	1 Kali	112.800	1 Kali	30.217	1 Kali	37.683	1 Kali	115.100	1 Kali	115.100	100,00 %	32,64%	100,00%	32,64%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.03.03	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah lembaga penerima sarana sekolah menengah yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan					4 Lembaga	1.333.258	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.03.04	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah SMP yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah menengah					1 Lembaga	392.176	0 Lembaga	23.000	0 Lembaga	34.000	0 Lembaga	43.900	1 Lembaga	24.000	1 Lembaga	24.000	100,00 %	6,12%	100,00%	6,12%			Dinas Pendidikan



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.01.02.03.05	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sekolah Menengah Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan					63 Lembaga	72.939.700	0 Lembaga	5.400	0 Lembaga	8.400	0 Lembaga	8.400	63 Lembaga	38.331.756	63 Lembaga	38.331.756	100,00 %	52,55%	100,00%	52,55%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.03.06	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan					1 Kali	392.521	0 Kali	30.600	0 Kali	60.600	0 Kali	51.600	1 Kali	55.400	1 Kali	55.400	100,00 %	14,11%	100,00%	14,11%			Dinas Pendidikan
			Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan					641 orang	392.521	854 orang	30.600	854 orang	60.600	854 orang	51.600	854 orang	55.400	854 orang	55.400	133,23 %	14,11%	133,23%	14,11%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.03.08	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah Menengah sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan					290 Lembaga	130.548.065	279 Lembaga	7.269.083	279 Lembaga	10.676.563	279 Lembaga	20.473.808	290 Lembaga	15.776.861	290 Lembaga	15.776.861	100,00 %	12,09%	100,00%	12,09%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.03.09	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan					63 Lembaga	36.466.713	63 Lembaga	5.687.087	63 Lembaga	8.437.587	63 Lembaga	8.413.389	63 Lembaga	5.852.279	63 Lembaga	5.852.279	100,00 %	16,05%	100,00%	16,05%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.03.10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional Sekolah Menengah					37413 Orang	54.600	37413 Orang	9.000	37413 Orang	28.800	37413 Orang	8.400	37413 Orang	8.400	37413 Orang	8.400	100,00 %	15,38%	100,00%	15,38%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.04	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																								
	1.01.02.04.01	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan					2592 lembaga	71.405.200	988 lembaga	0	988 lembaga	9.558	988 lembaga	8.037	2087 lembaga	30.886	2087 lembaga	30.886	80,52%	0,04%	80,52%	0,04%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.04.02	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					9141 orang	39.242.200	7963 orang	9.000	7963 orang	9.164.200	8163 orang	9.384.300	8649 orang	8.598.100	8649 orang	8.598.100	94,62%	21,91%	94,62%	21,91%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.04.03	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini					2 lembaga	136.800	0 lembaga	5.400	0 lembaga	8.400	0 lembaga	8.400	2 lembaga	80.083	2 lembaga	80.083	100,00 %	58,54%	100,00%	58,54%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.04.04	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan					2 lembaga	383.118	2 lembaga	61.464	2 lembaga	93.002	2 lembaga	92.589	2 lembaga	64.594	2 lembaga	64.594	100,00 %	16,86%	100,00%	16,86%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.04.05	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga					2 kali	1.050.192	0 kali	16.200	0 kali	53.000	0 kali	36.100	2 kali	57.100	2 kali	57.100	100,00 %	5,44%	100,00%	5,44%			Dinas Pendidikan
			Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini					1515 lembaga	1.050.192	1857 lembaga	16.200	1857 lembaga	53.000	1857 lembaga	36.100	1857 lembaga	57.100	1857 lembaga	57.100	122,57 %	5,44%	122,57%	5,44%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.05	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																								
	1.01.02.05.01	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM					134 lembaga	52.000	110 lembaga	5.400	110 lembaga	19.000	212 lembaga	13.800	239 lembaga	9.200	239 lembaga	9.200	178,36 %	17,69%	178,36%	17,69%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.05.02	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah SKB yang mendapatkan peningkatan sarana					1 Lembaga	198.970	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Pendidikan



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.01.02.05.03	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan					30 lembaga	6.157.500	12 lembaga	0	12 lembaga	0	12 lembaga	0	28 lembaga	0	28 lembaga	0	93,33%	0,00%	93,33%	0,00%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.05.04	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru TPA/TPQ dan kelas minggu yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan TPA/TPQ dan kelas minggu					12526 orang	69.763.026	11251 orang	15.000	11251 orang	16.869.069	11622 orang	16.679.920	12100 orang	17.162.969	12100 orang	17.162.969	96,60%	24,60%	96,60%	24,60%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.05.05	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pendidikan kesetaraan					1 lembaga	166.600	0 lembaga	10.800	0 lembaga	13.800	0 lembaga	13.800	1 lembaga	121.400	1 lembaga	121.400	100,00%	72,87%	100,00%	72,87%			Dinas Pendidikan
	1.01.02.05.06	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pendidikan kesetaraan					33 lembaga	1.396.087	0 lembaga	123.400	0 lembaga	396.477	33 lembaga	281.280	33 lembaga	279.302	33 lembaga	279.302	100,00%	20,01%	100,00%	20,01%			Dinas Pendidikan
Meningkatkan kualitas pendidikan	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			323.471.515		277.455.867		130.000		31.600		32.000		33.000		30.600		96.600		74,31%		277.552.467		85,77%	
			Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	0,15 %		115,86 %		0,15 %		0%		0,19 %		0,1 %		0,05%		0,18%		117,44 %		0,18%		117,44 %		-
			Persentase prestasi akademik SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	0,3 %		111,76 %		0,3 %		0%		0,16 %		0,09 %		0,3%		0,44%		147,57 %		0,44%		147,57 %		-
	1.01.03.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																								
	1.01.03.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar					650 lembaga	86.800	0 lembaga	26.200	0 lembaga	21.800	0 lembaga	13.800	650 lembaga	22.200	650 lembaga	22.200	100,00 %	25,58%	100,00%	25,58%			Dinas Pendidikan
	1.01.03.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah					245 Lembaga	43.200	0 Lembaga	5.400	0 Lembaga	10.200	245 Lembaga	19.200	245 Lembaga	8.400	245 Lembaga	8.400	100,00 %	19,44%	100,00%	19,44%			Dinas Pendidikan
Meningkatkan kualitas pendidikan	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			132.672.060		126.487.809		323.225		10.800		70.200		138.022		43.000		219.022		67,76%		126.706.831		95,27%	
			Persentase guru PAUD yang kompeten	100%		100%		100%		0%		98,71 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase tenaga kependidikan PAUD jenjang TK yang kompeten	100%		100%		100%		0%		94,36 %		100%		91,16%		91,16%		91,16 %		91,16%		91,16 %		-
	1.01.04.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																								
	1.01.04.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan					2 Dokumen	323.225	0 Dokumen	10.800	0 Dokumen	70.200	1 Dokumen	138.022	2 Dokumen	43.000	2 Dokumen	43.000	100,00 %	13,30%	100,00%	13,30%			Dinas Pendidikan
	1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%		100%		100%		0%		100%		93,18 %		100%		100%		100%		100%		100%		-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%		100%		100%		0%		100%		90,28 %		100%		100%		100%		100%		100%		-
	1.02.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
	1.02.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 dokumen	576.415	2 dokumen	56.400	2 dokumen	80.400	9 dokumen	93.000	12 dokumen	97.400	12 dokumen	97.400	100,00 %	16,90%	100,00%	16,90%				RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	1.02.01.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
	1.02.01.02.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 dokumen	36.483	2 dokumen	5.400	2 dokumen	8.400	9 dokumen	8.400	12 dokumen	8.400	12 dokumen	8.400	100,00 %	23,02%	100,00%	23,02%				RSUD Bhakti Dharma Husada
	1.02.01.03	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
	1.02.01.03.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 dokumen	71.405	2 dokumen	13.200	2 dokumen	14.900	9 dokumen	8.400	12 dokumen	13.400	12 dokumen	13.400	100,00 %	18,77%	100,00%	18,77%				Dinas Kesehatan
	1.02.01.04	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	1.02.01.04.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN				100%	142.634.778	100%	11.907.131	100%	15.858.202	100%	25.812.327	100%	13.438.898	100%	13.438.898	100,00 %	9,42%	100,00%	9,42%				RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	1.02.01.05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	1.02.01.05.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN				100%	299.307.168	100%	48.079.982	100%	66.468.382	100%	82.297.647	100%	57.685.433	100%	57.685.433	100,00 %	19,27%	100,00%	19,27%				Dinas Kesehatan
	1.02.01.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	1.02.01.06.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN				100%	61.670.155	100%	6.038.333	100%	7.932.873	100%	13.862.431	100%	6.411.037	100%	6.411.037	100,00 %	10,40%	100,00%	10,40%				RSUD Bhakti Dharma Husada
	1.02.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																								
	1.02.01.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran				100%	2.997.982	2%	295.269	2%	511.873	55,56%	937.986	100%	395.992	100%	395.992	100,00 %	13,21%	100,00%	13,21%				Dinas Kesehatan
	1.02.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	1.02.01.08.01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran				100%	136.626.392	3%	20.150.429	3%	29.801.438	75,76%	31.368.176	100%	21.341.068	100%	21.341.068	100,00 %	15,62%	100,00%	15,62%				Dinas Kesehatan



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
Meningkatkan derajat kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			302.529.340		289.924.421		1.270.380.582		106.133.550		97.759.067		184.739.846		293.455.763		419.336.046		33,01%		709.260.467		45,09%	
			Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100%		102,53 %		100%		0%		68,29 %		263,18 %		105,96%		105,96%		105,96 %		105,96%		105,96 %		-
			Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan	100%		100%		100%		0%		100%		104,78 %		102,26%		102,26%		102,26 %		102,26%		102,26 %		-
			Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD dr. Mohammad Soewandhie	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Cakupan kunjungan ibu hamil K4	99,01 %		100,01 %		99,01 %		0%		42,65 %		66,61 %		99,02%		99,38%		100,38 %		99,38%		100,38 %		-
			Cakupan kunjungan neonatal lengkap	100%		100%		100%		0%		43,32 %		68,64 %		100%		104,5%		104,5 %		104,5%		104,5 %		-
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinales)	97,74 %		101,39 %		97,74 %		0%		42,56 %		66,74 %		99,09%		99,63%		101,93 %		99,63%		101,93 %		-
			Prevalensi balita gizi buruk	0,1 %		100%		0,1 %		0%		0,09 %		0,09 %		0,1%		0,1%		100,48 %		0,1%		100,48 %		-
			Prevalensi balita gizi kurang	8,23 %		100,37 %		8,23 %		0%		4,35 %		4,35 %		4,17%		4,17%		149,34 %		4,17%		149,34 %		-
			Prevalensi balita stunting	8,89 %		119,3 %		8,89 %		0%		3,92 %		3,92 %		4,52%		4,52%		149,16 %		4,52%		149,16 %		-
			Cakupan imunisasi dasar lengkap	97,8 %		96,52 %		97,8 %		0%		38,32 %		69,98 %		94,5%		96,9%		99,08 %		96,9%		99,08 %		-
			Cakupan kelahiran mengalami KLB yang ditangani <20 jam	100%		100%		100%		0%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Cakupan kelahiran yang memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	84,9 %		108,49 %		84,9 %		0%		92,11 %		92,11 %		85,25%		85,25%		100,42 %		85,25%		100,42 %		-
			Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS sesuai standar	80%		194,15 %		80%		0%		111,36 %		117,46 %		110,34%		120,45%		150,57 %		120,45%		150,57 %		-
			Persentase SDM RSUD dr. Mohammad Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai standar	52%		163,64 %		52%		0%		74,89 %		71,56 %		71,91%		71,91%		138,29 %		71,91%		138,29 %		-
			Persentase prasarana layanan kesehatan dalam kondisi baik	100%		113,42 %		100%		0%		64,62 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Average Length of Stay (AvLOS)	4 hari		111,43 hari		4 hari		0 hari		4,62 hari		4,78 hari		4,55hari		4,41hari		110,37 %		4,41hari		110,37 %		-
			Bed Turn Over Ratio (BTO)	45 kali		86,99 kali		45 kali		0 kali		16,65 kali		25,79 kali		32,07kali		36,86kali		81,9 %		36,86kali		81,9 %		-
			Turn Over Interval (TOI)	3 hari		58,55 hari		3 hari		0 hari		6,33 hari		5,83 hari		5,84hari		5,44hari		18,71 %		5,44hari		18,71 %		-
			Angka Kejadian Infeksi Nosokomial	1%		178,24 %		1%		0%		0,43 %		0,23 %		0,2%		0,18%		181,65 %		0,18%		181,65 %		-
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	83,75 %		119,47 %		83,75 %		0%		81,6 %		54,47 %		100%		100%		119,4 %		100%		119,4 %		-



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohammad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	96,4 %		101,91 %		96,4 %		0%		98,08 %		98,08 %		98,08%		98,08%		101,75 %		98,08%		101,75 %		-
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	90%		110,85 %		90%		0%		100%		100%		91,76%		91,76%		101,95 %		91,76%		101,95 %		-
			Persentase puskesmas yang terakreditasi	100%		116,67 %		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standar	100%		101,17 %		100%		0%		150,79 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%		100%		100%		0%		100%		90,28 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,98 %		100%		0%		99,27 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	1.02.02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.02.02.01.01	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	13.147.397	3%	16.544	3%	56.138	80%	427.201	100%	812.913	100%	812.913	100,00 %	6,18%	100,00%	6,18%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	1.02.02.01.02	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara					1 jenis	8.382.097	1 jenis	5.400	1 jenis	38.250	1 jenis	8.400	1 jenis	5.600	1 jenis	5.600	100,00 %	0,07%	100,00%	0,07%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	1.02.02.01.03	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara					2 jenis	14.776.522	0 jenis	5.400	0 jenis	8.400	1 jenis	8.400	2 jenis	528.300	2 jenis	528.300	100,00 %	3,58%	100,00%	3,58%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie
			Jumlah jenis alat kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan					1 Jenis	14.776.522	0 Jenis	5.400	0 Jenis	8.400	0 Jenis	8.400	1 Jenis	528.300	1 Jenis	528.300	100,00 %	3,58%	100,00%	3,58%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	1.02.02.01.05	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan					1 jenis	53.014.949	1 jenis	5.400	1 jenis	8.400	1 jenis	8.400	1 jenis	5.600	1 jenis	5.600	100,00 %	0,01%	100,00%	0,01%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	1.02.02.01.06	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan					1 jenis	48.166.887	1 jenis	5.400	1 jenis	8.400	1 jenis	8.400	1 jenis	5.600	1 jenis	5.600	100,00 %	0,01%	100,00%	0,01%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	1.02.02.01.07	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	6.573.584	0%	0	0%	0	25%	0	100%	48.796	100%	48.796	100,00 %	0,74%	100,00%	0,74%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	1.02.02.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.02.02.02.01	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bangunan Layanan Kesehatan yang dibangun/direhabilitasi					11 bangunan	198.828.054	0 bangunan	317.012	0 bangunan	10.121.222	2 bangunan	3.121.597	19 bangunan	109.365.350	19 bangunan	109.365.350	172,73 %	55,00%	172,73%	55,00%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.02.02.03	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.02.02.03.01	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan					25 jenis	14.303.737	1 jenis	178.310	1 jenis	165.924	1 jenis	349.946	25 jenis	4.302.247	25 jenis	4.302.247	100,00 %	30,08%	100,00%	30,08%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.03.02	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang diadakan					1 item	1.403.780	0 item	0	0 item	0	0 item	0	1 item	1.357.500	1 item	1.357.500	100,00 %	96,70%	100,00%	96,70%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.03.03	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK BOK)					1 Jenis	49.690.822	Jenis	7.848	Jenis	283.881	0 Jenis	6.549.841	1 Jenis	5.641.297	1 Jenis	5.641.297	100,00 %	11,35%	100,00%	11,35%			Dinas Kesehatan
			Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan					74 jenis	49.690.822	3 jenis	7.848	3 jenis	283.881	37 jenis	6.549.841	74 jenis	5.641.297	74 jenis	5.641.297	100,00 %	11,35%	100,00%	11,35%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.03.05	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan					11 jenis	3.243.070	0 jenis	0	0 jenis	0	5 jenis	86.500	11 jenis	305.276	11 jenis	305.276	100,00 %	9,41%	100,00%	9,41%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.03.06	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan					1 Jenis	596.220	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.03.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan					5 dokumen	103.170	3 dokumen	5.400	3 dokumen	40.900	4 dokumen	25.275	5 dokumen	5.600	5 dokumen	5.600	100,00 %	5,43%	100,00%	5,43%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.04	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.02.02.04.01	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	13.974.665	4%	137.676	4%	901.082	78,57%	638.972	100%	111.808	100%	111.808	100,00 %	0,80%	100,00%	0,80%			RSUD Bhakti Dharma Husada
	1.02.02.04.02	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/Kedokteran					1 jenis	6.954.800	1 jenis	0	1 jenis	0	1 jenis	539.000	1 jenis	0	1 jenis	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			RSUD Bhakti Dharma Husada
	1.02.02.04.03	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/Kedokteran					2 jenis	8.734.807	2 jenis	6.830	2 jenis	8.400	2 jenis	433.938	2 jenis	1.395.506	2 jenis	1.395.506	100,00 %	15,98%	100,00%	15,98%			RSUD Bhakti Dharma Husada
	1.02.02.04.04	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang disediakan					1 jenis	24.530.600	1 jenis	5.400	1 jenis	8.400	1 jenis	8.400	1 jenis	8.400	1 jenis	8.400	100,00 %	0,03%	100,00%	0,03%			RSUD Bhakti Dharma Husada
	1.02.02.04.05	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang disediakan					1 jenis	29.460.744	1 jenis	384.722	1 jenis	1.690.094	1 jenis	8.400	1 jenis	8.400	1 jenis	8.400	100,00 %	0,03%	100,00%	0,03%			RSUD Bhakti Dharma Husada
	1.02.02.04.06	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial					1 jenis	3.529.309	0 jenis	0	0 jenis	0	1 jenis	14.959	1 jenis	2.427.223	1 jenis	2.427.223	100,00 %	68,77%	100,00%	68,77%			RSUD Bhakti Dharma Husada
	1.02.02.05	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.02.02.05.01	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya					63 lembaga	24.632.583	63 lembaga	2.794.632	63 lembaga	2.946.224	63 lembaga	3.784.909	63 lembaga	4.005.869	63 lembaga	4.005.869	100,00 %	16,26%	100,00%	16,26%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.05.02	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi					13 lembaga	3.228.651	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	13 lembaga	0	13 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.05.03	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular					154 lembaga	28.852.452	155 lembaga	3.071.951	155 lembaga	4.470.391	155 lembaga	4.615.130	155 lembaga	5.577.318	155 lembaga	5.577.318	100,65 %	19,33%	100,65%	19,33%			Dinas Kesehatan
			Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan					63 Lembaga	28.852.452	Lembaga	3.071.951	Lembaga	4.470.391	0 Lembaga	4.615.130	63 Lembaga	5.577.318	63 Lembaga	5.577.318	100,00 %	19,33%	100,00%	19,33%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.05.05	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan					1045644 orang	410.958.344	1045644 orang	79.949.187	1045644 orang	43.139.696	1071485 orang	119.769.062	1093374 orang	117.474.799	1093374 orang	117.474.799	104,56 %	28,59%	104,56%	28,59%			Dinas Kesehatan
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan					273337 orang	410.958.344	0 orang	79.949.187	0 orang	43.139.696	244736 orang	119.769.062	273337 orang	117.474.799	273337 orang	117.474.799	100,00 %	28,59%	100,00%	28,59%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.05.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan					63 Lembaga	6.624.705	Lembaga	688.879	Lembaga	995.948	126 Lembaga	1.190.995	63 Lembaga	849.803	63 Lembaga	849.803	100,00 %	12,83%	100,00%	12,83%			Dinas Kesehatan
			Jumlah ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi					375 orang	6.624.705	62 orang	688.879	62 orang	995.948	175 orang	1.190.995	375 orang	849.803	375 orang	849.803	100,00 %	12,83%	100,00%	12,83%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.05.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Kunjungan Ibu yang mendapatkan perawatan kehamilan, persalinan dan nifas serta perawatan bayi baru lahir di Fasilitas Pelayanan Kesehatan					691 kunjungan	2.938.518	0 kunjungan	0	0 kunjungan	0	78 kunjungan	181.000	101 kunjungan	46.829	101 kunjungan	46.829	14,62% %	1,59%	14,62%	1,59%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.05.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Lembaga yang melakukan Upaya Pelayanan Kesehatan Keluarga					64 lembaga	7.406.052	64 lembaga	731.607	64 lembaga	1.798.077	64 lembaga	1.569.914	64 lembaga	1.826.788	64 lembaga	1.826.788	100,00 %	24,67%	100,00%	24,67%			Dinas Kesehatan
			Jumlah lembaga yang melaksanakan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan					63 Lembaga	7.406.052	Lembaga	731.607	Lembaga	1.798.077	0 Lembaga	1.569.914	63 Lembaga	1.826.788	63 Lembaga	1.826.788	100,00 %	24,67%	100,00%	24,67%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.05.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga					63 lembaga	3.664.607	63 lembaga	411.920	63 lembaga	769.780	63 lembaga	875.264	63 lembaga	467.255	63 lembaga	467.255	100,00 %	12,75%	100,00%	12,75%			Dinas Kesehatan
			Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan					63 Lembaga	3.664.607	Lembaga	411.920	Lembaga	769.780	0 Lembaga	875.264	63 Lembaga	467.255	63 Lembaga	467.255	100,00 %	12,75%	100,00%	12,75%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.05.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular					154 lembaga	1.222.784	154 lembaga	54.420	154 lembaga	110.370	155 lembaga	874.258	154 lembaga	90.036	154 lembaga	90.036	100,00 %	7,36%	100,00%	7,36%			Dinas Kesehatan
			Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan					63 Lembaga	1.222.784	Lembaga	54.420	Lembaga	110.370	0 Lembaga	874.258	63 Lembaga	90.036	63 Lembaga	90.036	100,00 %	7,36%	100,00%	7,36%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.05.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan khusus dan tradisional					64 lembaga	198.628	0 lembaga	5.400	0 lembaga	27.064	64 lembaga	53.336	64 lembaga	100.538	64 lembaga	100.538	100,00 %	50,62%	100,00%	50,62%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.05.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Terpadu dan Pembinaan Imunisasi					63 lembaga	66.170	63 lembaga	20.944	63 lembaga	9.198	63 lembaga	11.969	63 lembaga	17.183	63 lembaga	17.183	100,00 %	25,97%	100,00%	25,97%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.05.18	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani					700 lokasi	1.526.047	459 lokasi	155.166	459 lokasi	246.908	766 lokasi	518.121	874 lokasi	125.034	874 lokasi	125.034	124,86 %	8,19%	124,86%	8,19%			Dinas Kesehatan



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.02.02.06	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.02.02.06.01	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan layanan medik Rumah Sakit yang diselenggarakan					155 kali	9.354.950	78 kali	10.600	78 kali	68.200	114 kali	50.000	163 kali	31.600	163 kali	31.600	105,16 %	0,34%	105,16%	0,34%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	1.02.02.06.02	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pengembangan manajemen rumah sakit yang dilaksanakan					2 jenis	353.680	1 jenis	5.400	1 jenis	14.922	2 jenis	8.512	2 jenis	5.600	2 jenis	5.600	100,00 %	1,58%	100,00%	1,58%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	1.02.02.06.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan gizi rumah sakit					20000 orang	13.887.507	7443 orang	17.082	7443 orang	57.879	10863 orang	36.852	14899 orang	42.890	14899 orang	42.890	74,50%	0,31%	74,50%	0,31%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	1.02.02.07	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.02.02.07.01	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Pasien RS yang Mendapatkan Pelayanan Medik					2118 orang	2.243.928	1188 orang	5.400	1188 orang	8.400	1650 orang	8.400	2260 orang	8.400	2260 orang	8.400	106,70 %	0,37%	106,70%	0,37%			RSUD Bhakti Dharma Husada
	1.02.02.07.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan					6756 orang	3.308.804	3169 orang	5.400	3169 orang	8.400	4999 orang	8.400	7265 orang	8.400	7265 orang	8.400	107,53 %	0,25%	107,53%	0,25%			RSUD Bhakti Dharma Husada
	1.02.02.07.03	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang Dilaksanakan					88 kali	436.125	49 kali	5.400	49 kali	8.400	74 kali	8.400	106 kali	49.320	106 kali	49.320	120,45 %	11,31%	120,45%	11,31%			RSUD Bhakti Dharma Husada
	1.02.02.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi																								
	1.02.02.08.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah sistem informasi manajemen kesehatan yang dikembangkan					1 aplikasi	193.892	0 aplikasi	42.426	0 aplikasi	30.931	0 aplikasi	25.230	1 aplikasi	35.300	1 aplikasi	35.300	100,00 %	18,21%	100,00%	18,21%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.09	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.02.02.09.01	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan					63 Lembaga	68.794.101	Lembaga	6.049.279	Lembaga	10.630.170	0 Lembaga	11.609.668	63 Lembaga	10.683.408	63 Lembaga	10.683.408	100,00 %	15,53%	100,00%	15,53%			Dinas Kesehatan
			Jumlah lembaga yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer					64 lembaga	68.794.101	64 lembaga	6.049.279	64 lembaga	10.630.170	64 lembaga	11.609.668	64 lembaga	10.683.408	64 lembaga	10.683.408	100,00 %	15,53%	100,00%	15,53%			Dinas Kesehatan
	1.02.02.09.03	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Sarana Kesehatan yang Dibina dan Diawasi					59 lembaga	40.795	20 lembaga	5.813	20 lembaga	11.602	45 lembaga	9.329	59 lembaga	9.776	59 lembaga	9.776	100,00 %	23,96%	100,00%	23,96%			Dinas Kesehatan
Meningkatkan derajat kesehatan	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			31.742.969		22.820.926		215.034.731		54.750		119.924		71.054.856		10.022.244		109.057.559		50,72%		131.878.485		53,44%	
			Persentase SDM RSUD Bhakti Dharma Husada yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai standar	60%		103,28 %		60%		0%		47,91 %		53,43 %		63,1%		63,1%		105,17 %		63,1%		105,17 %		-
			Persentase SDM RSUD dr. Mohammad Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai standar	52%		163,64 %		52%		0%		74,89 %		71,56 %		71,91%		71,91%		138,29 %		71,91%		138,29 %		-
			Angka Kejadian Infeksi Pasca Operasi	1%		193,03 %		1%		0%		0,11 %		0,2 %		0,19%		0,16%		183,85 %		0,16%		183,85 %		-



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	98,18 %		101,01 %		98,18 %		0%		106,41 %		109,82 %		99,18%		99,18%		101,02 %		99,18%		101,02 %		-
	1.02.03.01	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																								
	1.02.03.01.01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang kesehatan					11 kali	2.767.268	5 kali	43.950	5 kali	56.624	8 kali	64.198	12 kali	536.480	12 kali	536.480	109,09 %	19,39%	109,09%	19,39%			Dinas Kesehatan
	1.02.03.01.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga kesehatan daerah yang menerima insentif dalam rangka penanganan pandemi COVID-19					1139 Orang	63.486.137	Orang	0	Orang	0	0 Orang	34.776.286	1890 Orang	7.388.714	1890 Orang	7.388.714	165,94 %	11,64%	165,94%	11,64%			Dinas Kesehatan
	1.02.03.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																								
	1.02.03.02.01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan yang diadakan					95 kali	166.200	42 kali	5.400	42 kali	41.100	86 kali	11.400	109 kali	23.800	109 kali	23.800	114,74 %	14,32%	114,74%	14,32%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	1.02.03.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga kesehatan daerah yang menerima insentif dalam rangka penanganan pandemi COVID-19					473 Orang	40.985.000	Orang	0	Orang	0	540 Orang	21.015.714	554 Orang	1.218.393	554 Orang	1.218.393	117,12 %	2,97%	117,12%	2,97%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	1.02.03.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.02.03.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan peningkatan kinerja					80 orang	48.169.514	14 orang	0	14 orang	13.800	23 orang	43.500	82 orang	83.600	82 orang	83.600	102,50 %	0,17%	102,50%	0,17%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	1.02.03.04	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.02.03.04.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Peningkatan SDM Kesehatan					75 kali	31.780.433	52 kali	5.400	52 kali	8.400	70 kali	8.400	125 kali	8.400	125 kali	8.400	166,67 %	0,03%	166,67%	0,03%			RSUD Bhakti Dharma Husada
Meningkatkan derajat kesehatan	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			776.390		705.537		208.025		5.400		8.620		8.400		10.558		22.420		10,78%		727.957		73,95%	
			Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	98,07 %		101,98 %		98,07 %		0%		0%		0%		100%		100%		101,97 %		100%		101,97 %		-
	1.02.04.01	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tanqoa																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.02.04.01.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Sampel Yang Diperiksa					2028 sampel	208.025	0 sampel	5.400	0 sampel	8.620	0 sampel	8.400	2028 sampel	10.558	2028 sampel	10.558	100,00 %	5,08%	100,00%	5,08%			Dinas Kesehatan
Meningkatkan derajat kesehatan	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			70.326.703		87.557.210		193.643.282		3.763.572		10.980.989		12.717.601		97.845.381		27.462.162		14,18%		115.019.372		43,57%	
			Persentase kelurahan siaga aktif minimal strata madya	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		-
			Persentase rumah sehat	86,44 %		101,01 %		86,44 %		0%		87,3 %		87,3 %		87,44%		87,44%		101,16 %		87,44%		101,16 %		-
	1.02.05.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.02.05.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan					64 lembaga	2.370.302	64 lembaga	1.148.038	64 lembaga	1.080.113	64 lembaga	19.711	64 lembaga	0	64 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Dinas Kesehatan
	1.02.05.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.02.05.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan					63 lembaga	11.536.603	63 lembaga	751.639	63 lembaga	2.162.741	63 lembaga	1.937.497	63 lembaga	2.953.645	63 lembaga	2.953.645	100,00 %	25,60%	100,00%	25,60%			Dinas Kesehatan
	1.02.05.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.02.05.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat					63 lembaga	89.868.188	63 lembaga	931.948	63 lembaga	3.869.068	63 lembaga	5.380.197	63 lembaga	47.445.868	63 lembaga	47.445.868	100,00 %	52,79%	100,00%	52,79%			Dinas Kesehatan
			Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan					64 Lembaga	89.868.188	Lembaga	931.948	Lembaga	3.869.068	189 Lembaga	5.380.197	64 Lembaga	47.445.868	64 Lembaga	47.445.868	100,00 %	52,79%	100,00%	52,79%			Dinas Kesehatan
	1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang																								
Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan	15,48 %		137,22 %		15,48 %		0%		17,7 %		19,26 %		19,77%		20,16%		130,23 %		20,16%		130,23 %		-
			Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan publik yang berfungsi baik	100%		137,86 %		100%		0%		126,2 %		127,95 %		127,95%		127,95%		127,95 %		127,95%		127,95 %		-



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Persentase aset tanah, saluran, jalan dan kelengkapannya yang diamankan	3,5 %		102,37 %		3,5 %		0%		0,77 %		2,32 %		6,2%		6,2%		177,1 %		6,2%		177,1 %		-
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%		100%		100%		0%		100%		93,18 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%		100%		100%		0%		100%		90,28 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,98 %		100%		0%		99,27 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	1.03.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
	1.03.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					12 dokumen	94.530	2 dokumen	27.740	2 dokumen	32.830	9 dokumen	19.870	12 dokumen	13.139	12 dokumen	13.139	100,00 %	13,90%	100,00%	13,90%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.03.01.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
	1.03.01.02.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah					12 dokumen	116.600	2 dokumen	33.883	2 dokumen	37.048	11 dokumen	18.900	12 dokumen	23.940	12 dokumen	23.940	100,00 %	20,53%	100,00%	20,53%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.01.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	1.03.01.03.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	34.345.724	100%	6.549.044	100%	8.746.300	100%	7.753.378	100%	7.412.677	100%	7.412.677	100,00 %	21,58%	100,00%	21,58%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.03.01.04	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	1.03.01.04.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	52.229.983	100%	9.889.349	100%	13.702.883	100%	11.772.987	100%	11.625.202	100%	11.625.202	100,00 %	22,26%	100,00%	22,26%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.01.05	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																								
	1.03.01.05.01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tanah aset infrastruktur yang diamankan					40 bidang	909.250	33 bidang	285.655	33 bidang	303.217	114 bidang	79.913	264 bidang	112.440	264 bidang	112.440	660,00 %	12,37%	660,00%	12,37%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.03.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
	1.03.01.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	770.346	2%	102.098	2%	222.189	100%	241.352	100%	137.846	100%	137.846	100,00 %	17,89%	100,00%	17,89%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.03.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																								
	1.03.01.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	976.735	0%	14.157	0%	179.363	22,22%	230.691	100%	188.009	100%	188.009	100,00 %	19,25%	100,00%	19,25%		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
	1.03.01.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																								
	1.03.01.08.01	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Pemerintah Daerah yang prasarananya dibangun/direhabilitasi					57 bangunan	94.857.516	4 bangunan	627.980	4 bangunan	2.262.795	22 bangunan	11.340.259	84 bangunan	20.386.002	84 bangunan	20.386.002	147,37 %	21,49%	147,37%	21,49%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.03.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	1.03.01.09.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	858.263	1%	0	1%	87.843	57,14%	367.179	100%	246.562	100%	246.562	100,00 %	28,73%	100,00%	28,73%		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
	1.03.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah peralatan besar yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak					60 unit	13.441.852	44 unit	726.849	44 unit	3.021.591	60 unit	2.974.180	80 unit	1.973.564	80 unit	1.973.564	133,33 %	14,68%	133,33%	14,68%		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
	1.03.01.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak					160 unit	12.391.137	75 unit	1.453.947	75 unit	3.198.163	139 unit	2.609.423	176 unit	2.591.571	176 unit	2.591.571	110,00 %	20,91%	110,00%	20,91%		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			444.015.137		418.462.337		43.001.249		6.081.911		7.734.496		10.935.033		7.794.823		24.751.440		57,56%		443.213.777		91,01%	
			Lama genangan	22,1 menit		100,37 menit		22,1 menit		0 menit		42,04 menit		22,29 menit		22,04menit		22,04menit		100,27 %		22,04menit		100,27 %		-



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.03.02.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.03.02.01.01	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah unit pompa yang dipelihara selama 12 bulan sebanyak					61 unit	43.001.249	26 unit	6.081.911	26 unit	7.734.496	55 unit	10.935.033	73 unit	7.794.823	73 unit	7.794.823	119,67 %	18,13%	119,67%	18,13%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			193.173.380		165.369.002		89.227		5.400		8.400		8.400		5.600		22.200		24,88%		165.391.202		85,58%	
			Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan	15,48 %		137,22 %		15,48 %		0%		17,7 %		19,26 %		19,77%		20,16%		130,23 %		20,16%		130,23 %		-
	1.03.03.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.03.03.01.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah dokumen fasilitasi penunjang penyediaan jaringan air bersih/air minum					2 dokumen	89.227	0 dokumen	5.400	0 dokumen	8.400	0 dokumen	8.400	2 dokumen	5.600	2 dokumen	5.600	100,00 %	6,28%	100,00%	6,28%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			170.306.891		151.124.404		185.764.518		32.967.583		32.033.167		30.386.008		44.031.355		182.661.800		98,33%		333.786.204		93,74%	
			Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	38,46 %		104,84 %		38,46 %		0%		32,26 %		32,26 %		32,26%		32,26%		83,87 %		32,26%		83,87 %		-
	1.03.04.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.03.04.01.01	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dan RTH yang disediakan					1572 unit	3.759.458	0 unit	36.058	0 unit	102.958	100 unit	161.490	1672 unit	3.243.045	1672 unit	3.243.045	106,36 %	86,26%	106,36%	86,26%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.03.04.01.02	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar					1 rekening	171.918.613	1 rekening	31.492.038	1 rekening	29.805.348	1 rekening	28.347.724	1 rekening	39.416.719	1 rekening	39.416.719	100,00 %	22,93%	100,00%	22,93%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Jumlah sarana kebersihan yang dikelola					21 unit	4.673.759	12 unit	447.479	12 unit	966.156	24 unit	956.432	40 unit	580.818	40 unit	580.818	190,48 %	12,43%	190,48%	12,43%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
	1.03.04.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola					183 lokasi	5.412.688	197 lokasi	992.008	197 lokasi	1.158.705	199 lokasi	920.362	199 lokasi	790.773	199 lokasi	790.773	108,74 %	14,61%	108,74%	14,61%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			18.131.380		15.269.279		6.492.940		449.670		895.630		1.524.420		1.375.536		4.574.665		70,46%		19.843.944		80,59%	
			Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	50,83 %		100,79 %		50,83 %		0%		31,61 %		-34,53 %		53,31%		53,31%		104,87 %		53,31%		104,87 %		-
			Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	85%		125%		85%		0%		100%		76,92 %		178,85%		178,85%		210,41 %		178,85%		210,41 %		-
			Persentase instalasi pengolahan air limbah yang beroperasi dengan baik	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	1.03.05.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.03.05.01.01	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban					400 Unit	2.196.668	100 Unit	147.879	100 Unit	470.021	250 Unit	733.146	400 Unit	681.390	400 Unit	681.390	100,00 %	31,02%	100,00%	31,02%			Dinas Lingkungan Hidup
	1.03.05.02	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.03.05.02.01	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik					96 lokasi	3.028.565	102 lokasi	296.474	102 lokasi	396.953	153 lokasi	471.348	204 lokasi	248.413	204 lokasi	248.413	212,50 %	8,20%	212,50%	8,20%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			444.015.137		418.462.337		194.500.878		13.999.622		38.192.199		46.766.259		27.261.775		98.958.080		50,88%		517.420.416		81,03%	
			Luas genangan	500 hektar		122,89 hektar		500 hektar		0 hektar		572,37 hektar		308,05 hektar		452,57hektar		452,57hektar		109,49 %		452,57hektar		109,49 %		-
			Tinggi genangan	12,1 cm		111,2 cm		12,1 cm		0 cm		11,66 cm		12,22 cm		10,92cm		10,92cm		109,73 %		10,92cm		109,73 %		-



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Persentase dokumen perancangan dan pengawasan pematusan yang tepat waktu	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		-
	1.03.06.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.03.06.01.01	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah lokasi pemeliharaan saluran drainase dan boezem					975 lokasi	86.313.716	830 lokasi	13.567.899	830 lokasi	22.571.759	1297 lokasi	20.148.702	1793 lokasi	13.885.640	1793 lokasi	13.885.640	183,90 %	16,09%	183,90%	16,09%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.06.01.02	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah lokasi pembangunan dan penyediaan sarana prasarana pematusan					14 lokasi	39.983.179	7 lokasi	94.921	7 lokasi	11.335.313	16 lokasi	12.527.112	20 lokasi	8.411.128	20 lokasi	8.411.128	142,86 %	21,04%	142,86%	21,04%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.06.01.03	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan pematusan kota yang disusun					36 dokumen	3.315.422	23 dokumen	101.523	23 dokumen	1.419.489	34 dokumen	843.017	46 dokumen	593.652	46 dokumen	593.652	127,78 %	17,91%	127,78%	17,91%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.06.01.04	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah lokasi rehabilitasi saluran drainase dan boezem					23 lokasi	62.739.621	8 lokasi	161.581	8 lokasi	2.704.427	19 lokasi	13.060.457	28 lokasi	3.825.108	28 lokasi	3.825.108	121,74 %	6,10%	121,74%	6,10%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.06.01.05	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab saluran drainase/gorong-gorong					6 dokumen	2.148.940	0 dokumen	73.698	0 dokumen	161.211	0 dokumen	186.971	6 dokumen	546.247	6 dokumen	546.247	100,00 %	25,42%	100,00%	25,42%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			1.030.059		945.075		219.932.922		2.696.315		29.659.800		49.770.756		55.089.555		82.126.871		37,34%		83.071.946		37,60%	
			Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan dibanding permohonan rekomendasi teknis yang memenuhi syarat	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		-
			Persentase pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan dan kelengkapannya	73,8 %		177,82 %		73,8 %		0%		120,29 %		120,29 %		120,29%		120,36%		163,09 %		120,36%		163,09 %		-
	1.03.07.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.03.07.01.01	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Infrastruktur dan Rumah yang di Rehabilitasi					210 lokasi	43.443.245	165 lokasi	1.984.529	165 lokasi	8.059.499	244 lokasi	9.032.116	347 lokasi	9.626.952	347 lokasi	9.626.952	165,24 %	22,16%	165,24%	22,16%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.03.07.01.02	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan					280 lokasi	175.249.506	154 lokasi	579.211	154 lokasi	21.249.749	319 lokasi	40.405.803	507 lokasi	45.311.097	507 lokasi	45.311.097	181,07 %	25,86%	181,07%	25,86%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.03.07.02	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.03.07.02.01	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi teknis pendukung penunjang infrastruktur					180 rekomendasi	1.240.171	90 rekomendasi	132.575	90 rekomendasi	350.552	135 rekomendasi	332.837	180 rekomendasi	151.507	180 rekomendasi	151.507	100,00 %	12,22%	100,00%	12,22%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemukiman
Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			4.555.874		4.386.767		47.692.936		6.146.395		8.423.724		9.563.706		12.636.833		24.133.825		50,60%		28.520.592		54,59%	
			Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	60,79 %		100,22 %		60,79 %		0%		58,94 %		60,1 %		60,79%		60,85%		100,1 %		60,85%		100,1 %		-
			Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan	75%		135,2 %		75%		0%		97,79 %		97,95 %		98,31%		98,31%		131,08 %		98,31%		131,08 %		-
			Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan publik yang berfungsi baik	100%		137,86 %		100%		0%		126,2 %		127,95 %		127,95%		127,95%		127,95 %		127,95%		127,95 %		-
	1.03.08.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																								
	1.03.08.01.01	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Pemerintah yang dipelihara					300 bangunan	36.463.215	152 bangunan	5.149.746	152 bangunan	6.349.786	247 bangunan	8.024.791	334 bangunan	10.207.221	334 bangunan	10.207.221	111,33 %	27,99%	111,33%	27,99%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.03.08.01.02	Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan					7169 data	968.750	3631 data	162.620	3631 data	224.003	5616 data	207.131	7767 data	135.626	7767 data	135.626	108,34 %	14,00%	108,34%	14,00%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.03.08.01.03	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan yang diproses					7169 berkas	5.100.694	4517 berkas	720.529	4517 berkas	1.193.491	6357 berkas	1.191.685	9028 berkas	969.947	9028 berkas	969.947	125,93 %	19,02%	125,93%	19,02%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Jumlah berkas permohonan SLF yang diproses					50 berkas	5.100.694	40 berkas	720.529	40 berkas	1.193.491	54 berkas	1.191.685	93 berkas	969.947	93 berkas	969.947	186,00 %	19,02%	186,00%	19,02%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.03.08.01.05	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun					4 dokumen	542.400	0 dokumen	108.100	0 dokumen	110.100	2 dokumen	131.700	5 dokumen	161.800	5 dokumen	161.800	125,00 %	29,83%	125,00%	29,83%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.03.08.01.06	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun					4 dokumen	4.617.877	0 dokumen	5.400	0 dokumen	546.344	0 dokumen	8.400	4 dokumen	1.162.239	4 dokumen	1.162.239	100,00 %	25,17%	100,00%	25,17%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Jumlah dokumen perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan					9 Dokumen	4.617.877	0 Dokumen	5.400	0 Dokumen	546.344	0 Dokumen	8.400	10 Dokumen	1.162.239	10 Dokumen	1.162.239	111,11 %	25,17%	111,11%	25,17%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas/Gedung Pendidikan yang disusun					24 dokumen	4.617.877	5 dokumen	5.400	5 dokumen	546.344	5 dokumen	8.400	26 dokumen	1.162.239	26 dokumen	1.162.239	108,33 %	25,17%	108,33%	25,17%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah Daerah					30 Dokumen	4.617.877	5 Dokumen	5.400	5 Dokumen	546.344	5 Dokumen	8.400	37 Dokumen	1.162.239	37 Dokumen	1.162.239	123,33 %	25,17%	123,33%	25,17%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			279.972.767		259.035.500		337.757.747		105.587.187		54.742.758		32.928.673		24.411.760		193.258.617		57,22%		452.294.117		73,22%	
			Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan	15,48 %		137,22 %		15,48 %		0%		17,7 %		19,26 %		19,77%		20,16%		130,23 %		20,16%		130,23 %		-
			Persentase jaringan jalan yang terbangun	0,71 %		110,59 %		0,71 %		0%		0%		0,05 %		0,11%		0,11%		129,15 %		0,11%		129,15 %		-
			Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki	34,36 %		112,66 %		34,36 %		0%		0,55 %		1,58 %		8,32%		12,18%		223,4 %		12,18%		223,4 %		-
			Persentase dokumen perancangan dan pengawasan jalan dan jembatan yang tepat waktu	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	17,07 hektar		183,37 hektar		17,07 hektar		0 hektar		33,17 hektar		35,39 hektar		28,92hektar		35,84hektar		209,96 %		35,84hektar		209,96 %		-
	1.03.10.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota																								
	1.03.10.01.01	Pembangunan Jalan	Jumlah lokasi jalan dan kelengkapannya yang dibangun					12 lokasi	115.012.747	5 lokasi	1.302.429	5 lokasi	20.591.885	14 lokasi	11.855.243	23 lokasi	12.065.503	23 lokasi	12.065.503	191,67 %	10,49%	191,67%	10,49%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.10.01.02	Pembangunan Jembatan	Jumlah lokasi jembatan yang dibangun					1 lokasi	6.566.329	1 lokasi	5.400	1 lokasi	4.370.782	1 lokasi	8.400	2 lokasi	5.600	2 lokasi	5.600	200,00 %	0,09%	200,00%	0,09%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.10.01.03	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah lokasi tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur					4 lokasi	155.984.404	3 lokasi	102.430.381	3 lokasi	22.207.301	7 lokasi	13.125.796	4 lokasi	2.332.004	4 lokasi	2.332.004	100,00 %	1,50%	100,00%	1,50%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.10.01.04	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah lokasi jalan dan kelengkapannya yang dipelihara					2000 lokasi	42.858.404	1259 lokasi	1.634.826	1259 lokasi	6.372.735	2928 lokasi	5.079.564	2305 lokasi	7.956.887	2305 lokasi	7.956.887	115,25 %	18,57%	115,25%	18,57%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.10.01.05	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jalan dan jembatan					6 dokumen	3.319.655	0 dokumen	67.806	0 dokumen	117.367	1 dokumen	638.432	7 dokumen	177.325	7 dokumen	177.325	116,67 %	5,34%	116,67%	5,34%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.10.01.06	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang disusun					22 dokumen	2.080.668	12 dokumen	104.246	12 dokumen	905.287	22 dokumen	785.558	24 dokumen	135.823	24 dokumen	135.823	109,09 %	6,53%	109,09%	6,53%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.10.01.07	Rehabilitasi Jalan	Jumlah lokasi jalan dan kelengkapannya yang direhabilitasi/dipelihara					2 lokasi	829.933	0 lokasi	36.700	0 lokasi	169.000	0 lokasi	130.271	1 lokasi	250.723	1 lokasi	250.723	50,00%	30,21%	50,00%	30,21%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.03.10.01.08	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah lokasi jembatan yang direhabilitasi/dipelihara					1 lokasi	5.859.029	0 lokasi	5.400	0 lokasi	8.400	0 lokasi	8.400	1 lokasi	5.600	1 lokasi	5.600	100,00 %	0,10%	100,00%	0,10%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.10.01.09	Rekonstruksi Jalan	Jumlah lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)					1 lokasi	5.246.578	0 lokasi	0	0 lokasi	0	0 lokasi	1.297.009	1 lokasi	1.482.296	1 lokasi	1.482.296	100,00 %	28,25%	100,00%	28,25%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			345.533		335.241		292.639		44.289		65.990		66.064		46.345		176.343		60,26%		511.585		80,16%	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup konstruksi	93%		111,11 %		93%		0%		89,69 %		100%		100%		100%		107,53 %		100%		107,53 %		-
	1.03.11.01	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)																								
	1.03.11.01.01	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan					407 berkas	292.639	174 berkas	44.289	174 berkas	65.990	199 berkas	66.064	199 berkas	46.345	199 berkas	46.345	48,89%	15,84%	48,89%	15,84%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1.484.469		1.398.192		7.223.748		1.195.462		1.799.202		1.633.661		1.316.132		6.591.992		91,25%		7.990.184		91,75%	
			Indeks Pelayanan Tata Ruang	95%		102,51 %		95%		0%		96,77 %		96,99 %		97,53%		97,28%		102,4 %		97,28%		102,4 %		-
			Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	1.03.12.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTn) Kabupaten/Kota																								
	1.03.12.01.01	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang wilayah kota yang dibuat					3 dokumen	2.298.462	0 dokumen	429.031	0 dokumen	552.564	0 dokumen	555.106	3 dokumen	480.344	3 dokumen	480.344	100,00 %	20,90%	100,00%	20,90%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.03.12.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																								

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.03.12.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota					2 dokumen	2.488.114	0 dokumen	428.673	0 dokumen	588.762	0 dokumen	554.671	2 dokumen	354.564	2 dokumen	354.564	100,00 %	14,25%	100,00%	14,25%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.03.12.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.03.12.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah ijin pemanfaatan jalan, saluran dan utilitas yang diterbitkan					10 izin	681.444	2 izin	82.301	2 izin	184.420	9 izin	124.840	11 izin	144.797	11 izin	144.797	110,00 %	21,25%	110,00%	21,25%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemukiman
	1.03.12.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.03.12.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan					300 lokasi	1.755.728	206 lokasi	255.457	206 lokasi	473.456	316 lokasi	399.044	412 lokasi	336.427	412 lokasi	336.427	137,33 %	19,16%	137,33%	19,16%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman																								
Meningkatkan efektivitas pemanfaatan perumahan layak huni	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			22.338.293		20.905.069		21.894.465		3.853.860		4.985.271		5.018.288		3.732.173		13.857.419		63,29%		34.762.487		78,59%	
			Tingkat kesesuaian penghuni rusunawa	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		-
	1.04.02.01	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																								
	1.04.02.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola					103 blok	14.747.504	103 blok	2.327.859	103 blok	3.304.405	103 blok	3.374.757	103 blok	2.063.167	103 blok	2.063.167	100,00 %	13,99%	100,00%	13,99%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	1.04.02.01.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola					3981 lokasi	7.146.960	3981 lokasi	1.526.001	3981 lokasi	1.680.866	3981 lokasi	1.643.531	3981 lokasi	1.669.007	3981 lokasi	1.669.007	100,00 %	23,35%	100,00%	23,35%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			231.963.772		182.967.706		29.579.620		1.190.809		8.417.975		6.759.573		8.846.637		16.368.357		55,34%		199.336.062		76,22%	
			Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	50,83 %		100,79 %		50,83 %		0%		31,61 %		-34,53 %		53,31%		53,31%		104,87 %		53,31%		104,87 %		-
			Persentase rumah tapak tidak layak huni yang diperbaiki	100%		100,42 %		100%		0%		0%		10,45 %		73,99%		100%		100%		100%		100 %		-
	1.04.03.01	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																								
	1.04.03.01.01	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman					100 dokumen	5.671.973	50 dokumen	155.998	50 dokumen	2.944.414	71 dokumen	922.601	119 dokumen	772.823	119 dokumen	772.823	119,00 %	13,63%	119,00%	13,63%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan yang disusun					12 dokumen	5.671.973	0 dokumen	155.998	0 dokumen	2.944.414	5 dokumen	922.601	21 dokumen	772.823	21 dokumen	772.823	175,00 %	13,63%	175,00%	13,63%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.04.03.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																								
	1.04.03.02.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki					623 unit	23.907.647	9 unit	1.034.811	9 unit	5.473.561	88 unit	5.836.972	623 unit	8.073.814	623 unit	8.073.814	100,00 %	33,77%	100,00%	33,77%			Dinas Sosial
Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			231.963.772		182.967.706		42.809.978		118.029		344.308		9.254.818		3.446.548		9.717.154		22,70%		192.684.860		70,12%	
			Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	50,83 %		100,79 %		50,83 %		0%		31,61 %		-34,53 %		53,31%		53,31%		104,87 %		53,31%		104,87 %		-
	1.04.04.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota																								



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.04.04.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah yang dibangun					7 bangunan	42.809.978	0 bangunan	118.029	0 bangunan	344.308	0 bangunan	9.254.818	13 bangunan	3.446.548	13 bangunan	3.446.548	185,71 %	8,05%	185,71%	8,05%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			269.660.534		243.458.072		199.574.329		27.916.227		66.779.505		31.467.172		41.515.901		367.310.977		184,05 %		610.769.049		130,16 %	
			Indeks Pelayanan Tata Ruang	95%		102,51 %		95%		0%		96,77 %		96,99 %		97,53%		97,28%		102,4 %		97,28%		102,4 %		-
			Persentase titik pemasangan PJU hemat energi	85,9 %		129,5 %		85,9 %		0%		99,09 %		99,09 %		107,63%		107,63%		125,3 %		107,63%		125,3 %		-
			Persentase pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	10,24 %		149,29 %		10,24 %		0%		12,96 %		12,96 %		12,96%		12,96%		126,55 %		12,96%		126,55 %		-
			Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	38,46 %		104,84 %		38,46 %		0%		32,26 %		32,26 %		32,26%		32,26%		83,87 %		32,26%		83,87 %		-
	1.04.05.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																								
	1.04.05.01.01	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah titik PJU yang dipelihara					73680 titik	9.425.527	90252 titik	729.844	90252 titik	1.872.102	90252 titik	2.102.080	90252 titik	1.500.363	90252 titik	1.500.363	122,49 %	15,92%	122,49%	15,92%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Jumlah PJU hemat energi yang terpasang					1276 titik	46.922.015	30 titik	5.400	30 titik	35.756.200	30 titik	257.243	1324 titik	2.355.438	1324 titik	2.355.438	103,76 %	5,02%	103,76%	5,02%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan					6674 rekening	123.453.823	7170 rekening	24.567.233	7170 rekening	24.435.439	7175 rekening	24.314.699	7181 rekening	34.172.185	7181 rekening	34.172.185	107,60 %	27,68%	107,60%	27,68%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi					15 lokasi	5.617.961	17 lokasi	499.407	17 lokasi	1.330.080	17 lokasi	1.492.503	17 lokasi	1.145.790	17 lokasi	1.145.790	113,33 %	20,40%	113,33%	20,40%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Jumlah Pemakaman yang dibangun/rehab dan dipelihara					14 lokasi	13.002.063	14 lokasi	1.922.819	14 lokasi	3.098.064	14 lokasi	3.055.666	14 lokasi	2.064.740	14 lokasi	2.064.740	100,00 %	15,88%	100,00%	15,88%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
	1.04.05.02	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																								



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.04.05.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang disusun					9 Dokumen	1.152.940	0 Dokumen	191.524	0 Dokumen	287.622	0 Dokumen	244.981	34 Dokumen	277.385	34 Dokumen	277.385	377,78 %	24,06%	377,78%	24,06%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																								
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%		100%		100%		0%		100%		90,28 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,98 %		100%		0%		99,27 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	1.05.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	1.05.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	9.345.256	100%	1.572.010	100%	2.231.404	100%	1.837.412	100%	1.822.395	100%	1.822.395	100,00 %	19,50%	100,00%	19,50%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
	1.05.01.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																								
	1.05.01.02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	451.307	2%	82.549	2%	100.370	84,62%	106.100	100%	61.461	100%	61.461	100,00 %	13,62%	100,00%	13,62%			Dinas Pemadam Kebakaran
	1.05.01.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	1.05.01.03.01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	905.990	1%	207.635	1%	182.824	83,33%	189.891	100%	135.883	100%	135.883	100,00 %	15,00%	100,00%	15,00%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatkan ketertiban umum	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			42.505.981		41.316.518		82.119.657		13.692.794		20.037.722		20.102.837		13.381.355		53.833.353		65,55%		95.149.871		76,35%	
			Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase pelanggaran Perda terkait IMB, kebersihan, parkir umum, Perda lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%		100%		100%		0%		99,3 %		99,3 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase petugas perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	77,72 %		98,37 %		77,72 %		0%		78,91 %		78,45 %		99,43%		99,43%		127,93 %		99,43%		127,93 %		-
	1.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.05.02.01.01	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa					191 kali	425.218	88 kali	36.774	88 kali	87.254	130 kali	178.991	195 kali	46.207	195 kali	46.207	102,09 %	10,87%	102,09%	10,87%			Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial					2168 kali	1.709.441	1329 kali	371.654	1329 kali	426.885	2043 kali	413.637	3435 kali	298.113	3435 kali	298.113	158,44 %	17,44%	158,44%	17,44%			Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.01.03	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP					91 kali	92.336	43 kali	21.398	43 kali	20.340	66 kali	22.992	91 kali	16.412	91 kali	16.412	100,00 %	17,77%	100,00%	17,77%			Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.01.04	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat					1914 kali	34.840.370	1103 kali	5.802.106	1103 kali	8.561.554	1974 kali	8.538.355	3002 kali	5.674.912	3002 kali	5.674.912	156,84 %	16,29%	156,84%	16,29%			Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.02	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.05.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendukung pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat					793 orang	43.185.439	796 orang	7.102.769	796 orang	10.593.527	800 orang	10.546.149	814 orang	7.042.574	814 orang	7.042.574	102,65 %	16,31%	102,65%	16,31%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
	1.05.02.02.02	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta pelatihan kader perlindungan masyarakat					100 orang	83.600	0 orang	5.400	0 orang	8.400	0 orang	8.400	100 orang	55.600	100 orang	55.600	100,00 %	66,51%	100,00%	66,51%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.05.02.03	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota																								
	1.05.02.03.01	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penindakan pelanggaran Perda					65 kali	398.742	47 kali	117.118	47 kali	43.862	70 kali	80.645	76 kali	34.654	76 kali	34.654	116,92 %	8,69%	116,92%	8,69%			Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.03.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penerbitan, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi					397 kali	1.384.512	229 kali	235.575	229 kali	295.900	313 kali	313.668	416 kali	212.884	416 kali	212.884	104,79 %	15,38%	104,79%	15,38%			Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Penerbitan, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah					164 kali	1.384.512	96 kali	235.575	96 kali	295.900	144 kali	313.668	183 kali	212.884	183 kali	212.884	111,59 %	15,38%	111,59%	15,38%			Satuan Polisi Pamong Praja
Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			9.442.813		8.947.760		26.971.204		692.079		1.509.119		8.579.818		5.864.252		4.913.525		18,22%		13.861.285		38,07%	
			Persentase penanggulangan kejadian bencana alam ≤ 24 jam	100%		100%		100%		0%		0%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		-
			Persentase kelurahan tangguh bencana	100%		113,64 %		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		-
	1.05.03.01	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana																								
	1.05.03.01.01	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana					300 orang	168.200	207 orang	41.800	207 orang	58.600	207 orang	8.400	276 orang	8.200	276 orang	8.200	92,00%	4,88%	92,00%	4,88%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
			Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana					1650 orang	13.869.725	258 orang	87.163	258 orang	190.155	762 orang	5.698.973	1608 orang	4.053.883	1608 orang	4.053.883	97,45%	29,23%	97,45%	29,23%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
	1.05.03.01.03	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan					8 jenis	7.827.558	1 jenis	5.400	1 jenis	302.325	4 jenis	1.676.108	14 jenis	1.164.170	14 jenis	1.164.170	175,00 %	14,87%	175,00%	14,87%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
	1.05.03.02	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																								
	1.05.03.02.01	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana					100%	2.453.875	100%	156.869	100%	361.373	100%	349.251	100%	236.240	100%	236.240	100,00 %	9,63%	100,00%	9,63%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.05.03.02.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jenis kejadian bencana yang manajemen tanggap bencanaanya dikembangkan					10 jenis	2.651.846	10 jenis	400.847	10 jenis	596.666	10 jenis	847.086	11 jenis	401.759	11 jenis	401.759	110,00 %	15,15%	110,00%	15,15%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
Pengembangan sistem penanggulangan an bencana yang antisipatif dan tanggap	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			40.988.912		39.756.866		46.154.242		7.396.924		11.354.945		11.519.459		7.474.734		30.271.328		65,59%		70.028.194		80,36%	
			Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	50,5		108,26		50,5		0		20,89		39,38		45,78		46,11		108,69 %		46,11		108,69 %		-
			Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100,97%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	83%		125%		83%		0%		100%		100%		100%		100%		120,48 %		100%		120,48 %		-
	1.05.04.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.05.04.01.01	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksana operasional pemadaman kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya					830 orang	38.302.992	830 orang	6.458.850	830 orang	9.606.580	830 orang	9.433.929	830 orang	6.062.876	830 orang	6.062.876	100,00 %	15,83%	100,00%	15,83%			Dinas Pemadam Kebakaran
	1.05.04.01.02	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi aparatur dan peran serta masyarakat					30 kali	509.058	11 kali	67.516	11 kali	140.600	16 kali	148.994	30 kali	47.213	30 kali	47.213	100,00 %	9,27%	100,00%	9,27%			Dinas Pemadam Kebakaran
	1.05.04.01.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan/dibangun					69 unit	1.386.395	0 unit	79.304	0 unit	206.960	32 unit	417.922	69 unit	322.544	69 unit	322.544	100,00 %	23,26%	100,00%	23,26%			Dinas Pemadam Kebakaran
	1.05.04.01.04	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang terpelihara					200 unit	5.247.094	102 unit	702.511	102 unit	1.242.595	208 unit	1.316.488	200 unit	867.089	200 unit	867.089	100,00 %	16,53%	100,00%	16,53%			Dinas Pemadam Kebakaran
	1.05.04.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran																								
	1.05.04.02.01	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dilaksanakan pemeriksaan					350 bangunan	271.303	151 bangunan	41.943	151 bangunan	53.380	221 bangunan	62.327	350 bangunan	62.478	350 bangunan	62.478	100,00 %	23,03%	100,00%	23,03%			Dinas Pemadam Kebakaran
	1.05.04.03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran																								
	1.05.04.03.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi dan simulasi yang dilaksanakan					20 kali	437.400	8 kali	46.800	8 kali	104.829	10 kali	139.800	20 kali	112.533	20 kali	112.533	100,00 %	25,73%	100,00%	25,73%			Dinas Pemadam Kebakaran



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																								
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
	1.06.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	1.06.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	17.020.729	100%	3.174.040	100%	4.436.992	100%	3.716.412	100%	3.391.895	100%	3.391.895	100,00 %	19,93%	100,00%	19,93%			Dinas Sosial
Meningkatkan kesejahteraan PMKS	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		581.453		306.120		243.847		29.655		67.747		39.629		42.631		137.031		56,20%		443.151		53,70%		
			Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	62%		116,13 %		62%		0%		84,21 %		85,42 %		85,94%		85,94%		138,61 %		85,94%		138,61 %		-
	1.06.02.01	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.06.02.01.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan PSKS yang dibina				26 kali	243.847	17 kali	29.655	17 kali	67.747	22 kali	39.629	29 kali	42.631	29 kali	42.631	111,54 %	17,48%	111,54%	17,48%			Dinas Sosial	
Meningkatkan kualitas pendidikan	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		323.471.515		277.455.867		33.376.433		4.734.766		7.810.769		7.805.945		4.933.470		18.258.889		54,71%		295.714.755		82,87%		
			Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100%		101,46 %		100%		0%		91,72 %		111,75 %		109,94%		110,29%		110,29 %		110,29%		110,29 %		-
			Persentase sasaran penerima layanan pemakaman dan ambulance gratis dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	50%		82,57 %		50%		0%		18%		7,92 %		9,23%		50,12%		100,24 %		50,12%		100,24 %		-
			Persentase pemulangan PMKS	35%		157,43 %		35%		0%		11,35 %		36,1 %		41,29%		41,29%		117,98 %		41,29%		117,98 %		-
			Persentase sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	100%		100,18 %		100%		0%		61,88 %		61,72 %		65,9%		100%		100%		100%		100 %		-
	1.06.04.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																								
	1.06.04.01.01	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha				160 orang	5.394.744	181 orang	661.065	181 orang	1.310.127	202 orang	1.546.426	219 orang	752.662	219 orang	752.662	136,88 %	13,95%	136,88%	13,95%			Dinas Sosial	



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat					80 orang	1.338.321	80 orang	138.317	80 orang	297.626	83 orang	238.826	83 orang	162.138	83 orang	162.138	103,75 %	12,12%	103,75%	12,12%			Dinas Sosial
	1.06.04.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																								
	1.06.04.02.01	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan					55 lembaga	6.084.425	55 lembaga	924.258	55 lembaga	1.376.565	55 lembaga	1.374.865	55 lembaga	919.624	55 lembaga	919.624	100,00 %	15,11%	100,00%	15,11%			Dinas Pendidikan
	1.06.04.03	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																								
	1.06.04.03.01	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta lanjut usia					17 kali	154.260	0 kali	14.400	0 kali	19.200	0 kali	19.800	9 kali	80.038	9 kali	80.038	52,94%	51,89%	52,94%	51,89%			Dinas Sosial
			Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan					475 orang	1.269.010	34 orang	200.332	34 orang	313.106	54 orang	290.220	302 orang	198.247	302 orang	198.247	63,58%	15,62%	63,58%	15,62%			Dinas Sosial
	1.06.04.03.03	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih					1100 orang	15.606.766	1556 orang	2.269.255	1556 orang	3.763.856	1695 orang	3.460.537	1787 orang	2.304.986	1787 orang	2.304.986	162,45 %	14,77%	162,45%	14,77%			Dinas Sosial
	1.06.04.03.04	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Kegiatan Layanan Ambulance Gratis Yang Diselenggarakan					4416 kali	3.384.182	1866 kali	514.555	1866 kali	690.961	3385 kali	858.875	3809 kali	479.134	3809 kali	479.134	86,25%	14,16%	86,25%	14,16%			Dinas Sosial
			Jumlah Orang Yang Mendapat Fasilitas Pemakaman					315 orang	3.384.182	0 orang	514.555	0 orang	690.961	0 orang	858.875	0 orang	479.134	0 orang	479.134	0,00%	14,16%	0,00%	14,16%			Dinas Sosial
	1.06.04.03.06	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan					660 orang	144.725	156 orang	12.585	156 orang	39.328	428 orang	16.395	530 orang	36.642	530 orang	36.642	80,30%	25,32%	80,30%	25,32%			Dinas Sosial
Meningkatkan kesejahteraan PMKS	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			4.176.817		3.719.505		12.309.454		1.493.195		2.693.351		2.868.490		1.855.420		7.055.036		57,31%		10.774.541		65,35%	
			Persentase bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan yang tersalurkan	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	100 %		-	
			Persentase sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	100%		100,18 %		100%		0%		61,88 %		61,72 %		65,9%		100%		100%		100%	100 %		-	
			Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	62%		116,13 %		62%		0%		84,21 %		85,42 %		85,94%		85,94%		138,61 %		85,94%	138,61 %		-	
			Persentase data kesejahteraan sosial yang dimanfaatkan	100%		89,3 %		100%		0%		108,54 %		108,93 %		109,15%		100%		100%		100%	100 %		-	
	1.06.05.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar																								
	1.06.05.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan					85 orang	4.920.131	55 orang	676.544	55 orang	1.229.994	55 orang	906.695	55 orang	598.754	55 orang	598.754	64,71%	12,17%	64,71%	12,17%			Dinas Sosial



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri					45 orang	4.920.131	30 orang	676.544	30 orang	1.229.994	31 orang	906.695	31 orang	598.754	31 orang	598.754	68,89%	12,17%	68,89%	12,17%			Dinas Sosial
	1.06.05.01.03	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah panti sosial yang mendapat bantuan					10 lembaga	119.694	0 lembaga	5.400	0 lembaga	8.400	10 lembaga	72.744	10 lembaga	5.600	10 lembaga	5.600	100,00 %	4,68%	100,00%	4,68%			Dinas Sosial
	1.06.05.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																								
	1.06.05.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan Yang Dilaksanakan					22 kali	2.911.018	12 kali	91.380	12 kali	399.093	18 kali	822.050	24 kali	537.846	24 kali	537.846	109,09 %	18,48%	109,09%	18,48%			Dinas Sosial
	1.06.05.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pemutakhiran data PMKS dan PSKS					154 kelurahan	4.358.610	0 kelurahan	719.871	0 kelurahan	1.055.864	0 kelurahan	1.067.001	154 kelurahan	713.221	154 kelurahan	713.221	100,00 %	16,36%	100,00%	16,36%			Dinas Sosial
Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			4.557.141		4.401.028		1.368.576		215.215		320.583		304.634		201.289		840.431		61,41%		5.241.459		88,45%	
			Persentase lembaga/organisasi/kelompok kepahlawanan yang berpartisipasi dalam kegiatan kepahlawanan	100%		100%		100%		0%		80%		80%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	1.06.07.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																								
	1.06.07.01.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara					7 lokasi	1.368.576	7 lokasi	215.215	7 lokasi	320.583	7 lokasi	304.634	7 lokasi	201.289	7 lokasi	201.289	100,00 %	14,71%	100,00%	14,71%			Dinas Sosial
	2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																								
	2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																								
Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			6.149.120		3.582.661		2.953.476		402.550		643.564		612.615		463.161		1.658.729		56,16%		5.241.390		57,58%	
			Persentase angkatan kerja yang lulus sertifikasi	77%		133,33 %		77%		0%		0%		0%		100%		100%		129,87 %		100%		129,87 %		-
			Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	90%		117,65 %		90%		0%		0%		0%		100%		100%		111,11 %		100%		111,11 %		-
	2.07.03.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.07.03.01.01	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang					25 orang	163.522	0 orang	12.600	0 orang	21.750	0 orang	22.800	25 orang	55.372	25 orang	55.372	100,00 %	33,86%	100,00%	33,86%			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.03.01.02	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi keterampilan kerja					441 orang	194.389	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	441 orang	0	441 orang	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.03.02	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.07.03.02.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota yang disusun					1 dokumen	2.595.564	0 dokumen	389.950	0 dokumen	621.814	0 dokumen	589.815	1 dokumen	407.789	1 dokumen	407.789	100,00 %	15,71%	100,00%	15,71%			Dinas Tenaga Kerja
			Jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi					48 orang	2.595.564	0 orang	389.950	0 orang	621.814	0 orang	589.815	48 orang	407.789	48 orang	407.789	100,00 %	15,71%	100,00%	15,71%			Dinas Tenaga Kerja
Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			2.576.083		2.318.126		1.788.529		276.880		438.688		413.218		338.909		1.413.042		79,01%		3.731.169		85,49%	
			Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5,2 %		-	5752,79 %	5,2 %		0%		-25,97 %		-13,37 %		5,6%		5,6%		107,65 %		5,6%		107,65 %		-
	2.07.04.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.07.04.01.01	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan pendampingan pemilihan bidang kerja					1000 orang	850.258	295 orang	138.691	295 orang	215.836	693 orang	213.456	1000 orang	186.724	1000 orang	186.724	100,00 %	21,96%	100,00%	21,96%			Dinas Tenaga Kerja
			Jumlah pencari kerja yang mengikuti bimtek pengembangan softskill kerja					1050 orang	850.258	460 orang	138.691	460 orang	215.836	775 orang	213.456	1050 orang	186.724	1050 orang	186.724	100,00 %	21,96%	100,00%	21,96%			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.04.01.03	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perluasan kesempatan kerja					50 orang	30.071	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	50 orang	17.294	50 orang	17.294	100,00 %	57,51%	100,00%	57,51%			Dinas Tenaga Kerja
			Jumlah masyarakat pra purna kerja yang mengikuti bimtek persiapan usaha					50 orang	418.618	0 orang	68.687	0 orang	114.160	53 orang	101.409	53 orang	62.627	53 orang	62.627	106,00 %	14,96%	106,00%	14,96%			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.04.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.07.04.02.01	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang mengikuti bimtek					60 lembaga	43.717	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	60 lembaga	2.986	60 lembaga	2.986	100,00 %	6,83%	100,00%	6,83%			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.04.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja																								
	2.07.04.03.01	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah even job fair yang diselenggarakan					3 kali	40.917	1 kali	0	1 kali	0	1 kali	0	3 kali	186	3 kali	186	100,00 %	0,45%	100,00%	0,45%			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.04.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.07.04.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah peserta sosialisasi bidang dan standar kerja di luar negeri					250 orang	404.949	243 orang	69.503	243 orang	108.692	243 orang	98.353	263 orang	69.094	263 orang	69.094	105,20 %	17,06%	105,20%	17,06%			Dinas Tenaga Kerja
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			159.161		141.564		2.493.427		424.031		649.609		628.428		563.711		1.702.068		68,26%		1.843.632		69,50%	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup ketenagakerjaan	80%		128,21 %		80%		0%		100%		100%		100%		125%		100%		125 %			-	
			Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	7,77 %		119,92 %		7,77 %		0%		26,34 %		9,69 %		9,8%		9,83%		126,57 %		9,83%		126,57 %		-
	2.07.05.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.07.05.01.01	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diproses					500 berkas	66.884	158 berkas	7.950	158 berkas	14.250	239 berkas	10.650	615 berkas	23.360	615 berkas	23.360	123,00 %	34,93%	123,00%	34,93%			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.05.01.02	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diproses					500 berkas	45.916	268 berkas	6.150	268 berkas	14.830	369 berkas	10.650	531 berkas	8.600	531 berkas	8.600	106,20 %	18,73%	106,20%	18,73%			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.05.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja					300 lembaga	1.316.623	175 lembaga	229.044	175 lembaga	342.551	265 lembaga	338.406	360 lembaga	315.858	360 lembaga	315.858	120,00 %	23,99%	120,00%	23,99%			Dinas Tenaga Kerja
			Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun					1 dokumen	1.316.623	0 dokumen	229.044	0 dokumen	342.551	0 dokumen	338.406	1 dokumen	315.858	1 dokumen	315.858	100,00 %	23,99%	100,00%	23,99%			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.05.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.07.05.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek harmonisasi hubungan industrial					300 orang	621.091	120 orang	104.353	120 orang	164.269	240 orang	164.479	300 orang	129.936	300 orang	129.936	100,00 %	20,92%	100,00%	20,92%			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.05.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)					110 kasus	442.913	47 kasus	76.534	47 kasus	113.709	69 kasus	104.243	122 kasus	85.957	122 kasus	85.957	110,91 %	19,41%	110,91%	19,41%			Dinas Tenaga Kerja



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																								
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,98 %		100%		0%		99,27 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	2.08.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	2.08.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	10.762.806	100%	1.897.925	100%	2.718.791	100%	2.351.991	100%	2.190.950	100%	2.190.950	100,00 %	20,36%	100,00%	20,36%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	2.08.01.02.01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	369.479	2%	45.548	2%	60.913	57,14%	54.293	100%	72.918	100%	72.918	100,00 %	19,74%	100,00%	19,74%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			1.337.502		1.131.603		1.050.048		77.588		225.572		211.464		295.552		514.624		49,01%		1.646.227		68,95%	
			Persentase kelurahan yang responsif gender	41,56 %		100%		41,56 %		0%		20,13 %		20,13 %		34,42%		34,42%		82,81 %		34,42%		82,81 %		-
			Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	2.08.02.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.08.02.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender					72 lembaga	377.689	0 lembaga	45.007	0 lembaga	61.490	72 lembaga	71.227	72 lembaga	101.151	72 lembaga	101.151	100,00 %	26,78%	100,00%	26,78%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota																								
	2.08.02.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan					23 kali	672.359	5 kali	32.581	5 kali	164.082	11 kali	140.237	18 kali	194.400	18 kali	194.400	78,26%	28,91%	78,26%	28,91%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			3.466.324		3.175.519		231.106		5.400		13.800		27.408		25.964		46.608		20,17%		3.222.126		87,15%	
			Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		-
	2.08.03.01	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.08.03.01.01	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building					926 orang	85.164	0 orang	5.400	0 orang	13.800	926 orang	24.135	926 orang	12.000	926 orang	12.000	100,00 %	14,09%	100,00%	14,09%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			1.337.502		1.131.603		251.199		34.793		51.445		63.117		59.279		149.355		59,46%		1.280.958		80,63%	



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		-
	2.08.05.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.08.05.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun					2 dokumen	251.199	0 dokumen	34.793	0 dokumen	51.445	0 dokumen	63.117	2 dokumen	59.279	2 dokumen	59.279	100,00 %	23,60%	100,00%	23,60%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			3.466.324		3.175.519		803.068		96.671		155.074		162.118		281.840		413.863		51,54%		3.589.382		84,07%	
			Persentase kelurahan ramah anak	100%		91,53 %		100%		0%		77,27 %		77,27 %		99,35%		99,35%		99,35 %		99,35%		99,35 %		-
	2.08.06.01	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																								
	2.08.06.01.01	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak					431 lembaga	589.896	221 lembaga	88.171	221 lembaga	140.474	431 lembaga	149.318	440 lembaga	121.951	440 lembaga	121.951	102,09 %	20,67%	102,09%	20,67%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.01.02	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan					154 kampung	213.172	0 kampung	8.500	0 kampung	14.600	154 kampung	12.800	154 kampung	159.889	154 kampung	159.889	100,00 %	75,00%	100,00%	75,00%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatkan kualitas pendidikan	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			159.277.017		130.985.780		8.389.342		1.219.338		1.791.804		1.776.636		1.364.883		4.787.779		57,07%		135.773.559		80,98%	
			Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS	100%		102,31 %		100%		0%		84,33 %		91,61 %		110,92%		110,44%		110,44 %		110,44%		110,44 %		-



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	74,98 %		113,76 %		74,98 %		0%		0%		0%		82,27%		82,27%		109,72 %		82,27%		109,72 %		-
			Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		-
	2.08.07.01	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.08.07.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan					2 lembaga	1.628.800	2 lembaga	221.046	2 lembaga	303.987	2 lembaga	302.098	2 lembaga	285.201	2 lembaga	285.201	100,00 %	17,51%	100,00%	17,51%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan (DAK)					75 Orang	1.628.800	Orang	221.046	Orang	303.987	0 Orang	302.098	75 Orang	285.201	75 Orang	285.201	100,00 %	17,51%	100,00%	17,51%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.01.03	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak					200 kasus	940.285	38 kasus	154.721	38 kasus	250.831	242 kasus	228.169	247 kasus	152.549	247 kasus	152.549	123,50 %	16,22%	123,50%	16,22%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.08.07.02.01	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah Terbuka yang diselenggarakan dan dibuka selama 12 bulan					37 Lembaga	4.191.458	37 Lembaga	622.525	37 Lembaga	932.999	37 Lembaga	944.271	37 Lembaga	641.933	37 Lembaga	641.933	100,00 %	15,32%	100,00%	15,32%			Dinas Pendidikan
	2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																								
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,98 %		100%		0%		99,27 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	2.09.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	2.09.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	17.278.432	100%	3.173.838	100%	4.451.189	100%	3.753.390	100%	3.608.514	100%	3.608.514	100,00 %	20,88%	100,00%	20,88%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.01.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	2.09.01.02.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	750.554	3%	49.589	3%	284.652	83,33%	157.918	100%	187.745	100%	187.745	100,00 %	25,01%	100,00%	25,01%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Meningkatkan ketahanan pangan	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			5.149.959		4.881.481		2.471.168		316.693		897.237		609.216		356.256		1.823.145		73,78%		6.704.626		87,97%	
			Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80%		102,15 %		80%		0%		66,4 %		83,53 %		83,53%		83,53%		104,42 %		83,53%		104,42 %		-
	2.09.02.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.09.02.01.01	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah bahan pembibitan yang disediakan					9 jenis	2.471.168	8 jenis	316.693	8 jenis	897.237	9 jenis	609.216	9 jenis	356.256	9 jenis	356.256	100,00 %	14,42%	100,00%	14,42%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Meningkatkan ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			701.230		645.564		3.543.907		428.772		578.796		430.490		601.633		1.438.058		40,58%		2.083.622		49,08%	
			Persentase informasi OD yang diperoleh berdasarkan origin (asal) komoditas pangan	63,6 %		100%		63,6 %		0%		100%		63,64 %		63,64%		63,64%		100,06 %		63,64%		100,06 %		-
			Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan	1		341,77		1		0		3,14		2,9		2,84		2,84		283,8 %		2,84		283,8 %		-
			Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	95%		101,32 %		95%		0%		0%		94,48 %		94,48%		94,48%		99,45 %		94,48%		99,45 %		-
	2.09.03.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																								
	2.09.03.01.01	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring					15 laporan	647.298	6 laporan	138.149	6 laporan	144.731	10 laporan	174.454	15 laporan	114.934	15 laporan	114.934	100,00 %	17,76%	100,00%	17,76%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.09.03.02	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi																								
	2.09.03.02.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kegiatan Pelatihan Olah Pangan Yang Dilaksanakan					11 kali	1.448.304	0 kali	145.311	0 kali	217.033	0 kali	128.018	11 kali	243.349	11 kali	243.349	100,00 %	16,80%	100,00%	16,80%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah pelaksanaan Pengembangan Diversifikasi Pangan					28 kali	1.448.304	17 kali	145.311	17 kali	217.033	17 kali	128.018	28 kali	243.349	28 kali	243.349	100,00 %	16,80%	100,00%	16,80%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah kelompok yang mendapatkan intervensi					8 Kelompok	1.448.304	0 Kelompok	145.311	0 Kelompok	217.033	0 Kelompok	128.018	2 Kelompok	243.349	2 Kelompok	243.349	25,00%	16,80%	25,00%	16,80%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Meningkatkan ketahanan pangan	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			2.461.057		2.094.479		726.140		158.273		184.591		140.463		115.587		483.327		66,56%		2.577.806		80,88%	
			Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan	1		341,77		1		0		3,14		2,9		2,84		2,84		283,8 %		2,84		283,8 %		-
			Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	89,75 %		109,35 %		89,75 %		0%		96,61 %		84,04 %		92,77%		92,77%		103,37 %		92,77%		103,37 %		-
	2.09.05.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.09.05.01.01	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel produk pangan segar yang diperiksa					2060 sampel	726.140	1150 sampel	158.273	1150 sampel	184.591	1720 sampel	140.463	2060 sampel	115.587	2060 sampel	115.587	100,00 %	15,92%	100,00%	15,92%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																								
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan daerah	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,98 %		100%		0%		99,27 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	2.10.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	2.10.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	16.791.727	100%	3.132.648	100%	4.384.145	100%	3.752.234	100%	3.676.999	100%	3.676.999	100,00 %	21,90%	100,00%	21,90%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	2.10.01.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	2.10.01.02.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	282.524	2%	56.967	2%	61.374	66,67%	54.340	100%	40.863	100%	40.863	100,00 %	14,46%	100,00%	14,46%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			4.162.204		2.882.418		2.413.465		380.334		592.174		771.466		514.833		1.743.974		72,26%		4.626.393		70,36%	
			Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang ditangani	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		-
	2.10.04.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.10.04.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani					12 Kasus	1.180.909	6 Kasus	183.791	6 Kasus	273.203	9 Kasus	397.002	12 Kasus	242.328	12 Kasus	242.328	100,00 %	20,52%	100,00%	20,52%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	2.10.04.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani					18 obyek	1.232.556	9 obyek	196.543	9 obyek	318.970	14 obyek	374.464	18 obyek	272.506	18 obyek	272.506	100,00 %	22,11%	100,00%	22,11%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Mewujudkan penyediaan lahan bagi kepentingan umum	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			128.202.936		43.759.922		22.803.399		224.434		19.482.381		474.953		292.533		20.181.767		88,50%		63.941.689		42,34%	
			Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	48,05 hektar		93,46 hektar		48,05 hektar		0 hektar		43,38 hektar		43,38 hektar		43,38hektar		43,38hektar		100%		43,38hektar		100 %		-
	2.10.05.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.10.05.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lokasi tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum guna pembangunan non infrastruktur yang diadakan					1 lokasi	22.803.399	1 lokasi	224.434	1 lokasi	19.482.381	1 lokasi	474.953	1 lokasi	292.533	1 lokasi	292.533	100,00 %	1,28%	100,00%	1,28%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
			Jumlah dokumen pendataan dan persiapan pengadaan tanah dan/atau bangunan					1 dokumen	22.803.399	1 dokumen	224.434	1 dokumen	19.482.381	1 dokumen	474.953	1 dokumen	292.533	1 dokumen	292.533	100,00 %	1,28%	100,00%	1,28%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			4.162.204		2.882.418		3.848.433		629.702		1.080.568		798.133		705.545		2.508.403		65,18%		5.390.821		67,30%	
			Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang ditangani	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase aset tanah yang tercatat pemanfaatannya	100%		123%		100%		0%		6,65 %		107,42 %		135,65%		135,65%		135,65 %		135,65%		135,65 %		-

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.10.08.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong																								
	2.10.08.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya					10 kali	1.059.133	2 kali	169.014	2 kali	285.852	8 kali	314.364	10 kali	170.406	10 kali	170.406	100,00 %	16,09%	100,00%	16,09%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	2.10.08.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong																								
	2.10.08.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dan dipetakan					8000 lokasi	869.157	4211 lokasi	155.244	4211 lokasi	180.537	6309 lokasi	181.717	8227 lokasi	153.311	8227 lokasi	153.311	102,84 %	17,64%	102,84%	17,64%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	2.10.08.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah izin yang diterbitkan atas pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya					7000 izin	1.920.143	4749 izin	305.444	4749 izin	614.179	5954 izin	302.051	7313 izin	381.828	7313 izin	381.828	104,47 %	19,89%	104,47%	19,89%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			5.244.839		3.813.634		648.427		60.999		189.709		214.751		113.432		465.459		71,78%		4.279.093		72,61%	
			Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	39,74 %		100,08 %		39,74 %		0%		38,33 %		39,03 %		39,03%		100%		39,03%		100 %			-	
	2.10.10.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.10.10.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya					2 dokumen	648.427	0 dokumen	60.999	0 dokumen	189.709	2 dokumen	214.751	2 dokumen	113.432	2 dokumen	113.432	100,00 %	17,49%	100,00%	17,49%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																								
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,98 %		100%		0%		99,27 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	2.11.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	2.11.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	58.269.626	100%	10.763.912	100%	14.951.687	100%	12.732.346	100%	12.213.687	100%	12.213.687	100,00 %	20,96%	100,00%	20,96%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
	2.11.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	2.11.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	13.126.597	100%	2.456.360	100%	3.364.965	1200,48%	2.871.447	100%	2.742.509	100%	2.742.509	100,00 %	20,89%	100,00%	20,89%			Dinas Lingkungan Hidup



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.11.01.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
	2.11.01.03.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	131.798	1%	26.253	1%	30.367	76,92%	33.717	100%	15.758	100%	15.758	100,00 %	11,96%	100,00%	11,96%			Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	2.11.01.04.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	10.609.660	4%	1.559.736	4%	2.320.848	80,56%	2.310.270	100%	1.751.500	100%	1.751.500	100,00 %	16,51%	100,00%	16,51%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
	2.11.01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	2.11.01.05.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	220.378	2%	550	2%	117.393	75%	11.140	100%	21.495	100%	21.495	100,00 %	9,75%	100,00%	9,75%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Meningkatkan kualitas udara dan air	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			2.929.317		2.866.108		452.000		64.685		161.869		93.163		82.913		319.717		70,73%		3.185.825		94,22%	
			Persentase aspek lingkungan hidup yang dievaluasi	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	2.11.02.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota																								
	2.11.02.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun					1 dokumen	88.600	0 dokumen	9.300	0 dokumen	44.400	0 dokumen	11.000	1 dokumen	23.900	1 dokumen	23.900	100,00 %	26,98%	100,00%	26,98%			Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota																								
	2.11.02.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun					3 dokumen	363.400	0 dokumen	55.385	0 dokumen	117.469	2 dokumen	82.163	3 dokumen	59.013	3 dokumen	59.013	100,00 %	16,24%	100,00%	16,24%			Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatkan kualitas udara dan air	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			4.500.012		4.210.193		4.356.587		308.132		444.587		725.731		1.101.178		2.049.101		47,03%		6.259.293		70,67%	
			Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	95%		112,5 %		95%		0%		0%		0%		95%		95%		100%		95%		100 %		-
			Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	164 kegiatan dan/atau usaha		100 kegiatan dan/atau usaha		164 kegiatan dan/atau usaha		0 kegiatan dan/atau usaha		149 kegiatan dan/atau usaha		164 kegiatan dan/atau usaha		164kegiatan dan/atau usaha		164kegiatan dan/atau usaha		100%		164kegiatan dan/atau usaha		100 %		-
			Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	16%		142,86 %		16%		0%		14,29 %		14,29 %		16,25%		16,25%		101,58 %		16,25%		101,58 %		-
	2.11.03.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.11.03.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah data air laut (dari 48 sampel) dan kuantitas/kualitas Air Bawah Tanah (730 data dari 2 sumur pantau selama satu tahun) yang didapat sebanyak					766 data	733.383	388 data	91.611	388 data	135.850	584 data	209.366	766 data	162.596	766 data	162.596	100,00 %	22,17%	100,00%	22,17%			Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa					224 sampel	733.383	138 sampel	91.611	138 sampel	135.850	208 sampel	209.366	252 sampel	162.596	252 sampel	162.596	112,50 %	22,17%	112,50%	22,17%			Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah pelaksanaan Car Free Day					46 kali	849.008	0 kali	137.506	0 kali	164.430	38 kali	283.019	46 kali	185.479	46 kali	185.479	100,00 %	21,85%	100,00%	21,85%			Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan pengusahaan konservasi energi					120 lembaga	849.008	0 lembaga	137.506	0 lembaga	164.430	60 lembaga	283.019	120 lembaga	185.479	120 lembaga	185.479	100,00 %	21,85%	100,00%	21,85%			Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.02	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																								
	2.11.03.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah laporan kegiatan pengawasan dan rehabilitasi kawasan pesisir					14 laporan	1.773.739	5 laporan	20.977	5 laporan	63.975	7 laporan	48.871	14 laporan	208.032	14 laporan	208.032	100,00 %	11,73%	100,00%	11,73%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.11.03.03	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																								
	2.11.03.03.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublikasi dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun sebanyak					365 data	1.000.456	181 data	58.038	181 data	80.333	273 data	184.475	365 data	545.070	365 data	545.070	100,00 %	54,48%	100,00%	54,48%			Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			92.881.042		81.300.684		74.811.504		9.775.458		15.849.076		16.077.683		11.882.518		30.802.567		41,17%		112.103.251		66,85%	
			Persentase pertumbuhan luas taman hutan raya yang dipelihara dan diawasi	60,19 %		182,61 %		60,19 %		0%		109,4 %		109,4 %		109,4%		109,4%		181,75 %		109,4%		181,75 %		-
			Persentase pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	10,24 %		149,29 %		10,24 %		0%		12,96 %		12,96 %		12,96%		12,96%		126,55 %		12,96%		126,55 %		-
			Persentase aspek lingkungan hidup yang dievaluasi	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	2.11.04.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																								
	2.11.04.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun					3 dokumen	328.130	0 dokumen	36.383	0 dokumen	75.242	0 dokumen	107.923	3 dokumen	72.866	3 dokumen	72.866	100,00 %	22,21%	100,00%	22,21%			Dinas Lingkungan Hidup



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.11.04.02	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																								
	2.11.04.02.01	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah taman yang dipelihara					39 lokasi	17.968.212	39 lokasi	2.773.457	39 lokasi	4.164.040	39 lokasi	4.084.812	39 lokasi	2.810.561	39 lokasi	2.810.561	100,00 %	15,64%	100,00%	15,64%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata dan dipelihara					425 lokasi	41.600.582	425 lokasi	5.268.879	425 lokasi	7.795.849	425 lokasi	8.857.231	425 lokasi	6.807.876	425 lokasi	6.807.876	100,00 %	16,36%	100,00%	16,36%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
	2.11.04.03	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																								
	2.11.04.03.01	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Taman Hutan Raya yang dibangun dan dipelihara					12 lokasi	14.914.581	12 lokasi	1.696.740	12 lokasi	3.813.945	13 lokasi	3.027.717	12 lokasi	2.191.215	12 lokasi	2.191.215	100,00 %	14,69%	100,00%	14,69%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			389.350		352.530		1.371.748		133.568		264.920		251.979		152.101		650.467		47,42%		1.002.997		56,95%	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup	80%		101,63 %		80%		0%		84,02 %		84,03 %		85,52%		85,52%		106,9 %		85,52%		106,9 %		-
			Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi 3R yang beroperasi dengan baik	38,46 %		104,84 %		38,46 %		0%		35,48 %		35,48 %		35,48%		35,48%		92,26 %		35,48%		92,26 %		-
	2.11.05.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3																								
	2.11.05.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi					100 izin	480.851	108 izin	74.538	108 izin	132.560	176 izin	128.689	194 izin	74.761	194 izin	74.761	194,00 %	15,55%	194,00%	15,55%			Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.05.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.11.05.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan					1 kegiatan	890.897	0 kegiatan	59.030	0 kegiatan	132.360	0 kegiatan	123.290	1 kegiatan	77.340	1 kegiatan	77.340	100,00 %	8,68%	100,00%	8,68%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			2.580.226		2.442.153		2.738.062		431.624		676.562		657.712		535.087		2.434.933		88,93%		4.877.087		91,70%	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup	80%		101,63 %		80%		0%		84,02 %		84,03 %		85,52%		85,52%		106,9 %		85,52%		106,9 %		-
			Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	95%		112,5 %		95%		0%		0%		0%		95%		95%		100%		95%		100 %		-
	2.11.06.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.11.06.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan izin lingkungan yang diterbitkan					1300 berkas	1.392.943	1002 berkas	231.215	1002 berkas	346.563	1155 berkas	327.488	1222 berkas	274.138	1222 berkas	274.138	94,00%	19,68%	94,00%	19,68%			Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan					100 izin	342.006	74 izin	56.477	74 izin	96.702	108 izin	83.052	113 izin	55.466	113 izin	55.466	113,00 %	16,22%	113,00%	16,22%			Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya					254 lembaga	1.003.114	29 lembaga	143.933	29 lembaga	233.297	47 lembaga	247.172	254 lembaga	205.483	254 lembaga	205.483	100,00 %	20,48%	100,00%	20,48%			Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah					178 lokasi	1.003.114	120 lokasi	143.933	120 lokasi	233.297	120 lokasi	247.172	178 lokasi	205.483	178 lokasi	205.483	100,00 %	20,48%	100,00%	20,48%			Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatkan kualitas udara dan air	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			165.727		144.575		821.979		173.826		225.895		201.703		147.100		1.202.848		146,34 %		1.347.423		136,42 %	
			Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	75%		138,23 %		75%		0%		91,84 %		96,14 %		96,51%		96,51%		128,68 %		96,51%		128,68 %		-
			Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	13 lingkungan		181,82 lingkungan		13 lingkungan		0 lingkungan		20 lingkungan		20 lingkungan		24lingkungan		24lingkungan		184,62 %		24lingkungan		184,62 %		-
	2.11.08.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.11.08.01.01	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan					12 kali	780.879	4 kali	168.426	4 kali	217.495	9 kali	193.303	12 kali	141.500	12 kali	141.500	100,00 %	18,12%	100,00%	18,12%			Dinas Lingkungan Hidup



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.11.08.02	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.11.08.02.01	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif					1 lingkungan	41.100	1 lingkungan	5.400	1 lingkungan	8.400	1 lingkungan	8.400	1 lingkungan	5.600	1 lingkungan	5.600	100,00 %	13,63%	100,00%	13,63%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Meningkatkan kualitas udara dan air	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			3.590.557		3.217.852		418.524		82.700		117.188		96.396		63.018		296.284		70,79%		3.514.136		87,65%	
			Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	95%		112,5 %		95%		0%		0%		0%		95%		95%		100%		95%		100 %		-
	2.11.10.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota																								
	2.11.10.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani					50 obyek	418.524	34 obyek	82.700	34 obyek	117.188	41 obyek	96.396	51 obyek	63.018	51 obyek	63.018	102,00 %	15,06%	102,00%	15,06%			Dinas Lingkungan Hidup
Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			200.669.646		189.993.812		200.159.134		31.529.169		50.397.674		48.041.347		31.500.626		270.680.976		135,23 %		460.674.787		114,93 %	
			Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ≤ 1 hari	85,95 %		117,84 %		85,95 %		0%		101,6 %		101,6 %		101,6%		101,6%		118,21 %		101,6%		118,21 %		-
			Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	10,93 %		286,06 %		10,93 %		0%		25,03 %		25,03 %		10,99%		10,99%		100,54 %		10,99%		100,54 %		-
			Persentase instalasi pengolahan air limbah yang beroperasi dengan baik	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	2.11.11.01	Pengelolaan Sampah																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.11.11.01.01	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan jalur pedestrian					364 lokasi	100.959.726	364 lokasi	16.568.183	364 lokasi	24.420.990	364 lokasi	24.418.026	364 lokasi	16.331.734	364 lokasi	16.331.734	100,00 %	16,18%	100,00%	16,18%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Jumlah operasional peningkatan pelayanan posko kebersihan yang dilaksanakan					104 kegiatan	151.100	119 kegiatan	5.400	119 kegiatan	8.400	179 kegiatan	8.400	247 kegiatan	54.688	247 kegiatan	54.688	237,50 %	36,19%	237,50%	36,19%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah					267 lokasi	60.498.241	267 lokasi	9.012.673	267 lokasi	17.182.050	267 lokasi	14.226.750	267 lokasi	8.830.039	267 lokasi	8.830.039	100,00 %	14,60%	100,00%	14,60%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Jumlah lokasi operasional pembersihan sampah di saluran					550 lokasi	23.821.547	550 lokasi	3.778.934	550 lokasi	5.539.205	550 lokasi	5.776.559	550 lokasi	3.967.241	550 lokasi	3.967.241	100,00 %	16,65%	100,00%	16,65%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
	2.11.11.01.05	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Rumah Kompos/PLTsa/TPS 3R yang dikelola					39 lokasi	14.630.154	39 lokasi	2.158.580	39 lokasi	3.236.923	39 lokasi	3.603.212	39 lokasi	2.308.524	39 lokasi	2.308.524	100,00 %	15,78%	100,00%	15,78%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
	2.11.11.01.06	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kompetisi pengelolaan kebersihan yang diselenggarakan					1 kali	98.366	0 kali	5.400	0 kali	10.105	0 kali	8.400	1 kali	8.400	1 kali	8.400	100,00 %	8,54%	100,00%	8,54%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
	2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil																								
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%		100%		100%		0%		100%		93,18 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
	2.12.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
	2.12.01.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD					2 Dokumen	7.800	Dokumen	0	Dokumen	0	2 Dokumen	7.800	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.12.01.01.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					12 dokumen	154.100	2 dokumen	13.200	2 dokumen	8.400	9 dokumen	58.800	12 dokumen	71.700	12 dokumen	71.700	100,00 %	46,53%	100,00%	46,53%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	2.12.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	13.663.909	100%	2.571.900	100%	3.525.936	100%	2.914.277	100%	2.694.426	100%	2.694.426	100,00 %	19,72%	100,00%	19,72%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			12.153.695		11.950.290		3.107.917		545.272		793.980		737.033		517.908		3.224.256		103,74 %		15.174.546		99,43%	
			Cakupan penerbitan KTP	95%		106,64 %		95%		0%		97,57 %		99,05 %		98,37%		98,37%		103,55 %		98,37%		103,55 %		-
			Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100%		100%		100%		0%		98,45 %		99,39 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	2.12.02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk																								
	2.12.02.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan kartu keluarga dan KTP-el yang dilayani					398986 berkas	2.415.968	259704 berkas	400.154	259704 berkas	632.004	417110 berkas	579.970	516435 berkas	402.112	516435 berkas	402.112	129,44 %	16,64%	129,44%	16,64%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah permohonan berkas pindah datang dan pendataan penduduk Non Permanen					40930 berkas	691.949	45981 berkas	145.118	45981 berkas	161.976	68137 berkas	157.063	83885 berkas	115.795	83885 berkas	115.795	204,95 %	16,73%	204,95%	16,73%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			2.080.835		2.048.251		1.797.296		326.100		439.451		411.613		325.113		1.860.195		103,50 %		3.908.445		100,78 %	
			Cakupan penerbitan akte kelahiran	99,94 %		100,25 %		99,94 %		0%		100%		100%		100%		100%		100,06 %		100%		100,06 %		-
			Cakupan penerbitan akte kematian	89,51 %		113,64 %		89,51 %		0%		100%		100%		100%		100%		111,72 %		100%		111,72 %		-
			Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akte kelahiran dan akta kematian)	100%		88,98 %		100%		0%		99,75 %		100%		97,51%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akte kelahiran dan akta kematian)	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	2.12.03.01	Pelayanan Pencatatan Sipil																								
	2.12.03.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah berkas permohonan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan yang dilayani					3250 berkas	399.100	2598 berkas	77.098	2598 berkas	84.175	3810 berkas	85.793	5474 berkas	102.410	5474 berkas	102.410	168,43 %	25,66%	168,43%	25,66%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah berkas permohonan akta kelahiran dan kematian yang dilayani					104682 berkas	1.398.195	48538 berkas	249.002	48538 berkas	355.276	89210 berkas	325.819	130439 berkas	222.704	130439 berkas	222.704	124,60 %	15,93%	124,60%	15,93%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			859.958		830.231		2.657.648		376.080		633.079		628.991		449.161		1.638.149		61,64%		2.468.380		70,17%	
			Persentase peningkatan inovasi pelayanan	66,66 %		150,02 %		66,66 %		0%		33,33 %		50%		116,67%		116,67%		175,02 %		116,67%		175,02 %		-
			Persentase sistem informasi intervensi masyarakat yang telah menggunakan data kependudukan	20%		100,95 %		20%		0%		100%		62,5 %		62,5%		62,5%		312,5 %		62,5%		312,5 %		-
			Persentase penurunan data ganda pada database SIAK	90%		116,12 %		90%		0%		87,4 %		97,33 %		97,57%		97,57%		108,41 %		97,57%		108,41 %		-
	2.12.04.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan																								
	2.12.04.01.01	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil					6 dokumen	301.159	0 dokumen	35.482	0 dokumen	74.333	5 dokumen	68.710	6 dokumen	36.647	6 dokumen	36.647	100,00 %	12,17%	100,00%	12,17%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.01.02	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah pelaksanaan monitoring pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan					2 kali	294.708	1 kali	47.859	1 kali	119.637	1 kali	39.171	2 kali	61.469	2 kali	61.469	100,00 %	20,86%	100,00%	20,86%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																								
	2.12.04.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sistem informasi administrasi kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara					8 sistem	1.630.700	8 sistem	231.695	8 sistem	319.803	8 sistem	387.390	8 sistem	288.882	8 sistem	288.882	100,00 %	17,72%	100,00%	17,72%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.02.02	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	data kependudukan yang di mutakhirkan					146684 data	431.081	103260 data	61.043	103260 data	119.306	208578 data	133.720	237053 data	62.163	237053 data	62.163	161,61 %	14,42%	161,61%	14,42%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana																								
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			7.607.699		3.836.442		8.759.283		117.741		597.172		1.667.444		2.289.136		2.382.358		27,20%		6.218.800		38,00%	



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	19,22 %		109,45 %		19,22 %		0%		18,67 %		18,67 %		18,67%		18,67%		102,86 %		18,67%		102,86 %		-
			Persentase peserta KB aktif	80,95 %		101,83 %		80,95 %		0%		81,33 %		81,33 %		81,33%		81,33%		100,47 %		81,33%		100,47 %		-
			Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	2,78 %		194,53 %		2,78 %		0%		0,2 %		0,2 %		0,22%		0,22%		192,15 %		0,22%		192,15 %		-
			Persentase peserta KB baru	97,94 %		95,32 %		97,94 %		0%		6,26 %		6,26 %		63,62%		63,62%		64,96 %		63,62%		64,96 %		-
	2.14.03.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal																								
	2.14.03.01.01	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana					1566 orang	966.207	1566 orang	79.226	1566 orang	552.277	1566 orang	199.982	1566 orang	76.641	1566 orang	76.641	100,00 %	7,93%	100,00%	7,93%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.03.02	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.14.03.02.01	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB					325 orang	329.538	0 orang	37.690	0 orang	44.895	0 orang	60.226	114 orang	40.545	114 orang	40.545	35,08%	12,30%	35,08%	12,30%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.03.02.02	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					1950 Orang	2.705.778	Orang	0	Orang	0	0 Orang	71.070	896 Orang	333.951	896 Orang	333.951	45,95%	12,34%	45,95%	12,34%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.03.02.03	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana					19 unit	1.550.398	0 unit	0	0 unit	0	19 unit	999.075	19 unit	428.400	19 unit	428.400	100,00 %	27,63%	100,00%	27,63%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			2.771.143		2.677.347		3.685.400		422.285		663.564		737.866		531.310		1.823.716		49,48%		4.501.063		69,71%	
			Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif	100%		100%		100%		0%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		-
			Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi	10,33 %		110,52 %		10,33 %		0%		0%		12%		12%		12%		116,17 %		12%		116,17 %		-
	2.14.04.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																								
	2.14.04.01.01	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera					480 orang	328.234	310 orang	48.055	310 orang	104.331	484 orang	78.729	484 orang	58.978	484 orang	58.978	100,83 %	17,97%	100,83%	17,97%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.04.01.02	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi					875 orang	131.145	0 orang	10.800	0 orang	24.600	675 orang	65.328	875 orang	30.417	875 orang	30.417	100,00 %	23,19%	100,00%	23,19%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.04.01.03	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri					50 orang	899.036	0 orang	125.452	0 orang	192.784	25 orang	248.029	50 orang	204.767	50 orang	204.767	100,00 %	22,78%	100,00%	22,78%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.04.01.04	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan					1 bangunan	695.935	1 bangunan	37.722	1 bangunan	52.763	1 bangunan	56.326	1 bangunan	37.110	1 bangunan	37.110	100,00 %	5,33%	100,00%	5,33%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan					38 Unit	695.935	0 Unit	37.722	0 Unit	52.763	0 Unit	56.326	0 Unit	37.110	0 Unit	37.110	0,00%	5,33%	0,00%	5,33%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.04.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan					2 lembaga	556.907	2 lembaga	99.044	2 lembaga	138.255	2 lembaga	136.096	2 lembaga	98.879	2 lembaga	98.879	100,00%	17,76%	100,00%	17,76%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.04.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi					15 lembaga	378.207	8 lembaga	63.490	8 lembaga	98.069	12 lembaga	97.033	15 lembaga	64.048	15 lembaga	64.048	100,00%	16,93%	100,00%	16,93%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																								
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65%		88%		0%		90,17%		90,86%		91,15%		91,15%		103,58%		91,15%		103,58%		-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,98%		100%		0%		99,27%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		-
	2.15.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	2.15.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	64.321.026	100%	11.650.478	100%	17.020.656	100%	13.929.881	100%	13.672.277	100%	13.672.277	100,00%	21,26%	100,00%	21,26%			Dinas Perhubungan
	2.15.01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
	2.15.01.02.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	4.611.954	2%	731.123	2%	1.054.405	54,17%	924.776	100%	1.066.578	100%	1.066.578	100,00%	23,13%	100,00%	23,13%			Dinas Perhubungan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			4.520.540		4.494.082		163.151.624		17.081.473		48.329.570		31.584.750		27.191.379		62.893.725		38,55%		67.387.807		40,19%	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perhubungan	80%		128,21%		80%		0%		100%		100%		100,16%		100,16%		125,2%		100,16%		125,2%		-



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Persentase penyediaan prasarana pendukung transportasi berkelanjutan dalam kondisi baik	100%		100%		100%		0%		0%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		-
			Persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor	94%		102,73 %		94%		0%		94,31 %		94,88 %		95,24%		95,35%		101,44 %		95,35%		101,44 %		-
			Cakupan layanan angkutan trunk Suroboyo Bus	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		-
			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	40%		121,53 %		40%		0%		46,2 %		46,2 %		43,38%		43,38%		108,44 %		43,38%		108,44 %		-
			Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang pada rute tertentu	90,3 menit		102,17 menit		90,3 menit		0 menit		90,27 menit		90,27 menit		88,6menit		88,6menit		101,88 %		88,6menit		101,88 %		-
			Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	40 kilometer per jam		101,62 kilometer per jam		40 kilometer per jam		0 kilometer per jam		38,9 kilometer per jam		38,9 kilometer per jam		41,24kilometer per jam		41,24kilometer per jam		103,09 %		41,24kilometer per jam		103,09 %		-
			Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2%		270,27 %		2%		0%		45,71 %		19,29 %		-1,43%		-12,14%		-607,14 %		-12,14%		-607,14 %		-
	2.15.02.01	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																								
	2.15.02.01.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun			2 bangunan	643.396	0 bangunan	5.400	0 bangunan	8.400	0 bangunan	8.400	0 bangunan	8.400	2 bangunan	8.400	2 bangunan	8.400	100,00 %	1,31%	100,00%	1,31%			Dinas Perhubungan
	2.15.02.01.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Didirikan			1491 unit	9.552.885	2 unit	5.400	2 unit	493.654	589 unit	1.096.988	1492 unit	2.691.564	1492 unit	2.691.564	100,07 %	28,18%	100,07%	28,18%					Dinas Perhubungan
	2.15.02.01.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jenis Perlengkapan Jalan yang Dipelihara			5 Jenis	25.979.075	5 Jenis	1.307.788	5 Jenis	2.965.727	5 Jenis	7.830.864	5 Jenis	6.599.283	5 Jenis	6.599.283	100,00 %	25,40%	100,00%	25,40%					Dinas Perhubungan
	2.15.02.02	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C																								
	2.15.02.02.01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan			14 Lokasi	22.574.997	14 Lokasi	3.644.613	14 Lokasi	6.023.380	14 Lokasi	5.226.658	14 Lokasi	3.809.938	14 Lokasi	3.809.938	100,00 %	16,88%	100,00%	16,88%					Dinas Perhubungan
	2.15.02.02.02	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Paket Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi			4 Paket	2.760.508	0 Paket	384.004	0 Paket	470.024	0 Paket	563.243	4 Paket	410.926	4 Paket	410.926	100,00 %	14,89%	100,00%	14,89%					Dinas Perhubungan
	2.15.02.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi yang Dipelihara			30 Lokasi	3.923.749	0 Lokasi	338.218	0 Lokasi	889.886	0 Lokasi	684.022	30 Lokasi	990.683	30 Lokasi	990.683	100,00 %	25,25%	100,00%	25,25%					Dinas Perhubungan
	2.15.02.03	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir																								
	2.15.02.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Parkir yang Diselenggarakan selama 12 bulan			1821 Lokasi	23.477.946	1821 Lokasi	3.413.730	1821 Lokasi	4.590.272	1821 Lokasi	4.137.344	1821 Lokasi	3.263.607	1821 Lokasi	3.263.607	100,00 %	13,90%	100,00%	13,90%					Dinas Perhubungan
	2.15.02.04	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																								
	2.15.02.04.01	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kebutuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang Diadakan			1 jenis	527.600	0 jenis	5.400	0 jenis	8.400	0 jenis	8.400	1 jenis	448.400	1 jenis	448.400	100,00 %	84,99%	100,00%	84,99%					Dinas Perhubungan
	2.15.02.04.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR di lokasi pengujian kendaraan Bermotor			146069 Unit	7.532.375	73407 Unit	1.026.985	73407 Unit	2.212.424	109307 Unit	1.633.564	146069 Unit	1.175.857	146069 Unit	1.175.857	100,00 %	15,61%	100,00%	15,61%					Dinas Perhubungan



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.15.02.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																								
	2.15.02.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun			8 Dokumen	2.487.220	1 Dokumen	163.884	1 Dokumen	232.417	3 Dokumen	756.849	8 Dokumen	370.765	8 Dokumen	370.765	100,00 %	14,91%	100,00%	14,91%				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.05.02	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan selama 12 bulan			7 Jenis	14.304.552	7 Jenis	2.402.988	7 Jenis	3.676.020	7 Jenis	3.377.281	7 Jenis	2.498.975	7 Jenis	2.498.975	100,00 %	17,47%	100,00%	17,47%				Dinas Perhubungan	
			Jumlah Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan			48 Kali	14.304.552	24 Kali	2.402.988	24 Kali	3.676.020	36 Kali	3.377.281	48 Kali	2.498.975	48 Kali	2.498.975	100,00 %	17,47%	100,00%	17,47%				Dinas Perhubungan	
			Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas selama 12 bulan			365 Kali	14.304.552	181 Kali	2.402.988	181 Kali	3.676.020	273 Kali	3.377.281	365 Kali	2.498.975	365 Kali	2.498.975	100,00 %	17,47%	100,00%	17,47%				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.06	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.15.02.06.01	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Transportasi Umum yang Diselenggarakan			28 Unit	23.799.133	28 Unit	3.921.233	28 Unit	5.114.536	28 Unit	4.817.110	28 Unit	4.391.481	28 Unit	4.391.481	100,00 %	18,45%	100,00%	18,45%				Dinas Perhubungan	
			Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan			365 Kali	670.017	181 Kali	9.300	181 Kali	139.297	273 Kali	162.201	365 Kali	18.100	365 Kali	18.100	100,00 %	2,70%	100,00%	2,70%				Dinas Perhubungan	
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Survey Aksesibilitas Angkutan Barang			2 Kali	327.045	0 Kali	5.400	0 Kali	8.400	1 Kali	264.360	2 Kali	8.400	2 Kali	8.400	100,00 %	2,57%	100,00%	2,57%				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.06.04	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan selama 12 Bulan			8 Unit	1.258.459	8 Unit	146.567	8 Unit	290.170	8 Unit	276.143	8 Unit	183.203	8 Unit	183.203	100,00 %	14,56%	100,00%	14,56%				Dinas Perhubungan	
			Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan			365 Kali	21.769.303	181 Kali	107.232	181 Kali	20.940.449	273 Kali	159.911	365 Kali	112.408	365 Kali	112.408	100,00 %	0,52%	100,00%	0,52%				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.07	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.15.02.07.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan			2 Dokumen	1.492.191	1 Dokumen	187.930	1 Dokumen	257.716	2 Dokumen	545.870	2 Dokumen	200.990	2 Dokumen	200.990	100,00 %	13,47%	100,00%	13,47%				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.08	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.15.02.08.01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan					365 Kali	71.173	181 Kali	5.400	181 Kali	8.400	273 Kali	35.543	365 Kali	8.400	365 Kali	8.400	100,00 %	11,80%	100,00%	11,80%			Dinas Perhubungan
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			53.651.526		31.811.264		534.689		10.515		77.100		102.724		172.930		190.339		35,60%		32.001.603		59,06%	
			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	40%		121,53 %		40%		0%		46,2 %		46,2 %		43,38%		43,38%		108,44 %		43,38%		108,44 %		-
	2.15.03.01	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.15.03.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor					2 Kali	534.689	2 Kali	10.515	2 Kali	77.100	2 Kali	102.724	2 Kali	172.930	2 Kali	172.930	100,00 %	32,34%	100,00%	32,34%			Dinas Perhubungan
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			53.651.526		31.811.264		5.090.659		622.943		1.396.947		1.204.845		788.969		3.224.734		63,35%		35.035.999		59,64%	
			Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang pada rute tertentu	90,3 menit		102,17 menit		90,3 menit		0 menit		90,27 menit		90,27 menit		88,6menit		88,6menit		101,88 %		88,6menit		101,88 %		-
	2.15.05.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian																								
	2.15.05.01.01	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor					1 Kali	5.090.659	0 Kali	622.943	0 Kali	1.396.947	1 Kali	1.204.845	1 Kali	788.969	1 Kali	788.969	100,00 %	15,50%	100,00%	15,50%			Dinas Perhubungan
	2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika																								
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
	2.16.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.16.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	13.548.725	100%	2.526.889	100%	3.518.371	100%	3.005.103	100%	2.927.555	100%	2.927.555	100,00 %	21,61%	100,00%	21,61%			Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			13.039.267		11.357.758		11.915.318		2.383.293		2.551.893		2.273.314		2.649.683		7.634.765		64,08%		18.992.523		76,11%	
			Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	32414 kunjungan		204,5 kunjungan		32414 kunjungan		0 kunjungan		121136,15 kunjungan		149074,31 kunjungan		213270,16kunjungan		227423,06kunjungan		701,62 %		227423,06kunjungan		701,62 %		-
			Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75%		104,31 %		75%		0%		75,1 %		78,03 %		100%		100%		133,33 %		100%		133,33 %		-
			Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	85%		106,04 %		85%		0%		90,47 %		90,31 %		90,97%		90,97%		107,02 %		90,97%		107,02 %		-
	2.16.02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.16.02.01.01	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial					11 kali	573.772	6 kali	49.454	6 kali	147.987	10 kali	110.188	11 kali	101.877	11 kali	101.877	100,00 %	17,76%	100,00%	17,76%			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.01.02	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat, permohonan informasi dan dokumentasi publik yang dilayani					7000 berkas	728.923	5107 berkas	87.845	5107 berkas	200.540	9278 berkas	127.408	11343 berkas	94.654	11343 berkas	94.654	162,04 %	12,99%	162,04%	12,99%			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.01.03	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola					19 Saluran	652.170	19 Saluran	82.160	19 Saluran	145.454	19 Saluran	130.981	19 Saluran	106.534	19 Saluran	106.534	100,00 %	16,34%	100,00%	16,34%			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.01.04	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah					3 Jenis	1.603.955	2 Jenis	111.734	2 Jenis	395.101	3 Jenis	307.159	3 Jenis	258.945	3 Jenis	258.945	100,00 %	16,14%	100,00%	16,14%			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.01.05	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Analisa Data Dan Informasi Pemerintah Daerah yang disusun					3 dokumen	369.072	0 dokumen	48.384	0 dokumen	68.759	2 dokumen	77.197	3 dokumen	71.263	3 dokumen	71.263	100,00 %	19,31%	100,00%	19,31%			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.02	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.16.02.02.01	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan					3 kali	10.653	3 kali	10.471	3 kali	0	3 kali	0	3 kali	0	3 kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.16.02.03	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																								

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.16.02.03.01	Layanan Hubungan Media	Jumlah Pelaksanaan Komunikasi Media Massa					2287 kali	7.563.477	1128 kali	1.919.635	1128 kali	1.551.364	1662 kali	1.398.499	2304 kali	1.976.322	2304 kali	1.976.322	100,74 %	26,13%	100,74%	26,13%			Bagian Hubungan Masyarakat
	2.16.02.03.02	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan					85 kali	413.298	43 kali	73.609	43 kali	42.689	68 kali	121.884	94 kali	40.089	94 kali	40.089	110,59 %	9,70%	110,59%	9,70%			Bagian Hubungan Masyarakat
Meningkatkan kualitas pendidikan	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			29.301.566		26.978.423		40.125.334		2.093.342		9.833.437		8.860.044		4.026.457		22.844.352		56,93%		49.822.775		71,76%	
			Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi	83,18 %		122,16 %		83,18 %		0%		99,28 %		98,7 %		100%		100%		120,22 %		100%		120,22 %		-
			Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	58,37 %		100,83 %		58,37 %		0%		55,2 %		55,66 %		58,37%		58,37%		100%		58,37%		100 %		-
			Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung pelayanan publik	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	2.16.03.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.16.03.01.01	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK					4 Jenis	10.066.019	0 Jenis	875.987	0 Jenis	1.816.951	0 Jenis	1.416.829	4 Jenis	1.086.688	4 Jenis	1.086.688	100,00 %	10,80%	100,00%	10,80%			Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK					2 lokasi	10.066.019	0 lokasi	875.987	0 lokasi	1.816.951	0 lokasi	1.416.829	2 lokasi	1.086.688	2 lokasi	1.086.688	100,00 %	10,80%	100,00%	10,80%			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.16.03.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi Informasi yang dilaksanakan					72 lokasi	442.528	0 lokasi	72.970	0 lokasi	109.750	0 lokasi	115.164	72 lokasi	66.666	72 lokasi	66.666	100,00 %	15,06%	100,00%	15,06%			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.02.02	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data yang dikelola					2 Lokasi	2.541.758	2 Lokasi	119.599	2 Lokasi	189.327	2 Lokasi	162.424	2 Lokasi	1.908.892	2 Lokasi	1.908.892	100,00 %	75,10%	100,00%	75,10%			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.02.03	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manejemen yang Dibangun					15 aplikasi	1.644.006	3 aplikasi	293.265	3 aplikasi	411.968	6 aplikasi	381.196	15 aplikasi	214.337	15 aplikasi	214.337	100,00 %	13,04%	100,00%	13,04%			Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan dikembangkan					165 Aplikasi	1.644.006	165 Aplikasi	293.265	165 Aplikasi	411.968	165 Aplikasi	381.196	165 Aplikasi	214.337	165 Aplikasi	214.337	100,00 %	13,04%	100,00%	13,04%			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.02.05	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah layanan sistem informasi pemerintahan dan publik yang disediakan					399 lokasi	24.043.495	399 lokasi	586.721	399 lokasi	6.684.841	399 lokasi	6.578.731	399 lokasi	634.773	399 lokasi	634.773	100,00 %	2,64%	100,00%	2,64%			Dinas Komunikasi dan Informatika



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.16.03.03	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.16.03.03.01	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah					1213 lembaga	1.387.528	0 lembaga	144.800	0 lembaga	620.600	0 lembaga	205.700	1213 lembaga	115.100	1213 lembaga	115.100	100,00 %	8,30%	100,00%	8,30%			Dinas Pendidikan
			Jumlah kegiatan fasilitasi penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan					2 kali	1.387.528	0 kali	144.800	0 kali	620.600	2 kali	205.700	2 kali	115.100	2 kali	115.100	100,00 %	8,30%	100,00%	8,30%			Dinas Pendidikan
	2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah																								
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,98 %		100%		0%		99,27 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	2.17.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	2.17.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	11.314.579	100%	2.035.860	100%	2.845.775	100%	2.457.799	100%	2.333.104	100%	2.333.104	100,00 %	20,62%	100,00%	20,62%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	2.17.01.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	2.17.01.02.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	98.405	2%	11.817	2%	27.204	84,62%	25.613	100%	19.282	100%	19.282	100,00 %	19,59%	100,00%	19,59%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Mendorong pematapan daya saing usaha mikro dan koperasi	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			1.707.611		1.669.411		377.472		65.618		89.366		101.553		51.286		256.536		67,96%		1.925.947		92,37%	
			Persentase koperasi berklasifikasi AAB	72,95 %		103,19 %		72,95 %		0%		72,18 %		72,97 %		72,97%		72,97%		100,03 %		72,97%		100,03 %		-
	2.17.02.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.17.02.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kualitas koperasi					50 kelompok	377.472	24 kelompok	65.618	24 kelompok	89.366	45 kelompok	101.553	50 kelompok	51.286	50 kelompok	51.286	100,00 %	13,59%	100,00%	13,59%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			1.707.611		1.669.411		894.183		140.430		213.766		236.856		151.160		591.051		66,10%		2.260.462		86,88%	
			Persentase koperasi berklasifikasi AAB	72,95 %		103,19 %		72,95 %		0%		72,18 %		72,97 %		72,97%		72,97%		100,03 %		72,97%		100,03 %		-
	2.17.03.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota																								
	2.17.03.01.01	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan				629 koperasi	761.479	472 koperasi	135.030	472 koperasi	187.366	597 koperasi	194.191	629 koperasi	107.560	629 koperasi	107.560	100,00 %	14,13%	100,00%	14,13%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	2.17.03.01.02	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kinerjanya				35 koperasi	132.704	0 koperasi	5.400	0 koperasi	26.400	35 koperasi	42.665	35 koperasi	43.600	35 koperasi	43.600	100,00 %	32,86%	100,00%	32,86%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			941.787		904.147		459.181		0		207.786		250.841		0		458.626		99,88%		1.362.773		97,27%	
			Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	80%		101,1 %		80%		0%		41,49 %		51,97 %		61,59%		61,07%		109,61 %		61,07%		109,61 %		-
	2.17.05.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.17.05.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM				178 orang	459.181	90 orang	0	90 orang	207.786	210 orang	250.841	210 orang	0	210 orang	0	117,98 %	0,00%	117,98%	0,00%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			941.787		904.147		353.064		44.793		100.235		99.526		64.105		244.554		69,27%		1.148.701		88,71%	
			Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	80%		101,1 %		80%		0%		41,49 %		51,97 %		61,59%		61,07%		109,61 %		61,07%		109,61 %		-
	2.17.06.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota																								



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.17.06.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis					100 koperasi	353.064	45 koperasi	44.793	45 koperasi	100.235	45 koperasi	99.526	101 koperasi	64.105	101 koperasi	64.105	101,00 %	18,16%	101,00%	18,16%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Mendorong pematapan daya saing usaha mikro dan koperasi	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			6.015.430		5.662.567		6.210.663		1.010.441		1.517.012		1.479.939		1.016.878		123.094.593		1.981,99%		128.757.160		1.053,13%	
			Persentase sentra usaha makanan dan minuman yang beroperasi secara optimal	63%		119,63 %		63%		0%		66,67 %		72,92 %		77,08%		77,08%		122,35 %		77,08%		122,35 %		-
			Persentase pelaku usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	8,5 %		107,9 %		8,5 %		0%		9,75 %		9,14 %		9,97%		9,97%		117,34 %		9,97%		117,34 %		-
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100%		98,39 %		100%		0%		49,06 %		74,73 %		99,66%		99,66%		99,66 %		99,66%		99,66 %		-
	2.17.07.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	4.800	20 Kali	0	20 Kali	1.800	32 Kali	0	48 Kali	3.000	48 Kali	3.000	100,00 %	62,50%	100,00%	62,50%			Kec. Sambikerep
	2.17.07.02	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.02.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 kali	797	30 kali	0	30 kali	0	39 kali	780	48 kali	0	48 kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Sukolilo
	2.17.07.03	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.03.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 kali	8.640	24 kali	1.440	24 kali	0	36 kali	0	48 kali	0	48 kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Tandes



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.17.07.04	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.04.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	6.000	16 Kali	1.200	16 Kali	0	28 Kali	1.200	48 Kali	3.600	48 Kali	3.600	100,00 %	60,00%	100,00%	60,00%			Kec. Semampir
	2.17.07.05	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.05.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 kali	14.400	24 kali	0	24 kali	0	36 kali	0	48 kali	0	48 kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Krembangan
	2.17.07.06	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.06.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	1.080	24 Kali	0	24 Kali	0	36 Kali	0	48 Kali	1.080	48 Kali	1.080	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%			Kec. Genteng
	2.17.07.07	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.07.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 kali	1.920	16 kali	480	16 kali	1.440	28 kali	0	49 kali	0	49 kali	0	102,08 %	0,00%	102,08%	0,00%			Kec. Pakal
	2.17.07.08	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.08.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 kali	3.600	24 kali	480	24 kali	1.440	36 kali	1.440	48 kali	240	48 kali	240	100,00 %	6,67%	100,00%	6,67%			Kec. Gunung Anyar
	2.17.07.09	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.17.07.09.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	7.200	18 Kali	0	18 Kali	0	33 Kali	3.600	48 Kali	2.400	48 Kali	2.400	100,00 %	33,33%	100,00%	33,33%			Kec. Tegalsari
	2.17.07.10	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.10.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 kali	2.880	24 kali	0	24 kali	2.880	36 kali	0	48 kali	0	48 kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Rungkut
	2.17.07.11	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.11.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	8.640	24 Kali	0	24 Kali	0	38 Kali	0	51 Kali	7.200	51 Kali	7.200	106,25 %	83,33%	106,25%	83,33%			Kec. Sawahan
	2.17.07.12	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.12.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 kali	12.960	24 kali	0	24 kali	4.320	36 kali	4.320	48 kali	2.880	48 kali	2.880	100,00 %	22,22%	100,00%	22,22%			Kec. Gubeng
	2.17.07.13	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.13.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	3.420	24 Kali	0	24 Kali	2.520	36 Kali	900	48 Kali	0	48 Kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Lakarsantri
	2.17.07.14	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.14.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	5.760	24 Kali	0	24 Kali	0	36 Kali	0	48 Kali	0	48 Kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Gayungan



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.17.07.15	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.15.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 kali	2.400	25 kali	0	25 kali	0	40 kali	0	48 kali	0	48 kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Tambaksari
	2.17.07.16	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.16.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	1.980	24 Kali	0	24 Kali	0	48 Kali	0	48 Kali	1.560	48 Kali	1.560	100,00 %	78,79%	100,00%	78,79%			Kec. Jambangan
	2.17.07.17	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.17.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 kali	720	24 kali	720	24 kali	0	36 kali	0	48 kali	0	48 kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Asemrowo
	2.17.07.18	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.18.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	5.040	24 Kali	720	24 Kali	2.160	36 Kali	2.160	48 Kali	0	48 Kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Wonokromo
	2.17.07.19	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.19.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	300	24 Kali	0	24 Kali	0	36 Kali	0	48 Kali	300	48 Kali	300	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%			Kec. Karangpilang
	2.17.07.20	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemanuku Kepentingan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.17.07.20.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 kali	1.020	24 kali	0	24 kali	0	36 kali	0	48 kali	960	48 kali	960	100,00 %	94,12%	100,00%	94,12%			Kec. Kenjeran
	2.17.07.21	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.21.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 kali	8.640	24 kali	0	24 kali	2.880	36 kali	2.880	48 kali	2.880	48 kali	2.880	100,00 %	33,33%	100,00%	33,33%			Kec. Tenggilis Mejoyo
	2.17.07.22	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.22.01	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan					175 orang	262.051	62 orang	50.538	62 orang	59.648	125 orang	55.683	175 orang	50.056	175 orang	50.056	100,00 %	19,10%	100,00%	19,10%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	2.17.07.22.02	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah sentra usaha yang difasilitasi					58 sentra usaha	5.812.275	60 sentra usaha	953.363	60 sentra usaha	1.428.624	61 sentra usaha	1.401.936	61 sentra usaha	935.502	61 sentra usaha	935.502	105,17 %	16,10%	105,17%	16,10%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Jumlah sentra usaha yang pelaku usahanya mendapatkan pembinaan					48 sentra usaha	5.812.275	49 sentra usaha	953.363	49 sentra usaha	1.428.624	49 sentra usaha	1.401.936	49 sentra usaha	935.502	49 sentra usaha	935.502	102,08 %	16,10%	102,08%	16,10%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	2.17.07.23	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.23.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	900	24 Kali	0	24 Kali	0	36 Kali	0	48 Kali	0	48 Kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Pabean Cantian
	2.17.07.24	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.24.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	720	45 Kali	0	45 Kali	0	57 Kali	0	69 Kali	0	69 Kali	0	143,75 %	0,00%	143,75%	0,00%			Kec. Bulak
	2.17.07.25	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemanaku Kepentingan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.17.07.25.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 kali	720	24 kali	0	24 kali	0	36 kali	0	48 kali	720	48 kali	720	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%			Kec. Sukomanunggal
	2.17.07.26	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.26.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					36 Kali	9.600	12 Kali	0	12 Kali	2.400	24 Kali	3.600	36 Kali	2.400	36 Kali	2.400	100,00 %	25,00%	100,00%	25,00%			Kec. Bubutan
	2.17.07.27	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.27.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 kali	960	24 kali	0	24 kali	960	36 kali	0	48 kali	0	48 kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Wiyung
	2.17.07.28	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.28.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	1.080	24 Kali	0	24 Kali	0	36 Kali	0	48 Kali	180	48 Kali	180	100,00 %	16,67%	100,00%	16,67%			Kec. Simokerto
	2.17.07.29	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.29.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 kali	4.320	24 kali	0	24 kali	1.440	36 kali	1.440	48 kali	480	48 kali	480	100,00 %	11,11%	100,00%	11,11%			Kec. Benowo
	2.17.07.30	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.30.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 kali	8.640	24 kali	0	24 kali	0	36 kali	0	48 kali	1.440	48 kali	1.440	100,00 %	16,67%	100,00%	16,67%			Kec. Mulyorejo



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.17.07.31	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.31.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	1.200	16 Kali	0	16 Kali	0	28 Kali	0	48 Kali	0	48 Kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Dukuh Pakis
	2.17.07.32	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								
	2.17.07.32.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	6.000	24 Kali	1.500	24 Kali	4.500	36 Kali	0	48 Kali	0	48 Kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Wonocolo
Mendorong pematapan daya saing usaha mikro dan koperasi	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			802.669		749.671		744.526		103.803		174.782		194.416		123.925		473.001		63,53%		1.222.671		79,03%	
			Persentase pelaku usaha mikro yang produknnya layak diujimutukan	40%		102,86 %		40%		0%		36,12 %		30,26 %		42,92%		42,92%		107,29 %		42,92%		107,29 %		-
	2.17.08.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil																								
	2.17.08.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembinaan					707 orang	744.526	588 orang	103.803	588 orang	174.782	729 orang	194.416	729 orang	123.925	729 orang	123.925	103,11 %	16,64%	103,11%	16,64%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																								
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,98 %		100%		0%		99,27 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	2.18.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.18.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	11.606.240	100%	2.175.507	100%	3.026.629	100%	2.556.844	100%	2.514.551	100%	2.514.551	100,00 %	21,67%	100,00%	21,67%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	2.18.01.02.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	212.504	2%	31.401	2%	35.871	94,12%	32.633	100%	28.256	100%	28.256	100,00 %	13,30%	100,00%	13,30%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan realisasi investasi	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			1.236.034		1.138.045		408.556		55.896		118.027		117.365		62.261		291.288		71,30%		1.429.333		86,91%	
			Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM	42%		105,54 %		42%		0%		39,68 %		43,98 %		44,87%		44,87%		106,83 %		44,87%		106,83 %		-
			Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	24%		124,51 %		24%		0%		26,59 %		36,1 %		37,11%		37,67%		156,96 %		37,67%		156,96 %		-
	2.18.02.01	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																								
	2.18.02.01.01	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengembangan potensi penanaman modal					4 dokumen	408.556	0 dokumen	55.896	0 dokumen	118.027	2 dokumen	117.365	4 dokumen	62.261	4 dokumen	62.261	100,00 %	15,24%	100,00%	15,24%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan realisasi investasi	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			1.236.034		1.138.045		491.506		51.449		102.730		71.587		68.103		225.767		45,93%		1.363.812		78,95%	
			Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	24%		124,51 %		24%		0%		26,59 %		36,1 %		37,11%		37,67%		156,96 %		37,67%		156,96 %		-
	2.18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.18.03.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan					3 kali	491.506	1 kali	51.449	1 kali	102.730	2 kali	71.587	4 kali	68.103	4 kali	68.103	133,33 %	13,86%	133,33%	13,86%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			5.754.737		5.588.768		3.793.278		686.419		1.013.447		927.724		536.756		2.627.589		69,27%		8.216.357		86,05%	
			Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75%		104,31 %		75%		0%		75,1 %		78,03 %		100%		100%		133,33 %		100%		133,33 %		-
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	80%		128,21 %		80%		0%		100%		100%		99,86%		99,86%		124,83 %		99,86%		124,83 %		-



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																								
	2.18.04.01.01	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan					1 kali	10.586	1 kali	10.396	1 kali	0	1 kali	0	1 kali	0	1 kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.01.02	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan					60000 berkas	3.782.692	47340 berkas	676.023	47340 berkas	1.013.447	66457 berkas	927.724	78939 berkas	536.756	78939 berkas	536.756	131,57 %	14,19%	131,57%	14,19%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan realisasi investasi	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			1.189.113		1.134.073		3.365.143		347.907		852.465		740.861		635.999		1.941.232		57,69%		3.075.305		67,53%	
			Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM	42%		105,54 %		42%		0%		39,68 %		43,98 %		44,87%		44,87%		106,83 %		44,87%		106,83 %		-
			Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75%		104,31 %		75%		0%		75,1 %		78,03 %		100%		100%		133,33 %		100%		133,33 %		-
	2.18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.18.05.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah proyek yang dikunjungi dalam rangka pemantauan pelaksanaan penanaman modal					6 Proyek	43.539	Proyek	0	Proyek	0	6 Proyek	0	6 Proyek	459	6 Proyek	459	100,00 %	1,05%	100,00%	1,05%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi					3500 perusahaan	775.550	714 perusahaan	85.953	714 perusahaan	186.811	3288 perusahaan	135.725	3729 perusahaan	186.253	3729 perusahaan	186.253	106,54 %	24,02%	106,54%	24,02%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah peserta yang hadir dalam rangka pembinaan pelaksanaan penanaman modal					182 Peserta	775.550	Peserta	85.953	Peserta	186.811	104 Peserta	135.725	314 Peserta	186.253	314 Peserta	186.253	172,53 %	24,02%	172,53%	24,02%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Proyek yang dikunjungi dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanaman modal					12 Proyek	885.252	Proyek	88.001	Proyek	239.421	6 Proyek	234.706	12 Proyek	131.517	12 Proyek	131.517	100,00 %	14,86%	100,00%	14,86%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi					11000 pelaku usaha	885.252	5030 pelaku usaha	88.001	5030 pelaku usaha	239.421	9110 pelaku usaha	234.706	11994 pelaku usaha	131.517	11994 pelaku usaha	131.517	109,04 %	14,86%	109,04%	14,86%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			1.189.113		1.134.073		7.193.672		1.183.377		1.725.571		1.648.094		1.088.075		9.114.084		126,70 %		10.248.157		122,25 %	
			Indeks Pelayanan Tata Ruang	95%		102,51 %		95%		0%		96,77 %		96,99 %		97,53%		97,28%		102,4 %		97,28%		102,4 %		-
			Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM	42%		105,54 %		42%		0%		39,68 %		43,98 %		44,87%		44,87%		106,83 %		44,87%		106,83 %		-
	2.18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pemanfaatan ruang dan infrastruktur kota yang didata dan dipetakan					12250 Persil	6.782.904	6074 Persil	1.114.321	6074 Persil	1.629.026	9334 Persil	1.524.222	12636 Persil	1.017.237	12636 Persil	1.017.237	103,15 %	15,00%	103,15%	15,00%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	2.18.06.02	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.18.06.02.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah data investasi yang dikelola					45151 data	410.768	22780 data	69.055	22780 data	96.545	34208 data	123.873	45621 data	70.838	45621 data	70.838	101,04 %	17,25%	101,04%	17,25%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga																								
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,98 %		100%		0%		99,27 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.19.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	2.19.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	10.939.124	100%	1.986.887	100%	2.735.183	100%	2.363.421	100%	2.158.024	100%	2.158.024	100,00 %	19,73%	100,00%	19,73%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	2.19.01.02.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	191.971	2%	31.454	2%	31.705	100%	28.732	100%	19.525	100%	19.525	100,00 %	10,17%	100,00%	10,17%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Meningkatkan kualitas pendidikan	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			51.475.409		38.219.014		33.089.842		3.638.272		11.418.893		8.419.655		2.335.235		23.476.820		70,95%		61.695.835		72,96%	
			Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	46,12 %		100,05 %		46,12 %		0%		47,78 %		47,78 %		49,91%		49,91%		108,22 %		49,91%		108,22 %		-
			Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	154 kelurahan		100 kelurahan		154 kelurahan		0 kelurahan		7 kelurahan		141 kelurahan		141kelurahan		141kelurahan		100%		141kelurahan		100 %		-
			Persentase pemuda yang aktif memberikan penyuluhan sebagai kader anti kenakalan remaja	35%		119,35 %		35%		0%		2,38 %		4,61 %		5,01%		5,01%		100,22 %		5,01%		100,22 %		-
			Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	30%		97,45 %		30%		0%		0%		22,07 %		15,96%		15,96%		106,38 %		15,96%		106,38 %		-
	2.19.02.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																								
	2.19.02.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja					1000 peserta	86.600	0 peserta	5.400	0 peserta	8.400	700 peserta	52.400	1000 peserta	19.200	1000 peserta	19.200	100,00 %	22,17%	100,00%	22,17%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.02.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan					300 orang	310.882	0 orang	48.600	0 orang	94.800	145 orang	99.859	282 orang	66.769	282 orang	66.769	94,00%	21,48%	94,00%	21,48%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.02.01.03	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan					11 kali	600.877	4 kali	39.022	4 kali	102.286	7 kali	169.558	11 kali	234.911	11 kali	234.911	100,00 %	39,09%	100,00%	39,09%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.02.01.04	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga yang disusun					11 dokumen	456.296	6 dokumen	5.400	6 dokumen	102.116	6 dokumen	85.600	11 dokumen	136.984	11 dokumen	136.984	100,00 %	30,02%	100,00%	30,02%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.19.02.02	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																								
	2.19.02.02.01	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat					2 kali	31.635.187	1 kali	3.539.850	1 kali	11.111.291	1 kali	8.012.238	2 kali	1.877.370	2 kali	1.877.370	100,00 %	5,93%	100,00%	5,93%			Dinas Pendidikan
Meningkatkan kualitas pendidikan	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			51.475.409		38.219.014		25.644.757		1.714.057		11.063.758		3.363.002		2.609.436		16.807.133		65,54%		55.026.147		71,35%	
			Persentase prestasi non akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	2%		102,22 %		2%		0%		1,16 %		0%		0,61%		1,8%		89,99 %		1,8%		89,99 %		-
			Persentase prestasi non akademik peserta didik SMP pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	4,5 %		93,55 %		4,5 %		0%		1,63 %		0%		2,25%		3,5%		77,88 %		3,5%		77,88 %		-
			Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	154 kelurahan		100 kelurahan		154 kelurahan		0 kelurahan		7 kelurahan		141 kelurahan		141kelurahan		141kelurahan		100%		141kelurahan		100 %		-
			Akumulasi prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	1690 medali		179,82 medali		1690 medali		0 medali		2796 medali		3017 medali		4373medali		4373medali		258,76 %		4373medali		258,76 %		-
	2.19.03.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.19.03.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan					17 unit	10.912.183	1 unit	5.400	1 unit	8.510.430	7 unit	268.778	17 unit	511.930	17 unit	511.930	100,00 %	4,69%	100,00%	4,69%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.03.02	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi																								
	2.19.03.02.01	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan					18 kali	498.700	10 kali	73.200	10 kali	96.400	14 kali	96.200	16 kali	87.800	16 kali	87.800	88,89%	17,61%	88,89%	17,61%			Dinas Pendidikan
			Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS yang dilaksanakan					12 kali	498.700	3 kali	73.200	3 kali	96.400	6 kali	96.200	11 kali	87.800	11 kali	87.800	91,67%	17,61%	91,67%	17,61%			Dinas Pendidikan
	2.19.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi																								
	2.19.03.03.01	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan					1 kali	2.226.723	0 kali	55.800	0 kali	59.505	1 kali	285.211	1 kali	189.051	1 kali	189.051	100,00 %	8,49%	100,00%	8,49%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi					2 kali	2.226.723	2 kali	55.800	2 kali	59.505	2 kali	285.211	2 kali	189.051	2 kali	189.051	100,00 %	8,49%	100,00%	8,49%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.03.04	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi																								
	2.19.03.04.01	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak					2 kali	170.960	0 kali	5.400	0 kali	8.400	1 kali	90.526	2 kali	63.226	2 kali	63.226	100,00 %	36,98%	100,00%	36,98%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.03.04.02	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang difasilitasi					13 unit	11.391.607	13 unit	1.563.457	13 unit	2.281.059	13 unit	2.549.838	13 unit	1.671.450	13 unit	1.671.450	100,00 %	14,67%	100,00%	14,67%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan					2 jenis	11.391.607	0 jenis	1.563.457	0 jenis	2.281.059	0 jenis	2.549.838	2 jenis	1.671.450	2 jenis	1.671.450	100,00 %	14,67%	100,00%	14,67%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki					72 unit	11.391.607	39 unit	1.563.457	39 unit	2.281.059	62 unit	2.549.838	72 unit	1.671.450	72 unit	1.671.450	100,00 %	14,67%	100,00%	14,67%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.03.04.05	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional					17 kali	444.584	15 kali	10.800	15 kali	107.963	17 kali	72.450	17 kali	85.978	17 kali	85.978	100,00 %	19,34%	100,00%	19,34%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan					2 kali	444.584	0 kali	10.800	0 kali	107.963	0 kali	72.450	2 kali	85.978	2 kali	85.978	100,00 %	19,34%	100,00%	19,34%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.2	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																								
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			132.287		121.119		131.630		15.431		23.195		60.803		19.789		99.429		75,54%		220.549		83,57%	
			Tersedianya data statistik daerah yang terintegrasi	100%		100%		100%		0%		0%		200%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	2.20.02.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.20.02.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen data statistik daerah yang disusun					1 dokumen	131.630	0 dokumen	15.431	0 dokumen	23.195	1 dokumen	60.803	1 dokumen	19.789	1 dokumen	19.789	100,00 %	15,03%	100,00%	15,03%			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																								
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			18.328.242		16.685.368		5.018.232		305.912		1.470.530		407.809		886.756		2.184.252		43,53%		18.869.620		80,82%	
			Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung pelayanan publik	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.21.02.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.21.02.01.01	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani					100 persen	2.934.589	100 persen	182.880	100 persen	623.355	100 persen	235.344	100 persen	753.919	100 persen	753.919	100,00 %	25,69%	100,00%	25,69%			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.21.02.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Persandian Perkotaan yang dikelola					1389 unit	2.083.643	703 unit	123.032	703 unit	847.175	1187 unit	172.465	1648 unit	132.837	1648 unit	132.837	118,65 %	6,38%	118,65%	6,38%			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																								
Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			4.534.027		2.844.507		2.709.445		19.800		95.680		231.513		1.076.168		346.993		12,81%		3.191.500		44,06%	
			Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	59%		139,36 %		59%		0%		81,53 %		82,53 %		83,33%		83,33%		141,24 %		83,33%		141,24 %		-
	2.22.02.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.22.02.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah					235 kali	2.618.995	4 kali	12.600	4 kali	80.080	15 kali	223.113	250 kali	1.028.468	250 kali	1.028.468	106,38 %	39,27%	106,38%	39,27%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.02.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.22.02.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah pelaksaaan festival budaya lokal					1 kali	90.450	0 kali	7.200	0 kali	15.600	0 kali	8.400	1 kali	47.700	1 kali	47.700	100,00 %	52,74%	100,00%	52,74%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			4.534.027		2.844.507		773.949		149.086		147.424		158.224		158.772		454.734		58,76%		3.299.242		62,16%	
			Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 20 lokasi	100%		157,89 %		100%		0%		20%		35%		45%		45%		128,57 %		45%		128,57 %		-
	2.22.03.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.22.03.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring					7 lokasi	773.949	0 lokasi	149.086	0 lokasi	147.424	7 lokasi	158.224	11 lokasi	158.772	11 lokasi	158.772	157,14 %	20,51%	157,14%	20,51%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah Pelatihan dan pertunjukan seni budaya di destinasi wisata yg difasilitasi					770 kali	773.949	384 kali	149.086	384 kali	147.424	576 kali	158.224	770 kali	158.772	770 kali	158.772	100,00 %	20,51%	100,00%	20,51%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			1.208.206		1.159.350		165.006		9.000		8.400		36.100		22.121		53.500		32,42%		1.212.850		88,32%	
			Persentase cagar budaya yang terpelihara	91,69 %		100,45 %		91,69 %		0%		92,04 %		92,04 %		92,04%		92,04%		100,38 %		92,04%		100,38 %		-
	2.22.04.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.22.04.01.01	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai sejarah					3 kali	165.006	0 kali	9.000	0 kali	8.400	1 kali	36.100	3 kali	22.121	3 kali	22.121	100,00 %	13,41%	100,00%	13,41%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			1.208.206		1.159.350		922.590		178.864		207.289		186.011		144.602		572.164		62,02%		1.731.514		81,26%	
			Persentase cagar budaya yang terpelihara	91,69 %		100,45 %		91,69 %		0%		92,04 %		92,04 %		92,04%		92,04%		100,38 %		92,04%		100,38 %		-
	2.22.05.01	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																								
	2.22.05.01.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian					250 lokasi	922.590	135 lokasi	178.864	135 lokasi	207.289	197 lokasi	186.011	250 lokasi	144.602	250 lokasi	144.602	100,00 %	15,67%	100,00%	15,67%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			8.642.636		6.762.741		700.000		26.935		13.789		115.826		314.410		156.550		22,36%		6.919.291		74,06%	
			Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	76,92 %		113,49 %		76,92 %		0%		80%		86,67 %		86,67%		86,67%		112,67 %		86,67%		112,67 %		-
	2.22.06.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota																								
	2.22.06.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah museum yang dipelihara					6 lokasi	210.849	6 lokasi	26.935	6 lokasi	13.789	6 lokasi	41.014	6 lokasi	74.857	6 lokasi	74.857	100,00 %	35,50%	100,00%	35,50%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.06.01.02	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap museum	Jumlah Pelaksanaan event pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum					4 Kali	367.609	Kali	0	Kali	0	1 Kali	14.550	4 Kali	232.850	4 Kali	232.850	100,00 %	63,34%	100,00%	63,34%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.22.06.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Museum yang disediakan sarana penunjang					1 Lokasi	121.542	Lokasi	0	Lokasi	0	2 Lokasi	60.262	1 Lokasi	6.703	1 Lokasi	6.703	100,00 %	5,52%	100,00%	5,52%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan																								
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%		100%		100%		0%		100%		90,28 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	2.23.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	2.23.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	11.638.015	100%	2.100.385	100%	2.860.534	100%	2.460.816	100%	2.507.340	100%	2.507.340	100,00 %	21,54%	100,00%	21,54%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																								
	2.23.01.02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	288.872	2%	22.756	2%	34.013	68,75%	76.573	100%	80.424	100%	80.424	100,00 %	27,84%	100,00%	27,84%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatkan minat baca masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			738.626		725.609		29.919.755		5.037.159		7.387.165		7.377.480		4.953.515		19.801.805		66,18%		20.527.414		66,96%	
			Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	51,6 %		104,7 %		51,6 %		0%		48,8 %		48,8 %		52,97%		52,97%		102,65 %		52,97%		102,65 %		-
			Persentase peningkatan jumlah kegiatan petugas pengelola layanan baca	10%		101,57 %		10%		0%		8,88 %		8,88 %		10,06%		10,06%		100,59 %		10,06%		100,59 %		-
			Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	10%		153,47 %		10%		0%		-48,07 %		-12,88 %		10,3%		10,3%		103%		10,3%		103 %		-
			Persentase penambahan koleksi buku	100%		97,85 %		100%		0%		88,51 %		88,55 %		88,56%		88,56%		88,56 %		88,56%		88,56 %		-
	2.23.02.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.23.02.01.01	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan					470 lembaga	233.436	118 lembaga	53.650	118 lembaga	54.150	398 lembaga	34.400	470 lembaga	16.800	470 lembaga	16.800	100,00 %	7,20%	100,00%	7,20%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.01.02	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan					30 lembaga	46.288	34 lembaga	8.000	34 lembaga	9.418	34 lembaga	8.400	34 lembaga	16.362	34 lembaga	16.362	113,33 %	35,35%	113,33%	35,35%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.23.02.01.03	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah sarana layanan baca yang disediakan dan dirawat					1494 buku	455.340	1259 buku	38.776	1259 buku	81.116	2192 buku	77.240	2352 buku	61.108	2352 buku	61.108	157,43 %	13,42%	157,43%	13,42%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.01.04	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan baca yang dikelola					1494 lokasi	28.880.445	1494 lokasi	4.885.560	1494 lokasi	7.158.787	1506 lokasi	7.183.808	1494 lokasi	4.807.579	1494 lokasi	4.807.579	100,00 %	16,65%	100,00%	16,65%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.01.05	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan					500 lembaga	263.331	543 lembaga	44.453	543 lembaga	71.844	543 lembaga	63.013	543 lembaga	43.465	543 lembaga	43.465	108,60 %	16,51%	108,60%	16,51%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.23.02.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca					239 kali	40.915	121 kali	6.720	121 kali	11.850	203 kali	10.620	257 kali	8.200	257 kali	8.200	107,53 %	20,04%	107,53%	20,04%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan																								
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			425.746		392.220		2.734.329		394.269		595.701		799.872		482.569		1.789.842		65,46%		2.182.062		69,05%	
			Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang berhasil dibina sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	100%		113,99 %		100%		0%		91,08 %		91,08 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kearsipan	81,5		106,19		81,5		0		93,39		93,39		93,39		93,39		114,59 %		93,39		114,59 %		-
			Persentase arsip sejarah yang didigitalisasi	100%		117,38 %		100%		0%		100%		15350%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	100%		162,17 %		100%		0%		130,43 %		130,43 %		139,88%		139,88%		139,88 %		139,88%		139,88 %		-
	2.24.02.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.24.02.01.01	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan					9 item	338.196	3 item	9.650	3 item	12.393	6 item	185.297	9 item	82.548	9 item	82.548	100,00 %	24,41%	100,00%	24,41%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota																								
	2.24.02.02.01	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan					52 kali	1.963.862	24 kali	333.338	24 kali	471.204	36 kali	490.609	56 kali	329.681	56 kali	329.681	107,69 %	16,79%	107,69%	16,79%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota																								
	2.24.02.03.01	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang mendapatkan pembinaan sistem kearsipan					130 lembaga	288.945	0 lembaga	34.149	0 lembaga	74.989	47 lembaga	94.172	130 lembaga	39.871	130 lembaga	39.871	100,00 %	13,80%	100,00%	13,80%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	2.24.02.03.02	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan					40 kali	143.326	7 kali	17.132	7 kali	37.116	31 kali	29.794	40 kali	30.470	40 kali	30.470	100,00 %	21,26%	100,00%	21,26%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	3	Urusan Pemerintahan Pilihan																								
	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan																								
Meningkatkan ketahanan pangan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			4.500.012		4.210.193		3.239.477		324.965		463.167		459.819		597.256		1.247.951		38,52%		5.458.143		70,52%	
			Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	16%		142,86 %		16%		0%		14,29 %		14,29 %		16,25%		16,25%		101,58 %		16,25%		101,58 %		-
	3.25.03.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																								
	3.25.03.01.01	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan tangkap yang dipelihara dan diadakan					48 unit	3.239.477	0 unit	324.965	0 unit	463.167	0 unit	459.819	48 unit	597.256	48 unit	597.256	100,00 %	18,44%	100,00%	18,44%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Meningkatkan ketahanan pangan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			343.753		305.218		2.315.490		193.468		325.502		253.770		436.962		772.739		33,37%		1.077.957		40,54%	
			Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80%		100%		80%		0%		50%		50%		85,09%		85,09%		136,98 %		85,09%		136,98 %		-
			Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	16%		142,86 %		16%		0%		14,29 %		14,29 %		16,25%		16,25%		101,58 %		16,25%		101,58 %		-
	3.25.04.01	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil																								
	3.25.04.01.01	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pelaksanaan pelatihan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan					15 kali	210.749	9 kali	36.103	9 kali	82.605	9 kali	43.444	15 kali	35.916	15 kali	35.916	100,00 %	17,04%	100,00%	17,04%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.25.04.02	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																								
	3.25.04.02.01	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan budidaya yang dipelihara dan diadakan					553 unit	2.104.741	0 unit	157.365	0 unit	242.897	0 unit	210.325	553 unit	401.047	553 unit	401.047	100,00 %	19,05%	100,00%	19,05%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																								
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			713.913		511.411		5.006.941		547.756		809.726		915.133		788.366		1.741.910		34,79%		2.253.321		39,39%	



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pariwisata	65%		109,69 %		65%		0%		75,57 %		100%		96,7%		96,7%		148,77 %		96,7%		148,77 %		-
			Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	52,27 %		210,83 %		52,27 %		0%		9,04 %		9,19 %		23,39%		27,79%		259,69 %		27,79%		259,69 %		-
			Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	76,92 %		113,49 %		76,92 %		0%		80%		86,67 %		86,67%		86,67%		112,67 %		86,67%		112,67 %		-
	3.26.02.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																								
	3.26.02.01.01	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel					39 kali	639.523	0 kali	23.256	0 kali	33.500	0 kali	40.315	39 kali	69.187	39 kali	69.187	100,00 %	10,82%	100,00%	10,82%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Jumlah penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan dan Balai Pemuda					13 kali	827.278	0 kali	121.163	0 kali	181.948	0 kali	182.947	13 kali	186.137	13 kali	186.137	100,00 %	22,50%	100,00%	22,50%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.02.02	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																								
	3.26.02.02.01	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang					2 lokasi	1.557.781	2 lokasi	149.025	2 lokasi	233.642	2 lokasi	273.124	2 lokasi	154.556	2 lokasi	154.556	100,00 %	9,92%	100,00%	9,92%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang					2 lokasi	1.072.498	2 lokasi	152.269	2 lokasi	191.013	2 lokasi	227.814	2 lokasi	176.375	2 lokasi	176.375	100,00 %	16,45%	100,00%	16,45%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.02.02.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyelenggaraan Event Peningkatan Destinasi Wisata					2 kali	366.050	0 kali	19.921	0 kali	37.566	0 kali	36.266	2 kali	103.559	2 kali	103.559	100,00 %	28,29%	100,00%	28,29%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.02.03	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota																								
	3.26.02.03.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses					292 berkas	313.796	292 berkas	46.234	292 berkas	76.101	292 berkas	90.599	292 berkas	56.705	292 berkas	56.705	100,00 %	18,07%	100,00%	18,07%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses					84 berkas	230.015	60 berkas	35.888	60 berkas	55.956	60 berkas	64.068	60 berkas	41.847	60 berkas	41.847	71,43%	18,19%	71,43%	18,19%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			4.103.488		3.388.987		1.219.766		116.271		227.481		218.540		406.788		562.292		46,10%		3.951.279		74,23%	



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	52,27 %		210,83 %		52,27 %		0%		9,04 %		9,19 %		23,39%		27,79%		259,69 %		27,79%		259,69 %		-
	3.26.03.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																								
	3.26.03.01.01	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti					12 kali	384.096	3 kali	10.800	3 kali	20.100	6 kali	29.150	12 kali	207.974	12 kali	207.974	100,00 %	54,15%	100,00%	54,15%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.03.01.02	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah fasilitasi promosi wisata					93 kali	835.669	1 kali	105.471	1 kali	207.381	66 kali	189.390	93 kali	198.815	93 kali	198.815	100,00 %	23,79%	100,00%	23,79%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			8.642.636		6.762.741		463.693		52.765		95.396		148.971		103.534		297.131		64,08%		7.059.872		77,53%	
			Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran seni kreatif	12%		111,08 %		12%		0%		7,58 %		3,21 %		12,04%		12,04%		100,31 %		12,04%		100,31 %		-
			Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	76,92 %		113,49 %		76,92 %		0%		80%		86,67 %		86,67%		86,67%		112,67 %		86,67%		112,67 %		-
			Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	100%		175%		100%		0%		200%		220%		320%		320%		320%		320%		320 %		-
	3.26.05.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																								
	3.26.05.01.01	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor pariwisata yang dilaksanakan					1 kali	188.635	1 kali	28.806	1 kali	52.930	1 kali	49.764	1 kali	32.383	1 kali	32.383	100,00 %	17,17%	100,00%	17,17%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.05.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi					6 lokasi	158.441	6 lokasi	18.559	6 lokasi	34.065	6 lokasi	44.968	6 lokasi	22.618	6 lokasi	22.618	100,00 %	14,28%	100,00%	14,28%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata					6 kali	158.441	5 kali	18.559	5 kali	34.065	6 kali	44.968	6 kali	22.618	6 kali	22.618	100,00 %	14,28%	100,00%	14,28%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.05.02	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																								
	3.26.05.02.01	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni musik modern di rumah kreatif					300 orang	116.616	0 orang	5.400	0 orang	8.400	180 orang	54.239	300 orang	48.533	300 orang	48.533	100,00 %	41,62%	100,00%	41,62%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																								
Meningkatkan ketahanan pangan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			688.555		604.919		1.357.557		150.678		454.606		363.943		205.216		969.227		71,39%		1.574.146		76,93%	
			Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80%		103,45 %		80%		0%		0%		34,34 %		85,86%		85,86%		107,32 %		85,86%		107,32 %		-
			Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	17%		188,67 %		17%		0%		30,19 %		30,19 %		20,15%		30,19%		177,57 %		30,19%		177,57 %		-
	3.27.02.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian																								
	3.27.02.01.01	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah peserta pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan					216 Orang	868.439	90 Orang	78.654	90 Orang	326.807	216 Orang	246.081	216 Orang	92.794	216 Orang	92.794	100,00 %	10,69%	100,00%	10,69%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
	3.27.02.02.01	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan					5 jenis	489.118	5 jenis	72.025	5 jenis	127.799	5 jenis	117.862	5 jenis	112.422	5 jenis	112.422	100,00 %	22,98%	100,00%	22,98%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Meningkatkan ketahanan pangan	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			1.039.939		967.947		876.966		144.356		272.624		178.627		182.935		595.608		67,92%		1.563.554		81,57%	
			Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	88,5 %		101,57 %		88,5 %		0%		75,46 %		83,47 %		88,51%		88,51%		100,01 %		88,51%		100,01 %		-
			Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80%		103,45 %		80%		0%		0%		34,34 %		85,86%		85,86%		107,32 %		85,86%		107,32 %		-
	3.27.04.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
	3.27.04.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan serta Zoonosis					1408 kali	741.004	653 kali	111.354	653 kali	202.124	1133 kali	169.477	1412 kali	163.399	1412 kali	163.399	100,28 %	22,05%	100,28%	22,05%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.02	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner																								
	3.27.04.02.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan					4 kali	135.961	4 kali	33.002	4 kali	70.501	4 kali	9.150	4 kali	19.536	4 kali	19.536	100,00 %	14,37%	100,00%	14,37%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			222.140		205.510		37.123		8.905		8.400		8.400		8.400		25.705		69,24%		231.215		89,18%	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pertanian	80%		128,21 %		80%		0%		100%		100%		98,89%		98,89%		123,61 %		98,89%		123,61 %		-
	3.27.06.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
	3.27.06.01.01	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diproses					220 berkas	37.123	84 berkas	8.905	84 berkas	8.400	110 berkas	8.400	290 berkas	8.400	290 berkas	8.400	131,82 %	22,63%	131,82%	22,63%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Meningkatkan ketahanan pangan	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			5.149.959		4.881.481		2.052.173		213.146		758.998		642.290		232.173		1.614.435		78,67%		6.495.916		90,19%	
			Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80%		102,15 %		80%		0%		66,4 %		83,53 %		83,53%		83,53%		104,42 %		83,53%		104,42 %		-
			Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	17%		188,67 %		17%		0%		30,19 %		30,19 %		20,15%		30,19%		177,57 %		30,19%		177,57 %		-
	3.27.07.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian																								
	3.27.07.01.01	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah peserta pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Budidaya Pangan dan Hortikultura					200 orang	284.252	100 orang	32.629	100 orang	117.142	200 orang	62.328	200 orang	41.133	200 orang	41.133	100,00 %	14,47%	100,00%	14,47%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.07.01.02	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah peserta pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian					125 orang	652.432	25 orang	108.494	25 orang	141.324	75 orang	197.369	125 orang	104.227	125 orang	104.227	100,00 %	15,98%	100,00%	15,98%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.07.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah jenis sarana dan prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disediakan dan dipelihara					5 jenis	1.115.488	3 jenis	72.024	3 jenis	500.533	5 jenis	382.593	5 jenis	86.813	5 jenis	86.813	100,00 %	7,78%	100,00%	7,78%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																								
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,98 %		100%		0%		99,27 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	3.30.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	3.30.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	18.643.238	100%	3.336.736	100%	4.872.656	100%	4.069.022	100%	3.993.345	100%	3.993.345	100,00 %	21,42%	100,00%	21,42%			Dinas Perdaanqan



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	3.30.01.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	3.30.01.02.01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	434.392	2%	43.343	2%	115.502	73,68%	114.265	100%	53.259	100%	53.259	100,00 %	12,26%	100,00%	12,26%			Dinas Perdagangan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			1.603.379		1.550.636		1.289.998		241.668		325.938		310.966		235.200		878.572		68,11%		2.429.208		83,96%	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perdagangan	80%		119,76 %		80%		0%		98,42 %		97,9 %		97,92%		97,92%		122,4 %		97,92%		122,4 %		-
	3.30.02.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan																								
	3.30.02.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan					340 Berkas	361.771	192 Berkas	76.389	192 Berkas	98.901	284 Berkas	79.552	365 Berkas	66.527	365 Berkas	66.527	107,35 %	18,39%	107,35%	18,39%			Dinas Perdagangan
	3.30.02.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang																								
	3.30.02.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya					1200 Lembaga	337.893	622 Lembaga	59.408	622 Lembaga	76.436	976 Lembaga	83.131	1227 Lembaga	65.824	1227 Lembaga	65.824	102,25 %	19,48%	102,25%	19,48%			Dinas Perdagangan
	3.30.02.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri																								
	3.30.02.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan					55 Berkas	88.299	26 Berkas	15.164	26 Berkas	21.747	41 Berkas	21.726	55 Berkas	14.355	55 Berkas	14.355	100,00 %	16,26%	100,00%	16,26%			Dinas Perdagangan
	3.30.02.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri																								
	3.30.02.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan					5 Berkas	88.299	2 Berkas	15.229	2 Berkas	21.876	4 Berkas	21.887	5 Berkas	14.581	5 Berkas	14.581	100,00 %	16,51%	100,00%	16,51%			Dinas Perdagangan
	3.30.02.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat																								
	3.30.02.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya					352 Lembaga	413.736	180 Lembaga	75.479	180 Lembaga	106.978	283 Lembaga	104.670	370 Lembaga	73.913	370 Lembaga	73.913	105,11 %	17,86%	105,11%	17,86%			Dinas Perdagangan



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			2.232.231		2.115.157		764.859		136.822		188.381		182.759		129.599		507.962		66,41%		2.623.119		87,52%	
			Frekuensi fasilitasi pelaku distribusi perdagangan	17 kali		117,65 kali		17 kali		0 kali		16 kali		19 kali		19kali		19kali		111,76 %		19kali		111,76 %		-
	3.30.03.01	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya																								
	3.30.03.01.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pelaku Distribusi Perdagangan yang dibina					31 Kelompok	764.859	31 Kelompok	136.822	31 Kelompok	188.381	31 Kelompok	182.759	31 Kelompok	129.599	31 Kelompok	129.599	100,00 %	16,94%	100,00%	16,94%			Dinas Perdagangan
			Jumlah gudang yang dimonitor					300 Lokasi	764.859	312 Lokasi	136.822	312 Lokasi	188.381	359 Lokasi	182.759	385 Lokasi	129.599	385 Lokasi	129.599	128,33 %	16,94%	128,33%	16,94%			Dinas Perdagangan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			5.754.737		5.588.768		739.154		152.495		184.331		172.387		138.779		797.228		107,86 %		6.385.996		98,34%	
			Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75%		104,31 %		75%		0%		75,1 %		78,03 %		100%		100%		133,33 %		100%		133,33 %		-
			Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	31 kali per kejadian		145,16 kali per kejadian		31 kali per kejadian		0 kali per kejadian		47,33 kali per kejadian		47,33 kali per kejadian		54,8kali per kejadian		54,8kali per kejadian		176,77 %		54,8kali per kejadian		176,77 %		-
			Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	85%		104,38 %		85%		0%		76,98 %		82,91 %		94,18%		94,18%		110,8 %		94,18%		110,8 %		-
	3.30.04.01	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																								
	3.30.04.01.01	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan					205 Kali	393.786	145 Kali	80.902	145 Kali	105.470	175 Kali	95.658	274 Kali	64.815	274 Kali	64.815	133,66 %	16,46%	133,66%	16,46%			Dinas Perdagangan
	3.30.04.01.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan					12 Kali	339.329	6 Kali	65.609	6 Kali	78.861	9 Kali	76.729	12 Kali	73.964	12 Kali	73.964	100,00 %	21,80%	100,00%	21,80%			Dinas Perdagangan
	3.30.04.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	3.30.04.02.01	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau					1 kali	6.039	1 kali	5.985	1 kali	0	1 kali	0	1 kali	0	1 kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			2.193.821		1.955.744		1.291.172		188.513		354.528		320.331		220.856		863.371		66,87%		2.819.115		80,89%	
			Persentase temuan yang ditindaklanjuti	90%		117,65 %		90%		0%		100%		100%		100%		100%		111,11 %		100%		111,11 %		-
	3.30.06.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan																								
	3.30.06.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang dilayani					24570 Unit	1.142.665	12439 Unit	164.120	12439 Unit	318.453	19587 Unit	281.601	25164 Unit	195.742	25164 Unit	195.742	102,42 %	17,13%	102,42%	17,13%			Dinas Perdagangan
			Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan					16 Jenis	1.142.665	16 Jenis	164.120	16 Jenis	318.453	16 Jenis	281.601	16 Jenis	195.742	16 Jenis	195.742	100,00 %	17,13%	100,00%	17,13%			Dinas Perdagangan
	3.30.06.01.03	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah alat UTTP yang diawasi					4500 Unit	148.507	2347 Unit	24.393	2347 Unit	36.075	3740 Unit	38.729	4685 Unit	25.113	4685 Unit	25.113	104,11 %	16,91%	104,11%	16,91%			Dinas Perdagangan
Mendorong pematapan daya saing usaha mikro dan koperasi	3.30.07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			318.121		256.674		6.402.852		937.808		1.703.382		1.608.567		1.167.711		7.007.720		109,45 %		7.264.394		108,09 %	
			Persentase usaha mikro binaan yang mendapatkan fasilitasi pemasaran produk	100%		111,11 %		100%		0%		88,36 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	67,6 %		169,59 %		67,6 %		0%		28,4 %		84,79 %		84,79%		84,79%		125,43 %		84,79%		125,43 %		-
	3.30.07.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																								
	3.30.07.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi pemasaran produk pertanian yang dilaksanakan					41 kali	236.290	6 kali	55.835	6 kali	53.085	20 kali	52.785	41 kali	37.516	41 kali	37.516	100,00 %	15,88%	100,00%	15,88%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.30.07.02	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																								
	3.30.07.02.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sentra dan Stand Usaha Mikro yang dikelola					15 Lokasi	3.919.791	15 Lokasi	651.189	15 Lokasi	995.258	15 Lokasi	949.810	15 Lokasi	650.384	15 Lokasi	650.384	100,00 %	16,59%	100,00%	16,59%			Dinas Perdagangan
	3.30.07.02.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UKM Yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro					820 orang	2.246.771	670 orang	230.784	670 orang	655.040	844 orang	605.972	1439 orang	479.811	1439 orang	479.811	175,49 %	21,36%	175,49%	21,36%			Dinas Perdagangan
	4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																								
	4.01	Sekretariat Daerah																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Persentase instansi yang memiliki POS sesuai probis	100%		134,61 %		100%		0%		0%		84,62 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase instansi yang probisnya telah menggambarkan keterhubungan antar proses	100%		125,71 %		100%		0%		0%		0%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase kinerja unit penyelenggara pelayanan yang minimal mutu pelayanannya kategori baik	70%		137,8 %		70%		0%		0%		0%		99,61%		99,61%		142,3 %		99,61%		142,3 %		-
			Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	85%		106,04 %		85%		0%		90,47 %		90,31 %		90,97%		90,97%		107,02 %		90,97%		107,02 %		-
			Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	90%		105,18 %		90%		0%		92,56 %		92,56 %		92,56%		92,56%		102,85 %		92,56%		102,85 %		-
			Persentase pemanfaatan aset	97%		104,17 %		97%		0%		100%		99,24 %		99,27%		99,27%		102,34 %		99,27%		102,34 %		-
			Persentase instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal BB	100%		114,76 %		100%		0%		97,26 %		97,22 %		97,22%		97,22%		97,22 %		97,22%		97,22 %		-
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%		100%		100%		0%		100%		93,18 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%		100%		100%		0%		100%		90,28 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,98 %		100%		0%		99,27 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	4.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
	4.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					12 dokumen	19.588	5 dokumen	2.600	5 dokumen	12.727	10 dokumen	2.600	12 dokumen	0	12 dokumen	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Bagian Umum Dan Protokol
	4.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	17.230.490	100%	3.098.096	100%	4.407.367	100%	3.579.971	100%	3.564.853	100%	3.564.853	100,00 %	20,69%	100,00%	20,69%			Kec. Rungkut
	4.01.01.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.03.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	17.771.643	100%	3.128.859	100%	4.432.587	100%	3.632.383	100%	3.610.998	100%	3.610.998	100,00 %	20,32%	100,00%	20,32%			Kec. Sukolilo
	4.01.01.04	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	4.01.01.04.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	10.549.939	100%	1.963.040	100%	2.752.832	100%	2.468.954	100%	2.330.659	100%	2.330.659	100,00 %	22,09%	100,00%	22,09%			Bagian Hukum
	4.01.01.05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.05.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	16.661.068	100%	2.954.891	100%	4.215.282	100%	3.490.127	100%	3.649.506	100%	3.649.506	100,00 %	21,90%	100,00%	21,90%			Kec. Tandes
	4.01.01.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.06.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	14.715.792	100%	2.656.873	100%	3.723.811	100%	3.119.039	100%	3.164.965	100%	3.164.965	100,00 %	21,51%	100,00%	21,51%			Kec. Krembangan
	4.01.01.07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.07.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	13.618.849	100%	2.434.315	100%	3.525.801	100%	2.973.095	100%	2.979.443	100%	2.979.443	100,00 %	21,88%	100,00%	21,88%			Kec. Pakal
	4.01.01.08	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.08.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	12.235.053	100%	2.115.088	100%	3.024.536	100%	2.560.216	100%	2.727.621	100%	2.727.621	100,00 %	22,29%	100,00%	22,29%			Kec. Simokerto
	4.01.01.09	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.09.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	10.766.956	100%	1.885.201	100%	2.694.778	238,10%	2.321.174	100%	2.653.594	100%	2.653.594	100,00 %	24,65%	100,00%	24,65%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
	4.01.01.10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.10.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	4.605.089	100%	855.024	100%	1.197.532	100%	992.434	100%	935.702	100%	935.702	100,00 %	20,32%	100,00%	20,32%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	13.007.309	100%	2.278.296	100%	3.294.055	100%	2.850.478	100%	2.885.401	100%	2.885.401	100,00 %	22,18%	100,00%	22,18%			Kec. Gunung Anyar
	4.01.01.12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.12.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	33.935.748	100%	6.095.471	100%	8.923.872	100%	7.563.541	100%	7.474.648	100%	7.474.648	100,00 %	22,03%	100,00%	22,03%			Dinas Pemadam Kebakaran
	4.01.01.13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.13.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	4.875.028	100%	893.647	100%	1.247.288	100%	1.087.673	100%	939.226	100%	939.226	100,00 %	19,27%	100,00%	19,27%			Bagian Administrasi Kerjasama
	4.01.01.14	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.14.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	9.585.297	100%	1.719.939	100%	2.483.768	100%	2.332.274	100%	2.182.400	100%	2.182.400	100,00 %	22,77%	100,00%	22,77%			Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.15	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	4.01.01.15.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	4.471.892	100%	721.763	100%	1.087.178	100%	948.060	100%	1.108.876	100%	1.108.876	100,00 %	24,80%				Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	
	4.01.01.16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.16.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	26.311.576	100%	4.856.677	100%	6.932.938	100%	5.850.005	100%	5.585.058	100%	5.585.058	100,00 %	21,23%	100,00%	21,23%			Satuan Polisi Pamong Praja
	4.01.01.17	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.17.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	17.041.778	100%	3.097.793	100%	4.371.755	100%	3.661.491	100%	3.597.434	100%	3.597.434	100,00 %	21,11%	100,00%	21,11%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	4.01.01.18	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.18.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	4.892.860	100%	895.458	100%	1.268.750	100%	1.051.294	100%	953.877	100%	953.877	100,00 %	19,50%	100,00%	19,50%			Bagian Hubungan Masyarakat
	4.01.01.19	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.19.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	10.927.208	100%	2.069.775	100%	2.820.283	100%	2.355.072	100%	2.036.919	100%	2.036.919	100,00 %	18,64%	100,00%	18,64%			Dinas Tenaga Kerja
	4.01.01.20	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.20.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	90.928.322	100%	21.904.159	100%	16.208.877	54,05%	27.786.647	100%	21.210.420	100%	21.210.420	100,00 %	23,33%	100,00%	23,33%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	4.01.01.21	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.21.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	13.716.336	100%	2.487.004	100%	3.518.907	100%	2.939.489	100%	2.963.358	100%	2.963.358	100,00 %	21,60%	100,00%	21,60%			Kec. Karangpilang
	4.01.01.22	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.22.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	3.563.420	100%	698.773	100%	905.737	100%	784.485	100%	758.281	100%	758.281	100,00 %	21,28%	100,00%	21,28%			Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
	4.01.01.23	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.23.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	13.666.501	100%	2.318.614	100%	3.376.601	100%	2.828.032	100%	2.874.596	100%	2.874.596	100,00 %	21,03%	100,00%	21,03%			Kec. Kenjeran
	4.01.01.24	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.01.01.24.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	26.849.041	100%	5.437.741	100%	6.835.977	100%	6.158.780	100%	6.058.929	100%	6.058.929	100,00 %	22,57%	100,00%	22,57%			Bagian Umum Dan Protokol
	4.01.01.25	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	4.01.01.25.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	5.022.615	100%	905.988	100%	1.298.106	100%	1.163.995	100%	1.122.672	100%	1.122.672	100,00 %	22,35%	100,00%	22,35%			Bagian Organisasi
	4.01.01.26	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																								
	4.01.01.26.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan					776 stel	300.360	14 stel	25.420	14 stel	8.400	545 stel	122.415	598 stel	65.600	598 stel	65.600	77,06%	21,84%	77,06%	21,84%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
	4.01.01.27	Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
	4.01.01.27.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	169.292	2%	26.153	2%	35.841	94,44%	37.227	100%	27.113	100%	27.113	100,00 %	16,02%	100,00%	16,02%			Bagian Organisasi
	4.01.01.28	Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
	4.01.01.28.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	489.236	4%	103.034	4%	145.379	94,12%	145.111	100%	56.088	100%	56.088	100,00 %	11,46%	100,00%	11,46%			Bagian Hukum
	4.01.01.29	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																								
	4.01.01.29.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana kedinasan yang diadakan					1370 unit	22.120.528	202 unit	5.400	202 unit	801.891	1769 unit	2.719.330	1832 unit	151.290	1832 unit	151.290	133,72 %	0,68%	133,72%	0,68%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
	4.01.01.29.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1.051.270	1%	27.803	1%	169.797	21,43%	417.923	100%	43.403	100%	43.403	100,00 %	4,13%	100,00%	4,13%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
	4.01.01.30	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.30.01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	229.414	4%	47.496	4%	58.901	89,47%	45.015	100%	29.622	100%	29.622	100,00 %	12,91%	100,00%	12,91%			Bagian Hubungan Masyarakat
	4.01.01.31	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.31.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	173.314	3%	53.289	3%	47.262	100%	41.925	100%	25.898	100%	25.898	100,00 %	14,94%	100,00%	14,94%			Badan Kepegawaian dan Disiplin
	4.01.01.32	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.32.01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	214.573	2%	34.435	2%	45.536	100%	48.253	100%	37.149	100%	37.149	100,00 %	17,31%	100,00%	17,31%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	4.01.01.33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.33.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	138.516	2%	24.492	2%	26.067	111,11%	24.076	100%	17.277	100%	17.277	100,00 %	12,47%	100,00%	12,47%			Kec. Gubeng



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	4.01.01.34	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.34.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	109.033	2%	22.555	2%	21.700	69,23%	23.802	100%	14.647	100%	14.647	100,00 %	13,43%	100,00%	13,43%				Kec. Krembangan	
	4.01.01.35	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.35.01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	36.457	1%	5.689	1%	5.100	70%	4.479	100%	4.020	100%	4.020	100,00 %	11,03%	100,00%	11,03%				Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.01.36	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.36.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	56.711	1%	12.402	1%	12.363	75%	11.311	100%	7.564	100%	7.564	100,00 %	13,34%	100,00%	13,34%				Kec. Rungkut	
	4.01.01.37	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.37.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	33.023	3%	6.498	3%	9.263	108,33%	8.040	100%	4.537	100%	4.537	100,00 %	13,74%	100,00%	13,74%				Bagian Administrasi Kerjasama	
	4.01.01.38	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.38.01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	203.008	2%	36.970	2%	41.541	100%	35.548	100%	24.883	100%	24.883	100,00 %	12,26%	100,00%	12,26%				Dinas Tenaga Kerja	
	4.01.01.39	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.39.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	79.421	2%	21.356	2%	21.845	75%	19.284	100%	7.851	100%	7.851	100,00 %	9,89%	100,00%	9,89%				Kec. Dukuh Pakis	
	4.01.01.40	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.40.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	96.708	2%	18.893	2%	19.713	50%	19.323	100%	11.762	100%	11.762	100,00 %	12,16%	100,00%	12,16%				Kec. Simokerto	
	4.01.01.41	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.41.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya			2897 unit	6.314.761	1147 unit	435.131	1147 unit	1.223.783	2024 unit	1.599.687	2426 unit	1.073.540	2426 unit	1.073.540	83,74%	17,00%	83,74%	17,00%				Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	4.01.01.42	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.42.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	41.457	2%	5.956	2%	8.724	76,47%	8.597	100%	5.600	100%	5.600	100,00 %	13,51%	100,00%	13,51%			Bagian Organisasi
	4.01.01.43	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.43.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	95.958	2%	18.268	2%	18.322	107,69%	18.243	100%	12.847	100%	12.847	100,00 %	13,39%	100,00%	13,39%			Kec. Tandes
	4.01.01.44	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.44.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	103.000	1%	24.385	1%	23.289	225%	24.074	100%	15.675	100%	15.675	100,00 %	15,22%	100,00%	15,22%			Kec. Sukolilo
	4.01.01.45	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.45.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	105.070	2%	25.267	2%	25.590	112,50%	25.894	100%	25.188	100%	25.188	100,00 %	23,97%	100,00%	23,97%			Bagian Hukum
	4.01.01.46	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.46.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1.382.566	2%	36.611	2%	174.426	83,33%	687.979	100%	285.361	100%	285.361	100,00 %	20,64%	100,00%	20,64%			Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.47	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.47.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1.442.123	2%	266.250	2%	271.373	70,59%	265.191	100%	182.240	100%	182.240	100,00 %	12,64%	100,00%	12,64%			Satuan Polisi Pamong Praja
	4.01.01.48	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.48.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	51.527	2%	6.130	2%	6.004	92,31%	9.351	100%	11.120	100%	11.120	100,00 %	21,58%	100,00%	21,58%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
	4.01.01.49	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	4.01.01.49.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	74.320	2%	13.445	2%	13.170	100%	13.289	100%	8.396	100%	8.396	100,00 %	11,30%	100,00%	11,30%			Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
	4.01.01.50	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.50.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Kelayakan dan Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran					100%	2.247.095	3%	565.750	3%	743.028	2,33%	340.465	100%	181.874	100%	181.874	100,00 %	8,09%	100,00%	8,09%			Bagian Umum Dan Protokol
	4.01.01.51	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	4.01.01.51.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	66.385	1%	8.684	1%	9.172	53,85%	8.882	100%	5.105	100%	5.105	100,00 %	7,69%	100,00%	7,69%			Kec. Tenggilis Mejoyo
	4.01.01.52	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																								
	4.01.01.52.01	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan dana penunjang operasional			2 Orang	8.072.880	2 Orang	0	2 Orang	0	2 Orang	0	2 Orang	0	2 Orang	0	2 Orang	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Bagian Umum Dan Protokol
	4.01.01.52.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan gaji dan/atau tunjangan			2 Orang	397.676	2 Orang	0	2 Orang	0	2 Orang	0	2 Orang	0	2 Orang	0	2 Orang	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Bagian Umum Dan Protokol
	4.01.01.53	Penataan Organisasi																								
	4.01.01.53.01	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan monitoring			254 lembaga	368.231	0 lembaga	45.078	0 lembaga	94.145	0 lembaga	91.095	254 lembaga	51.363	254 lembaga	51.363	100,00 %	13,95%	100,00%	13,95%					Bagian Organisasi
			Jumlah unit layanan publik yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat			254 lembaga	368.231	0 lembaga	45.078	0 lembaga	94.145	0 lembaga	91.095	254 lembaga	51.363	254 lembaga	51.363	100,00 %	13,95%	100,00%	13,95%					Bagian Organisasi
	4.01.01.53.03	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta standar kompetensi yang disusun			1 dokumen	549.800	0 dokumen	42.520	0 dokumen	165.330	0 dokumen	127.226	1 dokumen	115.243	1 dokumen	115.243	100,00 %	20,96%	100,00%	20,96%					Bagian Organisasi
			Jumlah dokumen pelaksanaan analisis kelembagaan yang disusun			1 dokumen	549.800	0 dokumen	42.520	0 dokumen	165.330	0 dokumen	127.226	1 dokumen	115.243	1 dokumen	115.243	100,00 %	20,96%	100,00%	20,96%					Bagian Organisasi
	4.01.01.53.05	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen pendampingan penyusunan laporan kinerja dan monitoring implementasi reformasi birokrasi yang disusun			2 dokumen	830.805	1 dokumen	112.185	1 dokumen	171.981	1 dokumen	170.178	2 dokumen	167.214	2 dokumen	167.214	100,00 %	20,13%	100,00%	20,13%					Bagian Organisasi
			Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi			155 POS	830.805	0 POS	112.185	0 POS	171.981	141 POS	170.178	246 POS	167.214	246 POS	167.214	158,71 %	20,13%	158,71%	20,13%					Bagian Organisasi
	4.01.01.54	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan																								
	4.01.01.54.01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			100%	9.238.412	100%	922.385	100%	1.982.034	100%	1.838.643	100%	1.598.874	100%	1.598.874	100,00 %	17,31%	100,00%	17,31%					Bagian Umum Dan Protokol
	4.01.01.55	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan																								

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	4.01.01.55.01	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi, Data dan Informasi disusun					7 dokumen	209.767	5 dokumen	27.796	5 dokumen	95.494	5 dokumen	36.649	8 dokumen	34.435	8 dokumen	34.435	114,29 %	16,42%	114,29%	16,42%			Bagian Hubungan Masyarakat
Meningkatkan kesejahteraan PMKS	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			5.138.311		4.344.036		36.816.543		2.054.211		3.622.755		4.510.499		2.729.111		11.327.436		30,77%		15.671.472		37,35%	
			Persentase sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	100%		100,18 %		100%		0%		61,88 %		61,72 %		65,9%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase data kesejahteraan sosial yang dimanfaatkan	100%		89,3 %		100%		0%		108,54 %		108,93 %		109,15%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	100%		104,64 %		100%		0%		98,38 %		104,63 %		105,13%		105,13%		105,13 %		105,13%		105,13 %		-
			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	64,52 %		99,99 %		64,52 %		0%		35,48 %		41,94 %		51,61%		51,61%		80%		51,61%		80%		-
			Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	60%		166,67 %		60%		0%		100%		100%		100%		100%		166,67 %		100%		166,67 %		-
			Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%		100%		100%		0%		110,26 %		103,77 %		103,01%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%		100%		100%		0%		0%		0%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	100%		102,12 %		100%		0%		94,38 %		95,79 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	100%		101,59 %		100%		0%		77,78 %		88,89 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase MoU kerjasama yang dievaluasi	100%		194,96 %		100%		0%		142,86 %		148,57 %		151,43%		151,43%		151,43 %		151,43%		151,43 %		-
	4.01.02.01	Administrasi Tata Pemerintahan																								
	4.01.02.01.01	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan					16 kali	22.364.698	16 kali	153.428	16 kali	214.490	16 kali	422.168	16 kali	406.709	16 kali	406.709	100,00 %	1,82%	100,00%	1,82%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
			Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					2 Dokumen	22.364.698	1 Dokumen	153.428	1 Dokumen	214.490	1 Dokumen	422.168	2 Dokumen	406.709	2 Dokumen	406.709	100,00 %	1,82%	100,00%	1,82%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	4.01.02.01.03	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti pembinaan administrasi umum pemerintahan					185 lembaga	1.200.890	185 lembaga	137.971	185 lembaga	216.381	185 lembaga	127.210	185 lembaga	236.892	185 lembaga	236.892	100,00 %	19,73%	100,00%	19,73%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
			Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan					1 kali	1.200.890	1 kali	137.971	1 kali	216.381	1 kali	127.210	1 kali	236.892	1 kali	236.892	100,00 %	19,73%	100,00%	19,73%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
	4.01.02.01.05	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan					1 dokumen	1.452.024	0 dokumen	196.617	0 dokumen	261.620	0 dokumen	312.769	1 dokumen	357.738	1 dokumen	357.738	100,00 %	24,64%	100,00%	24,64%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
			Jumlah objek rupabumi yang berpotensi diajukan pembakuan					115 Objek	1.452.024	0 Objek	196.617	0 Objek	261.620	0 Objek	312.769	124 Objek	357.738	124 Objek	357.738	107,83 %	24,64%	107,83%	24,64%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
			Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan Kota Surabaya					420 kali	1.452.024	383 kali	196.617	383 kali	261.620	429 kali	312.769	510 kali	357.738	510 kali	357.738	121,43 %	24,64%	121,43%	24,64%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
	4.01.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																								
	4.01.02.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat yang disusun					1 Dokumen	155.998	0 Dokumen	29.250	0 Dokumen	42.450	1 Dokumen	70.212	1 Dokumen	9.050	1 Dokumen	9.050	100,00 %	5,80%	100,00%	5,80%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi bidang ketahanan masyarakat yang disusun					1 Dokumen	231.190	0 Dokumen	30.000	0 Dokumen	69.031	1 Dokumen	57.100	1 Dokumen	62.212	1 Dokumen	62.212	100,00 %	26,91%	100,00%	26,91%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat yang disusun					2 Dokumen	275.908	0 Dokumen	49.600	0 Dokumen	49.376	0 Dokumen	76.823	2 Dokumen	61.185	2 Dokumen	61.185	100,00 %	22,18%	100,00%	22,18%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.03	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																								
	4.01.02.03.01	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi					12 kali	869.561	6 kali	138.323	6 kali	203.597	9 kali	192.926	12 kali	162.144	12 kali	162.144	100,00 %	18,65%	100,00%	18,65%			Dinas Sosial
			Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi					12 kali	579.589	6 kali	95.230	6 kali	132.993	9 kali	147.623	12 kali	112.059	12 kali	112.059	100,00 %	19,33%	100,00%	19,33%			Dinas Sosial
	4.01.02.03.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi					4 kali	670.204	2 kali	90.737	2 kali	168.428	3 kali	175.903	4 kali	106.331	4 kali	106.331	100,00 %	15,87%	100,00%	15,87%			Dinas Sosial



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	4.01.02.04.01	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani					65 permasalahan hukum	2.292.195	27 permasalahan hukum	372.947	27 permasalahan hukum	879.241	45 permasalahan hukum	242.820	65 permasalahan hukum	370.969	65 permasalahan hukum	370.969	100,00 %	16,18%	100,00%	16,18%			Bagian Hukum
	4.01.02.04.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum daerah					12 dokumen	2.821.913	6 dokumen	327.287	6 dokumen	771.199	9 dokumen	664.915	12 dokumen	432.054	12 dokumen	432.054	100,00 %	15,31%	100,00%	15,31%			Bagian Hukum
			Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun					70 rancangan produk hukum	2.821.913	43 rancangan produk hukum	327.287	43 rancangan produk hukum	771.199	110 rancangan produk hukum	664.915	137 rancangan produk hukum	432.054	137 rancangan produk hukum	432.054	195,71 %	15,31%	195,71%	15,31%			Bagian Hukum
	4.01.02.04.04	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasi					70 produk hukum	1.374.499	43 produk hukum	171.290	43 produk hukum	332.020	110 produk hukum	338.870	137 produk hukum	285.568	137 produk hukum	285.568	195,71 %	20,78%	195,71%	20,78%			Bagian Hukum
	4.01.02.05	Fasilitasi Kerjasama Daerah																								
	4.01.02.05.01	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi					35 lembaga	521.200	18 lembaga	61.600	18 lembaga	135.200	22 lembaga	185.000	37 lembaga	64.400	37 lembaga	64.400	105,71 %	12,36%	105,71%	12,36%			Bagian Administrasi Kerjasama
	4.01.02.05.02	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah mitra kerjasama dalam negeri yang difasilitasi					20 lembaga	155.189	13 lembaga	59.900	13 lembaga	32.419	20 lembaga	31.800	26 lembaga	17.300	26 lembaga	17.300	130,00 %	11,15%	130,00%	11,15%			Bagian Administrasi Kerjasama
	4.01.02.05.03	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi					88 orang	1.851.483	0 orang	140.031	0 orang	114.309	150 orang	1.464.359	150 orang	44.500	150 orang	44.500	170,45 %	2,40%	170,45%	2,40%			Bagian Administrasi Kerjasama
			Jumlah mitra kerjasama luar negeri yang difasilitasi					10 lembaga	1.851.483	16 lembaga	140.031	16 lembaga	114.309	18 lembaga	1.464.359	19 lembaga	44.500	19 lembaga	44.500	190,00 %	2,40%	190,00%	2,40%			Bagian Administrasi Kerjasama
Meningkatkan kualitas udara dan air	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			540.697.761		455.577.059		386.974.495		56.285.424		75.799.102		83.531.252		57.922.369		13.703.644.452		3.541,23%		14.159.221.512		1.526,32%	
			Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan di gedung milik pemerintah kota	49 unit		164,44 unit		49 unit		0 unit		74 unit		37 unit		77unit		77unit		157,14 %		77unit		157,14 %		-
			Persentase BUMD yang berhasil dibina	78%		149,25 %		78%		0%		100%		100%		100%		100%		128,21 %		100%		128,21 %		-
			Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	94,5 %		88,35 %		94,5 %		0%		2,69 %		57,37 %		78,79%		78,79%		94,36 %		78,79%		94,36 %		-
			Persentase pemanfaatan aset	97%		104,17 %		97%		0%		100%		99,24 %		99,27%		99,27%		102,34 %		99,27%		102,34 %		-
			Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%		100%		100%		0%		100%		90,28 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	4.01.03.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																								

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	4.01.03.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi					9 BUMD	1.687.010	0 BUMD	159.850	0 BUMD	454.000	0 BUMD	188.450	9 BUMD	266.000	9 BUMD	266.000	100,00 %	15,77%	100,00%	15,77%			Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
	4.01.03.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah pelaksanaan operasi pasar dalam rangka pengawasan rokok dan pita cukai ilegal					6 kali	1.221.073	kali	87.400	kali	129.600	kali	127.000	5 kali	109.550	5 kali	109.550	83,33%	8,97%	83,33%	8,97%			Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
			Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah					12 laporan	1.221.073	6 laporan	87.400	6 laporan	129.600	9 laporan	127.000	12 laporan	109.550	12 laporan	109.550	100,00 %	8,97%	100,00%	8,97%			Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
	4.01.03.01.04	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro					4 dokumen	299.208	1 dokumen	57.000	1 dokumen	42.000	3 dokumen	79.907	4 dokumen	36.200	4 dokumen	36.200	100,00 %	12,10%	100,00%	12,10%			Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
	4.01.03.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan																								
	4.01.03.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun					6 dokumen	3.785.680	3 dokumen	595.022	3 dokumen	963.690	3 dokumen	897.159	6 dokumen	675.574	6 dokumen	675.574	100,00 %	17,85%	100,00%	17,85%			Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.03.02.02	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun					16 dokumen	2.264.517	6 dokumen	253.400	6 dokumen	649.259	8 dokumen	527.860	16 dokumen	423.700	16 dokumen	423.700	100,00 %	18,71%	100,00%	18,71%			Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.03.02.03	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara					6 sistem	3.851.861	6 sistem	518.171	6 sistem	943.827	6 sistem	980.169	6 sistem	835.018	6 sistem	835.018	100,00 %	21,68%	100,00%	21,68%			Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya					72 lembaga	3.851.861	72 lembaga	518.171	72 lembaga	943.827	72 lembaga	980.169	72 lembaga	835.018	72 lembaga	835.018	100,00 %	21,68%	100,00%	21,68%			Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.03.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	6.240.337	4%	1.205.975	4%	1.611.785	103,57%	1.260.435	100%	943.011	100%	943.011	100,00 %	15,11%	100,00%	15,11%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	4.01.03.04	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.04.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	543.435	4%	84.692	4%	108.158	94,44%	111.928	100%	85.859	100%	85.859	100,00 %	15,80%	100,00%	15,80%			Kec. Karangpilang
	4.01.03.05	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.05.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	991.595	4%	158.227	4%	251.660	100%	204.857	100%	156.490	100%	156.490	100,00 %	15,78%	100,00%	15,78%			Kec. Wonokromo
	4.01.03.06	Pengelolaan Pengadaan Barana dan Jasa																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	4.01.03.06.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	682.751	4%	132.771	4%	158.513	93,75%	147.932	100%	101.862	100%	101.862	100,00 %	14,92%	100,00%	14,92%			Kec. Dukuh Pakis
	4.01.03.07	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.07.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.872.593	4%	171.468	4%	209.358	91,67%	186.580	100%	166.005	100%	166.005	100,00 %	8,86%	100,00%	8,86%			Kec. Mulyorejo
	4.01.03.08	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.08.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	702.491	4%	98.576	4%	134.421	69,44%	146.117	100%	104.030	100%	104.030	100,00 %	14,81%	100,00%	14,81%			Kec. Benowo
	4.01.03.09	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.09.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	38.884.456	4%	11.596.935	4%	8.348.296	96,88%	7.118.760	100%	7.859.981	100%	7.859.981	100,00 %	20,21%	100,00%	20,21%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemukiman
	4.01.03.10	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.10.01	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan					304 dokumen	5.236.961	141 dokumen	1.059.868	141 dokumen	1.394.651	203 dokumen	1.126.437	324 dokumen	971.540	324 dokumen	971.540	106,58 %	18,55%	106,58%	18,55%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
	4.01.03.10.02	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.070.615	3%	139.279	3%	297.062	81,48%	230.550	100%	158.097	100%	158.097	100,00 %	14,77%	100,00%	14,77%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
	4.01.03.11	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.11.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	90.657.034	4%	9.266.532	4%	13.887.541	67,86%	14.592.270	100%	10.304.802	100%	10.304.802	100,00 %	11,37%	100,00%	11,37%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	4.01.03.12	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.12.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	3.233.838	4%	522.644	4%	761.014	91,18%	708.107	100%	447.226	100%	447.226	100,00 %	13,83%	100,00%	13,83%			Dinas Pemadam Kebakaran
	4.01.03.13	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.13.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	8.168.380	3%	1.099.455	3%	1.961.160	84,62%	1.979.774	75%	1.427.222	75%	1.427.222	75,00%	17,47%	75,00%	17,47%			Dinas Pendidikan
	4.01.03.14	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.14.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	963.220	4%	139.421	4%	201.890	96,67%	236.923	100%	128.932	100%	128.932	100,00 %	13,39%	100,00%	13,39%			Kec. Genteng
	4.01.03.15	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.15.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.364.666	4%	240.584	4%	316.473	90,91%	316.874	100%	234.294	100%	234.294	100,00 %	17,17%	100,00%	17,17%			Kec. Semampir
	4.01.03.16	Pengelolaan Pengadaan Barano dan Jasa																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	4.01.03.16.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	3.440.741	4%	546.999	4%	822.340	81,25%	790.380	100%	602.413	100%	602.413	100,00%	17,51%	100,00%	17,51%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	4.01.03.17	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.17.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.007.945	4%	202.436	4%	208.241	131,58%	204.810	100%	211.459	100%	211.459	100,00%	20,98%	100,00%	20,98%			Kec. Sukolilo
	4.01.03.18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.18.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	925.522	4%	185.677	4%	203.960	93,94%	204.401	100%	121.353	100%	121.353	100,00%	13,11%	100,00%	13,11%			Kec. Tandes
	4.01.03.19	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.19.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	871.067	4%	145.243	4%	204.277	103,33%	189.295	100%	158.591	100%	158.591	100,00%	18,21%	100,00%	18,21%			Kec. Sambikerep
	4.01.03.20	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.20.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	915.295	4%	149.752	4%	257.956	103,57%	191.184	100%	143.704	100%	143.704	100,00%	15,70%	100,00%	15,70%			Kec. Jambangan
	4.01.03.21	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.21.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2.508.901	4%	424.904	4%	618.374	107,14%	595.884	100%	447.662	100%	447.662	100,00%	17,84%	100,00%	17,84%			Badan Perencanaan Pembangunan
	4.01.03.22	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.22.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.553.867	4%	270.567	4%	335.502	85,71%	317.250	100%	258.974	100%	258.974	100,00%	16,67%	100,00%	16,67%			Kec. Tambaksari
	4.01.03.23	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.23.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	643.135	4%	96.915	4%	170.067	94,12%	162.584	100%	110.479	100%	110.479	100,00%	17,18%	100,00%	17,18%			Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.03.24	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.24.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	650.222	4%	110.888	4%	146.015	100%	147.635	100%	90.326	100%	90.326	100,00%	13,89%	100,00%	13,89%			Kec. Lakarsantri
	4.01.03.25	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.25.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.196.353	4%	151.714	4%	261.332	85,71%	264.872	100%	198.085	100%	198.085	100,00%	16,56%	100,00%	16,56%			Kec. Gubeng
	4.01.03.26	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	4.01.03.26.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	333.342	4%	50.795	4%	84.823	84,38%	69.465	100%	72.391	100%	72.391	100,00%	21,72%	100,00%	21,72%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
	4.01.03.27	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.27.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	3.503.251	4%	463.328	4%	829.399	100%	809.437	100%	646.757	100%	646.757	100,00%	18,46%	100,00%	18,46%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	4.01.03.28	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.28.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.769.476	4%	269.053	4%	456.655	90,32%	415.207	100%	276.143	100%	276.143	100,00%	15,61%	100,00%	15,61%			Kec. Sawahan
	4.01.03.29	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.29.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2.160.529	4%	273.212	4%	446.894	82,35%	549.413	100%	512.047	100%	512.047	100,00%	23,70%	100,00%	23,70%			Satuan Polisi Pamong Praja
	4.01.03.30	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.30.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	10.129.605	4%	1.652.968	4%	2.450.846	110,71%	2.474.224	100%	1.785.082	100%	1.785.082	100,00%	17,62%	100,00%	17,62%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	4.01.03.31	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.31.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.683.010	4%	188.520	4%	281.082	100%	247.379	100%	165.864	100%	165.864	100,00%	9,86%	100,00%	9,86%			Kec. Tegalsari
	4.01.03.32	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.32.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.166.972	4%	176.145	4%	265.562	103,70%	229.136	100%	193.781	100%	193.781	100,00%	16,61%	100,00%	16,61%			Kec. Bulak
	4.01.03.33	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.33.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	6.274.544	4%	640.018	4%	1.750.758	108,70%	2.445.102	100%	610.346	100%	610.346	100,00%	9,73%	100,00%	9,73%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	4.01.03.34	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.34.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	10.673.849	4%	1.812.929	4%	2.156.817	100%	2.044.604	100%	1.712.150	100%	1.712.150	100,00%	16,04%	100,00%	16,04%			Dinas Perhubungan
	4.01.03.35	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.35.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.492.971	3%	240.782	3%	366.040	75,86%	361.781	100%	268.270	100%	268.270	100,00%	17,97%	100,00%	17,97%			Dinas Tenaga Kerja
	4.01.03.36	Pengelolaan Pengadaan Barana dan Jasa																								



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	4.01.03.36.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	3.579.217	4%	546.285	4%	756.651	81,48%	760.318	100%	607.303	100%	607.303	100,00 %	16,97%	100,00%	16,97%			Dinas Perdagangan
	4.01.03.37	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.37.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.690.886	4%	306.580	4%	437.646	96,43%	392.446	100%	280.773	100%	280.773	100,00 %	16,61%	100,00%	16,61%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	4.01.03.38	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.38.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	903.970	4%	139.717	4%	192.559	67,65%	198.588	100%	132.028	100%	132.028	100,00 %	14,61%	100,00%	14,61%			Kec. Wonocolo
	4.01.03.39	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.39.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.251.309	3%	214.650	3%	322.747	100%	296.735	100%	192.652	100%	192.652	100,00 %	15,40%	100,00%	15,40%			Inspektorat
	4.01.03.40	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.40.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	983.127	4%	134.659	4%	236.617	106,06%	196.145	100%	152.892	100%	152.892	100,00 %	15,55%	100,00%	15,55%			Kec. Bubutan
	4.01.03.41	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.41.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	681.734	4%	126.073	4%	167.185	86,11%	137.938	100%	92.714	100%	92.714	100,00 %	13,60%	100,00%	13,60%			Kec. Simokerto
	4.01.03.42	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.42.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	948.948	4%	185.896	4%	213.408	96,30%	210.806	100%	156.630	100%	156.630	100,00 %	16,51%	100,00%	16,51%			Kec. Wiyung
	4.01.03.43	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.43.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.388.877	4%	259.605	4%	415.798	100%	325.149	100%	239.845	100%	239.845	100,00 %	17,27%	100,00%	17,27%			Badan Kepegawaian dan Diklat
	4.01.03.44	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.44.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.434.451	4%	176.469	4%	251.511	77,42%	249.957	100%	165.988	100%	165.988	100,00 %	11,57%	100,00%	11,57%			Kec. Sukomanunggal
	4.01.03.45	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.45.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.090.670	4%	183.714	4%	258.073	100%	240.686	100%	176.657	100%	176.657	100,00 %	16,20%	100,00%	16,20%			Kec. Pabean Cantian
	4.01.03.46	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.46.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	822.258	4%	112.023	4%	167.010	83,33%	170.271	100%	149.004	100%	149.004	100,00 %	18,12%	100,00%	18,12%			Kec. Tenggilis Mejoyo
	4.01.03.47	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.47.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	892.058	4%	153.638	4%	232.571	94,12%	205.550	100%	168.028	100%	168.028	100,00 %	18,84%	100,00%	18,84%			Kec. Kenjeran
	4.01.03.48	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.48.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	809.072	4%	145.087	4%	185.106	90,91%	180.793	100%	130.871	100%	130.871	100,00 %	16,18%	100,00%	16,18%			Kec. Gunung Anyar



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	4.01.03.49	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.49.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2.692.825	4%	471.099	4%	658.884	100%	621.503	100%	411.948	100%	411.948	100,00 %	15,30%	100,00%	15,30%			Bagian Hubungan Masyarakat
	4.01.03.50	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.50.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2.417.388	4%	402.280	4%	486.207	97,06%	643.781	100%	425.539	100%	425.539	100,00 %	17,60%	100,00%	17,60%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	4.01.03.51	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.51.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	942.697	4%	152.947	4%	243.283	103,57%	212.504	100%	161.209	100%	161.209	100,00 %	17,10%	100,00%	17,10%			Kec. Pakal
	4.01.03.52	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.52.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2.789.972	3%	448.310	3%	637.895	105%	614.531	100%	437.396	100%	437.396	100,00 %	15,68%	100,00%	15,68%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	4.01.03.53	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.53.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.088.564	3%	178.464	3%	268.606	86,21%	248.823	100%	170.836	100%	170.836	100,00 %	15,69%	100,00%	15,69%			Kec. Krembangan
	4.01.03.54	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.54.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	512.786	4%	86.621	4%	135.651	71,43%	107.866	100%	72.945	100%	72.945	100,00 %	14,23%	100,00%	14,23%			Kec. Asemrowo
	4.01.03.55	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.55.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.114.152	3%	220.215	3%	300.370	96,30%	279.700	100%	152.083	100%	152.083	100,00 %	13,65%	100,00%	13,65%			Dinas Lingkungan Hidup
	4.01.03.56	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.56.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.545.584	4%	356.349	4%	324.687	100%	348.797	100%	198.750	100%	198.750	100,00 %	12,86%	100,00%	12,86%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4.01.03.57	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.57.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	3.180.197	4%	561.915	4%	852.799	100%	729.697	100%	573.075	100%	573.075	100,00 %	18,02%	100,00%	18,02%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	4.01.03.58	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.58.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.197.627	4%	223.573	4%	302.682	94,12%	272.262	100%	169.399	100%	169.399	100,00 %	14,14%	100,00%	14,14%			Kec. Gayungan



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	4.01.03.59	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.59.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	966.908	3%	170.190	3%	232.698	77,42%	236.777	100%	154.684	100%	154.684	100,00 %	16,00%	100,00%	16,00%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	4.01.03.60	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.60.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	3.265.895	2%	500.096	2%	756.365	100%	786.542	100%	477.753	100%	477.753	100,00 %	14,63%	100,00%	14,63%			Dinas Sosial
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	3.265.895	4%	500.096	4%	756.365	93,33%	786.542	100%	477.753	100%	477.753	100,00 %	14,63%	100,00%	14,63%			Dinas Sosial
	4.01.03.61	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.61.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	46.297.161	4%	6.471.386	4%	9.049.845	100%	8.652.600	100%	5.965.326	100%	5.965.326	100,00 %	12,88%	100,00%	12,88%			RSUD Bhakti Dharma Husada
	4.01.03.62	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.62.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	3.431.188	4%	613.430	4%	849.982	88,57%	800.088	100%	550.044	100%	550.044	100,00 %	16,03%	100,00%	16,03%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	4.01.03.63	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.63.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.116.210	3%	183.268	3%	270.901	90%	266.541	100%	185.863	100%	185.863	100,00 %	16,65%	100,00%	16,65%			Bagian Administrasi Kerjasama
	4.01.03.64	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.64.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.444.421	4%	216.153	4%	289.134	76,47%	277.172	100%	200.491	100%	200.491	100,00 %	13,88%	100,00%	13,88%			Kec. Rungkut
	4.01.03.65	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.65.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2.133.357	4%	356.957	4%	495.325	93,75%	501.583	100%	349.160	100%	349.160	100,00 %	16,37%	100,00%	16,37%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	4.01.03.66	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.66.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1.909.832	3%	264.959	3%	546.014	105,88%	409.220	100%	337.872	100%	337.872	100,00 %	17,69%	100,00%	17,69%			Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1.909.832	4%	264.959	4%	546.014	91,67%	409.220	100%	337.872	100%	337.872	100,00 %	17,69%	100,00%	17,69%			Dinas Komunikasi dan Informatika
	4.01.03.67	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	4.01.03.67.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	848.406	3%	118.439	3%	198.557	96,15%	183.620	100%	146.155	100%	146.155	100,00 %	17,23%				Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	
	4.01.03.68	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.68.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	57.192.412	4%	5.619.079	4%	9.351.628	97,22%	19.187.786	100%	9.665.453	100%	9.665.453	100,00 %	16,90%	100,00%	16,90%			Bagian Umum Dan Protokol
	4.01.03.69	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.69.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2.894.396	4%	339.781	4%	561.011	82,35%	693.941	100%	441.338	100%	441.338	100,00 %	15,25%	100,00%	15,25%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
	4.01.03.70	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam																								
	4.01.03.70.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan					3 unit	626.197	0 unit	5.400	0 unit	8.400	0 unit	8.400	3 unit	8.400	3 unit	8.400	100,00 %	1,34%	100,00%	1,34%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	4.02	Sekretariat Dprd																								
Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		99,73%		99,73 %		99,73%		99,73 %		-
			Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,98 %		100%		0%		99,27 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	4.02.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	4.02.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	13.035.255	100%	2.452.895	100%	3.340.946	100%	2.774.993	100%	2.817.557	100%	2.817.557	100,00 %	21,61%	100,00%	21,61%			Sekretariat DPRD
	4.02.01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
	4.02.01.02.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	31.227.462	4%	4.679.697	4%	6.736.860	100%	6.532.237	100%	4.245.624	100%	4.245.624	100,00 %	13,60%	100,00%	13,60%			Sekretariat DPRD
	4.02.01.03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	4.02.01.03.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	5.711.267	3%	191.305	3%	518.558	54,17%	654.631	100%	695.049	100%	695.049	100,00 %	12,17%	100,00%	12,17%			Sekretariat DPRD
	4.02.01.04	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan																								
	4.02.01.04.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah studi banding yang difasilitasi					240 kali	45.794.271	121 kali	4.964.123	121 kali	4.323.522	156 kali	3.860.595	218 kali	4.380.218	218 kali	4.380.218	90,83%	9,56%	90,83%	9,56%			Sekretariat DPRD
			Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD					185 kali	45.794.271	89 kali	4.964.123	89 kali	4.323.522	127 kali	3.860.595	188 kali	4.380.218	188 kali	4.380.218	101,62 %	9,56%	101,62%	9,56%			Sekretariat DPRD
			Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang dilaksanakan					264 kali	45.794.271	123 kali	4.964.123	123 kali	4.323.522	188 kali	3.860.595	253 kali	4.380.218	253 kali	4.380.218	95,83%	9,56%	95,83%	9,56%			Sekretariat DPRD
	4.02.01.05	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																								
	4.02.01.05.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan DPRD					100%	37.239.802	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Sekretariat DPRD
	4.02.01.06	Layanan Administrasi DPRD																								
	4.02.01.06.01	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang diselenggarakan					930 kali	3.399.671	366 kali	247.000	366 kali	541.168	693 kali	758.484	910 kali	614.730	910 kali	614.730	97,85%	18,08%	97,85%	18,08%			Sekretariat DPRD
			Jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan					45 kali	3.399.671	19 kali	247.000	19 kali	541.168	40 kali	758.484	50 kali	614.730	50 kali	614.730	111,11 %	18,08%	111,11%	18,08%			Sekretariat DPRD
Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			87.509.761		69.969.439		41.671.433		1.573.411		11.906.138		10.184.240		7.355.186		23.663.790		56,79%		93.633.230		72,48%	
			Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		99,73%		99,73 %		99,73%		99,73 %		-
			Persentase kegiatan peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD yang terfasilitasi	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	4.02.02.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD																								
	4.02.02.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas					6 dokumen	2.341.635	1 dokumen	112.788	1 dokumen	278.293	2 dokumen	92.380	3 dokumen	153.110	3 dokumen	153.110	50,00%	6,54%	50,00%	6,54%			Sekretariat DPRD
	4.02.02.02	Peningkatan Kapasitas DPRD																								
	4.02.02.02.01	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah pelaksanaan publikasi kegiatan DPRD					5 media	22.846.035	5 media	1.415.333	5 media	6.767.950	5 media	5.353.433	5 media	2.322.640	5 media	2.322.640	100,00 %	10,17%	100,00%	10,17%			Sekretariat DPRD
	4.02.02.03	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																								
	4.02.02.03.01	Pelaksanaan Reses	Jumlah Fasilitasi Reses					3 kali	14.071.265	2 kali	0	2 kali	4.638.463	2 kali	4.584.972	3 kali	4.597.901	3 kali	4.597.901	100,00 %	32,68%	100,00%	32,68%			Sekretariat DPRD
	4.02.02.04	Fasilitasi Tugas DPRD																								
	4.02.02.04.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD					32 kali	2.412.499	6 kali	45.290	6 kali	221.432	8 kali	153.455	21 kali	281.536	21 kali	281.536	65,63%	11,67%	65,63%	11,67%			Sekretariat DPRD



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																								
	5.01	Perencanaan																								
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%		100%		100%		0%		100%		93,18 %		100%		100%		100%		100%		100 %	-	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %	-	
			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%		100%		100%		0%		100%		90,28 %		100%		100%		100%		100%		100 %	-	
	5.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
	5.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 dokumen	174.467	2 dokumen	25.376	2 dokumen	46.040	9 dokumen	23.616	12 dokumen	47.325	12 dokumen	47.325	100,00 %	27,13%	100,00%	27,13%			Badan Perencanaan Pembangunan	
	5.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	5.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN				100%	25.897.051	100%	4.660.095	100%	6.661.735	100%	6.010.706	100%	5.897.537	100%	5.897.537	100,00 %	22,77%	100,00%	22,77%			Badan Perencanaan Pembangunan	
	5.01.01.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	5.01.01.03.01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran				100%	285.851	3%	28.028	3%	65.409	93,75%	58.447	100%	73.359	100%	73.359	100,00 %	25,66%	100,00%	25,66%			Badan Perencanaan Pembangunan	
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			1.768.810		1.681.120		3.550.224		653.915		954.489		803.412		578.359		2.411.816		67,93%		4.092.937		76,95%	
			Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	100%		97,44 %		100%		0%		29,96 %		55,24 %		88,39%		88,97%		91,72 %		88,97%		91,72 %	-	
			Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %	-	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %	-	
	5.01.02.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																								
	5.01.02.01.01	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun				9 dokumen	1.375.985	3 dokumen	308.135	3 dokumen	387.690	8 dokumen	298.326	9 dokumen	161.999	9 dokumen	161.999	100,00 %	11,77%	100,00%	11,77%			Badan Perencanaan Pembangunan	



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	5.01.02.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																								
	5.01.02.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data urusan yang dikelola					17 data urusan	1.360.183	0 data urusan	156.880	0 data urusan	330.232	0 data urusan	341.826	17 data urusan	293.354	17 data urusan	293.354	100,00 %	21,57%	100,00%	21,57%			Badan Perencanaan Pembangunan
	5.01.02.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																								
	5.01.02.03.01	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah					72 PD	814.056	0 PD	188.900	0 PD	236.567	0 PD	163.259	72 PD	123.005	72 PD	123.005	100,00 %	15,11%	100,00%	15,11%			Badan Perencanaan Pembangunan
Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1.428.818		1.383.250		5.867.971		703.182		1.338.629		1.603.868		1.347.667		3.645.679		62,13%		5.028.928		68,92%	
			Persentase penyusunan rencana induk sektoral	100%		99,41 %		100%		0%		0%		92,31 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	85%		125%		85%		0%		100%		100%		100%		100%		117,65 %		100%		117,65 %		-
			Persentase perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang diimplementasikan	85%		125%		85%		0%		100%		100%		100%		100%		117,65 %		100%		117,65 %		-
			Persentase perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	85%		125%		85%		0%		100%		100%		100%		100%		117,65 %		100%		117,65 %		-
	5.01.03.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																								
	5.01.03.01.01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan kesejahteraan rakyat					1 dokumen	998.218	0 dokumen	113.963	0 dokumen	257.052	0 dokumen	300.802	1 dokumen	202.049	1 dokumen	202.049	100,00 %	20,24%	100,00%	20,24%			Badan Perencanaan Pembangunan
			Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat yang difasilitasi					12 kali	998.218	6 kali	113.963	6 kali	257.052	9 kali	300.802	12 kali	202.049	12 kali	202.049	100,00 %	20,24%	100,00%	20,24%			Badan Perencanaan Pembangunan
	5.01.03.01.03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan tata kelola pemerintahan yang disusun					2 dokumen	560.383	1 dokumen	68.304	1 dokumen	148.586	1 dokumen	191.990	2 dokumen	99.678	2 dokumen	99.678	100,00 %	17,79%	100,00%	17,79%			Badan Perencanaan Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	5.01.03.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)																								
	5.01.03.02.01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah yang disusun					2 dokumen	1.207.591	0 dokumen	173.928	0 dokumen	263.193	0 dokumen	262.623	2 dokumen	347.547	2 dokumen	347.547	100,00 %	28,78%	100,00%	28,78%			Badan Perencanaan Pembangunan
			Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang disusun					2 dokumen	1.207.591	0 dokumen	173.928	0 dokumen	263.193	0 dokumen	262.623	2 dokumen	347.547	2 dokumen	347.547	100,00 %	28,78%	100,00%	28,78%			Badan Perencanaan Pembangunan
			Jumlah Dokumen Kinerja Indikator Ekonomi yang disusun					6 dokumen	1.207.591	1 dokumen	173.928	1 dokumen	263.193	1 dokumen	262.623	6 dokumen	347.547	6 dokumen	347.547	100,00 %	28,78%	100,00%	28,78%			Badan Perencanaan Pembangunan
	5.01.03.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisataan dan Pertanian yang disusun					2 dokumen	756.681	0 dokumen	82.456	0 dokumen	193.788	1 dokumen	247.398	2 dokumen	142.545	2 dokumen	142.545	100,00 %	18,84%	100,00%	18,84%			Badan Perencanaan Pembangunan
	5.01.03.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																								
	5.01.03.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota					1 dokumen	1.330.252	0 dokumen	159.503	0 dokumen	227.651	0 dokumen	350.312	1 dokumen	297.863	1 dokumen	297.863	100,00 %	22,39%	100,00%	22,39%			Badan Perencanaan Pembangunan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase					1 dokumen	1.330.252	0 dokumen	159.503	0 dokumen	227.651	0 dokumen	350.312	1 dokumen	297.863	1 dokumen	297.863	100,00 %	22,39%	100,00%	22,39%			Badan Perencanaan Pembangunan
	5.01.03.03.03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Keciptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup					1 dokumen	1.014.847	0 dokumen	105.028	0 dokumen	248.359	0 dokumen	250.743	1 dokumen	257.986	1 dokumen	257.986	100,00 %	25,42%	100,00%	25,42%			Badan Perencanaan Pembangunan
			Jumlah dokumen perencanaan tata ruang kota dan pertanahan					1 dokumen	1.014.847	0 dokumen	105.028	0 dokumen	248.359	0 dokumen	250.743	1 dokumen	257.986	1 dokumen	257.986	100,00 %	25,42%	100,00%	25,42%			Badan Perencanaan Pembangunan
	5.02	Keuangan																								
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%		100%		100%		0%		100%		93,18 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,98 %		100%		0%		99,27 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	5.02.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	5.02.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun					12 Dokumen	102.605	2 Dokumen	10.600	2 Dokumen	34.400	8 Dokumen	29.699	12 Dokumen	18.600	12 Dokumen	18.600	100,00 %	18,13%	100,00%	18,13%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	5.02.01.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	5.02.01.02.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1.479.548	2%	251.352	2%	333.812	94,44%	340.049	100%	270.548	100%	270.548	100,00 %	18,29%	100,00%	18,29%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			3.435.858		2.862.054		41.700.768		624.255		1.054.203		981.612		780.655		2.660.070		6,38%		5.522.124		12,23%	
			Cakupan penerbitan KTP	95%		106,64 %		95%		0%		97,57 %		99,05 %		98,37%		98,37%		103,55 %		98,37%		103,55 %		-
			Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100%		100%		100%		0%		98,45 %		99,39 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan	90%		111,11 %		90%		0%		0%		100%		100%		100%		111,11 %		100%		111,11 %		-
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	75%		133,33 %		75%		0%		100%		100%		100%		100%		133,33 %		100%		133,33 %		-
	5.02.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah																								
	5.02.02.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					2 laporan	292.309	1 laporan	19.793	1 laporan	30.258	1 laporan	71.656	2 laporan	79.822	2 laporan	79.822	100,00 %	27,31%	100,00%	27,31%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	5.02.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					3 laporan	519.068	0 laporan	58.310	0 laporan	121.314	0 laporan	143.519	3 laporan	118.553	3 laporan	118.553	100,00 %	22,84%	100,00%	22,84%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	5.02.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah					4 dokumen	414.915	2 dokumen	61.185	2 dokumen	108.546	3 dokumen	56.911	4 dokumen	48.070	4 dokumen	48.070	100,00 %	11,59%	100,00%	11,59%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	5.02.02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah																								
	5.02.02.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola					245 dokumen	556.259	120 dokumen	107.514	120 dokumen	116.358	183 dokumen	116.409	249 dokumen	77.615	249 dokumen	77.615	101,63 %	13,95%	101,63%	13,95%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	5.02.02.02.02	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah yang disusun					4 dokumen	253.305	2 dokumen	36.438	2 dokumen	53.703	3 dokumen	53.089	4 dokumen	36.074	4 dokumen	36.074	100,00 %	14,24%	100,00%	14,24%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	5.02.02.02.03	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani					72000 berkas	1.346.027	40107 berkas	212.736	40107 berkas	331.331	64472 berkas	324.180	99220 berkas	233.950	99220 berkas	233.950	137,81 %	17,38%	137,81%	17,38%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	5.02.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah																								
	5.02.02.03.01	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun					22 dokumen	1.085.290	17 dokumen	128.281	17 dokumen	292.693	20 dokumen	215.847	22 dokumen	186.571	22 dokumen	186.571	100,00 %	17,19%	100,00%	17,19%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	5.02.02.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah																								
	5.02.02.04.01	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase realisasi bagi hasil retribusi					100%	3.055.435	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0	100%	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	5.02.02.04.02	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase realisasi dana darurat dan mendesak					25%	34.178.160	0%	0	0%	0	37,54%	0	38,75%	0	38,75%	0	154,99 %	0,00%	154,99%	0,00%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			66.158.295		58.685.115		22.521.859		3.583.586		4.993.561		5.414.580		4.008.716		16.604.884		73,73%		75.289.999		84,90%	
			Persentase tanah aset yang tersertifikasi	45,29 %		102,6 %		45,29 %		0%		44,99 %		45,23 %		50,04%		50,04%		110,67 %		50,04%		110,67 %		-
			Persentase aset tanah yang tercatat pemanfaatannya	100%		123%		100%		0%		6,65 %		107,42 %		135,65%		135,65%		135,65 %		135,65%		135,65 %		-
			Persentase bangunan gedung yang dipelihara	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase pemanfaatan aset	97%		104,17 %		97%		0%		100%		99,24 %		99,27%		99,27%		102,34 %		99,27%		102,34 %		-
			Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	100%		100%		100%		0%		0%		0%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	5.02.03.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah																								

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	5.02.03.01.01	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pendataan dan penataan terhadap tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan					1 dokumen	1.396.805	0 dokumen	230.986	0 dokumen	261.309	0 dokumen	350.622	1 dokumen	270.146	1 dokumen	270.146	100,00 %	19,34%	100,00%	19,34%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	5.02.03.01.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan					35 dokumen	4.297.204	27 dokumen	706.443	27 dokumen	1.024.909	35 dokumen	1.294.538	35 dokumen	819.775	35 dokumen	819.775	100,00 %	19,08%	100,00%	19,08%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
			Jumlah tanah aset yang diamankan					75 bidang	4.297.204	51 bidang	706.443	51 bidang	1.024.909	75 bidang	1.294.538	75 bidang	819.775	75 bidang	819.775	100,00 %	19,08%	100,00%	19,08%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	5.02.03.01.04	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola					25 lokasi	12.603.549	25 lokasi	2.081.301	25 lokasi	2.835.141	25 lokasi	2.905.680	25 lokasi	2.233.059	25 lokasi	2.233.059	100,00 %	17,72%	100,00%	17,72%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	5.02.03.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah																								
	5.02.03.02.01	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah berkas penetapan Penghapusan Aset/Barang Daerah					6 Berkas	3.331.457	3 Berkas	478.607	3 Berkas	660.763	6 Berkas	630.873	9 Berkas	583.071	9 Berkas	583.071	150,00 %	17,50%	150,00%	17,50%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
	5.02.03.02.02	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang Milik Daerah nya dimonitor					72 lembaga	892.844	72 lembaga	86.250	72 lembaga	211.439	72 lembaga	232.867	72 lembaga	102.665	72 lembaga	102.665	100,00 %	11,50%	100,00%	11,50%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			3.542.681		3.422.877		20.792.145		4.165.245		5.234.631		4.197.444		3.169.134		15.093.369		72,59%		18.516.246		76,09%	
			Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	85%		84,95 %		85%		0%		49,01 %		67,16 %		81,77%		61,94%		72,87 %		61,94%		72,87 %		-
			Persentase objek pajak daerah yang telah ditetapkan	85%		119,05 %		85%		0%		4,13 %		8,82 %		100,3%		99,95%		117,59 %		99,95%		117,59 %		-
	5.02.04.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah																								
	5.02.04.01.01	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani					150000 berkas	128.989	130585 berkas	5.400	130585 berkas	61.739	159632 berkas	48.284	169534 berkas	6.166	169534 berkas	6.166	113,02 %	4,78%	113,02%	4,78%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
			Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani					650 berkas	85.183	480 berkas	5.400	480 berkas	59.372	784 berkas	8.799	1106 berkas	6.140	1106 berkas	6.140	170,15 %	7,21%	170,15%	7,21%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani					2313 berkas	77.844	128 berkas	17.022	128 berkas	41.605	183 berkas	8.400	296 berkas	5.600	296 berkas	5.600	12,80%	7,19%	12,80%	7,19%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	5.02.04.01.04	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi					1799 objek pajak	2.913.338	1880 objek pajak	706.712	1880 objek pajak	725.723	1900 objek pajak	462.089	1870 objek pajak	589.860	1870 objek pajak	589.860	103,95 %	20,25%	103,95%	20,25%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
			Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi					16914 objek pajak	1.529.428	14678 objek pajak	405.804	14678 objek pajak	358.875	22277 objek pajak	293.872	28291 objek pajak	177.542	28291 objek pajak	177.542	167,26 %	11,61%	167,26%	11,61%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
			Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi					57144 objek pajak	3.578.164	28572 objek pajak	906.283	28572 objek pajak	808.282	40190 objek pajak	619.472	58452 objek pajak	594.662	58452 objek pajak	594.662	102,29 %	16,62%	102,29%	16,62%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	5.02.04.01.07	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani					26776 berkas	722.002	13614 berkas	158.580	13614 berkas	192.563	21345 berkas	140.953	28748 berkas	94.078	28748 berkas	94.078	107,36 %	13,03%	107,36%	13,03%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
			Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani					500000 berkas	1.826.125	432240 berkas	279.254	432240 berkas	600.362	581815 berkas	384.025	660543 berkas	256.224	660543 berkas	256.224	132,11 %	14,03%	132,11%	14,03%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
			Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani					71000 berkas	810.827	52240 berkas	164.531	52240 berkas	211.802	68667 berkas	156.478	86017 berkas	103.746	86017 berkas	103.746	121,15 %	12,80%	121,15%	12,80%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	5.02.04.01.10	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi					34800 objek pajak	2.893.811	20992 objek pajak	462.575	20992 objek pajak	697.133	28706 objek pajak	642.732	744330 objek pajak	401.122	744330 objek pajak	401.122	2138,88 %	13,86%	2138,88%	13,86%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
			Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi					7804 objek pajak	1.170.199	8187 objek pajak	192.919	8187 objek pajak	284.967	8090 objek pajak	270.247	7989 objek pajak	189.001	7989 objek pajak	189.001	102,37 %	16,15%	102,37%	16,15%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
			Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi					29670 objek pajak	2.325.387	22645 objek pajak	483.138	22645 objek pajak	512.365	31917 objek pajak	491.668	44356 objek pajak	330.864	44356 objek pajak	330.864	149,50 %	14,23%	149,50%	14,23%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	5.02.04.01.13	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi					21066 berkas	639.905	22414 berkas	101.988	22414 berkas	151.064	33455 berkas	151.076	44168 berkas	91.909	44168 berkas	91.909	209,66 %	14,36%	209,66%	14,36%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
			Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi					6288 objek pajak	581.080	7113 objek pajak	99.258	7113 objek pajak	146.707	7052 objek pajak	128.650	6835 objek pajak	85.642	6835 objek pajak	85.642	108,70 %	14,74%	108,70%	14,74%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
			Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi					721142 objek pajak	1.081.447	722444 objek pajak	157.581	722444 objek pajak	248.913	734242 objek pajak	253.619	752504 objek pajak	168.778	752504 objek pajak	168.778	104,35 %	15,61%	104,35%	15,61%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	5.02.04.01.16	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani					110 berkas	137.516	102 berkas	8.000	102 berkas	49.100	158 berkas	51.280	194 berkas	23.600	194 berkas	23.600	176,36 %	17,16%	176,36%	17,16%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
			Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani					250 berkas	126.200	178 berkas	5.400	178 berkas	12.300	242 berkas	47.500	293 berkas	25.600	293 berkas	25.600	117,20 %	20,29%	117,20%	20,29%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
			Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani					680 berkas	164.700	110 berkas	5.400	110 berkas	71.760	187 berkas	38.300	375 berkas	18.600	375 berkas	18.600	55,15%	11,29%	55,15%	11,29%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	5.03	Kepegawaian																								
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
	5.03.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	5.03.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	14.459.567	100%	2.667.934	100%	3.776.078	100%	3.338.647	100%	3.163.382	100%	3.163.382	100,00 %	21,88%	100,00%	21,88%			Badan Kepegawaian dan Diklat
Meningkatkan kualitas pendidikan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			3.484.480		3.151.362		37.292.972		5.195.341		8.162.516		8.787.279		6.549.291		41.541.943		111,39 %		44.693.305		109,60 %	
			Persentase guru SD yang kompeten	100%		100%		100%		0%		86,21 %		100%		85,57%		85,57%		85,57 %		85,57%		85,57 %		-
			Persentase guru SMP yang kompeten	100%		100%		100%		0%		87,57 %		100%		80,83%		80,83%		80,83 %		80,83%		80,83 %		-
			Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditingkatkan kapabilitasnya	100%		165%		100%		0%		100%		102,13 %		101,54%		100,84%		100,84 %		100,84%		100,84 %		-



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Persentase pegawai yang difasilitasi penilaian kinerja	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		-
			Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	52,03 %		136,48 %		52,03 %		0%		69,44 %		71,79 %		73,48%		73,98%		142,19 %		73,98%		142,19 %		-
			Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	65,06 %		110,25 %		65,06 %		0%		74,39 %		73,96 %		69,08%		66,78%		102,65 %		66,78%		102,65 %		-
			Persentase penataan pegawai sesuai analisa jabatan	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		-
	5.03.02.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																								
	5.03.02.01.01	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah tahapan seleksi penerimaan ASN					3 tahap	1.673.539	0 tahap	23.400	0 tahap	60.200	2 tahap	519.207	4 tahap	322.799	4 tahap	322.799	133,33 %	19,29%	133,33%	19,29%			Badan Kepegawaian dan Diklat
	5.03.02.01.02	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang dikelola					8437 data	347.784	4358 data	40.082	4358 data	96.294	5962 data	82.579	9323 data	85.337	9323 data	85.337	110,50 %	24,54%	110,50%	24,54%			Badan Kepegawaian dan Diklat
	5.03.02.02	Mutasi dan Promosi ASN																								
	5.03.02.02.01	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian					8437 berkas	519.035	4309 berkas	73.715	4309 berkas	117.572	5884 berkas	152.111	10045 berkas	104.449	10045 berkas	104.449	119,06 %	20,12%	119,06%	20,12%			Badan Kepegawaian dan Diklat
	5.03.02.02.02	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah berkas penempatan pegawai, promosi dan rotasi jabatan					118 berkas	815.529	47 berkas	136.094	47 berkas	135.977	76 berkas	148.696	118 berkas	331.815	118 berkas	331.815	100,00 %	40,69%	100,00%	40,69%			Badan Kepegawaian dan Diklat
	5.03.02.03	Pengembangan Kompetensi ASN																								
	5.03.02.03.01	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP					50 kali	66.100	16 kali	5.400	16 kali	27.900	32 kali	11.400	50 kali	12.100	50 kali	12.100	100,00 %	18,31%	100,00%	18,31%			Inspektorat
	5.03.02.04	Pengembangan Kompetensi ASN																								
	5.03.02.04.01	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah pelaksanaan assesmen pegawai					5 kali	1.047.266	2 kali	5.400	2 kali	151.800	2 kali	35.700	5 kali	117.403	5 kali	117.403	100,00 %	11,21%	100,00%	11,21%			Badan Kepegawaian dan Diklat
	5.03.02.04.02	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya					274 orang	858.453	13 orang	5.400	13 orang	247.350	232 orang	379.216	241 orang	53.700	241 orang	53.700	87,96%	6,26%	87,96%	6,26%			Badan Kepegawaian dan Diklat
	5.03.02.05	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																								
	5.03.02.05.01	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah lembaga yang mendapatkan pengawasan serta penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan					957 Lembaga	30.965.000	63 Lembaga	4.756.200	63 Lembaga	7.089.500	1570 Lembaga	7.248.200	1570 Lembaga	5.285.000	1570 Lembaga	5.285.000	164,05 %	17,07%	164,05%	17,07%			Dinas Pendidikan
	5.03.02.06	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																								
	5.03.02.06.01	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya					7226 orang	498.931	6926 orang	63.314	6926 orang	125.117	7250 orang	114.476	7460 orang	123.223	7460 orang	123.223	103,24 %	24,70%	103,24%	24,70%			Badan Kepegawaian dan Diklat
	5.03.02.06.02	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaiannya					1005 orang	501.335	0 orang	86.336	0 orang	110.808	0 orang	95.695	1005 orang	113.465	1005 orang	113.465	100,00 %	22,63%	100,00%	22,63%			Badan Kepegawaian dan Diklat
			Jumlah pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin pegawai					216 orang	501.335	154 orang	86.336	154 orang	110.808	164 orang	95.695	233 orang	113.465	233 orang	113.465	107,87 %	22,63%	107,87%	22,63%			Badan Kepegawaian dan Diklat
	5.04	Pendidikan Dan Pelatihan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
Meningkatkan kompetensi ASN	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			2.289.197		2.120.064		3.835.495		545.624		1.067.525		817.489		1.321.153		2.430.638		63,37%		4.550.702		74,30%	
			Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	52,03 %		136,48 %		52,03 %		0%		69,44 %		71,79 %		73,48%		73,98%		142,19 %		73,98%		142,19 %		-
			Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	65,06 %		110,25 %		65,06 %		0%		74,39 %		73,96 %		69,08%		66,78%		102,65 %		66,78%		102,65 %		-
	5.04.02.01	Pengembangan Kompetensi Teknis																								
	5.04.02.01.01	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis					2 jenis	875.000	2 jenis	189.350	2 jenis	156.800	2 jenis	207.100	2 jenis	286.150	2 jenis	286.150	100,00 %	32,70%	100,00%	32,70%			Badan Kepegawaian dan Diklat
	5.04.02.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah materi diklat pembelajaran (e-learning)					3 materi	189.417	0 materi	17.015	0 materi	41.841	1 materi	45.969	3 materi	47.763	3 materi	47.763	100,00 %	25,22%	100,00%	25,22%			Badan Kepegawaian dan Diklat
	5.04.02.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional																								
	5.04.02.02.01	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional dan sosial kultural					2 jenis	2.771.078	1 jenis	339.259	1 jenis	868.884	1 jenis	564.420	2 jenis	987.240	2 jenis	987.240	100,00 %	35,63%	100,00%	35,63%			Badan Kepegawaian dan Diklat
			Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial					2 jenis	2.771.078	2 jenis	339.259	2 jenis	868.884	2 jenis	564.420	2 jenis	987.240	2 jenis	987.240	100,00 %	35,63%	100,00%	35,63%			Badan Kepegawaian dan Diklat
	5.05	Penelitian Dan Pengembangan																								
Meningkatkan kualitas pendidikan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			1.768.810		1.681.120		622.462		72.302		141.013		181.938		119.399		395.254		63,50%		2.076.374		86,83%	
			Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib administrasi	88,88 %		114,44 %		88,88 %		0%		100%		0%		100%		100%		112,51 %		100%		112,51 %		-
			Persentase rekomendasi penelitian, pengembangan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		0%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	5.05.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	5.05.02.01.01	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah					805 lembaga	139.200	0 lembaga	12.600	0 lembaga	21.000	0 lembaga	21.000	805 lembaga	14.600	805 lembaga	14.600	100,00 %	10,49%	100,00%	10,49%			Dinas Pendidikan
	5.05.02.02	Pengembangan Inovasi dan Teknologi																								
	5.05.02.02.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi					4 dokumen	483.262	0 dokumen	59.702	0 dokumen	120.013	1 dokumen	160.938	4 dokumen	104.799	4 dokumen	104.799	100,00 %	21,69%	100,00%	21,69%			Badan Perencanaan Pembangunan
	6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																								
	6.01	Inspektorat Daerah																								
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%		100%		100%		0%		100%		93,18 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%		100%		100%		0%		100%		90,28 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	6.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
	6.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					12 dokumen	76.632	3 dokumen	10.720	3 dokumen	25.300	10 dokumen	13.600	13 dokumen	10.800	13 dokumen	10.800	108,33 %	14,09%	108,33%	14,09%			Inspektorat
	6.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	6.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	22.236.360	100%	4.118.806	100%	5.761.455	100%	5.255.299	100%	5.245.875	100%	5.245.875	100,00 %	23,59%	100,00%	23,59%			Inspektorat
	6.01.01.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																								
	6.01.01.03.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	275.179	2%	54.801	2%	69.739	100%	36.812	100%	30.991	100%	30.991	100,00 %	11,26%	100,00%	11,26%			Inspektorat
Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			759.688		710.251		1.095.241		99.520		371.720		296.780		139.400		768.020		70,12%		1.478.271		79,69%	
			Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	100%		200%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	100%		100%		100%		0%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah IV	100%		128,57 %		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah IV	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%		100%		100%		0%		100%		93,18 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	6.01.02.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal																								
	6.01.02.01.01	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen pelaporan kinerja tingkat kota yang direviu			2 dokumen	928.900	2 dokumen	88.200	2 dokumen	297.200	2 dokumen	260.100	2 dokumen	115.200	2 dokumen	115.200	100,00 %	12,40%	100,00%	12,40%					Inspektorat
			Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan			12 dokumen	928.900	6 dokumen	88.200	6 dokumen	297.200	9 dokumen	260.100	12 dokumen	115.200	12 dokumen	115.200	100,00 %	12,40%	100,00%	12,40%					Inspektorat
	6.01.02.01.03	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja			18 lembaga	75.966	18 lembaga	5.660	18 lembaga	39.860	18 lembaga	8.520	18 lembaga	12.100	18 lembaga	12.100	100,00 %	15,93%	100,00%	15,93%					Inspektorat
			Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan			35 lembaga	75.966	30 lembaga	5.660	30 lembaga	39.860	40 lembaga	8.520	48 lembaga	12.100	48 lembaga	12.100	137,14 %	15,93%	137,14%	15,93%					Inspektorat
	6.01.02.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																								
	6.01.02.02.01	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja			18 lembaga	90.375	18 lembaga	5.660	18 lembaga	34.660	18 lembaga	28.160	18 lembaga	12.100	18 lembaga	12.100	100,00 %	13,39%	100,00%	13,39%					Inspektorat
			Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan			35 lembaga	90.375	17 lembaga	5.660	17 lembaga	34.660	25 lembaga	28.160	35 lembaga	12.100	35 lembaga	12.100	100,00 %	13,39%	100,00%	13,39%					Inspektorat
Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			643.007		628.903		185.270		10.940		80.660		43.400		31.000		135.000		72,87%		763.903		92,23%	
			Persentase penanganan disiplin aparaturnya wilayah I	100%		133,33 %		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	100%		100%		100%		0%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase penanganan disiplin aparaturnya wilayah III	100%		266,67 %		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	100%		100%		100%		0%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	6.01.03.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan																								
	6.01.03.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan			35 lembaga	83.700	37 lembaga	5.400	37 lembaga	40.900	42 lembaga	15.300	51 lembaga	12.400	51 lembaga	12.400	145,71 %	14,81%	145,71%	14,81%					Inspektorat
			Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja			18 lembaga	83.700	19 lembaga	5.400	19 lembaga	40.900	19 lembaga	15.300	19 lembaga	12.400	19 lembaga	12.400	105,56 %	14,81%	105,56%	14,81%					Inspektorat
	6.01.03.02	Pendampingan dan Asistensi																								
	6.01.03.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja			18 lembaga	101.570	18 lembaga	5.540	18 lembaga	39.760	18 lembaga	28.100	18 lembaga	18.600	18 lembaga	18.600	100,00 %	18,31%	100,00%	18,31%					Inspektorat
			Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan			35 lembaga	101.570	33 lembaga	5.540	33 lembaga	39.760	37 lembaga	28.100	43 lembaga	18.600	43 lembaga	18.600	122,86 %	18,31%	122,86%	18,31%					Inspektorat
7		Unsur Kewilayahan																								



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01	Kecamatan																								
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%		100%		100%		0%		100%		90,28 %		100%		100%		100%		100%		100 %		-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,98 %		100%		0%		99,27 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	7.01.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	13.080.358	100%	2.368.586	100%	3.370.076	100%	2.860.882	100%	2.816.059	100%	2.816.059	100,00 %	21,53%	100,00%	21,53%			Kec. Dukuh Pakis
	7.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	14.158.679	100%	2.509.138	100%	3.678.935	100%	3.064.960	100%	3.102.558	100%	3.102.558	100,00 %	21,91%	100,00%	21,91%			Kec. Bulak
	7.01.01.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.03.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	15.553.142	100%	2.720.777	100%	3.837.796	100%	3.281.951	100%	3.230.555	100%	3.230.555	100,00 %	20,77%	100,00%	20,77%			Kec. Sukomanunggal
	7.01.01.04	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.04.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	13.375.646	100%	2.368.889	100%	3.433.696	100%	2.925.802	100%	2.818.665	100%	2.818.665	100,00 %	21,07%	100,00%	21,07%			Kec. Wiyung
	7.01.01.05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.05.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	12.153.293	100%	2.115.592	100%	2.971.765	100%	2.453.544	100%	2.723.984	100%	2.723.984	100,00 %	22,41%	100,00%	22,41%			Kec. Bubutan
	7.01.01.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.06.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	14.979.018	100%	2.698.977	100%	3.856.551	175,44%	3.223.890	100%	3.269.166	100%	3.269.166	100,00 %	21,82%	100,00%	21,82%			Kec. Wonocolo
	7.01.01.07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.07.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	12.653.876	100%	2.272.291	100%	3.243.603	100%	2.769.548	100%	2.758.677	100%	2.758.677	100,00 %	21,80%	100,00%	21,80%			Kec. Sambikerep
	7.01.01.08	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.08.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	15.271.429	100%	2.750.052	100%	3.906.627	100%	3.098.037	100%	3.068.103	100%	3.068.103	100,00 %	20,09%	100,00%	20,09%			Kec. Semampir
	7.01.01.09	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.09.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	13.713.430	100%	2.505.456	100%	3.590.037	100%	3.000.289	100%	3.030.122	100%	3.030.122	100,00 %	22,10%	100,00%	22,10%			Kec. Genteng
	7.01.01.10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.10.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	13.370.414	100%	2.427.691	100%	3.402.457	100%	2.817.789	100%	2.854.945	100%	2.854.945	100,00 %	21,35%	100,00%	21,35%			Kec. Tegalsari



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.01.11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	17.348.696	100%	3.155.001	100%	4.428.882	100%	3.759.013	100%	3.922.857	100%	3.922.857	100,00 %	22,61%	100,00%	22,61%			Kec. Sawahan
	7.01.01.12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.12.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	14.791.081	100%	2.615.883	100%	3.701.400	100%	3.163.500	100%	3.184.261	100%	3.184.261	100,00 %	21,53%	100,00%	21,53%			Kec. Lakarsantri
	7.01.01.13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.13.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	15.978.702	100%	2.744.296	100%	3.992.559	100%	3.295.894	100%	3.501.416	100%	3.501.416	100,00 %	21,91%	100,00%	21,91%			Kec. Gubeng
	7.01.01.14	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.14.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	21.826.024	100%	3.935.585	100%	5.607.354	100%	4.709.472	100%	4.794.982	100%	4.794.982	100,00 %	21,97%	100,00%	21,97%			Kec. Tambaksari
	7.01.01.15	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.15.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	13.507.341	100%	2.385.914	100%	3.394.194	100%	2.848.229	100%	2.984.809	100%	2.984.809	100,00 %	22,10%	100,00%	22,10%			Kec. Gayungan
	7.01.01.16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.16.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	12.281.304	100%	2.266.377	100%	3.124.858	100%	2.587.924	100%	2.654.911	100%	2.654.911	100,00 %	21,62%	100,00%	21,62%			Kec. Jambangan
	7.01.01.17	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.17.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	11.602.366	100%	2.102.288	100%	2.927.168	100%	2.315.155	100%	2.427.203	100%	2.427.203	100,00 %	20,92%	100,00%	20,92%			Kec. Asemrowo
	7.01.01.18	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.18.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	18.701.547	100%	3.391.056	100%	4.763.131	100%	4.019.665	100%	4.086.347	100%	4.086.347	100,00 %	21,85%	100,00%	21,85%			Kec. Wonokromo
	7.01.01.19	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.19.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	12.714.192	100%	2.229.959	100%	3.175.280	100%	2.560.942	100%	2.553.294	100%	2.553.294	100,00 %	20,08%	100,00%	20,08%			Kec. Tenggilis Mejoyo
	7.01.01.20	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.20.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	14.340.219	100%	2.575.132	100%	3.632.689	100%	3.054.127	100%	3.173.738	100%	3.173.738	100,00 %	22,13%	100,00%	22,13%			Kec. Pabean Cantian
	7.01.01.21	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.21.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	13.689.272	100%	2.486.353	100%	3.538.151	100%	2.894.737	100%	2.749.492	100%	2.749.492	100,00 %	20,09%	100,00%	20,09%			Kec. Benowo
	7.01.01.22	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	7.01.01.22.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	16.939.985	100%	3.058.515	100%	4.285.616	100%	3.452.368	100%	3.663.626	100%	3.663.626	100,00 %	21,63%	100,00%	21,63%			Kec. Mulyorejo
	7.01.01.23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.01.23.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	159.452	2%	22.517	2%	33.926	87,50%	26.364	100%	31.764	100%	31.764	100,00 %	19,92%	100,00%	19,92%			Kec. Semampir
	7.01.01.24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.24.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	69.583	1%	19.126	1%	18.486	58,33%	17.966	100%	11.804	100%	11.804	100,00 %	16,96%	100,00%	16,96%			Kec. Wonocolo
	7.01.01.25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.25.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	83.418	2%	22.638	2%	24.105	100%	17.491	100%	17.261	100%	17.261	100,00 %	20,69%	100,00%	20,69%			Kec. Pakal
	7.01.01.26	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.26.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	142.004	2%	23.797	2%	26.460	91,67%	21.529	100%	10.994	100%	10.994	100,00 %	7,74%	100,00%	7,74%			Kec. Tambaksari
	7.01.01.27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.27.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	92.767	1%	19.612	1%	19.653	61,54%	20.336	100%	14.210	100%	14.210	100,00 %	15,32%	100,00%	15,32%			Kec. Sawahan
	7.01.01.28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.28.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	94.965	2%	28.549	2%	25.745	91,67%	20.598	100%	7.701	100%	7.701	100,00 %	8,11%	100,00%	8,11%			Kec. Gayungan
	7.01.01.29	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.29.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	63.201	2%	19.577	2%	16.740	100%	10.839	100%	10.612	100%	10.612	100,00 %	16,79%	100,00%	16,79%			Kec. Wiyung
	7.01.01.30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.30.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	82.968	2%	15.789	2%	19.743	93,75%	18.884	100%	11.606	100%	11.606	100,00 %	13,99%	100,00%	13,99%			Kec. Bubutan
	7.01.01.31	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.01.31.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	89.908	2%	18.933	2%	20.512	84,62%	19.059	100%	14.787	100%	14.787	100,00 %	16,45%	100,00%	16,45%			Kec. Asemrowo
	7.01.01.32	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.32.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	106.995	2%	22.626	2%	25.944	100%	25.490	100%	18.471	100%	18.471	100,00 %	17,26%	100,00%	17,26%			Kec. Tegalsari
	7.01.01.33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.33.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	50.460	1%	11.287	1%	11.058	80%	12.679	100%	8.135	100%	8.135	100,00 %	16,12%	100,00%	16,12%			Kec. Lakarsantri
	7.01.01.34	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.34.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	63.108	1%	18.869	1%	18.777	60%	10.082	100%	13.877	100%	13.877	100,00 %	21,99%	100,00%	21,99%			Kec. Gunung Anyar
	7.01.01.35	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.35.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	92.233	2%	20.098	2%	16.474	120%	18.506	100%	16.430	100%	16.430	100,00 %	17,81%	100,00%	17,81%			Kec. Jambangan
	7.01.01.36	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.36.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	42.785	1%	10.049	1%	10.290	77,78%	11.223	100%	6.671	100%	6.671	100,00 %	15,59%	100,00%	15,59%			Kec. Sukomanunggal
	7.01.01.37	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.37.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	105.441	1%	20.949	1%	20.836	81,82%	21.399	50%	14.509	50%	14.509	50,00%	13,76%	50,00%	13,76%			Kec. Pabean Cantian
	7.01.01.38	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.38.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	66.102	2%	17.405	2%	16.646	71,43%	16.646	100%	12.964	100%	12.964	100,00 %	19,61%	100,00%	19,61%			Kec. Sambikerep
	7.01.01.39	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.01.39.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	109.941	1%	25.120	1%	24.860	75%	25.227	100%	22.813	100%	22.813	100,00 %	20,75%	100,00%	20,75%			Kec. Bulak
	7.01.01.40	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.40.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	125.344	1%	17.290	1%	16.871	60%	16.531	100%	10.894	100%	10.894	100,00 %	8,69%	100,00%	8,69%			Kec. Benowo
	7.01.01.41	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.41.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	84.694	2%	19.802	2%	21.187	111,11%	20.329	100%	12.569	100%	12.569	100,00 %	14,84%	100,00%	14,84%			Kec. Kenjeran
	7.01.01.42	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.42.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	87.946	1%	13.183	1%	14.268	81,82%	15.782	100%	16.961	100%	16.961	100,00 %	19,29%	100,00%	19,29%			Kec. Karangpilang
	7.01.01.43	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.43.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	80.000	1%	18.103	1%	18.944	77,78%	6.754	100%	34.212	100%	34.212	100,00 %	42,77%	100,00%	42,77%			Kec. Wonokromo
	7.01.01.44	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.44.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	102.762	1%	23.991	1%	22.253	81,82%	24.863	50%	15.457	50%	15.457	50,00%	15,04%	50,00%	15,04%			Kec. Genteng
	7.01.01.45	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	7.01.01.45.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	198.810	1%	7.172	1%	7.989	56,25%	9.553	100%	9.956	100%	9.956	100,00 %	5,01%	100,00%	5,01%			Kec. Mulyorejo
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			95.675.646		66.037.447		122.632.700		17.808.141		34.420.724		34.184.370		23.157.039		2.675.711.071		2.181,89%		2.741.748.518		1.255,91%	
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100%		98,39 %		100%		0%		49,06 %		74,73 %		99,66%		99,66%		99,66 %		99,66%		99,66 %		-
			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100%		99,12 %		100%		0%		70,52 %		81,62 %		99,3%		99,3%		99,3 %		99,3%		99,3 %		-



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		-
			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100%		99,44 %		100%		0%		65,65 %		83,26 %		99,68%		99,68 %		99,68%		99,68%		99,68 %		-
			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%		100%		100%		0%		100%		90,28 %		100%		100%		100%		100%		100%		-
	7.01.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	4.800	4 lembaga	2.400	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	2.400	4 lembaga	2.400	100,00 %	50,00%	100,00%	50,00%			Kec. Pakal
	7.01.02.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					6 lembaga	7.500	6 lembaga	3.000	6 lembaga	0	6 lembaga	0	9 lembaga	0	9 lembaga	0	150,00 %	0,00%	150,00%	0,00%			Kec. Gubeng
	7.01.02.03	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.03.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	5.430	4 lembaga	1.350	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	4.080	4 lembaga	4.080	100,00 %	75,14%	100,00%	75,14%			Kec. Karangpilang
	7.01.02.04	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.04.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	4.170	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	5 lembaga	0	5 lembaga	0	125,00 %	0,00%	125,00%	0,00%			Kec. Lakarsantri
	7.01.02.05	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.05.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	7.500	4 lembaga	2.400	4 lembaga	0	4 lembaga	0	6 lembaga	0	6 lembaga	0	150,00 %	0,00%	150,00%	0,00%			Kec. Tegalsari
	7.01.02.06	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.02.06.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					6 lembaga	12.450	6 lembaga	2.730	6 lembaga	0	6 lembaga	0	6 lembaga	9.720	6 lembaga	9.720	100,00 %	78,07%	100,00%	78,07%			Kec. Sawahan
	7.01.02.07	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.07.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	2.520	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	2.520	4 lembaga	2.520	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%			Kec. Jambangan
	7.01.02.08	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.08.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	6.000	4 lembaga	3.000	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Simokerto
	7.01.02.09	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.09.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 Lembaga	1.680	4 Lembaga	1.680	4 Lembaga	0	4 Lembaga	0	5 Lembaga	0	5 Lembaga	0	125,00 %	0,00%	125,00%	0,00%			Kec. Bulak
	7.01.02.10	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.10.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	2.850	4 lembaga	1.950	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Bubutan
	7.01.02.11	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.11.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	2.700	4 lembaga	1.500	4 lembaga	0	4 lembaga	0	5 lembaga	1.200	5 lembaga	1.200	125,00 %	44,44%	125,00%	44,44%			Kec. Wiyung
	7.01.02.12	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.02.12.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					6 lembaga	2.160	6 lembaga	2.160	6 lembaga	0	6 lembaga	0	9 lembaga	0	9 lembaga	0	150,00 %	0,00%	150,00%	0,00%			Kec. Sukomanunggal
	7.01.02.13	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.13.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	1.200	4 lembaga	750	4 lembaga	0	4 lembaga	0	5 lembaga	0	5 lembaga	0	125,00 %	0,00%	125,00%	0,00%			Kec. Dukuh Pakis
	7.01.02.14	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.14.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	6.000	4 lembaga	3.480	4 lembaga	0	4 lembaga	0	5 lembaga	0	5 lembaga	0	125,00 %	0,00%	125,00%	0,00%			Kec. Mulyorejo
	7.01.02.15	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.15.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	8.100	4 lembaga	3.360	4 lembaga	0	4 lembaga	0	5 lembaga	0	5 lembaga	0	125,00 %	0,00%	125,00%	0,00%			Kec. Wonokromo
	7.01.02.16	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.16.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Lembaga Peserta dari seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan Wonocolo					4 Lembaga	7.980	4 Lembaga	1.500	4 Lembaga	0	4 Lembaga	0	4 Lembaga	0	4 Lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Wonocolo
	7.01.02.17	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.17.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	1.750	4 lembaga	750	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Pabean Cantian
	7.01.02.18	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.02.18.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	8.460	4 lembaga	4.860	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Benowo
	7.01.02.19	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.19.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	5.100	4 lembaga	1.680	4 lembaga	0	4 lembaga	0	6 lembaga	960	6 lembaga	960	150,00 %	18,82%	150,00%	18,82%			Kec. Rungkut
	7.01.02.20	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.20.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	5.760	4 lembaga	2.880	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Sambikerep
	7.01.02.21	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.21.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	6.000	4 lembaga	3.000	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Gayungan
	7.01.02.22	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.22.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	4.890	4 lembaga	2.190	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	2.700	4 lembaga	2.700	100,00 %	55,21%	100,00%	55,21%			Kec. Kenjeran
	7.01.02.23	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.23.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	11.400	4 lembaga	360	4 lembaga	0	4 lembaga	0	5 lembaga	3.570	5 lembaga	3.570	125,00 %	31,32%	125,00%	31,32%			Kec. Tenggilis Mejoyo
	7.01.02.24	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.02.24.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	3.450	4 lembaga	780	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Asemrowo
	7.01.02.25	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.25.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	5.970	4 lembaga	3.000	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	2.970	4 lembaga	2.970	100,00 %	49,75%	100,00%	49,75%			Kec. Semampir
	7.01.02.26	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.26.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	6.000	4 lembaga	900	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Genteng
	7.01.02.27	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.27.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan					6 lembaga	7.020	6 lembaga	1.050	6 lembaga	0	6 lembaga	0	7 lembaga	5.970	7 lembaga	5.970	116,67 %	85,04%	116,67%	85,04%			Kec. Krembangan
	7.01.02.28	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.28.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					6 lembaga	4.620	6 lembaga	3.240	6 lembaga	0	6 lembaga	0	11 lembaga	0	11 lembaga	0	183,33 %	0,00%	183,33%	0,00%			Kec. Tandes
	7.01.02.29	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.29.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	11.850	4 lembaga	6.000	4 lembaga	0	4 lembaga	0	5 lembaga	0	5 lembaga	0	125,00 %	0,00%	125,00%	0,00%			Kec. Sukolilo
	7.01.02.30	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.02.30.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	3.750	4 lembaga	1.380	4 lembaga	0	4 lembaga	0	5 lembaga	2.370	5 lembaga	2.370	125,00 %	63,20%	125,00%	63,20%			Kec. Gunung Anyar
	7.01.02.31	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
	7.01.02.31.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	3.000	4 lembaga	3.000	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Tambaksari
	7.01.02.32	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.32.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					73 kali	11.700	25 kali	0	25 kali	3.900	61 kali	5.850	73 kali	1.950	73 kali	1.950	100,00 %	16,67%	100,00%	16,67%			Kec. Gubeng
	7.01.02.33	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.33.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					72 kali	25.920	54 kali	6.480	54 kali	6.480	63 kali	6.480	72 kali	4.320	72 kali	4.320	100,00 %	16,67%	100,00%	16,67%			Kec. Tandes
	7.01.02.34	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.34.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	5.400	40 Kali	1.350	40 Kali	1.350	85 Kali	1.350	116 Kali	1.350	116 Kali	1.350	100,00 %	25,00%	100,00%	25,00%			Kec. Semampir
	7.01.02.35	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.35.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	14.400	56 Kali	3.600	56 Kali	3.600	85 Kali	3.600	116 Kali	3.600	116 Kali	3.600	100,00 %	25,00%	100,00%	25,00%			Kec. Genteng
	7.01.02.36	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.02.36.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					96 Kali	6.300	31 Kali	0	31 Kali	5.100	81 Kali	0	116 Kali	0	116 Kali	0	120,83 %	0,00%	120,83%	0,00%			Kec. Tegalsari
	7.01.02.37	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.37.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	25.920	54 Kali	6.480	54 Kali	6.480	92 Kali	6.480	120 Kali	6.480	120 Kali	6.480	103,45 %	25,00%	103,45%	25,00%			Kec. Sawahan
	7.01.02.38	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.38.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					104 Kali	25.920	72 Kali	12.960	72 Kali	12.960	90 Kali	0	104 Kali	0	104 Kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Lakarsantri
	7.01.02.39	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.39.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					72 kali	8.640	32 kali	2.880	32 kali	5.760	56 kali	0	80 kali	0	80 kali	0	111,11 %	0,00%	111,11%	0,00%			Kec. Tambaksari
	7.01.02.40	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.40.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	10.800	54 Kali	4.320	54 Kali	6.480	87 Kali	0	116 Kali	0	116 Kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Wonokromo
	7.01.02.41	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.41.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					72 kali	14.400	57 kali	2.400	57 kali	4.800	62 kali	2.400	72 kali	4.800	72 kali	4.800	100,00 %	33,33%	100,00%	33,33%			Kec. Kenjeran
	7.01.02.42	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.02.42.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					72 kali	21.930	30 kali	3.600	30 kali	5.400	45 kali	5.400	65 kali	1.800	65 kali	1.800	90,28%	8,21%	90,28%	8,21%			Kec. Benowo
	7.01.02.43	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.43.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					72 kali	23.040	42 kali	0	42 kali	8.640	72 kali	8.640	88 kali	5.760	88 kali	5.760	122,22 %	25,00%	122,22%	25,00%			Kec. Mulyorejo
	7.01.02.44	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.44.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					105 Kali	360	64 Kali	360	64 Kali	0	93 Kali	0	108 Kali	0	108 Kali	0	102,86 %	0,00%	102,86%	0,00%			Kec. Dukuh Pakis
	7.01.02.45	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.45.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					72 kali	21.600	36 kali	5.400	36 kali	5.400	54 kali	5.400	72 kali	5.400	72 kali	5.400	100,00 %	25,00%	100,00%	25,00%			Kec. Krembangan
	7.01.02.46	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.46.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					72 kali	12.254	51 kali	3.240	51 kali	2.400	60 kali	4.530	72 kali	1.980	72 kali	1.980	100,00 %	16,16%	100,00%	16,16%			Kec. Gunung Anyar
	7.01.02.47	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.47.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					72 kali	7.200	50 kali	4.320	50 kali	2.880	59 kali	0	72 kali	0	72 kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Pakal
	7.01.02.48	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.02.48.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					72 kali	9.720	36 kali	3.240	36 kali	3.240	45 kali	3.240	54 kali	0	54 kali	0	75,00%	0,00%	75,00%	0,00%			Kec. Rungkut
	7.01.02.49	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.49.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	8.640	54 Kali	2.160	54 Kali	2.160	83 Kali	2.160	116 Kali	1.440	116 Kali	1.440	100,00 %	16,67%	100,00%	16,67%			Kec. Gayungan
	7.01.02.50	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.50.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					72 kali	12.960	36 kali	3.240	36 kali	3.240	54 kali	3.240	72 kali	2.160	72 kali	2.160	100,00 %	16,67%	100,00%	16,67%			Kec. Asemrowo
	7.01.02.51	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.51.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	2.880	50 Kali	480	50 Kali	960	72 Kali	480	120 Kali	960	120 Kali	960	103,45 %	33,33%	103,45%	33,33%			Kec. Bulak
	7.01.02.52	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.52.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 kali	49.968	58 kali	0	58 kali	0	94 kali	0	137 kali	4.000	137 kali	4.000	118,10 %	8,01%	118,10%	8,01%			Kec. Sukomanunggal
	7.01.02.53	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.53.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	30.100	56 Kali	7.800	56 Kali	7.200	86 Kali	7.200	116 Kali	4.800	116 Kali	4.800	100,00 %	15,95%	100,00%	15,95%			Kec. Simokerto
	7.01.02.54	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.02.54.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					72 kali	5.760	54 kali	0	54 kali	2.880	63 kali	1.440	72 kali	1.440	72 kali	1.440	100,00 %	25,00%	100,00%	25,00%			Kec. Wiyung
	7.01.02.55	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.55.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					105 Kali	25.924	43 Kali	6.120	43 Kali	6.480	84 Kali	6.480	114 Kali	4.320	114 Kali	4.320	108,57 %	16,66%	108,57%	16,66%			Kec. Bubutan
	7.01.02.56	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.56.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					108 Kali	34.125	53 Kali	9.000	53 Kali	9.000	87 Kali	9.000	108 Kali	6.000	108 Kali	6.000	100,00 %	17,58%	100,00%	17,58%			Kec. Wonocolo
	7.01.02.57	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.57.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 kali	5.760	54 kali	960	54 kali	1.440	84 kali	1.440	116 kali	960	116 kali	960	100,00 %	16,67%	100,00%	16,67%			Kec. Sambikerep
	7.01.02.58	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.58.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					72 kali	16.200	62 kali	4.050	62 kali	4.050	74 kali	4.050	97 kali	0	97 kali	0	134,72 %	0,00%	134,72%	0,00%			Kec. Sukolilo
	7.01.02.59	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.59.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					107 Kali	25.484	48 Kali	3.600	48 Kali	1.440	82 Kali	4.320	115 Kali	9.840	115 Kali	9.840	107,48 %	38,61%	107,48%	38,61%			Kec. Jambangan
	7.01.02.60	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.02.60.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	7.680	30 Kali	0	30 Kali	2.880	75 Kali	2.880	116 Kali	1.920	116 Kali	1.920	100,00 %	25,00%	100,00%	25,00%			Kec. Karangpilang
	7.01.02.61	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.61.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					80 kali	2.400	40 kali	480	40 kali	720	61 kali	720	80 kali	480	80 kali	480	100,00 %	20,00%	100,00%	20,00%			Kec. Tenggilis Mejoyo
	7.01.02.62	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																								
	7.01.02.62.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	900	54 Kali	0	54 Kali	0	85 Kali	0	116 Kali	0	116 Kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Pabean Cantian
	7.01.02.63	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																								
	7.01.02.63.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	169.619	2%	24.741	2%	39.615	92,86%	38.951	100%	42.180	100%	42.180	100,00 %	24,87%	100,00%	24,87%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	7.01.02.64	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.64.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					185 lembaga	2.132.550	185 lembaga	310.800	185 lembaga	596.250	186 lembaga	596.250	185 lembaga	403.000	185 lembaga	403.000	100,00 %	18,90%	100,00%	18,90%			Kec. Tenggilis Mejoyo
	7.01.02.65	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.65.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					480 Lembaga	5.438.575	480 Lembaga	802.500	480 Lembaga	1.522.320	500 Lembaga	1.522.320	480 Lembaga	1.026.320	480 Lembaga	1.026.320	100,00 %	18,87%	100,00%	18,87%			Kec. Gubeng
	7.01.02.66	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.66.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					568 Lembaga	6.409.500	568 Lembaga	946.800	568 Lembaga	1.791.030	579 Lembaga	1.791.030	568 Lembaga	1.206.780	568 Lembaga	1.206.780	100,00 %	18,83%	100,00%	18,83%			Kec. Wonokromo
	7.01.02.67	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.67.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					636 Lembaga	7.197.675	636 Lembaga	1.062.150	636 Lembaga	2.012.421	636 Lembaga	2.012.421	636 Lembaga	1.356.421	636 Lembaga	1.356.421	100,00 %	18,85%	100,00%	18,85%			Kec. Semampir



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.02.68	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.68.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					376 Lembaga	4.325.550	376 Lembaga	630.450	376 Lembaga	1.207.499	377 Lembaga	1.207.499	376 Lembaga	815.999	376 Lembaga	815.999	100,00 %	18,86%	100,00%	18,86%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.69	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.69.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					280 Lembaga	3.228.985	280 Lembaga	470.850	280 Lembaga	909.540	281 Lembaga	909.540	280 Lembaga	615.040	280 Lembaga	615.040	100,00 %	19,05%	100,00%	19,05%		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.70	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.70.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					205 Lembaga	2.352.150	200 Lembaga	337.350	200 Lembaga	652.710	202 Lembaga	652.710	205 Lembaga	450.460	205 Lembaga	450.460	100,00 %	19,15%	100,00%	19,15%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.71	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.71.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					323 lembaga	3.674.850	323 lembaga	541.050	323 lembaga	1.028.760	326 lembaga	1.028.760	323 lembaga	693.760	323 lembaga	693.760	100,00 %	18,88%	100,00%	18,88%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.72	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.72.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					356 Lembaga	4.090.225	356 Lembaga	596.850	356 Lembaga	1.141.960	358 Lembaga	1.141.960	356 Lembaga	771.460	356 Lembaga	771.460	100,00 %	18,86%	100,00%	18,86%		Kec. Simokerto	
	7.01.02.73	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.73.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					414 Lembaga	4.684.650	414 Lembaga	690.300	414 Lembaga	1.312.072	423 Lembaga	1.310.422	414 Lembaga	882.922	414 Lembaga	882.922	100,00 %	18,85%	100,00%	18,85%		Kec. Bubutan	
	7.01.02.74	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.74.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					211 lembaga	2.460.750	211 lembaga	355.050	211 lembaga	686.940	213 lembaga	686.940	211 lembaga	465.440	211 lembaga	465.440	100,00 %	18,91%	100,00%	18,91%		Kec. Wiyung	
	7.01.02.75	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.75.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					627 Lembaga	7.118.175	627 Lembaga	1.048.050	627 Lembaga	1.991.520	639 Lembaga	1.991.520	627 Lembaga	1.343.520	627 Lembaga	1.343.520	100,00 %	18,87%	100,00%	18,87%		Kec. Sawahan	
	7.01.02.76	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.76.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					439 lembaga	5.092.375	439 lembaga	737.550	439 lembaga	1.420.268	444 lembaga	1.420.268	439 lembaga	961.018	439 lembaga	961.018	100,00 %	18,87%	100,00%	18,87%		Kec. Sukolilo	



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.02.77	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.77.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					220 Lembaga	2.528.100	220 Lembaga	369.150	220 Lembaga	706.890	221 Lembaga	706.890	220 Lembaga	477.640	220 Lembaga	477.640	100,00 %	18,89%	100,00%	18,89%		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.78	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.78.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					365 Lembaga	4.185.600	365 Lembaga	611.700	365 Lembaga	1.170.180	367 Lembaga	1.170.180	365 Lembaga	790.680	365 Lembaga	790.680	100,00 %	18,89%	100,00%	18,89%		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.79	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.79.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					260 Lembaga	2.999.700	260 Lembaga	436.350	260 Lembaga	838.170	271 Lembaga	838.170	260 Lembaga	566.920	260 Lembaga	566.920	100,00 %	18,90%	100,00%	18,90%		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.80	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.80.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					431 Lembaga	4.865.700	430 Lembaga	720.000	430 Lembaga	1.361.422	532 Lembaga	1.361.422	431 Lembaga	916.922	431 Lembaga	916.922	100,00 %	18,84%	100,00%	18,84%		Kec. Krembangan	
	7.01.02.81	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.81.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					749 lembaga	8.461.050	749 lembaga	1.251.150	749 lembaga	2.366.998	749 lembaga	2.366.998	749 lembaga	1.594.498	749 lembaga	1.594.498	100,00 %	18,85%	100,00%	18,85%		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.82	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.82.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					197 Lembaga	2.289.325	197 Lembaga	331.350	197 Lembaga	639.300	206 Lembaga	637.800	197 Lembaga	431.550	197 Lembaga	431.550	100,00 %	18,85%	100,00%	18,85%		Kec. Gayungan	
	7.01.02.83	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.83.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					139 lembaga	1.592.100	139 lembaga	233.250	139 lembaga	445.470	142 lembaga	445.470	139 lembaga	300.720	139 lembaga	300.720	100,00 %	18,89%	100,00%	18,89%		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.84	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.84.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					488 lembaga	5.649.225	488 lembaga	819.000	488 lembaga	1.577.340	493 lembaga	1.577.340	488 lembaga	1.067.840	488 lembaga	1.067.840	100,00 %	18,90%	100,00%	18,90%		Kec. Rungkut	
	7.01.02.85	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.85.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					364 Lembaga	4.249.050	364 Lembaga	406.350	364 Lembaga	1.388.510	377 Lembaga	1.185.510	364 Lembaga	803.760	364 Lembaga	803.760	100,00 %	18,92%	100,00%	18,92%		Kec. Genteng	



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.02.86	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.86.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					217 lembaga	2.496.625	217 lembaga	364.200	217 lembaga	697.153	217 lembaga	697.153	217 lembaga	470.903	217 lembaga	470.903	100,00 %	18,86%	100,00%	18,86%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.87	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.87.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					229 Lembaga	2.652.925	229 Lembaga	384.750	229 Lembaga	740.940	229 Lembaga	740.940	229 Lembaga	501.440	229 Lembaga	501.440	100,00 %	18,90%	100,00%	18,90%		Kec. Pakal	
	7.01.02.88	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.88.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					168 Lembaga	1.957.200	168 Lembaga	282.900	168 Lembaga	545.999	169 Lembaga	545.999	168 Lembaga	369.499	168 Lembaga	369.499	100,00 %	18,88%	100,00%	18,88%		Kec. Jambangan	
	7.01.02.89	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.89.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					188 Lembaga	2.170.675	188 Lembaga	315.900	188 Lembaga	606.660	192 Lembaga	606.660	188 Lembaga	410.160	188 Lembaga	410.160	100,00 %	18,90%	100,00%	18,90%		Kec. Benowo	
	7.01.02.90	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.90.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					195 Lembaga	2.273.250	195 Lembaga	328.200	195 Lembaga	633.922	203 Lembaga	633.922	195 Lembaga	429.172	195 Lembaga	429.172	100,00 %	18,88%	100,00%	18,88%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.91	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.91.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					346 Lembaga	4.010.575	346 Lembaga	581.550	346 Lembaga	1.120.410	349 Lembaga	1.120.410	346 Lembaga	758.160	346 Lembaga	758.160	100,00 %	18,90%	100,00%	18,90%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.02.92	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.92.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					158 Lembaga	1.822.200	158 Lembaga	265.650	158 Lembaga	509.610	163 Lembaga	509.610	158 Lembaga	344.360	158 Lembaga	344.360	100,00 %	18,90%	100,00%	18,90%		Kec. Bulak	
	7.01.02.93	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.93.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					371 lembaga	4.271.550	371 lembaga	622.500	371 lembaga	1.193.910	377 lembaga	1.193.910	371 lembaga	807.160	371 lembaga	807.160	100,00 %	18,90%	100,00%	18,90%		Kec. Tandes	
	7.01.02.94	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																								
	7.01.02.94.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					460 lembaga	5.135.875	460 lembaga	764.850	460 lembaga	1.437.614	482 lembaga	1.438.614	460 lembaga	967.114	460 lembaga	967.114	100,00 %	18,83%	100,00%	18,83%		Kec. Kenjeran	



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan daerah	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			266.415.807		176.285.479		550.709.030		42.620.804		35.084.391		33.380.406		24.651.857		3.741.225.867		679,35 %		3.917.511.346		479,43 %	
			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100%		50,87 %		100%		0%		0%		16,57 %		29,36%		31,74%		31,74 %		31,74%		31,74 %		-
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100%		98,39 %		100%		0%		49,06 %		74,73 %		99,66%		99,66%		99,66 %		99,66%		99,66 %		-
	7.01.03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																								
	7.01.03.01.01	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Pengembangan Kampung Edukasi					3 kali	6.300	2 kali	0	2 kali	0	3 kali	0	3 kali	0	3 kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Benowo
	7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.02.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 lembaga	781.959	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	7 lembaga	0	7 lembaga	0	116,67 %	0,00%	116,67%	0,00%			Kec. Pakal
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 lembaga	3.594.499	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	1 lembaga	0	1 lembaga	0	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%			Kec. Pakal
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 lembaga	939.119	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	7 lembaga	0	7 lembaga	0	140,00 %	0,00%	140,00%	0,00%			Kec. Pakal
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	1.066.867	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	3 lembaga	0	3 lembaga	0	37,50%	0,00%	37,50%	0,00%			Kec. Pakal
	7.01.03.02.05	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	1.073.362	9 lembaga	259.364	9 lembaga	205.528	9 lembaga	213.289	9 lembaga	127.199	9 lembaga	127.199	112,50 %	11,85%	112,50%	11,85%			Kec. Pakal
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 lembaga	987.181	6 lembaga	198.953	6 lembaga	159.599	6 lembaga	171.667	8 lembaga	106.129	8 lembaga	106.129	133,33 %	10,75%	133,33%	10,75%			Kec. Pakal
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 lembaga	1.122.607	5 lembaga	205.139	5 lembaga	157.269	5 lembaga	131.088	8 lembaga	115.406	8 lembaga	115.406	160,00 %	10,28%	160,00%	10,28%			Kec. Pakal
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					14 lembaga	1.809.454	14 lembaga	295.861	14 lembaga	240.555	14 lembaga	265.304	14 lembaga	136.249	14 lembaga	136.249	100,00 %	7,53%	100,00%	7,53%			Kec. Pakal
	7.01.03.03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.03.03.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 lembaga	4.071.803	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sambikerep
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 lembaga	513.309	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sambikerep
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 lembaga	996.795	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	7 lembaga	0	7 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Sambikerep
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 lembaga	4.629.029	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sambikerep
	7.01.03.03.05	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 lembaga	933.547	14 lembaga	213.354	14 lembaga	172.203	14 lembaga	171.378	14 lembaga	114.767	14 lembaga	114.767	116,67 %	12,29%	116,67%	12,29%			Kec. Sambikerep
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 lembaga	766.249	7 lembaga	176.687	7 lembaga	122.787	7 lembaga	124.907	7 lembaga	74.968	7 lembaga	74.968	100,00 %	9,78%	100,00%	9,78%			Kec. Sambikerep
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 lembaga	570.759	4 lembaga	132.987	4 lembaga	104.242	4 lembaga	101.764	4 lembaga	63.919	4 lembaga	63.919	100,00 %	11,20%	100,00%	11,20%			Kec. Sambikerep
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 lembaga	755.508	7 lembaga	179.393	7 lembaga	141.734	7 lembaga	130.841	7 lembaga	82.343	7 lembaga	82.343	100,00 %	10,90%	100,00%	10,90%			Kec. Sambikerep
	7.01.03.04	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.04.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 lembaga	1.488.290	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	1 lembaga	0	1 lembaga	0	14,29%	0,00%	14,29%	0,00%			Kec. Tandes
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 lembaga	832.766	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	6 lembaga	0	6 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Tandes
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					14 lembaga	4.342.101	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	15 lembaga	0	15 lembaga	0	107,14 %	0,00%	107,14%	0,00%			Kec. Tandes
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	475.608	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	8 lembaga	0	8 lembaga	0	88,89%	0,00%	88,89%	0,00%			Kec. Tandes
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 lembaga	850.217	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	1 lembaga	0	1 lembaga	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%			Kec. Tandes



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	1.535.908	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	9 lembaga	0	9 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Tandes
	7.01.03.04.07	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	1.709.415	9 lembaga	273.082	9 lembaga	216.967	18 lembaga	216.966	10 lembaga	144.983	10 lembaga	144.983	111,11 %	8,48%	111,11%	8,48%			Kec. Tandes
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 lembaga	576.887	7 lembaga	154.211	7 lembaga	156.124	7 lembaga	143.125	7 lembaga	50.015	7 lembaga	50.015	100,00 %	8,67%	100,00%	8,67%			Kec. Tandes
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					15 lembaga	2.911.799	15 lembaga	399.302	15 lembaga	309.386	15 lembaga	299.910	15 lembaga	198.353	15 lembaga	198.353	100,00 %	6,81%	100,00%	6,81%			Kec. Tandes
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	1.648.246	9 lembaga	180.175	9 lembaga	141.705	9 lembaga	137.451	12 lembaga	94.195	12 lembaga	94.195	133,33 %	5,71%	133,33%	5,71%			Kec. Tandes
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 lembaga	916.460	4 lembaga	172.371	4 lembaga	137.017	6 lembaga	153.825	6 lembaga	92.098	6 lembaga	92.098	150,00 %	10,05%	150,00%	10,05%			Kec. Tandes
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 lembaga	1.160.010	7 lembaga	198.169	7 lembaga	158.110	14 lembaga	158.078	9 lembaga	106.434	9 lembaga	106.434	128,57 %	9,18%	128,57%	9,18%			Kec. Tandes
	7.01.03.05	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.05.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	2.276.076	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sukolilo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					13 lembaga	3.422.922	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sukolilo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 lembaga	635.636	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sukolilo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 lembaga	1.463.621	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	1 lembaga	0	1 lembaga	0	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%			Kec. Sukolilo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	1.107.842	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sukolilo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	1.781.811	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sukolilo



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	2.439.759	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sukolilo
	7.01.03.05.08	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 lembaga	1.391.720	11 lembaga	173.329	11 lembaga	138.013	11 lembaga	138.896	11 lembaga	87.479	11 lembaga	87.479	100,00%	6,29%	100,00%	6,29%			Kec. Sukolilo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	1.173.254	9 lembaga	175.143	9 lembaga	139.505	9 lembaga	136.214	9 lembaga	89.553	9 lembaga	89.553	100,00%	7,63%	100,00%	7,63%			Kec. Sukolilo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					13 lembaga	558.904	13 lembaga	108.735	13 lembaga	83.374	13 lembaga	60.261	13 lembaga	84.467	13 lembaga	84.467	100,00%	15,11%	100,00%	15,11%			Kec. Sukolilo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	1.338.408	9 lembaga	319.546	9 lembaga	252.178	9 lembaga	244.056	9 lembaga	81.733	9 lembaga	81.733	100,00%	6,11%	100,00%	6,11%			Kec. Sukolilo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 lembaga	2.268.496	10 lembaga	167.272	10 lembaga	225.789	10 lembaga	168.407	10 lembaga	106.305	10 lembaga	106.305	100,00%	4,69%	100,00%	4,69%			Kec. Sukolilo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 lembaga	1.242.787	6 lembaga	180.761	6 lembaga	136.034	10 lembaga	150.694	7 lembaga	49.757	7 lembaga	49.757	140,00%	4,00%	140,00%	4,00%			Kec. Sukolilo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 lembaga	881.748	7 lembaga	141.775	7 lembaga	169.312	7 lembaga	139.440	7 lembaga	60.584	7 lembaga	60.584	100,00%	6,87%	100,00%	6,87%			Kec. Sukolilo
	7.01.03.06	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.06.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	2.625.047	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	13 Lembaga	0	13 Lembaga	0	108,33%	0,00%	108,33%	0,00%			Kec. Semampir
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					16 Lembaga	7.340.842	16 Lembaga	0	16 Lembaga	0	0 Lembaga	0	16 Lembaga	0	16 Lembaga	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Semampir
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					17 Lembaga	3.652.820	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Semampir
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	2.448.587	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Semampir
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					14 Lembaga	3.922.430	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Semampir



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.03.06.06	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					16 Lembaga	2.781.884	16 Lembaga	728.140	16 Lembaga	565.300	16 Lembaga	382.882	16 Lembaga	558.353	16 Lembaga	558.353	100,00 %	20,07%	100,00%	20,07%			Kec. Semampir
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					14 Lembaga	3.066.279	14 Lembaga	373.473	14 Lembaga	381.869	14 Lembaga	386.020	14 Lembaga	253.635	14 Lembaga	253.635	100,00 %	8,27%	100,00%	8,27%			Kec. Semampir
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	3.301.341	11 Lembaga	617.581	11 Lembaga	498.393	11 Lembaga	503.843	11 Lembaga	330.704	11 Lembaga	330.704	100,00 %	10,02%	100,00%	10,02%			Kec. Semampir
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	3.184.211	12 Lembaga	607.111	12 Lembaga	484.614	12 Lembaga	320.798	13 Lembaga	305.673	13 Lembaga	305.673	108,33 %	9,60%	108,33%	9,60%			Kec. Semampir
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					17 Lembaga	1.527.614	17 Lembaga	255.229	17 Lembaga	259.968	34 Lembaga	306.815	17 Lembaga	101.502	17 Lembaga	101.502	100,00 %	6,64%	100,00%	6,64%			Kec. Semampir
	7.01.03.07	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.07.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 lembaga	2.576.265	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	5 lembaga	0	5 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Krembangan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4.103.973	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	6 Lembaga	0	6 Lembaga	0	66,67%	0,00%	66,67%	0,00%			Kec. Krembangan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					13 lembaga	3.110.962	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	6 lembaga	7.568	6 lembaga	7.568	46,15%	0,24%	46,15%	0,24%			Kec. Krembangan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 lembaga	3.705.457	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	8 lembaga	0	8 lembaga	0	114,29 %	0,00%	114,29%	0,00%			Kec. Krembangan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	3.072.504	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Krembangan
	7.01.03.07.06	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	378.404	8 lembaga	100.415	8 lembaga	50.807	16 lembaga	99.591	8 lembaga	63.271	8 lembaga	63.271	100,00 %	16,72%	100,00%	16,72%			Kec. Krembangan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	1.748.190	9 Lembaga	406.109	9 Lembaga	308.727	9 Lembaga	356.983	9 Lembaga	123.228	9 Lembaga	123.228	100,00 %	7,05%	100,00%	7,05%			Kec. Krembangan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 lembaga	1.857.469	5 lembaga	571.801	5 lembaga	434.687	5 lembaga	457.514	5 lembaga	157.175	5 lembaga	157.175	100,00 %	8,46%	100,00%	8,46%			Kec. Krembangan



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					13 lembaga	990.676	13 lembaga	259.312	13 lembaga	204.948	13 lembaga	150.476	13 lembaga	137.448	13 lembaga	137.448	100,00 %	13,87%	100,00%	13,87%			Kec. Krembangan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	1.300.706	8 lembaga	417.532	8 lembaga	220.098	8 lembaga	328.411	8 lembaga	252.836	8 lembaga	252.836	100,00 %	19,44%	100,00%	19,44%			Kec. Krembangan
	7.01.03.08	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.08.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	1.271.407	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	11 Lembaga	0	11 Lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Genteng
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	1.938.790	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	11 Lembaga	17.160	11 Lembaga	17.160	100,00 %	0,89%	100,00%	0,89%			Kec. Genteng
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					16 Lembaga	2.479.012	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	16 Lembaga	6.050	16 Lembaga	6.050	100,00 %	0,24%	100,00%	0,24%			Kec. Genteng
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	2.497.052	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	8 Lembaga	0	8 Lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Genteng
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	1.304.743	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	12 Lembaga	61.111	12 Lembaga	61.111	100,00 %	4,68%	100,00%	4,68%			Kec. Genteng
	7.01.03.08.06	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					15 Lembaga	2.082.679	15 Lembaga	413.134	15 Lembaga	326.944	15 Lembaga	338.756	15 Lembaga	244.532	15 Lembaga	244.532	100,00 %	11,74%	100,00%	11,74%			Kec. Genteng
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	1.225.869	11 Lembaga	116.412	11 Lembaga	93.203	11 Lembaga	92.545	11 Lembaga	65.444	11 Lembaga	65.444	100,00 %	5,34%	100,00%	5,34%			Kec. Genteng
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	2.211.872	5 Lembaga	371.771	5 Lembaga	290.465	5 Lembaga	305.751	12 Lembaga	217.470	12 Lembaga	217.470	100,00 %	9,83%	100,00%	9,83%			Kec. Genteng
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	862.293	8 Lembaga	224.886	8 Lembaga	179.312	8 Lembaga	186.003	8 Lembaga	136.142	8 Lembaga	136.142	100,00 %	15,79%	100,00%	15,79%			Kec. Genteng
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	1.897.148	12 Lembaga	445.165	12 Lembaga	359.922	12 Lembaga	367.196	12 Lembaga	256.486	12 Lembaga	256.486	100,00 %	13,52%	100,00%	13,52%			Kec. Genteng
	7.01.03.09	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.09.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 lembaga	3.954.860	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	8 lembaga	0	8 lembaga	0	72,73%	0,00%	72,73%	0,00%			Kec. Tambaksari



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 lembaga	3.629.721	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Tambaksari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 lembaga	3.345.960	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	5 lembaga	0	5 lembaga	0	45,45%	0,00%	45,45%	0,00%			Kec. Tambaksari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	3.928.984	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Tambaksari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 lembaga	3.399.975	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	7 lembaga	0	7 lembaga	0	140,00 %	0,00%	140,00%	0,00%			Kec. Tambaksari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 lembaga	4.151.945	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Tambaksari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	2.501.912	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Tambaksari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	2.083.750	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Tambaksari
	7.01.03.09.09	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 lembaga	2.579.302	11 lembaga	294.202	11 lembaga	387.714	11 lembaga	306.744	11 lembaga	173.236	11 lembaga	173.236	100,00 %	6,72%	100,00%	6,72%			Kec. Tambaksari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 lembaga	435.321	7 lembaga	105.339	7 lembaga	125.484	7 lembaga	124.882	7 lembaga	60.883	7 lembaga	60.883	100,00 %	13,99%	100,00%	13,99%			Kec. Tambaksari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	1.111.770	9 lembaga	301.566	9 lembaga	232.831	9 lembaga	218.539	9 lembaga	170.001	9 lembaga	170.001	100,00 %	15,29%	100,00%	15,29%			Kec. Tambaksari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 lembaga	2.572.654	12 lembaga	437.969	12 lembaga	349.416	12 lembaga	290.646	12 lembaga	292.767	12 lembaga	292.767	109,09 %	11,38%	109,09%	11,38%			Kec. Tambaksari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	2.150.385	9 lembaga	499.842	9 lembaga	677.943	9 lembaga	541.650	9 lembaga	343.154	9 lembaga	343.154	100,00 %	15,96%	100,00%	15,96%			Kec. Tambaksari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	1.940.208	8 lembaga	394.767	8 lembaga	504.772	8 lembaga	288.934	8 lembaga	417.871	8 lembaga	417.871	100,00 %	21,54%	100,00%	21,54%			Kec. Tambaksari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 lembaga	2.202.270	11 lembaga	410.286	11 lembaga	329.828	11 lembaga	365.225	11 lembaga	209.429	11 lembaga	209.429	100,00 %	9,51%	100,00%	9,51%			Kec. Tambaksari



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 lembaga	1.060.193	12 lembaga	304.388	12 lembaga	213.429	12 lembaga	225.826	12 lembaga	138.718	12 lembaga	138.718	100,00 %	13,08%	100,00%	13,08%			Kec. Tambaksari
	7.01.03.10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.10.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	2.102.631	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	4 Lembaga	0	4 Lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Gayungan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	2.264.990	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	8 Lembaga	0	8 Lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Gayungan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	1.437.238	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	9 Lembaga	0	9 Lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Gayungan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	1.768.928	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Gayungan
	7.01.03.10.05	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	390.391	8 Lembaga	67.780	8 Lembaga	71.016	8 Lembaga	64.011	8 Lembaga	43.579	8 Lembaga	43.579	100,00 %	11,16%	100,00%	11,16%			Kec. Gayungan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	408.525	9 Lembaga	93.654	9 Lembaga	121.016	9 Lembaga	64.226	9 Lembaga	88.426	9 Lembaga	88.426	100,00 %	21,65%	100,00%	21,65%			Kec. Gayungan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	741.740	4 Lembaga	218.572	4 Lembaga	172.537	4 Lembaga	117.256	7 Lembaga	165.242	7 Lembaga	165.242	100,00 %	22,28%	100,00%	22,28%			Kec. Gayungan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	483.574	6 Lembaga	81.047	6 Lembaga	78.064	6 Lembaga	47.170	7 Lembaga	45.218	7 Lembaga	45.218	116,67 %	9,35%	116,67%	9,35%			Kec. Gayungan
	7.01.03.11	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.11.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	566.669	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Jambangan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	2.576.573	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Jambangan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	1.064.340	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	8 Lembaga	0	8 Lembaga	0	114,29 %	0,00%	114,29%	0,00%			Kec. Jambangan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	954.959	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	2 Lembaga	0	2 Lembaga	0	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%			Kec. Jambangan



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.03.11.05	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	755.073	7 Lembaga	207.193	7 Lembaga	133.073	7 Lembaga	134.766	7 Lembaga	47.748	7 Lembaga	47.748	100,00 %	6,32%	100,00%	6,32%			Kec. Jambangan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	683.438	4 Lembaga	225.639	4 Lembaga	162.750	4 Lembaga	109.201	4 Lembaga	109.731	4 Lembaga	109.731	100,00 %	16,06%	100,00%	16,06%			Kec. Jambangan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	1.108.002	3 Lembaga	315.381	3 Lembaga	232.379	3 Lembaga	153.074	3 Lembaga	147.508	3 Lembaga	147.508	100,00 %	13,31%	100,00%	13,31%			Kec. Jambangan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	694.116	12 Lembaga	190.871	12 Lembaga	131.099	12 Lembaga	91.530	12 Lembaga	83.053	12 Lembaga	83.053	100,00 %	11,97%	100,00%	11,97%			Kec. Jambangan
	7.01.03.12	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.12.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 lembaga	232.534	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	1 lembaga	0	1 lembaga	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%			Kec. Asemrowo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 lembaga	246.714	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	1 lembaga	0	1 lembaga	0	16,67%	0,00%	16,67%	0,00%			Kec. Asemrowo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	2.745.931	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Asemrowo
	7.01.03.12.04	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 lembaga	971.760	6 lembaga	200.804	6 lembaga	108.622	12 lembaga	159.227	6 lembaga	152.613	6 lembaga	152.613	100,00 %	15,70%	100,00%	15,70%			Kec. Asemrowo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	2.208.137	8 lembaga	464.019	8 lembaga	347.377	16 lembaga	351.786	8 lembaga	199.489	8 lembaga	199.489	100,00 %	9,03%	100,00%	9,03%			Kec. Asemrowo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 lembaga	806.252	5 lembaga	235.335	5 lembaga	178.078	5 lembaga	117.085	5 lembaga	170.709	5 lembaga	170.709	125,00 %	21,17%	125,00%	21,17%			Kec. Asemrowo
	7.01.03.13	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.13.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	3.150.937	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Tegalsari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					14 Lembaga	3.397.154	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Tegalsari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	1.402.401	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	4 Lembaga	0	4 Lembaga	0	57,14%	0,00%	57,14%	0,00%			Kec. Tegalsari



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	1.712.318	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Tegalsari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	2.865.456	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Tegalsari
	7.01.03.13.06	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	1.366.578	10 Lembaga	405.873	10 Lembaga	312.760	10 Lembaga	207.259	10 Lembaga	282.596	10 Lembaga	282.596	100,00%	20,68%	100,00%	20,68%			Kec. Tegalsari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	1.790.273	11 Lembaga	356.605	11 Lembaga	274.442	11 Lembaga	239.361	11 Lembaga	255.463	11 Lembaga	255.463	100,00%	14,27%	100,00%	14,27%			Kec. Tegalsari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	2.028.425	7 Lembaga	496.945	7 Lembaga	379.925	7 Lembaga	264.361	7 Lembaga	381.564	7 Lembaga	381.564	100,00%	18,81%	100,00%	18,81%			Kec. Tegalsari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	1.174.724	6 Lembaga	341.220	6 Lembaga	269.227	6 Lembaga	230.022	6 Lembaga	148.271	6 Lembaga	148.271	100,00%	12,62%	100,00%	12,62%			Kec. Tegalsari
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					14 Lembaga	1.086.098	14 Lembaga	303.358	14 Lembaga	242.021	14 Lembaga	184.724	14 Lembaga	235.535	14 Lembaga	235.535	100,00%	21,69%	100,00%	21,69%			Kec. Tegalsari
	7.01.03.14	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.14.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 lembaga	4.002.165	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Rungkut
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 lembaga	1.405.307	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Rungkut
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					13 lembaga	989.553	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Rungkut
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 lembaga	2.751.220	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Rungkut
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					15 lembaga	4.440.293	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	5 lembaga	29.095	5 lembaga	29.095	33,33%	0,66%	33,33%	0,66%			Kec. Rungkut
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					15 lembaga	1.701.480	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	1 lembaga	0	1 lembaga	0	6,67%	0,00%	6,67%	0,00%			Kec. Rungkut



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.03.14.07	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					15 lembaga	1.584.375	15 lembaga	242.514	15 lembaga	164.545	15 lembaga	165.269	15 lembaga	108.206	15 lembaga	108.206	100,00 %	6,83%	100,00%	6,83%			Kec. Rungkut
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					15 lembaga	1.472.020	16 lembaga	264.504	16 lembaga	185.076	16 lembaga	185.100	16 lembaga	123.069	16 lembaga	123.069	106,67 %	8,36%	106,67%	8,36%			Kec. Rungkut
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 lembaga	1.967.259	12 lembaga	185.962	12 lembaga	142.378	12 lembaga	145.577	12 lembaga	104.124	12 lembaga	104.124	100,00 %	5,29%	100,00%	5,29%			Kec. Rungkut
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 lembaga	703.291	10 lembaga	211.864	10 lembaga	157.682	10 lembaga	98.422	11 lembaga	132.542	11 lembaga	132.542	110,00 %	18,85%	110,00%	18,85%			Kec. Rungkut
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 lembaga	1.236.672	10 lembaga	343.229	10 lembaga	257.166	10 lembaga	269.119	11 lembaga	186.400	11 lembaga	186.400	110,00 %	15,07%	110,00%	15,07%			Kec. Rungkut
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					13 lembaga	944.576	13 lembaga	220.179	13 lembaga	167.123	13 lembaga	160.791	17 lembaga	108.997	17 lembaga	108.997	130,77 %	11,54%	130,77%	11,54%			Kec. Rungkut
	7.01.03.15	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.15.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	1.317.835	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sawahan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	1.737.507	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	7 Lembaga	47.121	7 Lembaga	47.121	100,00 %	2,71%	100,00%	2,71%			Kec. Sawahan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	3.349.424	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sawahan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					14 Lembaga	2.492.421	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sawahan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	1.952.794	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sawahan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					18 Lembaga	2.025.769	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sawahan
	7.01.03.15.07	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4.253.006	9 Lembaga	681.554	9 Lembaga	534.126	9 Lembaga	497.642	9 Lembaga	414.335	9 Lembaga	414.335	100,00 %	9,74%	100,00%	9,74%			Kec. Sawahan



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					14 Lembaga	4.878.630	24 Lembaga	527.554	24 Lembaga	536.868	24 Lembaga	331.352	24 Lembaga	451.702	24 Lembaga	451.702	171,43 %	9,26%	171,43%	9,26%			Kec. Sawahan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	2.055.720	7 Lembaga	423.004	7 Lembaga	329.967	7 Lembaga	341.245	7 Lembaga	224.495	7 Lembaga	224.495	100,00 %	10,92%	100,00%	10,92%			Kec. Sawahan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	2.207.914	10 Lembaga	384.836	10 Lembaga	311.334	11 Lembaga	221.219	11 Lembaga	302.482	11 Lembaga	302.482	110,00 %	13,70%	110,00%	13,70%			Kec. Sawahan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	2.323.683	12 Lembaga	405.849	12 Lembaga	317.508	21 Lembaga	334.481	12 Lembaga	224.161	12 Lembaga	224.161	100,00 %	9,65%	100,00%	9,65%			Kec. Sawahan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					18 Lembaga	5.379.671	18 Lembaga	166.165	18 Lembaga	196.266	18 Lembaga	168.292	18 Lembaga	164.748	18 Lembaga	164.748	100,00 %	3,06%	100,00%	3,06%			Kec. Sawahan
	7.01.03.16	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.16.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	1.352.689	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Lakarsantri
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	813.964	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	5 Lembaga	0	5 Lembaga	0	5 Lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Lakarsantri
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	19.220	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Lakarsantri
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	445.173	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Lakarsantri
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	2.151.500	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Lakarsantri
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	134.713	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Lakarsantri
	7.01.03.16.07	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	1.304.615	8 Lembaga	277.932	8 Lembaga	365.532	8 Lembaga	199.842	8 Lembaga	264.414	8 Lembaga	264.414	114,29 %	20,27%	114,29%	20,27%			Kec. Lakarsantri
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	862.891	5 Lembaga	153.615	5 Lembaga	158.867	5 Lembaga	180.172	15 Lembaga	136.438	15 Lembaga	136.438	300,00 %	15,81%	300,00%	15,81%			Kec. Lakarsantri



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	499.559	5 Lembaga	95.025	5 Lembaga	124.168	5 Lembaga	72.814	5 Lembaga	73.028	5 Lembaga	73.028	100,00 %	14,62%	100,00%	14,62%			Kec. Lakarsantri
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	885.925	4 Lembaga	265.630	4 Lembaga	202.196	8 Lembaga	197.954	4 Lembaga	129.863	4 Lembaga	129.863	100,00 %	14,66%	100,00%	14,66%			Kec. Lakarsantri
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	545.914	3 Lembaga	167.327	3 Lembaga	125.345	3 Lembaga	110.655	7 Lembaga	96.485	7 Lembaga	96.485	233,33 %	17,67%	233,33%	17,67%			Kec. Lakarsantri
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	1.221.701	3 Lembaga	382.467	3 Lembaga	301.529	3 Lembaga	310.697	7 Lembaga	201.417	7 Lembaga	201.417	233,33 %	16,49%	233,33%	16,49%			Kec. Lakarsantri
	7.01.03.17	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.17.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 lembaga	434.225	11 lembaga	0	11 lembaga	0	11 lembaga	0	11 lembaga	0	11 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Gubeng
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	1.756.854	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	8 lembaga	0	8 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Gubeng
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 lembaga	1.906.016	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	3 lembaga	0	3 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Gubeng
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 lembaga	5.122.076	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Gubeng
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	2.337.197	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	8 lembaga	0	8 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Gubeng
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	2.054.865	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	8 lembaga	0	8 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Gubeng
	7.01.03.17.07	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 lembaga	4.373.422	11 lembaga	219.728	11 lembaga	186.084	11 lembaga	149.182	11 lembaga	170.449	11 lembaga	170.449	100,00 %	3,90%	100,00%	3,90%			Kec. Gubeng
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	1.465.156	8 lembaga	267.422	8 lembaga	206.714	8 lembaga	217.994	8 lembaga	134.998	8 lembaga	134.998	100,00 %	9,21%	100,00%	9,21%			Kec. Gubeng
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 lembaga	819.873	3 lembaga	220.918	3 lembaga	167.852	6 lembaga	163.461	3 lembaga	105.505	3 lembaga	105.505	100,00 %	12,87%	100,00%	12,87%			Kec. Gubeng



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					13 lembaga	1.795.209	13 lembaga	345.175	13 lembaga	263.875	13 lembaga	275.380	13 lembaga	178.749	13 lembaga	178.749	100,00 %	9,96%	100,00%	9,96%			Kec. Gubeng
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	733.584	8 lembaga	220.164	8 lembaga	165.766	8 lembaga	190.112	8 lembaga	108.644	8 lembaga	108.644	100,00 %	14,81%	100,00%	14,81%			Kec. Gubeng
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	2.363.917	8 lembaga	186.881	8 lembaga	148.399	8 lembaga	157.602	8 lembaga	98.051	8 lembaga	98.051	100,00 %	4,15%	100,00%	4,15%			Kec. Gubeng
	7.01.03.18	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.18.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	2.325.306	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	6 Lembaga	0	6 Lembaga	0	60,00%	0,00%	60,00%	0,00%			Kec. Pabean Cantian
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	1.390.623	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%			Kec. Pabean Cantian
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	2.414.966	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	3 Lembaga	0	3 Lembaga	0	37,50%	0,00%	37,50%	0,00%			Kec. Pabean Cantian
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	2.416.586	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Pabean Cantian
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	1.224.722	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	6 Lembaga	0	6 Lembaga	0	60,00%	0,00%	60,00%	0,00%			Kec. Pabean Cantian
	7.01.03.18.06	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	1.198.156	10 Lembaga	243.534	10 Lembaga	192.088	10 Lembaga	192.519	10 Lembaga	133.532	10 Lembaga	133.532	100,00 %	11,14%	100,00%	11,14%			Kec. Pabean Cantian
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	824.406	10 Lembaga	184.193	10 Lembaga	145.693	10 Lembaga	148.104	10 Lembaga	102.272	10 Lembaga	102.272	100,00 %	12,41%	100,00%	12,41%			Kec. Pabean Cantian
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	854.405	8 Lembaga	191.183	8 Lembaga	154.025	8 Lembaga	158.498	8 Lembaga	107.726	8 Lembaga	107.726	100,00 %	12,61%	100,00%	12,61%			Kec. Pabean Cantian
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	2.820.033	10 Lembaga	652.034	10 Lembaga	537.728	10 Lembaga	521.873	10 Lembaga	336.529	10 Lembaga	336.529	100,00 %	11,93%	100,00%	11,93%			Kec. Pabean Cantian
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	3.441.056	10 Lembaga	370.228	10 Lembaga	344.723	10 Lembaga	347.309	10 Lembaga	235.794	10 Lembaga	235.794	100,00 %	6,85%	100,00%	6,85%			Kec. Pabean Cantian
	7.01.03.19	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.03.19.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	1.514.055	7 Lembaga	0	7 Lembaga	9.240	7 Lembaga	0	7 Lembaga	0	7 Lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Bulak
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	575.755	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	4 Lembaga	123.869	4 Lembaga	123.869	133,33 %	21,51%	133,33%	21,51%			Kec. Bulak
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	2.589.715	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Bulak
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	103.812	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Bulak
	7.01.03.19.05	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	828.523	7 Lembaga	248.420	7 Lembaga	193.671	7 Lembaga	198.239	7 Lembaga	128.344	7 Lembaga	128.344	100,00 %	15,49%	100,00%	15,49%			Kec. Bulak
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	964.545	3 Lembaga	290.602	3 Lembaga	227.256	3 Lembaga	222.611	3 Lembaga	145.331	3 Lembaga	145.331	100,00 %	15,07%	100,00%	15,07%			Kec. Bulak
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	790.499	3 Lembaga	244.371	3 Lembaga	191.407	3 Lembaga	189.917	3 Lembaga	124.491	3 Lembaga	124.491	100,00 %	15,75%	100,00%	15,75%			Kec. Bulak
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	865.967	7 Lembaga	247.488	7 Lembaga	205.653	7 Lembaga	199.958	7 Lembaga	133.072	7 Lembaga	133.072	100,00 %	15,37%	100,00%	15,37%			Kec. Bulak
	7.01.03.20	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.20.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	1.486.029	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	9 Lembaga	3.520	9 Lembaga	3.520	100,00 %	0,24%	100,00%	0,24%			Kec. Wonokromo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	4.354.560	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	12 Lembaga	9.240	12 Lembaga	9.240	100,00 %	0,21%	100,00%	0,21%			Kec. Wonokromo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	3.303.824	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Wonokromo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	2.627.802	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Wonokromo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	3.384.811	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	10 Lembaga	0	10 Lembaga	0	90,91%	0,00%	90,91%	0,00%			Kec. Wonokromo



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	1.068.302	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	5 Lembaga	0	5 Lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Wonokromo
	7.01.03.20.07	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	3.153.431	12 Lembaga	338.103	12 Lembaga	332.630	12 Lembaga	332.842	12 Lembaga	315.730	12 Lembaga	315.730	100,00 %	10,01%	100,00%	10,01%			Kec. Wonokromo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4.266.857	9 Lembaga	577.932	9 Lembaga	473.012	9 Lembaga	392.051	9 Lembaga	399.551	9 Lembaga	399.551	100,00 %	9,36%	100,00%	9,36%			Kec. Wonokromo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	1.595.474	11 Lembaga	365.496	11 Lembaga	275.873	11 Lembaga	200.927	11 Lembaga	193.395	11 Lembaga	193.395	100,00 %	12,12%	100,00%	12,12%			Kec. Wonokromo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	1.750.805	12 Lembaga	344.013	12 Lembaga	332.937	12 Lembaga	249.069	12 Lembaga	272.058	12 Lembaga	272.058	100,00 %	15,54%	100,00%	15,54%			Kec. Wonokromo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	1.395.613	5 Lembaga	221.934	5 Lembaga	284.168	5 Lembaga	210.376	6 Lembaga	138.121	6 Lembaga	138.121	120,00 %	9,90%	120,00%	9,90%			Kec. Wonokromo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	1.812.146	11 Lembaga	306.788	11 Lembaga	407.697	11 Lembaga	321.438	11 Lembaga	214.945	11 Lembaga	214.945	100,00 %	11,86%	100,00%	11,86%			Kec. Wonokromo
	7.01.03.21	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.21.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	3.189.861	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Karangpilang
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					13 Lembaga	3.621.510	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Karangpilang
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	581.710	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Karangpilang
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	718.877	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Karangpilang
	7.01.03.21.05	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	791.998	4 Lembaga	172.459	4 Lembaga	135.952	4 Lembaga	149.544	4 Lembaga	92.431	4 Lembaga	92.431	100,00 %	11,67%	100,00%	11,67%			Kec. Karangpilang
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	475.660	3 Lembaga	119.798	3 Lembaga	96.738	3 Lembaga	87.584	3 Lembaga	57.936	3 Lembaga	57.936	100,00 %	12,18%	100,00%	12,18%			Kec. Karangpilang



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	1.072.140	11 Lembaga	204.293	11 Lembaga	155.037	11 Lembaga	161.583	11 Lembaga	98.624	11 Lembaga	98.624	100,00 %	9,20%	100,00%	9,20%			Kec. Karangpilang
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					13 Lembaga	877.432	25 Lembaga	138.855	25 Lembaga	137.318	25 Lembaga	123.520	25 Lembaga	101.023	25 Lembaga	101.023	192,31 %	11,51%	192,31%	11,51%			Kec. Karangpilang
	7.01.03.22	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.22.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 lembaga	1.043.090	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Tenggilis Mejoyo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	1.269.156	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Tenggilis Mejoyo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 lembaga	1.956.994	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Tenggilis Mejoyo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 lembaga	1.097.511	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Tenggilis Mejoyo
	7.01.03.22.05	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 lembaga	761.605	6 lembaga	211.901	6 lembaga	146.838	12 lembaga	220.239	6 lembaga	125.634	6 lembaga	125.634	100,00 %	16,50%	100,00%	16,50%			Kec. Tenggilis Mejoyo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 lembaga	1.021.252	5 lembaga	303.619	5 lembaga	214.103	5 lembaga	251.586	5 lembaga	138.850	5 lembaga	138.850	100,00 %	13,60%	100,00%	13,60%			Kec. Tenggilis Mejoyo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 lembaga	938.069	6 lembaga	198.210	6 lembaga	251.242	18 lembaga	210.078	6 lembaga	165.173	6 lembaga	165.173	100,00 %	17,61%	100,00%	17,61%			Kec. Tenggilis Mejoyo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	1.338.781	8 lembaga	311.374	8 lembaga	230.803	8 lembaga	276.957	8 lembaga	148.702	8 lembaga	148.702	100,00 %	11,11%	100,00%	11,11%			Kec. Tenggilis Mejoyo
	7.01.03.23	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.23.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 lembaga	2.212.864	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	5 lembaga	0	5 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Kenjeran
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	2.552.317	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	10 lembaga	0	10 lembaga	0	125,00 %	0,00%	125,00%	0,00%			Kec. Kenjeran
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 lembaga	6.286.501	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Kenjeran



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					14 Lembaga	5.084.214	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Kenjeran
	7.01.03.23.05	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	1.887.210	8 lembaga	421.763	8 lembaga	327.005	8 lembaga	336.208	8 lembaga	222.128	8 lembaga	222.128	100,00%	11,77%	100,00%	11,77%			Kec. Kenjeran
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 lembaga	2.654.496	12 lembaga	618.407	12 lembaga	476.426	12 lembaga	494.360	12 lembaga	327.119	12 lembaga	327.119	100,00%	12,32%	100,00%	12,32%			Kec. Kenjeran
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 lembaga	1.266.313	5 lembaga	259.009	5 lembaga	198.596	5 lembaga	199.855	5 lembaga	66.611	5 lembaga	66.611	100,00%	5,26%	100,00%	5,26%			Kec. Kenjeran
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					14 Lembaga	3.785.179	14 Lembaga	429.898	14 Lembaga	343.396	14 Lembaga	346.338	14 Lembaga	228.446	14 Lembaga	228.446	100,00%	6,04%	100,00%	6,04%			Kec. Kenjeran
	7.01.03.24	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.24.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 lembaga	2.040.556	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Mulyorejo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 lembaga	683.147	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Mulyorejo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					13 lembaga	1.408.634	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Mulyorejo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 lembaga	1.525.434	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Mulyorejo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 lembaga	2.154.616	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	10 lembaga	0	10 lembaga	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Mulyorejo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	3.268.557	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Mulyorejo
	7.01.03.24.07	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 lembaga	1.643.950	5 lembaga	385.730	5 lembaga	304.958	6 lembaga	207.838	6 lembaga	290.660	6 lembaga	290.660	120,00%	17,68%	120,00%	17,68%			Kec. Mulyorejo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 lembaga	1.617.216	11 lembaga	144.130	11 lembaga	113.881	11 lembaga	116.348	11 lembaga	75.881	11 lembaga	75.881	100,00%	4,69%	100,00%	4,69%			Kec. Mulyorejo



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 lembaga	386.497	5 lembaga	123.903	5 lembaga	95.253	5 lembaga	97.465	5 lembaga	62.323	5 lembaga	62.323	100,00 %	16,13%	100,00%	16,13%			Kec. Mulyorejo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 lembaga	558.964	6 lembaga	155.381	6 lembaga	122.178	6 lembaga	88.578	6 lembaga	118.090	6 lembaga	118.090	100,00 %	21,13%	100,00%	21,13%			Kec. Mulyorejo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 lembaga	949.787	10 lembaga	185.543	10 lembaga	101.050	10 lembaga	147.338	10 lembaga	102.242	10 lembaga	102.242	100,00 %	10,76%	100,00%	10,76%			Kec. Mulyorejo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 lembaga	581.366	4 lembaga	104.287	4 lembaga	81.403	4 lembaga	54.467	4 lembaga	73.433	4 lembaga	73.433	100,00 %	12,63%	100,00%	12,63%			Kec. Mulyorejo
	7.01.03.25	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.25.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	1.504.581	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	7 Lembaga	0	7 Lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Wonocolo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	1.611.223	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	1 Lembaga	2.926	1 Lembaga	2.926	10,00%	0,18%	10,00%	0,18%			Kec. Wonocolo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					13 Lembaga	2.370.306	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Wonocolo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	2.204.727	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	4 Lembaga	0	4 Lembaga	0	44,44%	0,00%	44,44%	0,00%			Kec. Wonocolo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	1.520.253	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Wonocolo
	7.01.03.25.06	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	851.550	7 Lembaga	195.908	7 Lembaga	233.982	7 Lembaga	186.367	7 Lembaga	116.874	7 Lembaga	116.874	100,00 %	13,72%	100,00%	13,72%			Kec. Wonocolo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	586.999	6 Lembaga	164.580	6 Lembaga	88.526	6 Lembaga	132.105	6 Lembaga	116.880	6 Lembaga	116.880	100,00 %	19,91%	100,00%	19,91%			Kec. Wonocolo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	1.587.357	9 Lembaga	148.565	9 Lembaga	202.226	9 Lembaga	231.820	9 Lembaga	230.327	9 Lembaga	230.327	100,00 %	14,51%	100,00%	14,51%			Kec. Wonocolo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					13 Lembaga	1.174.594	10 Lembaga	234.258	10 Lembaga	175.939	10 Lembaga	188.777	10 Lembaga	64.622	10 Lembaga	64.622	76,92%	5,50%	76,92%	5,50%			Kec. Wonocolo



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	525.238	10 Lembaga	142.581	10 Lembaga	110.208	10 Lembaga	120.352	10 Lembaga	71.521	10 Lembaga	71.521	100,00 %	13,62%	100,00%	13,62%			Kec. Wonocolo
	7.01.03.26	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.26.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	1.712.471	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	16,67%	0,00%	16,67%	0,00%			Kec. Dukuh Pakis
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	1.800.320	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	3 Lembaga	0	3 Lembaga	0	42,86%	0,00%	42,86%	0,00%			Kec. Dukuh Pakis
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	1.479.643	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	7 Lembaga	0	7 Lembaga	0	140,00 %	0,00%	140,00%	0,00%			Kec. Dukuh Pakis
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	1.492.815	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	6 Lembaga	0	6 Lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Dukuh Pakis
	7.01.03.26.05	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	721.230	7 Lembaga	112.546	7 Lembaga	107.454	7 Lembaga	142.295	7 Lembaga	70.962	7 Lembaga	70.962	100,00 %	9,84%	100,00%	9,84%			Kec. Dukuh Pakis
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	533.557	7 Lembaga	163.687	7 Lembaga	129.137	7 Lembaga	123.386	7 Lembaga	41.904	7 Lembaga	41.904	116,67 %	7,85%	116,67%	7,85%			Kec. Dukuh Pakis
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	585.304	5 Lembaga	162.216	5 Lembaga	124.762	5 Lembaga	123.463	5 Lembaga	69.640	5 Lembaga	69.640	100,00 %	11,90%	100,00%	11,90%			Kec. Dukuh Pakis
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	990.775	6 Lembaga	100.767	6 Lembaga	78.863	6 Lembaga	57.914	6 Lembaga	52.143	6 Lembaga	52.143	100,00 %	5,26%	100,00%	5,26%			Kec. Dukuh Pakis
	7.01.03.27	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.27.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 lembaga	2.230.727	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sukomanunggal
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 lembaga	4.572.666	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sukomanunggal
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 lembaga	2.103.344	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sukomanunggal
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 lembaga	598.935	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sukomanunggal



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 lembaga	1.910.171	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Sukomanung gal
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 lembaga	1.031.466	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	1 lembaga	29.150	1 lembaga	29.150	20,00%	2,83%	20,00%	2,83%			Kec. Sukomanung gal
	7.01.03.27.07	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 lembaga	961.977	7 lembaga	171.099	7 lembaga	139.986	7 lembaga	140.368	7 lembaga	92.786	7 lembaga	92.786	100,00%	9,65%	100,00%	9,65%			Kec. Sukomanung gal
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 lembaga	600.087	4 lembaga	135.830	4 lembaga	184.491	4 lembaga	141.311	4 lembaga	55.672	4 lembaga	55.672	100,00%	9,28%	100,00%	9,28%			Kec. Sukomanung gal
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 lembaga	489.130	4 lembaga	72.289	4 lembaga	38.625	4 lembaga	69.720	4 lembaga	38.757	4 lembaga	38.757	100,00%	7,92%	100,00%	7,92%			Kec. Sukomanung gal
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 lembaga	246.692	6 lembaga	50.873	6 lembaga	53.468	6 lembaga	69.294	6 lembaga	18.718	6 lembaga	18.718	100,00%	7,59%	100,00%	7,59%			Kec. Sukomanung gal
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 lembaga	1.154.646	10 lembaga	364.225	10 lembaga	275.051	10 lembaga	257.908	10 lembaga	168.698	10 lembaga	168.698	100,00%	14,61%	100,00%	14,61%			Kec. Sukomanung gal
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 lembaga	1.004.961	5 lembaga	299.878	5 lembaga	236.405	10 lembaga	224.345	5 lembaga	145.264	5 lembaga	145.264	100,00%	14,45%	100,00%	14,45%			Kec. Sukomanung gal
	7.01.03.28	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.28.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					14 Lembaga	1.540.062	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	9 Lembaga	0	9 Lembaga	0	64,29%	0,00%	64,29%	0,00%			Kec. Simokerto
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	1.361.060	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	10 Lembaga	0	10 Lembaga	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Simokerto
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	935.081	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Simokerto
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	736.632	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	8 Lembaga	0	8 Lembaga	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Simokerto
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	1.895.473	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	11 Lembaga	0	11 Lembaga	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Simokerto



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.03.28.06	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	1.863.999	11 Lembaga	308.373	11 Lembaga	167.066	11 Lembaga	250.500	11 Lembaga	152.659	100,00 %	8,19%	100,00%	8,19%				Kec. Simokerto	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					14 Lembaga	3.494.603	14 Lembaga	338.962	14 Lembaga	180.130	14 Lembaga	374.332	14 Lembaga	89.606	100,00 %	2,56%	100,00%	2,56%				Kec. Simokerto	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	1.852.194	10 Lembaga	307.616	10 Lembaga	229.494	10 Lembaga	235.683	10 Lembaga	82.065	100,00 %	4,43%	100,00%	4,43%				Kec. Simokerto	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	2.136.138	7 Lembaga	642.624	7 Lembaga	336.331	7 Lembaga	649.679	7 Lembaga	318.548	100,00 %	14,91%	100,00%	14,91%				Kec. Simokerto	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	3.094.504	8 Lembaga	587.446	8 Lembaga	452.474	8 Lembaga	352.560	9 Lembaga	495.913	112,50 %	16,03%	112,50%	16,03%				Kec. Simokerto	
	7.01.03.29	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.29.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	4.149.525	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	7 Lembaga	0	70,00%	0,00%	70,00%	0,00%				Kec. Bubutan	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	1.858.758	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	9 Lembaga	16.683	100,00 %	0,90%	100,00%	0,90%				Kec. Bubutan	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	3.062.863	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				Kec. Bubutan	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4.097.524	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	9 Lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%				Kec. Bubutan	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	1.010.680	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	3 Lembaga	0	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%				Kec. Bubutan	
	7.01.03.29.06	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	1.750.875	10 Lembaga	565.303	10 Lembaga	415.947	10 Lembaga	438.297	10 Lembaga	201.157	100,00 %	11,49%	100,00%	11,49%				Kec. Bubutan	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	2.023.755	10 Lembaga	474.434	10 Lembaga	368.342	10 Lembaga	379.878	10 Lembaga	226.946	100,00 %	11,21%	100,00%	11,21%				Kec. Bubutan	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	723.391	6 Lembaga	143.072	6 Lembaga	111.152	6 Lembaga	110.180	6 Lembaga	39.101	100,00 %	5,41%	100,00%	5,41%				Kec. Bubutan	



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	1.695.834	9 Lembaga	384.898	9 Lembaga	291.420	9 Lembaga	293.337	9 Lembaga	196.059	9 Lembaga	196.059	100,00 %	11,56%	100,00%	11,56%			Kec. Bubutan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	1.467.114	9 Lembaga	403.766	9 Lembaga	301.691	9 Lembaga	305.540	9 Lembaga	202.408	9 Lembaga	202.408	100,00 %	13,80%	100,00%	13,80%			Kec. Bubutan
	7.01.03.30	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.30.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 lembaga	1.336.580	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Wiyung
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 lembaga	934.069	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Wiyung
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	2.672.213	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Wiyung
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	1.800.816	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Wiyung
	7.01.03.30.05	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 lembaga	1.511.677	11 lembaga	384.838	11 lembaga	303.501	11 lembaga	296.046	11 lembaga	202.576	11 lembaga	202.576	100,00 %	13,40%	100,00%	13,40%			Kec. Wiyung
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	1.112.828	9 lembaga	304.138	9 lembaga	248.964	9 lembaga	239.486	9 lembaga	161.479	9 lembaga	161.479	100,00 %	14,51%	100,00%	14,51%			Kec. Wiyung
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 lembaga	675.344	10 lembaga	192.691	10 lembaga	157.874	10 lembaga	155.181	10 lembaga	103.123	10 lembaga	103.123	166,67 %	15,27%	166,67%	15,27%			Kec. Wiyung
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	670.751	8 lembaga	203.874	8 lembaga	121.541	8 lembaga	129.923	8 lembaga	104.091	8 lembaga	104.091	100,00 %	15,52%	100,00%	15,52%			Kec. Wiyung
	7.01.03.31	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.31.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 lembaga	675.431	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Gunung Anyar
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	1.856.620	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	9 lembaga	62.315	9 lembaga	62.315	100,00 %	3,36%	100,00%	3,36%			Kec. Gunung Anyar
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	1.800.551	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	8 lembaga	0	8 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Gunung Anyar



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	1.396.534	0 lembaga	0	0 lembaga	0	8 lembaga	0	13 lembaga	10.164	13 lembaga	10.164	162,50 %	0,73%	162,50%	0,73%			Kec. Gunung Anyar
	7.01.03.31.05	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	907.738	9 lembaga	151.755	9 lembaga	140.095	9 lembaga	132.164	9 lembaga	75.712	9 lembaga	75.712	100,00 %	8,34%	100,00%	8,34%			Kec. Gunung Anyar
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	2.250.427	8 lembaga	268.333	8 lembaga	265.147	8 lembaga	301.413	8 lembaga	324.669	8 lembaga	324.669	100,00 %	14,43%	100,00%	14,43%			Kec. Gunung Anyar
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 lembaga	1.256.245	4 lembaga	134.513	4 lembaga	120.057	4 lembaga	182.313	4 lembaga	42.039	4 lembaga	42.039	100,00 %	3,35%	100,00%	3,35%			Kec. Gunung Anyar
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 lembaga	670.491	8 lembaga	139.058	8 lembaga	100.684	8 lembaga	150.152	8 lembaga	41.929	8 lembaga	41.929	100,00 %	6,25%	100,00%	6,25%			Kec. Gunung Anyar
	7.01.03.32	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
	7.01.03.32.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	2.329.671	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Kec. Benowo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 lembaga	2.275.670	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	1 lembaga	0	1 lembaga	0	14,29%	0,00%	14,29%	0,00%			Kec. Benowo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 lembaga	351.413	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	3 lembaga	0	3 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Benowo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 lembaga	73.824	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Benowo
	7.01.03.32.05	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 lembaga	634.769	4 lembaga	156.833	4 lembaga	124.482	4 lembaga	123.873	4 lembaga	82.558	4 lembaga	82.558	100,00 %	13,01%	100,00%	13,01%			Kec. Benowo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	2.317.553	9 lembaga	358.593	9 lembaga	273.597	9 lembaga	264.502	9 lembaga	174.611	9 lembaga	174.611	100,00 %	7,53%	100,00%	7,53%			Kec. Benowo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 lembaga	353.977	3 lembaga	74.869	3 lembaga	95.544	3 lembaga	50.378	3 lembaga	71.003	3 lembaga	71.003	100,00 %	20,06%	100,00%	20,06%			Kec. Benowo
			Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 lembaga	965.287	9 lembaga	234.810	9 lembaga	280.907	9 lembaga	216.924	9 lembaga	129.733	9 lembaga	129.733	100,00 %	13,44%	100,00%	13,44%			Kec. Benowo



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			13.510.137		12.003.406		20.547.195		2.968.747		4.017.126		3.917.838		3.132.759		98.073.979		477,31 %		110.077.385		323,21 %	
			Persentase lembaga/organisasi/kelompok keagamaan yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan	100%		75%		100%		0%		75%		175%		100%		100%		100%		100%		100%		-
			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100%		99,44 %		100%		0%		65,65 %		83,26 %		99,68%		99,68%		99,68%		99,68%		99,68 %		-
	7.01.04.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																								
	7.01.04.01.01	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan					86 kali	16.578.292	25 kali	1.971.194	25 kali	3.048.721	39 kali	2.978.120	56 kali	2.404.658	56 kali	2.404.658	65,12%	14,50%	65,12%	14,50%			Dinas Sosial
	7.01.04.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					408 kali	158.030	204 kali	38.423	204 kali	37.041	306 kali	36.473	408 kali	24.516	408 kali	24.516	100,00 %	15,51%	100,00%	15,51%			Kec. Sukolilo
	7.01.04.03	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.03.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	133.774	176 kali	35.795	176 kali	35.795	268 kali	31.092	360 kali	20.728	360 kali	20.728	100,00 %	15,49%	100,00%	15,49%			Kec. Tandes
	7.01.04.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.04.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	132.629	181 kali	31.671	181 kali	31.956	273 kali	31.956	365 kali	31.956	365 kali	31.956	101,39 %	24,09%	101,39%	24,09%			Kec. Semampir
	7.01.04.05	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.04.05.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	140.404	180 kali	34.639	180 kali	30.364	270 kali	30.364	360 kali	20.243	360 kali	20.243	100,00 %	14,42%	100,00%	14,42%			Kec. Krembangan
	7.01.04.06	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.06.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	245.217	180 kali	61.119	180 kali	61.366	270 kali	61.366	360 kali	39.201	360 kali	39.201	100,00 %	15,99%	100,00%	15,99%			Kec. Genteng
	7.01.04.07	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.07.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					408 kali	90.427	204 kali	24.473	204 kali	22.985	306 kali	22.985	408 kali	19.985	408 kali	19.985	100,00 %	22,10%	100,00%	22,10%			Kec. Gunung Anyar
	7.01.04.08	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.08.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	98.443	180 kali	25.535	180 kali	25.535	270 kali	25.193	360 kali	21.858	360 kali	21.858	100,00 %	22,20%	100,00%	22,20%			Kec. Pakal
	7.01.04.09	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.09.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	123.982	182 kali	31.956	182 kali	32.099	274 kali	31.101	366 kali	19.024	366 kali	19.024	101,67 %	15,34%	101,67%	15,34%			Kec. Tegalsari
	7.01.04.10	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.10.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					408 kali	147.926	204 kali	38.167	204 kali	38.167	306 kali	36.679	408 kali	22.469	408 kali	22.469	100,00 %	15,19%	100,00%	15,19%			Kec. Rungkut



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.04.11	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.11.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	108.416	180 kali	29.667	180 kali	26.959	270 kali	25.535	360 kali	25.356	360 kali	25.356	100,00 %	23,39%	100,00%	23,39%				Kec. Sawahan	
	7.01.04.12	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.12.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	103.459	180 kali	25.677	180 kali	25.392	270 kali	25.962	374 kali	17.308	374 kali	17.308	103,89 %	16,73%	103,89%	16,73%				Kec. Lakarsantri	
	7.01.04.13	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.13.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	132.629	179 kali	29.627	179 kali	29.769	270 kali	29.912	360 kali	19.846	360 kali	19.846	100,00 %	14,96%	100,00%	14,96%				Kec. Gubeng	
	7.01.04.14	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.14.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	190.048	181 kali	48.100	181 kali	47.122	273 kali	47.264	365 kali	31.462	365 kali	31.462	101,39 %	16,55%	101,39%	16,55%				Kec. Tambaksari	
	7.01.04.15	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.15.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	119.219	180 kali	33.157	180 kali	32.077	270 kali	29.917	360 kali	15.189	360 kali	15.189	100,00 %	12,74%	100,00%	12,74%				Kec. Gayungan	
	7.01.04.16	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.04.16.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	128.462	181 kali	32.410	181 kali	32.410	273 kali	32.410	365 kali	30.956	365 kali	30.956	101,39 %	24,10%	101,39%	24,10%			Kec. Jambangan
	7.01.04.17	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.17.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	108.816	180 kali	27.131	180 kali	27.359	272 kali	27.473	360 kali	17.774	360 kali	17.774	100,00 %	16,33%	100,00%	16,33%			Kec. Asemrowo
	7.01.04.18	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.18.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	119.239	180 kali	29.808	180 kali	29.810	270 kali	29.810	360 kali	27.010	360 kali	27.010	100,00 %	22,65%	100,00%	22,65%			Kec. Karangpilang
	7.01.04.19	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.19.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	119.952	181 kali	29.810	181 kali	29.810	271 kali	10.079	363 kali	39.746	363 kali	39.746	100,83 %	33,14%	100,83%	33,14%			Kec. Wonokromo
	7.01.04.20	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.20.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	88.675	180 kali	29.240	180 kali	19.265	270 kali	20.063	360 kali	20.063	360 kali	20.063	100,00 %	22,63%	100,00%	22,63%			Kec. Tenggilis Mejoyo
	7.01.04.21	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.21.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	122.656	178 kali	28.913	178 kali	29.483	268 kali	29.625	358 kali	29.625	358 kali	29.625	99,44%	24,15%	99,44%	24,15%			Kec. Kenjeran



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.04.22	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.22.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	112.812	181 kali	28.082	181 kali	28.077	273 kali	28.092	365 kali	18.711	365 kali	18.711	101,39 %	16,59%	101,39%	16,59%			Kec. Pabean Cantian
	7.01.04.23	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.23.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	59.853	181 kali	14.907	181 kali	12.761	273 kali	13.502	365 kali	12.655	365 kali	12.655	101,39 %	21,14%	101,39%	21,14%			Kec. Bulak
	7.01.04.24	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.24.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	135.112	181 kali	29.810	181 kali	28.214	273 kali	27.473	365 kali	18.277	365 kali	18.277	101,39 %	13,53%	101,39%	13,53%			Kec. Sukomanunggal
	7.01.04.25	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.25.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	95.770	180 kali	23.585	180 kali	23.585	270 kali	23.585	360 kali	15.723	360 kali	15.723	100,00 %	16,42%	100,00%	16,42%			Kec. Simokerto
	7.01.04.26	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.26.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	113.219	179 kali	29.525	179 kali	29.952	269 kali	29.810	360 kali	23.920	360 kali	23.920	100,00 %	21,13%	100,00%	21,13%			Kec. Wiyung
	7.01.04.27	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.04.27.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	113.043	180 kali	31.671	180 kali	27.681	272 kali	26.826	364 kali	17.884	364 kali	17.884	101,11 %	15,82%	101,11%	15,82%			Kec. Bubutan
	7.01.04.28	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.28.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	176.901	179 kali	42.065	179 kali	42.635	270 kali	42.635	360 kali	28.423	360 kali	28.423	100,00 %	16,07%	100,00%	16,07%			Kec. Benowo
	7.01.04.29	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.29.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					408 kali	154.683	181 kali	31.956	181 kali	31.956	273 kali	31.956	365 kali	21.181	365 kali	21.181	89,46%	13,69%	89,46%	13,69%			Kec. Mulyorejo
	7.01.04.30	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.30.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	120.732	178 kali	29.525	178 kali	29.810	269 kali	29.952	360 kali	20.016	360 kali	20.016	100,00 %	16,58%	100,00%	16,58%			Kec. Dukuh Pakis
	7.01.04.31	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.31.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	155.541	180 kali	37.967	180 kali	37.967	270 kali	39.837	360 kali	39.304	360 kali	39.304	100,00 %	25,27%	100,00%	25,27%			Kec. Sambikerep
	7.01.04.32	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																								
	7.01.04.32.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	118.833	180 kali	33.144	180 kali	31.007	270 kali	30.793	360 kali	17.693	360 kali	17.693	100,00 %	14,89%	100,00%	14,89%			Kec. Wonocolo



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			4.557.141		4.401.028		5.255.035		800.458		1.221.701		1.145.975		750.717		3.168.135		60,29%		7.569.163		77,14%	
			Persentase lembaga/organisasi/kelompok kepahlawanan yang berpartisipasi dalam kegiatan kepahlawanan	100%		100%		100%		0%		80%		80%		100%		100%		100%		100%		100%		-
	7.01.05.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																								
	7.01.05.01.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan					33 kali	5.255.035	14 kali	800.458	14 kali	1.221.701	21 kali	1.145.975	34 kali	750.717	34 kali	750.717	103,03 %	14,29%	103,03%	14,29%			Dinas Sosial
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			16.662.248		13.848.570		98.243		0		0		0		36.180		0		0,00%		13.848.570		82,63%	
			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100%		99,44 %		100%		0%		65,65 %		83,26 %		99,68%		99,68%		99,68 %		99,68%		99,68 %		-
	7.01.06.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.01.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	750	30 Kali	0	30 Kali	0	45 Kali	0	60 Kali	0	60 Kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Pabean Cantian
	7.01.06.02	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.02.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	720	30 Kali	0	30 Kali	0	45 Kali	0	60 Kali	0	60 Kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Bulak
	7.01.06.03	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	360	30 Kali	0	30 Kali	0	45 Kali	0	60 Kali	360	60 Kali	360	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%			Kec. Wonokromo
	7.01.06.04	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.06.04.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	30	36 Kali	0	36 Kali	0	54 Kali	0	66 Kali	30	66 Kali	30	110,00 %	100,00 %	110,00%	100,00%			Kec. Karangpilang
	7.01.06.05	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.05.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 kali	2.160	30 kali	0	30 kali	0	45 kali	0	60 kali	2.160	60 kali	2.160	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%			Kec. Tenggilis Mejoyo
	7.01.06.06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.06.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 kali	1.020	30 kali	0	30 kali	0	45 kali	0	60 kali	720	60 kali	720	100,00 %	70,59%	100,00%	70,59%			Kec. Kenjeran
	7.01.06.07	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.07.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 kali	21.600	30 kali	0	30 kali	0	45 kali	0	60 kali	3.600	60 kali	3.600	100,00 %	16,67%	100,00%	16,67%			Kec. Mulyorejo
	7.01.06.08	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.08.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	1.200	30 Kali	0	30 Kali	0	45 Kali	0	60 Kali	0	60 Kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Dukuh Pakis
	7.01.06.09	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.09.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi dan Validasi Data Sarana					60 Kali	4.500	30 Kali	0	30 Kali	0	45 Kali	0	60 Kali	0	60 Kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Wonocolo
	7.01.06.10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.10.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 kali	720	53 kali	0	53 kali	0	68 kali	0	83 kali	0	83 kali	0	138,33 %	0,00%	138,33%	0,00%			Kec. Sukomanunggal
	7.01.06.11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.06.11.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					120 Kali	1.800	60 Kali	0	60 Kali	0	90 Kali	0	120 Kali	300	120 Kali	300	100,00 %	16,67%	100,00%	16,67%			Kec. Simokerto
	7.01.06.12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.12.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 kali	600	30 kali	0	30 kali	0	45 kali	0	60 kali	600	60 kali	600	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%			Kec. Wiyung
	7.01.06.13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.13.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					45 Kali	1.200	16 Kali	0	16 Kali	0	31 Kali	0	45 Kali	0	45 Kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Bubutan
	7.01.06.14	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.14.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 kali	600	30 kali	0	30 kali	0	45 kali	0	60 kali	0	60 kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Benowo
	7.01.06.15	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.15.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	1.980	37 Kali	0	37 Kali	0	55 Kali	0	69 Kali	0	69 Kali	0	115,00 %	0,00%	115,00%	0,00%			Kec. Lakarsantri
	7.01.06.16	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.16.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 kali	1.500	30 kali	0	30 kali	0	45 kali	0	60 kali	0	60 kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Gubeng
	7.01.06.17	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.17.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 kali	4.320	30 kali	0	30 kali	0	45 kali	0	60 kali	0	60 kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Gunung Anyar
	7.01.06.18	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.06.18.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 kali	900	30 kali	0	30 kali	0	45 kali	0	60 kali	900	60 kali	900	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%			Kec. Pakal
	7.01.06.19	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.19.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 kali	6.857	25 kali	0	25 kali	0	41 kali	0	60 kali	2.400	60 kali	2.400	100,00 %	35,00%	100,00%	35,00%			Kec. Sambikerep
	7.01.06.20	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.20.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	1.000	30 Kali	0	30 Kali	0	45 Kali	0	60 Kali	840	60 Kali	840	100,00 %	84,00%	100,00%	84,00%			Kec. Sukolilo
	7.01.06.21	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.21.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 kali	10.800	30 kali	0	30 kali	0	45 kali	0	60 kali	0	60 kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Tandes
	7.01.06.22	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.22.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	9.000	30 Kali	0	30 Kali	0	45 Kali	0	60 Kali	9.000	60 Kali	9.000	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%			Kec. Semampir
	7.01.06.23	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.23.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 kali	990	30 kali	0	30 kali	0	45 kali	0	60 kali	990	60 kali	990	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%			Kec. Krembangan
	7.01.06.24	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.24.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	1.200	30 Kali	0	30 Kali	0	45 Kali	0	60 Kali	1.200	60 Kali	1.200	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%			Kec. Genteng
	7.01.06.25	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	7.01.06.25.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 kali	800	0 kali	0	0 kali	0	36 kali	0	60 kali	0	60 kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Tambaksari
	7.01.06.26	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.26.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 kali	2.257	30 kali	0	30 kali	0	45 kali	0	60 kali	1.200	60 kali	1.200	100,00 %	53,18%	100,00%	53,18%			Kec. Gayungan
	7.01.06.27	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.27.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	1.980	20 Kali	0	20 Kali	0	50 Kali	0	60 Kali	1.980	60 Kali	1.980	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%			Kec. Jambangan
	7.01.06.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.28.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 kali	900	30 kali	0	30 kali	0	45 kali	0	60 kali	900	60 kali	900	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%			Kec. Asemrowo
	7.01.06.29	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.29.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	5.400	0 Kali	0	0 Kali	0	30 Kali	0	60 Kali	0	60 Kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Tegalsari
	7.01.06.30	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.30.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	10.800	30 Kali	0	30 Kali	0	45 Kali	0	60 Kali	9.000	60 Kali	9.000	100,00 %	83,33%	100,00%	83,33%			Kec. Sawahan
	7.01.06.31	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																								
	7.01.06.31.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 kali	300	30 kali	0	30 kali	0	45 kali	0	60 kali	0	60 kali	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Rungkut
	8	Unsur Pemerintahan Umum																								
	8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95.675.646		66.037.447		3.024.161.231		429.644.333		925.999.368		591.374.014		713.591.207		751.259.397		24,84%		817.296.844		26,20%	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		103,65 %		88%		0%		90,17 %		90,86 %		91,15%		91,15%		103,58 %		91,15%		103,58 %		-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,98 %		100%		0%		99,27 %		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		-
	8.01.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	8.01.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					100%	5.949.267	100%	930.899	100%	1.219.270	100%	1.083.797	100%	1.086.660	100%	1.086.660	100,00 %	18,27%	100,00%	18,27%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	8.01.01.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	8.01.01.02.01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	61.971	2%	4.309	2%	11.574	81,82%	6.113	100%	16.587	100%	16.587	100,00 %	26,77%	100,00%	26,77%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			1.006.032		744.109		562.664		47.800		88.450		206.594		139.469		685.689		121,86 %		1.429.798		91,15%	
			Persentase organisasi masyarakat dan partai politik yang mendukung pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%		186,01 %		80%		0%		80%		0%		81,58%		81,58%		101,97 %		81,58%		101,97 %		-
			Persentase petugas perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	77,72 %		98,37 %		77,72 %		0%		78,91 %		78,45 %		99,43%		99,43%		127,93 %		99,43%		127,93 %		-
	8.01.02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																								
	8.01.02.01.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat					81 kali	517.064	25 kali	41.400	25 kali	75.050	51 kali	193.194	81 kali	127.069	81 kali	127.069	100,00 %	24,58%	100,00%	24,58%			Badan Penanggulan gan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
	8.01.02.02	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebanosaan																								



Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	8.01.02.02.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan wawasan kebangsaan					750 orang	45.600	256 orang	6.400	256 orang	13.400	593 orang	13.400	783 orang	12.400	783 orang	12.400	104,40 %	27,19%	104,40%	27,19%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			1.006.032		744.109		8.214.450		6.150		10.650		10.650		9.150		27.450		0,33%		771.559		8,37%	
			Persentase organisasi masyarakat dan partai politik yang mendukung pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%		186,01 %		80%		0%		80%		0%		81,58%		81,58%		101,97 %		81,58%		101,97 %		-
	8.01.03.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																								
	8.01.03.01.01	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah lembaga yang mendapatkan pemberdayaan					10 lembaga	8.214.450	2 lembaga	6.150	2 lembaga	10.650	10 lembaga	10.650	10 lembaga	9.150	10 lembaga	9.150	100,00 %	0,11%	100,00%	0,11%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			1.006.032		744.109		12.000		2.500		5.750		1.500		1.250		9.750		81,25%		753.859		74,05%	
			Persentase organisasi masyarakat dan partai politik yang mendukung pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%		186,01 %		80%		0%		80%		0%		81,58%		81,58%		101,97 %		81,58%		101,97 %		-
	8.01.04.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasarakatan																								



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	8.01.04.01.01	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah lembaga yang mendapatkan pemberdayaan					21 lembaga	12.000	17 lembaga	2.500	17 lembaga	5.750	24 lembaga	1.500	24 lembaga	1.250	24 lembaga	1.250	114,29 %	10,42%	114,29%	10,42%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			1.006.032		744.109		645.615		173.214		297.089		78.073		96.239		548.376		84,94%		1.292.485		78,25%	
			Persentase organisasi masyarakat dan partai politik yang mendukung pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%		186,01 %		80%		0%		80%		0%		81,58%		81,58%		101,97 %		81,58%		101,97 %		-
	8.01.05.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																								
	8.01.05.01.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kehidupan beragama					30 kali	645.615	16 kali	173.214	16 kali	297.089	23 kali	78.073	30 kali	96.239	30 kali	96.239	100,00 %	14,91%	100,00%	14,91%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			4.984.718		4.814.003		9.064.028		1.601.474		2.506.418		1.209.540		2.801.616		5.317.431		58,67%		10.131.434		72,12%	
			Persentase gangguan ketenteraman umum yang ditangani	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		99,66%		99,66 %		99,66%		99,66 %		-
	8.01.06.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial																								
	8.01.06.01.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kegiatan kerjasama pengendalian keamanan kota					194 kali	8.743.700	121 kali	1.552.474	121 kali	2.433.434	186 kali	1.139.743	270 kali	2.753.855	270 kali	2.753.855	139,18 %	31,50%	139,18%	31,50%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2020 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
	8.01.06.01.02	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kegiatan pemantauan dan pengendalian ketenteraman kota					24 kali	320.328	19 kali	49.000	19 kali	72.983	28 kali	69.797	39 kali	47.761	39 kali	47.761	162.50 %	14,91%	162,50%	14,91%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	
Rata-rata capaian kinerja (%)																99,86%	98,19%	99,86%	98,19%								
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan koordinasi dapat dilakukan melalui media daring - Adanya bantuan dari pihak ketiga dalam bentuk CSR atau sejenis, yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong ketercapaian output kegiatan - Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi pusat maupun jajaran samping dalam rangka mensukseskan kegiatan - Adanya kerjasama yang baik antar elemen di dalam Pemerintah Kota Surabaya																											
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : - Terjadinya pandemi Covid-19 yang mencapai puncak kedua pada tahun 2021 akibat munculnya varian baru - Refocusing anggaran yang ditujukan untuk penanganan pandemi Covid-19 - Adanya PPKM Darurat sebagai kebijakan untuk menekan peningkatan kasus Covid-19 sehingga beberapa kegiatan harus ditunda pelaksanaannya																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Perlu dilakukan identifikasi terhadap target yang ditunda pelaksanaannya akibat refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kota Surabaya berikutnya : - Perlu dilakukan identifikasi terhadap target yang ditunda pelaksanaannya akibat refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19																											



2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambaran umum serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Surabaya.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Perlunya pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19;
2. Perlunya percepatan penanganan kemiskinan sebagai dampak pandemi Covid-19;
3. Perlunya penanganan terhadap pengangguran terbuka sebagai dampak pandemi Covid-19;
4. Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting;
5. Masih perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta penurunan stunting;
6. Masih perlunya peningkatan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar.
7. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat;
8. Masih perlunya optimalisasi jaringan drainase;
9. Belum optimalnya kunjungan dan pengembangan obyek destinasi wisata dan kerjasama pelaku pariwisata;
10. Perlunya peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan upaya perlindungan anak;
11. Masih perlunya peningkatan sistem manajemen transportasi serta penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan;
12. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana, sistem jaringan jalan dan utilitas perkotaan sesuai rencana tata ruang;
13. Masih perlunya peningkatan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni;
14. Masih ditemukannya pelanggaran Perda dan kejadian gangguan ketentraman umum;



15. Perlunya upaya peningkatan pemberdayaan pemuda dan penguatan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal;
16. Masih perlunya pendataan, pengembangan dan inovasi berkelanjutan di bidang pelayanan publik.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Pendidikan

1. Masih terdapat guru SD maupun SMP yang belum memenuhi kompetensi;
2. Masih belum optimalnya ketersediaan guru yang sesuai antara kualifikasi mata pelajaran dengan ijazah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan dikarenakan adanya Perpres nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah;
4. Masih terdapat lembaga yang masa berlaku ijin operasionalnya telah berakhir sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BOP;
5. Belum optimalnya kualitas tenaga pendidik dan lembaga PAUD/TK;
6. Masih adanya lembaga kursus dan pelatihan yang belum terakreditasi.

2.3.2.2 Kesehatan

1. Cakupan pelayanan untuk ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita dan anak masih perlu ditingkatkan sesuai standar;
2. Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain Covid-19, HIV/AIDS, TB, dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, dll;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan sesuai standar;
4. Masih perlunya peningkatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal terutama pada Rumah Sakit Umum Daerah;
5. Masih terdapat Tempat Pengolahan Makanan (TPM) binaan Pemerintah Kota Surabaya yang belum memenuhi syarat higienis sanitasi;
6. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan;
7. Perlunya pembangunan rumah sakit untuk melayani kebutuhan masyarakat di wilayah Surabaya Timur dan/atau Utara;



8. Perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan;
9. Perlunya optimalisasi rujukan berjenjang;
10. Perlunya optimalisasi pemanfaatan jaminan kesehatan semesta dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan jaminan kesehatan.

2.3.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih adanya bangunan yang belum memiliki IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan IMB;
2. Masih terjadinya genangan di beberapa titik di Surabaya karena curah hujan tinggi serta masih adanya jaringan drainase yang belum berfungsi optimal;
3. Belum optimalnya penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan dan / atau konservasi energi pada gedung pemerintah dan swasta ;
4. Penyediaan layanan air bersih terkendala lahan yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Kota;
5. Adanya jaringan jalan yang v/c rasio-nya masih kurang optimal;
6. Masih tingginya biaya pemeliharaan PJU, sehingga perlunya pemanfaatan energi alternatif untuk mengurangi beban biaya listrik pada PJU.

2.3.2.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Masih perlunya pembenahan atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman;
2. Masih diperlukannya peningkatan kualitas lingkungan dan rumah layak huni;
3. Masih diperlukannya peningkatan sarana prasarana permukiman antara lain penyediaan air layak minum dan sanitasi;
4. Perlunya peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

2.3.2.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Masih perlunya upaya peningkatan partisipasi warga dalam mewujudkan Kampung Tangguh Bencana dan Kampung Tangguh Wani Covid-19 (wani sehat, wani jogo, wani sejahtera, dan wani ngandani);
2. Masih adanya temuan pelanggaran peraturan;
3. Masih terdapat gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;



4. Masih adanya kejadian kebakaran yang antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat.

2.3.2.6 Sosial

1. Perlunya pemutakhiran data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara berkala;
2. Belum optimalnya proses reunifikasi diakibatkan adanya PPKM di daerah asal PMKS;
3. Belum optimalnya program penanganan PMKS, dilihat dari banyaknya PMKS usia produktif yang dilatih/dibina yang belum berproduksi;
4. Kurang optimalnya partisipasi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

2.3.2.7 Tenaga Kerja

1. Masih adanya pemutusan hubungan kerja terutama sebagai dampak pandemi Covid- 19;
2. Masih diperlukannya fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran;
3. Masih kurangnya sinergitas antara informasi kesempatan kerja dari pengusaha dan penyediaan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan;
4. Masih adanya peserta pelatihan berbasis kompetensi yang belum mendapatkan fasilitasi penyaluran kerja;
5. Pengawasan ketenagakerjaan. perlindungan serta hubungan industrial belum optimal dijalankan.

2.3.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya pemahaman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh beberapa pemangku kepentingan;
2. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pencapaian indikator Kelurahan/kampung layak anak;
3. Masih belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak, dilihat dari masih terdapat permasalahan perempuan dan anak antara lain *trafficking* dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).



2.3.2.9 Pangan

1. Masih ditemukannya bahan pangan segar dan makanan olahan yang belum memenuhi syarat keamanan makanan karena rendahnya kesadaran masyarakat;
2. Perlunya perluasan kerjasama penyediaan pangan dengan daerah-daerah penghasil bahan pangan, sehingga akan mampu mendukung stabilitas harga pangan;
3. Perlunya optimalisasi potensi *urban farming* baik di masyarakat maupun pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota.

2.3.2.10 Pertanahan

1. Masih perlunya pengadaan tanah/bangunan untuk kepentingan umum;
2. Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya;
3. Belum optimalnya pengamanan dan sertifikasi aset pertanahan.

2.3.2.11 Lingkungan Hidup

1. Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan penataan Ruang Terbuka Hijau;
2. Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R;
3. Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan;
4. Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan;
5. Masih adanya permasalahan lingkungan hidup yang perlu ditangani, antara lain terkait limbah, kebisingan dan polusi udara dari kegiatan usaha dan transportasi;
6. Menurunnya kualitas air baku kali Surabaya menyebabkan menurunnya kualitas air bersih dan menurunnya kualitas jaringan pipa distribusi air bersih yang mengakibatkan rawan kebocoran air;
7. Belum optimalnya pelaksanaan penerbitan persetujuan lingkungan dikarenakan adanya transisi perubahan peraturan dengan diterbitkannya PP 5 tahun 2021, PP 22 tahun 2021 dan Permenlh 4 tahun 2021 dan



adanya perpindahan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan di provinsi dan pusat.

2.3.2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Masih adanya penduduk lahir dan penduduk meninggal yang belum dicatatkan untuk memperoleh akte kelahiran / akte kematian;
2. Masih adanya warga yang belum bisa mengakses layanan kependudukan dan pencatatan sipil secara *online*.

2.3.2.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Perlunya upaya peningkatan cakupan jumlah peserta KB baru;
2. Perlunya upaya peningkatan akses Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
3. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun.

2.3.2.14 Perhubungan

1. Masih diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah di sekitar Surabaya;
2. Masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum termasuk waktu tunggu kendaraan umum, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum;
3. Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas.

2.3.2.15 Komunikasi dan Informatika

1. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana dan jaringan utilitas untuk menunjang sistem informasi perkotaan.

2.3.2.16 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Perlunya optimalisasi penggunaan ePeken oleh masyarakat untuk meningkatkan akses pemasaran produk UMKM dan toko kelontong;
2. Masih ada produk usaha mikro yang belum layak diuji mutukan dan belum memiliki sertifikasi merk, halal dan BPOM;
3. Masih ada koperasi masih belum berklasifikasi AAB dan kurang optimalnya pertumbuhan anggota koperasi serta peningkatan volume usaha koperasi;



4. Masih diperlukan upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional.

2.3.2.17 Kepemudaan dan Olahraga

1. Kurang meratanya sarana prasarana olah raga yang tersedia dan dalam kondisi baik, terutama pada kampung-kampung padat penduduk;
2. Masih diperlukannya pembinaan dan pengembangan tenaga atlet dan pelatih profesional.

2.3.2.18 Statistik

1. Masih diperlukan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sistem satu data dan satu peta yang tervalidasi dan terintegrasi.

2.3.2.19 Persandian

1. Perlunya optimalisasi integrasi sistem antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

2.3.2.20 Kebudayaan

1. Masih ada bangunan cagar budaya yang belum terpelihara dengan baik, karena pelibatan pemilik/pengelola cagar budaya dalam pengembangan kawasan sejarah/cagar budaya masih belum optimal;
2. Perlunya fasilitasi kelompok seni untuk dapat tampil di fasilitas publik;
3. Masih belum optimalnya upaya penguatan budaya lokal.

2.3.2.21 Perpustakaan

1. Perlunya optimalisasi pemanfaatan Perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

2.3.2.22 Kearsipan

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan;
2. Implementasi pengelolaan arsip secara digital belum optimal.

2.3.2.23 Kelautan dan Perikanan

1. Masih belum optimalnya pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan;
2. Perlunya pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan pendapatan nelayan.



2.3.2.24 Pariwisata

1. Menurunnya kunjungan di objek wisata dikarenakan pandemi covid-19;
2. Perlunya optimalisasi kawasan wisata dan integrasi antar kawasan wisata;
3. Masih belum optimalnya kerjasama dengan *stakeholder* bidang pariwisata;
4. Menurunnya jumlah kegiatan seni dan budaya sebagai dampak pandemi covid-19.

2.3.2.25 Pertanian

1. Masih kurang optimalnya penyediaan dan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya pertanian (*urban farming*), peternakan dan perikanan;
2. Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan pengobatan;
3. Perlunya penanganan terhadap dampak munculnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak.

2.3.2.26 Perdagangan

1. Perlunya optimalisasi pengoperasian sentra dan pasar;
2. Perlunya optimalisasi pengelolaan pasar tradisional.

2.3.2.27 Sekretariat Daerah

1. Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku;
2. Masih adanya kecamatan yang batas wilayahnya perlu penegasan yang sah;
3. Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan kota dan kondisi masyarakat.

2.3.2.28 Perencanaan

1. Masih diperlukannya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan;
2. Masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan data dan evaluasi.

2.3.2.29 Keuangan

1. Kurang optimalnya realisasi pendapatan daerah karena masa pemulihan akibat dampak Covid- 19;



2. Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi yang perlu ditingkatkan;
3. Belum optimalnya pendapatan dari dana perimbangan dikarenakan keterlambatan dan petunjuk teknis yang senantiasa berubah.

2.3.2.30 Kepegawaian

1. Perlunya optimalisasi sistem merit dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.
2. Perlunya penyusunan analisa beban kerja dan analisa jabatan secara berkala;
3. Perlunya optimalisasi pengembangan kompetensi pegawai.

2.3.2.31 Pendidikan dan Pelatihan

1. Perlunya optimalisasi pengembangan kompetensi pegawai.

2.3.2.32 Penelitian dan Pengembangan

1. Masih adanya hasil penelitian dan pengembangan yang belum dimanfaatkan/ditindaklanjuti.

2.3.2.33 Inspektorat Daerah

1. Perlunya optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah;
3. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah.

2.3.2.34 Kecamatan

1. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia utamanya pemberi pelayanan langsung bagi masyarakat;
2. Perlunya peningkatan kerjasama yang baik antar personil di kecamatan dan kelurahan;
3. Perlunya optimalisasi pelaksanaan Dana Kelurahan.

2.3.2.35 Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Masih adanya potensi konflik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan munculnya krisis kesehatan tidak dapat dihindari sehingga menjadi pemicu kontraksi perekonomian Nasional. Kondisi tersebut terjadi secara global yang bersifat *unprecedented shock* dan belum ada negara yang memiliki pengalaman dalam menanggulangi pandemi tersebut. Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi Covid-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,7 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal-moneter dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen, menjadi Rp62,2 juta atau setara US\$4.349,5 tahun 2021. Dengan pencapaian ini, *Gross National Income* (GNI) Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level prapandemi. Pemulihan di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang belum mampu kembali ke level sebelum pandemi, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, Jerman, Perancis, dan Italia. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,0–5,5 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan pada risiko penyebaran varian baru Covid-19, *permanent scar* yang



dialami oleh dunia usaha dan sosial, normalisasi kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok, dan krisis energi. Keberhasilan pengendalian Covid-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 4,8–5,3 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran Covid-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor barang dan jasa juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 11,0–11,6 persen. Investasi pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 5,4–6,0 persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi pemerintah diperkirakan berkontraksi sebesar 2,0–1,6 persen, dipicu oleh mulai berkurangnya program stimulus dan belanja penanganan pandemi seiring dengan kondisi pandemi yang mengarah ke endemi.

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (*herd immunity*) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan



pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

a. Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (*within sectors*) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (*between sectors*). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

b. Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Dampak pandemi Covid-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak

c. Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons



tantangan-tantangan dari perubahan iklim

Perekonomian Jawa Timur untuk keseluruhan tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2021 tumbuh 3,57% (yoy) atau meningkat dibandingkan 2020 yang tumbuh sebesar -2,33% (yoy). Secara umum, pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat pada tahun 2021 seiring berkurangnya kasus Covid-19 dan percepatan vaksinasi Covid-19 mendorong kenaikan mobilitas masyarakat dan dibukanya sektor ekonomi produktif. Hal tersebut mendorong peningkatan permintaan domestik masyarakat yang tercermin dari kenaikan pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan net ekspor antardaerah pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Berlanjutnya perbaikan ekonomi global juga turut mendorong masih kuatnya permintaan eksternal yang tercermin dari masih positifnya ekspor luar negeri Jawa Timur pada tahun 2021. Perbaikan permintaan domestik dan masih kuatnya permintaan eksternal tersebut, serta berlanjutnya proyek strategis Jawa Timur menopang perbaikan pertumbuhan investasi sepanjang tahun 2021. Sementara dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didorong oleh mayoritas lapangan usaha, termasuk lapangan usaha utama yakni Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta Konstruksi sebagai respon atas perbaikan permintaan domestik dan masih kuatnya permintaan eksternal. Sehubungan dengan kondisi tersebut maka arah kebijakan ekonomi Jawa Timur Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan infra aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi melalui implementasi project-project strategisa nasional khususnya yang mendukung infrastruktur ekonomi (Perpres 80 tahun 2018).
- 2) Mengatasi *scarring effect* masyarakat dengan melakukan optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah dengan menjaga keseimbangan inflasi harga kebutuhan-kebutuhan pokok, daya beli dan kemampuan konsumsi masyarakat, serta penyediaan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.
- 3) Optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan, melalui dukungan



terhadap aktivitas produksi komoditas-komoditas ekspor utama seperti lemak & minyak hewan/nabati, tembaga, produk-produk kayu, sert aikan dan udang.

- 4) Sektor Pertanian dengan membangun sumber pertumbuhan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan pola musim panen,antisipasi dampak perubahan iklim, kepastian rantai pasok dan logistik pangan, peningkatan kegiatan padat karya.
- 5) Penguatan pemulihan sektor riil dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMKM (optimalisasi incubator centre, sertifikasi dan uji produk UMKM), perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasistas usaha KUKM, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM KUKM, pengembangan sharing program yang difokuskan pada pemberdayaan KUKM.
- 6) Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan melalui sertifikasi CHSE produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif menuju pariwisata berkelanjutan dan perluasan lapangan pekerjaan yang didukung pula oleh insentif bagi para pelaku industri pariwisata.
- 7) Sektor investasi yang menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui pelayanan perizinan sesuai protokol kesehatan serta penyerdahanaan perizinan berbasis online dan peningkatan kepastian usaha, promosi investasi terarah serta pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata, dan infrastruktur.
- 8) Penurunan kasus Covid-19 serta pemulihan perekonomian negara-negara tujuan ekspor utama Jawa Timur juga disinyalir akan kembali meningkatkan permintaan terhadap ekspor Provinsi Jawa Timur, terutama untuk komoditas-komiditas utama seperti tembaga, emas dan perhiasan, maupun produk-produk pertanian.
- 9) Pembukaan kembali aktivitas ekonomi dan pengurangan batasan mobilitas diprediksi akan semakin meningkatkan pendapatan dan konsumsi dari masyarakat yang pada akhirnya mendorong terjadinya pertumbuhan positif



sektor Industri pengolahan, perdagangan, serta penyediaan akomodasi.

- 10) Pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini lebih pada sisi jasa agar didorong untuk lebih kearah sisi supply dan produksi (*e-commerce*, inklusi keuangan dll), sehingga digitalisasi ekonomi berperan optimal.
- 11) Sektor Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Pertambangan melalui optimalisasi desain program penyediaan listrik melalui IR/SR (Instalasi Rumah/Sambungan Rumah) bagi masyarakat miskin, pembangunan biogas, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) serta percepatan Perijinan Pertambangan.
- 12) Sektor Industri dan perdagangan diarahkan pada pemulihan produktivitas melalui pelatihan wirausaha baru bagi masyarakat terdampak Covid-19, stabilisasi harga kebutuhan pokok, fasilitasi standarisasi produk IKM (Halan dan SNI), penguatan promosi dan misi dagang, akselerasi industri substitusi impor, peningkatan ekspor khususnya ekspor non migas, peningkatan kapasitas teknologi industri dan perdagangan.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian di Kota Surabaya. Seiring dengan perbaikan dalam penanganan pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya menunjukkan hasil yang positif sehingga tahun 2021 ekonomi tumbuh pada angka 4,29%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 belum diiringi oleh perbaikan signifikan pada Tingkat Pengangguran Terbuka yang berada pada angka 9,68% dan persentase penduduk miskin yang meningkat menjadi 5,23%. Indikator makro ekonomi yang menunjukkan perbaikan yakni nilai PDRB Kota Surabaya, baik PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Selama tahun 2021 PDRB ADHB dan ADHK mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan ekonomi Kota Surabaya diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Produktivitas dalam rangka pemulihan ekonomi Kota Surabaya melalui program padat karya guna memberdayakan Masyarakat



Berpenghasilan Rendah sebagai segmen yang paling terdampak pandemi Covid-19, peningkatan sektor pariwisata melalui pengembangan obyek potensial wisata dan penataan kawasan pariwisata yang terintegasi guna meningkatkan daya tarik wisata Kota Surabaya serta Mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penggerak utama perekonomian kota Surabaya.

2) Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada sektor Kesehatan namun juga sektor sosial lainnya. Pemenuhan kebutuhan dasar diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan Pendidikan, Kesehatan dan sosial. Intervensi yang dilakukan pada ketiga sektor ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan SDM yang berdaya saing sehingga dapat menuntaskan permasalahan kemiskinan dan menyokong pertumbuhan ekonomi.

3) Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan diharapkan dapat mendorong pembangunan yang maju dengan mengutamakan lingkungan yang tetap lestari serta mengantisipasi akibat buruk yang ditimbulkan perubahan iklim

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dampak perbaikan ekonomi sebagai hasil keberhasilan penanganan Covid-19 tercermin dari beberapa indikator makro Kota Surabaya tahun 2021 yang menunjukkan pertumbuhan positif. Tekanan akibat dampak Covid-19 yang terjadi hingga saat ini membuat perekonomian Kota Surabaya mengalami pertumbuhan terkontraksi di akhir tahun 2020. Indikator makro ekonomi yang menunjukkan perbaikan yakni nilai PDRB Kota Surabaya, baik PDRB atas Dasar Harga Berlaku



(ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Selama tahun 2021 PDRB ADHB dan ADHK mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Peningkatan tersebut dikontribusi oleh akumulatif meningkatnya nilai tambah seluruh komponen pembentuk PDRB. Perkembangan perekonomian Kota Surabaya terbaru hingga tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel III.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya
Tahun 2020 dan Tahun 2021 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2020	2021*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	889.331,91	9.175.955,40
B	Pertambangan dan Penggalian	31.943,80	32.761,30
C	Industri Pengolahan	107.416.294,34	113.544.581,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.237.615,57	2.417.167,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	824.951,94	872.320,90
F	Konstruksi	51.969.408,77	55.273.538,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	149.246.755,05	163.509.913,20
H	Transportasi dan Pergudangan	29.794.090,41	30.520.260,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85.618.582,64	91.418.079,70
J	Informasi dan Komunikasi	33.247.669,54	35.273.340,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	29.183.377,44	30.560.741,60
L	Real Estate	15.354.350,85	15.790.323,10
M,N	Jasa Perusahaan	14.116.912,06	14.543.158,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.238.304,23	8.310.975,30
P	Jasa Pendidikan	14.540.365,94	14.682.371,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.880.587,79	5.220.638,20
R,S,T, U	Jasa lainnya	6.918.915,11	7.340.199,70
	Produk Domestik Regional Bruto	554.509.457,38	590.227.966,80

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2022

Catatan : *) data sementara

Pada Tabel III.1 terlihat bahwa perekonomian Kota Surabaya berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai Rp554.509.457,38 juta dan hingga akhir tahun 2021 nilai PDRB Kota Surabaya menghasilkan nilai tambah sebesar Rp590.227.966,80 juta. Dari sisi sektoral, perekonomian Kota Surabaya didorong oleh hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran,



Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor masih memberikan kontribusi yang tertinggi bagi perekonomian Kota Surabaya. Pada tahun 2020, PDRB lapangan usaha kategori ini sebesar Rp149.246.755,05 juta dan hingga periode 2021 sebesar Rp163.509.913,20 juta. Masih sama seperti sebelumnya, lapangan usaha yang berkontribusi tinggi selanjutnya yaitu Industri Pengolahan dan diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Besaran nilai tambah yang dihasilkan dari kedua lapangan usaha tersebut dijelaskan dalam Tabel III.1.

Selaras dengan peningkatan PDRB Kota Surabaya yang mengalami peningkatan, hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Pada Tabel III.2, nilai PDRB ADHK Kota Surabaya pada tahun 2020 sebesar Rp390.936.424,98 juta dan hingga akhir tahun 2021 nilai PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp407.726.799,20 juta. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan nilai PDRB kategori yang lainnya, yaitu sebesar Rp 114.183.332,30 juta. Pada urutan berikutnya adalah Kategori Industri Pengolahan dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp79.366.597,60 juta, serta kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai PDRB sebesar Rp57.221.633,10 juta.

Tabel III.2
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Tahun 2020 dan Tahun 2021 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2020*	2021*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	547.994,90	554.054,70
B	Pertambangan dan Penggalian	19.464,04	19.479,80
C	Industri Pengolahan	76.384.521,77	79.366.597,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.449.668,99	1.538.145,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	630.336,37	665.833,70
F	Konstruksi	38.387.739,29	40.070.071,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	106.340.867,71	114.183.332,30
H	Transportasi dan Pergudangan	19.477.422,82	19.875.912,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56.053.239,21	57.221.633,10
J	Informasi dan Komunikasi	29.511.280,46	31.281.790,20



Kategori	Uraian	2020*	2021*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.231.210,98	19.324.709,70
L	Real Estate	11.000.304,15	11.179.684,10
M,N	Jasa Perusahaan	8.801.216,28	8.974.255,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.754.525,35	4.748.920,20
P	Jasa Pendidikan	9.934.443,75	9.993.043,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.539.299,11	3.722.145,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.872.889,81	5.007.190,10
	Produk Domestik Regional Bruto	390.936.424,98	407.726.799,20

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2022

Catatan : *) data sementara

Berdasarkan peranan sektoral, struktur perekonomian Kota Surabaya memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat pergeseran besaran peran dari sektor pembentuk ekonomi Kota Surabaya yang terus berkembang menuju perekonomian perdagangan dan jasa. Semakin berkurangnya peran sektor-sektor primer secara perlahan dan sebaliknya semakin besarnya peran sektor tersier terhadap perekonomian Kota Surabaya menjadi indikasi perubahan struktur perekonomian Kota Surabaya secara perlahan. Hal itu ditandai oleh semakin kecilnya nilai tambah yang dihasilkan khususnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian akibat semakin terbatasnya lahan pertanian yang tersedia di Kota Surabaya.

Peran sektor tersier dalam menopang perekonomian Kota Surabaya dilihat dari peranan sektor Perdagangan dan Jasa. Berdasarkan data BPS Kota Surabaya, nilai tambah yang dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor hingga tahun 2021 sebesar 28,00 persen, lebih tinggi dibanding peranan selama tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di tahun 2021 mengalami peningkatan. Tumbuhnya sektor ini dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat yang mulai kembali normal dengan diberlakukannya kebijakan *new normal* oleh pemerintah mendorong meningkatnya kembali konsumsi masyarakat akibat keyakinan masyarakat terhadap perekonomian kedepan yang semakin membaik. Selanjutnya membaiknya kinerja lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor



akan mendorong tumbuhnya lapangan usaha industri pengolahan. Ditambah lagi, perbaikan ekonomi mitra dagang domestik maupun luar negeri turut mendorong kinerja industri pengolahan.

Lapangan usaha yang memberikan peran tertinggi selanjutnya yakni Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Prospek peningkatan kinerja lapangan usaha ini sejalan dengan perluasan program vaksinasi yang mendorong semakin luasnya pembukaan sektor bisnis dan pariwisata dengan protokol kesehatan diindikasikan berdampak terhadap peningkatan sektor ini. Kebijakan pelonggaran PPKM juga membuat aktivitas lapangan usaha ini seperti kegiatan operasional hotel dan restoran dengan pembatasan kapasitas maksimal menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan sektor ini tumbuh lebih tinggi.

Lapangan usaha yang terus menunjukkan peningkatan peran terhadap perekonomian Kota Surabaya yakni sektor informasi dan komunikasi. Semakin berkembang pesatnya perkembangan Kota Surabaya sebagai kota bisnis, peran sektor ini sebagai penunjang berbagai aktivitas masyarakat cukup signifikan. Ditambah lagi, peran sektor ini semakin besar ketika pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat karena menjadi kebutuhan utama disaat aktivitas *Work From Home* (WFH) dan *School From Home* (SFH).,

Sektor konstruksi juga terus memberikan kontribusi tinggi. Semakin banyaknya perbaikan fisik Kota Surabaya seiring maraknya permintaan akan hunian, objek pendukung sektor pariwisata dan perjalanan bisnis seperti hotel, convention hall, maupun tempat hiburan sebagai imbas resiko urbanisasi maupun pusat perjalanan bisnis menjadikan sektor konstruksi masih berperan tinggi terhadap perekonomian Kota Surabaya. Lebih lanjut, masih berlanjutnya pembangunan proyek – proyek strategis dengan protokol kesehatan mendorong perbaikan kinerja Konstruksi di Kota Surabaya.

Tabel III.3
Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 dan 2021
(dalam persen)

Kategori	Uraian	2020*	2021*
		Persen	Persen
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,14	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,00



C	Industri Pengolahan	19,54	19,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,37	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,16
F	Konstruksi	9,82	9,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,20	28,00
H	Transportasi dan Pergudangan	4,98	4,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,34	14,03
J	Informasi dan Komunikasi	7,55	7,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,92	4,74
L	Real Estate	2,81	2,74
M,N	Jasa Perusahaan	2,25	2,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,22	1,16
P	Jasa Pendidikan	2,54	2,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,91	0,91
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,25	1,23
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2022

Catatan : *) data sementara

**b. Pertumbuhan Ekonomi**

Keberhasilan penanganan Covid-19 ditandai oleh perbaikan ekonomi yang terus membaik. Perbaikan kinerja perekonomian tahun 2021 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meski kenaikannya belum optimal seperti pada kondisi normalnya, namun capaian tersebut merupakan perbaikan dari kondisi-kondisi sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi. Sehingga secara akumulatif capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya di tahun 2021 yakni sebesar 4,29 persen, yang tumbuh positif dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar -4,85 persen. Pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang ditetapkan pada periode tertentu di tahun 2021 seiring menurunnya penyebaran Covid19 di Surabaya menjadi faktor utama yang mendorong tumbuhnya mayoritas lapangan usaha di Kota Surabaya, dengan capaian pertumbuhan yang bervariasi.

Secara sektoral, lapangan usaha yang memberikan kontribusi pertumbuhan tertinggi masih direalisasikan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, Pengadaan Listrik dan Gas serta Jasa Kesehatan. Produktivitas lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kembali membaik seiring membaiknya tingkat konsumsi masyarakat Kota Surabaya sebagai imbas membaiknya perekonomian Kota Surabaya. Ditambah lagi, peningkatan pertumbuhan seiring dengan mulai kembali normalnya aktivitas masyarakat sejalan dengan semakin luasnya pembukaan sektor-sektor ekonomi dengan protokol kesehatan mendorong peningkatan permintaan konsumsi masyarakat. Perekonomian yang kembali produktif mendorong meningkatnya permintaan tenaga kerja yang secara otomatis akan mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat. Sementara untuk lapangan usaha Informasi dan Komunikasi juga masih memberikan pertumbuhan yang tinggi selama aktivitas belajar dan bekerja dari rumah masih diberlakukan seiring masih munculnya variasi Covid19 yang baru dan mudah tingkat penularannya cukup tinggi.

Lapangan usaha yang berkontribusi tertinggi selanjutnya yakni Pengadaan Listrik dan Gas serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mempertahankan pertumbuhan positif di tahun 2021, yakni sebesar 5,63



persen. Masih berlanjutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terutama saat varian delta meningkatkan jumlah kasus positif secara signifikan di Kota Surabaya ikut mendorong banyaknya aktivitas masyarakat baik belajar dan bekerja dari rumah mendorong tingginya permintaan pada lapangan usaha ini. Disamping itu, Penerapan protokol yang ketat dengan selalu memakai masker dan rajin menjaga higienitas dengan rajin cuci tangan menjadi kebiasaan normal baru bagi masyarakat juga ikut berkontribusi terhadap meningkatnya sektor ini.

Tabel III.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2020 dan 2021 (dalam persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	-4,85
2021*	4,29

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2022

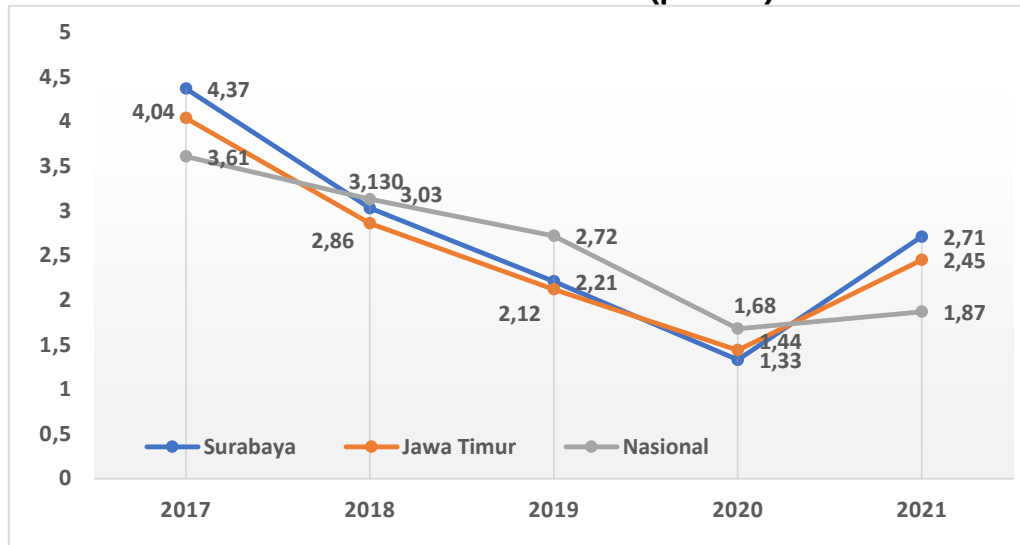
*) data sementara

c. Tingkat Inflasi

Hingga akhir Desember 2021, Inflasi Kota Surabaya secara kumulatif lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2020. Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Inflasi Kota Surabaya tahun 2021 sebesar 2,71 persen, dimana capaian tersebut lebih tinggi dibanding realisasi inflasi Jawa Timur yang sebesar 2,45 persen dan inflasi nasional sebesar 1,87 persen. Meskipun demikian, inflasi Kota Surabaya 2021 masih selaras dengan arah inflasi Jawa Timur dan Nasional. Lebih tinggi inflasi Kota Surabaya tersebut mengindikasikan bahwa adanya peningkatan daya beli masyarakat sehingga peningkatan inflasi yang lebih tinggi di Kota Surabaya mengindikasikan mulai kembali pulihnya perekonomian Kota Surabaya yang ditunjukkan dari sisi permintaan masyarakat.



Gambar III.1
Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2017 – Tahun 2021 (persen)



Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, 2022, diolah

Berdasarkan komoditasnya, 10 komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi Kota Surabaya selama tahun 2021 yakni, minyak goreng, akademi/ perguruan tinggi, tarif jalan tol, angkutan udara, tahu mentah, cabai rawit, sop, rokok kretek filter, pemeliharaan/service dan obat dengan resep. Sementara 10 komoditas yang menahan laju inflasi Kota Surabaya selama tahun 2021 antara lain bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, telepon selular, cabai merah, tomat, pisang, tarif kereta api, biscuit dan ikan mujair.

d. Investasi

Penanaman modal merupakan salah satu komponen pembentuk PDRB. Sama demikian halnya dengan peran konsumsi rumah tangga maupun swasta, peran investasi bagi perekonomian Kota Surabaya cukup besar. Nyatanya peran investasi sangatlah penting untuk menstimulus perekonomian Kota Surabaya sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi.



Tabel III.5
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2017	Rp. 1.658.419.300.000	Rp 2.725.427.900.000
2018	Rp 3.190.545.316.800	Rp 1.549.687.145.643
2019	Rp 16.777.246.236.711	Rp 2.442.653.778.989
2020	Rp 16.356.162.161.751	Rp 1.258.527.150.916
2021*	Rp 25.895.741.771.363	Rp 1.929.023.592.649

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

*) Data Sementara

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya, nilai total investasi di Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana terangkum dalam tabel diatas. Dari tabel tersebut, nilai investasi Kota Surabaya tahun 2021 yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp25.895.741.771.363,-. Sementara investasi dari penanaman modal asing (PMA) Rp1.929.023.592.649,-. Berdasarkan data DPM-PTSP Kota Surabaya investasi PMDN Kota Surabaya pada tahun 2021 lebih dari 50 persen berasal dari penanaman modal pada bidang usaha perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Kontribusi tertinggi selanjutnya berasal dari bidang usaha transportasi, gudang dan telekomunikasi dan sisanya dikontribusi oleh bidang usaha hotel dan restoran, kesehatan, perdagangan dan reparasi serta bidang usaha lainnya. Sementara investasi yang berasal dari PMA sebagian besar bersumber dari bidang usaha transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan kontribusi lebih dari 70 persen. Sisanya dikontribusi oleh bidang usaha perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran, industri kimia dan farmasi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran serta bidang usaha lainnya.



e. Ekspor

Pemulihan ekonomi juga tercermin dari aktivitas perdagangan Kota Surabaya. Dari sisi ekspor, total ekspor Kota Surabaya selama tahun 2021 mencapai US\$22.780.677.395, yang didominasi oleh komoditas bahan baku seperti lemak dan minyak hewan/nabati, bahan kimia organik, tembaga, kayu dan bahan dari kayu masih menjadi komoditas yang diminati. Berdasarkan tabel III.6 capaian ekspor Kota Surabaya pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020, yakni sebesar 31,84 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh perekonomian mitra dagang Kota Surabaya yang mengalami perbaikan menjadi factor yang mempengaruhi meningkatnya kinerja ekspor Kota Surabaya di tahun 2021.

Sementara dari sisi impor, total impor Kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar US\$19.568.405.393, yang juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 30 persen. Karakteristik komoditas impor Kota Surabaya masih merupakan barang modal yang digunakan untuk mendukung proses produksi. Adanya peningkatan nilai realisasi impor Kota Surabaya tahun 2021 dapat merefleksikan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Surabaya sudah lebih produktif yang ditunjukkan dari permintaan akan input produksi yang meningkat seiring pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat di Kota Surabaya. Sehingga dengan total kinerja ekspor dan impor Kota Surabaya tersebut dengan demikian maka kinerja neraca perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2021 mengalami surplus sebesar US\$3.212.272.002.

Tabel III.6
Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2021

Nilai/Tahun	2018	2019	2020	2021
Ekspor (US\$)	18.120.064.879	17.278.974.907	17.278.974.907	22.780.677.395
Impor (US\$)	17.368.048.068	15.382.235.848	15.382.235.848	19.568.405.393

Sumber data: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Timur dan Bappeko Surabaya, diolah, 2022



f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data rilis BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Surabaya pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 9,68 persen dari yang sebelumnya sebesar 9,79 persen atau turun sebesar 0,11 persen dibandingkan tahun 2020. Penurunan TPT Kota Surabaya yang belum signifikan disebabkan oleh belum meredanya ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 menjadikan para investor maupun pelaku usaha melakukan *wait and see* untuk melakukan ekspansi usahanya kembali. Ditambah lagi, kebijakan pelonggaran PPKM yang belum konsisten turut mempengaruhi tertahannya permintaan akan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja selama tahun 2021 belum optimal.

Ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, nilai TPT Kota Surabaya tahun 2021 mengalami peningkatan pada tenaga kerja dengan jenjang pendidikan perguruan tinggi dan tamatan sekolah dasar (SD). Peningkatan tertinggi terjadi pada pekerja dengan tingkat pendidikan SD yakni sebesar 3,57 persen sementara pekerja dengan latar belakang tingkat pendidikan perguruan tinggi meningkat 0,48 persen dibanding periode laporan di tahun sebelumnya. Sementara untuk tenaga kerja dengan pendidikan latar belakang SMP, SMA umum dan kejuruan mengalami penurunan.

Tabel III.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya
Tahun 2020 - 2021

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2020	9,79%
2021	9,68

Sumber data: BPS Jawa Timur, 2021

3.1.2 Prospek Ekonomi Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perekonomian domestik terus membaik secara bertahap. Searah dengan perekonomian Nasional, perekonomian Kota Surabaya juga terus menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2020 perekonomian Kota Surabaya yang mengalami kontraksi berangsur menghasilkan realisasi pertumbuhan yang positif. Hal itu ditunjukkan oleh kinerja perekonomian Kota Surabaya pada triwulan I tahun 2021 yang tumbuh lebih tinggi meski masih terkontraksi pada angka -1,54 persen.



Meskipun demikian, capaian pertumbuhan Kota Surabaya pada awal periode laporan tersebut telah menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelum-sebelumnya di tahun 2020. Selanjutnya pada triwulan II 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tumbuh signifikan hingga mencapai 8,91 persen. Hingga secara akumulatif di akhir tahun 2021 capaian pertumbuhan ekonomi tumbuh cukup signifikan yakni sebesar 4,29 persen

Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 seperti pelaksanaan program vaksinasi secara masif, kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat secara spasial (PPKM) secara efektif mampu mendorong perbaikan disegala aspek. Berdasarkan perkembangan realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang terus meningkat di triwulan I dan II tahun 2021 maka pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya secara akumulatif di akhir tahun 2021 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibanding tahun 2020. Optimisme perbaikan ekonomi diperkirakan terus berlanjut di tahun 2022. Seperti perkiraan sebelumnya, pada tahun 2022 tekanan dampak Covid-19 diperkirakan masih ada namun diperkirakan berangsur menurun. Optimisme tersebut dilatar belakangi oleh faktor-faktor seperti upaya percepatan program vaksinasi, perkembangan kasus Covid-19 yang menurun, serta perbaikan beberapa indikator ekonomi. Seiring kondisi tersebut, perekonomian diperkirakan berjalan normal sehingga aktivitas ekonomi berlangsung normal. Bahkan pada tahun 2022 perekonomian diperkirakan mulai bergerak cepat sebagai dampak kembali kuatnya konsumsi masyarakat seiring dengan kembalinya keyakinan masyarakat terhadap perekonomian, utamanya untuk konsumsi *leisure* yang pada tahun sebelumnya tertahan akibat penerapan kebijakan penanganan Covid-19.

Dari sisi sektoral, lapangan usaha utama Kota Surabaya yakni lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum kembali tumbuh menggeliat seiring kembali meningkatnya konsumsi masyarakat. Selain itu, adanya pelonggaran kebijakan PPKM berdampak terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas sektor pariwisata. Perkembangan yang positif dari *leading sector* Kota Surabaya tersebut turut mendorong kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif. Kondisi tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja investasi yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja



di Kota Surabaya.

Sementara kondisi perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2023 diperkirakan semakin baik dibandingkan kinerja perekonomian saat ini meskipun masih dihadapkan dengan tingginya ketidakpastian akan kapan berakhirnya pandemi Covid-19 dan gejolak perekonomian global dimasa mendatang. Namun demikian semakin baiknya reformasi kebijakan pemerintah pada berbagai sektor khususnya sektor kesehatan dan ekonomi sehingga ketahanan sektor kesehatan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai.

Dari sisi perkembangan harga, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2022 diperkirakan searah dengan sasaran inflasi nasional yakni inflasi pada rentan nilai $3,0 \pm 1$ persen dengan asumsi tidak ada gejolak ekonomi yang berpengaruh signifikan. Sama halnya dengan tahun 2022, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2023 juga diperkirakan selaras dengan sasaran inflasi nasional. Memperhatikan prospek perekonomian Kota Surabaya dimasa yang akan datang, arah kebijakan ekonomi yang disusun diharapkan dapat mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditargetkan

Mengacu hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, hasil forum konsultasi publik dan kerangka ekonomi makro maka tema pembangunan nasional dalam RKP Nasional tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Adapun RKP Nasional tahun 2023 terdapat beberapa arah kebijakan dijadikan prioritas nasional, yaitu :

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
- 2) Peningkatan kualitas SDM dalam aspek Kesehatan dan Pendidikan
- 3) Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha
- 5) Revitalisasi Industri dan penguatan riset terapan
- 6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
- 8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.



Pada tingkat Provinsi Jawa Timur, mengacu pada kondisi ekonomi makro dan RPJMD Provinsi Jawa Timur diatas, maka tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah ***“Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Mendukung Daya Saing Daerah Menyambut Era Industry Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”*** dengan prioritas pembangunan difokuskan pada:

- 1) Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata
- 2) Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur
- 3) Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan
- 4) Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
- 5) Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi
- 6) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup
- 7) Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

Berdasarkan kondisi makro ekonomi, diselaraskan dengan kebijakan tahun 2023 yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 ***“Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar berkelanjutan”***, masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Musrenbang, kebijakan yang tertuang dalam RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, maka tema pembangunan pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 yaitu ***“Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Menuju Kota Surabaya Yang Humanis dan Berkelanjutan”*** dengan prioritas pembangunan difokuskan pada :

1. Pemulihan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya;
2. Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota;
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar;



4. Penguatan nilai budaya lokal, partisipasi kepemudaan, serta ekonomi kreatif;
5. Peningkatan ketahanan pangan;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Surabaya tahun 2023 mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 192 menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku maka untuk tahun 2022 dan 2023 Pemerintah Kota Surabaya mempersiapkan penyesuaian regulasi pemungutan pendapatan berdasarkan Undang-undang tersebut.



Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2023 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis obyek meliputi :

- a. Pajak Daerah yaitu :
 - 1) mengoptimisasikan penerimaan pajak melalui perluasan basis data pajak
 - 2) mengembangkan layanan pajak *on line* untuk mempermudah pembayaran pajak
- b. Retribusi daerah yaitu Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu optimalisasi koordinasi dan pengawasan kepada BUMD
- d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu



- 1) peningkatan koordinasi dengan PD terkait terkait optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan obyek lainnya.
- 2) koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kota

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Penganggaran dana transfer dari provinsi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur tentang alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir. Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa Hibah Bos yang semula pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026 ada pada kode rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka berdasarkan peraturan tersebut masuk ke dalam Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya berasal dari Pendapatan Asli



Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kota Surabaya sebagaimana terlihat pada Tabel III.8.



Tabel III.8
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya
Tahun 2020 s.d Tahun 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
Pendapatan Asli Daerah					
Pajak Daerah	3.277.053.240.709	3.649.732.215.700	4.768.251.212.053	4.808.116.511.898	4.466.769.358.425
Retribusi Daerah	301.268.032.273	232.591.662.263	352.737.274.643	352.737.274.643	329.992.555.760
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	48.541.103.496	160.867.394.117	167.621.848.477	187.512.698.894	241.198.135.131
Lain-Lain PAD yang sah	663.097.915.895	681.089.357.590	770.360.255.515	810.360.255.515	643.382.226.626
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	4.289.960.292.373	4.724.280.629.670	6.058.970.590.688	6.158.726.740.950	5.681.342.275.941
Pendapatan Transfer					
Transfer Pemerintah Pusat	2.168.177.541.469	2.202.536.032.336	2.501.585.625.000	2.501.585.625.000	2.683.519.017.393
Dana Perimbangan	2.045.481.662.469	2.154.338.429.336	2.469.347.796.000	2.469.347.796.000	2.635.321.414.393
Dana Transfer Umum	1.625.440.700.953	1.770.191.478.753	1.608.449.738.000	1.608.449.738.000	1.861.010.135.311
Dana Bagi Hasil	421.978.744.953	603.035.148.835	426.010.015.000	426.010.015.000	612.319.084.559
Dana Alokasi Umum	1.203.461.956.000	1.167.156.329.918	1.182.439.723.000	1.182.439.723.000	1.248.691.050.752
Dana Transfer Khusus	420.040.961.516	384.146.950.583	860.898.058.000	860.898.058.000	774.311.279.082
Dana Alokasi Khusus Fisik	16.312.498.048	15.584.019.460	65.242.283.000	65.242.283.000	58.680.392.098
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	403.728.463.468	368.562.931.123	795.655.775.000	795.655.775.000	715.630.886.984
Dana Insentif Daerah	122.695.879.000	48.197.603.000	32.237.829.000	32.237.829.000	48.197.603.000



Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0
Dana Keistimewaan	0	0	0	0	0
Dana Desa	0	0	0	0	0
Transfer Antar - Daerah	680.348.197.455	1.016.416.082.323	972.878.914.263	990.497.069.513	977.844.217.440
Pendapatan Bagi Hasil Provinsi	677.024.797.455	1.013.160.682.323	971.727.230.020	989.345.385.270	974.000.903.661
Pendapatan Bantuan Keuangan	3.323.400.000	3.255.400.000	1.151.684.243	1.151.684.243	3.843.313.779
Jumlah Pendapatan Transfer	2.848.525.738.924	3.218.952.114.659	3.474.464.539.263	3.492.082.694.513	3.661.363.234.833
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah					
Hibah	0	15.255.315.784	0	0	0
Dana Darurat	0	0	0	0	0
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	406.930.962.879	365.390.016.114	0		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	406.930.962.879	380.645.331.898	0	0	0
Jumlah Pendapatan	7.545.416.994.176	8.323.878.076.226	9.533.435.129.951	9.650.809.435.463	9.342.705.510.774

Sumber : Badan Pendapatan, 2022



Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2020 dikelola oleh 18 Perangkat Daerah dan Tahun 2021 dikelola oleh 18 Perangkat Daerah. Realisasi pendapatan tahun 2020 dan tahun 2021 disajikan pada tabel III.9

Tabel III.9
Realisasi Pendapatan Kota Surabaya
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	6.632.198.026.068	7.457.577.292.611
2	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	253.293.904.358	327.392.879.016
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	134.110.064.538	91.645.170.368
4	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	109.510.782.446	99.756.045.281
5	Dinas Kesehatan	115.363.873.100	2.509.328.000
6	RSUD Bhakti Dharma Husada	155.750.319.532	204.992.688.699
7	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	82.650.223.500	88.274.192.166
8	Dinas Perhubungan	44.463.289.385	38.663.359.372
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.498.187.861	948.884.500
10	Dinas Tenaga Kerja	7.271.397.300	4.399.749.300
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.284.825.000	2.459.620.000
12	Dinas Perdagangan	2.302.246.128	2.182.974.904
13	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	2.304.389.120	4.713.307.090
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	390.805.000	244.280.000
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	574.039.940	654.215.020
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	440.200.000	444.014.000
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.420.900,00	1.485.900,00
18	Dinas Pemadam Kebakaran	3.000.000	18.590.000,00
Jumlah Pendapatan		7.545.416.994.176	8.326.878.076.226

Sumber : Badan Pendapatan, 2022



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya maka proyeksi pendapatan pada tahun 2022 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel III.10

Tabel III.10
Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya
Tahun 2022 s.d Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
1	Badan Pendapatan Daerah	4.779.802.210.966	4.819.667.510.813	4.476.404.515.559
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.844.157.580.163	3.904.181.565.964	4.079.086.125.916
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	140.142.716.461	146.458.489.923	129.248.002.828
4	Dinas Perhubungan	80.988.327.420	60.112.181.095	74.652.677.320
5	Dinas Lingkungan Hidup	90.080.224.915	91.108.039.792	81.834.173.267
6	Dinas Kesehatan	124.050.395.300	127.651.539.431	104.273.645.555
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.500.000	13.000.000	6.713.148
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.772.000.000	6.958.043.183	5.400.957.933
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	2.927.268.200	2.976.092.991	2.739.094.319
10	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	6.359.018.000	6.622.290.000	5.950.240.595
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	553.584.000	700.338.432	517.997.903
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.312.510.000	360.000.000	1.928.958.473
13	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	275.643.275.000	292.316.171.975	229.925.246.074
14	RSUD Bhakti Dharma Husada	180.055.319.525	190.946.366.267	150.191.451.791
15	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	583.200.000	737.805.597	545.710.095
JUMLAH		9.533.435.129.951	9.650.809.435.463	9.342.705.510.774

Sumber : Badan Pendapatan, 2022



3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Arah kebijakan dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Terjadinya pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada berbagai aspek perlu ditindaklanjuti dengan pemulihan kinerja pada berbagai sektor utamanya pada pemulihan ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan dan sistem sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan tema pembangunan pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 yaitu ***“Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Menuju Kota Surabaya Yang Humanis dan Berkelanjutan”*** diprioritaskan untuk:

- 1) Pemulihan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya;



- 2) Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota;
- 3) Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar;
- 4) Penguatan nilai budaya lokal, partisipasi kepemudaan, serta ekonomi kreatif;
- 5) Peningkatan ketahanan pangan;
- 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana;
- 7) Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik.

Belanja Daerah memperhatikan hal-hal khusus lain, sebagai berikut :

1. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan;
2. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagai upaya peningkatan bidang kesehatan, termasuk didalamnya anggaran penanggulangan stunting;
3. Mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;
4. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan data realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2021, Tahun 2022 serta proyeksi Tahun 2023 dan Tahun 2024 maka Belanja Daerah Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel III.11



Tabel III.11
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Surabaya
Tahun 2020 s.d Tahun 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
Belanja Operasi					
Belanja pegawai	2.399.681.325.080	2.353.630.642.870	2.779.269.027.871	2.732.788.519.501	2.784.082.764.994
Belanja barang dan jasa	3.689.879.143.903	4.259.965.065.999	5.214.772.758.757	4.983.742.513.680	5.130.419.704.898
Belanja hibah	340.851.516.728	157.779.323.459	222.505.773.962	255.473.866.919	426.850.553.420
Belanja bantuan sosial	8.627.900.535	58.944.000	0	146.135.606.513	0
Jumlah Belanja Operasi	6.439.039.886.246	6.771.433.976.328	8.216.547.560.590	8.118.140.506.613	8.341.353.023.312
Belanja Modal					
Belanja tanah	299.284.778.936	171.876.414.740	219.315.504.503	194.636.607.352	317.695.111.576
Belanja peralatan dan mesin	204.643.054.890	163.131.234.366	445.429.030.961	333.891.930.918	368.340.324.226
Belanja gedung dan bangunan	605.850.297.517	345.118.654.570	525.461.849.765	433.616.538.804	645.215.239.660
Belanja jalan, irigasi dan jaringan	453.938.706.031	329.418.247.818	938.813.525.353	1.269.806.710.316	724.891.224.192
Belanja aset tetap lainnya	18.765.230.254	6.791.951.896	11.368.325.941	12.425.044.736	19.564.902.042
Belanja aset lainnya	1.181.091.977	0			0
Jumlah Belanja Modal	1.583.663.159.605	1.016.336.503.390	2.140.388.236.523	2.244.376.832.126	2.075.706.801.696
Jumlah Belanja Operasi dan Belanja Modal	8.022.703.045.851	7.787.770.479.718	10.356.935.797.113	10.362.517.338.739	10.417.059.825.008
Belanja Tidak Terduga					
Belanja tidak terduga	9.977.942.214	28.251.407.155	37.000.000.000	37.000.000.000	15.000.000.000
Jumlah Belanja Tidak Terduga	9.977.942.214	28.251.407.155	37.000.000.000	37.000.000.000	15.000.000.000
Belanja Transfer					
Belanja bagi hasil	-	3.055.434.672	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Belanja bantuan keuangan			500.000.000	500.000.000	500.000.000
Jumlah Transfer	-	3.055.434.672	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
Jumlah Belanja	8.032.680.988.065	7.819.077.321.546	10.395.185.797.113	10.400.767.338.739	10.433.309.825.008

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2022



3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2023 diperoleh dari SILPA dan diarahkan untuk penempatan modal / penyertaan modal bagi badan usaha milik negara / daerah dan / atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Sisa penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada BUMD (sesuai dengan pencapaian tujuan pembangunan di tahun 2023) berdasarkan :

- 1) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
- 2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama melalui Pengalihan Saham dari PT. Surya Karsa Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya
- 3) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) terlihat seperti yang terdapat pada Tabel III.12



Tabel III.12
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2020 s.d Tahun 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
Penerimaan Daerah					
Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	803.850.973.368	316.612.578.243	871.750.667.162	759.957.903.276	1.096.604.314.234
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	25.598.764	11.172.724	0	0	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	803.876.572.132	316.623.750.967	871.750.667.162	759.957.903.276	1.096.604.314.234
Pengeluaran Daerah					
Penyertaan modal	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000	6.000.000.000
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000	6.000.000.000

Sumber : Badan Pendapatan, 2022



3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan daerah, pemerintah daerah telah menyusun program-program perencanaan, baik perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Namun demikian, jika dilihat dari sisi fiskal daerah, kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya masih cukup rentan. Mengingat besarnya rencana program pembangunan Pemerintah Kota Surabaya baik infrastruktur maupun non infrastruktur maka anggaran belanja yang dikeluarkan selalu meningkat setiap tahunnya dan lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat bergantung sepenuhnya terhadap APBD yang tersedia sehingga mengharuskan pemerintah Kota Surabaya untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari sumber lainnya.

Alternatif-alternatif kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut: (1) *fiscal engineering* yaitu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk mampu membangun kemandirian fiskal dengan konsep *expenditure reform* melalui perubahan tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan *cost recovery*. (2) *Creative Financing* yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran sektor swasta dalam melalui beberapa skema yakni skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui sinergi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya, antara lain yakni:

1. Kemitraan Pembiayaan Daerah antara Pemerintah dan swasta, melalui
 - a. Peningkatan kerjasama swasta dan pemerintah melalui kerjasama pemerintah swasta (KPS) / *Public Private Partnership* (PPP). Bentuk kerjasama PKS dapat dilakukan dengan berbagai skema kerjasama seperti *Build Operate and Transfer* (BOT), *Build Transfer Operate* (BTO) maupun bentuk lainnya.



- b. Optimalisasi partisipasi dunia usaha sebagai bagian dari pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan dan terlibat aktif dalam program pembangunan melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pembiayaan pembangunan di Kota Surabaya melalui CSR dipandang potensial untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya. Potensi tersebut didukung oleh tingginya peran sektor industri pengolahan, dimana sektor industri pengolahan merupakan sektor kedua dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya
2. Pengembangan kerjasama antar daerah. Kerjasama daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah lainnya tersebut meliputi kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan. Kerjasama antara daerah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas guna mendorong pembangunan suatu daerah.
 3. Kerjasama kemitraan dengan lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi maupun ilmu pengetahuan guna menunjang pembangunan daerah.
 4. Pengembangan kerjasama melalui pinjaman maupun hibah luar negeri yang digunakan pada bidang-bidang strategis utamanya untuk pembangunan infrastruktur publik yang mempunyai daya ungkit kepada perekonomian daerah.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota memiliki beberapa program pembangunan yang direncanakan dibiayai dari non APBD, antara lain :

1. Dalam rangka program pengembangan Kawasan Wisata Religi, Pemerintah Kota Surabaya berencana untuk melakukan pengembangan Terminal melalui skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur transportasi



darat di Kota Surabaya. Di samping itu, Pemerintah Kota Surabaya juga akan mengubah pola terminal menjadi sistem pengembangan berbasis kawasan *Transit Oriented Development (TOD)* sehingga dapat menjadi simpul transportasi yang terintegrasi. Dengan demikian, keberadaan terminal akan meningkatkan potensi kunjungan yang dapat mendorong peningkatan produk UMKM Kota Surabaya, terutama yang diproduksi oleh masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

2. Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran menyuguhkan keindahan dan pesona kawasan pesisir pantai di timur laut Kota Surabaya dengan pemandangan berlatar belakang Jembatan Suramadu. THP Kenjeran yang memiliki luas 15.153,5 M² di sisi utara dan 23.220 M² di sisi Selatan masih memiliki potensi yang harus dikembangkan. Program penataan dan pengembangan THP Kenjeran dengan beragam fasilitas penunjang seperti *playground*, gazebo, anjungan, stan souvenir produk UMKM dan *foodcourt* yang menawarkan berbagai pilihan kuliner khas pesisir diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitarnya. Pemerintah Kota Surabaya berencana untuk melakukan pengembangan dengan skema APBD maupun dengan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU). Dengan adanya rencana skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) diharapkan progres pengembangan akan lebih efisien dan efektif.
3. Sarana dan prasarana pelayanan dasar yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dimungkinkan dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) maupun *Build Operate and Transfer (BOT)*.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, dan program strategis nasional.

RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut mengacu pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih ***“Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”***. Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :



1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel IV.1



Tabel IV.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Laju Pertumbuhan Ekonomi;	3,21%	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3,86%
		Indeks Gini	0,323		Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	3,70%
					Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	5,18%
					Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5,25%
					Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	16,60%
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);	8,26%	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	5,50%
		Persentase Penduduk Miskin	4,31%		Persentase tenaga kerja yang terserap	21,57%
					Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,83
					Indeks Pendidikan	78,52
					Angka Harapan Hidup	74,44
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	82,50	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	2,28%
					Skor Pola Pangan Harapan	94,00
					Indeks Pembangunan Gender	93,74
	Pembentukan karakter masyarakat	Indeks Harmoni Sosial	79,41	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	Indeks Budaya Lokal	89,30
					Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	56,46
					Indeks Kepedulian Sosial	89,20



Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Indeks Infrastruktur Kota	0,678	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,800
					Indeks Keciptakarya, Penataan uang dan Pertanahan	0,503
					Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,690
	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	68,54	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	56,08
					Indeks Kualitas Udara	90,33
					Indeks Kualitas Lahan	42,69
					Indeks Persampahan	77,54
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	83,41	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	82,97
					Opini BPK	WTP
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,2 (Baik)
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	89,23%
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,85	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,78
				Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	Indeks Penanggulangan Bencana	0,828



4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kota Surabaya tahun 2005-2025, strategi dan penelaahan terhadap RKPD Provinsi Jawa Timur, RKP dan Program Strategis Nasional serta Rancangan Akhir Renja seluruh Perangkat Daerah.

4.2.1 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kota Surabaya selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Isu strategis Kota Surabaya yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Bermartabat.
2. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif.
3. Pengembangan infrastruktur Hijau dan Sistim Transportasi Perkotaan Terpadu (*Integrated Transportation System*)
4. Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
5. Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat.

Penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 ini masih mempertimbangkan dampak terjadinya pandemi Covid-19. Proses vaksinasi *booster* serta upaya penegakan protokol kesehatan terus dilakukan sehingga diharapkan dapat segera menuntaskan pandemi Covid-19, selain itu upaya-upaya dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan pemberdayaan sumber daya manusia yang diharapkan mampu mengembalikan kondisi perekonomian masyarakat seperti sebelum terjadinya pandemic Covid-19 dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut pembangunan Kota Surabaya pada tahun 2023 diprioritaskan pada :



1. Pemulihan Ekonomi Masyarakat melalui Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro, Penataan Kawasan Wisata, dan Padat Karya;

Adanya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, memberikan dampak yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Dengan diberlakukannya pembatasan pergerakan manusia di masa puncak Pandemi Covid-19 menimbulkan efek negatif bagi berbagai sektor dunia usaha yang berakibat terganggunya kondisi perekonomian masyarakat. Untuk memulihkan kondisi perekonomian masyarakat diperlukan dukungan dan stimulasi-stimulasi dari pemerintah. Kebijakan serta inovasi yang akan dilakukan untuk mendukung prioritas tersebut adalah;

- 1) Revitalisasi pasar rakyat / pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya;
- 2) Fasilitasi pemasaran produk berbasis digital (*e-peken*) bagi pelaku usaha mikro termasuk usaha toko kelontong dan sentra wisata kuliner, pemasaran dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan lain seperti toko daring dan Dekranasda Surabaya;
- 3) Pelatihan, pembinaan dan pendampingan pedagang di sentra wisata kuliner dan pasar rakyat;
- 4) Fasilitasi pemasaran produk pelaku usaha mikro di Surabaya Kriya Gallery;
- 5) Meningkatkan keterlibatan pelaku usaha mikro dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- 6) Sinkronisasi kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sesuai dengan ketersediaan peluang kerja;
- 7) Optimalisasi pemanfaatan tanah dan bangunan aset untuk kegiatan ekonomi masyarakat;
- 8) Penataan, branding dan promosi kawasan wisata untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2014-2034, kebijakan Strategi pengembangan kawasan pariwisata dilakukan dengan mengembangkan obyek wisata tematik yang terintegrasi sebagai satu sistem kepariwisataan baik di dalam kota maupun sekitar



wilayah kota dan mengembangkan obyek wisata potensial berbasis bahari, merupakan kawasan wisata yang menjadi prioritas dalam pengembangan di Tahun 2023.

2. Penataan Ruang, Infrastruktur, dan Utilitas Kota yang Terpadu dan Memperhatikan Daya Dukung Kota;

Kebijakan serta inovasi yang akan dilakukan untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

- 1) Optimalisasi penataan ruang melalui perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 2) Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya;
- 3) Pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur untuk kepentingan umum;
- 4) Optimalisasi dan peningkatan kuantitas pemasangan PJU hemat energi;
- 5) Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan serta konektivitas antar wilayah;
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana drainase kota yang terpadu;
- 7) Pengembangan sistem transportasi umum yang aman, nyaman, handal dan terjangkau;
- 8) Peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sebagai dukungan terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo – Lamongan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, telah disusun program yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023, sebagai berikut :

- a) Program penyelenggaraan Jalan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga untuk mendukung proyek pembangunan Jalan Luar Lingkar Barat (JLLB);



- b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan untuk mendukung Transportasi Publik di Gerbangkertosusila
 - c) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan untuk mendukung program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR di Kota Surabaya
3. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang didukung dengan Peningkatan SDM dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar; Kebijakan serta inovasi untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :
- 1) Pemerataan kualitas pendidikan secara berkelanjutan yang dilakukan dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung
 - 2) Peningkatan jangkauan akses layanan pendidikan dan kesehatan khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pemberian beasiswa, seragam dan sepatu;
 - 3) Pengembangan sistem layanan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang terintegrasi;
 - 4) Percepatan Vaksinasi booster untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan;
 - 5) Penguatan Sistem Kesehatan Kota dengan penguatan kolaborasi pemerintah dan masyarakat melalui Kader Surabaya Hebat, untuk melakukan deteksi dini atas permasalahan kesehatan di masyarakat serta melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk melakukan pendampingan dan penanganan pada Ibu Hamil Resiko Tinggi (Risti) dan Balita Stunting;
 - 6) Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempermudah akses layanan kesehatan masyarakat baik di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut;
 - 7) Pencegahan, pengendalian, dan penanganan Penyakit Menular serta Penyakit Tidak Menular melalui peningkatan upaya promosi kesehatan,



surveilans kesehatan, deteksi dini resiko penyakit tidak menular dan pemberian imunisasi dasar lengkap.

4. Penguatan Nilai Budaya Lokal, Partisipasi Kepemudaan, serta Ekonomi Kreatif; Kebijakan serta inovasi untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

- 1) Revitalisasi dan pengembangan kawasan dan bangunan cagar budaya;
- 2) Pelaksanaan *event-event* dengan tema budaya;
- 3) Pemberdayaan seniman dan budayawan;
- 4) Pengembangan dan akreditasi museum;
- 5) Penanaman nilai moral kebangsaan dan toleransi dengan falsafah bhineka tunggal ika kepada pemuda;
- 6) Pengembangan iklim industri ekonomi kreatif dengan menyediakan ruang / sarana prasarana rumah kreatif.

5. Peningkatan Ketahanan Pangan

Kebijakan serta inovasi untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

- 1) Gerakan *urban farming* dengan memanfaatkan lahan perkarangan warga;
- 2) Peningkatan diversifikasi pangan;
- 3) Optimalisasi pemanfaatan lahan aset pemerintah kota menjadi lahan produktif budidaya *urban farming*;
- 4) Pelaksanaan monitoring ketersediaan dan harga komoditas pangan;
- 5) Peningkatan kerjasama dengan produsen pangan untuk memastikan kelancaran distribusi pangan.

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengan angka kesakitan 100% yang ditandai dengan adanya pembentukan vesikel/lepuh dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku dengan angka kematian tinggi pada hewan rentan muda/anakan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya tidak masuk dalam daerah wabah PMK. Kendati tidak masuk dalam Daerah wabah PMK, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan Langkah antisipasi berupa pendataan sebaran ternak,



pemberian vaksin serta pengawasan dan pendampingan kepada peternak. Pemantauan kegiatan jual beli ternak juga akan terus dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk pihak kecamatan dan kelurahan. Kegiatan antisipasi tersebut terdapat pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penguatan Sistem Ketahanan Bencana;

Kebijakan serta inovasi untuk mendukung prioritas, yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas sarana pengolahan air limbah rumah tangga;
- 2) Peningkatan pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- 3) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan layak huni;
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hemat energi dan penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan;
- 5) Peningkatan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana alam/ bencana non alam sesuai dengan peta kerawanan bencana.

7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kualitas Pelayanan Publik :

- 1) Pemantapan pelayanan publik berbasis digital;
- 2) Peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan dan penguatan partisipasi masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan utamanya pada perkantoran yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat;
- 4) Pencegahan terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme melalui penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan.

Penyusunan RKPD Tahun 2023, memperhatikan strategi dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Visi pembangunan ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.



Gambar IV.1

Visi, Misi, Arah dan Tujuan Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Sumber : Lampiran 1 Perpres 18 Tahun 2020

Nawacita kedua terdiri atas:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.



Sebagai strategi pelaksanaan Nawacita kedua, Presiden memberikan 5 (lima) arahan, sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi misi pembangunan, selanjutnya diterjemahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagai berikut:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang ingin dicapai antara lain:

- 1) Tingkat Kemiskinan 6,0-7,0%
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka 3,6-4,3 %
- 3) Rasio Gini 0,360-0,374
- 4) Indeks Pembangunan Manusia 75,54
- 5) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,3 %
- 6) Pertumbuhan investasi 6,6-7,0%
- 7) Tingkat Inflasi 2,7%
- 8) Rasio Pajak 10,7-12,3 %PDB
- 9) Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas 6,6-7,0%
- 10) Pertumbuhan Ekspor Non Migas 7,4%
- 11) Share Industri Pengolahan 21%
- 12) Defisit Transaksi Berjalan 1,7% ODB

Tema yang diusung dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah ***“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;



6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan dalam RKP Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
 - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan social sebesar 91%;
 - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
 - d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
 - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
 - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
 - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
 - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
 - g. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.



3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job* dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
 - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
 - b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
 - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
 - d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
 - e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.
5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
 - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
 - d. Peringkat *Global Innovation Index* 75-80;
 - e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
 - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.
6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
 - b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;



- c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
 - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.
7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m³/detik;
 - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
 - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
 - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.
8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
 - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha

Adapun sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2023 antara lain:

- 1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,9%;
- 2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02%;
- 3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0%;
- 4. Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378;
- 5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,29 – 73,35;
- 6. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0%.
- 7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103-105;
- 8. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 105-107;



Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 memperhatikan strategi dan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024.

Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong"

Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Sedangkan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagai penjabaran dari Visi pembangunan adalah:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Strategi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

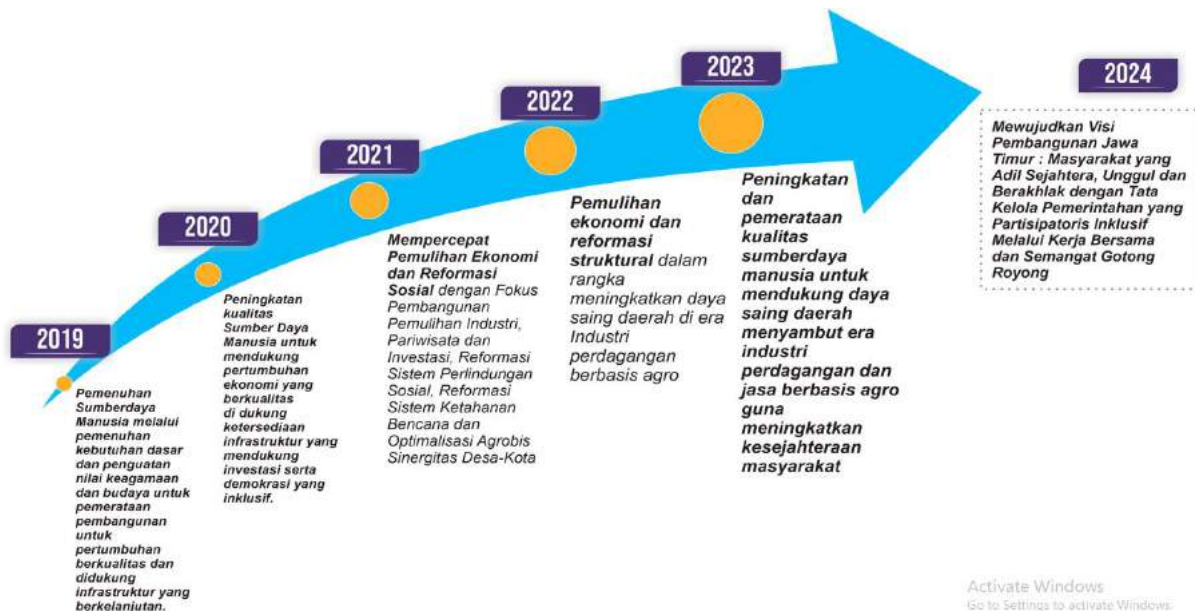
Guna mendukung pencapaian keempat Misi di atas, maka dilakukan melalui serangkaian Strategi Pembangunan sebagai berikut:



1. Penegasan Nilai-nilai Luhur Budaya dan Keagamaan sebagai Perspektif dan Spirit dalam Pembangunan;
2. Pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan Jawa Timur untuk menghadapi disrupsi ekonomi maupun ketidakpastian masa depan (*uncertain future*);
3. Pemenuhan hak dan ruang kepada perempuan (Pengarusutamaan Gender), perlindungan anak dan kelompok rentan dalam berpartisipasi pada proses pembangunan (*Right Based Development*);
4. Memperluas akses dan kesempatan kepada warga untuk memperoleh apa yang dianggap bermakna bagi dirinya (*Development as Freedom*);
5. Pembangunan berbasis kawasan yang sensitif terhadap potensi serta problem khas wilayah untuk memastikan setiap wilayah dengan konteks persoalan yang berbeda-beda dapat tumbuh kembang bersama; dan
6. Percepatan Pembangunan melalui Inovasi di Segala Bidang Berbasis *Information Communication Technology (ICT)*.

Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Mengacu pada Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan di atas, maka Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam ilustrasi *milestone* di bawah ini;



Gambar IV.2 Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024



Tabel IV.2
Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kota Surabaya dengan Prioritas
Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI JAWA TIMUR	ISU STRATEGIS	RKPD KOTA SURABAYA
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui pengembangan ekonomi inklusif.	Pemulihan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Pengembangan infrastruktur hijau dan sistem transportasi perkotaan terpadu (<i>integrated transportation system</i>)	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota
Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan bermartabat	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan sdm dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Mewujudkan harmoni sosial, keamanan dan ketentraman wilayah serta pencegahan dan mitigasi bencana berbasis masyarakat	Penguatan nilai budaya lokal, partisipasi kepemudaan, serta ekonomi kreatif
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui pengembangan ekonomi inklusif.	Peningkatan ketahanan pangan
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan harmoni sosial, keamanan dan ketentraman wilayah serta pencegahan dan mitigasi bencana berbasis masyarakat	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana
Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik



4.2.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, telah diselaraskan dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026, mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan yang ada di dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3

Keselarasan Kebijakan RPJMD Kota Surabaya dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023

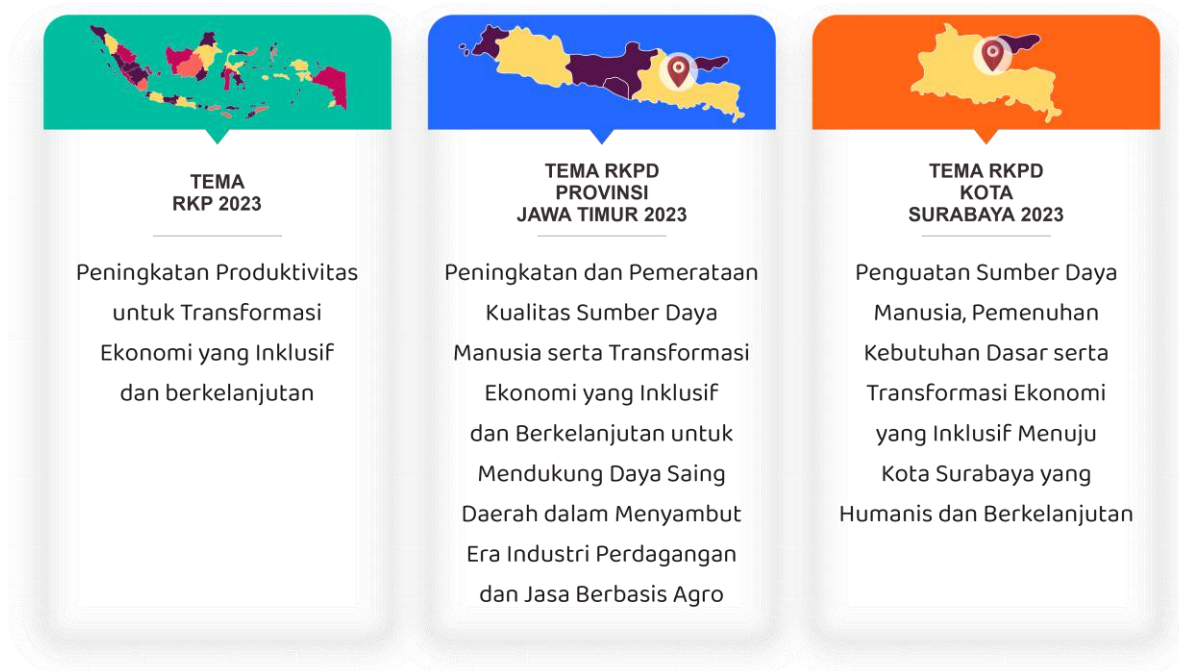
ARAH KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023
Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar berkelanjutan.	1. Pemulihan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya
	2. Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota
	3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
	4. Penguatan nilai budaya lokal, partisipasi kepemudaan, serta ekonomi kreatif
	5. Peningkatan ketahanan pangan
	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana
	7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik



Tabel IV.4
Keselarasn Sasaran Pembangunan Daerah Kota Surabaya, Sasaran
Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan Sasaran Pembangunan Nasional
Tahun 2023

Indikator Makro	Target Kota Surabaya	Target Provinsi Jawa Timur	Target Nasional
Persentase Penduduk Miskin	4,31%	15,00%	7,50% - 8,50%
Indeks Pembangunan Manusia	82,50	73,08 – 73,57	73,31 – 73,49
Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,21%	3,45 – 5,15%	5,30 – 5,90%
Indeks Gini	0,323	0,365 – 0,359	0,375-0,378
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,26%	3,82 – 5,41%	5,30 - 6,00%

Dampak dari Pandemi Covid-19 masih terasa sampai saat ini pada semua lini kehidupan, dengan upaya percepatan vaksinasi, upaya penegakan protokol kesehatan terus dilakukan serta mengajak para pelaku ekonomi untuk bangkit sehingga diharapkan perekonomian segera kembali membaik dan pulih. Selain disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD tahun 2021-2026, penentuan tema pembangunan Kota Surabaya juga disesuaikan dengan tema pembangunan Nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2023 serta tema pembangunan Provinsi Jawa Timur seperti yang telah disampaikan dalam Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :





4.2.3 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023 yang Mendukung Prioritas Pembangunan

Dalam menjalankan program Kota Surabaya melalui serangkaian kegiatan dan sub kegiatan telah seiring dengan pemenuhan atau dukungan terhadap prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Kota Surabaya.



Tabel IV.5
Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023 yang Mendukung Prioritas Pembangunan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
					Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup
					Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Dinas Lingkungan Hidup



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dinas Lingkungan Hidup
				Penyimpanan Sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
					Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan	Dinas Lingkungan Hidup



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan	Peningkatan ketahanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
ekonomi dan pelayanan dasar	sumber daya energi		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Prasarana Pertanian		Prasarana Pertanian Lainnya	
				Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Pemulihan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Program Pelatihan Kerja	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
					Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
			Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Pengelolaan Mutasi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Pengelolaan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Pengelolaan Data Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Sumber Daya Manusia
					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	31 Kecamatan
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	31 Kecamatan (154 Kelurahan)
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31 Kecamatan (154 Kelurahan)
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31 Kecamatan
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	31 Kecamatan
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	31 Kecamatan
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
				Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah
					Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekretariat Daerah
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah
					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sekretariat Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sekretariat Daerah
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah
			Program Dukungan Pelaksanaan	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tugas Dan Fungsi DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD
			Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
					Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Penelitian dan Pengembangan
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dinas Komunikasi dan Informatika



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Informasi Dan Komunikasi Publik	Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pendapatan Daerah
					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah
					Penagihan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
					Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pendapatan Daerah
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja
					Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja
					Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
					Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
					Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan (63 Puskesmas)
						RSUD Bhakti Dharma Husada
						RSUD dr. Mohamad Soewandhie
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
						Dinas Kependudukan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						dan Pencatatan Sipil
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	31 Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	31 Kecamatan
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	31 Kecamatan
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	31 Kecamatan
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31 Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat
					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat
					Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat
					Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	31 Kecamatan
					Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	31 Kecamatan
			Program Perencanaan, Pengendalian	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Standardisasi	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Dan Perlindungan Konsumen	Ulang, dan Pengawasan		Menengah dan Perdagangan
				Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
					Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
					Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
					Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
					Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
			Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Perkeretaapian	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Permukiman serta Pertanahan
			Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
					Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
			Program Pengembangan Perumahan	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
						Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
					Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
					Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
					Rehabilitasi Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
					Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dinas Perhubungan
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian	Dinas Perhubungan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Berkala Kendaraan Bermotor	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Sistem Informasi Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Permukiman serta Pertanahan
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRT) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar				Keluarga Berencana
					Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan + 63 Puskesmas
			Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Pengendalian Program KKBPK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
					Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
						RSUD Bhakti Dharma Husada
						RSUD dr. Mohamad Soewandhie
					Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dinas Kesehatan
					Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
					Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan (63 Puskesmas)
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan + 63 Puskesmas
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan + 63 Puskesmas
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan + 63 Puskesmas
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan + 63 Puskesmas
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan + 63 Puskesmas
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan + 63 Puskesmas



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan + 63 Puskesmas
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan + 63 Puskesmas
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan + 63 Puskesmas
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
			Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kewenangan Kabupaten/Kota		Keluarga Berencana
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan
					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Daerah Kabupaten/Kota		Keluarga Berencana
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
			Program Pengembangan Kapasitas Daya	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Saing Kepemudaan	Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Olah Raga serta Pariwisata
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
			Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Keluarga Berencana
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan + 63 Puskesmas



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial
					Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial
					Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial
					Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Penguatan nilai budaya lokal, partisipasi kepemudaan, serta ekonomi kreatif	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
			Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
			Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, dan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Olah Raga serta Pariwisata
					Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
			Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



4.2.4 Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023

Pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023 dijabarkan dalam Tabel IV.6 berikut ini yang memuat indikator sasaran beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2023 dari setiap indikator sasaran tersebut.

Tabel IV.6
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran 2023
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3,86%
			Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	3,70%
			Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	5,18%
			Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5,25%
			Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	16,60%
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	5,50%
			Persentase tenaga kerja yang terserap	21,57%



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran 2023
		kerja dan pengentasan kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,83
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religious, berbudaya dalam bingkai kebhinekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pendidikan	78,52
			Angka Harapan Hidup	74,44
			Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	2,28%
			Skor Pola Pangan Harapan	94,00
	Pembentukan karakter masyarakat	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,74
			Indeks Budaya Lokal	89,30
			Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	56,46
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	Indeks Kepedulian Sosial	89,20
			Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,800
			Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,503



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran 2023
infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	sosial dan ekonomi masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,690
	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	56,08
			Indeks Kualitas Udara	90,33
			Indeks Kualitas Lahan	42,69
			Indeks Persampahan	77,54
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	82,97
			Opini BPK	WTP
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Baik
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	89,23%
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks ketentraman dan ketertiban kota	0,87
		Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	Indeks Penanggulangan Bencana	0,828



4.2.5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok Pikiran DPRD RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD disajikan dalam tabel IV.7 sebagai berikut:



Tabel IV.7

Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen RKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Lomba-lomba Akademis dan Non Akademis	100 ORANG	JL. BUBUTAN GANG 6/2 PC FATAYAT NU SURABAYA, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata					
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pembangunan Lapangan Bola Volley	162 m2 / meter persegi	PONDOK BENOWO INDAH RT 2 RW 7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pembangunan Lapangan Bola Volley	56 Meter	Pondok Benowo Indah RT.007 RW.08 Kel.Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	350 m2	belakang kantor kejaksaan sukomanunggal RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pembangunan Lapangan Tennis	20 m	RW 05 Nginden, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pembangunan/Rehabilitasi Lapangan Futsal	1 lokasi	jl sambikerep 1,2,3,4, RT 05 Rw 07 dekat pos korwil 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pembangunan/Rehabilitasi Lapangan Futsal	1 lokasi	Perum YKP Penjaringan Sari PS2 RW 11 Penjaringan Sari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pembangunan/Rehabilitasi Lapangan Futsal	1 lokasi	Pondok Benowo Indah RW.08 Kel.Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pembangunan/Rehabilitasi Lapangan Futsal	1 lokasi	RW 06 Kel Karang Poh (Gadel) Tandes, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
10	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pembangunan Paving	250 Meter	PONDOK BENOWO INDAH RT 3 RW 12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
11	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pembangunan/Rehabilitasi Lapangan Futsal	1 lokasi	Jl. Bangkingan RT. 04 RW. 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
12	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pembangunan/Rehabilitasi Lapangan Futsal	1 lokasi	Lapangan futsal dupak bangunsari RT 05-06 RW 04 No. telp 08819094842 (Yono), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
13	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Rehabilitasi Lapangan Olah Raga	162 m2 / meter persegi	RT 4 RW 14 PONDOK BENOWO INDAH, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
14	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Rehabilitasi Lapangan Olah Raga	38 m2 / meter persegi	Jl.Sambiroto 4C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
15	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Rehabilitasi Lapangan Olah Raga	80 m / meter	PONDOK BENOWO INDAH RT 11 RW 7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Dinas Kesehatan					
16	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 1 Unit	Sidotopo Sekolah 12/65 kontak person : 081216225559 Lailatul, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
17	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 1 Unit	Sukodono no.6 RT.1 RW.15 kontak person ; 085102771034 Fatimah, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
18	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 pcs	JL.KLAKAH REJO 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
19	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 pcs	JL.Klakah Rejo Lor 66 4B No 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
20	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 pcs	Kandangan 3F, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
21	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 pcs	Kandangan Pemula No 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
22	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 pcs	Kandangan RT 1 RW 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
23	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 pcs	Kendung Indah 1B/16 RT 12 RW 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
24	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 pcs	Perum Kehakiman E-03 RT 6 RW 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
25	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 pcs	Posyandu Melati 6 Kandangan Rejo 4/1 RT 6 RW 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
26	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 pcs	RAYA TENGGER 6/44 SURABAYA, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
27	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 pcs	Tengger Kandangan XXI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
28	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 set	Penjaringan sari RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
29	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Banjarsugihan Baru I No.40 RT.008 RW.004 Kel. Banjarsugihan Kec. Tandes, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
30	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Banjarsugihan Baru I No.40 RT.008 RW.004 Kel.	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				Banjarsugihan Kec. Tandes, Kota Surabaya	
31	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Banjarsugihan Baru I No.40 RT.008 RW.004 Kel. Banjarsugihan Kec. Tandes, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
32	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Buntaran I No.1 RT.001 RW.004 Kel.Manukan Wetan Kec. Tandes, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
33	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Buntaran I No.1 RT.001 RW.004 Kel.Manukan Wetan Kec. Tandes, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
34	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Buntaran I No.1 RT.001 RW.004 Kel.Manukan Wetan Kec. Tandes, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
35	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Buntaran I No.1 RT.001 RW.004 Kel.Manukan Wetan Kec. Tandes, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
36	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Jalan Banyuurip Kidul 10E. RT 13/RW 09, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
37	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	JL KAPAS BARU 1 RW 07 MASCHURI 081331912897, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
38	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	JL Kapas Lor Wetan 3 Bunadi 08176639139, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
39	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Jl tenggumung karya lor gang IV, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
40	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Jl tenggumung karya lor gang XIV, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
41	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	JL. KAPAS JAYA NO 82 BALAI RW 08 KMB, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
42	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	JL. KAPAS LOR 2 BALAI RW 06 SUHARTO 088228195478, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
43	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	JL. KAPAS MADYA 4 K MULYONO 081931090597, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
44	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Jl. Karangrejo 6. RT 04/RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
45	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Jl. Tenggumung Karya Lor Gg. I, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
46	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Jl. Tenggumung Karya Lor Gg. IV, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
47	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Jl. Tenggumung Karya Lor Gg. X, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
48	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Jl. Tenggumung Karya Lor Gg. XIV, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
49	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Juwangan I/36, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
50	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Karangrejo Sawah XI. RT 08/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
51	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Kupang Gunung Jaya 4. RT 04/RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
52	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Kupang Gunung Jaya 4. RT 04/RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
53	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Pos yandu balita Rw 09, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
54	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	RW 10 Posyandu Melati RT 9 Jl Juwingan 1 no 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
55	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	RW08. Karangrejo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
56	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	RW10 RT10 Jl Juwingan 1/36, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
57	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	RW2 RT5 Jl Gubeng Airlangga VI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
58	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	Simo Gunung Kramat Timur 1. RT 3/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
59	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	1 Unit	simo gunung kramat timur 7. RT 10/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
60	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	2 Buah	Jln. Rungkut Kidul gg 1 Rw 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
61	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	2 Buah	Jln. Rungkut Kidul gg 1 Rw 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
62	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	2 Buah	Jln. Rungkut Kidul gg 1 Rw 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
63	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	2 Buah	RT 02 RW 02 Pagesangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
64	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	2 Pcs	POSYANDU DIPONEGORO 1 Romokalisari RT 3 RW 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
65	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	2 Pcs	POSYANDU DIPONEGORO 1 Romokalisari RT 3 RW 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
66	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	2 Pcs	POSYANDU TUNAS BANGSA RT 1 - 6 RW 7 PONDOK BENOWO INDAH, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
67	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	2 unit	jalan sulung tengah, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
68	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	2 unit	Jl tenggumung karya lor gang I, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
69	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	2 unit	Jl tenggumung karya lor gang X, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
70	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	2 unit	Jln. Rungkut Kidul gg 1 Rw 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
71	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	2 unit	Kenjeran 163-A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
72	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	2 unit	Kenjeran 163-A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
73	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	2 unit	RW13 RT2,RT5 Jl Keputran Panjuran III, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
74	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	3 unit	balai rw.09 tambak asri 250, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
75	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	3 unit	balai rw.09 tambak asri 250, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
76	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	3 unit	balai rw.09 tambak asri 250, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
77	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	3 unit	Jangkungan II A no. 9, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
78	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	3 unit	Jangkungan II A no. 9, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
79	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	4 unit	Jambangan Baru Selatan (Rusunawa 1 Jambangan), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
80	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	4 unit	Jambangan Baru Selatan (Rusunawa 1 Jambangan), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
81	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	5 biji	Dharmahusada Dalam No. 8-B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
82	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	5 biji	Dharmahusada Dalam No. 8-B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
83	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	5 buah	TENGGUMUNG WETAN GANG CERME RT 12 RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
84	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	5 Pcs	Kandangan Gunung Bhakti Pemula No.2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
85	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	5 unit	Bogen No. 15 F, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
86	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	5 unit	Bogen No. 15 F, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
87	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	5 unit	Bogen No. 15 F, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
88	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	5 unit	Jl. Kaliasin, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
89	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	9 unit	Jl. Gayungan Gg. Manggis No. 2. contact person : 081233615516 (Ade Kusuma Wardhani/ Wakil Ketua PKK Kel. Gayungan), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
90	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	9 unit	Jl. Gayungan Gg. Manggis No. 2. contact person : 081233615516 (Ade Kusuma Wardhani/ Wakil Ketua PKK Kel. Gayungan), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
91	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlengkapan Posyandu	9 unit	Jl. Gayungan Gg. Manggis No. 2. contact person : 081233615516 (Ade Kusuma Wardhani/Wakil Ketua PKK Kel. Gayungan), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
92	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tas Antropometri	1 Unit	Banjarsugihan Baru I No.40 RT.008 RW.004 Kel. Banjarsugihan Kec. Tandes, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
93	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tas Antropometri	1 Unit	Buntaran I No.1 RT.001 RW.004 Kel.Manukan Wetan Kec. Tandes, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
94	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tas Antropometri	1 Unit	Dukuh Pakis I NO.66 RT.001 RW.006 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
95	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tas Antropometri	1 Unit	Kupang Gunung Jaya 9. RT 09/RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
96	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	balai rw.09 tambak asri 250, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
97	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	Bandarejo Tama RT 1 RW 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
98	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	Bogen No 15 F, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
99	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	Dharmahusada Dalam No. 8-B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
100	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	GRIYA BENOWO INDAH H 22, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
101	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	Jalan Karangrejo sawah XI. RT 08/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
102	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	Jambangan Baru Selatan (Rusunawa 1 Jambangan), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
103	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	Jangkungan II A no. 9, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
104	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	JL. KAPAS BARU 1 MASCHURI 081331912897, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
105	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	JL. KAPAS JAYA NO 82 SBY, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
106	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	JL. KAPAS LOR 2 BALAI RW 06 SUHARTO 088228195478, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
107	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	jl. Kapas Lor Wetan 3 bunadi Balai RW 05 08176639139, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
108	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	JL.BANDAREJO TAMA RT 1 RW 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
109	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	JL.Klakah Rejo Lor 66 4B No 01, Kota Surabaya, Benowo, Kandangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
110	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	POSYANDU GUNUNG AGUNG Klakah Rejo 2A/25 RT 1 RW 8, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
111	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	Posyandu Melati 6 Kandangan Rejo 4/1 RT 6 RW 1, Kota Surabaya, Benowo, Kandangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
112	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	RW 03 Wonosari Kidul, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
113	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	RW 08. Karangrejo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
114	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	RW10 RT10 Jl Juwangan 1/36, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
115	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	Simo Gunung Kramat Timur 1. RT 03/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
116	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	simo gunung kramat timur 7. RT 10/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
117	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	Tengger Kandangan 17/14 RT 1 RW 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
118	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	1 Unit	Wisma Tengger 6/21 RT 2 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
119	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	2 unit	Kenjeran 163 A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
120	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	2 unit	PKK RT 02 RW 02 Pagesangan RT 02 RW 02 Pagesangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
121	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	3 unit	POSYANDU DAHLIA, SAKURA, HARAPAN RT 1,2,4,5 RW 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
122	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Badan	9 unit	Jl. Gayungan Gg. Manggis No. 2. contact person : 081233615516 (Ade Kusuma Wardhani/Wakil Ketua PKK Kel. Gayungan), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
123	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket Budidaya Perikanan Lele	1 Ls	Gadel Tengah RW 06 Kel Gadel - Tandes, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
124	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket Budidaya Perikanan Lele	1 set	Bumi Sari Praja RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
125	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Alat Tangkap Waring	2 unit	Rt 2 RW 2 Sukolilo Baru, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
126	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Alat Tangkap Waring	5 roll	RT 1 RW 2 Kelurahan Sukolilo Baru, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan					
127	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	1 jenis usaha	alamat usaha : jl. kedondong lor 5 no.7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
128	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	1 jenis usaha	bagong ginayan 4d no 8 surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
129	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	1 jenis usaha	bagong ginayan 4d no, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
130	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	1 jenis usaha	Dukuh Kupang XVI no 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
131	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	1 jenis usaha	GAYUNGSARI 2 NO 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
132	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	1 jenis usaha	GAYUNGSARI 2 NO 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
133	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	1 jenis usaha	jl tidar 157 C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				
134	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	1 jenis usaha	Jl. Girilaya 2/4, Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
135	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	1 jenis usaha	Jl. Kebangsren 3/14 Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
136	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	1 jenis usaha	Kendangsari VI no. 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
137	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	1 jenis usaha	Krukah lama 2 no 16A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
138	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	1 jenis usaha	teluk sampit 47, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
139	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	1 jenis usaha	ngagel dadi 1-14, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
140	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	1 jenis usaha	petemon kuburan no.71, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
141	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	1 jenis usaha	Dukuh Kupang XVI no 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
142	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	bagong ginayan 4d no 8 surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
143	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	Dukuh Kupang XVI no 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
144	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	GAYUNGSARI 2 NO 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
145	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	jl Krukah lama 2 no 16A RT.04 RW.09, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
146	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	jl tidar 157 C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
147	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	jl tidar 157 C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
148	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	Jl. Girilaya 2/4, Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
149	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	Jl. Girilaya 2/4, Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
150	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	Jl. Kebangsren 3/14 Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
151	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	Jl. Kebangsren 3/14 Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
152	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	jl. kedondong lor 5 no.7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
153	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	jl. kedondong lor 5 no.7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
154	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	Kendangsari VI no. 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
155	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	Kendangsari VI no. 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
156	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	Krukah lama 2 no 16A RT.04 RW.09, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
157	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	ngagel dadi 1-14, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
158	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	petemon kuburan 71, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
159	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	petemon kuburan 71, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
160	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	teluk sampit 47, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
161	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	teluk sampit 47, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
162	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	10 orang	Gubeng Kertajaya 5E, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
163	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	10 orang	Kranggan RW 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
164	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	10 orang	Pandegiling RT 06 RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
165	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	5 orang	Mojoklanggru Lor RT 9 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
166	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	8 orang	jalan kawatan 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
167	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 jenis usaha	ngagel dadi 1-14, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
168	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Terkait Perizinan NIB	1 perumahan	Balai RT 01 dan RT 02 RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
169	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	1 kampung	Jl. Kejawan Putih Tambak Gang 24 No. 50 RW. 002, Kel. Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
170	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	1 kampung	Kuwukan RT 01 dan RT 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
171	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	1 kampung	RT 01 RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
172	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	1 kampung	RT 04 RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
173	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	1 kampung	RT 09 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
174	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	1 kampung	RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
175	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	1 kampung	Sepat Lidah Kulon, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
176	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	10 orang	Kedondong RT 10 RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
177	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	10 orang	Kranggan RW 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
178	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	10 orang	RT 02 RW 12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
179	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	10 orang	Tempel Sukorejo RT 07 RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
180	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	10 orang	Undaan Wetan RT 05 RW 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
181	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	100 Usaha	Jl jolotundo baru III, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
182	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	10 orang	Pandegiling RT 06 RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
183	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	10 orang	Jalan Gubeng Jaya Langgar RW 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
184	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	10 orang	Pandegiling RT 05/RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
185	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	4 unit	Jl. Keputran Panjunan 3 RT 07 RW 13, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
186	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	5 unit	Jl. Keputran Panjunan 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
187	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	5 unit	Jl. Tambakrejo 83, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
188	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	50 ORANG	kendangsari 120 pac fatayat nu tenggilis mejoyo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
189	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi Permodalan	50 ORANG	Lidah Haparan Blok V-39, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
190	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan Koperasi	10 orang	Kranggan RW 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Dinas Lingkungan Hidup					
191	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Taman	1 taman	Jl. Raya Kutisari Indah Selatan, RT 02 RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
192	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Taman	143 meter	Jl. Raya Bendul Merisi RT 01 RW 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
193	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Taman	174 m2	Kutisari Indah Selatan RT 02 RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
194	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Taman	50 m2 / meter persegi	PONDOK BENOWO INDAH RT 1 RW 8, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
195	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Taman	56 Meter	Jl. Tales III RT 02 RW 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
196	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pembangunan Paving	30 Meter	Makam Rw.02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
197	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pembangunan Paving dan Saluran	400 meter	JL RAYA KENDUNG RW 02. Pengusul : Bpk.SURIYANTO. HP. 081233298396., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
198	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pembangunan TPS	20 m2	RW 05 Nginden, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					
199	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Afsluiter Tandon Air Kebakaran	1 Unit	RT 10 RW 12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
200	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Afsluiter Tandon Air Kebakaran	10 m3	Wonorejo Selatan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
201	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Pembuatan Tandon Air kebakaran	3 unit	gundih lapangan rt10 rw 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Dinas Perhubungan					
202	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	1 Titik	Jl. Bulak rukem VI/71 RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
203	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	1 Titik	JL. JEMUR GAYUNGAN 1, RT. 002 RW. 003, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
204	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	1 Titik	Jl. Kedung Mangu Timur 1A/2 RT.11 RW.10 kontak person : 081393292292, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
205	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	1 Titik	JL. SUKOMANUNGGAL BARU SELATAN PJKA, BALAI RW. 005, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
206	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	1 Titik	Jl. Wonokusumo Jaya Baru 7/22 Rt.09 Rw. XI. contct person : 087704718427 (Fathur Rozi), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
207	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	1 Titik	Jl. Wonokusumo Jaya Baru 8//34 RT.13 RW. XI komtak person : 083857084559 Moch. Khotib, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
208	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	1 Titik	Jl. Wonokusumo Jaya Baru 9 RT.20 RW. XI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
209	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	1 Titik	Jl.Sambiroto 4C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
210	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	1 Titik	Karangrejo V. RT 05/RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
211	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	1 Titik	makam kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
212	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	1 Titik	Tengguung Baru Selatan XII/10A Kontak Person : 081259963702 Fachrudin, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
213	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	1 Titik	Wonoayu Gg 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
214	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	1 Titik	Wonokusumo jaya baru 8/34 RT.13 RW XI Kontak Person : 087854700864 Romli, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
215	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	Dupak Bangunsari RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
216	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	Gembong Sayuran RT 07/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
217	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	Gg. tengah mulai dari utara masjid sampai Gg.21 RW.08 Sidotopo Wetan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
218	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	Gubeng Masjid 4 RT 05 RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
219	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	Gunung Anyar Tengah VII - D RT 02 RW 03 (Ahmad Sanusi 081216033139), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
220	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	Jalan Amir Mahmud VII - B RT 04 RW 02 (H. Usman Ali 081232648909), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
221	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	Jalan Dupak Masigit PJKA gang VII RT 13/RW 02. Cp : Moch. Romli 082132314825, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
222	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	jalan pradah indah, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
223	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	jl sumber mulyo 3 RT 3 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
224	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	jl wonokitri besar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
225	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	Jl. Dupak Rukun, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
226	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	Jl. Jatisrono Barat Gang 1 (Mochamad Zabir - 08121685545 / 081234332045), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
227	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	Jl. Jatisrono Timur Gang 1 (Mochamad Zabir -	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				08121685545 / 081234332045), Kota Surabaya	
228	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	jl. kencanasari timur, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
229	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	Jl. Plemahan 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
230	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	Jl. Plemahan 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
231	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	Jl. Plemahan Besar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
232	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	Keputran Kejambon RW 12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
233	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	lidah kulon III, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
234	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	makam RW 5 di rt 1 rw 5 kelurahan kebraon, no bp.sigit telp.082332080222, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
235	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	Randu Timur Lebar 2 RT.12 RW.10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
236	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	RT 01 RW IV Asem Jaya No. Telp. 081235160309 (Hamzah), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
237	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	rt 05 rw 04 kelurahan babat jerawat kecamatan pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
238	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	RT.04 RW.14 Jl. Petemon IV, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
239	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	tenggumung wetan gg.manggis RT.12 RW.08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
240	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	10 Titik	Undaan Wetan RT 05 RW 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
241	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	11 Titik	RT.05 RW.06 Jl. Banyu Urip Lor 9/50, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
242	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	11 Titik	tambak Wedi baru Gg 16 RT 04 RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
243	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	12 Titik	Jl. Kedung Mangu 4 RT.17 / RW.03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
244	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	12 Titik	klampis semelang IV RW. 003, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
245	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	12 Titik	LEBAK JAYA 2 TENGAH UTARA RT 10 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
246	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	12 Titik	Tambak Wedi Baru 13, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
247	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	12 Titik	Tambak Wedi baru 14b no. 5, Rt07/ Rw04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
248	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	13 Titik	RT.01 RW.04 Jl. Banyu Urip Kidul 1C/16 B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
249	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	15 Titik	Gunung Anyar Kidul V-B RT 02 RW 03 (Achmad Sanusi 081216033139), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
250	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	15 Titik	Jl. Kutisari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
251	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	15 Titik	Keputran Kejambon II, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
252	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	15 Titik	sepanjang jl kejawan lor RT 1 - RT 5 RW 2 (tepi pantai) kontak person : kusnadi (085853476349), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
253	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	15 Titik	tenggumung wetan gg manggis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
254	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	18 Titik	Sememi Jaya Utara Rel Gang 3 RT 03 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
255	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	18 Titik	Sepat Lidah Kulon RW. 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
256	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	18 Titik	TELUK ARU 4/18 RT 3 RW 4 (ALI IMRON, 0812-3393-3923, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
257	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	2 Titik	BANYU URIP WETAN TENGAH 6 No. 4 RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
258	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	2 Titik	Dk. Kuwukan 1 RT 01 RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
259	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	2 Titik	Dk. Kuwukan 1 RT 01 RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
260	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	2 Titik	Dk. Kuwukan 1 RT 01 RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
261	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	2 Titik	Gadel Jaya Timur Blok.CC, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
262	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	2 Titik	gunung anyar lor 3 depan mushola al- muslimun, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
263	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	2 Titik	gununganyar lor 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
264	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	2 Titik	jl Kuwukan Gang 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
265	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	2 Titik	Jl. Dukuh Kupang 19 RT 04 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
266	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	2 Titik	JL. KAPAS MADYA 2 DEKAT KELURAHAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
267	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	2 Titik	Ketandan Baru 4 No. 9 RT 12 RW 04 No. Telp 082244805535 (Jazuli), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
268	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	2 Titik	MAKAM RW. 003, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
269	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	2 Titik	RT 07 rungkut lor gg 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
270	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	20 Titik	Jatipurwo v/71 RW.13, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
271	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	20 Titik	kalijudan 4 RT 1 RW 2 kontak person : Doni (0895393310756), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
272	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	20 Titik	RW13 RT4 Jl Keputran Panjunan III, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
273	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	20 Titik	TELUK NIBUNG TIMUR 2 RT 02, RW 08 (IMAM CHOLIK, 0822-3459-3214), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
274	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	22 Titik	Jl tambak wedi tengah timur RT 06 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
275	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	24 Titik	LINGKUNGAN RT. 015 RW. 003, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
276	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	25 Titik	Jl. Sencaki Gang 1 (Suluhwati - 088217908366), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
277	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	25 Titik	RT.02 RW.05 Jl. Pakis Gunung 1/133, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
278	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Bulak Setro Utara Gg 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
279	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Bulak Setro Utara Gg Makam dan dekat lapangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
280	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Dupak Timur 2 No. 4 RT 06 RW 08 No. Telp. 087756203935 (Yanto), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
281	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Gang Musang Pesapen RT. 01 RW. 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
282	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Jl Bnetul 7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
283	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Jl dinoyo gang VI RT 3 RW 3 kontak person : Suharti (087878800428), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
284	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Jl. Bentul 7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
285	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Jl. Gunung Anyar Tengah Gang VIII A, RT 09 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
286	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Jl. Gunung Anyar Tengah Gang VIII B, RT 09 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
287	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Jl. Gunung Anyar Tengah gang VIII Buntu, RT 09 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
288	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Jl. Gunung Anyar Tengah Gang VIII C, RT 09 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
289	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Jl. Jambangan IIb RT 01 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
290	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Jl. KAPAS MADYA 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
291	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Jl. KAPAS MADYA BARAT 5 RT 4 RW 1 MUAD 082132905788, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
292	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Jl. Kedung Rukem 4 RT 01 RW 07 No. Telp. 085784752543 (Iliyin/Amin), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
293	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Jl. TUWOWO REJO 7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
294	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	jl.demak rt.06 rw.08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
295	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Ketandan Bong No. 24 RT 04 RW 04 No. Telp. 085851369048 (Subagyo Edi Purwoko), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
296	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Ketandan lama 1 No. 15 RT 02 RW 04. No Telp. 085854054144 (Siswandoko), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
297	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Ketandan lama 2 RT 01 RW 04. No Telp. 085755466854 (Aditya Dana Kusdhiar), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
298	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	PONDOK BENOWO INDAH RT 5 RW 7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
299	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	RAYA SIMOREJOSARI B RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
300	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	RT 2 RW 5 Margorejo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
301	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	SIMO GUNUNG BARU RW 01, RT 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
302	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	VILLA BEJI RT 3 RW 4. pengusul : BUDI PRAJITNO HP. 085100329086, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
303	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Wonorejo Selatan Gg 3A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
304	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	30 Titik	medokan tambak RT 12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
305	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	BALAI KELURAHAN SIMOMULYO BARU, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
306	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	BANYU URIP KIDUL I RW 05, RT 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
307	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	BANYU URIP KIDUL I RW 05, RT 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
308	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	Bratang Binangun 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
309	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	Bulak Setro 1B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
310	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	demak timur 142 rt 12 rw 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
311	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	Dk.Jerawat Gg 6 RT 2 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
312	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	Dk.Jerawat Gg 9 RT 9 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
313	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	Dukuh Jerawat RT 2 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
314	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	Jalan Ketintang 4B. RT 09/RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
315	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	jl semolowaru utara gang 1 RT 1 RW 1 makam umum RW 1 semolowaru kontak person : Mukhlis (085732198154), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
316	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	Jl Tambak Medokan Ayu Gg X, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
317	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	JL. BEJI RAHAYU GANG 6A RT 01 RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
318	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	Jl. Gadel Baru gg Buntu RT 11 RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
319	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	JL. KAPAS LOR 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
320	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	JL. KAPAS MADYA 1 REGENCY, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
321	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	JL. KAPAS MADYA 2 DEKAT GAPURA, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
322	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	Jl. Kedung Rukem 4, RT 07 RW 07, No. Telp. 085716434555 (Cahya Budi Santoso/Sudarmanto), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
323	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	Jl. Ketintang Gg 4A. RT 05/RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
324	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	Karangrejo 2. RT 02/RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
325	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	Karangrejo Balong. RT 08/RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
326	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	Kebraron I No. 12-A RT.001 RW.001 Kel. Kebraron Kec. Karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
327	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	Kedung Mangu 4D RT.17 RW.03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
328	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	makam cumpat RW 2 Kontak person : Samiadi santoso (082142056637), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
329	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	Nambangan perak baru gang H. Sulaiman RT 3 RW 2 kontak person : Mas"ud (082140678431), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
330	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	PAKAL BARAT 1A. RT 1 RW 3. PENGUSUL : H. SUHAIMI. B.A. HP. 085101349877., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
331	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	Pakis Gunung Langgar. RT 08/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
332	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	PBI CQ 34 RT 3 RW 12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
333	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	PONDOK BENOWO INDAH WW 08 RT 2 RW 8, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
334	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	RT.01 RW.05 Jl. Simo Pomahan Baru GG Protokol / Pabrik, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
335	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	SIMOHILIR 7 RW 04, RT 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
336	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	SIMOHILIR 7 RW 04, RT 12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
337	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	SIMOHILIR 8 RW 04, RT 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
338	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	4 Titik	Tambang Boyo No 32, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
339	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	BABAT JERAWAT GANG MSJID. RT 1 RW 03. pengusul : BPK. IBNI. HP. 083849009178., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
340	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Balas gang nakula, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
341	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	BANYU URIP KIDUL 6-G RW 09, RT 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
342	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	BANYU URIP KIDUL gg. II RW 04, RT 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
343	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	BANYU URIP KIDUL gg. II RW 04, RT 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
344	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	BANYU URIP KIDUL GG. II RW 04, RT 15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
345	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	BANYU URIP KIDUL I-A RW 05, RT 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
346	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	BANYU URIP KIDUL MOLIN 2 gg. BENTENG RW 04, RT 13, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
347	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	BANYU URIP KIDUL MOLIN 2-B RW 04, RT 12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
348	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Benowo Sawah Barat, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
349	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Bogen 15 F, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
350	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Bratang Binangun 5B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
351	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Bulak Cumpat Srono IV, IV A, dan Gg Made, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
352	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Bulak Kalitintang Baru Timur 1 & 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
353	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Bumi Sari Praja gang 1 gang 2 gang 4 dan gang 7 RT 8 RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
354	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Dk.Jerawat Gg 7 RT 3 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
355	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Dk.Jerawat RT 2 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
356	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Dk.Jerawat RT 4 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
357	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Dsn. TAMBAK DONO RT4 RW 7. pengusul : BPK. SULADI. HP. 082232383577., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
358	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Dsn. TAMBAK DONO RT 1 RW 7. PENGUSUL : BPK. SULADI (KETUA RW). HP. 082232383577., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
359	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Dsn. Tambak Dono RT 2 RW 7. pengusul : Bpk. SULADI. HP. 082232383577., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
360	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Dsn. TAMBAK DONO RT 3 RW 7. Pengusul: BPK. SULADI (KETUA RW). Hp. 082232383577., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
361	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Dsn. TAMBAK DONO. RT 2 RW 7. PENGUSUL : BPK. SULADI (KETUA RW). HP. 082232383577., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
362	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Dsn. TAMBAK DONO. RT 3 RW 7. PENGUSUL : BPK. SULADI. HP. 082232383577., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
363	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Dukuh Bulu RT.004 RW.004 Kel. Lontar Kec. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
364	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	DUKUH KUKUN RT 1 RW 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
365	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	gadel madya 1 gang dalam, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
366	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	gadel madya 1 gang dalam, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
367	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	griya kebraon RT 02 RW 09, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
368	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	griya Kebraon RT 02 RW 12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
369	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	griya Kebraon RT 03 RW 09, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
370	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	griya Kebraon RT 04 / RW 09, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
371	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	griya Kebraon RT 05 RW 09, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
372	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	griya kebraon RT 05 RW 12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
373	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	griya Kebraon RT 06 RW 09, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
374	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	griya Kebraon RT 06/RW12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
375	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	GUNUNG SARI RT 02 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
376	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jalan Jetis Kulon 1 Blok B RT 20/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
377	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jalan Karangrejo 6 Masjid. RT 07/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
378	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jalan Ketintang 4E. RT 06/RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
379	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jalan Ketintang Gang 2. RT 02/RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
380	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jalan Pulo Wonokromo. RT 10/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
381	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl Bratang binangun 5A(Soedirman), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
382	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	jl bumiarjo RT 01 RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
383	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	jl Gang Mushola RT 02 RW 06 kuwukan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
384	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl indrapura jaya tengah, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
385	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl Kalijudan HKS, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
386	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl Krukah Selatan 14 B Rt.10 Rw.05. contact person : 081333082569, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
387	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl Margorejo II G, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
388	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl Mulyorejo Selatan Baru (mushola ke timur), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
389	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl Putra Bangsa III Blok A, Blok F, Blok G, dan pinggir kali, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
390	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl Raya TK, Gg TK2, Gg TK3, Gg Makam1, dan Gg Makam2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
391	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl. DUKUH PAKIS RT 05 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
392	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl. Gadel Baru 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
393	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl. Gadel Baru kapling 1 RT 11 RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
394	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl. Gadel Tengah gg 04 RT 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
395	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 50-A Rt.09 Rw.02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
396	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl. Inspeksi Karah. RT 01-04/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
397	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS BARU GG 4 RT 7 RW7 MASCHU, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
398	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS BARU GG. 5 RT 8 RW 7 ABD. SHOMAD, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
399	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS BARU IV SISI SELATAN SEKOLAHAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
400	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS BARU RAYA MASCHU, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
401	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS BARU RAYA RW 07 MASCHURI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
402	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS JAYA BUNTU NO 53, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
403	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS JAYA NO 24B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
404	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS JAYA NO 88, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
405	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS LOR WETAN 4 DEPAN MAKAM, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
406	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS LOR WETAN IV, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
407	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS MADYA 1A1 H. MARJUKI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
408	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS MADYA 2/1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
409	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS MADYA 3 I, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
410	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS MADYA 3B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
411	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS MADYA 6 RT17 RW 02 MARKADI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
412	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS MADYA 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
413	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS MADYA I C1 PAK MUDJITO 081231177166, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
414	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS MADYA IV J, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
415	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KAPAS MADYA 4J, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
416	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. KARANGGAYAM RT 03 RW 08 DHARMARAKYAT Pak Heru 081231862592, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
417	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl. Karangrejo 6. RT 01/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
418	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl. Kendung Gang III Kavling RT.002 RW.003 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
419	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl. Ketintang Masjid RT 10/RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
420	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl. PAKAL MADYA JAYA 3. RT 3 RW 2. PENGUSUL : MAKSUM. HP. 085103073124., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
421	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl. PAKAL MADYA PERMAI. RT3 RW 2.	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				PENGUSUL : MAKSUM (KETUA RT). HP. 085103073124., Kota Surabaya	
422	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl. Raya Kupang Jaya 2A/90 RT. 07 RW.13 Kel. Simomulyo Baru. Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
423	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl. Raya Kutisari Indah Selatan, RT 03 RW 05., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
424	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Jl. Raya Kutisari Indah Selatan, RT 06 RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
425	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. SUKOMANUNGGAL BARU SELATAN PJKA, RT. 003 RW. 005, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
426	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. SUKOMANUNGGAL BARU SELATAN PJKA, RT. 004 RW. 005, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
427	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. TUWOWO 3D, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
428	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. WONOKITRI GANG 4 RT 04 RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
429	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. WONOKITRI GANG 7 RT 03 RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
430	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	JL. WONOKITRI RT 01 RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
431	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	KALILOM LOR BARU GANG V, RT. 003 RW. 008, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
432	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	KAPAS BARU GG. 6 RT12 RW 07 M. AMIN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
433	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Kebraon 2 Gang Mangga (Waduk Belong) Gang Sekolah RT.004 RW.001	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				Kel.Kebraon Kec.Karangpilang, Kota Surabaya	
434	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	KENDUNG JAYA RT 6 RW 3. PENGUSUL : WARDANI. HP. 081553833628., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
435	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Ketintang IV-F. RT 10/RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
436	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	KUPANG INDAH 2 RT 02, RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
437	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	KUPANG INDAH 3 RT 03, RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
438	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	MADE RT 01 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
439	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	PAKAL BARAT 2. RT 2 RW 3. PENGUSUL : H. SUHAIMI. BA. HP. 085101349877., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
440	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	PAKAL BARAT 2A. RT 2 RW 3. PENGUSUL : H. SUHAIMI. BA. HP. 085101349877., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
441	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	PAKAL MADYA BARAT 2. RT1 RW 3. PENGUSUL : H. SUHAIMI B.A. HP. 085101349877., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
442	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	PARKIR MAKAM RW 09, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
443	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	PBI CP 44 RT 2 RW 12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
444	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	PONDOK BENOWO INDAH BLOK AC RT 1 RW 8, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
445	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	PONDOK BENOWO INDAH BLOK EM 12 RT 1 RW 12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
446	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	PONDOK BENOWO INDAH RT 10 RW 7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
447	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	PONDOK BENOWO INDAH RT 2 RW 7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
448	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	PONDOK BENOWO INDAH RT 3 RW 7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
449	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	PONDOK BENOWO INDAH RT 4 RW 7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
450	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Pondok Benowo Indah RT.001 RW.08 Kel.Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
451	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	REJOSARI RT 3 RW 3. PENGUSUL : M. SOLEH. HP. 085740672161., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
452	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	REJOSARI. RT 3 RW 3. PENGUSUL : ISWAHYUDI (KETUA RT). HP. 082231929187., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
453	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	RT 01 RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
454	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	RT 08 RW 12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
455	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	RT 5 RW 4 Kelurahan Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
456	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	RT 6, RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
457	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Rt.01 Rw 06, Lontar Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
458	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	RT.08 RW.08 Jl. Banyu Urip Wetan 3B/31, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
459	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	RT.11 RW.04 Jl. Pakis Gunung 1B/5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
460	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	RT.15 RW.04 Jl. Pakis Gunung 3 A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
461	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	rungkut lor gg 10 RT 03 Rw 15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
462	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	rungkut lor gg 10 RT 04 RW 15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
463	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	RW 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
464	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Rw 5 Kutisari Indah Selatan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
465	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Rw 5 Kutisari Indah Selatan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
466	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Sememi, Gang 5B Dan Gang 6. Rt2 Rw 4. Pengusul : Bpk. SAIPAN NO HP : 081216778402, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
467	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	SIMO HILIR TIMUR 13 RT 05 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
468	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	SIMO JAWAR 1 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
469	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	SIMO KWAGEAN KUBURAN RW 02, RT 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
470	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Tambak Medokan Ayu Gg X, XII, XIV, XVI, XI F, XI E, XI G, XIII, XV, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
471	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	TAMBAK WEDI BARU 16A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
472	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	TANJUNGSARI JAYA RT 08, 11, dan 14. RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
473	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	5 Titik	Ujung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
474	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	6 Titik	Bratang Binangun 5C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
475	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	6 Titik	Jalan Tembok Lor Kalimir RT 05/RW 03. Cp : Agus Sudarsono 081230215758, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
476	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	6 Titik	Jl dinoyo tengah 42 RT 2 RW 3 Kontak person : Lailiana Indriawati (081330641004), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
477	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	6 Titik	Jl. Binangun Lidah Kulon, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
478	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	6 Titik	Jl. Jambangan Kebon Agung RT 02 RW 02 (lapangan sepakbola jambangan), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
479	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	6 Titik	RT.12 RW.05 Jl. Simo Pomahan Baru Barat 4/39, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
480	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	7 Titik	Dukuh bulak banteng sekolahan 1A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
481	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	7 Titik	Dukuh bulak banteng sekolahan 2A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
482	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	7 Titik	Gang 1-B, Sebelah Timur Tower, Pesapen RT. 01 RW. 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
483	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	7 Titik	jl ampel rahmat, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
484	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	7 Titik	Jl. Ampel Wira"i 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
485	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	7 Titik	Jl. Ampel Wira"i 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
486	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	7 Titik	jl. plosor IX/9 RT.09 RW.05 Kontak person : 089502488400, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
487	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	7 Titik	nambangan tepi laut RW 3 kontak person : suparman (081332044479), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
488	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	7 Titik	Randu Indah RT. 14 RW.10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
489	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	7 Titik	RT 06 Wonosari Lor, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
490	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	8 Titik	Dukuh Bulak Banteng Sekolahan 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
491	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	8 Titik	Dukuh Bulak Banteng Sekolahan 2Buntu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
492	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	8 Titik	Jl Bogorami gang 3 RT 2 RW 3 Kontak Person : Sugeng Riyanto (081369623444), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
493	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	8 Titik	jl manukan subur, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
494	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	8 Titik	RT.12 RW.04 Jl. Darmo Kali Tugu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
495	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	8 Titik	RW2 RT18 Jl Gubeng Jaya SR, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
496	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	9 Titik	Mojoklanggru Lor RT 9 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
497	pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Penerangan Jalan Umum	9 Titik	RT.01 RW.01 Jl. Petemon Barat 227 A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
498	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cermin Tikungan	1 Unit	Bratang Binangun 5C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
499	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cermin Tikungan	1 Unit	Bratang Binanun 5C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
500	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cermin Tikungan	1 Unit	Gading I no. 18 B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
501	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cermin Tikungan	1 Unit	Gading Karya VII (sebelah SDN Gading 3), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
502	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cermin Tikungan	1 Unit	Jalan Banyuurip Kidul 10E. RT 13/RW 09, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
503	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cermin Tikungan	1 Unit	Jl. Plemahan Besar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
504	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cermin Tikungan	1 Unit	Kupang Gunung Jaya 9. RT 09/RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
505	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cermin Tikungan	1 Unit	Pakis Gunung Gg 1. RT 01/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
506	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cermin Tikungan	1 Unit	Pertigaan Karangrejo 3. RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
507	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cermin Tikungan	1 Unit	Pertigaan Pulo Wonokromo. RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
508	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cermin Tikungan	1 Unit	Simo Gunung Barat 5. RT 05/RW 14, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
509	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cermin Tikungan	10 unit	Perumahan Mulyosari Utara RW 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
510	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cermin Tikungan	2 unit	Bratang Binangun 5B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
511	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cermin Tikungan	2 unit	Bratang binangun VII, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
512	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cermin Tikungan	2 unit	Jalan Karangrejo 6. RT 01/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
513	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cermin Tikungan	2 unit	Kedung Tarukan Baru 4B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
514	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cermin Tikungan	3 unit	RT 11 RW 1 Kalisari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
515	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cermin Tikungan	3 unit	Wonorejo Selatan Gg 3A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
516	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Papan Jalan	1 Unit	RT 03 RW 10 Kalisari Sayangan III, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
517	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Papan Jalan	2 Titik	Batang Binangun 5C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
518	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Papan Jalan	2 Titik	Bratang Binangun 5A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
519	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Papan Jalan	2 Titik	Bratang Binangun 5B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
520	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Papan Jalan	3 Titik	Bratang Binangun 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja					
521	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Administrasi Perkantoran	1 orang	Ambengan Batu DKA 11, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
522	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Digital Marketing	6 orang	jalan kawatan 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
523	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Multimedia	1 orang	Hangtuh 3 No. 11, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan					
524	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Serbaguna	1 Titik	Bratang Binangun 5C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
525	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Serbaguna	300 meter	Dukuh Karangan Tengah RW.003 Kel. Babatan Kec. Wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
526	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Gedung Serbaguna	1 Ls	Jl. Grudo II RT 02 RW 01, No. Telp. 082244100503 (Mbak Nodit), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
527	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Gedung Serbaguna	250 meter persegi	Jalan Karangrejo Timur 3. No 28. RT 08/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga					
528	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	300 meter	Simorejo Timur RT 02-RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
529	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jembatan	6 m	Jl.Gundih 3 RT.07 RW.01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
530	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	1.250 m ²	Jl. Bulak Banteng Pratama RT.11 / RW.08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
531	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	1040 Meter	jl dukuh bulak banteng pandu 1 RT4 RW 1 kontak person : Abd Aziz (087854991079), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
532	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	120000 m3	RT.07 RW.08 Jl. Pondok Benowo Indah, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
533	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	150 Meter	JL. NGAGLIK DKA RW 05 TAMBAKSARI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
534	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	1600 M2	Simo gunung kramat barat 5. RT 05/RW XIV, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
535	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	171 m2	PARKIR MAKAM RW 09, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
536	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	172800 m3	RT.04 RW.09 Jl. Pondok Benowo Indah, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
537	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	180 m2	SIMO KWAGEAN KUBURAN gg. IV RW 02, RT 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
538	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	20 Meter	SDN Menur jalan Manyar Kartika, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
539	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	230 Meter	sambikerep gg jambu RT 05 RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
540	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	260 Meter	Jalan Tembok Gede I RT 04 RW 03. Cp : Bintarto 089628325566, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
541	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	300 meter	Jalan Jepara Gang 4 RT 04/RW 04. Cp : Aziz 081333933369, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
542	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	300 meter	jl lebar timur 9A RT 2 RW 10 kontak person : Liem Liong hien (08123584455), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
543	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	43200 m3	RT.03 RW.07 Jl. Simo Kalangan Barat Tol Trowongan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
544	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	490 Meter	kalijudan 4 RT 1 RW 2 kontak person : Doni (0895393310756), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
545	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	700 2	Jl. Gayungan Gg.05 Rt.03 Rw.02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
546	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	770 m ²	Jl. Bhineka I RT.04 / RW.02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
547	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	825 m ²	Bulak Banteng Lor Bhineka 7 RT.08 RW.08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
548	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving	900 Meter	RT. 005 RW. 001, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
549	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	1.320 m	JL. WONOKUSUMO JAYA BARU GANG 7 RT 19 RW 11, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
550	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	1.320 m	JL. WONOKUSUMO JAYA BARU GG 6 RT 12 RW 11, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
551	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	1.320 m	kedungmangu selatan 6 RT 10 RW.03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
552	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	1.320 m	TENGGUMUNG WETAN GANG CERME RT 12 RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
553	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	100 M	Jl. Kedinding Tengah Baru III, RT 07 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
554	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	100 Meter	Jl. Gadelsari madya gang dalam, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
555	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	100 Meter	RW3 RT5 Gubeng Klingsingan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
556	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	105 Meter	Jl. Beji Rahayu 6C. Rt 2 Rw 4. Pengusul : PARMATLIM HP. 081259989339, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
557	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	1120 m2	SONO INDAH 8 RT 02, RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
558	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	120 Meter	Jl. Beji Rahayu KAVLING 1.Rt 2 Rw 4. Pengusul : PARMATLIM. HP. 081259989339, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
559	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	120 Meter	Jl. Kendangsari Gg Lebar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
560	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	120 Meter	Jl. Tanah Merah Gang 3F (Moch. Taqwa Zamil - 08970965326), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
561	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	1200 M2	JL. KAPAS LOR 1 RW 6 ZAENUDDIN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
562	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	1395 Meter	JL.Lamongan DIPO 15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
563	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	150 m	jllamongan dipo 15 rt 1 rw 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
564	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	150 Meter	Jalan Amir Mahmud VII - B RT 4 RW 2 (H. Usman Ali 081232648909), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
565	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	160 M	Jl. Made selatan RT 04 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
566	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	174 m2	Babadan gang 1 RT 03 RW 05 No. Telp 081331704029 (Muktiani), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
567	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	183 Meter	Dukuh bulak banteng gg suropati 4 sby, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
568	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	185 meter	Jl. Sepat Lidah Kulon Gang Masjid RT. 05 RW. 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
569	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	1920 Meter	Jalan Purwodadi Raya Sisi Timur RT 01/RW 03. Cp : Subagyo 081332602608, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
570	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	2 M3	Morokrengan Gg 8, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
571	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	200 M2	Bulak Banteng Lor 1 Gg Garuda 3A RT.12 RW.8, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
572	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	200 M2	tandes lor 2 no. 5 (yosua - 0857-3055-6890), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
573	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	200 meter	Buntaran I No.1 RT.001 RW.004 Kel.Manukan Wetan Kec. Tandes, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
574	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	200 meter	Jalan Karangrejo Baru. RT 05/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
575	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	200 meter	TENGUMUNG WETAN GANG 5B RT 05 RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
576	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	200 meter	TENGUMUNG WETAN GANG GAYAM MAS RT 05 RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
577	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	2000 m2	pesapenrt 01 rw 02 pesapen sumurwelu.no hp 081216669173, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
578	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	205 Meter	JL. DUKUH PAKIS III GANG TIKUS RT 03 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
579	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	212 meter	Jl. Tales Langgar no 10 RT 07 RW 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
580	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	216 M2	Jl pogot jaya gang 3 RT 07 RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
581	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	218 Meter	JL BULAK RUKEM VI/71, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
582	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	220 Meter	SIMO HILIR VI RW 04, RT 06 & 12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
583	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	225 m2	Kalibutih Barat 4/59 RT 05 RW 06 No. Telp 0881027261117 (Anang Mudjianto), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
584	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	250 Meter	Jl. Tales Langgar Perbatasan RT 07 RW 06 dan RT 06 RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
585	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	300 meter	Gembong Sayuran RT 07/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
586	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	300 meter	Jl. Kendangsari Gang Inpres, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
587	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	300 meter	Jl. Sidotopo jaya gg 3A rt,04 RW.12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
588	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	300 meter	medokan tambak 13 A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
589	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	301 Meter	Jl. Made selatan RT 02 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
590	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	350 meter	Gunung Anyar Kidul V - B RT 02 RW 03 (Ahmad Sanusi 081216033139), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
591	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	350 meter	Gunung Anyar Tengah VII - D RT 02 RW 03 (Achmad Sanusi 081216033139), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
592	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	350 meter	medokan tambak 16, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
593	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	355 Meter	Jl. BANDAREJO GANG I RT 02 RW05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
594	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	360 meter	Jl. Pakal Mulyo RT 04 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
595	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	360 meter	Sememi Jaya Utara Rel Gang 3 RT 03 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
596	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	360 meter	TAMBAK WEDI BARU 17 B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
597	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	37500 Meter	tenggumung wetan gg. cermi, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
598	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	392 M	Jalan Jagalan Gang 3 BARAT RT 03/ RW 16. Cp : Iwan Dwi M 085107190390, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
599	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	4 M3	Morokrengan Gg 9, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
600	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	400 M2	JL. POGOT BARU 9/23 SUGENG UTOMO 081334237423, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
601	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	400 M2	KEDURUS GANG MANGGA NO TELP BP SUPRONO 082228657878, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
602	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	400 M2	pilang asri kedurus rt 8 rw 2,no wa/hp : 085706696951, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
603	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	400 M2	rt 8/rw2 kedurus pilang indah.no hp 085706696951, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
604	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	400 meter	Jl. Sepat Lidah Kulon RT. 03 RW. 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
605	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	400 meter	medokan tambak RT 12 depan masjid, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
606	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	450 m2	Jl. Kejawan Putih Tambak Gang Masjid, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
607	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	48000 m3	RT.04 RW.02 Jl. Pakal Timur Baru GG 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
608	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	500 Meter	INDRAPURA JAYA TENGAH RT 04 RW 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
609	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	500 Meter	kedung mangu selatan gang 3 RT 9 RW 3	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				kontak person : syaiful anam (081234541104), Kota Surabaya	
610	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	60 meter	Jl. Benowo Krajan Barat RT 01 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
611	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	600 m2	SONO INDAH 3 RT 03, RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
612	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	600 m2	SONO INDAH 5 RT 04, RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
613	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	600 m2	SONO INDAH 6 RT 04, RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
614	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	600 Meter	Jalan Semarang No. 67 RT 06/RW 03. Cp : Soebakti 08123252331, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
615	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	600 Meter	medokan sawah timur 4c, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
616	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	600 Meter	medokan tambak gang 11 A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
617	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	615 Meter	Jl. Sukodono I RT.1 RW.15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
618	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	620 m2	TANJUNGSARI JAYA UTARA RT 16, RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
619	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	640 m2	SIMO JAWAR gg. 7-A RW 01, RT 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
620	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	680 M3	JL. TENGGUMUNG WETAN GG.LANGSEP, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
621	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	70 Meter	JL. BANDAREJO GANG BENDUNGAN RT 01 RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
622	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	75 meter	Jl. Jambangan III B RT 01 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
623	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	750 m2	Jl kedinding lor gang sedap malam rt 17 rw 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
624	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	76.5 Meter	Tengguung Baru Selatan XII/10A Kontak Person :	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				081259963702 Fachrudin, Kota Surabaya	
625	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	770 m ²	Jl. Setro Baru Utara XIV RT.12 / RW.04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
626	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	8 meter	Jl. Lidah Kulon RT. 001 RW. 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
627	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	800 m2	SONO INDAH 4 RT 03, RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
628	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	840 m2	SONO INDAH 2 RT 02, RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
629	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	90 Meter	SIMO KWAGEAN KUBURAN gg. IV RW 02, RT 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
630	Pembangunan Jalan	Pembangunan Paving dan Saluran	900 Meter	Grogol Kauman Gg1 dan 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
631	Pembangunan Jalan	Saluran	225 Meter	Tambak Asri turi 5 RT 26 RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
632	Pembangunan Jalan	Saluran	250 Meter	Jl Kyai Satari gang 1 RT 06 RW 01 (Sugiono 081216251998), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
633	Pembangunan Jalan	Saluran	6 Meter	Grogol Kauman Gg 1 dan 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
634	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Pembangunan Paving	144000 m3	RT.08 RW.09 Jl. Pondok Benowo Indah, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
635	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Pembangunan Paving dan Saluran	100 Meter	jl pulosari 3n, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
636	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Pembangunan Paving dan Saluran	160 meter	jl demak timur 4 RT RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
637	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Pembangunan Paving dan Saluran	20 Meter	jalan pulosari 3i, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
638	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Pembangunan Paving dan Saluran	225 Meter	Tambak Asri Kembang Turi 5 RT 26 RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
639	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Pembangunan Paving dan Saluran	750 m2	Jl. Sepat Lidah Kulon Gang Kesambi, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
640	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Plengsengan	10 meter	RW2 RT18 Jl Gubeng Jaya SR, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
641	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Plengsengan	100 m2	Ketandan Bong No. 24 RT 04 RW 04 No. Telp. 085851369048 (Subagyo Edi Purwoko), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
642	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Plengsengan	600 Meter	kalijudan 4 RT 1 RW 2 kontak person : Doni (0895393310756), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
643	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Plengsengan	70 M2	Jalan raya jolotundo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
644	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	10 meter	JL. KAPAS LOR WETAN 4/5 SUHARTO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
645	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	10 ton	gang Panduk RT 4 RW 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
646	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	10 ton	Pumpungan gang Masjid RT 3 RW 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
647	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	10 ton	Pumpungan gang Masjid RT 6 RW 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
648	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	100 m2	Ketandan lama 1 No. 15 RT 02 RW 04. No Telp. 085854054144 (Siswandoko), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
649	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	100 Meter	GANG MAKAM ISLAM BENOWO. RT 1 RW 2. PENGUSUL : NURROCHIM. HP. 085851882840., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
650	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	100 Meter	jl demak timur 2 RT 2 RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
651	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	100 Meter	Jl. Gunung Anyar Tengah Gang VIII C, RT 09 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
652	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	100 Meter	Jl. taman sempurna RT.08 RW.10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
653	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	105 Meter	PANJANG JIWO GANG XI (MOCH ROFIQ, 0878-5345-3613), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
654	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	114 Meter	Jl. Kendangsari Gg 8 Gang Kecil, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
655	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	12 Meter	Jl. Kedinding Sekolahan Gang 5 (Toni Irwanto - 08175141900), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
656	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	12 Meter	Jl. Kedinding Sekolahan Gang 5A (Toni Irwanto - 08175141900), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
657	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	120 Meter	KENDUNG REJO GANG 7 RT 4 RW 8. PENGUSUL : SUPRAPTO. HP. 085230422888., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
658	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	125 Meter	Jl. Gadel Barat gg pipa RTV 02 RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
659	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	130 M2	Jalan Pulo Wonokromo Blok 259. RT 06/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
660	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	130 Meter	RW4 RT2, RT3 Jl. Baratajaya IIA, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
661	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	130 Meter	Sidotopo wetan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
662	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	140 1	Jl. Gayungan Gg.05 Rt.02 Rw.02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
663	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	140 Meter	Ds. RACI. JL. STASIUN KERETA API. RT3 RW4.	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				Pengusul : BPK. NASIKIN. HP. 085101655967., Kota Surabaya	
664	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	140 Meter	RT 9 RW 2 Medokan Ayu Blok B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
665	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	140 Meter	RT 9 RW 2 Medokan Ayu Blok D, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
666	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	144 Meter	Jl. Gadel Sari Praja gg pipa RT 18 RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
667	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	15 m2	Jl. Kedali RT 01 RW 10 No. Telp 08385780186 (Wati Dwi Anggraeni), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
668	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	15 Meter	rt 02 rw 05 kelurahan kebraon bp sigit 082332080222, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
669	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	150 m2	Ketandan lama 2 RT 01 RW 04. No Telp. 085755466854 (Aditya Dana Kusdhiar), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
670	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	150 Meter	BALONGSARI TAMA BARAT GG 8, Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
671	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	150 Meter	Kapasari VI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
672	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	150 Meter	Mrutu kalianayar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
673	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	150 Meter	PAKAL BARAT 1. RT 1 RW 3. PENGUSUL : H. SUHAIMI. BA. HP. 085101349877., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
674	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	150 Meter	PAKAL BART 1A. RT 1 RW 3. PENGUSUL : H. SUHAIMI. BA. HP. 085101349877., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
675	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	150 Meter	Pakal Mangga Jaya. Rt 3 Rw 6. Pengusul : PURWIYADI HP. 082244265899, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
676	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	150 Meter	RW1 RT6 Sepanjang Gubeng Kertajaya 1c+3D (Kiri Kanan), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
677	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	150 Meter	Tambak Rejo Gg. 3 RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
678	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	160 meter	jl demak timur 4 RT RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
679	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	160 meter	jl demak timur 5 RT 5 RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
680	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	160 meter	jl demak timur 6 RT 6 RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
681	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	170 Meter	Dharmahusada I No. 23-37, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
682	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	180 Meter	RT 9 RW 2 Medokan Ayu Blok Raya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
683	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	2 Meter	JL. KAPASLOR WETAN 6 KETUA RW 5 (08828195478, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
684	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	20 ton	Pumpungan gang Masjid RT 5 RW 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
685	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	200 M2	Kalongan Kidul RT 01 RW 06 No. Telp. 085665184704 (Salam), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
686	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	200 M2	waru gunung gang makam rt 3 rw 01.telp 081217440461, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
687	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	200 meter	Dukuh Bulak Banteng Suropati 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
688	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	200 meter	Dukuh. RACI RT1 RW 4. pengusul: BPK. M. DOFIR	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				(KETUA RW). HP. 082177211127., Kota Surabaya	
689	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	200 meter	Jalan Rembang Sisi Utara RT 01/RW 01. Cp : Aziz 081333933369, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
690	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	200 meter	Jl. BEJI RAHAYU 2. RT 01 RW 04. PENGUSUL : ZAINUL ARIFIN. HP. 085648656568., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
691	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	200 meter	jl.bangun rejo rt 7 rw 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
692	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	200 meter	Jln. Klimbangan RW 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
693	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	200 meter	perbatasan Jojoran-Mojo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
694	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	200 meter	RT 05 RW 12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
695	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	200 meter	RT 1/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
696	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	200 meter	RT 2 RW 6 Mulyorejo Baru, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
697	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	200 meter	RT 9 RW 2 Medokan Ayu Blok C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
698	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	200 meter	Tambak Asri Gg Tanjung 3 RT 25 RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
699	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	200 meter	Wonorejo Selatan Gg VII, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
700	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	210 Meter	KALIJUDAN GG 1/12 A (RUSDI- -0821-4069-4416), Kota Surabaya, Kalijudan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
701	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	240 Meter	Jl. Pesapen gg.3 RT.05 RW.10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
702	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	250 Meter	Dukuh Bulak Banteng Suropati 8, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
703	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	250 Meter	Jl Kyai Satari Gang II RT 06 RW 01 (Sugiono 081216251998), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
704	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	250 Meter	Jl Kyai Satari gang III A RT 06 RW 01 (Sugiyono 081216251998), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
705	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	250 Meter	Kyai Satari gang 1E RT 06 RW 01 (Sugiyono 081216251998), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
706	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	26 Meter	PANJANG JIWO GANG XI - B (MOCH ROFIQ, 0878-5345-3613), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
707	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	30 Meter	RT. 002 RW. 001, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
708	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	300 meter	DUKUH JERAWAT RT 5 RW 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
709	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	315 Meter	JL. LEBAK REJO UTARA 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
710	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	350 meter	Jl. Ploso Timur IX/12 RT.09 RW.09 Kontak Person : 081332857500, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
711	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	3600 m3	RT.04 RW.07 Jl. Simo Kalangan 2/139, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
712	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	373 Meter	Simo Kalangan 2, RT 05-RW 07 Simo Mulyo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
713	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	375 Meter	Tambak Asri Gg Teratai RT 12 RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
714	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	39 Meter	RT. 004 RW. 001, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
715	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	40 Meter	Wonorejo Indah Timur Gg IX, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
716	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	400 meter	Ds. RACI RT2 RW4. pengusul : BPK. JAROT. HP. 085330363088., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
717	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	49 Meter	PANJANG JIWO GANG XII (MOCH ROFIQ, 0878-5345-3613), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
718	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	490 Meter	kalijudan 4 RT 1 RW 2 kontak person : Doni (0895393310756), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
719	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	5 ton	Jl. Wonorejo 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
720	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	50 Meter	Jalan Ketintang Gg 3. RT 01 - 02/RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
721	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	50 Meter	Jl. Ketintang 1A. RT 06/RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
722	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	50 Meter	Jl. Raya Kutisari Indah Selatan, RT 06 RW 05., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
723	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	500 Meter	Dk. BUNGKAL GANG 4. RT 5 RW 3. PENGUSUL : BPK. H. MATJUKI. HP. 085655075099., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
724	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	500 Meter	Dukuh Bulak Banteng Suropati 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
725	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	500 Meter	TUBANAN BARU I BLOK B (DEDENG, 0857-3361-3326), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
726	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	6 Meter	JL. WARDOYO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
727	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	6.6 Meter	RT. 009 RW. 002, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
728	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	60 meter	Jl kedung cowek gang masjid RW 1	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				Kontak person : H.Supono,SH (082313494129), Kota Surabaya	
729	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	60 meter	Jl. Kelapa Gading 1 dan 2 RT 04, 05, 06 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
730	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	60 meter	Karang Menjangan 3F, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
731	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	600 Meter	pagesangan timur III, IV, V, VI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
732	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	72 Meter	Tanah Merah Indah 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
733	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	80 Meter	Jl Keputih Timur Jaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
734	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	850 Meter	Pondok Benowo Indah RT.004 RW.010 Kel.Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
735	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran	9600 m3	RT.06 RW.07 Jl. Simo Kalangan Baru 1/4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Asemrowo					
736	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	jl tambak pring kelurahan asemrowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
737	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Greges Barat gg. Dalam RT. 002 RW. 004 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
738	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	jalan greges barat, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
739	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Genting Tambak Dalam 58 RT.002 RW.003 Kel. Genting Kalianak Kec. Asemrowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Benowo					



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
740	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	18 Unit	Raya Kandangan No. 8, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
741	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Jl. Kendung III-C RT.002 RW.003 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
742	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	KLAKAH REJO Gang 2B. RT 2 RW 8. PENGUSUL : MINSARLI (KETUA RT). HP. 081235119458., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
743	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Kendung III-C RT.002 RW.003 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
744	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	KENDUNG INDAH. RT 12 RW 02. PENGUSUL : RATNO. HP. 085100621626., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
745	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	KENDUNG REJO. RT 1 RW 8. PENGUSUL : FAUZAN. HP. 081216360942., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
746	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	4 Paket	Raya Kandangan No. 18, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Bubutan					
747	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	jl sumber mulyo 3 RT 3 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
748	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	jl sumber mulyo 6 RT 6 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
749	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	1 Unit	jl sumber mulyo 6 RT 6 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
750	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	jl demak timur 6 RT 6 RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
751	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	jl sumber mulyo 3 RT 3 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
752	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Dupak Timur 2 No. 4 RT 06 RW 08 No. Telp. 087756203935 (Yanto), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
753	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Dupak Timur 3/17 D RT 04 RW 08 No. Telp. 088235310481 (Sudarsono), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
754	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	jl demak timur 6 RT 6 RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
755	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	jl sumber mulyo 3 RT 3 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
756	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	jl sumber mulyo 6 RT6 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
757	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Demak Selatan V/45 RT 07 RW 09, No. Telp 081295955045 (Budi Heriyanto), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Bulak					
758	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	RT 1 RW 4 Kelurahan Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
759	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	RT 4 RW 1 Kelurahan Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
760	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	RT 7 RW 4 Kelurahan Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
761	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	RT 1 RW 4 Kelurahan Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
762	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	RT 7 RW 4 Kelurahan Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
763	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 1 RW 4 Kelurahan Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
764	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 3 RW 4 Kelurahan Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
765	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 4 RW 1 Kelurahan Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
766	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 4 RW 5 Kelurahan Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
767	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 7 RW 4 Kelurahan Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
768	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT 1 RW 4 Kelurahan Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
769	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT 4 RW 1 Kelurahan Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
770	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT 4 RW 5 Kelurahan Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
771	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT 7 RW 4 Kelurahan Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Dukuh Pakis					
772	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	dukuh pakis V, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
773	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	pradah kalikendal gg vi rt 4 rw 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
774	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Jl. Dukuh Kupang RT.004 RW.007, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
775	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Jl. Dukuh Pakis 2 RT. 004 RW. 001, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
776	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT. 002 RW.002 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis,, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
777	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT.001 RW.002 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
778	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT.001 RW.003 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
779	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT.001 RW.006 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
780	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT.002 RW.003, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
781	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT.002 RW.006 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
782	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT.004 RW.006 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
783	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Jl. Dukuh Pakis VI RT. 003 RW. 003 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
784	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Jl. Dukuh Pakis VI RT. 004 RW. 003, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
785	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Jl. Dukuh Pakis VI RT. 007 RW. 003, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
786	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Jl. Dukuh Pakis VI RT. 009 RW. 003 Kel. Dukuh Pakis Kc. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
787	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Jl. Dukuh Pakis 2 RT. 004 RW. 001, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
788	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Jl. Dukuh Pakis RT. 002 RW.002 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
789	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Jl. Dukuh Pakis RT.002 RW.006 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
790	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Dukuh Kupang RT 06 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
791	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Dukuh Kupang RT.002 RW.007 Kel. Dukuh Kupang	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	
792	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Dukuh Kupang RT.004 RW.007, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
793	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis 2 RT. 004 RW. 001, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
794	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT.001 RW.002 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
795	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT.001 RW.003 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
796	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT.001 RW.006 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
797	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT.002 RW.003, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
798	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT.002 RW.006 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
799	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT.004 RW.006 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
800	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis VI RT. 003 RW. 003 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
801	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis VI RT. 004 RW. 003, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
802	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis VI RT. 007 RW. 003, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
803	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis VI RT. 009 RW. 003 Kel. Dukuh Pakis Kc. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
804	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	jl dukuh pakis V, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
805	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Dukuh Kupang RT 06 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
806	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Dukuh Kupang RT.002 RW.007 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
807	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis 2 RT. 004 RW. 001, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
808	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT. 002 RW.002 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
809	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT.001 RW.002 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
810	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT.001 RW.003 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
811	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT.001 RW.006 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
812	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT.002 RW.003, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
813	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT.002 RW.006 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
814	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis RT.004 RW.006 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
815	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis VI RT. 003 RW. 003 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
816	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis VI RT. 004 RW. 003, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
817	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis VI RT. 007 RW. 003, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
818	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Dukuh Pakis VI RT. 009 RW. 003 Kel. Dukuh Pakis Kc. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
819	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Dukuh Kupang Gang 16 RT.002 RW.001 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
820	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Dukuh Kupang Gang 19 RT.004 RW.001 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
821	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Dukuh Kupang Gang 20 Sisi Barat RT.008 RW.001 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
822	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Dukuh Kupang RT.002 RW.007 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
823	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Dukuh Pakis RT. 002 RW.002 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
824	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Dukuh Pakis RT. 005 RW.004 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
825	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	CCTV	1 Paket	Jl. Pulosari III RT.002 RW.002 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
Kec. Gayungan					
826	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Dukuh Menanggal VII/26. RT 03/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
827	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	gayungan 8. RT 01/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
828	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	jl. Jemur Gayungan 1 RT.01 RW.03. penanggung jawab : 081225420961 (M. Rizal), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
829	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	RT 02-RW 06 Dukuh Menanggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
830	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	RT. 02 RW. III, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
831	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	10 unit	jl. Jemur Gayungan 1 RT.01 RW.03. penanggung jawab : 081225420961 (M. Rizal), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
832	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Dukuh Menanggal VII/26. RT 03/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
833	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	(PPT Kuncup Harapan 1). Balai RT 03/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
834	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Dukuh Menanggal VII/26. RT 03/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
835	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	jl. Jemur Gayungan 1 RT.01 RW.03. penanggung jawab : 081225420961 (M. Rizal), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
836	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT. 02 RW. III, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
837	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	CCTV	1 Paket	Gayungan 1 Gg. Setu RT. 02 / RW. 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
838	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Gayungan 1 RT.01 RW. 03. penanggung jawab : Suliono, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
839	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Gayungan Gg. 2 RT. 02 / RW. 02. Contact person : 081249690847 (Yuliani), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
840	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Gayungan Gg. 3 Airdas. Contact person : 081357783282 (Siswanto), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
841	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Gayungan Gg. Manggis No. 2. penanggung jawab : 081233615516 (Ade Kusuma Wardhani), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
842	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Gayungan Pasar ; Jl. Gayungan PTT ; Jl. Gayungan Gg. IV. Contact person : 081559715494 (Farit Harmono), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
843	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Gayungan PTT : Jl. Gayungan Gg. VI (Gg. Makam). Contact person : 085607756649 (Sumarjono), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
844	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	CCTV	1 Paket	Jl. Gayungan PTT 51 (SD Nurul Huda / Masjid Rochmat). Contact person :	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			081515307226 (Miftahuddin), Kota Surabaya	
845	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	jl. Jemur Gayungan 1 RT.01 RW.03. penanggung jawab : 081225420961 (M. Rizal), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
846	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Makam RW.02 Kel. Gayungan Kec. Gayungan. Contact person : 081331239133 (Suhono), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Genteng					
847	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Ketandan Punden No. 15 RT 07 RW 04. No. Telp. 082139964699 (Fatchur Rachman), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
848	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Ketandan Baru 4 No. 9 RT 12 RW 04 No. Telp 082244805535 (Jazuli), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
849	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Ketandan Bong No. 24 RT 04 RW 04 No. Telp. 085851369048 (Subagyo Edi Purwoko), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
850	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Ketandan lama 1 No. 15 RT 02 RW 04. No Telp. 085854054144 (Siswandoko), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
851	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Ketandan lama 2 RT 01 RW 04. No Telp. 085755466854 (Aditya Dana Kusdhiar), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
852	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Ketandan Punden No. 15 RT 07 RW 04. No. Telp. 082139964699 (Fatchur Rachman), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
853	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Ketandan Punden No. 15 RT 07 RW 04. No. Telp. 082139964699 (Fatchur Rachman), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
854	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Ketandan Baru 4 No. 9 RT 12 RW 04 No. Telp. 082244805535 (Jazuli), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
855	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Ketandan Bong No. 24 RT 04 RW 04 No. Telp. 085851369048 (Subagyo Edi Purwoko), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
856	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Ketandan lama 1 No. 15 RT 02 RW 04. No Telp. 085854054144 (Siswandoko), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
857	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Ketandan lama 2 RT 01 RW 04. No Telp. 085755466854 (Aditya Dana Kusdhiar), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
858	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Ketandan Punden No. 15 RT 07 RW 04. No. Telp. 082139964699 (Fatchur Rachman), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
859	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Ketandan Punden No. 15 RT 07 RW 04. No. Telp. 082139964699 (Fatchur Rachman), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
860	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Ketandan Bong No. 24 RT 04 RW 04 No. Telp. 085851369048 (Subagyo Edi Purwoko), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
861	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Ketandan lama 1 No. 15 RT 02 RW 04. No Telp. 085854054144 (Siswandoko), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
862	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Ketandan lama 2 RT 01 RW 04. No Telp. 085755466854 (Aditya Dana Kusdhiar), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
863	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RW 12 RT 03 Jl Keputran Kejambon I/43, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
864	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Ketandan Baru 4 No. 9 RT 12 RW 04 No. Telp 082244805535 (Jazuli), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
865	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Ketandan Bong No. 24 RT 04 RW 04 No. Telp. 085851369048 (Subagyo Edi Purwoko), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
866	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Ketandan lama 1 No. 15 RT 02 RW 04. No Telp. 085854054144 (Siswandoko), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
867	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Ketandan lama 2 RT 01 RW 04. No Telp. 085755466854 (Aditya Dana Kusdhiar), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
868	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RW 12 RT 03 Jl Keputran Kejambon I/43, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
869	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Ketandan Bong No. 24 RT 04 RW 04 No. Telp. 085851369048 (Subagyo Edi Purwoko), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
870	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Ketandan lama 1 No. 15 RT 02 RW 04. No Telp. 085854054144 (Siswandoko), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
871	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Ketandan lama 2 RT 01 RW 04. No Telp. 085755466854 (Aditya Dana Kusdhiar), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
872	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	CCTV	1 Paket	Pecindilan RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
873	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RW 12 RT 03 Jl Keputran Kejambon I/43, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Gubeng					
874	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	RW 01 RT 05 Jl Dharmawangsa 4/21, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
875	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	RW 10 RT 08 Jl Juwangan 48, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
876	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	RW10 RT9 Jl. Juwangan I/15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
877	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Mojoklanggru Lor RT 06 RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
878	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	RW 10 RT 06 Jl Juwangan 64B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
879	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	RW10 RT10 Jl Juwangan 1/36, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
880	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	RW10 RT9 Jl. Juwangan I/15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
881	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	W 10 RT 10 Jl Juwangan 55U, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
882	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	RW 01 RT 05 Jl Dharmawangsa 4/21, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
883	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	RW 01 RT 12 Jl Dharmawangsa Barat I/9, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
884	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Gubeng Kertajaya 5E RT 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
885	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Karang Menjangan 6/9B RT 6 RW 7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
886	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Mojo Klanggru RT 1 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
887	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Mojo Klanggru RT 2 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
888	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Mojo Klanggru RT 4 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
889	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Mojo Klanggru RT 5 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
890	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 03 Jl. Gubeng Kertajaya 5 Raya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
891	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 09 Jl. Gubeng Kertajaya 1F-3G, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
892	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RW 01 RT 05 Jl Dharmawangsa 4/21, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
893	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RW 01 RT 06 Jl Dharmawangsa V/43, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
894	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RW 01 RT 07 Jl Dharmawangsa V/33, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
895	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RW 01 RT 12 Jl Dharmawangsa Barat I/9, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
896	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RW 02 RT 07 Jl Gubeng Airlangga IV/78, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
897	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RW 02 RT 07 Jl Gubeng Jaya Langgar 17-A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
898	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RW 02 RT 08 Jl Gubeng Airlangga V/6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
899	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RW 02 RT 09 Jl Gubeng Jaya 2/34, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
900	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RW 02 RT 11 Jl Gubeng Jaya 4/8, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
901	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RW 02 RT 17 Jl Gubeng Jaya IX No. 22, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
902	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RW 02 RT 18 Jl Gubeng Jaya SR12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
903	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RW 03 RT 04 Jl Gubeng Kertajaya VI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
904	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RW 03 RT 04 Jl Gubeng Klingsingan 54, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
905	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RW 03 RT 05 Jl Gubeng Kertajaya 5D, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
906	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RW 03 RT 08 Jl Gubeng Kertajaya 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
907	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RW2 PTT Jl Gubeng Airlangga II, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
908	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Bratang Binangun gg 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
909	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Bratang binangun VB, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
910	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Gubeng Kertajaya 5E RT 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
911	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Mojo Klanggru RT 4 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
912	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT 16, RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
913	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RW 01 RT 09 Jl Dharmawangsa 7/8, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
914	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RW 01 RT 12 Jl Dharmawangsa Barat I/9, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
915	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RW 02 RT 08 Jl Gubeng Airlangga V/6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
916	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RW 03 RT 04 Jl Gubeng Klingsingan 54, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
917	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RW 03 RT 05 Jl Gubeng Kertajaya 5D, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
918	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RW 10 RT 01 Jl Juwangan 135B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
919	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RW 10 RT 02 Jl Juwangan 108, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
920	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RW 10 RT 03 Jl Juwangan 93, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
921	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RW 10 RT 04 Jl Juwingan 88A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
922	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RW 10 RT 06 Jl Juwingan 64B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
923	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RW10 RT10 Jl Juwingan 1/36, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
924	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RW10 RT9 Jl. Juwingan I/15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
925	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Gubeng kertajaya 12A/21, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
926	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Gubeng Kertajaya 12B/15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
927	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Gubeng Kertajaya 12C/1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
928	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Gubeng Kertajaya 5E, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
929	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Gubeng Kertajaya 8B timur/17, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
930	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jalan Gubeng Jaya Langgar RW2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
931	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	CCTV	1 Paket	Jojeoran 1 perintis 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
932	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jojeoran 1 Perintis 3 dalam, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
933	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jojeoran 1(Belakang Sakinah), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
934	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jojeoran 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
935	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	jojeoran 3/42 E, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
936	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	jojeoran 4/10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
937	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jojeoran 5 Timur E no 28, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
938	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jojeoran 5 Timur, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
939	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jojeoran 5/21, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
940	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jojoran Gg 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
941	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Karang Menjangan 131 B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
942	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Karang Menjangan 1C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
943	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Karang Menjangan 3E/9, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
944	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Karang Menjangan V/7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
945	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Kedung Tarukan Baru 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
946	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Kedung Tarukan Baru 4B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
947	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Kedung Tarukan baru 4C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
948	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	CCTV	1 Paket	Mojo Klanggru Kidul blok D, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
949	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Mojo Klanggru Lor Baru, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
950	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RW 01 RT 06 Jl Gubeng Kertajaya 1c+3d, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
951	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RW 02 RT 05 Jl Gubeng Jaya 2/12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
952	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RW 02 RT 09 Jl Gubeng Jaya 2/34, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
953	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RW 02 RT 18 Jl Gubeng Jaya SR12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
954	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RW 10 RT 05 Jl Juwingan 49, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Gunung Anyar					
955	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	RT 8 RW 3 Kelurahan Gununganyar Tambak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
956	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	RT 8 RW 3 Kelurahan Gununganyar Tambak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
957	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 8 RW 3 Kelurahan Gununganyar Tambak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
958	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT 8 RW 3 Kelurahan Gununganyar Tambak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
959	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	4 Paket	Gunung Anyar RT 09 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
960	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	4 Paket	Sekretariat RT 09 RW 02 Gunung Anyar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Jambangan					
961	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	gang 3A, RT 01/ RW 02 Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
962	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Gang 3B, RT 01/ RW 02 Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Karangpilang					
963	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Jl. Kebraon II Gang Mangga No.15 RT. 003 RW.001 Kel. Kebraon Kec. Karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
964	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	RT 05 %W 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
965	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	jl kedurus gang 1 rt 04 rw 01,koordinator gopur telp ;081216669172, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
966	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	jl kedurus gg 1 rt 04 rw 01 no telp 081216669172/bp.yusuf, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
967	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Kebraon II Gang Mangga No.15 RT. 003 RW.001 Kel. Kebraon Kec. Karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
968	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 05 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
969	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Kedurus IV RT 11 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
970	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	kedurus gang 1 rt 5/rw 1,081216669172/ 081216623193 (bp.warno), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
971	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RT 05 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Kenjeran					
972	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Takal IV Kluwih/7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
973	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Kedung Mangu Timur 6A/21 RT.09 RW.10. penanggung jawab : 081336636857 (Tutiek Sri Utami), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
974	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	KEDUNG MANGUSELATAN 6/55 RT 10 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
975	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	POGOT BARU RT 02 RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
976	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	TAMBAKWEDI BARU BARAT GANG MADU RT 09 RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
977	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Tanah Merah II/60, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
978	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Tanah Merah Indah Sayur IV/2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
979	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Tanah Merah Sayur 1-A/7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
980	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Tanah Merah Sayur III/31, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
981	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Takal IV Kluwih/7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
982	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	POGOT BARU RT 02 RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
983	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Tanah Merah II/60, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
984	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Tanah Merah III-Buntu/14, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
985	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Tanah Merah Indah Sayur IV/2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
986	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Tanah Merah Sayur 1-A/7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
987	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Tanah Merah Sayur III/31, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
988	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Takal IV Kluwih/7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
989	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Tanah Merah Indah Sayur IV/2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Krembangan					



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
990	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Tambak Asri RT 5 RW 9, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
991	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Rembang Utara RT 01 RW 05 No. Telp 082132698949 (Farocha), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
992	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Branjangan RT 01 RW 10 No. Telp 08385780186 (Wati Dwi Anggraeni), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
993	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Kalongan Kidul Gang. 2 No. 38 RT 02 RW 06 No. Telp. 082236092146 (Yuli Setyorini), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
994	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Tambak Asri Dahlia 6/14, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
995	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Tambak Asri RT 5 RW 9, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
996	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Dupak Bangunsari RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
997	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Ikan Kerapu 3/19, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
998	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Kemayoran Budidayan 17A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
999	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Kemayoran Budidayan DKA Buntu 36, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RW III Perak Barat. Jl Ikan Dorang 45, No. Telp. 0812 5996 5431 (Ridwan), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Lakarsantri					
1001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Jl. Bendungan AMD RT. 002 RW. 003 kel. Sumur Welut Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Bangkingan Timur II RT 02 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	bangkingan timur III RT 03 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Bangkingan Timur V RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Bendungan AMD RT. 002 RW. 003 kel. Sumur Welut Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1006	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Bangkingan Timur II RT 02 RW 01 Kel Bangkingan Kec Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	bangkingan timur III RT 03 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1008	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Bendungan AMD RT. 002 RW. 003 kel. Sumur Welut Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Mulyorejo					
1009	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	JL Manyar Sabrangan XI /31 RT 8 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1010	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Jl. Manyar Sabrangan 9 No 67 RW 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1011	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	RT 1 RW 6 Kelurahan Kalijudan (Kalijudan 10/29), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1012	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	JL Manyar sabrangan XI/31 RT 08 RW 03 (Ainun 089668063363), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1013	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	RT 6 RW 1 Kelurahan Mulyorejo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1014	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	JL manyar sabrangan XI/31 RT 8 RW 3 (Ainun 089668063363), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1015	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Manyar Sabrangan RT 01 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1016	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 1 RW 6 Kelurahan Kalijudan (Kalijudan 10/29), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1017	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 3 RW 12 Kelurahan Manyar Sabrangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1018	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 4 RW 2 Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1019	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 4 RW 6 Kelurahan Kalijudan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1020	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 6 RW 1 Kelurahan Mulyorejo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1021	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 7 RW 2 Kelurahan Mulyorejo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1022	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT 1 RW 6 Kelurahan Kalijudan (Kalijudan 10/29), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1023	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT 4 RW 12 Kelurahan Manyar Sabrangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1024	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT 4 RW 6 Kelurahan Kalijudan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1025	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Mulyorejo Selatan 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1026	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Mulyorejo Selatan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1027	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RT 3 RW 12 Kelurahan Manyar Sabrangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1028	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RT 4 RW 6 Kelurahan Kalijudan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Pabean Cantian					
1029	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	indrapura baru II/7 RT.03 RW. 08. penanggung jawab : 081332965235 (Joesoef), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1030	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	INDRAPURA JAY 3 RT 04 RW 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1031	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	INDRAPURA JAYA 3/3B, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1032	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	SAMBONGAN 3/3 RT 01 RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1033	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Kebalen Kulon I/62 RT.01 RW.06. penanggung jawab : 087854555858 (Supiyan), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1034	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	SAMBONGAN 3/3 RT 01 RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1035	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Indrapura baru 3/19 RT.01 RW. 08. penanggung jawab : 082299925187 (M. Lukman), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1036	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Kalimas Baru 2 RT 04 RW 09 No. Telp 082225568909 (Agung), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Pakal					
1037	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	jerawat rt 5 rw 4 pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1038	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Dukuh Buran RT.005 RW.001 Kel.Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1039	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Dukuh Jerawat RT.001 RW.001 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1040	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pondok Benowo Indah RT.001 RW.008 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1041	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pondok Benowo Indah RT.001 RW.014 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1042	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pondok Benowo Indah RT.002 RW.008 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1043	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pondok Benowo Indah RT.002 RW.010 Kel.Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1044	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pondok Benowo Indah RT.002 RW.014 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1045	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pondok Benowo Indah RT.003 RW.008 Kel.Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1046	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pondok Benowo Indah RT.003 RW.014 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1047	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pondok Benowo Indah RT.004 RW.007 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1048	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pondok Benowo Indah RT.004 RW.010 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1049	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pondok Benowo Indah RT.004 RW.014 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1050	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pondok Benowo Indah RT.004 RW.08 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1051	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pondok Benowo Indah RT.005 RW.008 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1052	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pondok Benowo Indah RT.006 RW.008 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1053	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pondok Benowo Indah RT.007 RW.007 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1054	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pondok Benowo Indah RT.007 RW.008 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1055	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pondok Benowo Indah RT.008 RW.007 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1056	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pondok Benowo Indah RT.008 RW.008 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1057	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pondok Benowo Indah RT.009 RW.007 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1058	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	14 Unit	Raya Babat Jerawat, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1059	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	6 Unit	raya benowo 88, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1060	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.004 RW.008 Kel.Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1061	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	14 Unit	Raya Babat Jerawat, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1062	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	6 Unit	raya benowo 88, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1063	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Dsn.RACI. RW 04. Pengusul : M. DOFIR. HP. 082177211127., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1064	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Dukuh Buran RT.005 RW.001 Kel.Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1065	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Dukuh Jerawat RT.001 RW.001 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1066	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	PAKAL MANGGA JAYA RT 3 RW 6. PENGUSUL : PURWIADI. HP. 082244265899., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1067	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.001 RW.008 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1068	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.001 RW.014 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1069	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.002 RW.008 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1070	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.002 RW.010 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1071	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.002 RW.014 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1072	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.003 RW.014 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1073	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.003 RW.08 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1074	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.004 RW.007 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1075	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.004 RW.010 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1076	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.004 RW.014 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1077	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.004 RW.08 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1078	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.005 RW.008 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1079	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.006 RW.008 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1080	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.007 RW.007 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1081	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.007 RW.08 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1082	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.008 RW.007 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1083	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.008 RW.008 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1084	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RT.009 RW.007 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya, Babat Jerawat, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1085	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RW.007 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1086	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RW.008 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1087	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RW.010 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1088	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pondok Benowo Indah RW.014 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1089	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	14 Unit	Raya Babat Jerawat, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1090	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	6 Unit	raya benowo 88, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1091	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	CCTV	1 Paket	BEJI RT 01 RW04. PENGUSUL : ZAINUL ARIFIN.	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			HP. 085648656568., Kota Surabaya	
1092	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl.RAYA BEJI RT2 RW 4. Pengusul : PARMATLIM (KETUA RT). HP. 081259989339., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1093	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Pondok Benowo Indah RT 01 RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1094	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Pondok Benowo Indah RT.004 RW.08 Kel.Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1095	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Pondok Benowo Indah RW.014 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1096	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	3 Paket	raya benowo 88, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Rungkut					
1097	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Jln. Rungkut Kidul gg 1 Rw 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1098	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Sekretariat RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1099	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	RT 2 RW 12 Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1100	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	RT 3 RW 12 Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1101	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	medokan tambak RT 12, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1102	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 2 RW 12 Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1103	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 3 RW 12 Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1104	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 3 RW 2 Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1105	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 4 RW 11 Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1106	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 6 RW 2 Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1107	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RW 2 Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1108	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jln Rungkut Lor Gg 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1109	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	medokan tambak RT. 12 rw 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1110	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT 2 RW 12 Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1111	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT 3 RW 12 Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1112	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT 3 RW 2 Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1113	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT 4 RW 11 Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1114	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT 5 RW 12 Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1115	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT 6 RW 2 Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1116	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl Medayu Utara 14 dan Jl Medayu Utara 15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1117	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	CCTV	1 Paket	Jl Medayu Utara V (sisi selatan), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
1118	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl Medokan Kampung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1119	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl Putra Bangsa III, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1120	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Penjaringan Sari RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1121	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	medokan sawah timur 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1122	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Penjaringan Sari RT 02 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1123	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Penjaringan Sari RT 03 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1124	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Perum YKP Penjaringan Sari PS2 RW 11 Kelurahan Penjaringan Sari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1125	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RT 1 RW 3 Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1126	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RT 4 RW 4 Kelurahan Kedung Baruk (Kedung Baruk 2), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1127	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Rusunawa Penjaringan 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1128	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RW 12 Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1129	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Wonorejo Selatan 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1130	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Wonorejo Selatan Gang III, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1131	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	2 Paket	Rungkut Lor gg 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Sambikerep					
1132	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Balai RT 01 dan RT 02 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1133	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Made Barat RT 02 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1134	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Dk. Kuwukan 1 RT 01 RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1135	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Dukuh Bulu RT.001 RW.004 Kelurahan Lontar Kec. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1136	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	4 unit	Balai RT 01 dan RT 02 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1137	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Made Barat RT 02 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1138	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Dk. Kuwukan 1 RT 01 RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1139	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Dukuh Bulu RT.001 RW.004 Kelurahan Lontar Kec. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1140	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Dukuh Bulu RT.004 RW.004 Kelurahan Lontar Kec. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1141	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	JALAN SAMBIARUM LOR GANG VII RT.08 RW.06 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1142	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Lontar RT. 006 RW. 002 Kel. Lontar Kec. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1143	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Made Barat RT 02 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1144	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 01 dan RT 02 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1145	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	2 unit	Balai RT 01 dan RT 02 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1146	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Dk. Kuwukan 1 RT 01 RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1147	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Dukuh Bulu RT.001 RW.004 Kelurahan Lontar Kec. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1148	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Dukuh Bulu RT.004 RW.004 Kelurahan Lontar Kec. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1149	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	JALAN SAMBIARUM LOR GANG VII RT.08 RW.06 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1150	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Lontar RT. 006 RW. 002 Kel. Lontar Kec. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1151	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	sambikerep RT 04 RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1152	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	sambikerep RT 04 RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1153	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	2 unit	Balai RT 01 dan RT 02 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1154	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	3 unit	wilayah RT 05 RW 07 korwil 1,2,3 Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1155	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Dk. BUNGKAL. RW 03. PENGUSUL : H. MATJUKI. HP. 085655075099., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1156	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	wilayah RT 01 RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Sawahan					
1157	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	RT 03-RW 02 Petemon Kuburan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1158	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	RT 06-RW 02 Petemon Kuburan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1159	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	TPQ AL - AMIEN JLN. BANYU URIP KIDUL 6 NO.18 RT 3 RW 9 (MOCHAMAD YUSUF , 0853-3474-6029), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1160	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	JL. PETEMON SIDOMULYO RT 9 RW 18. CIPTO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1161	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	(RW 2/RT 4), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1162	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Balai RT 13 RW 09. Banyu Urip Kidul 10 E, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1163	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Banyu Urip Kidul VI / 72. RT 04/RW 09, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1164	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Kupang gunung jaya 8. RT 08/RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1165	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	petemon sidomulyo tengah RT 05 RW 18, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1166	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	RT 04 RW 07 Kupang Gunung Jaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1167	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Simo gunung kramat Barat 3a dan 4. RT 05/RW 14, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1168	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Simo Katrungan Kidul v/6. RT 04/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1169	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Simo Kwagean Kuburan 14. RT 04/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1170	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	TPQ AL - AMIEN JLN. BANYU URIP KIDUL 6 NO.18 RT 3 RW 9 (MOCHAMAD YUSUF , 0853-3474-6029), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1171	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	10 unit	TPQ AL - AMIEN JLN. BANYU URIP KIDUL 6 NO.18 RT 3 RW 9 (MOCHAMAD YUSUF , 0853-3474-6029), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1172	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Balai RT 13 RW 09. Banyu Urip Kidul 10 E, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1173	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	banyu urip kidul 2 / 37. RT 02/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1174	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	banyu urip kidul 4/7. RT 05/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1175	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Banyu Urip Kidul VI / 72. RT 04/RW 09, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1176	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	banyu urip wetan tengah 6 / 4. RT 10/RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1177	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Girilaya 7/48. RT 07/RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1178	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Pakis Gunung Gang 2A/37. RT 08/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1179	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Pakis Gunung Gang 2E. RT 17/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1180	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	petemon kuburan 36. RT 03/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1181	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	RT 03-RW 02 Petemon Kuburan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1182	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	RT 06 / RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1183	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	RT 08/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1184	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Simo Katrungan Kidul v/6. RT 04/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1185	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Simo Kwagean Kuburan 14. RT 04/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1186	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	(RW 12/RT 08), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1187	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	banyu urip wetan tengah 6 / 4. RT 10/RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1188	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	petemon kuburan 36. RT 03/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1189	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Putat jaya 3A no 37. RT 03/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1190	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	simo gunung kramat timur 1b. RT 07/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1191	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	simo gunung kramat timur 1b. RT 07/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1192	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	simo gunung kramat timur 1b. RT 07/RW 02,, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1193	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	simo gunung kramat timur 2. RT 05/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1194	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	simo gunung kramat timur 3 /21. RT 06/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1195	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	simo gunung kramat timur 5. RT 02/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1196	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	simo gunung kramat timur 8. RT 08/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1197	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	simo gunung kramat timur 9. RT 09/RW02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1198	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	TPQ AL - AMIEN JLN. BANYU URIP KIDUL 6 NO.18 RT 3 RW 9 (MOCHAMAD YUSUF , 0853-3474-6029), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1199	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Balai RT 13 RW 09. Banyu Urip Kidul 10 E, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1200	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	banyu urip kidul 2 / 37. RT 02/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1201	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	banyu urip kidul 4/7. RT 05/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1202	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Banyu Urip Kidul VI / 72. RT 04/RW 09, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1203	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	banyu urip wetan tengah 6 / 4. RT 10/RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1204	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Banyuurip kidul Gg 5. RT 05/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1205	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Girilaya 7/48. RT 07/RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1206	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Banyu Urip Kidul 3 RT 04 – RW 04 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1207	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Petemon Barat no. 27 RT 01 RW. 02 Kel. Kupang Krajan. Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1208	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT / RW :08/08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1209	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 06-RW 02 Petemon Kuburan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1210	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Simo Kwagean Kuburan 14. RT 04/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1211	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	TPQ AL - AMIEN JLN. BANYU URIP KIDUL 6 NO.18 RT 3 RW 9 (MOCHAMAD YUSUF , 0853-3474-6029), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1212	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Balai RT 13 RW 09. Banyu Urip Kidul 10 E, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1213	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	banyu urip wetan tengah 6 / 4. RT 10/RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1214	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Banyuurip kidul 9A. RT 10/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1215	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Banyuurip kidul Gg 5. RT 05/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1216	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Petemon Barat 170 RT. 05 RW. 12 Kel. Petemon. Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1217	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	JL. PETEMON SIDOMULYO RT 9 RW 18. AN. CIPTO (PAK RT),, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1218	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Putat Jaya C Barat V RT. 07 RW. 13	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				Kel. Putat Jaya. Kec. Sawahan, Kota Surabaya	
1219	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Kupang Gunung Jaya 3 /10. RT 03/RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1220	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Kupang gunung jaya 8. RT 08/RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1221	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Petemon 2A RT 8 RW 9 Koko Koesnindar, Kota Surabaya, Sawahan, Petemon, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1222	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Petemon 3 RT.02 RW.13. penanggung jawab : Ramdani, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1223	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Petemon 3 RT.02 RW.14. penanggung jawab : Mardiyah, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1224	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Putat jaya 3A no 37. RT 03/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1225	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	putat jaya barat 10B. RT 06/RW 11, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1226	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Putat Jaya Baru 2 RT 07 – RW 11 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1227	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT / RW :08/08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1228	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT 05-RW 14 Putat Jaya-Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1229	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	simo gunung baru jaya. RW 15, Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1230	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR 1 NO 12 A. RT 03/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1231	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	simo gunung kramat timur 1b. RT 07/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1232	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	simo gunung kramat timur 1C. RT 04/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1233	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	simo gunung kramat timur 2. RT 05/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1234	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	simo gunung kramat timur 3 /21. RT 06/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1235	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	simo gunung kramat timur 4. RT 01/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1236	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	simo gunung kramat timur 5. RT 02/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1237	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	simo gunung kramat timur 8. RT 08/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1238	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	simo gunung kramat timur 9. RT 09/RW02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1239	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	TPQ AL - AMIEN JLN. BANYU URIP KIDUL 6 NO.18 RT 3 RW 9 (MOCHAMAD YUSUF , 0853-3474-6029), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1240	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	alan putat jaya barat gang 6B. RT 02/RW 11, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1241	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl Dukuh Kupang Timur VII Pakis. RT 06/RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1242	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	JL. PETEMON SIDOMULYO RT 9 RW 18. AN. CIPTO (PAK RT), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1243	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Kupang gunung jaya 8. RT 08/RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1244	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Kupang Gunung Jaya Gg2. RT 02/RW 07, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1245	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Pakis Gang 3/32C. RT 02/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1246	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Pakis Gunung Gang 2A/37. RT 08/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1247	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Pakis Gunung Gang 3A. RT 15/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1248	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Pakis Wetan Gang 8/1. RT 15/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1249	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Petemon 2A RT 8 RW 9 Koko Koesnindar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1250	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Petemon 3 RT.02 RW.13. penanggung jawab : Ramdani, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1251	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Petemon 3 RT.02 RW.14. penanggung jawab : Mardiyah, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1252	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Petemon 3 RT.03 RW.13. penanggung jawab : Imam Bonangin, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1253	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Petemon 4 RT.00 RW.00. penanggung jawab : Didik Sulaiman, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1254	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Petemon 4 RT.01 RW.13. penanggung jawab : Agus Santoso, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1255	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	petemon kuburan 36. RT 03/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1256	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Putat jaya 3A no 37. RT 03/RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1257	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	putat jaya barat 10B. RT 06/RW 11, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1258	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RT / RW :08/08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1259	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RT 04 RW 07 Kupang Gunung Jaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1260	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	CCTV	1 Paket	RT 15/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
1261	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RT 6 RW 8 Kel Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1262	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	simo gunung baru jaya. RW 15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1263	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Simo gunung kramat Barat 3a dan 4. RT 05/RW 14, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1264	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	simo gunung kramat timur 2. RT 05/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1265	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	simo gunung kramat timur 3 /21. RT 06/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1266	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	simo gunung kramat timur 5. RT 02/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1267	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	simo gunung kramat timur 9. RT 09/RW02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1268	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Simokwagean RW.13. penanggung jawab : Mas Ar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1269	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	TPQ AL - AMIEN JLN. BANYU URIP KIDUL 6 NO.18 RT 3 RW 9 (MOCHAMAD YUSUF , 0853-3474-6029), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Semampir					
1270	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	sidotopo sekolahan 12/83, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1271	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Ujung 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1272	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Ujung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1273	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Bulak Jaya 1/34, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1274	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Bulak Jaya 10 RT.08 RW.XV. penanggung jawab : 088804915108 (Susilo), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1275	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	DANAKARYA 1/50 B RT 03 RW 14, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1276	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	JL. DANA KARYA 1/30 RT 02 RW 14, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1277	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	JL. KETABANG BESAR NO 36A RT 02 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1278	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Sidotopo Sekolahan 12/65 RT.09 RW.XI penanggung jawab : 081216225559b (Lailatul H), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1279	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Sidotopo Sekolahan 7/58 RT.7 RW.XI. penanggung jawab : 081330564966, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1280	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Sidotopo Sekolahan Buntu 12 RT.02 RW. XI.	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				penanggung jawab : 081226892307 (Yayuk Rahayu), Kota Surabaya	
1281	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	sidotopo sekolahan 12/83, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1282	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Tenggumung Baru Selatan 5/49 RT. 08 RW. X. penanggung jawab : 081331028570 (Mugiyem), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1283	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Wonokusumo Jaya Baru 6/36 RT.12 RW.XI. penanggung jawab : 083857084559 (Moch. Khotib), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1284	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Wonokusumo Jaya Baru 8/34 RT.12 RW.XI. penanggung jawab : 087854700864 (M. Romli), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1285	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	WONOKUSUMO JAYA BARU 9/10 RT 20 RW 11, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1286	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	WONOKUSUMO JMAYA GANG 1 RT 08 RW 11, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1287	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Wonosari Lor 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1288	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	WONOSARI LOR KB RT 9 RW 14, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1289	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Bulak Jaya 10 RT.08 RW.XV. penanggung jawab : 081357152665 (Karyono), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1290	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	CCTV	1 Paket	JL. DANAKARYA 1/50B RW 14, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
1291	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Sidotopo Sekolah 7/58 RT.7 RW.XI. penanggung jawab : 081330564966 (Hasan Mudiono), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1292	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl.Kunti No, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1293	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Tenggumung Baru Selatan XII/10A RT.08 RW.X. penanggung jawab : 081259963702 (Fachrudin), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Sukolilo					
1294	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Jalan Semampir selatan 5A (Ketut 081330675174), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1295	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	RT 9 RW 2 Kelurahan Keputih, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1296	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jalan Semampir selatan 5A (Ketut 081330675174), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1297	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Medokan Semampir Indah Gang III, RT 01 RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1298	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Medokan Semampir Indah Gang IV, RT 01 RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1299	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Medokan Semampir Indah Gang V, RT 01 RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1300	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	MENUR PUMPUNGAN RT 03 RW 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1301	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	menur pumpungan RT. 01 RW. 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1302	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	MENUR PUMPUNGAN RT. 02 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1303	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Menur Pumpungan RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Sukomanunggal					
1304	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	balai RT. 03/ RW. 01 PUTAT GEDE barat 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1305	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Simorejo I No.22 RT.01 RW.02. Penanggung jawab : Jojok Setawan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1306	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Simorejo No.75 RT.08 RW.02. penanggung jawab : Hj. Sri Hartatik, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1307	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Simorejo Sari A No.05 RT. 07 RW.06. penanggung jawab : Suyitno, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1308	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Simorejo V No.01 RT.03 RW.02. penanggung jawab : Hery Mulyono, SE, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1309	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Simorejo VI No.35 RT.02 RW.02. penanggung jawab : Umar Abdullah, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1310	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Simorejo XV No.51 RT.06 RW.02. penanggung jawab : Didik Eko Iswanto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1311	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Simorejo XX No.01 RT.10 RW.02. penanggung jawab : Agus Budi Santoso, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1312	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Balai RT 06/RW 02. jl simorejo gg 15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1313	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	balai RT. 03/ RW. 01 PUTAT GEDE barat 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1314	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	POS RT 06/RW 05. Jln simo pomahan baru, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1315	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Simorejo Sari A No.05 RT. 07 RW.06. penanggung jawab : Suyitno, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1316	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Balai RT 06/RW 02. jl simorejo gg 15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1317	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	balai RT. 03/ RW. 01 PUTAT GEDE barat 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1318	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Raya Kupang Jaya 2A/90 RT. 07 RW.13 Kel. Simomulyo Baru. Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1319	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	POS RT 01 jln simo pomahan baru. RT 01/RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1320	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	POS RT 03 Jln Donowati Ila. RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1321	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	POS RT 06/RW 05. Jln simo pomahan baru, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1322	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Simo Jawar 5 Blok A5 No. 12 RT 04 - RW 10 Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1323	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Simorejo I No.22 RT.01 RW.02. Penanggung jawab : Jojok Setawan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1324	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Simorejo No.75 RT.08 RW.02. penanggung jawab : Hj. Sri Hartatik, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1325	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Simorejo V No.01 RT.03 RW.02. penanggung jawab : Hery Mulyono, SE, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1326	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Simorejo VI No.35 RT.02 RW.02. penanggung jawab : Umar Abdullah, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1327	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Simorejo XV No.51 RT.06 RW.02. penanggung jawab : Didik Eko Iswanto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1328	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Simorejo XVII No.07 RT. 07 RW.02. penanggung jawab : Putut Heru Katika, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1329	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Simorejo XX No.01 RT.10 RW.02. penanggung jawab : Agus Budi Santoso, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1330	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Simorejosari A RT.05 RW.06. penanggung jawab : Lilik Susilawati, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1331	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	balai RT. 03/ RW. 01 PUTAT GEDE barat 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1332	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	POS RT 03 jln Donowati Ila. RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1333	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	POS RT 06/RW 05. Jln simo pomahan baru, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1334	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Simo Rukun RT 7/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1335	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Simorejo I No.22 RT.01 RW.02. Penanggung jawab : Jojok Setawan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1336	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Simorejo No.75 RT.08 RW.02. penangggung jawab : Hj. Sri Hartatik, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1337	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Simorejo Sari A No.05 RT. 07 RW.06. penanggung jawab : Suyitno, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1338	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Simorejo Sari A RT.07 RW.06. penanggung jawab : Suyitno, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1339	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Simorejo V No.01 RT.03 RW.02. penanggung jawab : Hery Mulyono, SE, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1340	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Simorejo XV No.51 RT.06 RW.02. penanggung jawab : Didik Eko Iswanto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1341	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Simorejo XVII No.07 RT. 07 RW.02. penanggung jawab : Putut Heru Katika, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1342	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Simorejo XX No.01 RT.10 RW.02. penanggung jawab : Agus Budi Santoso, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1343	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Simorejosari A RT.05 RW.06. penanggung jawab : Lilik Susilawati, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1344	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Balai RT 06/RW 02. jl simorejo gg 15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1345	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Raya Kupang Jaya 2A/90 RT. 07 RW.13 Kel. Simomulyo Baru. Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1346	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	JL. SIMOREJO SARI B GG 7 RT 03 RW 07. Agus, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1347	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	POS RT 03 jln Donowati Ila. RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1348	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	POS RT 06/RW 05. Jln simo pomahan baru, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1349	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Simo Rukun RT 7/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1350	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	CCTV	1 Paket	Simomulyo Baru gg 6 No.74 RT.03 RW. 06.	Teralokasi pada TA 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			penanggung jawab : H. Faisol, Kota Surabaya	
1351	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Simorejo I No.22 RT.01 RW.02. Penanggung jawab : Jojok Setawan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1352	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Simorejo Sari A RT.07 RW.06. penanggung jawab : Suyitno, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1353	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Simorejo V No.01 RT.03 RW.02. penanggung jawab : Hery Mulyono, SE, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1354	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Simorejo VI No.35 RT.02 RW.02. penanggung jawab : Umar Abdullah, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1355	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Simorejo VI No.35 RT.02 RW.02. penanggung jawab : Yayuk, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1356	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Simorejo XX No.01 RT.10 RW.02. penanggung jawab : Agus Budi Santoso, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1357	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Simorejosari A RT.05 RW.06. penanggung jawab : Lilik Susilawati, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Tambaksari					
1358	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Bronggalan Sawah 4-A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1359	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Bronggalan sawah 4c/77, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1360	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Bronggalan sawah 4d/97, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1361	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Bronggalan sawah 4F/35, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1362	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Bronggalan sawah 6/107, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1363	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Bronggalan Sawah V-A/ 55, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1364	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Bronggalan swah 5 no 31 A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1365	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Dharmahusada Dalam 6-C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1366	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Bronggalan sawah 4c/77, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1367	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Bronggalan sawah 4d/97, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1368	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Bronggalan sawah 4F/35, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1369	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Bronggalan Sawah 5/25, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1370	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Bronggalan sawah 6/107, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1371	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Bronggalan Sawah V-A/ 55, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1372	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Bronggalan Sawah VI A/ 52, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1373	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Bronggalan swah 5 no 31 A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1374	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Kalikepiting 149/9, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1375	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Kalikepiting Jaya 6/42, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1376	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Kedung Tarukan V/15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1377	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pacarkeling 5/53a, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1378	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	TUWOWO KALI REJO RT 10 RW 4 (SUGENG WAHYUDI, 0822-3455-5485), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1379	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Bronggalan sawah 4c/77, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1380	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Bronggalan sawah 4d/97, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1381	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Bronggalan sawah 6/107, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1382	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Bronggalan Sawah V-A/ 55, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1383	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Bronggalan Sawah VI A/ 52, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1384	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Dharmahusada Dalam 6-C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1385	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Kedungsroko 1/17, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1386	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Bronggalan sawah 4c/77, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1387	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Bronggalan sawah 4d/97, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1388	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Bronggalan sawah 4F/35, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1389	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Bronggalan sawah 6/107, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1390	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Bronggalan Sawah V-A/ 55, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1391	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	6 Unit	Tambaksari Selatan 12/2D, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1392	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Bronggalan sawah 4c/77, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1393	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Bronggalan sawah 4d/97, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1394	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Bronggalan sawah 4F/35, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1395	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Bronggalan sawah 6/107, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1396	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Bronggalan Sawah V-A/ 55, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1397	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Bronggalan Sawah VI A/ 52, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1398	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Bronggalan swah 5 no 31 A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1399	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Dharmahusada Dalam 6-C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1400	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Kapas Baru 5 gg Masjid 7a, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1401	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Kapas Lor 1A No 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1402	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Kedungsroko 1/17, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1403	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Tambaksari Selatan 12/2D, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1404	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Bronggalan sawah 4c/77, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1405	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Bronggalan sawah 4d/97, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1406	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Bronggalan sawah 4F/35, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1407	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Bronggalan sawah 5 baru tengah no 43, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1408	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Bronggalan sawah 6/107, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1409	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Bronggalan Sawah V-A/ 55, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1410	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Bronggalan Sawah VI A/ 52, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1411	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Bronggalan swa 5 no 31 A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1412	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Dharmahusada Dalam 6-C, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1413	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Bronggalan Sawah 5/25, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1414	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	JL. TAMBAKSARI SELATAN LEBAR NO. 28 RT 18 RW 06 PAK HERU 081231862592, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1415	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Kalikepiting 149/9, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1416	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Kalikepiting Jaya 6/42, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1417	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Kedung Tarukan V/15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1418	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	KEDUNGSROKO 7 RT 07 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1419	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Kenjeran No. 163 A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1420	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Pacarkeling 5/53a, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1421	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	SETRO BARU 1/ 45-A RT 01 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1422	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Setro Baru Utara 6/93, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1423	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	AMBENGAN BATU GG 5 RT 06 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1424	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Bronggalan sawah 4c/77, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1425	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Bronggalan sawah 4d/97, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1426	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Bronggalan sawah 4F/35, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1427	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Bronggalan sawah 5 baru tengah no 43, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1428	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Bronggalan sawah 6/107, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1429	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Bronggalan Sawah V-A/ 55, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1430	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Gading Karya Raya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1431	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Bronggalan Sawah 5/25, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1432	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Kalikepiting 149/9, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1433	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Kalikepiting Jaya 6/42, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1434	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Kedung Tarukan V/15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1435	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	KEDUNGSROKO 7 RT 07 RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1436	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pacarkeling 5/53a, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1437	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	SETRO BARU 1/45-A RT 01 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1438	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	AMBENGAN BATU GG 5 RT 06 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1439	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Bronggalan Sawah 4-A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1440	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Bronggalan sawah 4c/77, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1441	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Bronggalan sawah 4d/97, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1442	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Bronggalan sawah 6/107, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1443	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Bronggalan Sawah V-A/ 55, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1444	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Bronggalan Sawah VI A/ 52, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1445	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Bronggalan swah 5 no 31 A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1446	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	JL. AMBENGAN BATU DKA NO 11 RT 07 RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1447	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Bronggalan Sawah 5/25, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1448	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	CCTV	1 Paket	Kalikepiting Baskara, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
1449	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Kedung Tarukan I/12-14, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1450	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Kedung Tarukan V/15, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1451	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Kenjeran No. 163A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1452	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Rangkah VII RT. 01 RW. 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1453	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	SETRO BARU 1/45-A RT 01 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1454	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Tambaksari Selatan 12/2D, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1455	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	2 Paket	Bronggalan sawah 4F/35, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Tandes					
1456	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	7 Unit	Balongsari Krajan II / 123, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1457	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	TUBANAN BARU I BLOK B (DEDENG, 0857-3361-3326), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1458	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	15 Unit	Jalan Manukan Asri I-A, Kota Surabaya, Tandes, Manukan Kulon, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1459	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	7 Unit	Jl. Sikatan Ii/71, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1460	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	14 Unit	Balongsari Krajan II / 123, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1461	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	14 Unit	Jl. Sikatan Ii/71, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1462	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	18 Unit	Darmo Indah Asri No. 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1463	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	18 Unit	Jl. Raya Darmo Indah Blok K No. 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1464	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	30 Unit	Jalan Manukan Asri I-A, Kota Surabaya, Tandes, Manukan Kulon, Kota Surabaya, Tandes, Manukan Kulon, Kota Surabaya, Tandes, Manukan Kulon, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1465	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	8 Unit	Raya Banjarsugihan No. 8, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1466	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	15 Unit	Jalan Manukan Asri I-A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1467	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	7 Unit	Jl. Sikatan Ii/71, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1468	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	9 unit	Jl. Raya Darmo Indah Blok K No. 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1469	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Gadel Baru 1 RT 11, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1470	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	4 unit	Raya banjarsugihan no 8, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1471	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	7 Unit	Balongsari Krajan II / 123, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1472	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Raya Banjarsugihan No. 8, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1473	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	TUBANAN BARU I BLOK B (DEDENG, 0857-3361-3326), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Tegalsari					
1474	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Jl Dinoyo Sekolahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1475	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Kedondong RT 9 RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1476	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Jl. Wonorejo III/82 B RT 04 RW 05 No. Telp. 085790833391 (Tulus), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1477	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pandegiling Tengah RT 8 RW 7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1478	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Tempel Sukorejo I (RT/RW : 6/7), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1479	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Tempel Sukorejo IV RT 3 RW X, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1480	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Kupang Panjaan IV RT 7 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1481	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Jl Dinoyo Sekolahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1482	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Kedondong RT 9 RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1483	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Kupang Panjaan 1/18 RT 01 RW 03, No. Telp 081230500702 (Agus Pramono), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1484	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Kedondong RT 9 RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1485	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Kupang Panjaan IV RT 7 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1486	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Tempel Sukorejo I (RT/RW : 6/7), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1487	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Tempel Sukorejo IV RT 3 RW X, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1488	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Kedung Rukem 4 RT 01 RW 07 No. Telp. 085784752543 (Iliyin/Amin), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1489	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Kedung Rukem 4, RT 07 RW 07, No. Telp. 085716434555 (Cahya Budi Santoso/Sudarmanto), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1490	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Kupang Panjaan 1/18 RT 01 RW 03, No. Telp 081230500702 (Agus Pramono), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1491	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Wonorejo III/82 B RT 04 RW 05 No. Telp. 085790833391 (Tulus), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1492	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Wonorejo III/9A RT 09 RW 05 No. Telp 083857711888 (Edi Suwarno), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1493	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jln. Kedondong RT 13 RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1494	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Kedondong RT 9 RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1495	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Kupang Panjaan IV RT 7 RW 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1496	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pandegiling Tengah RT 8 RW 7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1497	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Tempel Sukorejo I (RT/RW : 6/7), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1498	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Tempel Sukorejo IV RT 3 RW X, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1499	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	JL. KEPUTRAN 4/4-A RT 02 RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Tenggilis Mejoyo					
1500	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	RT 7 RW 2 Kelurahan Kutisari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1501	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	RT 8 RW 2 Kelurahan Kutisari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1502	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Tenggilis Kauman RT 3 RW 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1503	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT 8 RW 2 Kelurahan Kutisari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1504	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Kendangsari RT 07 RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1505	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Kendangsari RW 05, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1506	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Tenggilis Kauman RT 03 RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1507	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl. Tenggilis Kauman RT 3 RW 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1508	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RT 5 RW 6 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Wiyung					
1509	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Dukuh Kramat gg. 2 RT. 002 RW. 004 Kel. Jajar Tunggal Kec. Wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1510	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Balas Klumprik RT. 001 RW. 002 kel. Balas Klumprik kec. Wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1511	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Dukuh Kramat gg. 2 RT. 002 RW. 004 Kel. Jajar Tunggal Kec. Wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1512	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jl. Balas Klumprik RT. 002 RW. 002 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Wonocolo					
1513	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	SIDOSERMO II BLOK G (BUDI 0882-9878-9653), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1514	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	SIDOSERMO II BLOK G (BUDI 0882-9878-9653), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1515	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RT 3 RW 1 Kelurahan Margorejo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1516	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	T 1 RW 2 Kelurahan Sidosermo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1517	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl Margorejo II G, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1518	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	CCTV	1 Paket	Jl Sidosermo Gg 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
1519	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Margorejo Gang 2F, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1520	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	pintu masuk ke Jemurwonosari RT 2 RW 2 Kelurahan Jemurwonosari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1521	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RT 1 RW 2 Kelurahan Jemurwonosari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1522	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RT 1 RW 2 Kelurahan Sidosermo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1523	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RT 2 RW 5 Kelurahan Margorejo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1524	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	RW 5 Kelurahan Margorejo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1525	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	SIDOSERMO II BLOK G (BUDI 0882-9878-9653), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
Kec. Wonokromo					
1526	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Brawijaya Kidul RT.07 RW.06. penanggung jawab : Basuni, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1527	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	jl bumiarjo RT 1 RT 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1528	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Joyoboyo No.28 RT.06 RW,06. penanggung jawab : Moch Zaiful Amin, Drs, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1529	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Waringin Kedurus No.26 RT.02 RW.06. penanggung jawab : Yahya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1530	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Komputer	1 Unit	Waringin Kedurus RT.02 RW.06. penanggung jawab : Kukuh Suyoko, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1531	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Bendul Merisi 147 RT.08 RW.03. penanggung jawab : Susilowati, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1532	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Brawijaya Kedurus II No.92 RT.04 RW.06. penanggung jawab : Ruwihadi, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1533	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Bumiarjo RT.01 RW. 05. penanggung jawab : Moch. Sholehuddin, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1534	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	DKA Tegal No.70 RT.05 RW.06. penanggung jawab : Eko Endri P, SE, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1535	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	DKA Tegal RT.10 RW.06. penanggung jawab : Abdul Muchid, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1536	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Joyoboyo No.28 RT.06 RW,06. penanggung jawab : Moch Zaiful Amin, Drs, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1537	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Joyoboyo Timur RT.11 RW. 06. penanggung jawab : Muhyidin Arief, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1538	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pulo Wonokromo Wetan 3 No.14 RT.01 Rw.04. penanggung jawab : Sundari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1539	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pulo Wonokromo Wetan 6 No. 21 RT.5 RW.04. penanggung jawab : Nurmasiyah, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1540	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pulo Wonokromo Wetan 6 No.21 RT.03 Rw.04. penanggung jawab : Rina Anggraini Putri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1541	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pulo Wonokromo wetan 6 No.26 RT.04 RW.04. penanggung jawab : Kartika Aryani, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1542	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Pulo Wonokromo Wetan 6 No.45 RT.02 Rw.04. penanggung jawab : Yustina Noviana Owen, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1543	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Waringin Kedurus No.26 RT.02 RW.06. penanggung jawab : Yahya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1544	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Kursi Lipat	20 Unit	Waringin No.19 RT.03 RW.06. penanggung jawab : Sunaryo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1545	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	DKA Tegal No.12 RT.09 RW.06. penanggung jawab :081231748887 (Siti Syahroh), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1546	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Jalan Jetis Kulon Pertolongan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1547	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Jl wonokromo tengah 7 dan 8. RT 12/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1548	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	JL. KARANGREJO 8 RT 06 / RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1549	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	JL. KARANGREJO 9 RT 10 / RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1550	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	JL. KARANGREJO BARU RT 05 / RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1551	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Jl. Wonokromo. V. No. 21. RT 08/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1552	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Jl.ketintang 3/1. RT 02/RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1553	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Jl.Wonokromo tengah 3 RT 10/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1554	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Karangrejo Sawah Gg 11. Balai RT 08. RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1555	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	RT06/RW08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1556	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Wonokromo Gg 1. RT 04/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1557	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	wonokromo pasar lama no. 3. RT 01/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1558	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Wonokromo Pasar RT 06/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1559	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Wonokromo Pasar RT. 02/ RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1560	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	wonokromo RT 11/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1561	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Wonokromo Tengah 10 dan Wonokromo Tengah 9. RT 14/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1562	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan LCD Proyektor	1 Unit	Wonokromo Tengah Gg 1 & Gg 2 RT 09 RW.06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1563	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Bagong Tambangan RT.01 RW.5.	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
				penanggung jawab : H. Bahruddin, Kota Surabaya	
1564	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Bagong Tambangan RT.02 RW.5. penanggung jawab : H. Nur Qomari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1565	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Bagong Tambangan RT.08 RW.03. penanggung jawab : Arif, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1566	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Brawijaya Kedurus II No.92 RT.04 RW.06. penanggung jawab : Ruwihadi, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1567	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Bumiarjo RT.01 RW. 05. penanggung jawab : Moch. Sholehuddin, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1568	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Joyoboyo Timur RT.11 RW. 06. penanggung jawab : Muhyidin Arief, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1569	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Meja Lipat	2 unit	Waringin Kedurus No.26 RT.02 RW.06. penanggung jawab : Yahya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1570	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	DKA Tegal No.12 RT.09 RW.06. penanggung jawab :081231748887 (Siti Syahroh), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1571	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	jl bumiarjo RT 1 RT 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1572	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Printer	1 Unit	Waringin Kedurus RT.02 RW.06. penanggung jawab : Kukuh Suyoko, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1573	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Bumiarjo RT.01 RW. 05. penanggung jawab : Moch. Sholehuddin, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1574	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Bumiarjo RT.09 RW.05. penanggung jawab : Muhammad Azhari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1575	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Darmo Rejo RT. 09 RW. 04. penanggung jawab : Jufri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1576	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Darmo Rejo RT.11 RW. 04 . penanggung jawab : John Feliek, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1577	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	DKA Tegal No.12 RT.09 RW.06. penanggung jawab : Siti Syahroh, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1578	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	DKA Tegal No.70 RT.05 RW.06. penanggung jawab : Eko Endri P, SE, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1579	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	DKA Tegal RT.10 RW.06. penanggung jawab : Abdul Muchid, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1580	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	JETIS BARU LEBAR RT 16/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1581	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jetis kulon 1buntu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1582	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jetis kulon 1buntu. RT 03/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1583	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jetis Kulon 4 No. 19 RT.07 RW.04. penanggung jawab : Sa"l Yahya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1584	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	jetis kulon gg 7. RT 08/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1585	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jetis kulon Gg1. RT 01/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1586	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	jl bumiarjo RT1 RT 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1587	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl Jetis Baru I. RT 18/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1588	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl Jetis Kulon 10. RT 11/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1589	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl wonokromo tengah 7 dan 8. RT 12/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1590	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	JL. KARANGREJO 6 masjid RT 07 / RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1591	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	JL. KARANGREJO 6 NO 39 RT 01/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1592	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	JL. KARANGREJO 6 NO 91 RT 08 / RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1593	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	JL. KARANGREJO 7 NO 17 RT 02/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1594	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	JL. KARANGREJO 8 RT 06 / RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1595	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	JL. KARANGREJO 9 RT 10 / RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1596	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	JL. KARANGREJO BARU RT 05 / RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1597	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Ketintang 4A. RT 05/RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1598	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl. Ketintang 4B. RT 09/RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1599	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl.ketintang 1. RT 01/RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1600	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl.ketintang 1. RT 08/RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1601	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl.ketintang 2/ 43. RT 04/RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1602	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl.ketintang 2/10 c. RT 3/RW 1, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1603	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl.ketintang 3/1. RT 02/RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1604	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl.ketintang lama gang 1A no 29A. RT 06/RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1605	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl.ketintang lama gang 1A no 29A. RT 06/RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1606	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jl.Wonokromo tengah 3 RT 10/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1607	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Jln. Karangrejo Balong. RT 08/RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1608	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Joyoboyo No.28 RT.06 RW,06. penanggung jawab : Moch Zaiful Amin, Drs, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1609	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Joyoboyo Timur RT.11 RW. 06. penanggung jawab : Muhyidin Arief, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1610	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Karangrejo Sawah Gg 11. Balai RT 08. RW 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1611	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Karangrejo Timur 3/32 RT.01 RW.03. penanggung jawab : Ahmad Umar Faruq, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1612	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	pulo wonokromo no 298. RT 07/RW 01, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1613	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 02 RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1614	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 02/RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1615	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 03/RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1616	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 04 RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1617	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 04/RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1618	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 04/RW 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1619	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 07 / RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1620	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 10/RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1621	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT 12/ RW 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1622	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT06/RW08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1623	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	RT07/ RW08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1624	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Waringin Kedurus No.26 RT.02 RW.06. penanggung jawab : Yahya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1625	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Waringin Kedurus RT.02 RW.06. penanggung jawab : Kukuh Suyoko, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1626	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Waringin No.19 RT.03 RW.06. penanggung jawab : Sunaryo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1627	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Wonokitri 66/4 RT.02 RW.02. penanggung jawab : M. Ali, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1628	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Wonokitri 8/11 RT.04 RW.02. penanggung jawab : Susanto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1629	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Wonokromo RT 13/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1630	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	wonokromo 4 RT 05/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1631	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	wonokromo 7 no 54a. RT 07/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1632	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Wonokromo Gg 1. RT 04/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1633	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	wonokromo pasar lama no. 3. RT 01/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1634	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Wonokromo Pasar RT 06/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1635	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Wonokromo Pasar RT. 02/ RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1636	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Wonokromo RT 03/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1637	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	wonokromo RT 11/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1638	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Wonokromo Tengah 10 dan Wonokromo Tengah 9. RT 14/RW 06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1639	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Wonokromo Tengah Gg 1 & Gg 2 RT 09 RW.06, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1640	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Wonosari Kidul 147 RT.01 RW.02. penanggung jawab : Moryati, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1641	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sound System	1 Unit	Wonosari Kidul 167 RT.03 RW.02. penanggung jawab : Soebiyantoro, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1642	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Balai RT 08. RW 03. Karangrejo Sawah Gg 11., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1643	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Bendul Merisi 147 RT.08 RW.03. penanggung jawab : Susilowati, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1644	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Brawijaya Kedurus II No.92 RT.04 RW.06. penanggung jawab : Ruwihadi, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1645	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Bumiarjo RT.04 RW.05. penanggung jawab : Budi Kurniawan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1646	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Bumiarjo RT.09 RW.05. penanggung jawab : Muhammad Azhari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1647	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Darmo Kali RT.10 RW.04. penanggung jawab : M. Sholehuddin, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1648	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Darmo Rejo RT.11 RW. 04 . penanggung jawab : John Feliek, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1649	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	DKA Tegal No.12 RT.09 RW.06. penanggung jawab : Siti Syahroh, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1650	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Jagir Sidomukti RT.02 RW.03. penanggung jawab : Riana, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1651	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Joyoboyo No.28 RT.06 RW.06. penanggung jawab : Moch Zaiful Amin, Drs, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1652	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Joyoboyo Timur RT.11 RW. 06. penanggung jawab : Muhyidin Arief, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1653	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pulo Wonokromo Wetan 3 No.14 RT.01 Rw.04. penanggung jawab : Sundari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1654	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Pulo Wonokromo Wetan 6 No. 21 RT.5 RW.04. penanggung jawab : Nurmasyitah, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1655	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	RW X, jagir, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1656	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Waringin Kedurus No.26 RT.02 RW.06. penanggung jawab : Yahya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1657	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Wonokitri 8/11 RT.04 RW.02. penanggung jawab : Susanto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1658	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Tenda Terop	1 Unit	Wonosari Kidul 167 RT.03 RW.02. penanggung jawab : Soebiyantoro, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1659	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Bagong Tambangan RT.08 RW.03. penanggung jawab : Arif, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1660	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Bendul Merisi 147 RT.08 RW.03. penanggung jawab : Susilowati, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1661	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Bratang Gede 6H No.96 RT.06 RW.12. penanggung jawab : Aan Trimulyanto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1662	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Brawijaya Kedurus II No.92 RT.04 RW.06. penanggung jawab : Ruwihadi, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1663	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Brawijaya Kidul RT.07 RW.06. penanggung jawab : Basuni, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1664	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	CCTV	1 Paket	DKA Tegal No.12 RT.09 RW.06. penanggung jawab : Siti Syahroh, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
1665	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	DKA Tegal No.70 RT.05 RW.06. penanggung jawab : Eko Endri P, SE, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1666	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	DKA Tegal RT.10 RW.06. penanggung jawab : Abdul Muchid, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1667	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jagir Sidomukti RT.02 RW.03. penanggung jawab : Riana, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1668	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	JL Krukah Lama 1 RT.02 RW.09. Contact person : 0895339403074 (Ardiyan), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1669	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	JL Krukah Lama 1 Rt.03 Rw.09. Contact person : 81235565222 (Asmadi SE), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1670	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	JL Krukah Lama 4 Rt.05 Rw.09. Contact person : 0 81331444122 (Didik Kussudiharjo), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1671	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	JL Krukah Lama 5 Rt.06 Rw.09. Contact person : 081233839194 (Royawan Ritno), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1672	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	CCTV	1 Paket	JL Krukah Lama 6 Rt.01 Rw 09 Contact person :	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			082132140791 (Yudi Pernomo), Kota Surabaya	
1673	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	JL Krukah Lama Buntu Rt.04 Rw.09. Contact person : 087849882179 (Hamzah Deppa), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1674	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	JL Krukah Selatan 14 B RT.10 RW.05 Contcat person : 081333082569 (Agus Hadi), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1675	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	JL Ngagel Rejo Kidul KA Rt.08 Rw.02 Contact person : 087803224616 (Sunarko), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1676	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Jl Ngagel Rejo Penjernihan Dalam RT13 RW 02. penangung jawab : 088803731779 (Rudy), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1677	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	JL Ngagel Rejo Utara 6 Rt.08 Rw.01 Contact person : 081555473352 (Totok), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1678	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	JL Ngagel Rejo Utara 8 Rt.05 Rw.01. Contact person : 087854970032 (Darmaji), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1679	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	CCTV	1 Paket	JL Ngagel Tirto 3 Rt.04 Rw.03 Contact person :	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			082233319711 (Tjatur SH), Kota Surabaya	
1680	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	JL. KARANGREJO 6 NO 117. RT 09/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1681	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	JL. KARANGREJO 7 . RT 03/RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1682	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	JL. KARANGREJO 8 RT 06 / RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1683	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	JL. KARANGREJO 9 RT 10 / RW 02, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1684	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Joyoboyo Timur RT.11 RW. 06. penanggung jawab : Muhyidin Arief, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1685	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Pulo Wonokromo Wetan 3 No.14 RT.01 Rw.04. penanggung jawab : Sundari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1686	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Pulo Wonokromo Wetan 6 No. 21 RT.5 RW.04. penanggung jawab : Nurmasyitah, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1687	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Pulo Wonokromo Wetan 6 No.21 RT.03 Rw.04. penanggung jawab : Rina Anggraini Putri, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1688	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Rt 04-RW 03. Jl Wonosari Kidul III, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1689	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Rt 04-RW10 Jagir, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1690	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Sepanjang Jl Penjernihan Rt.13 Rw.02. Contact person : 085232010204 (Muhroji), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1691	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Waringin Kedurus No.26 RT.02 RW.06. penanggung jawab : Yahya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1692	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Waringin Kedurus RT.01 RW.06. penanggung jawab : Edy Sunaryo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1693	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Waringin Kedurus RT.02 RW.06. penanggung jawab : Kukuh Suyoko, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1694	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Waringin No.19 RT.03 RW.06. penanggung jawab : Sunaryo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1695	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Wonokitri 66/4 RT.02 RW.02. penanggung jawab : M. Ali, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/Keterangan
1696	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Wonokitri 8/11 RT.04 RW.02. penanggung jawab : Susanto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1697	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Wonosari Kidul 147 RT.01 RW.02. penanggung jawab : Moryati, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1698	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Wonosari Kidul 167 RT.03 RW.02. penanggung jawab : Soebiyantoro, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023
1699	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	CCTV	1 Paket	Wonosari Kidul 178 B RW.02. penanggung jawab : Yulianto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2023



4.2.6 Inovasi Unggulan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peranan inovasi Daerah ini sangat penting dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sesuai dengan tema RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 **“Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif Menuju Kota Surabaya Yang Humanis dan Berkelanjutan”**, pada tahun 2023 akan dilaksanakan beberapa inovasi unggulan guna mendukung pencapaian tema dan prioritas pembangunan tahun 2023, antara lain :

1. Optimalisasi ePeken, Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo (PEKEN) berbentuk aplikasi yang dapat diakses melalui website maupun playstore pada android. Aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya ini menjadi media transaksi untuk toko kelontong, UMKM dan Sentra Wisata Kuliner. Pada tahun 2023, beberapa fitur akan ditambahkan salah satunya kemudahan pengiriman dan percepatan proses transaksi. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan omset pada toko kelontong, UMKM dan Sentra Wisata Kuliner dapat meningkat;
2. Program Padat Karya, terjadinya pandemi Covid-19 mengakibatkan meningkatnya pengangguran terbuka di Kota Surabaya. Perbaikan pada pertumbuhan ekonomi belum dapat secara signifikan mendongkrak pengurangan pengangguran terbuka di Kota Surabaya, berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pembukaan lapangan kerja dengan program padat karya dengan menyinergikan program-program Pemerintah Kota Surabaya serta optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Surabaya;
3. Dandan Omah, merupakan program perbaikan rumah tidak layak huni yang dalam prosesnya untuk sarana percepatan dan transparansi disinergikan dengan kemudahan teknologi antar PD yaitu usulan dari Kader Surabaya Hebat (KSH) melalui aplikasi Sayang Warga, proses verifikasi dan monitoring



pelaksanaan pekerjaan dengan e-Housing / e-Rutilahu, dan mengintervensi tenaga kerja melalui aplikasi Padat Karya;

4. Beasiswa Pemuda Tangguh, merupakan upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mencegah adanya siswa putus sekolah serta meningkatkan capaian indikator harapan lama sekolah. Program ini menasar pada siswa SMA/SMK/Sederajat dan Mahasiswa;
5. KECAPIN MAMS (Kelas Calon Pengantin & Mama Menyusui), merupakan program di Bidang Kesehatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin dan Ibu menyusui sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya bayi dengan status gizi buruk, stunting, masalah tumbuh kembang bayi lainnya serta kehamilan resiko tinggi yang dapat mengakibatkan kematian Ibu dan bayi;
6. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan, program ini berupaya memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan pemerintah utamanya administrasi kependudukan. Upaya yang akan dilakukan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dalam lingkup kerja Kelurahan.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Program

Rencana Program Tahun 2023 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023, yang mempertimbangkan RPJMN 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, RPJPD Kota Surabaya tahun 2005-2025 serta RPJMD Kota Surabaya 2021-2026.

Rencana Program Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023 beserta tolok ukur Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel V.1 tentang Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel V.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2023

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6,251,867,635,539	6,067,763,182,203	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				2,067,892,257,698	2,217,057,022,752	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91.75 %	1,026,661,408,385	1,012,596,104,339	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 kegiatan	1,902,846,133	4,068,290,393	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1,902,846,133	4,068,290,393	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	882,992,452,945	979,803,617,796	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5929 Orang/bulan	882,992,452,945	979,803,617,796	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	838,797,066	1,258,669,136	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	838,797,066	1,258,669,136	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	9,321,449,380	4,738,408,275	
1.01.01.2.07.11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	964 Unit	9,321,449,380	4,738,408,275	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	131,605,862,861	22,727,118,739	
1.01.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2,214,545,812	2,370,376,111	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	129,391,317,049	20,356,742,628	Dinas Pendidikan
1.01.02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	1,006,904,138,813	1,082,691,168,521	
						Angka Kelulusan SMP/MTS	100%			
						Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Persentase guru PAUD yang kompeten	100%			
						Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	28%			
						Persentase lembaga PAUD berkualitas	83,71%			
						Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	87,60%			
						Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	85%			
						Persentase SD terakreditasi minimal B	93,69%			
						Persentase SMP terakreditasi minimal B	96,79%			
1.01.02.2.01						Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	479,800,261,660	500,497,397,725	
						Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar	4 laporan			
						Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	692 Lembaga			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%			
						Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan			
1.01.02.2.01.06				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	23,511,200,896	57,926,029,959	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.12				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	125 Unit	5,640,774,480	22,462,455,931	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.16				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3,116,551,363	6,931,065,546	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.21				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85997 Peserta Didik	217,806,618,873	235,653,696,103	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.22				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	1,250,000,000	2,631,936,510	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.23				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	649 Satuan Pendidikan	286,445,788	294,264,281	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.25				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	73986 Peserta Didik	3,226,545,528	5,650,169,309	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.27				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	3135 Orang	622,948,532	27,782,250,665	Dinas Pendidikan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				
1.01.02.2.01.28				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	259 Satuan Pendidikan	176,796,200	172,609,866	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.29				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	587 Satuan Pendidikan	224,162,380,000	140,992,919,555	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	313,083,879,538	328,756,132,543	
						Jumlah lembaga pendidikan menengah yang mendapatkan peningkatan mutu	305 Lembaga			
						Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%			
						Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan			
						Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.01.02.2.02.12				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	19,150,718,063	38,617,353,306	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.24				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Unit	5,300,874,348	14,974,959,446	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.27				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	4,861,883,360	6,392,452,545	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.32				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	40574 Peserta Didik	139,313,664,501	173,662,953,408	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.35				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	1,412,647,453	1,469,916,941	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.36				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	39248 Peserta Didik	250,900,000	222,740,044	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.38				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2000 Peserta Didik	3,899,739,259	4,239,903,098	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.40				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	1013 Orang	618,596,604	12,175,051,019	Dinas Pendidikan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kompetensi dan Kualifikasi				
1.01.02.2.02.41				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	255 Satuan Pendidikan	389,755,950	401,023,182	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.42				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan	137,885,100,000	76,599,779,554	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	129,927,192,199	147,461,969,060	
						Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	4 laporan			
						Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan			
1.01.02.2.03.04				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	418,978,715	501,150,854	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.09				Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket	252,183,954	698,619,577	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.11				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	209 Peserta Didik	151,200,000	153,824,556	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.13				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	88678 Peserta Didik	54,503,204,200	68,715,991,366	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.16				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3092 Orang	1,895,100,000	7,718,182,882	Dinas Pendidikan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				
1.01.02.2.03.17					Dinas Pendidikan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidikan	1,369,485,330	659,799,825	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.18					Dinas Pendidikan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2479 Satuan Pendidikan	71,337,040,000	69,014,400,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04						Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	84,092,805,416	105,975,669,193	
						Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	4 laporan			
						Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	3-5 hari			
1.01.02.2.04.09					Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	75,864,470	279,458,158	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.10					Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30 Peserta Didik	734,569,600	768,598,399	Dinas Pendidikan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.01.02.2.04.11				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	198,970,000	198,970,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.12				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2792 Peserta Didik	77,707,916,800	98,029,883,463	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.15				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	100,750,546	106,150,586	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.16				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	293 Satuan Pendidikan	130,084,000	125,793,778	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.17				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27 Satuan Pendidikan	5,144,650,000	6,466,814,809	Dinas Pendidikan
1.01.04				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Rasio Guru/ Murid jenjang SD	1:20	34,326,710,500	121,769,749,892	
						Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	1:20			
1.01.04.2.01				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga		Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang	34,326,710,500	121,769,749,892	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan						
						Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang			
1.01.04.2.01.01				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2 Dokumen	617,310,500	889,811,138	Dinas Pendidikan
1.01.04.2.01.02				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	350 Laporan	33,709,400,000	120,879,938,754	Dinas Pendidikan
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,888,838,492,914	1,866,526,621,808	
1.02.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	82%	1,145,806,270,359	1,004,798,437,627	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	82,88%			
						Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%			
						Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87,88%			
						Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%			
1.02.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	392,895,786,996	351,400,874,537	
1.02.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1174 Orang/bulan	264,162,966,022	254,508,633,224	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/bulan	47,542,346,199	32,410,450,425	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	395 Orang/bulan	81,190,474,775	64,481,790,888	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
1.02.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	1,593,241,789	6,357,694,105	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.07.10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1,593,241,789	6,357,694,105	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	238,360,547,846	224,360,461,450	
						Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%			
						Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%			
1.02.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16,601,450,000	18,379,722,714	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
1.02.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	128,976,756,068	106,757,409,721	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	33,264,899,989	37,534,742,502	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	59,517,441,789	61,688,586,513	RSUD dr. Mohamad Soewandhie



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kantor yang Disediakan				
1.02.01.2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	3 jenis	512,956,693,728	422,679,407,535	
						Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	100%			
						Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100%			
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Asemrowo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,021,741,886	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	631,350,791	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Balongsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,785,348,297	15,187,130	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bangkingan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	627,213,301	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,581,189,886	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Benowo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,463,645,493	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,572,441,250	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,977,367,742	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,368,041,846	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Dupak	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,403,026,532	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Gading	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,099,583,581	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Gayungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,803,603,443	15,187,130	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Gundih	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,609,753,380	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,662,340,101	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Jagir	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,886,804,875	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Jemursari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	947,893,887	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Jeruk	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,058,038,438	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kalijudan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,493,918,577	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,886,908,693	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kebonsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,861,558,490	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,126,622,098	15,187,130	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kedurus	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,419,290,811	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kenjeran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,811,458,817	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Keputih	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,420,317,177	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Ketabang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,121,672,485	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,266,704,912	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,956,828,673	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,150,313,666	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Lontar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,506,313,367	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Made	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	938,617,278	15,187,130	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,860,148,974	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,136,199,443	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Menur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,813,376,013	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Mojo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,825,495,403	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,989,056,526	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,971,300,144	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,919,078,553	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,353,277,946	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pakis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,478,769,147	15,187,130	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pegirian	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,390,846,506	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Peneleh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,620,033,054	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Perak Timur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,109,476,771	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,351,715,905	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,946,997,084	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Rangkah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,690,767,831	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sawahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,401,279,875	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,490,594,628	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sememi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,670,513,946	15,187,130	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sidosermo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,391,193,083	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sidotopo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,095,337,374	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,724,605,677	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Simolawang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,143,814,435	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Simomulyo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,101,778,426	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,102,583,399	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,652,125,745	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	913,086,912	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,884,734,639	15,187,130	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,136,973,446	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,421,094,107	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tenggilis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,028,513,718	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Wiyung	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,226,468,509	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Wonokromo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,847,562,485	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,169,385,321	15,187,130	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	143,792,169,020	152,101,861,358	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.01.2.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	245,846,429,910	269,620,756,987	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
1.02.02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN		Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%	605,047,950,052	789,438,385,776	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
						Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,04%			
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82,50%			
						Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,18%			
						Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani $\leq 1 \times 24$ Jam	100%			
						Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	79,37%			
						Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%			
						Persentase Jaminan Kesehatan	96,97%			
						Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%			
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana	100%			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Puskesmas dan Puskesmas Pembantu				
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	98%			
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98,08%			
							Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%			
							Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	55%			
							Persentase Rumah Sehat	88,19%			
							Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%			
							Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,10%			
1.02.02.2.01						Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Jumlah dokumen peningkatan Fasilitas Kesehatan	3 Dokumen	146,454,077,999	287,794,502,877	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
					Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	15 unit			
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	64 Unit			
					Jumlah unit layanan yang terpenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	64 Unit			
					Persentase Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas	100%			
					Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%			
					Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD	100%			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Mohamad Soewandhie				
1.02.02.2.01.01				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1,101,100,000	152,813,635,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.05				Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	18,220,000,000	33,729,643	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.02.2.01.07				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	109,800,000	91,386,930	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.09				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12 Unit	59,598,934,309	32,801,242,628	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.01.10				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	950,937,300	914,280,116	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.13				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	472,804,500	685,442,030	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.14				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	10,649,578,500	1,394,803,733	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.14				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	70 Unit	12,952,999,590	10,604,452,562	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.02.2.01.14				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	14,537,925,785	1,780,585,510	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
1.02.02.2.01.16				Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket	2,324,769,919	9,091,552,153	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.01.17				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	3 Paket	16,715,148,974	57,239,710,091	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.20				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit	8,182,794,793	19,989,680,431	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.21				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Paket	130,000,000	275,941,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.22				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dinas Kesehatan	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	797929 Keluarga	507,284,329	78,061,050	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	100 Dokumen	457,376,136,106	451,533,950,145	
						Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	4 kegiatan			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	2 kegiatan			
						Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi di puskesmas	2 kegiatan			
						Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas	2 kegiatan			
						Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di puskesmas	2 kegiatan			
						Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di puskesmas	2 kegiatan			
						Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas	3 kegiatan			
						Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut di puskesmas	1 kegiatan			
						Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir	1 kegiatan			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	153 Kelurahan			
						Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	700 Lokasi			
						Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	63 Unit			
						Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	63 Puskesmas			
						Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas			
						Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas			
						Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Puskesmas			
						Jumlah Puskesmas Yang Melakukan	63 Puskesmas			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pelayanan Kesehatan usia lanjut				
						Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	105 jiwa			
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43881 Orang	6,015,759,642	8,246,001,668	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	745 Orang	7,339,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	226 Orang	5,119,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Balongsari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	546 Orang	7,339,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	223 Orang	6,229,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	935 Orang	6,229,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Benowo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan	831 Orang	8,449,500	3,205,200	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.01					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	679 Orang	5,119,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	766 Orang	7,339,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1035 Orang	8,532,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Dupak	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	366 Orang	5,119,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gading	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1292 Orang	7,339,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gayungan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	676 Orang	8,532,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gundih	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	601 Orang	6,229,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	975 Orang	8,532,000	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Jagir	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	819 Orang	7,422,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Jemursari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	283 Orang	5,119,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Jeruk	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang	6,229,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	825 Orang	7,422,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	852 Orang	7,422,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	830 Orang	8,532,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	583 Orang	6,229,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kedurus	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1115 Orang	8,532,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	692 Orang	8,449,500	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Keputih	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	612 Orang	6,229,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Ketabang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	298 Orang	6,229,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	409 Orang	6,229,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	606 Orang	7,339,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	405 Orang	6,229,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Lontar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	704 Orang	6,229,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Made	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	267 Orang	6,229,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	854 Orang	7,339,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	905 Orang	7,422,000	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Menur	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	465 Orang	7,339,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Mojo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1164 Orang	7,422,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	827 Orang	5,119,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	622 Orang	7,422,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	850 Orang	6,229,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	761 Orang	6,229,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pakis	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	539 Orang	5,119,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pegirian	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	421 Orang	5,119,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Peneleh	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	616 Orang	7,339,500	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1084 Orang	9,559,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648 Orang	7,339,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	790 Orang	5,119,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Rangkah	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	542 Orang	7,339,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sawahan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	461 Orang	6,229,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	709 Orang	5,119,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sememi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1353 Orang	8,449,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	624 Orang	7,422,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	794 Orang	6,229,500	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1057 Orang	5,119,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Simolawang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	610 Orang	6,229,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1170 Orang	7,339,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	251 Orang	5,119,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	304 Orang	7,339,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	592 Orang	5,119,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	948 Orang	5,119,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360 Orang	7,339,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	725 Orang	7,339,500	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	738 Orang	8,532,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wiyung	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	852 Orang	7,339,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	619 Orang	5,119,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1129 Orang	5,119,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.02				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41885 Orang	457,445,514	3,139,512,631	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2041119 Orang	1,339,344,750	2,788,597,149	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32481 Orang	10,662,216	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9532 Orang	10,661,640	1,602,600	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23496 Orang	90,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Balongsari	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10065 Orang	5,547,300	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43791 Orang	91,300	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40774 Orang	10,661,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Benowo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24727 Orang	90,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39126 Orang	5,546,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40504 Orang	90,640	1,602,600	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15643 Orang	4,864,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Dupak	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63720 Orang	90,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Gading	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29810 Orang	10,662,300	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Gayungan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28171 Orang	90,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Gundih	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40803 Orang	91,300	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43641 Orang	90,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Jagir	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14220 Orang	5,546,640	1,602,600	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Jemursari	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11941 Orang	90,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Jeruk	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30711 Orang	10,661,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35637 Orang	5,546,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35692 Orang	90,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28548 Orang	91,300	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51512 Orang	4,864,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Kedurus	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31364 Orang	7,251,640	1,602,600	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25434 Orang	90,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Keputih	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12894 Orang	10,661,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Ketabang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16551 Orang	90,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31584 Orang	91,300	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20170 Orang	5,546,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34622 Orang	90,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Lontar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10196 Orang	90,640	1,602,600	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Made	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38388 Orang	10,661,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45226 Orang	10,413,576	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33599 Orang	10,413,576	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Menur	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55119 Orang	10,413,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Mojo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31690 Orang	10,413,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27928 Orang	10,661,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38763 Orang	10,413,640	1,602,600	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42496 Orang	5,547,300	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24844 Orang	10,413,576	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Pakis	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21541 Orang	5,546,448	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Pegirian	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26217 Orang	4,864,464	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Peneleh	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51368 Orang	10,414,242	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37167 Orang	10,413,576	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31961 Orang	10,662,300	1,602,600	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48729 Orang	4,864,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Rangkah	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23046 Orang	10,413,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Sawahan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37740 Orang	10,414,300	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	47513 Orang	10,413,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Sememi	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27970 Orang	10,320,640	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34020 Orang	4,864,464	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42176 Orang	4,865,130	1,602,600	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25976 Orang	5,546,448	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Simolawang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52558 Orang	4,864,464	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11861 Orang	10,413,576	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12635 Orang	10,413,576	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38413 Orang	4,864,464	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40670 Orang	10,662,216	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18284 Orang	10,413,576	1,602,600	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39718 Orang	4,864,464	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39833 Orang	10,414,242	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41028 Orang	10,413,576	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Wiyung	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28260 Orang	10,414,020	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	47022 Orang	10,320,558	1,602,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	314690 Orang	103,261,000	3,815,489,824	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3554 Orang	68,020,000	3,205,200	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1570 Orang	43,680,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Balongsari	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3861 Orang	90,690,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1501 Orang	33,900,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6663 Orang	77,360,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Benowo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4613 Orang	138,160,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2205 Orang	19,494,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6945 Orang	53,240,000	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6894 Orang	67,580,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Dupak	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2408 Orang	14,978,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Gading	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9065 Orang	48,372,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Gayungan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5025 Orang	62,074,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Gundih	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4409 Orang	91,108,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5658 Orang	24,296,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Jagir	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6996 Orang	81,920,000	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Jemursari	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2532 Orang	29,120,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Jeruk	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1762 Orang	38,724,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5361 Orang	66,920,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6135 Orang	33,790,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5371 Orang	53,020,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4750 Orang	29,142,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Kedurus	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7548 Orang	77,096,000	3,205,200	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3883 Orang	77,316,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Keputih	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3481 Orang	34,010,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Ketabang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2810 Orang	38,658,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2912 Orang	43,504,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5522 Orang	48,020,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2912 Orang	53,240,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Lontar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5214 Orang	53,240,000	3,205,200	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Made	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1519 Orang	34,010,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6564 Orang	114,304,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5746 Orang	91,988,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Menur	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6182 Orang	48,592,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Mojo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9983 Orang	105,470,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4095 Orang	36,210,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5084 Orang	48,592,000	3,205,200	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6239 Orang	77,536,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7279 Orang	87,030,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Pakis	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4377 Orang	48,592,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Pegirian	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2769 Orang	53,460,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Peneleh	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5422 Orang	26,584,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8289 Orang	118,908,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7305 Orang	72,888,000	3,205,200	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4461 Orang	53,460,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Rangkah	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8707 Orang	31,056,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Sawahan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2985 Orang	90,932,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7137 Orang	43,724,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Sememi	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5165 Orang	53,460,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4748 Orang	63,174,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4896 Orang	100,162,000	3,205,200	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5053 Orang	28,790,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Simolawang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3928 Orang	28,284,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7626 Orang	77,448,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2116 Orang	19,912,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1284 Orang	68,020,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7035 Orang	21,166,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4585 Orang	43,724,000	3,205,200	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3871 Orang	29,142,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6425 Orang	95,514,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6510 Orang	34,560,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Wiyung	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5879 Orang	58,306,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4197 Orang	38,878,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5669 Orang	68,052,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.08				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	744435 Orang	149,916,600	18,866,000	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60480 Orang	1,341,554,400	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	949 orang	9,061,200	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	282 orang	7,196,400	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Balongsari	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	707 orang	12,724,200	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	293 orang	7,296,300	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1293 orang	11,092,500	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Benowo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1178 orang	11,059,200	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	711 orang	7,029,900	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1163 orang	10,459,800	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1216 orang	11,558,700	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Dupak	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	463 orang	6,963,300	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Gading	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1878 orang	8,361,900	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Gayungan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	887 orang	12,424,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Gundih	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	834 orang	7,662,600	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1203 orang	9,827,100	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Jagir	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1273 orang	9,560,700	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Jemursari	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	422 orang	7,596,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Jeruk	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	353 orang	9,527,400	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 orang	9,793,800	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1067 orang	9,527,400	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1065 orang	10,626,300	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	847 orang	7,862,400	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kedurus	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1514 orang	13,390,200	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	916 orang	13,390,200	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Keputih	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	750 orang	8,728,200	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Ketabang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	391 orang	7,895,700	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	496 orang	8,162,100	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	941 orang	13,676,580	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	593 orang	7,962,300	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Lontar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1029 orang	9,960,300	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Made	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	298 orang	7,456,140	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1162 orang	10,926,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1323 orang	11,425,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Menur	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1009 orang	9,560,700	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Mojo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1648 orang	10,726,200	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	932 orang	8,028,900	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	842 orang	8,694,900	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1136 orang	10,593,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1267 orang	9,027,900	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Pakis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	741 orang	7,835,760	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Pegirian	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	630 orang	8,828,100	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Peneleh	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	798 orang	8,741,520	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1534 orang	10,446,480	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1115 orang	10,386,540	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	944 orang	7,456,140	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Rangkah	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1443 orang	10,131,840	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sawahan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	680 orang	9,061,200	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1126 orang	8,508,420	3,205,200	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sememi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1382 orang	19,650,600	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	840 orang	8,628,300	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1017 orang	11,092,500	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1245 orang	8,195,400	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Simolawang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	779 orang	22,477,730	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1562 orang	28,224,200	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 orang	19,566,200	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	365 orang	24,533,450	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1148 orang	19,327,550	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1193 orang	34,490,600	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	552 orang	26,832,162	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1175 orang	29,578,400	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1186 orang	25,510,250	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Wiyung	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1195 orang	22,479,950	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	829 orang	21,780,650	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1403 orang	26,810,212	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52741 Orang	5,608,320	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	823 orang	4,649,040	3,205,200	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Balongsari	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	249 orang	6,127,920	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	640 orang	4,289,280	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250 orang	6,527,520	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Benowo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1416 orang	6,048,240	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	912 orang	4,369,200	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	732 orang	5,448,480	3,205,200	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	922 orang	6,568,080	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Dupak	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1224 orang	6,247,440	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Gading	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	465 orang	5,728,800	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Gayungan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1420 orang	5,808,240	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Gundih	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	538 orang	4,329,360	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	695 orang	7,567,200	3,205,200	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Jagir	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1109 orang	9,205,200	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Jemursari	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	924 orang	4,968,960	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Jeruk	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	333 orang	4,489,200	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	792 orang	5,488,800	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	882 orang	6,608,640	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1217 orang	7,327,200	3,205,200	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	949 orang	5,128,800	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kedurus	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2175 orang	7,007,280	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1287 orang	5,568,480	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Keputih	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	696 orang	6,168,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Ketabang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	664 orang	5,409,120	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	429 orang	5,088,720	3,205,200	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	462 orang	6,527,760	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	718 orang	5,328,960	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Lontar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	447 orang	5,808,240	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Made	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	754 orang	5,608,080	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	290 orang	7,407,120	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1037 orang	7,487,280	3,205,200	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Menur	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	971 orang	5,968,560	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Mojo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	718 orang	7,368,240	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Moro Krebangan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1430 orang	4,728,960	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	879 orang	6,127,680	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	670 orang	5,968,320	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	948 orang	5,768,640	3,205,200	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Pakis	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	832 orang	5,648,400	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Pegirian	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	592 orang	5,288,400	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Peneleh	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	490 orang	6,088,560	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	687 orang	6,847,920	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1436 orang	7,168,320	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	700 orang	5,888,400	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Rangkah	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	966 orang	6,048,720	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Sawahan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	803 orang	6,008,640	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	578 orang	4,449,360	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Sememi	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	951 orang	7,007,280	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1638 orang	5,888,880	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	686 orang	5,288,640	3,205,200	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	861 orang	5,528,160	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Simolawang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1148 orang	5,688,240	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	666 orang	6,767,520	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1277 orang	6,047,760	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 orang	5,808,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	350 orang	4,489,200	3,205,200	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	613 orang	6,647,280	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1037 orang	6,367,920	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	401 orang	5,968,320	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	795 orang	8,307,120	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Wiyung	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	944 orang	7,247,520	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	952 orang	5,368,800	3,205,200	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	667 orang	5,688,240	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1235 orang	1,090,785,000	3,205,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.14				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	845,988,055	163,115,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	7,009,710,516	4,275,041,785	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	10,054,728	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	9,515,171	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	16,099,330	24,039,000	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kesehatan Gizi Masyarakat		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	15,547,137	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12,088,945	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	32,392,933	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	13,680,398	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	10,186,865	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	21,267,535	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12,629,444	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	9,911,580	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	10,166,467	24,039,000	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kesehatan Gizi Masyarakat		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	9,944,615	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	9,856,524	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	16,517,763	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	9,946,239	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	9,994,102	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	10,355,285	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	11,017,592	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	10,341,024	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	14,663,660	24,039,000	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kesehatan Gizi Masyarakat		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	17,513,660	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	13,990,341	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	13,581,296	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	13,150,228	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12,719,159	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	10,243,547	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12,343,148	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12,862,307	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	9,629,102	24,039,000	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kesehatan Gizi Masyarakat		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	18,738,489	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12,618,433	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	9,669,330	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	10,230,911	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	11,160,740	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	9,724,387	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12,849,672	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	11,404,615	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	13,834,558	24,039,000	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kesehatan Gizi Masyarakat		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	9,614,273	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	18,122,535	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	14,199,558	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	13,115,569	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	10,762,706	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	11,415,626	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	16,321,865	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	10,410,341	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	20,053,717	24,039,000	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kesehatan Gizi Masyarakat		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12,750,569	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	13,979,330	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	13,370,455	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12,950,398	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	24,745,967	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	9,548,245	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	16,429,672	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	9,858,148	24,039,000	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	9,823,489	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	16,539,273	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	10,364,672	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	13,436,524	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	11,129,330	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	9,735,398	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	13,856,580	24,039,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	705,890,900	2,815,812,360	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	33,877,200	41,667,600	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	21,329,550	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	39,562,200	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	22,679,100	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	26,508,600	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	42,903,300	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	29,947,800	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	23,827,050	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	34,962,150	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	22,477,500	41,667,600	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	36,343,200	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	27,640,800	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	22,668,000	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	38,168,250	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	41,864,550	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	25,885,200	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	20,203,800	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	33,401,700	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	37,135,950	41,667,600	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	35,983,350	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	23,506,050	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	43,214,100	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	28,411,350	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	28,460,400	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	21,025,200	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	29,232,750	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	33,395,250	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	21,529,350	41,667,600	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	31,663,650	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	23,538,450	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	37,730,700	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	39,073,800	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	28,917,300	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	33,495,150	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	26,273,700	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	37,986,000	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	61,023,150	41,667,600	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	34,143,600	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	23,527,350	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	23,043,600	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	20,013,300	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	41,591,700	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	42,625,800	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	23,043,600	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	37,308,900	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	26,939,700	41,667,600	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	22,677,300	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	34,811,400	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	34,767,000	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	27,361,500	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	35,692,950	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	27,845,250	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	33,011,400	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	24,826,050	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	33,450,750	41,667,600	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	22,211,100	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	21,889,200	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	29,305,800	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	33,333,300	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	38,680,650	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	33,046,500	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	29,248,500	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	31,834,800	41,667,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.19				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	12 Dokumen	218,181,732	301,544,377	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	299,301,680	419,204,784	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	143,268,732	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	170,592,370	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	139,891,866	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	174,736,278	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	129,699,786	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	220,742,598	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	253,103,346	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	131,086,506	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	178,879,146	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	252,309,798	6,410,400	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	128,469,798	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	296,143,506	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	271,903,266	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	154,845,786	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	314,006,478	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	225,089,238	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	164,899,146	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	149,939,706	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	263,785,866	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	244,436,706	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	331,653,198	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	175,732,746	6,410,400	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	318,467,478	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	187,504,146	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	243,386,958	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	133,519,866	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	177,432,906	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	209,169,318	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	174,845,946	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	334,970,226	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	144,153,066	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	259,393,038	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	404,673,198	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	255,530,466	6,410,400	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	387,541,146	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	137,657,346	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	255,370,404	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	251,103,906	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	214,270,386	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	167,166,204	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	112,686,186	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	183,012,666	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	173,763,906	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	279,930,546	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	172,099,146	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	262,399,146	6,410,400	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	227,599,386	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	129,726,426	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	244,166,770	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	222,673,092	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	121,189,212	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	173,760,132	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	111,162,492	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	200,085,750	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	181,639,686	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	124,548,732	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	162,736,092	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	216,510,606	6,410,400	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	185,326,566	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	201,200,052	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	317,390,526	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	307,550,286	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	172,175,292	6,410,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1,204,826,671	18,638,141,844	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	33,946,500	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,098,500	15,160,400	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	33,502,500	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,098,500	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,098,500	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	33,946,500	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,348,250	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,098,500	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	33,946,500	15,160,400	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,098,500	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,098,500	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	33,946,500	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,098,500	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	79,888,649	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,760,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	43,608,000	15,160,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.26				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	376,157,001,307	396,529,112,995	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	525,234,585	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	307,917,805	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	330,421,132	11,752,400	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	396,028,500	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	483,799,495	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	599,867,930	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	654,376,594	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	472,096,542	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	416,281,791	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	520,698,780	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	724,646,442	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	456,357,727	11,752,400	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	341,297,974	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	573,143,193	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	870,715,563	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	248,753,740	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	468,662,349	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	362,066,030	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	623,366,175	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	580,383,948	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	532,143,285	11,752,400	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	572,951,945	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	626,109,015	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	549,649,493	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	487,181,397	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	404,500,803	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	613,782,404	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	406,718,072	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	544,707,545	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	307,433,989	11,752,400	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	434,766,830	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	469,255,152	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	500,880,586	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	489,025,005	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	658,980,980	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	423,887,595	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	577,562,255	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	530,048,870	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	505,646,152	11,752,400	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	392,263,823	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	392,524,796	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	734,587,184	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	348,137,550	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	590,713,797	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	401,739,450	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	333,809,630	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	366,174,890	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	462,015,670	11,752,400	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	512,730,740	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	581,156,901	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	741,039,802	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	420,950,850	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	798,109,880	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	610,782,321	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	344,558,575	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	563,341,652	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	966,740,192	11,752,400	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	619,784,489	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	588,550,549	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	524,837,810	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	548,493,632	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	419,553,603	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	778,517,160	11,752,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.35				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	63 Unit	3,250,000,000	2,808,189,318	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.37				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	609,120,000	421,358,110	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	3 Aplikasi	196,092,255	301,543,425	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.03.01				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5 Dokumen	196,092,255	301,543,425	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga	1,021,643,692	49,808,389,329	
1.02.02.2.04.03				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	63 Unit	783,584,062	41,398,079,999	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04.04				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	238,059,630	8,410,309,330	Dinas Kesehatan
1.02.03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	48,49%	18,790,588,875	6,082,808,455	
1.02.03.2.02				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan realisasi penyediaan SDM Kesehatan di Puskesmas yang bersumber dari dana APBN	1 laporan	18,790,588,875	6,082,808,455	
						Jumlah tenaga kesehatan yang	63 Orang			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan				
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Balongsari	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Benowo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Dupak	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Gading	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Gayungan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Gundih	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	137,019,269	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Jagir	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Jemursari	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Jeruk	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Kedurus	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Keputih	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Ketabang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Lontar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1.02.03.2.02.02					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Made	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Menur	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	137,019,269	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Mojo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Pakis	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Pegirian	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Peneleh	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Rangkah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Sawahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Sememi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Simolawang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Wiyung	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	127,856,601	11,906,714	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1794 Orang	9,795,000,000	1,869,434,220	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.03				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	922,297,676	3,463,251,253	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%	614,525,085	2,247,876,863	
1.02.04.2.01			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	79%	46,981,930	52,218,000	
1.02.04.2.01.02			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	200 Sarana	46,981,930	52,218,000	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.06			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT	567,543,155	2,195,658,863	
1.02.04.2.06.01			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman	Dinas Kesehatan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman	150 Unit	567,543,155	2,195,658,863	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				
1.02.05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	100%	118,579,158,543	63,959,113,087	
1.02.05.2.02				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan	156,740,983	9,682,098,539	
1.02.05.2.02.01				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	156,740,983	9,682,098,539	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Puskesmas	6 Kegiatan	118,422,417,560	54,277,014,548	
						Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	63 Puskesmas			
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	12 Dokumen	115,849,477,700	51,683,623,124	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	35,157,400	38,879,076	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	42,522,400	37,436,736	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	37,419,900	37,436,736	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	52,552,400	52,565,280	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi	12 Dokumen	43,582,400	48,013,896	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	21,167,400	38,077,776	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	33,223,310	41,026,560	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	23,612,400	42,372,744	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	47,247,400	33,205,872	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	64,244,900	25,577,496	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	28,167,400	49,360,080	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	47,652,400	61,539,840	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	43,497,400	51,443,460	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	28,607,400	47,276,700	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan	12 Dokumen	43,997,400	46,667,712	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	49,977,400	37,020,060	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	46,982,400	45,770,256	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	45,104,900	61,187,268	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	46,117,400	52,180,656	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	39,084,900	31,827,636	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	23,027,400	32,404,572	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	33,067,400	34,808,472	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	41,062,400	65,001,456	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	54,632,400	22,821,024	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	40,784,900	21,346,632	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	57,112,400	46,571,556	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	46,952,400	44,872,800	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	29,232,400	31,955,844	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	35,772,400	44,520,228	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	36,544,900	53,719,152	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	48,992,400	35,930,292	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	34,567,400	43,462,512	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	40,157,400	38,270,088	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	22,817,400	21,635,100	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	48,397,400	33,975,120	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	38,022,400	24,135,156	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	36,619,900	48,302,364	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	51,432,400	65,674,548	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	46,977,400	28,782,696	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	37,244,900	48,719,040	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	40,137,400	44,456,124	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	41,454,900	29,231,424	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	32,467,400	44,968,956	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	25,022,400	51,090,888	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	48,267,400	48,045,948	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	20,887,400	46,122,828	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	43,889,900	47,148,492	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	31,262,650	39,968,844	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	43,557,400	23,526,168	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	60,209,900	33,814,860	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	50,322,400	41,988,120	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	46,242,400	55,866,636	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	45,659,900	41,699,652	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	44,782,400	58,398,744	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	36,212,400	48,013,896	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	59,859,900	0	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	51,034,900	36,571,332	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	31,137,400	37,372,632	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	31,702,400	50,097,276	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	34,039,900	35,353,356	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	63,569,900	41,058,612	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	22,322,400	23,333,856	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	45,559,900	49,488,288	Dinas Kesehatan
1.03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1,883,476,956,764	1,464,977,723,400	
1.03.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	92%	117,967,168,863	128,343,183,555	
						Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86,00%			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	234,961,020	313,085,175	
1.03.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	234,961,020	313,085,175	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	49,157,727,837	55,535,679,351	
1.03.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan	49,157,727,837	55,535,679,351	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	8,848,370,858	9,586,665,652	
1.03.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8,848,370,858	9,586,665,652	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	321 unit	59,726,109,148	62,907,753,377	
						Persentase Gedung Kantor dan Bangunan	100%			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Lainnya layak operasional				
1.03.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	243 Unit	13,745,816,751	14,115,134,956	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.09.03				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	73 Unit	15,606,886,758	16,071,803,820	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	30,373,405,639	32,720,814,601	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%	45,654,753,685	47,545,083,862	
1.03.02.2.01				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	61 unit	45,654,753,685	47,545,083,862	
1.03.02.2.01.55				Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	266 Unit	45,654,753,685	47,545,083,862	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%	7,289,033,886	8,463,679,752	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	906 m3			
1.03.05.2.01				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan	7,289,033,886	8,463,679,752	
						Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis			
1.03.05.2.01.06				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	50 Rumah Tangga	1,597,515,911	2,061,153,059	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.05.2.01.10				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	96 Unit	5,691,517,975	6,402,526,693	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%	813,939,533,447	473,086,221,887	
1.03.06.2.01				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen	813,939,533,447	473,086,221,887	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1127 lokasi			
						Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	200 lokasi			
1.03.06.2.01.01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	50 Dokumen	6,765,887,618	7,495,690,469	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.03				Supervisi Pembangunan/ Penin gkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Pening katan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	30 Dokumen	8,793,328,826	9,588,008,564	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.05				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	5000 M	436,003,238,652	204,041,228,686	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.07				Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	2700 M	102,812,655,898	84,300,074,211	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.09				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	26875 M	80,954,057,176	85,806,484,223	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.12				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10000 M	178,610,365,277	81,854,735,734	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.07				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	7%	3,393,943,846	2,819,942,393	
						Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%			
1.03.07.2.01				Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas	3,393,943,846	2,819,942,393	
						Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	12 Dokumen			
1.03.07.2.01.02				Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12 Sistem Jaringan	850,719,446	1,278,418,906	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.07.2.01.03				Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	240 Sistem Jaringan	2,543,224,400	1,541,523,487	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase bangunan yang ber IMB	2,20%	299,058,306,008	245,685,293,220	
						Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	90,48%			
						Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	82%			
1.03.08.2.01				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	243 Bangunan	299,058,306,008	245,685,293,220	
						Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	1736 Berkas			
						Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan	2 Dokumen			
						Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	1872 Lokasi			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.08.2.01.01				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	3,473,527,420	5,303,789,801	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.02				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	59 Dokumen	4,378,673,620	7,921,166,525	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.03				Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	612,944,000	674,782,208	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.09				Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	1861 Unit	1,931,869,772	3,178,321,625	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.12				Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	137 Unit	245,816,869,816	193,582,065,448	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Permukiman serta Pertanahan	Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui				Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.13				Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	175 Unit	42,844,421,380	35,025,167,613	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Luas jalan yang diperbaiki	150.000 m2	589,836,060,395	546,323,264,452	
						Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	10.850 meter			
1.03.10.2.01				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	130 dokumen	589,836,060,395	546,323,264,452	
						Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	309 lokasi			
						Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1.081 lokasi			
						Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 lokasi			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.10.2.01.01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	65 Dokumen	12,950,358,826	6,895,076,716	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.02				Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	5550 M ²	81,046,164,296	203,765,117,066	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.05				Pembangunan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dibangun	10.85 KM	389,855,613,063	235,279,253,658	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.09				Rehabilitasi Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.8 KM	3,557,334,000	5,549,312,092	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.11				Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	45 KM	89,468,415,623	81,396,893,142	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.23				Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	65 Dokumen	12,958,174,587	13,437,611,778	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	93%	814,161,879	889,703,970	
1.03.11.2.01				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jenis kelembagaan konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	5 jenis	814,161,879	889,703,970	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.11.2.01.07				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	105 Orang	814,161,879	889,703,970	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase pelayanan penataan ruang	95%	5,523,994,755	11,821,350,309	
1.03.12.2.01				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRT) Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	3 dokumen	2,909,163,206	3,426,751,279	
1.03.12.2.01.03				Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	2,909,163,206	3,426,751,279	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12.2.03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	3 dokumen	2,614,831,549	8,394,599,030	
1.03.12.2.03.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi	2 Dokumen	783,647,054	2,217,008,339	Dinas Perumahan Rakyat dan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Permukiman serta Pertanahan	Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12.2.03.02				Sistem Informasi Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	1,831,184,495	6,177,590,691	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				140,433,932,382	189,533,443,610	
1.04.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88%	37,349,098,369	53,137,401,570	
1.04.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	88,552,800	111,360,981	
1.04.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	88,552,800	111,360,981	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	28,135,102,509	41,150,503,578	
1.04.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	28,135,102,509	41,150,503,578	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Permukiman serta Pertanahan
1.04.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	6,054,318,063	8,645,809,408	
1.04.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	6,054,318,063	8,645,809,408	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	3,071,124,997	3,229,727,603	
1.04.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	3,071,124,997	3,229,727,603	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	75%	24,541,335,481	32,035,878,742	
1.04.02.2.05				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	5157 Unit Hunian	24,541,335,481	32,035,878,742	
1.04.02.2.05.02				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	105 Dokumen	24,541,335,481	32,035,878,742	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.04.03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	92%	44,823,085,272	16,772,455,276	
1.04.03.2.03			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis	44,823,085,272	16,772,455,276	
1.04.03.2.03.02			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	900 Unit Rumah	44,823,085,272	16,772,455,276	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100%	31,967,970,200	86,519,074,955	
1.04.04.2.01			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	7 lokasi	31,967,970,200	86,519,074,955	
1.04.04.2.01.01			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	7 Unit Rumah	31,967,970,200	86,519,074,955	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.04.05				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	40%	1,752,443,060	1,068,633,067	
1.04.05.2.01				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	11 dokumen	1,752,443,060	1,068,633,067	
1.04.05.2.01.03				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	11 Laporan	1,752,443,060	1,068,633,067	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				186,549,535,785	226,970,704,095	
1.05.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,50%	80,703,820,018	92,288,662,273	
						Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88%			
						Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	93%			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.05.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	68,856,316,090	75,881,015,687	
1.05.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	8,877,705,282	11,678,755,561	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan	31,924,912,064	35,774,865,258	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan	28,053,698,744	28,427,394,868	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	5,154,926,222	8,226,435,993	
						Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%			
1.05.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	1,499,612,728	1,607,630,956	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	631,745,457	848,108,528	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	3,023,568,037	5,770,696,509	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum	3 paket	6,692,577,706	8,181,210,593	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						kantor yang dilaksanakan				
						Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%			
1.05.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,347,409,739	1,708,740,464	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,986,325,026	3,545,463,921	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,358,842,941	2,927,006,208	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	25,971,487,273	31,036,676,051	
						Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%			
						Persentase PPNS yang dibina	100%			
						Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%			
						Persentase Warga Negara yang	100%			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada				
1.05.02.2.01				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	11 Lembaga	20,877,310,278	28,834,331,701	
						Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	98 Titik/Lokasi			
						Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	192 Kali			
						Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1150 Orang			
1.05.02.2.01.01				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	10080 Kasus	17,719,324,624	25,322,509,677	Satuan Polisi Pamong Praja



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pengamanan, dan Pengawasan				
1.05.02.2.01.02				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	36 Kasus	1,660,505,000	1,964,815,676	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.05				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	978 Orang	910,332,362	893,433,563	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.06				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	367,608,902	478,577,950	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.08				Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang	3 Dokumen	77,130,000	54,673,668	Satuan Polisi Pamong Praja



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				
1.05.02.2.01.09				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	142,409,390	120,321,167	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	94 Objek	4,972,852,195	2,097,076,727	
						Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	4230 Objek			
1.05.02.2.02.02				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	356,821,655	378,798,980	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02.03				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	4,616,030,540	1,718,277,747	Satuan Polisi Pamong Praja



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.05.02.2.03				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	80 Orang	121,324,800	105,267,623	
1.05.02.2.03.01				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan	121,324,800	105,267,623	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100%	25,086,076,016	46,230,371,063	
						Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%			
1.05.03.2.02				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42 Kegiatan	2,107,213,222	18,610,191,999	
1.05.03.2.02.02				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1.650 Orang	1,101,324,160	3,009,980,171	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.05.03.2.02.04				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5 Unit	233,314,322	381,945,796	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.06				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	30 Kawasan	772,574,740	15,218,266,032	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis	22,978,862,794	27,620,179,064	
1.05.03.2.03.03				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	4497 Orang	20,639,091,648	25,456,075,840	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.04				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	467 Orang	2,339,771,146	2,164,103,224	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN		Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	48	54,788,152,478	57,414,994,708	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						
						Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%			
1.05.04.2.01				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	656 Petugas	53,986,768,887	56,413,724,499	
						Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik	100%			
1.05.04.2.01.02				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	33,072,700,099	34,876,598,432	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.05				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan	2 Dokumen	7,138,108,757	7,867,143,960	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				
1.05.04.2.01.06					Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	806 Unit	12,988,325,384	12,772,331,111	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.07					Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	787,634,647	897,650,996	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.02						Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	460 Berkas	328,214,111	450,712,203	
1.05.04.2.02.02					Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana	2 Dokumen	328,214,111	450,712,203	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Prasarana Proteksi Kebakaran				
1.05.04.2.04				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	80 Kegiatan	473,169,480	550,558,006	
1.05.04.2.04.01				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	800 Orang	473,169,480	550,558,006	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				84,676,459,996	102,697,666,537	
1.06.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%	19,572,755,572	22,823,723,260	
1.06.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,368,259,002	18,300,753,890	
1.06.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	16,368,259,002	18,300,753,890	Dinas Sosial
1.06.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dan pemeliharaan	100%	1,920,557,060	2,243,342,683	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						peralatan dan perlengkapan Kantor				
1.06.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1,920,557,060	2,243,342,683	Dinas Sosial
1.06.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%	1,283,939,510	2,279,626,687	
1.06.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,283,939,510	2,279,626,687	Dinas Sosial
1.06.02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	82.35 %	7,266,755,140	7,733,223,592	
						Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	85.95 %			
1.06.02.2.03				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	5 jenis	7,266,755,140	7,733,223,592	
						Jumlah peserta pembinaan	359 orang			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						pemberdayaan PSKS kelembagaan				
1.06.02.2.03.01				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	577 Orang	5,944,728,080	6,272,855,923	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.04				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	1,322,027,060	1,460,367,669	Dinas Sosial
1.06.04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	36,235,614,024	60,495,543,744	
						Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%			
						Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%			
						Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan	100%			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial				
1.06.04.2.01				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali	18,288,398,763	40,363,410,248	
						Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	12 kali			
						Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali			
						Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali			
1.06.04.2.01.04				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang	430,448,255	456,012,632	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.05				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	215 Orang	11,858,821,744	32,897,136,638	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.08				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses	130 Orang	5,030,623,126	5,470,922,541	Dinas Sosial



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				dan Kesehatan Dasar		ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				
1.06.04.2.01.12				Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	968,505,638	1,539,338,437	Dinas Sosial
1.06.04.2.02				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali	17,947,215,261	20,132,133,496	
						Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan			
1.06.04.2.02.02				Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang	2,604,034,303	3,776,160,595	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.07				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1100 Orang	15,343,180,958	16,355,972,901	Dinas Sosial
1.06.05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87%	20,173,049,670	9,827,406,651	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.06.05.2.02				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan	20,173,049,670	9,827,406,651	
						Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	12 laporan			
1.06.05.2.02.01				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	802097 Orang	3,686,144,020	4,247,389,165	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.02				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	264931 keluarga	116,600,000	130,622,959	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.03				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83899 Keluarga	13,432,538,850	5,337,923,279	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.04				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2229 Orang	2,937,766,800	111,471,248	Dinas Sosial
1.06.07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase taman makam pahlawan	100%	1,428,285,590	1,817,769,290	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					yang dikelola dalam kondisi baik				
1.06.07.2.01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 Jenis	1,428,285,590	1,817,769,290	
1.06.07.2.01.02			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam	1,428,285,590	1,817,769,290	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,783,678,187,989	1,818,167,231,708	
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					28,269,105,622	28,885,980,178	
2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	14,644,205,555	13,722,169,795	
2.07.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	13,014,489,286	12,089,584,034	
2.07.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	13,014,489,286	12,089,584,034	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1,629,716,269	1,632,585,761	
					Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa	12 Laporan			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
2.07.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	262,846,040	305,508,355	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,366,870,229	1,327,077,406	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	79,02%	8,947,664,917	9,988,978,601	
						Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	90,20%			
2.07.03.2.01				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	4 Laporan	5,344,051,031	6,406,191,701	
						Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	1 Laporan			
2.07.03.2.01.01				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	720 Orang	4,973,362,301	5,995,296,274	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.07.03.2.01.02				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga	370,688,730	410,895,427	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.04				Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen	498,188,196	278,800,098	
2.07.03.2.04.01				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	498,188,196	278,800,098	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.05				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	4 Laporan	3,105,425,690	3,303,986,802	
2.07.03.2.05.01				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen	3,105,425,690	3,303,986,802	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	2,50%	2,452,212,925	3,227,762,676	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.07.04.2.01				Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	9 laporan	1,417,566,621	1,956,921,201	
2.07.04.2.01.02				Pelayanan antar Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1900 Orang	78,213,889	22,442,950	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.01.03				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1000 Orang	525,149,025	946,271,012	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.01.05				Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang	814,203,707	988,207,239	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.03				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	4 Laporan	369,598,916	321,640,264	
2.07.04.2.03.03				Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	200 Orang	369,598,916	321,640,264	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.04				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	4 Laporan	665,047,388	949,201,211	
2.07.04.2.04.01				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 Orang	665,047,388	949,201,211	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				(PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						
2.07.05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	13,14%	2,225,022,225	1,947,069,106	
						Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	30%			
2.07.05.2.01				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan	1,388,025,820	1,202,605,604	
2.07.05.2.01.01				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	220 Perusahaan	44,131,800	58,807,436	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.01.03				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur	12 Laporan	1,343,894,020	1,143,798,168	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				
2.07.05.2.02				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	836,996,405	744,463,502	
2.07.05.2.02.01				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	581,538,550	463,151,732	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.02.02				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	110 Perkara	255,457,855	281,311,770	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				21,762,563,931	25,100,646,821	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	13,575,101,046	16,351,861,097	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	10,567,629,918	12,343,917,584	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	10,567,629,918	12,343,917,584	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	2,533,198,720	3,447,701,601	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,533,198,720	3,447,701,601	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.08.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	474,272,408	560,241,912	
2.08.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	474,272,408	560,241,912	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%	2,108,415,465	2,127,600,606	
						Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%			
2.08.02.2.01			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen	623,537,771	709,549,895	
2.08.02.2.01.03				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencana	58 Perangkat Daerah	623,537,771	709,549,895	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.02.2.02				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	322,932,471	420,088,874	
2.08.02.2.02.02				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Organisasi	322,932,471	420,088,874	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02.2.03				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan	1,161,945,223	997,961,837	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.08.02.2.03.02				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang	1,161,945,223	997,961,837	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking $\leq 1 \times 24$ jam	100%	572,543,337	665,912,329	
						Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	48.38 %			
2.08.03.2.01				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	35,377,040	59,451,477	
2.08.03.2.01.01				Koordinasi dan Sinkronisasi	Dinas Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	1 Dokumen	35,377,040	59,451,477	Dinas Pemberdayaan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.02				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus	163,412,000	195,372,268	
2.08.03.2.02.01				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang	100,200,000	97,795,376	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.02.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Layanan	63,212,000	97,576,892	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.08.03.2.03				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	15 kecamatan	373,754,297	411,088,584	
2.08.03.2.03.04				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	373,754,297	411,088,584	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	245	668,528,387	520,589,869	
2.08.04.2.03				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan	668,528,387	520,589,869	
2.08.04.2.03.01				Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah	2 Layanan	668,528,387	520,589,869	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kabupaten/Kota yang Tersedia				
2.08.05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	408,898,881	420,799,717	
2.08.05.2.01				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga	408,898,881	420,799,717	
2.08.05.2.01.01				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	408,898,881	420,799,717	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Kelurahan Layak Anak	60.38 %	3,230,285,332	3,465,327,764	
2.08.06.2.01				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan	747,665,140	834,253,991	
2.08.06.2.01.01				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat	20 Organisasi	747,665,140	834,253,991	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06.2.02				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan	2,482,620,192	2,631,073,773	
2.08.06.2.02.01				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	1,435,416,256	1,359,115,598	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06.2.02.03				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,047,203,936	1,271,958,175	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.08.07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	1,198,791,483	1,548,555,439	
						Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	48.38 %			
2.08.07.2.01				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	77,572,960	112,544,214	
2.08.07.2.01.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	77,572,960	112,544,214	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.02				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	15 lembaga	1,044,412,523	1,349,168,853	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus			
2.08.07.2.02.01				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	845,580,523	1,159,369,097	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.02.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Layanan	198,832,000	189,799,756	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.03				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2 Kegiatan	76,806,000	86,842,372	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.07.2.03.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	76,806,000	86,842,372	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				24,813,019,555	28,119,436,835	
2.09.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93,50%	22,070,841,990	25,232,454,654	
2.09.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,083,942,277	21,104,686,344	
2.09.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	18,083,942,277	21,104,686,344	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3,986,899,713	4,127,768,310	
2.09.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	912,363,690	937,000,603	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.09.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,074,536,023	3,190,767,707	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Indeks Kecukupan Pangan Pokok	1,15	1,919,634,938	1,986,318,479	
2.09.03.2.01				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	4 Jenis	653,790,352	834,375,756	
2.09.03.2.01.04				Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	15 Dokumen	653,790,352	834,375,756	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03.2.04				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	3 Jenis	1,265,844,586	1,151,942,723	
2.09.03.2.04.02				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	4 Laporan	1,265,844,586	1,151,942,723	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Berbasis Sumber Daya Lokal				
2.09.05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97,88%	822,542,627	900,663,702	
2.09.05.2.01			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan	822,542,627	900,663,702	
2.09.05.2.01.04				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen	822,542,627	900,663,702	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					114,172,843,715	124,247,246,362	
2.10.05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	42.279,63 M2	114,172,843,715	124,247,246,362	
2.10.05.2.01			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	1 lokasi	114,172,843,715	124,247,246,362	
2.10.05.2.01.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan	1 Dokumen	114,172,843,715	124,247,246,362	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2.11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				625,261,103,012	646,853,385,135	
2.11.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86%	62,587,399,466	92,741,944,231	
2.11.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	49,446,539,083	77,798,220,355	
2.11.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang/bulan	49,446,539,083	77,798,220,355	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	12,686,191,465	14,143,430,802	
2.11.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12,686,191,465	14,143,430,802	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	454,668,918	800,293,074	
2.11.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50 Unit	454,668,918	800,293,074	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kantor atau Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/Direhabilitasi				
2.11.03				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	44%	17,923,510,248	6,236,254,698	
						Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	84%			
2.11.03.2.01				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis	2,135,937,824	2,705,937,582	
						jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 kegiatan			
2.11.03.2.01.01				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	661,714,100	867,662,361	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.02				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan	1 Dokumen	1,474,223,724	1,838,275,221	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Adaptasi Perubahan Iklim		Hidup yang Dilaksanakan				
2.11.03.2.02				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	2 stasiun	15,787,572,424	3,530,317,116	
						Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	100%			
2.11.03.2.02.01				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1,071,623,619	1,211,520,481	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.02.03				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	3000 Titik	14,715,948,805	2,318,796,635	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	99,24%	89,680,911,897	98,210,450,750	
2.11.04.2.01				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	3 dokumen	89,680,911,897	98,210,450,750	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2,81 Ha			
2.11.04.2.01.01				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	554,874,657	302,332,558	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.04				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275,84 Ha	68,525,883,030	75,611,322,747	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.05				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	143,26 Ha	12,673,484,315	13,570,013,869	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.07				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	125 Unit	7,926,669,895	8,726,781,576	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	80%	4,185,572,486	34,719,715,691	
						Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	90%			
2.11.05.2.01				Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah rincian teknis pengelolaan	250 berkas	464,336,406	640,025,540	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						(penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan				
2.11.05.2.01.01				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255 Dokumen	464,336,406	640,025,540	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.2.02				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan	3,721,236,080	34,079,690,151	
2.11.05.2.02.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3	1 Dokumen	3,721,236,080	34,079,690,151	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						yang Sesuai dengan Kewenangannya				
2.11.06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	60%	2,142,486,015	3,243,641,907	
2.11.06.2.01				Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	432 obyek	2,142,486,015	3,243,641,907	
						Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%			
2.11.06.2.01.01				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	275 Dokumen	1,483,568,026	1,982,580,975	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01.03				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat	254 Laporan	658,917,989	1,261,060,932	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2.11.08				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	55,66%	6,713,859,700	7,561,937,115	
						Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	57,74%			
2.11.08.2.01				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 jenis	6,713,859,700	7,561,937,115	
						Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali			
2.11.08.2.01.02				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya	12 Dokumen	6,145,627,866	6,766,871,734	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				
2.11.08.2.01.03				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1560 Orang	568,231,834	795,065,381	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	60,80%	150,087,000	601,342,835	
2.11.09.2.01				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	4 penghargaan	150,087,000	601,342,835	
2.11.09.2.01.01				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	150,087,000	601,342,835	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	49 obyek	377,158,629	622,589,238	
2.11.10.2.01				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang		Persentase penanganan	100%	377,158,629	622,589,238	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		pengaduan lingkungan hidup				
2.11.10.2.01.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	49 Dokumen	377,158,629	622,589,238	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	2,56%	441,500,117,571	402,915,508,670	
						Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	87,64%			
						Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	50,50%			
2.11.11.2.01				Pengelolaan Sampah		Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	3 jenis	441,500,117,571	402,915,508,670	
						Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis			
2.11.11.2.01.02				Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	184,079,379,732	170,710,996,626	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.03				Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST / SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	650430 Ton	214,801,145,206	194,571,691,247	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.07				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	226 Unit	42,619,592,633	37,632,820,797	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							29,910,490,945	32,168,840,097	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.12.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	86.22 %	23,282,387,619	24,426,428,603	
2.12.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	13,000,000	15,187,130	
2.12.01.2.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	13,000,000	15,187,130	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14,850,951,791	14,946,377,452	
2.12.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	14,850,951,791	14,946,377,452	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%	4,079,897,340	8,654,445,873	
2.12.01.2.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4,079,897,340	8,654,445,873	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	4,338,538,488	810,418,148	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.12.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,338,538,488	810,418,148	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	95%	2,766,789,709	3,155,596,117	
2.12.02.2.01				Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas	2,095,612,883	2,407,151,341	
2.12.02.2.01.02				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	2,095,612,883	2,407,151,341	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas	671,176,826	748,444,776	
2.12.02.2.03.02				Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	671,176,826	748,444,776	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.12.03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95%	1,592,665,793	1,785,194,095	
2.12.03.2.01			Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas	1,215,482,068	1,380,691,388	
2.12.03.2.01.01			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	1,215,482,068	1,380,691,388	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas	377,183,725	404,502,707	
2.12.03.2.02.04			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	377,183,725	404,502,707	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	68%	2,166,047,824	2,721,012,638	
					Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	40%			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	96%			
2.12.04.2.01				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi	48000 data	357,188,261	392,100,631	
2.12.04.2.01.01				Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	357,188,261	392,100,631	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 Lembaga	558,669,813	593,673,752	
2.12.04.2.03.04				Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	256,391,308	264,138,982	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.06				Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5 Dokumen	302,278,505	329,534,770	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.04				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan	1,250,189,750	1,735,238,255	
2.12.04.2.04.01				Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan	Dinas Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	12 Laporan	1,250,189,750	1,735,238,255	Dinas Kependudukan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Informasi Administrasi Kependudukan	dan Pencatatan Sipil	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				dan Pencatatan Sipil
2.12.05				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%	102,600,000	80,608,644	
2.12.05.2.01				Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan	4 Informasi	102,600,000	80,608,644	
2.12.05.2.01.02				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2 Dokumen	102,600,000	80,608,644	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				27,270,482,142	13,752,716,965	
2.14.02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	46.07 %	461,509,750	363,015,151	
2.14.02.2.01				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	150 Orang	244,235,000	220,005,103	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
2.14.02.2.01.09					Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	75 Satuan Pendidikan	244,235,000	220,005,103	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	217,274,750	143,010,048	
2.14.02.2.02.11					Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	45,510,000	13,573,890	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.13					Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	171,764,750	129,436,158	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.14.03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	18.35 %	10,919,637,632	9,334,373,212	
						Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	83%			
2.14.03.2.01				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan	523,600,000	342,420,000	
2.14.03.2.01.06				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	483,600,000	171,210,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.08				Pengendalian Program KKBPK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	40,000,000	171,210,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali	1,836,351,599	2,486,170,651	
2.14.03.2.02.03				Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	995,886,999	795,113,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02.04				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang	840,464,600	1,691,057,651	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	416957 Orang	7,970,686,033	4,113,450,401	
2.14.03.2.03.01				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1,656,142,633	2,139,361,614	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.03				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	5,294,543,400	1,579,069,432	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.06				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Unit	1,020,000,000	395,019,355	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.04					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan	589,000,000	2,392,332,160	
2.14.03.2.04.03					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	31 Kampung	589,000,000	2,392,332,160	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Median usia kawin pertama perempuan	20 tahun	15,889,334,760	4,055,328,602	
							Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.55 %			
							Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	43.37 %			
							Persentase peserta UPPKA yang	41%			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						meningkat pendapatannya				
2.14.04.2.01				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok	15,889,334,760	4,055,328,602	
						Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	1 Laporan			
						Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan			
						Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan			
2.14.04.2.01.01				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit	49 Kelompok	1,067,105,902	937,835,961	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang Dibentuk				
2.14.04.2.01.02				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	38 Unit	747,866,000	394,556,773	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.04				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	625 Orang	592,985,245	534,249,286	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.05				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan	6642 Orang	12,820,360,000	932,854,669	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.07				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	661,017,613	1,255,831,913	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				510,570,692,800	499,300,728,788	
2.15.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%	78,771,247,200	88,711,667,916	
2.15.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	60,709,164,002	69,520,829,334	
2.15.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	287 Orang/bulan	60,709,164,002	69,520,829,334	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%	6,557,915,328	5,718,230,580	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.15.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	6,557,915,328	5,718,230,580	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%	11,504,167,870	13,472,608,002	
2.15.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	11,504,167,870	13,472,608,002	Dinas Perhubungan
2.15.02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	43 km/jam	425,350,878,954	402,143,354,000	
						Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,65%			
						Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80%			
						Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80%			
2.15.02.2.02				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan	291,738,175,419	269,921,556,001	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi			
2.15.02.2.02.01				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3000 Unit	116,896,763,103	79,070,716,384	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.02				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit	23,265,396,070	22,261,945,200	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.03				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	96252 Unit	121,637,360,563	135,530,322,973	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.04				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9.000 Unit	29,938,655,683	33,058,571,444	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	18,607,274,196	24,598,980,737	
2.15.02.2.03.03				Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dinas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	12 Unit	18,607,274,196	24,598,980,737	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.04				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas	14,423,363,794	17,418,066,766	
2.15.02.2.04.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	12 Laporan	14,423,363,794	17,418,066,766	Dinas Perhubungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.15.02.2.05				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134.525 Unit	7,399,826,486	8,081,330,492	
2.15.02.2.05.01				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit	7,399,826,486	8,081,330,492	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan	7 Jenis	14,486,135,925	17,786,619,388	
						Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi			
2.15.02.2.06.01				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	13 Laporan	3,039,073,536	3,667,263,904	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06.04				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	11,447,062,389	14,119,355,484	Dinas Perhubungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.15.02.2.09				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 Koridor	74,586,341,837	60,094,632,830	
						Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang			
2.15.02.2.09.01				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	72 Unit	52,800,595,466	29,395,033,560	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09.02				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	21,785,746,371	30,699,599,270	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.11				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan	4,109,761,297	4,242,167,786	
2.15.02.2.11.01				Pelaksanaan Penyusunan	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana	10 Dokumen	4,109,761,297	4,242,167,786	Dinas Perhubungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2.15.03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100%	1,274,914,309	3,317,414,454	
2.15.03.2.04				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	1,274,914,309	3,317,414,454	
2.15.03.2.04.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	1,274,914,309	3,317,414,454	Dinas Perhubungan
2.15.05				PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%	5,173,652,337	5,128,292,418	
2.15.05.2.01				Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta	2 Kali	5,173,652,337	5,128,292,418	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Rencana Induk Perkeretaapian				
2.15.05.2.01.02				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	5,173,652,337	5,128,292,418	Dinas Perhubungan
2.16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				97,257,192,556	101,480,174,007	
2.16.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,55%	17,482,926,500	17,112,886,144	
2.16.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14,608,926,026	14,591,505,775	
2.16.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	14,608,926,026	14,591,505,775	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,069,931,776	1,728,487,950	
2.16.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,069,931,776	1,728,487,950	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	804,068,698	792,892,419	
2.16.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	804,068,698	792,892,419	Dinas Komunikasi dan Informatika



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.16.02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	86%	13,907,183,482	15,398,988,106	
2.16.02.2.01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis	13,907,183,482	15,398,988,106	
					Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100%			
2.16.02.2.01.05			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	11,106,604,817	11,966,225,931	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.06			Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	890,910,712	756,325,479	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.08			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	1,909,667,953	2,676,436,696	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%	65,867,082,574	68,968,299,757	
2.16.03.2.01			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di		Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a.	100%	51,612,543,482	28,962,078,222	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam				
2.16.03.2.01.03					Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	267 Unit	51,612,543,482	28,962,078,222	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02					Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100%	14,254,539,092	40,006,221,535	
							Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100%			
2.16.03.2.02.01					Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58 Dokumen	343,674,857	422,194,185	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.03					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	3,689,235,401	5,245,325,652	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.07					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	190 Unit	5,272,055,132	5,842,205,329	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.10					Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan	58 Dokumen	4,949,573,702	28,496,496,369	Dinas Komunikasi dan Informatika



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				
2.17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				35,233,672,448	44,881,286,387	
2.17.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	29,635,180,529	38,302,462,736	
2.17.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	25,957,205,502	32,489,184,565	
2.17.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	25,957,205,502	32,489,184,565	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,677,975,027	5,813,278,171	
						Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan			
2.17.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	991,340,268	930,598,126	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.17.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,686,634,759	4,882,680,045	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.02				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	23%	433,919,400	629,843,980	
2.17.02.2.01				Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi	433,919,400	629,843,980	
2.17.02.2.01.01				Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha	433,919,400	629,843,980	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.03				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	68%	711,462,964	899,697,274	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.17.03.2.01				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi	711,462,964	899,697,274	
2.17.03.2.01.02				Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	415 Unit Usaha	711,462,964	899,697,274	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	29%	404,202,429	524,868,977	
2.17.05.2.01				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	103 Orang	404,202,429	524,868,977	
2.17.05.2.01.01				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	103 Orang	404,202,429	524,868,977	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kompetensi SDM Koperasi						
2.17.06				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	40%	383,211,117	480,547,075	
2.17.06.2.01				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi	383,211,117	480,547,075	
2.17.06.2.01.01				Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	83 Orang	383,211,117	480,547,075	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber	19,95%	2,485,771,672	2,735,976,607	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha				
							Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	100%			
2.17.07.2.01				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	136 Orang	2,485,771,672	2,735,976,607	
							Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	10 sentra			
2.17.07.2.01.02					Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	136 Unit Usaha	262,621,227	330,242,612	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.07.2.01.04					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha	2,223,150,445	2,405,733,995	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif	64%	1,179,924,337	1,307,889,738	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					yang meningkat skala kinerja usahanya				
2.17.08.2.01			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil		Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 orang	1,179,924,337	1,307,889,738	
2.17.08.2.01.01			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha	1,179,924,337	1,307,889,738	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				19,084,085,415	22,196,588,601	
2.18.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	13,338,776,444	15,045,387,913	
2.18.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	10,111,051,943	12,892,828,611	
2.18.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	10,111,051,943	12,892,828,611	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.18.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%	3,227,724,501	2,152,559,302	
						Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%			
2.18.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	184,043,200	179,401,070	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,043,681,301	1,973,158,232	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor PMA/PMDN	170 Perusahaan	568,345,462	584,238,272	
2.18.02.2.02				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	72%	568,345,462	584,238,272	
2.18.02.2.02.02				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4 Dokumen	568,345,462	584,238,272	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Calon Investor / Investor	55%	505,567,333	684,022,654	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						yang Mempunyai Minat Berinvestasi				
2.18.03.2.01				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	250 Calon Investor / Investor	505,567,333	684,022,654	
2.18.03.2.01.02				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	505,567,333	684,022,654	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	3,588,990,147	4,723,516,288	
2.18.04.2.01				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	85.000 berkas	3,588,990,147	4,723,516,288	
						Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	11.500 Kegiatan usaha			
2.18.04.2.01.01				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	10.000 Pelaku Usaha	2,664,338,056	3,733,065,903	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
2.18.04.2.01.02				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	11.500 Kegiatan Usaha	924,652,091	990,450,385	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	43%	863,765,857	907,688,445	
2.18.05.2.01				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1.200 perusahaan	863,765,857	907,688,445	
2.18.05.2.01.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	260 Pelaku Usaha	363,696,725	260,652,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.18.05.2.01.03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2870 Kegiatan Usaha	500,069,132	647,036,045	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga	218,640,172	251,735,029	
2.18.06.2.01				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	350 perusahaan	218,640,172	251,735,029	
2.18.06.2.01.01				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	218,640,172	251,735,029	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				164,589,011,542	130,645,795,556	
2.19.02				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	22%	74,186,910,556	46,225,108,666	
						Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	22%			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	46,86%			
2.19.02.2.01				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	2 jenis	74,186,910,556	46,225,108,666	
						Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor, Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja dan Pemuda Pasukan Pengibar Bendera	24 jenis			
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Siswi SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi	1 laporan			
2.19.02.2.01.02				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	500 Orang	670,366,754	1,611,586,031	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Olah Raga serta Pariwisata	yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.02.2.01.03				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	820 Orang	451,904,381	1,598,500,528	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.02.2.01.07				Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	15.549 Orang	70,979,421,779	40,588,928,856	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.02.2.01.08				Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	810 Orang	1,682,395,993	2,311,308,405	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.02.2.01.09				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	100 Orang	402,821,649	114,784,846	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.03				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN		Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	174 medali	90,402,100,986	84,420,686,890	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	17%			
2.19.03.2.01				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	5 kecamatan	54,294,138,565	21,722,840,178	
2.19.03.2.01.03				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	51 Unit	54,294,138,565	21,722,840,178	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.03.2.03				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	45 cabang olahraga	13,454,176,350	31,460,014,839	
2.19.03.2.03.03				Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	642 Orang	13,454,176,350	31,460,014,839	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.03.2.05				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	4 dokumen	22,653,786,071	31,237,831,873	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Jumlah Prasarana Olahraga yang Difasilitasi dan Dipelihara	154 lokasi			
2.19.03.2.05.01				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	7 Dokumen	3,487,448,790	3,819,874,431	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.03.2.05.03				Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	154 Unit	19,166,337,281	27,417,957,442	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				569,606,140	604,243,387	
2.20.02				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	569,606,140	604,243,387	
2.20.02.2.01				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	569,606,140	604,243,387	
2.20.02.2.01.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	569,606,140	604,243,387	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				6,205,025,537	6,563,959,430	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.21.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	18%	6,205,025,537	6,563,959,430	
2.21.02.2.01			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari	3,952,705,422	4,094,204,516	
2.21.02.2.01.04			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13 Perangkat Daerah	3,952,705,422	4,094,204,516	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.2.02			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali	2,252,320,115	2,469,754,914	
2.21.02.2.02.01			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah	2,252,320,115	2,469,754,914	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				41,515,486,909	60,786,696,401	
2.22.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	28,481,759,544	47,511,498,540	
2.22.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	22,193,916,268	30,576,525,527	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.22.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	22,193,916,268	30,576,525,527	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%	6,287,843,276	16,934,973,013	
						Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%			
2.22.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,031,180,269	1,942,448,464	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,256,663,007	14,992,524,549	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	70%	3,252,080,100	5,426,086,008	
2.22.02.2.01				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah	450 kali	3,252,080,100	5,426,086,008	
2.22.02.2.01.01				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan	1 Objek	3,252,080,100	5,426,086,008	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pemajuan Kebudayaan	Olah Raga serta Pariwisata	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.03				PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional		Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	59,50%	1,517,758,757	2,219,342,391	
2.22.03.2.01				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional	12 dokumen	1,517,758,757	2,219,342,391	
2.22.03.2.01.01				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	860 Orang	1,517,758,757	2,219,342,391	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.04				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Persentase siswa yang memahami materi sejarah	74%	894,244,290	1,133,077,773	
2.22.04.2.01				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali	894,244,290	1,133,077,773	
2.22.04.2.01.03				Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	894,244,290	1,133,077,773	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92,04%	766,652,957	1,367,670,981	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.22.05.2.02				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	270 lokasi	766,652,957	1,367,670,981	
2.22.05.2.02.01				Pelindungan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	270 Objek	766,652,957	1,367,670,981	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%	6,602,991,261	3,129,020,708	
2.22.06.2.01				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola	8 lokasi	6,602,991,261	3,129,020,708	
2.22.06.2.01.01				Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	730 Unit	450,849,060	216,527,254	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.06.2.01.03				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	8 Unit	807,608,640	380,843,669	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.06.2.01.04				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	241,542,300	128,119,889	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.06.2.01.05				Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	8 Unit	5,102,991,261	2,403,529,896	Dinas Kebudayaan,



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Olah Raga serta Pariwisata					dan Olah Raga serta Pariwisata
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						33,925,021,499	49,598,402,228	
2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,04%	18,803,706,105	18,279,357,902	
2.23.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15,907,816,320	15,139,366,546	
2.23.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	15,907,816,320	15,139,366,546	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	222,734,995	214,450,912	
2.23.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	222,734,995	214,450,912	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	806,679,722	778,097,465	
2.23.01.2.07.11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	806,679,722	778,097,465	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.23.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1,866,475,068	2,147,442,979	
2.23.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	330,708,101	205,565,209	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,535,766,967	1,941,877,770	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase event literasi yang diselenggarakan	38,80%	15,121,315,394	31,319,044,326	
						Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	39,92%			
						Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	67.21 %			
2.23.02.2.01				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jenis buku yang disediakan	2 Jenis	14,567,898,378	30,664,379,187	
						Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	230 Lembaga			
						Tingkat Kepuasan Pemustaka	82 nilai			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.23.02.2.01.02				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1498 Perpustakaan	12,345,677,564	28,538,566,953	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.04				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	123,409,935	72,140,384	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.05				Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200 Perpustakaan	191,742,380	220,910,848	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.06				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang	282,611,035	260,947,899	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.23.02.2.01.09				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1498 Eksemplar	1,624,457,464	1,571,813,103	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah bibit penulis dan pendongeng	4477 orang	553,417,016	654,665,139	
2.23.02.2.02.01				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	245 Lokus	553,417,016	654,665,139	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				3,268,784,221	2,981,104,529	
2.24.02				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	28,25%	3,095,763,072	2,817,333,651	
						Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	64,14%			
						Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	12,12%			
2.24.02.2.01				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	9000 item	906,345,880	883,350,056	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	48 lembaga			
2.24.02.2.01.02				Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	471 Berkas	751,486,926	736,508,566	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.01.03				Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Laporan	154,858,954	146,841,490	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.02				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Arsip yang dialih mediakan	8640 Lembar	1,731,730,984	1,580,187,835	
2.24.02.2.02.02				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300 Arsip	1,731,730,984	1,580,187,835	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.03				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	6200 item	457,686,208	353,795,760	
						PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	70 Lembaga			
2.24.02.2.03.01				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat	100 Pengguna	278,446,877	216,950,995	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kabupaten/Kota melalui JIKN		Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				
2.24.02.2.03.02				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	70 Laporan	179,239,331	136,844,765	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	39,96%	173,021,149	163,770,878	
2.24.03.2.01				Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun	2 Dokumen	173,021,149	163,770,878	
2.24.03.2.01.01				Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	880 Arsip	173,021,149	163,770,878	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							58,794,974,706	110,720,513,980	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							9,715,152,668	51,259,669,045	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.25.03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	35%	6,164,506,402	3,431,004,505	
3.25.03.2.01			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan	6,164,506,402	3,431,004,505	
3.25.03.2.01.03			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	55 Unit	6,164,506,402	3,431,004,505	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Jumlah pembudidaya perikanan yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	25 orang/kelompok	2,949,858,793	1,477,734,148	
3.25.04.2.02			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	34 kali	408,539,300	351,564,854	
3.25.04.2.02.04			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	25 Kelompok	408,539,300	351,564,854	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pendidikan dan Pelatihan				
3.25.04.2.04				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan	2,541,319,493	1,126,169,294	
3.25.04.2.04.03				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	53 Unit	2,541,319,493	1,126,169,294	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.05				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	NIHIL kasus	313,723,504	45,573,183,537	
3.25.05.2.01				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Kali	313,723,504	45,573,183,537	
3.25.05.2.01.01				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	313,723,504	45,573,183,537	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN		Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan	65%	287,063,969	777,746,855	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			PEMASARAN HASIL PERIKANAN		pemasaran hasil ikan yang produktif				
3.25.06.2.03			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah sentra ikan yang dikelola	3 sentra	287,063,969	777,746,855	
3.25.06.2.03.02			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	250 Pelaku Usaha	287,063,969	777,746,855	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				12,437,676,370	14,172,007,133	
3.26.02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	42,85%	7,178,251,398	5,548,526,556	
3.26.02.2.01			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi	6,567,657,077	4,496,363,961	
3.26.02.2.01.03			Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	6,567,657,077	4,496,363,961	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.26.02.2.03				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	1 lokasi	610,594,321	1,052,162,595	
3.26.02.2.03.02				Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	105,392,850	356,644,928	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.02.2.03.03				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	396,997,101	554,941,104	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.02.2.03.05				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60 Dokumen	108,204,370	140,576,563	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.03				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	42,50%	3,513,313,402	6,082,453,900	
3.26.03.2.01				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	2 jenis	3,513,313,402	6,082,453,900	
3.26.03.2.01.02				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran	2 Laporan	3,513,313,402	6,082,453,900	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Olah Raga serta Pariwisata	Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	80%	1,746,111,570	2,541,026,677	
						Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	22%			
						Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	40%			
3.26.05.2.01				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah jenis kelompok pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan peninjauan kerjasama	2 jenis	569,009,850	730,199,191	
						Jumlah laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat	1 laporan			
3.26.05.2.01.02				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam	250 Orang	276,082,205	375,098,539	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pengembangan Kemitraan Pariwisata				
3.26.05.2.01.03				Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	60 Orang	292,927,645	355,100,652	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.05.2.02				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	4 Produk	1,177,101,720	1,810,827,486	
3.26.05.2.02.01				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200 Orang	1,177,101,720	1,810,827,486	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				22,025,532,586	29,337,725,027	
3.27.02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	30 Orang	6,501,694,973	6,973,758,641	
3.27.02.2.01				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	10 Jenis	4,112,021,721	6,167,168,077	
3.27.02.2.01.02				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4,112,021,721	6,167,168,077	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.02.2.03				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman		Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran	6 Jenis	2,389,673,252	806,590,564	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
3.27.02.2.03.01					Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	2,389,673,252	806,590,564	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	19 Lokasi	12,361,743,881	18,844,976,397	
							Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha			
3.27.03.2.01					Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis	584,008,082	1,177,475,288	
3.27.03.2.01.03					Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5 Laporan	584,008,082	1,177,475,288	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03.2.02					Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	13 Laporan	11,777,735,799	17,667,501,109	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.27.03.2.02.09				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13 Unit	11,777,735,799	17,667,501,109	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Jumlah pembudidaya ternak yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	5 kelompok	1,103,056,222	998,945,024	
						Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89,50%			
3.27.04.2.01				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%	905,862,350	727,993,939	
3.27.04.2.01.01				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	905,862,350	727,993,939	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04.2.04				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	30 Unit	197,193,872	270,951,085	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.27.04.2.04.01				Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	197,193,872	270,951,085	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.06				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100%	152,647,258	107,561,803	
3.27.06.2.01				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan	80%	152,647,258	107,561,803	
3.27.06.2.01.02				Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen	152,647,258	107,561,803	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	100%	1,906,390,252	2,412,483,162	
						Tingkat Produktivitas Pertanian	5,85 ton/ha			
3.27.07.2.01				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	7 kali	1,906,390,252	2,412,483,162	
						Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.27.07.2.01.01				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	929,126,319	841,681,062	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07.2.01.02				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	977,263,933	1,570,802,100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				13,090,921,797	14,902,316,183	
3.30.02				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase ketepatan waktu pelayanan	93%	1,046,912,690	1,715,159,367	
3.30.02.2.01				Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan	318,197,034	455,649,826	
3.30.02.2.01.01				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	450 Dokumen	318,197,034	455,649,826	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Terintegrasi Secara Elektronik		Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
3.30.02.2.02				Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	12 Laporan	292,535,281	535,133,184	
3.30.02.2.02.01				Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	60 Dokumen	292,535,281	535,133,184	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.03				Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	12 Laporan	100,145,094	117,761,193	
3.30.02.2.03.02				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	24 Dokumen	100,145,094	117,761,193	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.04				Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri		Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	12 Laporan	50,400,000	117,761,193	
3.30.02.2.04.02				Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan	24 Dokumen	50,400,000	117,761,193	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Menengah dan Perdagangan	Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri				Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.05				Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	12 Laporan	285,635,281	488,853,971	
3.30.02.2.05.01				Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Dokumen	285,635,281	488,853,971	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%	3,361,665,176	4,285,392,608	
3.30.03.2.02				Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan	3,361,665,176	4,285,392,608	
3.30.03.2.02.01				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada	611 Dokumen	3,361,665,176	4,285,392,608	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Distribusi Perdagangan	Menengah dan Perdagangan	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				Menengah dan Perdagangan
3.30.04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%	861,442,671	1,161,705,036	
3.30.04.2.02				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan	861,442,671	1,161,705,036	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan			
3.30.04.2.02.01				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	569,796,864	790,955,450	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.04.2.02.03				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	291,645,807	370,749,586	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.06				PROGRAM STANDARDISASI DAN		Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%	1,915,352,662	2,034,164,063	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			PERLINDUNGAN KONSUMEN						
3.30.06.2.01			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan	1,915,352,662	2,034,164,063	
3.30.06.2.01.01			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	22.880 Unit	1,800,253,568	1,898,933,032	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.06.2.01.02			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1200 Orang	115,099,094	135,231,031	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%	5,905,548,598	5,705,895,109	
3.30.07.2.01			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan	5,905,548,598	5,705,895,109	
3.30.07.2.01.02			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	5220 UMKM	5,905,548,598	5,705,895,109	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1,525,691,285	1,048,796,592	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.31.02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	17%	848,179,341	547,084,641	
3.31.02.2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan	848,179,341	547,084,641	
3.31.02.2.01.05			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	848,179,341	547,084,641	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	82%	488,630,804	305,575,225	
3.31.03.2.01			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan	488,630,804	305,575,225	
3.31.03.2.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri,	12 Dokumen	488,630,804	305,575,225	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kewenangan Kabupaten/ Kota		Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				
3.31.04				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	100%	188,881,140	196,136,726	
3.31.04.2.01				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota Surabaya	1 Laporan	188,881,140	196,136,726	
3.31.04.2.01.01				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	188,881,140	196,136,726	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							482,214,364,240	545,637,814,194	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							262,972,744,675	306,683,792,276	
4.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan	100%	185,224,524,184	243,769,546,164	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			DAERAH KABUPATEN/KOTA			Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
						Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%			
						Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	92%			
						Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan revidi kelembagaan yang dilakukan	85%			
						Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	66,66%			
						Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%			
							Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%			
							Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	97%			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%			
4.01.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	64,285,896,365	87,213,493,721	
4.01.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 Orang/bulan	64,285,896,365	87,213,493,721	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan	1,706,734,500	3,866,500,710	
4.01.01.2.05.02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	1,706,734,500	3,866,500,710	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07					Pengadaan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan Pengadaan Barang	12 laporan	17,917,990,025	26,396,399,026	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
4.01.01.2.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1800 Unit	17,917,990,025	26,396,399,026	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%	71,326,391,883	60,930,480,147	
							Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%			
							Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%			
4.01.01.2.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,709,675,234	4,586,656,077	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,571,397,780	5,644,798,158	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	66,045,318,869	50,699,025,912	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala		Persentase Keberhasilan administrasi	100%	9,635,766,452	9,302,988,321	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Daerah dan Wakil Kepala Daerah		keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah				
4.01.01.2.11.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	397,676,341	1,230,107,941	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.04				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	9,238,090,111	8,072,880,380	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13				Penataan Organisasi		Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi	2,539,768,894	3,107,580,348	
						Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	58 instansi			
						Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.01.01.2.13.01				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	864,493,000	794,863,208	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.03				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	867,707,992	1,023,713,687	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.04				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	807,567,902	1,289,003,453	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan	17,811,976,065	52,952,103,891	
						Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%			
4.01.01.2.14.01				Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	16,773,070,100	51,136,821,463	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.02				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1,038,905,965	1,815,282,428	Sekretariat Daerah
4.01.02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari	52,010,372,138	32,728,129,490	
						Kecepatan waktu rekomendasi	14 hari			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan				
							Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	92%			
							Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	83%			
							Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%			
							Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	38,91%			
							Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	98%			
							Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	77,42%			
							Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%			
							Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%			
						Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%			
4.01.02.2.01				Administrasi Tata Pemerintahan		Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	72 Lembaga	8,106,604,242	10,976,706,487	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen			
						Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	24 Kecamatan			
4.01.02.2.01.01				Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	2,232,829,804	3,706,537,473	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.02				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1,603,354,320	3,039,275,907	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.03				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	4,270,420,118	4,230,893,107	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen	26,882,766,502	4,449,821,678	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan			
						Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS	1 Kegiatan			
4.01.02.2.02.01				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	25,720,595,446	2,858,074,511	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.02				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	910,230,345	1,497,820,758	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.03				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	1 Dokumen	251,940,711	93,926,409	Sekretariat Daerah



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kesejahteraan Masyarakat		Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				
4.01.02.2.03				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum	9,048,962,692	14,585,916,021	
						Jumlah produk hukum yang dipublikasi	60 produk hukum			
						Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	60 rancangan produk hukum			
4.01.02.2.03.01				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	4,465,991,527	6,022,773,010	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.02				Fasilitasi Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	2,881,891,372	6,759,883,098	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.03				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sekretariat Daerah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	1,701,079,793	1,803,259,913	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04				Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	31 Lembaga	7,972,038,702	2,715,685,304	
						Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	11 Lembaga			
4.01.02.2.04.01				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	643,482,648	880,089,405	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.02				Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	6,901,965,302	1,681,112,230	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.03				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	426,590,752	154,483,669	Sekretariat Daerah
4.01.03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	25,737,848,353	30,186,116,622	
						Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya $\geq 76\%$	84,50%			
						Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	80%			
4.01.03.2.01				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan	4,168,798,948	3,940,124,178	
4.01.03.2.01.01				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	1,868,087,550	1,976,288,272	Sekretariat Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.01.03.2.01.02				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	2,070,070,998	1,552,699,806	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.03				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	230,640,400	411,136,100	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen	9,087,001,222	14,203,780,270	
4.01.03.2.02.02				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	7,350,303,352	6,669,889,815	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.03				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	1,736,697,870	7,533,890,455	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	92%	12,089,990,583	11,975,388,802	
						Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%			
4.01.03.2.03.01				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen	5,408,562,583	1,593,170,529	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.03				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi	300 Orang	6,681,428,000	10,382,218,273	Sekretariat Daerah



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pengadaan Barang dan Jasa				
4.01.03.2.04				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan	392,057,600	66,823,372	
4.01.03.2.04.01				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	392,057,600	66,823,372	Sekretariat Daerah
4.02				SEKRETARIAT DPRD				219,241,619,565	238,954,021,918	
4.02.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92,50%	175,261,585,977	191,218,515,636	
4.02.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15,348,387,449	15,209,514,474	
4.02.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	15,348,387,449	15,209,514,474	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	25,829,147,888	27,893,384,894	
4.02.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan	11 Paket	25,829,147,888	27,893,384,894	Sekretariat DPRD



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
4.02.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	≤ 1 Hari	4,892,968,308	5,210,889,254	
4.02.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit	4,892,968,308	5,210,889,254	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.14				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	≤ 1 Hari	81,326,586,002	90,097,291,193	
4.02.01.2.14.01				Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96 Laporan	81,326,586,002	90,097,291,193	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%	45,059,551,136	49,565,506,242	
4.02.01.2.15.01				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	45,059,551,136	49,565,506,242	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16				Layanan Administrasi DPRD		Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	≤ 2 Hari	2,804,945,194	3,241,929,579	
4.02.01.2.16.03				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	36 Laporan	2,804,945,194	3,241,929,579	Sekretariat DPRD



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.02.02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%	43,980,033,588	47,735,506,282	
4.02.02.2.01			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen	4,202,903,526	4,773,482,461	
4.02.02.2.01.01			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	4,202,903,526	4,773,482,461	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04			Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang	21,268,944,606	22,836,714,576	
4.02.02.2.04.02			Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	1,266,384,530	1,781,567,940	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.03			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 Dokumen	20,002,560,076	21,055,146,636	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen	14,176,559,647	15,443,605,416	
4.02.02.2.05.03			Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	14,176,559,647	15,443,605,416	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08			Fasilitasi Tugas DPRD		Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	≤ 2 Hari	4,331,625,809	4,681,703,829	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.02.02.2.08.01				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen	4,331,625,809	4,681,703,829	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							268,847,292,739	324,035,352,859	
5.01	PERENCANAAN							35,695,446,556	45,522,796,014	
5.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,47%	25,988,849,696	33,265,609,068	
5.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	201,642,416	192,758,327	
5.01.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	201,642,416	192,758,327	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	22,635,990,668	29,682,878,386	
5.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	22,635,990,668	29,682,878,386	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	3,151,216,612	3,389,972,355	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.01.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	588,196,947	485,192,848	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,563,019,665	2,904,779,507	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%	2,979,838,536	3,459,660,297	
						Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%			
						Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%			
5.01.02.2.01				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	6 dokumen	1,048,380,825	1,242,804,801	
5.01.02.2.01.07				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	2 Dokumen	1,048,380,825	1,242,804,801	Badan Perencanaan Pembangunan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP D)				Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02.2.02				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD	1,151,648,587	1,328,476,808	
5.01.02.2.02.01				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	38 Masukan	1,151,648,587	1,328,476,808	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02.2.03				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD	779,809,124	888,378,688	
5.01.02.2.03.03				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	779,809,124	888,378,688	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN		Persentase capaian indikator program	98,36%	6,726,758,324	8,797,526,649	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			PEMBANGUNAN DAERAH		Perangkat Daerah mitra di atas 76%				
5.01.03.2.01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan	2,249,541,977	2,508,892,230	
5.01.03.2.01.04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	958,144,045	1,060,545,849	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.01.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	1,291,397,932	1,448,346,381	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Laporan	1,797,859,679	3,057,817,640	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.01.03.2.02.04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	955,155,808	1,894,557,165	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.02.08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	842,703,871	1,163,260,475	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.03				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Laporan	2,679,356,668	3,230,816,779	
5.01.03.2.03.04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	1,513,368,460	1,845,390,322	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.03.08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	2 Laporan	1,165,988,208	1,385,426,457	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Penelitian dan Pengembangan	RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				Penelitian dan Pengembangan
5.02	KEUANGAN							201,337,102,947	245,333,173,382	
5.02.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	106,183,394,181	149,535,432,658	
5.02.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	79,760,710,671	131,912,073,016	
5.02.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/bulan	45,831,991,148	100,502,685,242	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan	33,928,719,523	31,409,387,774	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.04				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	315,445,241	271,876,565	
5.02.01.2.04.02				Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	315,445,241	271,876,565	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah		Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana	100%	830,873,406	1,321,497,636	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				
5.02.01.2.07.10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	830,873,406	1,321,497,636	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	18,539,679,135	7,521,286,932	
						Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%			
5.02.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6,539,095,738	235,540,780	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,149,359,531	51,198,038	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,709,566,504	5,266,418,808	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,141,657,362	1,968,129,306	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
5.02.01.2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	6,736,685,728	8,508,698,509	
5.02.01.2.09.01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.660 Unit	6,736,685,728	8,508,698,509	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	44,603,871,411	22,519,362,919	
							Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%			
5.02.02.2.01					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan	7 Dokumen	2,654,929,663	2,306,965,190	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun				
5.02.02.2.01.01				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	629,603,390	520,619,029	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	788,199,835	594,181,119	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.07				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	638,506,755	548,390,462	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.08				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	598,619,683	643,774,580	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan	90220 berkas	2,635,702,780	2,940,036,506	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pemberhentian Pembayaran yang dilayani				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 dokumen			
						Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen			
5.02.02.2.02.01				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen	551,444,641	520,387,130	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.05				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	374,774,087	346,688,613	Badan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.02.09				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	Badan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi	90220 Dokumen	1,709,484,052	2,072,960,763	Badan Pengelolaan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Keuangan dan Aset Daerah	Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	24 Dokumen	1,063,238,968	1,022,361,223	
5.02.02.2.03.08				Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen	1,063,238,968	1,022,361,223	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%	38,250,000,000	16,250,000,000	
						Persentase realisasi bagi hasil retribusi	100%			
						Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%			
5.02.02.2.04.08				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	500,000,000	500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.09				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	37,000,000,000	15,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.10				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana	1 Laporan	750,000,000	750,000,000	Badan Pengelolaan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Keuangan dan Aset Daerah	bagi Hasil Kabupaten/Kota				Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	61,80%	34,509,856,060	42,919,042,983	
5.02.03.2.01				Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Dokumen	34,509,856,060	42,919,042,983	
						Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%			
5.02.03.2.01.07				Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	9,567,600,511	8,363,235,367	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.09				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	2,737,700,309	22,865,389,692	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.10				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7.679 Dokumen	18,309,074,949	8,753,637,657	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.13				Pembinaan Pengelolaan Barang	Badan Pengelolaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	60 Orang	3,895,480,291	2,936,780,267	Badan Pengelolaan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	82%	16,039,981,295	30,359,334,822	
						Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	67%			
						Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60%			
5.02.04.2.01				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	16,039,981,295	30,359,334,822	
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen			
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan			
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	19.426 Objek Pajak			
5.02.04.2.01.05				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	4,166,923,658	12,221,219,396	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.07				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	19.426 Obyek Pajak	7,627,341,314	12,583,132,012	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.11				Penagihan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	1,819,720,529	4,438,318,551	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.13				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	1,820,625,000	487,831,260	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.14				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	605,370,794	628,833,603	Badan Pendapatan Daerah
5.03				KEPEGAWAIAN				23,648,404,835	24,455,197,333	
5.03.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	17,388,043,765	17,792,608,937	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.03.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15,594,212,085	15,869,660,163	
5.03.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	15,594,212,085	15,869,660,163	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,278,983,048	1,299,621,937	
5.03.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	1,278,983,048	1,299,621,937	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	514,848,632	623,326,837	
5.03.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	514,848,632	623,326,837	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%	6,260,361,070	6,662,588,396	
						Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	92%			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Persentase pegawai yang disiplin	96.50 %			
						Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	30.77 %			
5.03.02.2.01				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	91%	2,447,856,309	2,636,992,589	
5.03.02.2.01.02				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	270,753,594	293,868,992	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.03				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1,778,036,258	1,900,922,163	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.11				Pengelolaan Data Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	399,066,457	442,201,434	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02				Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	8555 berkas	1,513,311,500	1,759,333,953	
5.03.02.2.02.01				Pengelolaan Mutasi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan	1 Dokumen	502,329,140	598,959,654	Badan Kepegawaian dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sumber Daya Manusia	Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.02				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	525,265,817	621,795,238	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.03				Pengelolaan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	485,716,543	538,579,061	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis	2,299,193,261	2,266,261,854	
						Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis			
						Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis			
5.03.02.2.04.02				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6138 Dokumen	597,159,952	625,742,234	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.03				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	885,902,628	805,107,460	Badan Kepegawaian dan Pengembangan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.08				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	816,130,681	835,412,160	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				6,629,543,978	8,108,404,234	
5.04.02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	94.5 %	6,629,543,978	8,108,404,234	
5.04.02.2.01				Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	2232 orang	2,345,746,634	1,618,755,270	
5.04.02.2.01.03				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2232 Orang	2,345,746,634	1,618,755,270	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan		Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi,	168 orang	4,283,797,344	6,489,648,964	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				
5.04.02.2.02.07				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	4,283,797,344	6,489,648,964	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1,536,794,423	615,781,896	
5.05.02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%	1,536,794,423	615,781,896	
5.05.02.2.04				Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	4 Dokumen	1,536,794,423	615,781,896	
5.05.02.2.04.01				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	821,729,317	339,357,906	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.05.02.2.04.03				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	715,065,106	276,423,990	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							28,600,621,537	32,044,588,948	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH							28,600,621,537	32,044,588,948	
6.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	25,263,708,571	29,138,885,204	
6.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	23,506,298,275	26,238,796,353	
6.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	23,506,298,275	26,238,796,353	Inspektorat
6.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	485,489,610	806,874,052	
6.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	485,489,610	806,874,052	Inspektorat
6.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1,271,920,686	2,093,214,799	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6.01.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,271,920,686	2,093,214,799	Inspektorat
6.01.02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%	1,668,986,616	2,093,210,792	
						Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100%			
						Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%			
6.01.02.2.01				Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah dokumen hasil revidi laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen	964,423,700	1,638,560,047	
						Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev	200 Rekomendasi			
						Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	65 lembaga			
6.01.02.2.01.02				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	65 Laporan	234,174,400	423,962,099	Inspektorat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6.01.02.2.01.03				Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	230,741,280	37,461,865	Inspektorat
6.01.02.2.01.04				Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	229,826,640	34,121,530	Inspektorat
6.01.02.2.01.07				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	200 Dokumen	269,681,380	1,143,014,553	Inspektorat
6.01.02.2.02				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga	704,562,916	454,650,745	
6.01.02.2.02.01				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	349,202,616	26,105,465	Inspektorat
6.01.02.2.02.02				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	355,360,300	428,545,280	Inspektorat
6.01.03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100%	1,667,926,350	812,492,952	
						Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait	100%			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						urusan pemerintahan daerah				
						Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%			
6.01.03.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen	547,443,150	392,304,936	
6.01.03.2.01.01				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	276,638,100	349,929,114	Inspektorat
6.01.03.2.01.02				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	270,805,050	42,375,822	Inspektorat
6.01.03.2.02				Pendampingan dan Asistensi		Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokrasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	43 Kali	1,120,483,200	420,188,016	
						Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 Laporan			
6.01.03.2.02.01				Pendampingan dan Asistensi Urusan	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan	65 perangkat daerah	308,839,500	359,261,944	Inspektorat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pemerintahan Daerah		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				
6.01.03.2.02.02				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	270,555,300	23,321,800	Inspektorat
6.01.03.2.02.03				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan	270,555,300	23,321,800	Inspektorat
6.01.03.2.02.04				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 perangkat daerah	270,533,100	14,282,472	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAHAN							1,461,499,442,720	1,305,154,187,344	
7.01	KECAMATAN							1,461,499,442,720	1,305,154,187,344	
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,17%	824,159,171,529	589,931,264,890	
						Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,95%			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.00 %			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,59%			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,63%			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.77 %			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.81 %			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,86%			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.91 %			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.95 %			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,03%			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,24%			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.24 %			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.30 %			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,35%			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.40 %			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,44%			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,46%			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,68%			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.81 %			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,86%			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,97%			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.99 %			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,05%			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.30 %			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,39%			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.39 %			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.44 %			
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.71 %			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,86%			
						Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.37 %			
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	653,780,004,806	519,814,802,116	
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Asemrowo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	16,220,461,119	13,322,629,275	Kec. Asemrowo
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Benowo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	18,740,442,200	14,862,725,507	Kec. Benowo
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bubutan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	20,953,634,003	15,188,306,764	Kec. Bubutan
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	19,135,962,054	16,011,905,953	Kec. Bulak
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	18,465,768,003	15,006,571,192	Kec. Dukuh Pakis
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Gayungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	20,349,904,561	15,412,312,649	Kec. Gayungan
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Genteng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	20,731,653,271	15,673,460,933	Kec. Genteng
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Gubeng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	24,257,524,912	18,492,048,320	Kec. Gubeng

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	18,122,836,167	14,424,346,363	Kec. Gunung Anyar
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Jambangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	20,619,198,759	14,310,773,496	Kec. Jambangan
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Karangpilang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	19,010,099,391	15,158,232,507	Kec. Karangpilang
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kenjeran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	18,018,751,685	15,973,253,485	Kec. Kenjeran
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Krembangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	17,734,910,582	16,933,359,902	Kec. Krembangan
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lakarsantri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan	24,709,495,595	17,193,180,756	Kec. Lakarsantri
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan	24,713,202,655	19,302,378,127	Kec. Mulyorejo
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	19,622,467,156	16,624,833,007	Kec. Pabean Cantian
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pakal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	18,331,148,068	15,048,165,896	Kec. Pakal
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rungkut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	23,498,786,598	19,007,169,591	Kec. Rungkut
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sambikerep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	17,567,722,254	14,377,009,302	Kec. Sambikerep
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sawahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	23,548,553,310	19,241,095,983	Kec. Sawahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Semampir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	21,099,989,067	17,293,658,687	Kec. Semampir
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Simokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	20,649,295,876	15,172,845,831	Kec. Simokerto
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sukolilo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	26,478,104,113	20,726,502,522	Kec. Sukolilo
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	22,880,810,130	18,197,566,528	Kec. Sukomanunggal
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tambaksari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	29,170,764,805	24,217,209,231	Kec. Tambaksari
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tandes	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	24,421,354,591	19,318,804,488	Kec. Tandes
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tegalsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	20,258,100,407	16,133,827,741	Kec. Tegalsari
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	17,857,980,452	14,980,878,479	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Wiyung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	18,645,504,111	14,852,032,407	Kec. Wiyung
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Wonocolo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	22,105,816,666	16,747,426,609	Kec. Wonocolo
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Wonokromo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	25,859,762,245	20,610,290,583	Kec. Wonokromo
7.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah paket peralatan dan	24 paket	165,189,549,448	65,029,574,161	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						perlengkapan kantor yang disediakan				
						Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	28 Paket			
						Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket			
						Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%			
						Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%			
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Asemrowo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	3,581,664,271	724,604,239	Kec. Asemrowo
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Benowo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	4,040,220,249	703,359,720	Kec. Benowo
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bubutan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	5,038,449,994	1,507,199,400	Kec. Bubutan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bulak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	5,341,078,955	3,139,853,854	Kec. Bulak
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,860,903,960	3,724,629,689	Kec. Dukuh Pakis
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Gayungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	4,288,677,836	1,591,074,861	Kec. Gayungan
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Genteng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5,678,111,298	2,464,296,819	Kec. Genteng
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Gubeng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	6,384,137,597	869,151,654	Kec. Gubeng
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	4,805,225,680	4,910,979,889	Kec. Gunung Anyar
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Jambangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	3,502,526,716	860,602,485	Kec. Jambangan
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Karangpilang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	5,017,691,632	2,041,450,612	Kec. Karangpilang
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenjeran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5,734,431,202	927,516,489	Kec. Kenjeran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Krembangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	5,824,220,181	1,887,590,315	Kec. Krembangan
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Lakarsantri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4,836,602,326	1,427,501,679	Kec. Lakarsantri
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mulyorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	6,365,123,443	2,899,050,000	Kec. Mulyorejo
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5,323,154,570	1,498,820,219	Kec. Pabean Cantian
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pakal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	501 Paket	4,555,664,368	1,129,925,214	Kec. Pakal
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Rungkut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	6,022,369,527	1,625,853,257	Kec. Rungkut
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sambikerep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	4,224,508,613	6,439,947,228	Kec. Sambikerep
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sawahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	6,518,977,449	2,092,796,748	Kec. Sawahan
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Semampir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5,788,444,959	2,350,287,334	Kec. Semampir

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Simokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	4,897,186,608	1,529,666,418	Kec. Simokerto
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukolilo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	6,583,101,437	2,271,709,842	Kec. Sukolilo
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	5,641,567,370	1,635,074,555	Kec. Sukomanunggal
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tambaksari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	10,043,777,705	5,171,461,556	Kec. Tambaksari
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tandes	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5,490,247,644	1,594,945,131	Kec. Tandes
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tegalsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	5,883,154,719	2,794,487,678	Kec. Tegalsari
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	4,621,817,153	1,300,014,882	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Wiyung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4,308,359,680	1,545,237,837	Kec. Wiyung
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Wonocolo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	5,186,909,217	1,665,152,468	Kec. Wonocolo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Wonokromo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	5,801,243,089	705,332,089	Kec. Wonokromo
7.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	18 Unit	5,189,617,275	5,086,888,613	
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit			
						Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%			
						Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%			
						Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan	100%			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pemerintah Daerah yang disediakan				
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Asemrowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	131,793,300	130,682,462	Kec. Asemrowo
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Benowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	153,825,200	158,441,117	Kec. Benowo
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bubutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	128,935,309	156,241,309	Kec. Bubutan
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200,708,000	225,547,781	Kec. Bulak
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	4 Unit	153,180,950	96,412,800	Kec. Dukuh Pakis

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Dipelihara/Direhabilitasi				
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gayungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	130,450,800	145,683,714	Kec. Gayungan
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Genteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	123,600,000	162,841,325	Kec. Genteng
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gubeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	190,104,900	108,862,800	Kec. Gubeng
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	105,859,000	105,600,000	Kec. Gunung Anyar
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Jambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	100 Unit	136,128,000	115,807,000	Kec. Jambangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Dipelihara/Direhabilitasi				
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Karangpilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	129,770,000	125,172,116	Kec. Karangpilang
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	160,370,000	160,370,000	Kec. Kenjeran
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Krembangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	217,470,600	197,185,982	Kec. Krembangan
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Lakarsantri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	113,022,193	158,149,181	Kec. Lakarsantri
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 Unit	183,770,200	198,809,901	Kec. Mulyorejo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Dipelihara/Direhabilitasi				
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	161,968,500	174,807,534	Kec. Pabean Cantian
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pakal	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	150,778,449	135,700,705	Kec. Pakal
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Rungkut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	131,708,120	136,265,586	Kec. Rungkut
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sambikerep	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	95,500,800	95,505,600	Kec. Sambikerep
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sawahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 Unit	130,171,200	132,432,385	Kec. Sawahan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Dipelihara/Direhabilitasi				
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Semampir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	269,337,699	292,557,786	Kec. Semampir
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Simokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	141,704,641	138,868,769	Kec. Simokerto
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukolilo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	218,373,920	207,094,842	Kec. Sukolilo
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	175,458,879	168,411,647	Kec. Sukomanunggal
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tambaksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	50 Unit	278,135,300	232,979,740	Kec. Tambaksari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Dipelihara/Direhabilitasi				
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tandes	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	175,203,900	161,133,113	Kec. Tandes
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tegalsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	286,508,185	296,952,878	Kec. Tegalsari
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	151,703,380	145,556,568	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wiyung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	146,743,200	109,970,392	Kec. Wiyung
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wonocolo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	100 Unit	218,143,150	220,118,360	Kec. Wonocolo



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Dipelihara/Direhabilitasi				
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wonokromo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	199,189,500	192,725,220	Kec. Wonokromo
7.01.02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	112,167,047,180	142,612,289,211	
						Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%			
						Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%			
						Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%			
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	15%			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	20.43 %			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.25 %			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.36 %			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.82 %			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25,99%			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.32 %			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26,71%			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27,27%			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27.71 %			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	29.54 %			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30.77 %			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33.33 %			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	34.45 %			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,11%			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40,51%			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	42,86%			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47,02%			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50%			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.51 %			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51%			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53.19 %			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53,35%			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	55,81%			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	56.45 %			
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,16%			
							Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	23.38 %			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	24,73%			
7.01.02.2.01						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	130,165,980	249,414,320
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan			
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan			
						Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan	2 Laporan			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						musrenbang pada tingkat kecamatan				
						Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga			
						Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga			
						Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga			
						Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga			
						Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga			
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	2 laporan			
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan	3,450,000	3,685,980	Kec. Asemrowo



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,860,000	5,192,424	Kec. Benowo
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,500,000	4,807,800	Kec. Bubutan
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	4,500,000	4,807,800	Kec. Bulak
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan	3,750,000	8,013,000	Kec. Dukuh Pakis



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1,650,000	6,410,400	Kec. Gayungan
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,000,000	4,887,875	Kec. Genteng
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,000,000	8,013,000	Kec. Gubeng
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	2 Laporan	2,400,000	10,256,640	Kec. Gunung Anyar



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	178 Laporan	3,000,000	3,205,200	Kec. Jambangan
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,100,000	15,384,960	Kec. Karangpilang
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,250,000	2,403,900	Kec. Kenjeran
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2,550,000	8,461,728	Kec. Krembangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	9,870,000	10,320,744	Kec. Lakarsantri
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,600,000	6,410,400	Kec. Mulyorejo
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5,430,000	3,846,240	Kec. Pabean Cantian
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan	2,400,000	8,814,300	Kec. Pakal



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1,050,000	11,859,240	Kec. Rungkut
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5,100,000	5,448,840	Kec. Sambikerep
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,730,000	2,916,732	Kec. Sawahan
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan	14,157,180	15,098,229	Kec. Semampir



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,000,000	3,205,200	Kec. Simokerto
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	9,720,000	14,134,932	Kec. Sukolilo
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,088,800	8,077,104	Kec. Sukomanunggal
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,500,000	14,711,868	Kec. Tambaksari



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,700,000	18,461,952	Kec. Tandes
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	125 Laporan	9,000,000	9,615,600	Kec. Tegalsari
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,000,000	12,179,760	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan	2,250,000	6,666,816	Kec. Wiyung

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,500,000	8,525,832	Kec. Wonocolo
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,060,000	3,589,824	Kec. Wonokromo
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga	110,679,984,712	136,316,477,761	
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung	158 Lembaga			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						penyelenggaraan urusan pemerintahan				
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	168 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	185 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	188 lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	196 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	200 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung	211 lembaga			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						penyelenggaraan urusan pemerintahan				
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	217 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	260 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	280 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung	346 Lembaga			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						penyelenggaraan urusan pemerintahan				
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	365 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	376 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung	431 Lembaga			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						penyelenggaraan urusan pemerintahan				
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	439 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	480 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	488 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	568 Lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga			
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung	636 Lembaga			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						penyelenggaraan urusan pemerintahan				
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	749 Lembaga			
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1,458,567,356	1,873,704,368	Kec. Asemrowo
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1,965,475,000	2,433,193,337	Kec. Benowo
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4,275,000,000	4,430,686,594	Kec. Bubutan
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1,652,500,000	2,104,766,800	Kec. Bulak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,060,500,000	2,444,585,954	Kec. Dukuh Pakis
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2,065,475,000	2,594,903,674	Kec. Gayungan
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3,817,500,000	4,840,211,458	Kec. Genteng
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4,960,000,000	6,190,146,360	Kec. Gubeng
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2,262,500,000	2,405,365,794	Kec. Gunung Anyar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1,765,000,000	1,680,000,000	Kec. Jambangan
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2,293,050,000	2,854,355,708	Kec. Karangpilang
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4,715,475,000	5,792,532,274	Kec. Kenjeran
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4,445,000,000	5,581,029,848	Kec. Krembangan
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2,160,475,000	2,735,713,378	Kec. Lakarsantri

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3,622,500,000	4,621,660,277	Kec. Mulyorejo
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3,915,475,000	4,907,559,595	Kec. Pabean Cantian
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2,395,000,000	2,654,407,893	Kec. Pakal
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5,095,000,000	5,412,284,736	Kec. Rungkut
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2,712,975,000	3,406,926,494	Kec. Sambikerep

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6,480,525,000	9,214,197,470	Kec. Sawahan
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	6,576,792,356	8,263,311,188	Kec. Semampir
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3,705,475,000	4,695,992,638	Kec. Simokerto
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	4,592,500,000	5,870,958,764	Kec. Sukolilo
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	3,350,000,000	4,146,925,920	Kec. Sukomanunggal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7,735,800,000	9,556,544,880	Kec. Tambaksari
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3,867,500,000	4,835,795,256	Kec. Tandes
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3,795,475,000	4,966,783,554	Kec. Tegalsari
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1,932,500,000	2,474,847,432	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2,215,475,000	2,865,768,659	Kec. Wiyung



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2,935,475,000	3,677,686,594	Kec. Wonocolo
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5,855,000,000	6,783,630,864	Kec. Wonokromo
7.01.02.2.04				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	4 Bidang Urusan	1,356,896,488	6,046,397,130	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan			
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan			
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	8 Bidang Urusan			
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
					Jumlah Dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	620 Dokumen			
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Laporan			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen			
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang Dilaksanakan Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	24 Dokumen			
						Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan			
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan			
						Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	12 laporan			
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan			
						Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan			
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Asemrowo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	8,640,018	9,230,976	Kec. Asemrowo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Benowo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	7,200,000	7,692,480	Kec. Benowo
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bubutan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen	14,380,383	15,384,960	Kec. Bubutan
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bulak	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	888,000	1,174,800	Kec. Bulak
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	4,883,911	15,384,960	Kec. Dukuh Pakis
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Gayungan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	5,630,364	1,282,080	Kec. Gayungan
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Genteng	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	14,986,110	11,538,720	Kec. Genteng
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Gubeng	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	8,711,946	15,384,960	Kec. Gubeng

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	620 Dokumen	9,540,000	10,192,536	Kec. Gunung Anyar
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Jambangan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16 Dokumen	900,000	961,560	Kec. Jambangan
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Karangpilang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	20,187,000	12,307,968	Kec. Karangpilang
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Kenjeran	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen	14,400,000	15,384,960	Kec. Kenjeran
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Krembangan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	10,339,650	8,557,884	Kec. Krembangan
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Lakarsantri	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	42 Dokumen	24,320,403	15,384,960	Kec. Lakarsantri
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Mulyorejo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	12,000,000	12,820,800	Kec. Mulyorejo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	3,496,500	20,566,700	Kec. Pabean Cantian
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Pakal	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	2,816,802	12,756,696	Kec. Pakal
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Rungkut	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	14,400,000	15,384,960	Kec. Rungkut
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sambikerep	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	38 Dokumen	8,520,000	9,102,768	Kec. Sambikerep
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sawahan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	8,998,881	9,615,600	Kec. Sawahan
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Semampir	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	14,000,000	16,355,360	Kec. Semampir
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Simokerto	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen	3,246,750	3,553,077	Kec. Simokerto

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sukolilo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	50 Dokumen	9,000,000	9,551,496	Kec. Sukolilo
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	34,973,294	9,615,600	Kec. Sukomanunggal
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tambaksari	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	8,729,262	11,538,720	Kec. Tambaksari
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tandes	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	9,016,530	23,077,440	Kec. Tandes
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tegalsari	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	21,600,000	23,077,440	Kec. Tegalsari
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	10,832,712	17,788,860	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Wiyung	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	8,999,796	9,615,600	Kec. Wiyung

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Wonocolo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	8,600,000	101,724,426	Kec. Wonocolo
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Wonokromo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	16,819,275	1,602,600	Kec. Wonokromo
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11,458,356	11,430,883	Kec. Asemrowo
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	7,159,500	7,692,480	Kec. Benowo
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12,000,000	13,300,032	Kec. Bubutan
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3,330,000	4,111,800	Kec. Bulak
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	22,916,713	13,300,032	Kec. Dukuh Pakis
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	21,978,000	8,546,168	Kec. Gayungan
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non	12 Laporan	12,654,000	11,538,720	Kec. Genteng

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				terkait dengan Nonperizinan		Perizinan pada Urusan Pemerintahan				
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11,691,719	13,300,032	Kec. Gubeng
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11,791,356	10,192,536	Kec. Gunung Anyar
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4277 Laporan	21,584,713	72,000,000	Kec. Jambangan
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	21,978,000	384,624	Kec. Karangpilang
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	144,246,447	4,802,277,392	Kec. Kenjeran
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	7,500,000	8,557,884	Kec. Krembangan
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2923 Laporan	9,508,926	13,300,032	Kec. Lakarsantri
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	49,852,153	12,820,800	Kec. Mulyorejo
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non	12 Laporan	19,785,987	20,566,700	Kec. Pabean Cantian



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				terkait dengan Nonperizinan		Perizinan pada Urusan Pemerintahan				
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	7,140,000	7,756,584	Kec. Pakal
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8,726,178	13,300,032	Kec. Rungkut
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3,000,000	3,205,200	Kec. Sambikerep
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	6,000,000	9,615,600	Kec. Sawahan
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	15,000,000	17,523,600	Kec. Semampir
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3,262,290	3,553,077	Kec. Simokerto
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	188,661,709	9,615,600	Kec. Sukolilo
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9,000,000	9,615,600	Kec. Sukomanunggal
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non	12 Laporan	10,794,750	11,538,720	Kec. Tambaksari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				terkait dengan Nonperizinan		Perizinan pada Urusan Pemerintahan				
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	87,436,176	23,077,440	Kec. Tandes
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4140 Laporan	18,000,000	19,231,200	Kec. Tegalsari
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	30,969,000	17,788,860	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8,991,000	9,615,600	Kec. Wiyung
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12,124,356	1,923,120	Kec. Wonocolo
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	1,221,000	3,846,240	Kec. Wonokromo
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4,435,005	12,307,968	Kec. Asemrowo
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	5,913,525	7,692,480	Kec. Benowo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	15,440,331	7,692,480	Kec. Bubutan
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	4,440,000	5,874,000	Kec. Bulak
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	5,084,910	15,384,960	Kec. Dukuh Pakis
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,200,000	7,692,480	Kec. Gayungan
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	242,868	1,044,367	Kec. Genteng
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	9,207,450	7,692,480	Kec. Gubeng
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6,975,150	10,192,536	Kec. Gunung Anyar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	6,036,901	32,500,000	Kec. Jambangan
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,780,210	384,624	Kec. Karangpilang
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,200,000	7,692,480	Kec. Kenjeran
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7,500,000	8,557,884	Kec. Krembangan
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,000,000	9,615,600	Kec. Lakarsantri
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	12,000,000	12,820,800	Kec. Mulyorejo
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	2,861,600	20,566,700	Kec. Pabean Cantian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,140,000	7,756,584	Kec. Pakal
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	5,381,280	7,692,480	Kec. Rungkut
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	1,500,000	1,955,150	Kec. Sambikerep
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	8,991,222	9,615,600	Kec. Sawahan
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,400,590	10,136,461	Kec. Semampir
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	3,246,750	3,553,077	Kec. Simokerto
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	2,520,000	9,615,600	Kec. Sukolilo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,000,000	9,615,600	Kec. Sukomanunggal
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	10,791,420	11,538,720	Kec. Tambaksari
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6,438,600	23,077,440	Kec. Tandes
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	8,640,000	123,079,680	Kec. Tegalsari
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	19,315,332	17,788,860	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	793,428	864,864	Kec. Wiyung
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	6,000,000	6,410,400	Kec. Wonocolo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	3,600,000	3,846,240	Kec. Wonokromo
7.01.03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	514,420,740,309	566,662,088,324	
						Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.50 %			
						Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%			
						Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	503,854,997,683	560,627,870,808	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 kelurahan			
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan			
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan			
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	3 kelurahan			
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan			
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan			
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan			
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan			
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Lembaga			
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	7 kelurahan			
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan			
						jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga			
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan			
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan			
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	1 Pokmas/Ormas			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Masyarakat di Kelurahan				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Asemrowo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5,340,000	9,615,600	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Benowo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	27,000,000	28,846,800	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Bubutan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	32,840,000	35,585,456	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Bulak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	4,500,000	5,128,320	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	5 Lembaga Kemasyarakatan	9,200,000	1,923,120	Kec. Dukuh Pakis

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Gayungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7,200,000	12,820,800	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Genteng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	15,456,800	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Gubeng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9,000,000	28,846,800	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	19,938,160	22,436,400	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Jambangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,500,000	1,602,600	Kec. Jambangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Karangpilang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	16,400,000	2,564,160	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Kenjeran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5,520,000	5,897,568	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Krembangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	12,800,000	28,846,800	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	1,560,000	5,826,832	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3,900,000	1,602,600	Kec. Mulyorejo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pembangunan di Kelurahan		Pembangunan di Kelurahan				
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	9,000,000	6,410,400	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Pakal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	14,600,000	25,641,600	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Rungkut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	11,960,000	32,052,000	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sambikerep	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4,500,000	4,807,800	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sawahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	9,720,000	10,384,848	Kec. Sawahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pembangunan di Kelurahan		Pembangunan di Kelurahan				
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Semampir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	24,080,000	26,226,272	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Simokerto	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	37,636,250	42,954,046	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sukolilo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12,600,000	22,436,400	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	5,528,760	28,846,800	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000	1,602,600	Kec. Tambaksari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pembangunan di Kelurahan		Pembangunan di Kelurahan				
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tandes	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	4,200,000	38,462,400	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tegalsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7,500,000	8,013,000	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	12,400,000	25,522,746	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Wiyung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1,200,000	1,282,080	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Wonocolo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	14,800,000	16,810,720	Kec. Wonocolo



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pembangunan di Kelurahan		Pembangunan di Kelurahan				
7.01.03.2.02.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Wonokromo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	7,920,000	1,025,664	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Asemrowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,867,082,508	3,103,122,751	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,147,006,151	533,748,040	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,035,613,555	698,358,304	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kandangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1,799,003,339	1,975,098,439	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Romokalisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	669,938,176	739,278,731	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sememi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,694,330,682	2,444,846,683	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambak Oso Wilangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,647,442,931	743,769,770	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Alun-Alun Contong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,793,287,298	1,605,822,036	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bubutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1,529,374,196	3,482,466,496	Kec. Bubutan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gundih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,249,139,334	2,181,116,010	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jepara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,156,316,476	3,240,462,523	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,065,266,559	3,512,396,861	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,130,045,812	1,235,468,611	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,928,378,288	319,365,784	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,986,426,486	592,052,079	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,024,453,808	932,763,447	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,051,837,212	867,446,976	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,438,403,778	1,101,749,645	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunungsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,956,668,671	626,519,207	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,903,751,202	674,411,418	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,532,438,154	1,794,459,788	Kec. Gayungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gayungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,804,474,605	2,020,820,111	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ketintang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	2,010,307,184	2,020,820,194	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Menanggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,765,276,942	1,794,459,788	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	66 Unit	2,127,343,316	1,189,241,135	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Genteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	1,807,840,552	840,156,700	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kapasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1,886,482,317	1,328,087,445	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ketabang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	1,896,392,881	3,842,814,348	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Peneleh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,760,926,712	1,588,231,000	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Airlangga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	837,106,751	3,119,477,121	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Baratajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,532,277,608	2,776,610,233	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gubeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,904,046,620	2,402,104,111	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kertajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,234,622,405	3,243,031,086	Kec. Gubeng

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mojo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,776,101,386	3,829,018,383	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,504,268,444	2,739,731,065	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,347,351,917	1,451,514,815	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,016,168,653	563,043,160	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,889,123,550	682,014,771	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,026,889,195	1,409,563,856	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,556,351,583	889,239,300	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2,339,026,833	1,375,199,315	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kebonsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,116,656,284	1,048,568,497	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pagesangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,972,496,562	907,829,335	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karang Pilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,374,766,898	755,270,509	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kebraon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1,968,233,278	3,688,293,503	Kec. Karangpilang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedurus	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	2,188,164,607	1,409,692,675	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Waru Gunung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,074,588,049	611,159,362	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	3,057,919,393	3,250,291,160	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,900,818,083	3,188,203,243	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,946,492,665	4,194,797,248	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,254,950,074	1,246,349,819	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kemayoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,428,582,296	2,792,466,405	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dupak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,460,118,890	2,843,293,250	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Morokrembangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	3,044,744,646	3,320,971,502	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,041,447,960	2,590,231,201	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Perak Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,511,760,619	2,645,004,982	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bangkingan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	1,751,642,120	633,430,036	Kec. Lakarsantri

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jeruk	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,793,960,275	453,301,149	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lakarsantri	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,813,759,580	451,949,929	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	2,097,791,039	1,241,573,046	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,361,731,578	660,659,916	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sumurwelut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,055,597,482	347,922,544	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,869,442,826	2,733,545,998	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,658,999,340	1,767,942,000	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	886,964,927	1,767,942,000	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,301,163,847	883,971,000	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manyar Sambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,358,410,254	2,209,927,500	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,972,391,976	2,209,927,500	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bongkaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	747,862,278	1,801,636,370	Kec. Pabean Cantian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,026,849,834	2,273,332,496	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Nyamplungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,241,536,458	1,866,321,883	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Perak Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,879,778,334	2,045,302,946	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Perak Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,395,439,229	2,215,863,513	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	1,946,145,827	4,240,366,612	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pakal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,154,841,496	1,028,613,941	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sumberejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,985,320,831	1,102,703,339	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Benowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	1,848,096,454	1,277,339,941	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalirungkut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,649,553,962	3,223,580,090	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,569,959,425	2,655,648,591	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,078,087,864	2,493,831,140	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Penjaringansari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,980,886,151	2,713,057,990	Kec. Rungkut

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,729,818,726	2,550,664,696	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,294,785,297	2,541,358,557	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lontar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,158,191,658	1,361,063,901	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Made	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,957,197,334	478,242,238	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sambikerep	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2,186,366,642	1,351,529,719	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Beringin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,143,027,532	293,810,808	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pakis	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	2,516,379,473	2,866,724,607	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Putat Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,563,518,254	2,579,658,898	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,636,037,612	3,232,506,515	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Banyu Urip	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	2,173,724,342	3,295,382,028	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sawahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,089,388,124	3,300,376,811	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Petemon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	1,702,402,652	3,270,197,153	Kec. Sawahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ujung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,940,250,775	4,226,735,700	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidotopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,106,975,766	4,098,652,800	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pegirian	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,628,190,986	4,186,237,888	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	3,037,844,500	5,251,398,900	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ampel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,500,433,243	4,482,901,500	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kapasan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,256,461,108	1,565,865,451	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidodadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,891,884,256	1,471,705,383	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simolawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 Unit	1,691,768,223	1,815,705,273	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	1,303,334,963	1,721,883,892	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,880,889,326	2,252,798,092	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Keputih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3,122,499,256	1,853,212,558	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,550,688,996	2,347,870,458	Kec. Sukolilo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,294,503,509	2,547,145,359	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,209,969,436	1,185,916,992	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,513,144,944	2,547,145,356	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Semolowaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,204,558,186	2,805,706,957	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gebang Putih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,224,017,309	1,146,146,210	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Putat Gede	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,963,759,267	1,302,021,604	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2,383,125,814	2,007,248,000	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,549,570,971	2,848,131,096	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,949,934,671	1,681,325,138	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,941,147,760	1,613,687,658	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,494,790,535	1,920,525,312	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2,118,340,421	3,705,743,160	Kec. Tambaksari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gading	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	2,363,861,475	4,323,367,020	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,852,123,109	4,323,367,020	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pacarkeling	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,299,765,416	2,988,463,703	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pacarkembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	2,561,189,916	4,323,367,020	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ploso	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	2,329,459,031	4,009,859,998	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rangkah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,126,603,820	4,323,367,020	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambaksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,079,160,023	4,323,367,020	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tandes	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,291,068,039	1,857,300,337	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karangpoh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,584,254,286	1,689,213,835	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Balongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,351,194,129	1,343,058,621	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manukan Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,187,396,001	988,792,072	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,661,890,790	3,355,295,984	Kec. Tandes

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1,977,541,635	2,326,298,445	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tegalsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,188,376,135	1,970,021,374	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Keputran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	827,381,368	1,713,692,111	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	1,640,811,050	2,251,332,416	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedungdoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	1,277,293,419	2,175,106,300	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	294,219,123	1,857,590,878	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kutisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,417,581,265	1,274,818,662	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kendangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,995,285,016	1,177,366,387	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,857,701,454	1,187,886,121	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,973,704,740	1,451,967,817	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,940,055,883	1,157,387,333	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Balas Klumprik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,792,684,584	924,259,563	Kec. Wiyung

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wiyung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,099,931,601	913,122,867	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Babatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	2,530,326,540	2,336,086,331	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Siwalankerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,903,294,021	1,470,980,227	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidosermo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	2,086,542,958	1,059,313,086	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,359,463,124	2,009,523,245	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,076,853,810	2,544,711,363	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Margorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,821,997,924	1,093,782,835	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Darmo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	673,629,474	1,829,240,422	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jagir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,126,910,174	3,239,162,668	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ngagel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,435,813,895	2,657,165,249	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,608,394,570	2,727,825,940	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sawunggaling	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,912,483,412	3,147,590,727	Kec. Wonokromo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonokromo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	869,215,805	4,804,872,722	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Asemrowo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,479,136,545	2,001,004,559	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	772,137,778	835,125,324	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	926,970,895	736,613,920	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kandangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,676,083,536	1,406,567,166	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Romokalisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	373,627,044	395,573,426	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sememi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas	2,649,020,728	1,900,946,711	Kec. Benowo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambak Oso Wilangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	503,829,950	533,650,363	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Alun-Alun Contong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	512,514,750	1,115,824,486	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bubutan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,481,294,320	2,174,515,198	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gundih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,692,626,426	2,372,475,407	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jepara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,522,351,390	2,093,842,331	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas	2,229,585,238	3,420,142,076	Kec. Bubutan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	949,155,500	1,049,715,441	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kenjeran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,060,999,500	1,349,943,590	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	878,581,500	1,714,073,242	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bulak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	889,587,500	1,723,687,252	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	368,817,550	906,284,992	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas	759,636,400	1,024,521,092	Kec. Dukuh Pakis

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunungsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,109,123,735	1,091,704,648	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	498,263,200	1,051,642,260	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	433,488,380	672,510,427	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gayungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	729,225,850	1,132,966,153	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ketintang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	444,402,800	716,107,132	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Menanggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	597,991,785	669,200,018	Kec. Gayungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,544,626,285	1,755,345,902	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Genteng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	897,776,300	903,969,367	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kapasari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,484,862,621	2,042,890,663	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ketabang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,221,710,910	1,435,192,079	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Peneleh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,311,598,471	2,192,750,626	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Airlangga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas	1,965,945,753	1,440,586,681	Kec. Gubeng

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Baratajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,408,760,936	1,738,292,735	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gubeng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	694,242,150	1,289,330,319	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kertajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,431,107,046	1,752,672,094	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mojo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,092,071,250	2,616,699,291	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,141,551,346	1,318,455,202	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas	1,120,197,600	1,784,609,406	Kec. Gunung Anyar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	389,053,150	626,021,047	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	474,966,795	1,037,727,407	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	666,436,505	1,400,218,985	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	1,223,755,140	1,680,536,000	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	609,906,250	1,421,992,000	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebonsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas	1,087,335,450	898,052,584	Kec. Jambangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pagesangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	944,715,008	969,540,000	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karang Pilang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,249,689,773	620,504,307	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebraon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	610,145,210	639,091,074	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedurus	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	632,209,240	839,986,070	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Waru Gunung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	426,683,550	1,951,577,770	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas	1,479,063,112	2,895,275,820	Kec. Kenjeran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,319,813,840	3,099,518,082	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,051,518,300	1,790,974,775	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	859,005,440	1,266,363,197	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kemayoran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2,436,592,673	1,896,875,859	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dupak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,809,275,450	2,327,160,639	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	7 Pokmas / Ormas	2,755,995,702	1,314,032,997	Kec. Krembangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Perak Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1,293,598,293	1,005,324,150	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Morokrembangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,438,008,400	2,231,532,371	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bangkingan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,355,791,846	923,413,795	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jeruk	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,217,434,150	946,271,040	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lakarsantri	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	783,485,650	937,535,609	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas	1,167,996,000	1,570,369,396	Kec. Lakarsantri

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	421,861,900	673,397,924	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sumurwelut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	591,359,350	601,101,220	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,165,425,306	1,053,528,018	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,019,095,440	1,078,955,820	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,934,202,174	983,372,104	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	487,168,207	534,526,792	Kec. Mulyorejo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manyar Sambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,822,296,810	1,597,659,720	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	556,868,100	813,573,332	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bongkaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,204,914,690	1,083,092,524	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	3,369,925,372	2,617,357,256	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Nyamplungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	769,020,700	1,130,768,038	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Perak Timur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	1,166,976,241	1,329,045,432	Kec. Pabean Cantian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Perak Utara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,696,079,399	2,327,232,107	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,513,643,196	1,938,920,797	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pakal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,855,930,350	883,787,549	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sumberejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	1,644,430,951	1,065,069,106	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Benowo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	826,932,649	969,919,039	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalirungkut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	1,169,303,796	1,915,329,480	Kec. Rungkut

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	618,327,900	1,598,502,792	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,266,888,120	1,639,508,016	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Penjaringansari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	967,037,436	1,547,684,352	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	922,885,001	1,636,353,768	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	687,052,650	1,290,788,376	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lontar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas	868,968,970	1,440,403,952	Kec. Sambikerep

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sambikerep	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	599,041,300	1,357,356,000	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Made	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	710,903,300	788,559,200	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Beringin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	584,691,308	562,333,200	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Banyu Urip	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,704,531,482	3,161,006,127	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,978,964,756	2,066,702,946	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pakis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	5 Pokmas / Ormas	1,681,470,770	2,393,345,246	Kec. Sawahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Putat Jaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,385,222,948	3,105,248,127	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sawahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,500,211,986	1,788,970,761	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Petemon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,793,424,708	2,232,173,043	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ujung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,774,547,760	3,202,072,500	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,310,727,050	2,689,740,900	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ampel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	1,231,539,900	3,202,072,500	Kec. Semampir

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidotopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,731,049,008	3,202,072,500	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pegirian	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,003,363,100	1,704,399,150	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kapasan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1,867,256,266	1,754,232,137	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,092,807,030	1,645,340,527	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidodadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	2,009,594,880	2,456,742,123	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simokerto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	1,862,654,458	2,191,167,216	Kec. Simokerto

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simolawang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,885,785,910	3,040,385,269	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gebang Putih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,528,053,344	746,986,011	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Keputih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	632,395,000	988,920,273	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,778,025,259	1,406,508,362	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	659,498,500	1,116,747,294	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	1,252,203,300	1,241,302,799	Kec. Sukolilo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,354,074,980	1,154,896,039	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Semolowaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	580,334,800	1,146,812,139	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Putat Gede	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	538,355,320	389,629,151	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	844,523,430	1,186,378,981	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,249,559,440	2,092,678,244	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	272,390,750	599,755,511	Kec. Sukomanunggal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,071,563,000	1,086,890,955	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,439,110,779	998,900,244	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	725,972,972	1,016,999,411	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gading	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,365,683,650	2,128,105,658	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,800,792,230	2,350,039,064	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pacarkeling	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	1,070,362,500	1,602,750,288	Kec. Tambaksari



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pacarkembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,362,117,900	2,322,488,648	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ploso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,671,404,486	2,569,882,316	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rangkah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,484,815,243	1,298,636,820	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambaksari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,449,708,251	2,551,982,255	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tandes	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,387,950,854	872,549,595	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karangpoh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	1,398,982,832	1,684,525,969	Kec. Tandes

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Balongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,363,189,786	847,522,547	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manukan Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,603,639,130	920,685,416	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,233,353,272	2,778,604,475	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	741,059,097	775,779,379	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tegalsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,522,543,084	1,756,372,782	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Keputran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	2,419,319,992	1,389,443,772	Kec. Tegalsari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,740,085,318	1,731,531,944	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedungdoro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,248,960,660	1,754,617,169	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,952,088,126	1,544,946,535	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kutisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	932,956,800	1,021,249,083	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kendangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	937,778,450	1,204,797,320	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	1 Pokmas / Ormas	1,028,168,150	1,182,437,896	Kec. Tenggilis Mejoyo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,020,739,852	1,321,010,960	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Babatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1,370,047,742	1,757,816,462	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	643,139,500	806,308,765	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Balas Klumprik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	875,085,725	921,343,859	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wiyung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,035,498,763	1,263,797,737	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Siwalankerto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	1 Pokmas / Ormas	919,514,205	679,324,360	Kec. Wonocolo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,057,446,450	1,890,162,932	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	896,931,775	809,503,680	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Margorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	673,341,860	1,425,144,258	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidosermo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	589,398,000	996,840,811	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Darmo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3,355,696,584	2,024,036,292	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jagir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas	1,610,941,589	1,878,541,402	Kec. Wonokromo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ngagel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,699,620,806	1,241,486,946	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,772,969,160	2,652,333,335	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sawunggaling	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,797,489,479	2,000,934,528	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonokromo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	3,464,093,172	2,895,159,461	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.03					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	17 Lembaga	10,565,742,626	6,034,217,516	
							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananva untuk	25 Lembaga			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pemberdayaan dapat disediakan				
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	30 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	31 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	32 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk	36 Lembaga			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pemberdayaan dapat disediakan				
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	61 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	67 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk	70 Lembaga			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pemberdayaan dapat disediakan				
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	37 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	51 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk	52 Lembaga			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pemberdayaan dapat disediakan				
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	58 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	72 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	74 Lembaga			
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	78 Lembaga			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Unit Usaha			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	20 unit usaha			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	420 Lembaga			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Pelaku Usaha			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	100 Lembaga			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	110 Unit Usaha			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	124 Lembaga			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	140 Unit Usaha			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	156 Lembaga			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	20 Lembaga			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	25 Lembaga			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	420 Lembaga			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	50 Lembaga			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	62 Unit Usaha			
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	90 Unit Kerja			
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Asemrowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	81,573,900	68,649,719	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Benowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	50 Unit	141,647,100	98,701,200	Kec. Benowo
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bubutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	93 Unit	221,110,890	176,850,115	Kec. Bubutan
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	94 Unit	166,551,060	79,720,200	Kec. Bulak
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	328 Unit	419,972,940	124,598,944	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Gayungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	119 Unit	180,137,460	120,579,624	Kec. Gayungan
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Genteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	183 Unit	350,155,050	245,178,568	Kec. Genteng
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kec. Gubeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga	108 Unit	503,318,400	209,004,681	Kec. Gubeng



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Lembaga Kemasyarakatan		Kemasyarakatan yang Disediakan				
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit	132,698,280	116,560,303	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Jambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	98,701,200	104,502,340	Kec. Jambangan
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Karangpilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	154,729,560	116,560,303	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	54 Unit	248,584,500	152,734,190	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Krembangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	51 Unit	191,150,880	176,850,115	Kec. Krembangan
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	59 Unit	175,380,000	128,618,265	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	89 Unit	316,802,880	213,024,002	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	58 Unit	240,292,800	209,004,681	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kec. Pakal	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga	522 Unit	560,544,450	136,656,907	Kec. Pakal



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Lembaga Kemasyarakatan		Kemasyarakatan yang Disediakan				
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Rungkut	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	95 Unit	392,302,860	297,429,739	Kec. Rungkut
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sambikerep	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	68 Unit	275,742,870	148,714,869	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sawahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	197 Unit	622,762,170	289,391,097	Kec. Sawahan
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Semampir	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	91 Unit	422,406,060	281,352,456	Kec. Semampir
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Simokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	182,217,600	182,217,599	Kec. Simokerto
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sukolilo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	70 Unit	262,057,680	269,294,493	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	230 Unit	393,190,860	144,695,548	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tambaksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	415 Unit	754,360,440	313,507,022	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kec. Tandes	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga	245 Unit	563,461,530	194,566,114	Kec. Tandes

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Lembaga Kemasyarakatan		Kemasyarakatan yang Disediakan				
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tegalsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	150 Unit	315,259,980	192,927,398	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	67 Unit	122,954,700	100,483,020	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Wiyung	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	147,618,900	136,656,907	Kec. Wiyung
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Wonocolo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	49 Unit	176,482,230	176,850,115	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.03.03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Wonokromo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	464 Unit	1,173,226,710	233,120,606	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	8,640,000	9,230,976	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	14,700,000	15,705,480	Kec. Benowo
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan	6 Laporan	14,400,000	15,384,960	Kec. Bubutan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Usaha Ekonomi Masyarakat				
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	1,950,000	2,403,900	Kec. Bulak
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	10,200,000	7,692,480	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	26,040,000	11,538,720	Kec. Gayungan
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	15,000,000	16,625,040	Kec. Genteng
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	14,400,000	15,705,480	Kec. Gubeng
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	9,000,000	9,615,600	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan	48 Laporan	9,450,000	15,000,000	Kec. Jambangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Usaha Ekonomi Masyarakat				
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	31,500,000	48,194,048	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	30,946,320	14,999,161	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	20,400,000	22,394,400	Kec. Krembangan
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	8,640,000	8,783,036	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	12,240,000	48,078,000	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	50,955,816	62,656,665	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan	48 Laporan	19,500,000	21,154,320	Kec. Pakal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Usaha Ekonomi Masyarakat				
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	9,000,000	9,615,600	Kec. Rungkut
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	13,500,000	14,651,610	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	8,640,000	9,230,976	Kec. Sawahan
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	17,280,000	18,461,952	Kec. Semampir
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	36,464,550	39,991,404	Kec. Simokerto
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	18,400,000	22,394,400	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan	4 Laporan	21,000,000	22,436,400	Kec. Sukomanunggal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Usaha Ekonomi Masyarakat				
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	24,000,000	27,244,200	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	23,280,000	18,461,952	Kec. Tandes
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	19,800,000	23,846,688	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	25,760,000	25,000,560	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	11,520,000	12,307,968	Kec. Wiyung
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	43,100,000	3,205,200	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.03.04				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan	12 Laporan	8,640,000	3,205,200	Kec. Wonokromo



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Usaha Ekonomi Masyarakat				
7.01.04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	10,018,835,097	4,765,467,920	
7.01.04.2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	10,018,835,097	4,765,467,920	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 lokasi			
						Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi			
						Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	11 Lokasi			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Laporan			
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi			
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi			
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi			
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi			
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 lokasi			
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	20 Lokasi			
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	21 Lokasi			
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi			
						Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi			
						Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi			
						Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi			
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	155,009,112	120,841,152	Kec. Asemrowo



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	252,461,424	149,066,789	Kec. Benowo
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	132,636,000	145,510,224	Kec. Bubutan
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	92,241,600	30,664,876	Kec. Bulak
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	299,531,892	143,065,152	Kec. Dukuh Pakis
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 Laporan	382,218,360	147,004,896	Kec. Gayungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	346,638,780	241,528,944	Kec. Genteng
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	804,467,880	138,771,486	Kec. Gubeng
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	276,306,048	153,615,600	Kec. Gunung Anyar
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	199,957,381	154,045,440	Kec. Jambangan



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	216,626,712	148,489,152	Kec. Karangpilang
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	194,661,912	154,942,502	Kec. Kenjeran
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	266,119,980	166,624,764	Kec. Krembangan
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	201,369,600	136,969,152	Kec. Lakarsantri
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 Laporan	245,878,696	154,682,872	Kec. Mulyorejo



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.04.2.01.01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	181,917,912	153,385,728	Kec. Pabean Cantian
7.01.04.2.01.01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	282,586,848	111,625,152	Kec. Pakal
7.01.04.2.01.01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	335,385,398	153,615,600	Kec. Rungkut
7.01.04.2.01.01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	212,563,512	185,619,912	Kec. Sambikerep



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	816,103,080	143,564,352	Kec. Sawahan
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	237,021,180	134,285,520	Kec. Semampir
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	128,605,920	122,193,801	Kec. Simokerto
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	343,285,248	176,656,368	Kec. Sukolilo
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 Laporan	481,582,610	180,687,470	Kec. Sukomanunggal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	675,176,964	266,035,200	Kec. Tambaksari
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	268,615,512	131,412,864	Kec. Tandes
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	231,685,356	286,586,640	Kec. Tegalsari
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	216,493,980	79,369,152	Kec. Tenggilis Mejoyo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	132,624,000	144,059,352	Kec. Wiyung
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	342,249,804	155,278,704	Kec. Wonocolo
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1,066,812,396	155,269,104	Kec. Wonokromo
7.01.05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	733,648,605	1,183,076,999	
						Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%			
7.01.05.2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan	1 Laporan	733,648,605	1,183,076,999	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Penugasan Kepala Daerah	Peraturan Perundang-Undangan			
					Jumlah laporan potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	12 Laporan			
					Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, k Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang			
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	24 kasus			
					Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtib mas	24 kasus			
					Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	12 Kasus			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Babinsa/Babinkamtib mas				
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	144 Kasus			
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	150 Kasus			
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	2 Kasus			
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	20 Kasus			
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	210 Kasus			
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	24 kasus			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Babinsa/Babinkamtib mas				
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	24 Kasus			
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	34 Kasus			
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	36 Kasus			
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	37 Kasus			
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	38 Kasus			
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	44 Kasus			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Babinsa/Babinkamtib mas				
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	45 Kasus			
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	7 Kasus			
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	7 Laporan			
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	73 Kasus			
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	88 Kasus			
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	9 Kasus			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Babinsa/Babinkamtib mas				
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	12 Kasus			
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	2 kasus			
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	62 Kasus			
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik			
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	35 Orang			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Asemrowo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	164 Orang	5,720,000	4,807,800	Kec. Asemrowo
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Benowo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang	14,600,000	15,705,480	Kec. Benowo
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Bubutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	14,400,000	15,384,960	Kec. Bubutan
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Bulak	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang	2,300,000	2,403,900	Kec. Bulak
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	160 Orang	14,500,000	15,384,960	Kec. Dukuh Pakis

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
7.01.05.2.01.02					Kec. Gayungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	230 Orang	2,400,000	29,775,200	Kec. Gayungan
7.01.05.2.01.02					Kec. Genteng	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	57 Orang	6,310,000	11,083,360	Kec. Genteng
7.01.05.2.01.02					Kec. Gubeng	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	69 Orang	14,600,000	15,705,480	Kec. Gubeng
7.01.05.2.01.02					Kec. Gunung Anyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	63 Orang	5,000,000	9,615,600	Kec. Gunung Anyar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Jambangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Orang	15,800,000	21,538,944	Kec. Jambangan
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Karangpilang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	187 Orang	5,970,000	6,410,400	Kec. Karangpilang
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Kenjeran	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	418 Orang	7,200,000	7,692,480	Kec. Kenjeran
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Krembangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang	8,800,000	16,946,704	Kec. Krembangan
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Kec. Lakarsantri	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	160 Orang	8,010,000	8,974,560	Kec. Lakarsantri



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
7.01.05.2.01.02					Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	53 Orang	7,180,000	12,820,800	Kec. Mulyorejo
7.01.05.2.01.02					Kec. Pabean Cantian	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	19,240,000	22,436,400	Kec. Pabean Cantian
7.01.05.2.01.02					Kec. Pakal	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	166 Orang	9,000,000	9,615,600	Kec. Pakal
7.01.05.2.01.02					Kec. Rungkut	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	8,900,000	9,615,600	Kec. Rungkut

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sambikerep	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	14,400,000	15,384,960	Kec. Sambikerep
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sawahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	91 Orang	21,270,000	23,204,100	Kec. Sawahan
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Semampir	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	561 Orang	15,000,000	16,026,000	Kec. Semampir
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Simokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	5,800,000	7,447,203	Kec. Simokerto
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sukolilo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	10,400,000	16,946,704	Kec. Sukolilo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
7.01.05.2.01.02					Kec. Sukomanunggal	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	9,000,000	9,615,600	Kec. Sukomanunggal
7.01.05.2.01.02					Kec. Tambaksari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	663 Orang	20,560,000	29,150,142	Kec. Tambaksari
7.01.05.2.01.02					Kec. Tandes	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	69 Orang	9,740,000	22,465,384	Kec. Tandes
7.01.05.2.01.02					Kec. Tegalsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	94 Orang	46,500,000	49,680,600	Kec. Tegalsari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	9,080,000	9,615,600	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Wiyung	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	78 Orang	8,800,000	9,615,600	Kec. Wiyung
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Wonocolo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	63 Orang	15,200,000	22,166,720	Kec. Wonocolo
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Wonokromo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	22,900,000	27,708,400	Kec. Wonokromo
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan	12 Laporan	11,982,950	14,018,880	Kec. Asemrowo



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perundang-Undangan		Peraturan Perundang-Undangan				
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	14,308,000	15,705,480	Kec. Benowo
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	6,438,600	7,692,480	Kec. Bubutan
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	3,000,000	3,205,200	Kec. Bulak
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	6,796,300	7,692,480	Kec. Dukuh Pakis
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	6,438,600	7,151,490	Kec. Gayungan
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	10,731,000	11,970,868	Kec. Genteng
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan	12 Laporan	14,665,700	15,705,480	Kec. Gubeng



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perundang-Undangan		Peraturan Perundang-Undangan				
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	8,584,800	12,820,800	Kec. Gunung Anyar
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38 Laporan	8,000,000	21,538,944	Kec. Jambangan
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	32,193,000	99,361,200	Kec. Karangpilang
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	7,200,000	7,692,480	Kec. Kenjeran
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan	6,438,600	27,232,975	Kec. Krembangan
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan	7,200,000	7,692,480	Kec. Lakarsantri
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan	1 Laporan	12,000,000	12,820,800	Kec. Mulyorejo



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perundang-Undangan		Peraturan Perundang-Undangan				
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	8,584,800	51,283,200	Kec. Pabean Cantian
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	9,000,000	9,615,600	Kec. Pakal
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	8,942,500	9,615,600	Kec. Rungkut
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37 Laporan	7,200,000	7,692,480	Kec. Sambikerep
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	16,800,000	19,626,432	Kec. Sawahan
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	20,000,000	23,364,800	Kec. Semampir
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan	12 Laporan	1,930,867	2,199,356	Kec. Simokerto



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perundang-Undangan		Peraturan Perundang-Undangan				
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	23,904,000	27,232,975	Kec. Sukolilo
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	9,000,000	9,615,600	Kec. Sukomanunggal
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	22,089,288	25,359,790	Kec. Tambaksari
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	19,315,800	90,261,648	Kec. Tandes
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	7,200,000	99,361,200	Kec. Tegalsari
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	18,242,700	9,615,600	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan	12 Laporan	8,942,500	9,615,600	Kec. Wiyung

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perundang-Undangan		Peraturan Perundang-Undangan				
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88 Laporan	11,500,000	14,887,600	Kec. Wonocolo
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	6,438,600	6,482,240	Kec. Wonokromo
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							65,264,819,269	229,786,953,772	
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						65,264,819,269	229,786,953,772	
8.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	12,953,089,686	11,027,532,098	
8.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	9,939,346,872	8,680,645,496	
8.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	9,939,346,872	8,680,645,496	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	211,183,095	138,538,375	
8.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	211,183,095	138,538,375	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	2,802,559,719	2,208,348,227	
8.01.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2,802,559,719	2,208,348,227	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	91%	888,664,895	770,026,999	
8.01.02.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	298 Lembaga	888,664,895	770,026,999	
8.01.02.2.01.04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	298 Orang	888,664,895	770,026,999	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN		Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan	46%	20,124,463,297	205,599,194,271	



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		pengembangan etika serta budaya politik				
8.01.03.2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	70 Lembaga	20,124,463,297	205,599,194,271	
8.01.03.2.01.04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140 Orang	20,124,463,297	205,599,194,271	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8.01.04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	40%	94,382,910	56,928,932	
8.01.04.2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	31 Lembaga	94,382,910	56,928,932	
8.01.04.2.01.05			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	94,382,910	56,928,932	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100%	647,120,080	747,005,623	
8.01.05.2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang		Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	8 Lembaga	647,120,080	747,005,623	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budayaerumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pertahanan ekonomi, sosial dan budaya				
8.01.05.2.01.04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	690 Orang	647,120,080	747,005,623	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%	30,557,098,401	11,586,265,849	
						Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%			



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8.01.06.2.01					Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 Lembaga	30,557,098,401	11,586,265,849	
					Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	18 Lembaga			
8.01.06.2.01.04				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Orang	30,070,315,767	10,914,346,755	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.05				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	44 Laporan	486,782,634	671,919,094	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2023



Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
TOTAL								10,400,767,338,739	10,433,309,825,008	



5.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun berdasarkan hasil analisa keuangan dengan mempertimbangkan regulasi dan kondisi terkini terkait terjadinya pandemi Covid-19. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif belanja Daerah disajikan dalam tabel V.2 tentang Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2023.

Tabel V.2

Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2023

Kode	Belanja	Anggaran
5.1	BELANJA OPERASI	8,118,140,506,613
5.1.01	Belanja Pegawai	2,732,788,519,501
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,983,742,513,680
5.1.03	Belanja Bunga	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0
5.1.05	Belanja Hibah	255,473,866,919
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	146,135,606,513
5.2	BELANJA MODAL	2,244,376,832,126
5.2.01	Belanja Modal Tanah	194,636,607,352
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	333,891,930,918
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	433,616,538,804
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,269,806,710,316
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12,425,044,736
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	37,000,000,000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	37,000,000,000
5.4	BELANJA TRANSFER	1,250,000,000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	750,000,000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	500,000,000
TOTAL		10,400,767,338,739

Kerangka pendanaan tersebut telah memperhatikan kebutuhan anggaran terkait :

1. Persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024 telah dialokasikan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.



2. Dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu Posyandu telah dialokasikan di Dinas Kesehatan pada sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas serta sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Sedangkan dalam rangka dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan TP PKK telah dialokasikan di beberapa Perangkat Daerah yaitu :
 - a. Dinas Kesehatan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, serta Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - b. Dinas Pendidikan pada sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - d. Dinas Lingkungan Hidup pada sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, serta Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - f. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan pada sub kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
 - g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.



- h. Sekretariat Daerah pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- 3. Dukungan terhadap upaya perlindungan anak dan korban kekerasan telah dialokasikan di beberapa Perangkat Daerah yaitu :
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Badan Penanggulangan Bencana pada sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Pencarian serta Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, serta Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan.



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang juga dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kota Surabaya terkait pembangunan manusia, nilai tambah barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, garis atau batas kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan sosial. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban, tenaga kerja, pengarusutamaan gender, pangan, pertanahan, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga bencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, penanaman modal, kebudayaan, kearsipan, kelautan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh



kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan
4. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, dapat dilihat pada Tabel VI.1.



Tabel VI.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan										
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Indikator Tujuan						Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-4,85%	6,3%-6,8%	2,96 %	3,21 %	3,46 %	3,71 %	3,96 %	3,96%
				2,71%-5,00%*						
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Indeks Gini	0,344	0,38-0,37	0,328	0,323	0,319	0,315	0,311	0,311
				0,334*						
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,79%	6,30%-5,90%	8,99 %	8,26 %	6,93 %	6,50 %	6,00 %	6,00%
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Persentase Penduduk Miskin	5,02%	4,71%-4,60%	4,62 %	4,31 %	4,01 %	3,71 %	3,42 %	3,42%
	Pembentukan karakter masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	82,23	81-82	82,50	82,50	83,50	83,50	83,50	83,50
		Indeks Harmoni Sosial	73,99	75,05**	76,69	79,41	82,13	84,85	87,57	87,57



Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan										
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Indikator Tujuan						Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Indeks Infrastruktur Kota	0,600	0,606**	0,626	0,678	0,734	0,793	0,854	0,854
	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	65,08	65,10	68,32	68,54	68,75	68,97	69,18	69,18
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	78,13	81,81	82,61	83,41	84,21	85,01	85,81	85,81
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,77	0,81**	0,83	0,85	0,87	0,90	0,92	0,92

Keterangan :

1. Untuk IKLH memiliki kondisi awal = 66,99 dan target pada Tahun 2021-2026 adalah 66,99 ; 67,00 ; 67,02 ; 67,03 ; 67,05 ; 67,06 secara berturut-turut.
2. *) penyesuaian target pada Tahun 2021 dengan kondisi saat proses penyusunan
3. **) merupakan indikator baru atau menggunakan cara perhitungan yang berbeda, kondisi awal pada Tahun 2020 dan target pada Tahun 2021 merupakan proyeksi.



6.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKK Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKK Kepala PD dapat dilihat pada Tabel VI.2.



Tabel VI.2
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
	1	Indeks Gini	0,344	0,38-0,37 0,334*	0,328	0,323	0,319	0,315	0,311	0,311	Indeks
	2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-4,85%	6,3%- 6,8% 2,71%- 5,00%*	2,96%	3,21%	3,46%	3,71%	3,96%	3,96%	%
	3	Persentase Penduduk Miskin	5,02%	4,71%- 4,60%	4,62%	4,31%	4,01%	3,71%	3,42%	3,42%	%
	4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,79%	6,30%- 5,90% 9,00%- 5,90%*	8,99%	8,26%	6,93%	6,50%	6,00%	6,00%	%
	5	Indeks Pembangunan Manusia	82,23	81-82	82,50	82,50	83,50	83,50	83,50	83,50	Indeks
	6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	65,08	65,10	68,32	68,54	68,75	68,97	69,18	69,18	Indeks
	7	Indeks Reformasi Birokrasi	78,13	81,81	82,61	83,41	84,21	85,01	85,81	85,81	Indeks
	8	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,77	0,81**	0,83	0,85	0,87	0,90	0,92	0,92	Indeks
	B.	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1		Indeks Harmoni Sosial	73,99	75,05**	76,69	79,41	82,13	84,85	87,57	87,57	Indeks
2		Indeks Infrastruktur Kota	0,600	0,606**	0,626	0,678	0,734	0,793	0,854	0,854	Indeks



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
C.	ASPEK PELAYANAN UMUM											
	Layanan Urusan Wajib Dasar											
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan										
	1.1.	Indeks Pendidikan	76,08	80,16 76,89*	77,70	78,52	79,33	80,14	81,77	81,77	Indeks	
	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan										
	2.1.	Angka Harapan Hidup	74,18	74,04 74,27*	74,36	74,44	74,53	74,62	74,70	74,70	Tahun	
	2.2.	Nilai Kepuasan Masyarakat	86,05%	88,31%	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%	
		2.2.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	86,05%	88,31%**	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
	3.1.	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,748	0,754**	0,770	0,800	0,820	0,860	0,890	0,890	Indeks	
	3.2.	Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,329	0,338**	0,379	0,503	0,625	0,751	0,894	0,894	Indeks	
		3.2.1.	Indeks Penataan Ruang	0,282	0,283**	0,285	0,286	0,288	0,292	0,294	0,294	Indeks
	4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman										
	4.1.	Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,329	0,338**	0,379	0,503	0,625	0,751	0,894	0,894	Indeks	
		4.1.1.	Indeks Keciptakarya	0,035	0,038**	0,070	0,170	0,270	0,370	0,500	0,500	Indeks
	5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
	5.1.	Indeks Penanggulangan Bencana	0,732	0,765**	0,792	0,828	0,864	0,899	0,935	0,935	Indeks	
	5.2.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,81	0,85**	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90	0,90	Indeks	



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		5.2.1.	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	65,68%	74,20%**	76,39%	78,58%	80,77%	82,96%	85,15%	85,15%	%
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial											
6.1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan			0,87	0,87**	0,85	0,83	0,81	0,79	0,77	0,77	Indeks
6.2.	Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk			2,46%	2,41%**	2,35%	2,28%	2,22%	2,16%	2,10%	2,10%	%
Layanan Urusan Wajib Non Dasar												
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja											
1.1.	Persentase tenaga kerja yang terserap			20,28%	20,71%**	21,14%	21,57%	22,01%	22,45%	22,83%	22,83%	%
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2.1.	Indeks Pembangunan Gender			93,58	93,70	93,73	93,74	93,75	93,77	93,78	93,78	Indeks
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan											
3.1.	Skor Pola Pangan Harapan			96,25	92,00*	93,00	94,00	95,20	95,35	95,50	95,50	Skor
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian											
4.1.	Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanian			0,329	0,338**	0,379	0,503	0,625	0,751	0,894	0,894	Indeks
	4.1.1.	Indeks Pertanian		0,012	0,018**	0,024	0,047	0,067	0,089	0,100	0,100	Indeks
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup											
5.1.	Indeks Kualitas Air			56,05	56,06	56,07	56,08	56,09	56,10	56,11	56,11	Indeks
5.2.	Indeks Kualitas Udara			90,31	90,31	90,32	90,33	90,34	90,35	90,36	90,36	Indeks
5.3.	Indeks Kualitas Lahan			42,63	42,63	42,66	42,69	42,72	42,75	42,78	42,78	Indeks
5.4.	Indeks Persampahan			75,84	75,90	76,95	77,54	78,13	78,71	79,29	79,29	Indeks



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
5.5.	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan		39,49	42,97**	47,97	56,46	64,94	73,43	81,91	81,91	Indeks
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
6.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat		86,05%	88,31%	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
	6.1.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat pada Layanan Administrasi Kependudukan	86,05%	88,31%**	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
7.1.	Angka Harapan Hidup		74,18	74,04 74,27*	74,36	74,44	74,53	74,62	74,70	74,70	Tahun
	7.1.1.	Indeks Bangga Kencana	61,23%	63,14%**	65,05%	66,96%	68,87%	70,78%	72,69%	72,69%	%
8	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan										
8.1.	Indeks Penyelenggaraan Transportasi		0,673	0,676**	0,680	0,690	0,728	0,745	0,768	0,768	Indeks
9	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika										
9.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,0 (Baik)	3,0 (Baik)**	3,1 (Baik)	3,2 (Baik)	3,3 (Baik)	3,4 (Baik)	3,5 (Sangat Baik)	3,5 (Sangat Baik)	Indeks
10	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah										
10.1.	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro		0,00%	0,24%**	8,30%	16,60%	24,90%	33,20%	41,50%	41,50%	%



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	11	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal										
	11.1.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah		2,71%	4,25%**	4,60%	5,50%	6,30%	6,90%	7,40%	7,40%	%
	11.2.	Nilai Kepuasan Masyarakat		86,05%	88,31%	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
		11.2.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	86,05%	88,31%**	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
	12	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
	12.1.	Indeks Pendidikan		76,08	80,16 76,89*	77,70	78,52	79,33	80,14	81,77	81,77	Indeks
		12.1.1.	Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan	0,69	0,70**	0,70	0,73	0,76	0,79	0,82	0,82	Indeks
	13	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik										
	13.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,0 (Baik)	3,0 (Baik)**	3,1 (Baik)	3,2 (Baik)	3,3 (Baik)	3,4 (Baik)	3,5 (Sangat Baik)	3,5 (Sangat Baik)	Indeks
		13.1.1.	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	100,00 %	100,00%* *	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	%
	14	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian										
	14.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,0 (Baik)	3,0 (Baik)**	3,1 (Baik)	3,2 (Baik)	3,3 (Baik)	3,4 (Baik)	3,5 (Sangat Baik)	3,5 (Sangat Baik)	Indeks
		14.1.1.	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	100,00 %	100,00%* *	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	%



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
15	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan										
15.1.	Indeks Budaya Lokal	88,56	81,50 88,60*	88,90	89,30	89,70	90,10	90,50	90,50	90,50	Indeks
16	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan										
16.1.	Indeks Pendidikan	76,08	80,16 76,89*	77,70	78,52	79,33	80,14	81,77	81,77	81,77	Indeks
	16.1.1.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	67,40	67,90**	68,40	68,90	69,40	69,90	70,40	70,40	Nilai
17	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan										
	17.1.1.	Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	0,00%	61,54%**	69,23%	76,92%	84,62%	92,31%	100,00 %	100,00 %	%
Layanan Urusan Pilihan											
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata										
1.1.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	-10,87%	4,40%**	4,87%	5,18%	5,37%	5,87%	6,51%	6,51%	6,51%	%
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian										
2.1.	Skor Pola Pangan Harapan	96,25	92,00*	93,00	94,00	95,20	95,35	95,50	95,50	95,50	Skor
	2.1.1.	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian	0,00%	5,00%**	10,00%	16,00%	22,00%	28,00%	34,00%	34,00%	%



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan										
3.1.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor		-8,57%	3,30%**	3,65%	3,86%	4,01%	4,12%	4,58%	4,58%	%
3.2.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan		-1,15%	3,50%**	3,61%	3,70%	3,96%	3,81%	4,10%	4,10%	%
3.3.	Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak		5,23%	5,23%**	5,24%	5,25%	5,26%	5,27%	5,28%	5,28%	%
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian										
4.1.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan		-1,15%	3,50%**	3,61%	3,70%	3,96%	3,81%	4,10%	4,10%	%
	4.1.1.	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha	70,00%	73,00%**	75,00%	77,00%	78,00%	79,00%	80,00%	80,00%	%
5	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan										
5.1.	Skor Pola Pangan Harapan		96,25	92,00*	93,00	94,00	95,20	95,35	95,50	95,50	Skor
	5.1.1.	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	1,90%	2,00%**	2,50%	5,10%	8,20%	12,00%	16,00%	16,00%	%
Penunjang Urusan											
1	Perencanaan										
1.1.	Nilai SAKIP		75,13	81,00	81,92	82,97	84,02	85,07	86,12	86,12	Nilai
	1.1.1.	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	21,68	22,00**	23,62	23,93	24,23	24,53	24,84	24,84	Nilai



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2	Keuangan										
2.1.	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Nilai
	2.1.1.	Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD	91,13%	88,03%**	90,87%	88,88%	89,50%	89,92%	90,35%	90,35%	%
3	Kepegawaian										
	3.1.1.	Indeks Kualitas Pegawai	76,69%	78,69%**	79,20%	79,64%	80,24%	81,03%	81,73%	81,73%	%
4	Pendidikan dan Pelatihan										
	4.1.1.	Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	68,90%	75,38%**	76,38%	77,14%	78,28%	79,52%	80,30%	80,30%	%
5	Penelitian dan pengembangan										
5.1.	Nilai SAKIP		75,13	81,00	81,92	82,97	84,02	85,07	86,12	86,12	Nilai
	5.1.1.	Nilai Indeks Inovasi Daerah	52,90	54,00**	55,00	58,00	61,00	64,00	67,00	67,00	Indeks
6	Sekretariat Daerah										
6.1.	Nilai SAKIP		75,13	81,00	81,92	82,97	84,02	85,07	86,12	86,12	Nilai
7	Sekretariat DPRD										
	7.1.1.	Persentase pelaksanaan fungsi DPRD	100,00 %	100,00%* *	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	%



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	8	Inspektorat Daerah										
		8.1.1.	Indeks kualitas pengawasan	76,89	78,19	79,23	81,60	83,55	85,93	87,88	87,88	Indeks
	9	Kesatuan Bangsa dan Politik										
	9.1.	Indeks Kepedulian Sosial		89,00	89,00**	89,10	89,20	89,30	89,40	89,50	89,50	Indeks
	9.2.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota		0,81	0,85**	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90	0,90	Indeks
		9.2.1.	Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	95,35%	95,43%**	95,51%	95,59%	95,67%	95,75%	95,83%	95,83%	%
	10	Kecamatan										
	10.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat		86,05%	88,31%	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
	10.1.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	86,05%	88,31%**	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%	



Tema pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 **“Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif Menuju Kota Surabaya Yang Humanis dan Berkelanjutan”**. Beberapa indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian tema tersebut antara lain :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pada tahun 2023 ditargetkan 8,26%
2. Persentase Penduduk Miskin, pada tahun 2023 ditargetkan pada 4,31%
3. Indeks Pembangunan Manusia, pada tahun 2023 ditargetkan pada 82.50
4. Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2023 ditargetkan pada 89,23%



BAB VII PENUTUP

RKPD Kota Surabaya tahun 2023 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2023, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2023 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

RKPD Tahun 2023 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil fasilitasi yang dikakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur. RKPD Tahun 2023 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen RKPD yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka telah dilaksanakan hal-hal yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu RKPD Tahun 2023 telah mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah dan Provinsi Jawa Timur, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

